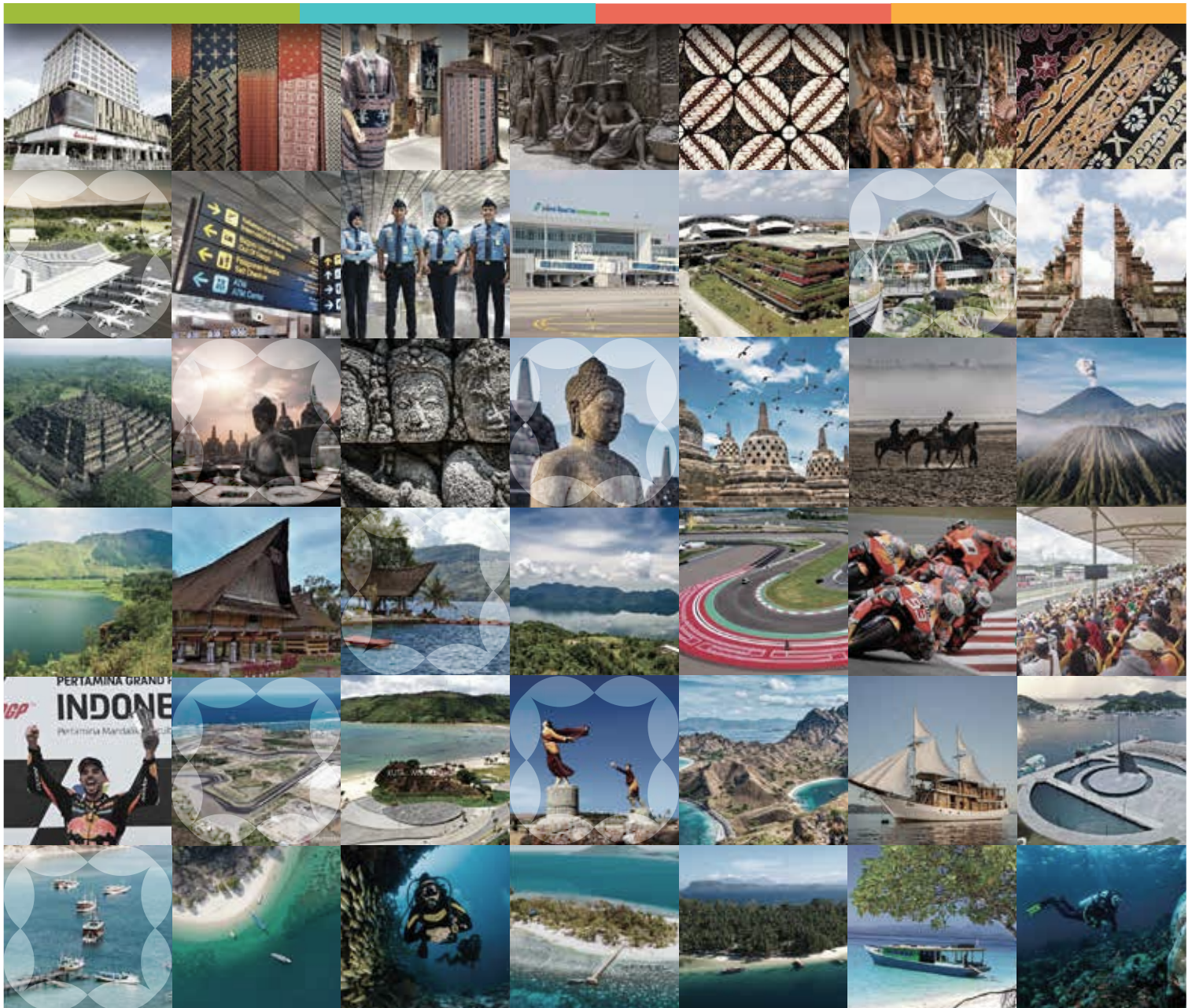


injourney
Indonesia
Aviation and Tourism

THE FUTURE OF INDONESIA'S AVIATION & TOURISM

LAPORAN TAHUNAN 2021
ANNUAL REPORT 2021

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)







PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
Injourney
Laporan Tahunan 2021
Annual Report 2021

Tema:
Theme:

The Future of Indonesia's Aviation and Tourism



Pariwisata Indonesia merupakan harta luar biasa yang termasyhur di dunia internasional selama beberapa dekade terakhir. Kaya akan berbagai budaya serta adat istiadat yang masih kental dengan ciri khasnya masing-masing, Indonesia telah dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata ternama. Sektor pariwisata Indonesia masih memiliki potensi besar untuk berkembang lebih gemilang.

Indonesia tourism is a great treasure that has gained international fame over the last few decades. Having rich cultures and strong customs with their respective characteristics, Indonesia has been known as one of the leading tourism destinations. Indonesia's tourism sector has great potential to grow.



Melalui pembentukan Holding PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero) atau "InJourney" yang merupakan ekosistem pariwisata multi sektor yang terlengkap dan terbesar di Asia Tenggara, InJourney mentransformasi anggota Holding untuk berkembang menjadi perusahaan yang sehat, kompetitif, dan berdampak besar bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Terdiri atas layanan bandar udara dan kargo, destinasi pariwisata, hotel, hingga manajemen retail produk serta industri kreatif, InJourney siap menjadi pelopor Holding Pariwisata dan Pendukung yang saling terhubung dari hulu hingga hilir secara holistik, kolaboratif, dan inklusif. Sebagai upaya dalam meraih masa depan gemilang di sektor pariwisata dan pendukung di Indonesia, InJourney akan terus mengembangkan kapasitas layanan melalui integrasi layanan penerbangan dan pariwisata, pengembangan *super platform*, perencanaan perjalanan, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus serta destinasi pariwisata super prioritas.

Sinergi bersama seluruh anak usaha diharapkan mampu menjadi langkah besar kebangkitan sektor aviati dan pariwisata. Sehingga pandemi yang sempat terjadi bukan menjadi sebuah halangan, namun menjadi batu loncatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kolaborasi dan kerja sama antarperusahaan BUMN ini semakin menguatkan potensi meraih impian bersama untuk menjadi penyedia ekosistem pariwisata unggul di Indonesia.

Langkah strategis dan optimisme inilah yang juga mendasari semangat pemulihan pariwisata Indonesia. InJourney optimis mampu memberikan layanan inklusif kepada seluruh wisatawan baik pada saat perjalanan wisata, akomodasi, dan kualitas destinasi pariwisata yang bertaraf internasional. Mengakhiri tahun 2021, kami bersiap meraih masa depan sektor aviati dan pariwisata Indonesia, bersinergi dengan seluruh anak usaha, serta mengembalikan Indonesia menjadi primadona panggung pariwisata mancanegara.

Sanggahan Disclaimer

Laporan ini merupakan Laporan Tahunan 2021 PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero) yang memberikan gambaran mengenai kinerja usaha, keuangan, dan tata kelola Perusahaan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Selain menyajikan data dan informasi mengenai kinerja tahun 2021, Perusahaan juga memberikan pandangan ke depan (*forward-looking statement*) seperti target, perkiraan, estimasi atau proyeksi kegiatan usaha yang akan datang, serta informasi pejabat yang bergabung dengan Perseroan pada tahun 2022. Namun, InJourney mengingatkan pembaca bahwa keadaan bisnis InJourney juga dapat dipengaruhi oleh perubahan keadaan eksternal, seperti perubahan regulasi pemerintah, bencana alam, dan keadaan lain.

The 2021 Annual Report of PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero) provides an overview of the Company's business, financial and governance performances for the period from January 1, 2021 to December 31, 2021. In addition to presenting data and information regarding performance in 2021, the Company also provides forward-looking statements, including targets, estimates or projections of future business activities, as well as officials joining the Company in 2022. However, InJourney reminds readers that the state of InJourney's business can also be affected by changes in external circumstances, such as changes in government regulations, natural disasters, and other circumstances.

Through the holding establishment of PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero) or "InJourney" as the most comprehensive and largest multi-sector tourism ecosystem in Southeast Asia, InJourney transforms Holding members to develop into healthy, competitive companies, and has a significant impact on the progress of Indonesia's tourism sector. Consisting of airport and cargo services, tourism destinations, hotels, product retail management and creative industries, InJourney is ready to become a pioneer in Tourism and Support Holding, which is interconnected from upstream to downstream in a holistic, collaborative and inclusive manner. In an endeavor to achieve a bright future in Indonesia's tourism and supporting sectors, InJourney continues to develop service capacity through the integration of aviation and tourism services, development of super platform, travel planning, and development of special economic zones and super priority tourism destinations.

Synergy with all subsidiaries is expected to be a big step toward the revival of the aviation and tourism sectors. The pandemic is not an obstacle, but a steppingstone to achieve a better future. The collaboration and cooperation between state-owned enterprises further strengthen the potential to achieve the common goal to become the provider of a superior tourism ecosystem in Indonesia.

The strategic measures and optimism also underpin Indonesia's tourism recovery spirit. InJourney is optimistic that the company is able to provide inclusive services to all tourists at the time of travel, accommodation, and the quality of international tourism destinations. As of the end of 2021, we were ready to seize the future of Indonesia's aviation and tourism sectors, synergize with all subsidiaries, and return Indonesia to being the prima donna on the foreign tourism stage.






Daftar Isi Laporan Tahunan 2021 PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)

Table of Contents of the 2021 Annual Report of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)

01	Kilas Kinerja 2021 <i>Performance Review 2021</i>	9	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Platform Digital <i>Human Resource Development and Digital Platform</i>	100
	Ikhtisar Kinerja Keuangan <i>Financial Performance Highlight</i>	10	Inisiatif Memperkuat Human Capital di Injourney <i>Initiatives to Strengthen Human Capital in Injourney</i>	
02	Laporan Manajemen <i>Management Report</i>	12	Pengembangan Digital Platform <i>Digital Platform Development</i>	104
	Laporan Dewan Komisaris <i>Report of the Board of Commissioners</i>	16	Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang <i>Name and Address of Supporting Agencies/Profession</i>	108
	Laporan Direksi <i>Report of the Board of Directors</i>	28	Komposisi Pemegang Saham <i>Shareholder Composition</i>	108
	Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) Tahun Buku 2021 <i>Statement of Responsibility for the Annual Report of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) Fiscal Year 2021</i>	52	Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Yayasan <i>Subsidiaries, Associated Entities, and Foundations</i>	108
03	Profil Perusahaan <i>Company Profile</i>		Penghargaan dan Sertifikasi <i>Awards and Certifications</i>	122
	Profil Singkat Perusahaan <i>A Brief Profile of the Company</i>	54	04 Analisis dan Pembahasan Manajemen <i>Management Discussion and Analysis</i>	126
	Logo Perusahaan <i>Company Logo</i>	56	Tinjauan Ekonomi <i>Economic Overview</i>	128
	Riwayat Singkat Perusahaan <i>A Brief History of the Company</i>	58	Tinjauan Industri Aviassi dan Pariwisata <i>Overview of Indonesia's Aviation and Tourism Industry</i>	130
	Jejak Langkah <i>Milestones</i>	60	Tinjauan Operasi <i>Operational Overview</i>	134
	Peristiwa Penting di Tahun 2021 <i>Significant Events in 2021</i>	63	Kinerja Keuangan Komprehensif <i>Comprehensive Financial Performance</i>	156
	Visi, Misi dan Budaya Perusahaan <i>Vision, Mission and Corporate Culture</i>	64	Kemampuan Membayar Utang <i>Ability to Pay Debt</i>	174
	Segmen Usaha <i>Business Segment</i>	66	Struktur Modal <i>Capital Structure</i>	175
	Peta Wilayah Operasi <i>Operation Area Map</i>	67	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan <i>Material Information and Facts After the Date of Accounting Statement</i>	176
	Struktur Grup <i>Group Structure</i>	70	Prospek Usaha <i>Business Prospect</i>	183
	Struktur Organisasi <i>Organizational Structure</i>	72	Perbandingan antara Target dan Proyeksi Awal Tahun dan Target Tahun 2022 <i>Comparison between Target and Projection at the Beginning of Fiscal Year and Target for 2022</i>	177
	Profil Direksi <i>Profile of Board of Directors</i>	76	Aspek Pemasaran <i>Marketing Aspect</i>	187
	Profil Dewan Komisaris <i>Profile of Board of Commissioners</i>	78	Informasi Material dan Hubungan Afiliasi Material <i>Information and Affiliate Relationship</i> Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan <i>Amendment to the Provision of Laws and Regulations</i>	190
	Profil Pejabat Eksekutif <i>Profile of Executive Officers</i>	88	Perubahan Kebijakan Akuntansi <i>Changes in Accounting Policies</i>	191
		98		

05	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di InJourney	193	06	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	276
	<i>Good Corporate Governance Implementation in InJourney</i>			<i>Social and Environmental Responsibility</i>	
	Dasar Penerapan dan Struktur Tata Kelola	194		Kebijakan dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan InJourney	278
	<i>Implementation Basis and Governance Structure</i>			<i>InJourney's Social and Environmental Responsibility and Policy</i>	
	Rapat Umum Pemegang Saham	195		Komitmen Tanggung Jawab Sosial di InJourney	279
	<i>General Meeting of Shareholders</i>			<i>Social Responsibility Commitment at InJourney</i>	
	Dewan Komisaris	201		Metode dan Ruang Lingkup Due Diligence terhadap Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan	279
	<i>Board of Commissioners</i>			<i>Methods and Scope of Due Diligence on Social, Economic, and Environmental Impacts of Company Activities</i>	
	Direksi	211		Pemangku Kepentingan yang Terdampak Kegiatan Perusahaan	280
	<i>Board of Directors</i>			<i>Stakeholders Affected by the Company's Activities</i>	
	Nominasi dan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	221		Praktik Operasi yang Adil	281
	<i>Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>			<i>Fair Operating Practices</i>	
	Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	222		Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM)	281
	<i>Remuneration Policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>			<i>Upholding Human Rights</i>	
	Sekretaris Dewan Komisaris	228		Lingkungan Hidup	282
	<i>Secretary to the Board of Commissioners</i>			<i>Environment</i>	
	Komite Audit	230		Ketenagakerjaan	282
	<i>Audit Committee</i>			<i>Employment</i>	
	Komite Nominasi dan Remunerasi	236		Pengembangan Sosial dan Masyarakat	284
	<i>Nomination and Remuneration Committee</i>			<i>Social and Public Development</i>	
	Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG	244		Realisasi Program TJSL Pilar Sosial	284
	<i>Business Risk Management, Investment & GCG Committee</i>			<i>Realization of Social Pillar of Social and Environmental Responsibility Program</i>	
	Sekretaris Perusahaan	252		Realisasi Program TJSL Pilar Ekonomi	290
	<i>Corporate Secretary</i>			<i>Realization of Economic Pillar of Social and Environmental Responsibility Program</i>	
	Unit Audit Internal	256		Realisasi Program TJSL Pilar Lingkungan	294
	<i>Internal Audit Unit</i>			<i>Realization of Environmental Pillar of Social and Environmental Responsibility Program</i>	
	Sistem Pengendalian Internal	258		Realisasi Program TJSL Pilar Hukum dan Tata Kelola	296
	<i>Internal Control System</i>			<i>Realization of Legal and Governance Pillar of Social and Environmental Responsibility Program</i>	
	Sistem Manajemen Risiko	259		Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Unggulan	298
	<i>Risk Management System</i>			<i>Flagship Social and Environmental Responsibility Program</i>	
	Perkara Penting	266		Bersama Menanggulangi COVID-19	301
	<i>Legal Proceedings</i>			<i>Overcoming COVID-19 Together</i>	
	Sanksi Administratif	267		Referensi SEOJK 16/POJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Emiten Atau Perusahaan Publik	306
	<i>Administrative Sanctions</i>			<i>Reference To SEOJK 16/POJK.04/2021 Regarding The Form and Content Of Reports Of Issuers Or Public Companies</i>	
	Kode Etik	267			
	<i>Code of Conduct</i>				
	Informasi Kepemilikan Saham oleh Karyawan	268			
	<i>Disclosure of Share Ownership by Employees</i>				
	Sistem Pelaporan Pelanggaran	269			
	<i>Whistleblowing System</i>				
	Kebijakan Antikorupsi	275			
	<i>Anti-Corruption Policy</i>				
			07	Laporan Keuangan Konsolidasi	321
				<i>Consolidated Financial Statement</i>	



 Likupang





01 Kilas Kinerja 2021

2021 Performance Highlight





Ikhtisar Kinerja Keuangan

Financial Performance Highlight

Dalam ribuan Rp, kecuali dinyatakan lain
In Rp thousand, unless stated otherwise

Uraian Description	2021	2020
Laporan Laba Rugi Komprehensif <i>Comprehensive Income Statement</i>		
Pendapatan usaha <i>Revenues</i>	9,732,833,584	10,459,370,952
Beban pokok pendapatan <i>Cost of revenue</i>	(8,760,520,441)	(8,596,807,551)
Laba bruto <i>Gross profit (loss)</i>	972,313,143	1,862,563,401
Pendapatan (beban) usaha <i>Operating income (expenses)</i>	(6,454,007,685)	(5,306,983,693)
Rugi usaha <i>Operating loss</i>	(5,481,694,542)	(3,444,420,292)
Rugi komprehensif lain <i>Other comprehensive loss</i>	(23,189,033)	(821,857,705)
Laporan Posisi Keuangan <i>Statement of Financial Position</i>		
Total aset lancar <i>Total current assets</i>	7,423,731,978	9,477,484,582
Total aset tidak lancar <i>Total non-current assets</i>	87,114,082,570	88,266,327,353
Total aset <i>Total assets</i>	94,537,814,548	97,743,811,935
Total liabilitas jangka pendek <i>Total current liabilities</i>	11,520,232,627	12,012,617,303
Total liabilitas jangka panjang <i>Non-current liability</i>	46,817,749,801	42,128,749,009
Total liabilitas <i>Total liabilities</i>	58,337,982,428	54,141,366,312
Total ekuitas <i>Total equity</i>	36,199,832,120	43,602,445,623
Laporan Arus Kas <i>Statement of Cash Flows</i>		
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi <i>Cash flows from operating activities</i>	(3,208,197,490)	(5,561,214,952)
Arus kas dari aktivitas investasi <i>Cash flow from investing activities</i>	(2,280,017,802)	(6,046,580,060)
Arus kas dari aktivitas pendanaan <i>Cash flow from financing activities</i>	5,175,483,542	6,261,113,198
Kenaikan bersih kas dan bank <i>Net increase in cash on hand and cash in bank</i>	(312,731,750)	(5,346,681,814)

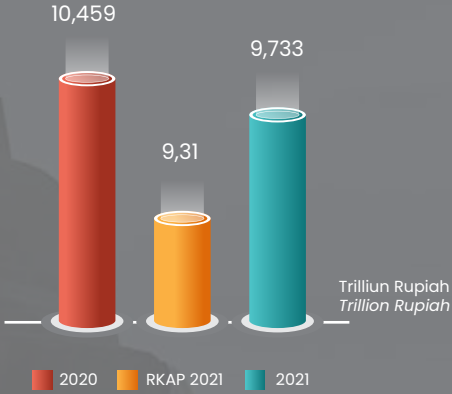
**Rasio Keuangan***Financial Ratio*

Rasio laba/rugi terhadap ekuitas (ROE) <i>Return on equity (ROE)</i>	(20.70)%	(11.77)%
Rasio laba /rugi terhadap jumlah aset (ROA) <i>Return on asset</i>	(7.97) %	(5.27)%
Rasio laba rugi terhadap investasi (ROI) <i>Return on investment</i>	(1.96) %	(0.15)%
Rasio laba/rugi bersih terhadap pendapatan <i>Operating margin</i>	(77.43) %	(49.23)%
EBITDA margin	(17.72) %	(1.25)%
BOPO	156.22%	132.10%
Rasio Lancar <i>Current ratio</i>	64.44%	78.9%
Rasio Kas <i>Cash ratio</i>	32.34%	33.63%
Rasio Liabilitas terhadap ekuitas <i>Debt to equity ratio</i>	1.61	1.24
Rasio Liabilitas terhadap EBITDA <i>Debt to EBITDA ratio</i>	(33.82)	(414.80)
Periode kolektibilitas <i>Collection period</i>	61	93
IBD to EBITDA	(27.04)	(323.60)
IBD to Equity	1.29	0.97
Perputaran Aset <i>Asset Turnover</i>	11.40	12.73

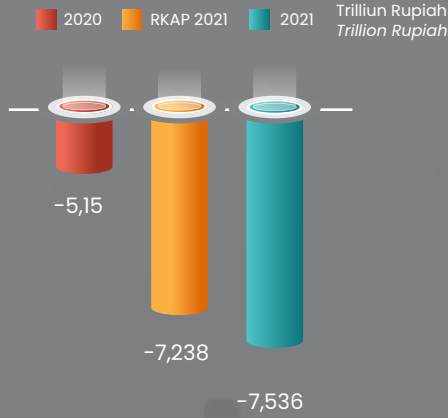




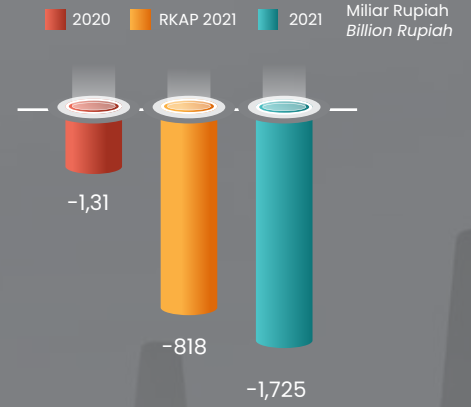
Pendapatan Usaha
Revenue



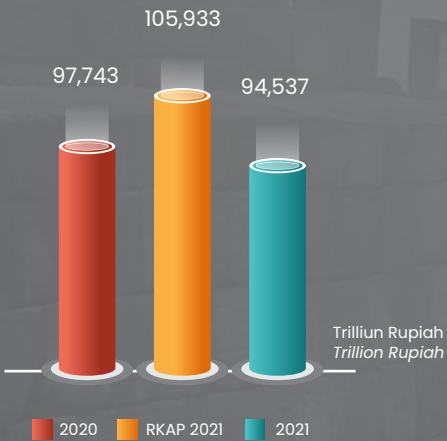
Laba (Rugi)
Profit (Loss)



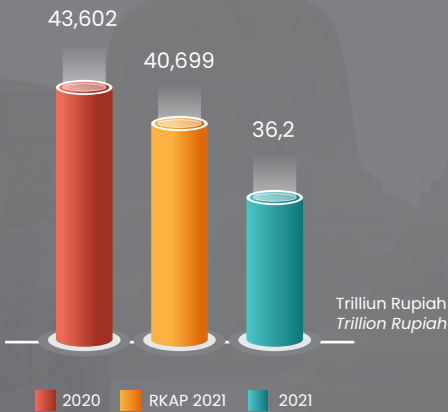
EBITDA



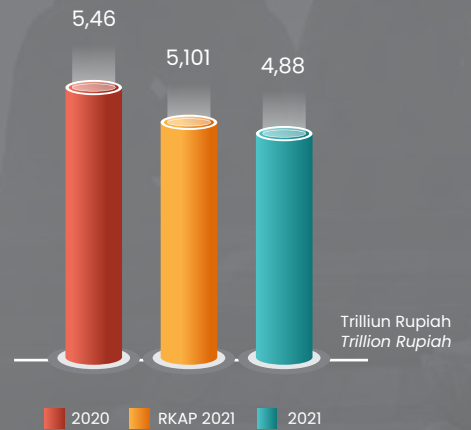
Aset
Asset



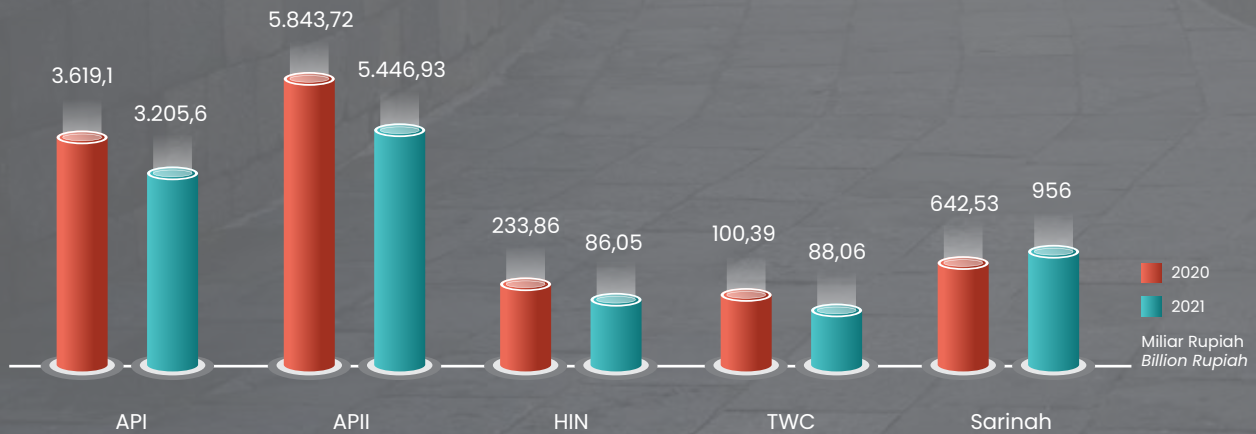
Ekuitas
Equity



CAPEX

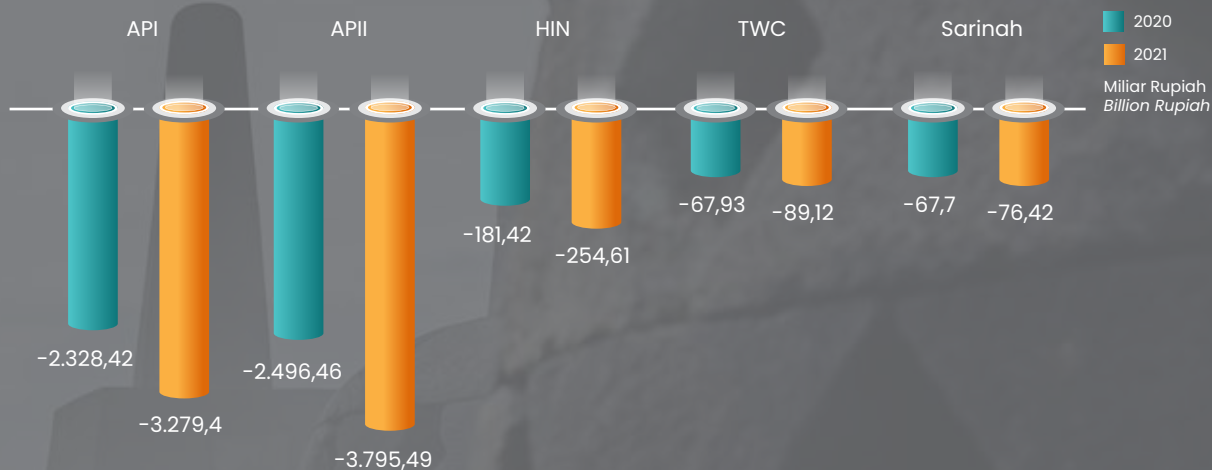


Pendapatan Usaha Anak Usaha
Subholding Revenue

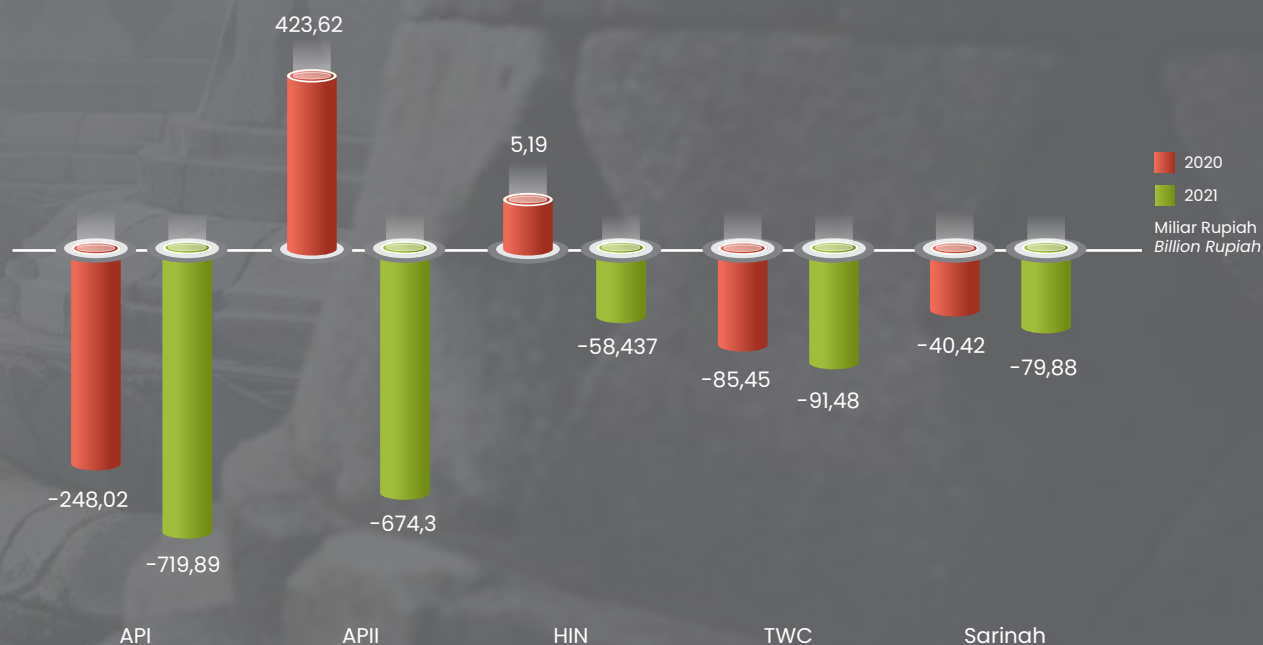




Laba (Rugi) Anak Usaha Subholding Profit (Loss)



EBITDA Anak Usaha Subholding EBITDA







02

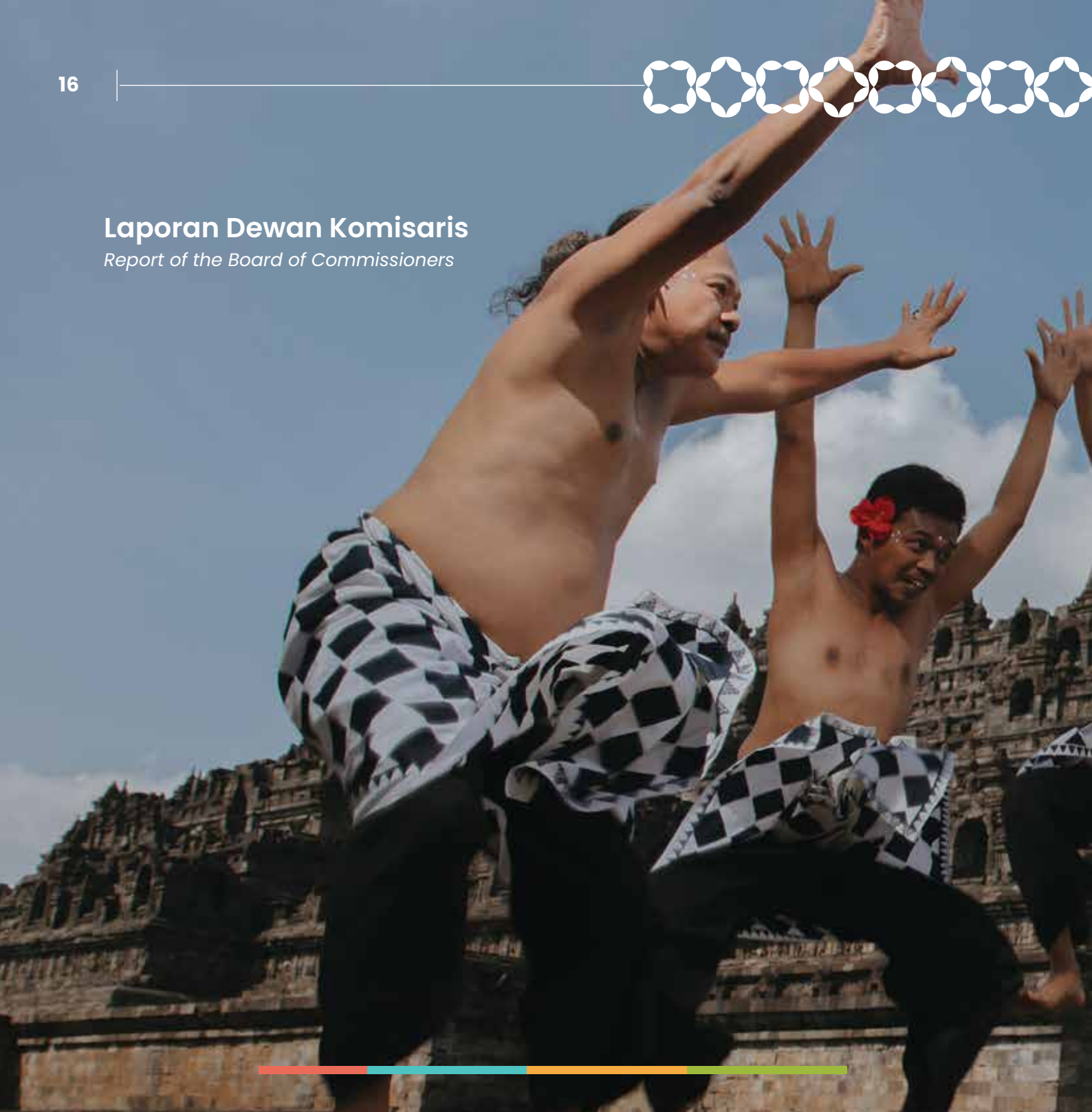
Laporan Manajemen

Management Report



Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners



“Pembentukan PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) sebagai Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung menjadi nafas baru bagi industri pariwisata di Indonesia untuk mendorong kebangkitan sektor pariwisata di tengah kondisi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, Dewan Komisaris terus mendukung dan memberikan arahan kepada Direksi dalam mengelola perusahaan. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan strategi yang baik untuk membangun sinergi dan berkolaborasi dalam misi pengembangan wisata Indonesia.”

“The establishment of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) as a State-Owned Enterprise (SOE) Holding in Tourism and Support Services sector has become the new air for Indonesian’s tourism industry amidst the COVID-19 pandemic. Thus, the Board of Commissioners has kept supporting and guiding the Directors especially in managing the company. The Board of Commissioners has stated that the Directors have executed well-planned strategies to develop synergy and collaboration in improving the Indonesian’s tourism.”



Triawan Munaf
Komisaris Utama
President Commissioner



Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Kami menghaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau "Injourney" yang telah resmi terbentuk di tahun 2021 sebagai Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung.

Tahun 2021 menjadi titik balik bagi seluruh sektor usaha untuk kembali bangkit dari keterpurukan yang disebabkan pandemi COVID-19. Di tahun yang sama, seiring dengan semakin baiknya capaian vaksinasi di seluruh Indonesia, baik Pemerintah, para pelaku usaha, dan masyarakat melakukan transformasi dan penyesuaian dalam menjalani kehidupan di tengah tantangan COVID-19 yang belum usai. Sesuai amanat dari Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, pembentukan Injourney merupakan langkah strategis untuk memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional khususnya sektor aviasi dan pariwisata.

Tema "The Future of Indonesia's Aviation and Tourism" pada Laporan Tahunan 2021 menggambarkan dengan tepat upaya memanfaatkan momentum untuk menyambut pemulihan sektor aviasi dan pariwisata Indonesia melalui pembentukan Injourney.

Dengan tiga kunci perspektif yang mendefinisikan visi dari Injourney yaitu untuk memulihkan perekonomian Indonesia melalui aspirasi dan nilai pemangku kepentingan, tren pasar dan implikasinya, serta strategi, kapabilitas dan sinergi antar Holding dan anggota Holding yang telah dirumuskan dalam *Visioning Workshop* tanggal 4 November 2021.

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait implementasi strategi dan pengelolaan Perseroan. Dewan Komisaris mengucapkan selamat kepada jajaran Direksi dan segenap Insan Injourney atas pencapaian ini, dan seraya mengingatkan akan tugas dan tanggung jawab penting yang menanti di depan.

Dear Respected Stakeholders,

We would like to thank God, the Almighty, who has granted His blessings so that PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) or "Injourney" officially became a State-Owned Enterprise (SOE) Holding for Tourism and Supporting sectors in 2021.

2021 was a turning point for all business sectors in order to rise from the ashes caused by the pandemic COVID-19. During this year, along with the increasing number of fully vaccinated people throughout Indonesia, the government, entrepreneurs, and communities carry out transformations and adjustments to face the challenges amid the ongoing COVID-19 pandemic. In accordance with the mandate of the President of the Republic of Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, the establishment of Injourney is a strategic measure in order to take the advantage of national economic recovery momentum, especially in the aviation and tourism sectors.

The theme "The Future of Indonesia's Aviation and Tourism" in the 2021 Annual Report perfectly describes efforts to take the momentum to welcome the recovery of Indonesia's aviation and tourism sectors through the establishment of Injourney.

Three key perspectives define Injourney's vision, namely to restore Indonesia's economy through stakeholder aspirations and values, market trends and implications, as well as strategies, capabilities and synergies between Holding and Holding members as formulated in Visioning Workshop on November 4, 2021.

During 2021, the Board of Commissioners had carried out its supervisory and advisory responsibilities toward the Board of Directors, especially those related to the implementation of the Company's strategy and management. The Board of Commissioners would like to congratulate the Board of Directors and Injourney personnel upon the achievement, while reminding them of the important tasks and responsibilities ahead.



Tinjauan Ekonomi dan Industri

Perekonomian global dan nasional masih mengalami dinamika dan tantangan di tahun 2021, walaupun optimisme dan pertumbuhan mulai menggeliat dibandingkan tahun 2020. Meski keadaan masih diwarnai dengan gelombang ketiga dan keempat pandemi COVID-19, negara-negara di berbagai belahan dunia mulai mencoba memulihkan aktivitas perekonomian dengan kebijakan pembukaan dan penutupan perbatasan.

Mengakhiri tahun 2021, IMF mencatat pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 5,9%. Dua ekonomi terbesar dunia, Tiongkok dan Amerika Serikat, diperkirakan akan mengalami perlambatan ekonomi karena disrupsi rantai pasok dan kebijakan *zero-tolerance* to COVID-19 yang diterapkan Tiongkok. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp62,2 juta, naik 4,9% dari tingkat sebelum pandemi sebesar Rp59,3 juta di tahun 2019. Kinerja ini mengindikasikan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang baik bagi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Perekonomian Indonesia memperlihatkan pertumbuhan positif pada triwulan II-IV, meski terkoreksi pada triwulan III karena penyebaran varian Delta yang sempat menekan sistem kesehatan nasional. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk menekan laju angka penyebaran COVID-19 dengan memberlakukan pembatasan perjalanan bagi masyarakat (PPKM), percepatan vaksinasi dosis 2 dan *booster*, serta berbagai kebijakan lain dalam mempertahankan keuangan negara dari krisis ekonomi akibat pandemi.

Sektor aviasi dan pariwisata termasuk sektor yang paling dalam terdampak langsung oleh pandemi. Sebagai negara yang memperoleh pendapatan signifikan dari sektor pariwisata, penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2021 menembus angka 61,57% atau hanya mencapai 1,56 juta kunjungan lebih rendah dari tahun 2020. Sementara itu, penurunan juga terjadi pada pengguna moda transportasi udara. Sepanjang tahun 2021, jumlah penumpang domestik hanya mencapai 30,1 juta pengguna atau menurun 7,18% dan penurunan penumpang internasional sebesar 627,9 ribu orang, atau turun 82,83% jika dibanding periode 2020.

Economic and Industry Review

Despite the growing optimism and business compared to 2020, the global and national economy was still facing dynamics and challenges in 2021. During the third and fourth waves of COVID-19 pandemic, countries in other parts of the world had tried to recover from the economical breakdown by issuing a policy on border opening-and-closing mechanisms.

By the end of 2021, IMF recorded global economic growth as much as 5.9%. The world's two biggest economic powers, China and the United States were estimated to face a slow-down in their economic sector due to the disrupted supply chain and zero-tolerance to COVID-19 policy issued by China. In 2021, the Gross Domestic Product (GDP) per capita was recorded at Rp62.2 billion, which was 4.9% higher than the pre-pandemic period which peaked at Rp59.3 million in 2019. This performance has indicated that Indonesia has been in a stable position that makes the economic recovery and structural reformation possible. Although the spread of Delta variant had impacted the national health sector during the third quarter, Indonesia's economy had shown positive growth in the second and fourth quarters. The Government had implemented various policies in order to minimize the spread of COVID-19 such as applying large-scale community restrictions, accelerating the second dose and booster vaccination program, as well as other policies related to financial sustaining amid the economic crisis caused by the pandemic.

Aviation and tourism sectors were among the most affected by the pandemic. As a country in which its significant revenues come from the tourism sector, declining international tourist numbers are bad news. In 2021, the declining visits reached 61.57% or 1.56 million less than 2020. Meanwhile, there was also a decline in air transportation traffic. In 2021, domestic passengers were only 30.1 million users or a decrease of 7.18%; as for the international passengers, there were only 627.9 thousand users or a decrease of 82.83% compared to 2020.



Dasbor Pariwisata United Nations World Tourism Organization (UNWTO) mencatat penurunan 74% pada angka kedatangan pariwisata global, bahkan mencapai 80-90% di banyak negara berkembang. Di triwulan III 2021, pertumbuhan penerbangan domestik Indonesia tercatat sebesar -54% dibanding triwulan II, atau sebesar -24% dibanding tahun 2020. Penerbangan internasional pada triwulan III turun -7% dibandingkan triwulan II, atau naik 4% dari tahun 2020.

Penerbangan sangat erat kaitannya dengan perjalanan pariwisata. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi di kedua sektor ini dilakukan oleh Pemerintah melalui pembentukan PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero) atau "Injourney" sebagai Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung. Pembentukan Injourney didasari oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021. Injourney menjadi *holding company* dari beberapa anak usaha yang mencakup PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, PT Hotel Indonesia Natour (HIN), dan PT Sarinah. Langkah ini juga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat target-target untuk sektor pariwisata Indonesia, yang antara lain berfokus pada peningkatan devisa pariwisata, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, serta peningkatan daya dukung lingkungan.

Bersama Injourney, Pemerintah berharap dapat memulihkan 6,5 juta lapangan kerja dengan melakukan pendekatan holistik, inklusif, dan kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan sektor pariwisata yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha swasta, dan UMKM.

Pengawasan Terhadap Implementasi Kebijakan Strategis

Dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi dan kondisi pandemi COVID-19 yang perlahan terkendali, Dewan Komisaris menilai dan optimis bahwa sekarang adalah momentum yang tepat bagi transformasi ekosistem pariwisata Indonesia di bawah Injourney. Pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung yang dilakukan oleh pemerintah merupakan langkah

United Nations World Tourism Organization (UNWTO)'s Tourism Dashboard, recorded a decline of 74% in global tourism arrivals, the decline was even up to 80-90% in developing countries. In the third quarter of 2021, there was growth in Indonesia's domestic flights of -54% higher than in the second quarter, or -24% higher than 2020. In its international flights, during the third quarter, Indonesia experienced a decline at -7%, which was lower than the previous quarter but 4% higher than 2020.

Aviation is bonded tightly to tourism. Therefore, the Government has decided to carry out economic recovery in the sectors by establishing PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero) or "Injourney" as an SOE Holding in Tourism and Supporting sectors. The establishment was based on the issuance of the Government Regulation No. 104/2021 dated October 6, 2021. Injourney became the holding company for several subsidiaries, including PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, PT Hotel Indonesia Natour (HIN) and PT Sarinah. This measure has been in accordance with The 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJM) which contains targets of Indonesia's tourism sector, including focusing on increasing tourism foreign exchange, developing competitive tourism and creative economy, improving the human resource capacity and quality, as well as improving the environmental carrying capacity.

Together with Injourney, the Government hopes that 6.5 million job opportunities will be recovered by conducting a holistic, inclusive, and collaborative approach with all stakeholders in the tourism sector, including the central government, local government, private businesses, and MSMEs.

Supervision of Strategic Policy Implementation

As the macro economy and COVID-19 pandemic have been under control, the Board of Commissioners has been optimistic that now is the right time to transform Indonesia's tourism ecosystem under Injourney. The establishment of SOE Holding for Tourism and Supporting Sectors by the Government is a good measure as well as a solution to create a holistic, collaborative,



sekaligus solusi yang baik untuk menciptakan ekosistem pariwisata multisektor yang holistik, kolaboratif, dan inklusif yang siap mengorkestrasi seluruh anggota Holding dan stakeholders untuk bersama bangkit dan melakukan upaya untuk menjawab tantangan pemulihan sektor aviasi dan pariwisata.

Dewan Komisaris mengetahui dan mendukung penuh *grand strategy* percepatan perbaikan sektor aviasi dan pariwisata yang telah disusun oleh manajemen Injourney. Tahun 2021 Injourney berfokus pada penetapan fondasi-fondasi krusial perseroan untuk meraih tujuan utama integrasi, transformasi, serta konsolidasi portofolio anak-anak usaha.

Anak-anak usaha Injourney telah terbukti selama puluhan tahun memiliki keunggulan kompetitif dengan model bisnis yang berkelanjutan di sepanjang rantai pasok pariwisata. Namun, masing-masing lini bisnis belum berjalan dalam satu tujuan. Oleh karena itu, Injourney sebagai Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung memiliki mandat strategis untuk menciptakan keselarasan antaranak usaha untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional terutama di sektor aviasi dan pariwisata. Dewan Komisaris menilai bahwa langkah pemetaan dan pengelompokan anak-anak usaha ke dalam subkluster-subkluster berdasarkan keunggulan model bisnis yang telah dilaksanakan Direksi sudah tepat. Dewan Komisaris berpendapat bahwa model bisnis yang selaras dan terintegrasi akan membantu Injourney menguasai ekosistem total dan rantai pasok pariwisata Indonesia, sejak dari tahap promosi dan *awareness*, perencanaan, aksesibilitas dan transportasi, akomodasi, dan destinasi. Dengan optimisme yang ada, Dewan Komisaris juga mengingatkan bahwa langkah implementasi strategi ini adalah langkah besar yang memerlukan persiapan dan kolaborasi antarlembaga dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, implementasi strategi harus dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Selain itu, transformasi holding dan subholding tentu membutuhkan investasi yang besar, yang dapat diperoleh dari *Foreign Direct Investment* (FDI), *Domestic Direct Investment* (DDI), investasi Pemerintah melalui *Penyertaan Modal Negara*

and inclusive multisector tourism ecosystem that will provide a stage for all Holding members and stakeholders to rise up and topple the challenges while recovering the aviation and tourism sectors.

The Board of Commissioners has fully acknowledged and supported the grand strategy in accelerating the recovery of the aviation and tourism sectors compiled by the management of Injourney. In 2021 Injourney focused on determining the Company's crucial foundations to achieve the main goals of integration, transformation, and consolidated portfolios of subsidiaries.

For decades, subsidiaries of Injourney have been proven to be having competitive excellence with a sustainable business model in all their tourism supply chains. However, each business line has not been aligning. Thus, Injourney, as the SOE Holding, owns a strategic mandate to create conformity among subsidiaries in order to accelerate the national economic recovery, especially in the sector of aviation and tourism. The Board of Commissioners considered that the strategy of mapping and grouping subsidiaries into subclusters based on their excellent business model by the Board of Directors has been appropriate. The Board of Commissioners states that an aligned and integrated business model will help Injourney dominate the total ecosystem and supply chain in Indonesia's tourism sector; from the promotion and awareness step, planning, accessibility and transportation, accomodation, and destination. The Board of Commissioners, with great optimism, has kept reminding that the implementation of this strategy is a big step that needs good preparation and collaboration between institutions and the stakeholders. Therefore, this implementation must be executed by the principle of precautionary, accountability, transparency, responsibility, independency, and fairness.

Furthermore, the transformation of holding and sub-holding certainly needs great investment. Such investment can be obtained from Foreign Direct Investment (FDI), Domestic Direct Investment (DDI), Government Investment through State



(PMN), maupun investasi swasta. Tata kelola keuangan yang baik serta budaya risiko juga harus diimplementasikan demi penerapan strategi yang tepat sasaran dan mampu menciptakan nilai tambah (*value creation*), agar memberikan dampak baik dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Selama periode pelaporan tahun 2021 dan di tengah pandemi yang masih berjalan, Dewan Komisaris menilai kinerja seluruh jajaran Direksi di Injourney serta seluruh Direksi anak perusahaan telah berjalan dengan baik. Dewan Komisaris menyampaikan arahan, saran, dan nasihat secara berkala kepada Direksi melalui rapat rutin.

Dewan Komisaris mengapresiasi atas kerja keras tim pembentukan Injourney yang dimulai dari dibentuknya tim PMO Holding BUMN ITE dan Tim Percepatan Konsolidasi BUMN Sektor Transportasi dan Pariwisata, kemudian dialihkannya bentuk usaha Perum Survai Udara Penas menjadi Perseroan melalui PP 72 Tahun 2021 hingga terbentuknya PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) melalui PP 104 Tahun 2021 yang ditandai dengan diberikannya Penanaman Modal Nasional Republik Indonesia dalam modal saham PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero). Hal ini merupakan jejak langkah yang luar biasa bagi sektor aviassi dan pariwisata Indonesia.

Injourney telah berhasil menyelesaikan satu dari tiga tahapan inbrenng, yakni tahap I pembentukan Holding dan pengalihan saham Seri B milik Negara Republik Indonesia di anak-anak usaha. Dewan Komisaris mengucapkan selamat kepada Direksi akan pencapaian ini, dan mengingatkan agar Direksi mempersiapkan diri dengan baik untuk menyelesaikan tahap lainnya, yakni tahap II: inklusi ITDC ke dalam Holding melalui mekanisme pengalihan saham Seri B milik Negara Republik Indonesia.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi upaya kolaborasi Injourney dan anak-anak usaha dalam melaksanakan proyek-proyek strategis. Persiapan bandara-bandara internasional dalam rangka event Konferensi Tingkat Tinggi G20 Bali, pengelolaan *heritage management* kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), revitalisasi Sarinah yang merupakan pusat

Equity Participation (PMN), or private investment. Moreover, good financial governance and risk culture should also be implemented in order to apply a well-planned strategy and create added value (value creation); thus, it will carry out positive and sustainable impacts for all the stakeholders.

Assessment on the Performance of the Board of Directors

During the 2021 reporting period and amid the ongoing pandemic, the Board of Commissioners assessed that all members of the Board of Directors of Injourney and all subsidiaries had a good performance. Through a regular meeting, the Board of Commissioners delivered a set of guidelines, suggestions, and advice to all Directors.

The Board of Commissioners appreciates the hard work of Injourney establishment team, from the formation of PMO team for ITE State-Owned Holding and Team for Accelerating the Consolidation of SOEs in Transportation and Tourism Sectors, the transformation of Public Company (Perum) Survai Udara Penas into a Company (Persero) through Government Regulation No. 72/2021 to the establishment of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) through Government Regulation No. 104/2021 marked by the granting of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero). This is a remarkable milestone for Indonesia's aviation and tourism sector.

Injourney has succeeded in finishing one out of three inbrenng phases, which is the establishment of the Holding and the transfer of B Series shares owned by the Government of the Republic Indonesia in subsidiaries. The Board of Commissioners would like to congratulate the Board of Directors upon this achievement, as well as remind them to be ready to complete Phase II: ITDC inclusion into the Holding through a transfer of B Series shares owned by the Government of the Republic of Indonesia.

The Board of Commissioners also appreciates the collaboration attempt between Injourney and its subsidiaries in conducting strategic projects. Some of the remarkable projects to be appreciated include the preparation of international airports in welcoming the upcoming G20 event in Bali, the good heritage management in the area of Borobudur, Prambanan, Ratu Boko Temple and Taman Mini Indonesia Indah (TMII), the revitalization



perbelanjaan pertama yang historis di Indonesia, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan di Grand Inna Bali Beach Sanur yang berkolaborasi dengan Holding BUMN Kesehatan, serta persiapan perhelatan event olahraga internasional bergengsi MotoGP di Mandalika dan berjalannya ajang balap World Superbike (WSBK) dan dengan sukses merupakan serangkaian pencapaian yang patut diapresiasi. Dewan Komisaris melihat bahwa Seluruh Direksi dan Insan Injourney berupaya keras dalam kontribusi upaya menyukseskan event-event penting dan historis ini.

Pendapatan konsolidasian Injourney terealisasi sebesar Rp9,73 triliun, atau 107,8% dari proyeksi RKAP 2021. Walaupun sedikit menurun dari tahun 2020 sebesar Rp10,46 triliun, capaian ini cukup menggembirakan di tengah pandemi COVID-19 yang masih berjalan dan kondisi ekonomi dan pariwisata yang belum pulih sepenuhnya. Dewan Komisaris juga mencatat realisasi kinerja pendapatan anak perusahaan yang melebihi RKAP, yakni PT Angkasa Pura I (104,6%), PT Angkasa Pura II (114,1%), PT Sarinah (135,4%), dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (121,5%). Kinerja ini patut diapresiasi, mengingat belum pulihnya kondisi sektor pariwisata dan pendukung secara penuh hingga akhir tahun 2021.

Langkah tepat lain yang telah dilaksanakan Direksi adalah pembentukan *Project Management Office* (PMO) yang memiliki tanggung jawab utama implementasi kinerja dan program strategis Perusahaan. PMO berperan sebagai rekanan dalam menjembatani, menghubungkan, dan mengakselerasi seluruh arahan dan inisiatif strategi Holding.

Pandangan terhadap Prospek Usaha

Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung merupakan holding BUMN pertama yang berbasis ekosistem. Holding ini diharapkan dapat mendukung program Pemerintah dalam menyelaraskan dan mengintegrasikan aspek *supply* dan *demand* sektor pariwisata dari hulu sampai hilir, sekaligus membantu pemulihan sektor pariwisata di Indonesia pasca COVID-19. Seiring dengan semakin terkendalinya penyebaran kasus COVID-19, tingkat vaksinasi tinggi, serta pelonggaran kebijakan restriksi COVID-19, potensi Injourney dan anak usaha untuk mewujudkan ekosistem total pariwisata semakin menjanjikan.

of Sarinah as Indonesia's first historical shopping center, the development of Special Economic Zone for Healthcare in Grand Inna Bali Beach Sanur in collaboration with Healthcare SOE Holding, and the preparation of prestigious international sport events, MotoGP, in Mandalika as well as the well-managed and successful World Superbike (WSBK) event. The Board of Commissioners has witnessed that all members of the Board of Directors and Injourney personnel have worked hard in contributing to the success of these important and historical events.

Injourney's consolidated revenue was recorded at Rp9.73 trillion or 107.8% from the Company's 2021 projected Work Plan and Budget (RKAP). Although the number was slightly lower than 2020 that peaked at Rp10.46 trillion, this achievement was quite remarkable, especially amid the COVID-19 pandemic where the economic and tourism sectors were not fully recovered. The Board of Commissioners had also recorded the revenue of all subsidiaries that exceeded the Company's Work Plan and Budget, such as PT Angkasa Pura I (104.6%), PT Angkasa Pura II (114.1%), PT Sarinah (135.4%), and PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (121.5%). Thus, these performances deserved to be appreciated, especially because the tourism and support sectors were not fully recovered up until the end of 2021.

Another appropriate measure taken by the Board of Directors was the establishment of Project Management Office (PMO) whose main responsibility is to focus on the implementation of the Company's strategic performance and program. PMO functions as a partner in bridging, connecting and accelerating all directions and strategic initiatives of the Holding.

Outlook on Business Prospect

State-Owned Enterprises Holding for Tourism and Supporting Sectors is the first ecosystem-based SOE Holding. The Government hopes that this Holding will support their program in aligning and integrating supply and demand aspects in tourism sector, from upstream to downstream, as well as support the recovery of Indonesia's post-pandemic tourism sector. As the spread of COVID-19 is already in control, as well as the massive vaccination program, and the easing of COVID-19 restriction policy, the potential of Injourney and its subsidiaries to pursue the tourism total ecosystem is becoming more promising.



dalam rangka pemulihan sektor pariwisata akan bersambut baik dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Hal ini tentu saja perlu keterlibatan semua pihak, termasuk Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung. Dalam rangka mendukung program Pemerintah tersebut, Direksi Injourney dan Direksi anak-anak perusahaan telah menyusun dan menyelaraskan *business plan* dengan program Pemerintah di sektor pariwisata. Dewan Komisaris melihat bahwa rencana bisnis yang disusun, selain dapat mendukung program Pemerintah, juga meningkatkan sinergi kinerja perusahaan dan anak-anak perusahaan untuk meraih segala potensi prospek usaha yang ada di masa depan, dalam rangka akselerasi pemulihan pariwisata, terutama pascapandemi COVID-19. Pembagian subkluster *Airport Management, Heritage Management, Demand Management, Destination Management*, dan *Retail Management* akan membantu menyelaraskan rencana bisnis Injourney dalam mengonsolidasi portofolio dan menyambut prospek usaha yang cerah di masa depan.

Dewan Komisaris mengapresiasi proyek dan pembangunan yang sedang dijalankan Injourney untuk mempromosikan pariwisata di kancah dunia. Persiapan MotoGP, Konferensi Tingkat Tinggi G20, dan revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang akan diselenggarakan tahun 2022 akan menjadi momentum menghadirkan kembali Indonesia ke panggung internasional. Revitalisasi Mall Sarinah akan memberikan peluang kepada Sarinah yang saat ini mengelola bisnis ritel, *trading* dan properti untuk berkiprah bisnis di era digital, sekaligus berkolaborasi dengan anggota

The Board of Commissioners considered that the Government's strategic programs in recovering the tourism sector will have positive results in the upcoming years. Thus, many parties, including SOE Holding for Tourism and Supporting Sectors need to participate. In order to participate in the program, the Board of Directors of Injourney as well as the subsidiaries have compiled and aligned a set of business plans that is in accordance with the Government's program in the tourism sector. According to the Board of Commissioners, in addition to supporting the Government's program, the compiled business plan can help improve the performance synergy of the company and its subsidiaries in reaching the goals of future potential business prospects to accelerate the recovery of post-pandemic tourism sector. The sub-clustering of Airport Management, Heritage Management, Demand Management, Destination Management, and Retail Management will help Injourney sync the business plan in consolidating portfolios as well as welcoming excellent business prospects in the future.

Furthermore, the Board of Commissioners appreciates the projects and development executed by Injourney as a way to promote tourism to the world. The preparation for the 2022 MotoGP event, G20 Summit, and the revitalization of Taman Mini Indonesia Indah (TMII) will become the momentum for Indonesia to get back to the international stage. Moreover, the revitalization of Sarinah Mall will open up a new opportunity for Sarinah, which is conducting retail business, trading, and property to have a role in this digital era, as well as collaboration with other Holding



holding dalam meningkatkan *revenue, added value* dan *services*. Program Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Grand Inna Bali Beach Sanur akan menawarkan destinasi wisata serta kesehatan unggulan yang holistik.

Dewan Komisaris yakin pemulihan sektor aviasi dan pariwisata di tahun-tahun mendatang sudah di depan mata. Optimisme ini juga didukung oleh beberapa prediksi perkembangan industri aviasi dan pariwisata di masa depan. United Nations World Tourism Organization memperkirakan bahwa Indonesia yang saat ini menempati posisi ke-21 dalam hal ukuran pasar pariwisata berpotensi akan naik ke posisi ke-17 di tahun 2030 dengan total nilai pasar sekitar USD42 miliar.

members in order to increase the revenue, added value, and services. Then, the development program for 5 Super Priority Destinations (DPSP) and also the Development of Special Economic Zone for Healthcare in Grand Inna Bali Beach Sanur will offer a holistic tourism destination as well as excellent healthcare services.

The Board of Commissioners believes that the recovery of the aviation and tourism sector will take place in the near future. This optimism is supported by some predictions on the future development in the aviation and tourism industry. United Nations World Tourism Organization has estimated that Indonesia, which is now sitting in the 21st position in the tourism market, will potentially rank up to the 17th position by 2030 with an estimated total market value of USD42 billion.



Pandangan terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola di Injourney dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*/"GCG"), peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dewan Komisaris berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik: independensi, transparansi dan itikad baik, serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan dan penunjukan organ-organ tata kelola, baik fungsi pengawasan maupun fungsi eksekutif, yang telah dilaksanakan tahun 2021 menegaskan telah mulai diletakkannya fondasi-fondasi tata kelola Perusahaan yang baik.

Sebagai BUMN, penerapan *Good Corporate Governance* di Injourney tunduk kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan Direksi untuk mempersiapkan fondasi dan implementasi tata kelola yang kuat, serta senantiasa menerapkan praktik tata kelola yang baik dalam setiap aktivitas dan aksi korporasi yang dijalankan Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris melalui Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG terus mengawal penerapan GCG di perusahaan dengan melakukan evaluasi setiap bulannya.

Dewan Komisaris mengapresiasi telah diletakkannya beberapa fondasi penerapan GCG. Kami telah menyetujui Piagam Direksi (*Board of Directors' Charter*) yang mengatur tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban Direksi dalam melaksanakan perannya di Perusahaan. Sarana *whistleblowing system* (WBS) yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor PER.005/INJOURNEY/12/2021 menyediakan jalur pengaduan yang transparan, rahasia, dan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Beberapa pedoman yang mengatur etika, pakta integritas, dan aspek teknis yang mendukung GCG juga

Outlook on the Implementation of Corporate Governance

The implementation of Injourney's corporate governance has been in accordance with the principle of good corporate governance (GCG), the applicable laws and regulations, as well as the initial aims and objectives of the Company.

In carrying out the duties and functions, the Board of Commissioners is guided by the principle of good corporate governance: independency, transparency, and good faith, as well as referring to the Company's Article of Association and the applicable laws and regulations.

The process of appointing and selecting the governance organs, either supervisory or executive functions in 2021, proved that the Company had started to implement the principle of good corporate governance.

As a State-Owned Enterprises, the implementation of Good Corporate Governance in Injourney has referred to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 con the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, as amended by the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012.

In its implementation, the Board of Commissioners has constantly reminded the Board of Directors to prepare a strong foundation and good governance implementation, as well as apply good governance practices in each corporate activity and action carried out by the Board of Directors. Furthermore, through Risk Management, Investment & GCG Committee, the Board of Commissioners continues to oversee the implementation of GCG in the company by holding a monthly evaluation.

The Board of Commissioners has given appreciation for the implementation of GCG. We have approved the Board of Directors' Charter that stipulates the duties, responsibilities, rights and obligations of Directors in carrying out their role in the company. Furthermore, the Whistleblowing System (WBS) as regulated in the Decree of the Board of Directors No. PER.005/INJOURNEY/12/2021 has provided a hotline for complaints that is transparent, confidential, and protective toward the whistleblowers. The Company has also applied several guidelines to regulate ethics, integrity pact, and technical aspects supporting the GCG,

telah diberlakukan, antara lain Keputusan Direksi tentang Pedoman Pendanaan Internal dan Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Apresiasi

Kami menyampaikan rasa terima kasih yang besar atas kepercayaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga Injourney dapat melangkah secara percaya diri sebagai holding pariwisata dan pendukung yang akan menjadi katalis pemulihan ekonomi bagi Indonesia. Rasa terima kasih kami ucapkan kepada seluruh anak usaha atas kolaborasi yang baik antara Injourney dan anak usaha. Akhir kata, kami mengapresiasi seluruh Direksi, jajaran manajemen, karyawan, seluruh Insan Injourney, serta pemangku kepentingan lain atas kontribusi dan dukungan dalam meningkatkan nilai serta kelangsungan bisnis di sepanjang tahun 2021. Dewan Komisaris berharap, berbagai pencapaian di tahun 2021 menjadi langkah awal pemacu semangat dalam membangkitkan sektor aviasi dan pariwisata di tahun-tahun mendatang.

such as the Decree of the Board of Directors on Guidelines for Internal Funding and the Decree of the Board of Directors on Guidelines for Goods/ Services Procurement.

Appreciation

We would like to express our gratitude to the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) for trusting Injourney so that we can walk confidently as a Holding for Tourism and Supporting Sectors and will lead Indonesia's economic recovery. We would like express our gratitude to all subsidiaries, especially for the good collaboration with Injourney. Lastly, we appreciate the entire Board of Directors, management, employees, all Injourney personnel, as well as other stakeholders for their contribution and support in raising the value and business continuity during 2021. The Board of Commissioners greatly hopes that many achievements in 2021 become the stepping stone to keep doing our best in the revitalization of the aviation and tourism sectors in the upcoming years.

Jakarta, Juni 2022

Jakarta, June 2022



Triawan Munaf
Komisaris Utama

President Commissioner



Laporan Direksi

Board of Directors Report

“Pembentukan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), atau Injourney, menggambarkan momentum harapan bangkit memimpin dan mengembalikan kejayaan aviasi dan pariwisata Indonesia dan menjadi katalis usaha pemulihan ekonomi nasional. Injourney menjadi ekosistem multisektor pariwisata terbesar di Asia Tenggara yang holistik, kolaboratif, dan inklusif yang siap mengorkestrasi dan mentransformasi anggota Holding untuk berkembang menjadi perusahaan yang sehat, kompetitif, serta berdampak besar bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia.”

“The establishment of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), or Injourney, marks the awakening momentum to lead Indonesia’s aviation and tourism sector to glory as well as become a catalyst for national economic recovery. Injourney has become the biggest holistic, collaborative, and inclusive tourism multisector ecosystem in Southeast Asia that will orchestrate and transform the Holding members to grow into a healthy, competitive, and impactful toward the improvements of tourism sector in Indonesia.”



Dony Oskaria

Direktur Utama
President Director



Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Selamat datang di Laporan Tahunan 2021 PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero), atau "Injourney". Mewakili Jajaran Direksi dan Insan Injourney, izinkan saya menyampaikan pencapaian dan kinerja Perseroan tahun 2021, terutama dalam situasi upaya pemulihan sektor aviassi dan pariwisata akibat pandemi COVID-19.

Laporan Tahunan 2021 yang mengusung tema "*The Future of Indonesia's Aviation and Tourism*" menggambarkan momentum harapan untuk solusi bangkit memimpin dan mengembalikan kejayaan pariwisata Indonesia melalui pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, yakni Injourney. Dengan tiga kunci perspektif yang mendefinisikan visi dari Injourney yaitu untuk memulihkan perekonomian Indonesia melalui aspirasi dan nilai pemangku kepentingan, tren pasar dan implikasinya, serta strategi, kapabilitas dan sinergi antar Holding dan anggota Holding yang telah dirumuskan dalam Visioning Workshop tanggal 4 November 2021, Injourney dibentuk dengan visi "*To be the leading tourism ecosystem in the region, providing memorable experience through Indonesian hospitality*". Injourney bertujuan menjadi katalis usaha pemulihan ekonomi nasional.

Tinjauan Makro Ekonomi

Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan ekonomi global dan nasional pada tahun 2021 masih diwarnai banyak tantangan, terutama terkait pandemi COVID-19. Kebijakan *zero tolerance* terhadap COVID-19 yang diberlakukan Tiongkok sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi serta kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) di seluruh dunia turut memberikan dampak kontraksi ekonomi, menurunnya konsumsi, dan disrupsi rantai pasok global. Namun demikian, perekonomian di beberapa negara Asia-Pasifik dan Eropa mulai dibuka, walaupun dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Gelombang pandemi ketiga dan keempat yang terjadi di berbagai belahan dunia serta merebaknya varian Delta dan Omicron memaksa pembatasan-pembatasan diberlakukan kembali, terutama di negara dan daerah dengan tingkat vaksinasi yang belum optimal. Krisis energi di benua Asia, Eropa, dan Amerika dan beberapa hambatan pada rantai pasok global turut

Dear Honorable Stakeholders,

We would like to welcome you to the 2021 Annual Report of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero), or Injourney. As a representative of the Board of Directors and Injourney People, please let me present to you the achievements and performance of the Company in 2021, especially focusing on the recovery attempts of the aviation and tourism sector post COVID-19 pandemic.

The Annual Report carrying out the theme "The Future of Indonesia's Aviation and Tourism" depicts a revival momentum to lead and regain the glory of Indonesia's aviation and tourism through the establishment of SOE Holding of Tourism and Support Services, namely Injourney. Through three key perspectives defining Injourney's vision, namely to restore Indonesia's economy through stakeholder aspirations and values, market trends and implications, as well as strategies, capabilities and synergies between Holding and Holding members as formulated in Visioning Workshop on November 4, 2021, Injourney was established with vision "To be the leading tourism ecosystem in the region, providing memorable experience through Indonesian hospitality". Injourney aims to be a catalyst for national economic recovery efforts.

Review on Macro Economy

During 2021, as we all acknowledge, the growth of global and national economy was full of challenges due to the COVID-19 pandemic. The Zero-Tolerance policy toward COVID-19 applied by China, as the country with the highest economic growth, and the social distancing policy implemented by the whole world had helped cause economic contraction, declining consumption rate, and disrupted global supply chain. However, some countries in Pacific-Asia and Europe had started to regain their economy, although with some restrictions applied. However, the third and fourth wave of the pandemic happening all around the world, as well as the appearance of new variants Delta and Omicron, had forced some countries to re-apply the restrictions, especially in those countries with low-level vaccination program. Furthermore, the energy crisis happening in Asia, Europe, and America as well as other obstacles in global supply chains had contributed to inflation, mostly in developing countries. The International

mendorong inflasi, terutama di negara-negara berkembang. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 sebesar 5,9%. Negara-negara yang merupakan mitra dagang strategis Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang masih positif antara 3,9%-5,4%, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Hongkong, dan Uni Eropa. Singapura mencatat pertumbuhan lebih tinggi, yakni 6,5%.

Pandemi COVID-19 di Indonesia telah memengaruhi perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia selama kurang lebih dua tahun. Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah diberlakukan kembali pada Juli 2021 akibat gelombang kedua varian Delta COVID-19. Di penghujung tahun 2021, PPKM kembali diterapkan sebagai upaya pencegahan penyebaran varian Omicron pada 4 Oktober 2021 hingga 2 November 2021. Namun demikian, Indonesia masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69% dibandingkan tahun 2020. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5, meningkat 5,02% (y-o-y) pada kuartal keempat tahun 2021.

Tinjauan Industri

Pandemi COVID-19 menyebabkan krisis kesehatan dan ekonomi di negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang bergantung pada sektor pariwisata. Dasbor Pariwisata United Nations World Tourism Organization mencatat penurunan 74% pada angka kedatangan pariwisata global. Di banyak negara berkembang, penurunan tercatat hingga 80-90%. Penurunan ini juga berdampak pada sektor-sektor lainnya, seiring dengan tenaga kerja dan modal tetap yang tidak digunakan dan permintaan barang dan jasa setengah jadi menjadi menurun (*United Nations Conference on Trade and Development*).

Pada tahun 2021, industri aviasi dan pariwisata Indonesia masih berupaya menggeliat naik. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan kontribusi PDB Pariwisata tahun 2021 meningkat 37,4% dari tahun 2020, sehingga mencapai angka 4,2% terhadap total PDB Indonesia. Devisa pariwisata juga meningkat sebesar 4% dibandingkan tahun 2020, yakni dari US\$320 juta menjadi US\$360 juta.

Monetary Fund (IMF) projected that the global economy of 2021 would increase by 5.9%. Some of Indonesia's trading partner countries, such as China, The USA, Hongkong, and European Union, recorded positive economic growth as much as 3.9% - 5.4%. Meanwhile, Singapore recorded a higher rate at 6.5%.

Pandemic COVID-19 taking place in Indonesia has impacted the economy as well as the life of the Indonesian people for the last two years. The Government had to re-apply the social restriction in July 2021 due to the second-wave pandemic carrying a new COVID-19 variant called Delta. Then, by the end of 2021, a new variant called Omicron was born; forcing the Government to, once again, apply the social restriction from 4 October 2021 to 2 November 2021. However, Indonesia was able to gain economic growth as much as 3.69%, compared to 2020. The Gross Domestic Product (GDP) based on the existing price peaked at Rp16,970.8 trillion and the GDP per capita was up to Rp62.2 million or US\$4,349.5, increasing by 5.02% (y-o-y) in the fourth quarter of 2021.

Review on Industry

It is undeniable that the COVID-19 pandemic has caused healthcare and economical crisis in developing countries, especially those relying on the tourism sector. United Nations World Tourism Organization's Tourism Dashboard, has recorded a decline in global tourism arrivals as much as 74%. In many developing countries, the decline reaches down to 80-90%. Certainly, this decline has negatively impacted other sectors, thus, the labor, unused current capital, and the demand for the Work In Progress (WIP) goods and services have also been declining. (United Nations Conference on Trade and Development).

In 2021, the Indonesia's aviation and tourism industry was still struggling to get back on track. Indonesia's Central Bureau of Statistics (BPS) estimated that the 2021's tourism GDP would increase by 37.4% from the previous year, reaching 4.2% of the total national GDP. Meanwhile, the tourism foreign exchange would increase as much as 4% from the previous year, or from US\$320 million in 2020 to US\$360 million in 2021.



Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdapat 1,56 juta kunjungan wisatawan mancanegara selama tahun 2021. Angka ini turun sebesar 61,48% dibandingkan dengan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2020 sebesar 4,05 juta. Penurunan jumlah wisatawan mancanegara masih sangat kuat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, antara lain terkait kewajiban karantina terhadap wisatawan mancanegara, pembatasan masuk ke Indonesia terhadap beberapa warga negara akibat adanya transmisi varian Delta dan Omicron, dan pembatasan sejumlah destinasi pariwisata. Di tengah menurun drastisnya angka kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara masih menjanjikan secercah harapan bagi pariwisata Indonesia.

Di sisi lain, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang mengalami kenaikan hingga 51,57%, tertinggi sejak awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Desember 2021, TPK hotel mengalami peningkatan secara bulanan sebesar 3,74 poin dibandingkan 47,8% pada November 2021.

Selain sektor pariwisata, sektor aviasi termasuk salah satu sektor yang paling terpuak di masa pandemi, terutama karena menurun drastisnya perjalanan masyarakat, merebaknya varian Delta yang meningkat tajam, serta Omicron di kuartal keempat tahun 2021. IATA Economics tahun 2020 mencatat penurunan lalu lintas udara sebesar 49%. Ketidakpastian pemberlakuan kebijakan buka-tutup perbatasan di seluruh dunia untuk mencegah penyebaran COVID-19 menghambat pertumbuhan trafik penerbangan internasional. Meski demikian, pemulihan trafik di masa depan tetap diantisipasi dengan berbagai macam strategi dan kebijakan Perseroan.

Pemerintah Indonesia berupaya melakukan segala cara untuk menekan laju penularan COVID-19 dan menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya dengan mengencangkan program vaksinasi. Hingga akhir tahun 2021, capaian vaksinasi nasional mencapai 280 juta dosis vaksin COVID-19, atau memenuhi target WHO sebesar minimal 40% penduduk negara di akhir tahun 2021.

Based on the data from the Ministry of Tourism and Creative Economy, there were 1.56 million international tourist visits in 2021. This number decreased by 61.48% compared to the visits in 2020, which was recorded at 4.05 million. The declining number of international tourists was mainly due to the COVID-19 pandemic, since there needed to be a quarantine program for international tourists, entry restrictions to Indonesia due to the Delta and Omicron variants, and limited tourism destinations. Despite the drastic decline in the number of international tourists, the number of domestic tourists was a little bit promising for Indonesia's tourism.

On the other side, the room occupation level in starred hotels increased by 51.57%, the highest number ever recorded since the beginning of the pandemic back in March 2020. The Central Bureau of Statistic noted that in December 2021, the level increased by 3.74 point in December; the number was higher than November 2021 which was recorded at 47.8%.

Tourism sector was not the only sector affected by the pandemic, the aviation was affected just as bad due to the drastic decline in air travels as well as the wide-spreading of Delta and Omicron variant in the fourth quarter of 2021. The 2020 IATA Economics recorded a decline in air traffic as much as 49%. Furthermore, the uncertainty of the open-close border mechanism in the world had restricted the growth of international air traffic. However, the Company will strive for future recovery in air traffic by making and conducting various strategies and policies.

Indonesian Government has been doing anything in their power to help press the spreading of COVID-19 as well as save the nation's economy, one of their efforts is intensifying the vaccination program. In the end of 2021, the national vaccination has reached 280 million doses, or has met the minimum number targeted by the WHO at 40% by the end of the year.

Menghadapi dinamika ini, Pemerintah Indonesia melihat bahwa momentum ini adalah peluang untuk mengejar ketertinggalan. Pandemi yang terjadi menjadi memberikan kesempatan untuk melakukan penataan ulang menyeluruh ke arah yang lebih baik, dengan menggali semua potensi yang ada. Pemerintah Indonesia merencanakan strategi pemulihan ekonomi Indonesia di berbagai sektor secara menyeluruh. Lebih mengerucut pada sektor aviasi dan pariwisata, Pemerintah telah menetapkan sepuluh pengembangan destinasi pariwisata Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara khusus memberikan arahan pada rapat terbatas tanggal 6 Agustus 2020, bahwa: "Saat pandemi merupakan momentum untuk transformasi di bidang pariwisata dan penerbangan melalui penataan yang lebih baik mengenai rute penerbangan, penentuan hub, penentuan *super hub*, kemudian juga penggabungan BUMN Pariwisata dan Pendukung sehingga fondasi ekonomi di sektor pariwisata dan transportasi akan semakin kokoh dan semakin baik, dan bisa berlari lebih cepat lagi".

Sektor pariwisata dan pendukung memiliki peluang untuk berkontribusi pada pencapaian optimalisasi potensi sektoral dan lintas sektor, serta menjadi katalis pengembangan Indonesia yang lebih inklusif. Target sektor pariwisata Indonesia adalah "Quality Tourism Experience" yang berfokus tidak hanya pada pertumbuhan dan volume, namun juga pada kualitas *experience*, *human capital*, dan preservasi lingkungan untuk meraih "World-class Tourism Ecosystem" yang berkelanjutan.

Karena mayoritas permintaan penerbangan global erat kaitannya dengan perjalanan pariwisata, sektor aviasi memiliki hubungan erat dengan sektor kepariwisataan. Oleh karena itu, strategi pertumbuhan sektor aviasi dan pariwisata perlu diselaraskan. Strategi Pemerintah ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat target-target untuk sektor pariwisata Indonesia, yang berfokus antara lain pada peningkatan devisa dan nilai tambah bagi negara melalui pariwisata, mempersiapkan destinasi, industri, dan masyarakat dalam rangka pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan daya dukung lingkungan, dan meningkatkan citra pariwisata yang berdaya saing.

Furthermore, to face this dynamic, the Indonesian Government has noticed that this is their opportunity to strive and move forward. The pandemic, however, has given this country a chance to do a total re-arrangement in order to be better in all aspects by digging any existing potentials. The Government has planned a strategy to recover the national economy in all sectors entirely. As for the aviation and tourism sectors, the Government has determined 10 (ten) tourism destinations development in Indonesia. The President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, particularly gave directions in a closed-meeting on 6 August 2020: "This pandemic is the right momentum for us to transform the aviation and tourism sectors through a better arrangement concerning on the flight routes, hub closing, determining super hub, and then merging SOE aviation and tourism so that the economic foundation in these sectors will be stronger and better, thus, runs faster".

The sector of tourism and support services has the opportunity to contribute more to achieve the optimized sectoral potential and cross-sector, as well as become the catalyst for Indonesia's inclusive development. The target of tourism sector itself is "Quality Tourism Experience" that focuses on the growth and volume as well as experience quality, human capital, and environmental preservation in order to reach the goal of sustainable "World-class Tourism Ecosystem".

Since the majority of global flight demands are closely related to tourism travels, thus, the aviation sector is bond tightly to tourism sector. Therefore, there needs to be an alignment in both sectors. The Government's strategy listed in the National Mid-Term Development Plan of 2020-2024 includes the targets of Indonesia's tourism sector, such as increasing the nation's foreign exchange and added value through tourism, preparing the destination, industry, as well as the community to develop tourism industry and creative economy, improving the human resources capacity, improving the environmental support power, and improving the image of tourism with global competitiveness.



Injourney sebagai Katalis Pemulihan Ekonomi Indonesia

Sebagai pengejawantahan dari arahan Pemerintah, RPJMN 2022-2024 serta Fokus Kebijakan APBN 2022 menjadi salah satu dasar pembentukan holding pariwisata dan pendukung, Injourney, untuk menyelamatkan industri aviasi dan pariwisata Indonesia. Berdasarkan aspirasi *shareholder* dalam *Roadmap 2020-2024*, Visi dan Misi bagi Sub Klaster Pariwisata adalah "Menjadi lokomotif pemulihan dan pengembangan pariwisata Indonesia berbasis ekosistem melalui pendekatan holistik, inklusif, dan kolaboratif yang mampu memberikan *added value* dan berkontribusi positif pada perekonomian nasional".

Menteri BUMN, Erick Thohir, pada Arahan Pemegang Saham tentang Pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung menyatakan bahwa Injourney dibentuk untuk meningkatkan sinergi antar-BUMN pada sektor pariwisata dan pendukung, serta mengoptimalkan potensi dan peran BUMN. Dengan demikian, pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung akan mendorong pelaksanaan inisiatif-inisiatif, pengembangan, peningkatan daya saing, dan kemampuan pendanaan lintas sektor yang terintegrasi di masa depan.

Pembentukan Injourney melalui proses panjang yang telah dilakukan secara matang. Dari dibentuknya tim PMO Holding BUMN ITE dan Tim Percepatan Konsolidasi BUMN Sektor Transportasi dan Pariwisata, kemudian dialihkannya bentuk usaha Perum Survai Udara Penas menjadi Perseroan melalui PP 72 Tahun 2021 hingga terbentuknya PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) melalui PP 104 Tahun 2021 yang ditandai dengan diberikannya Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam modal saham PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero).

Injourney merupakan mega ekosistem yang meliputi seluruh anak perusahaan BUMN yang terkait dengan industri pariwisata dan pendukung, seperti hotel, bandara, kargo, hingga destinasi wisata. Pembentukan Injourney mengkonsolidasi

Injourney as the Catalyst of Indonesia's Economic Recovery

As a manifestation of the Government's directives, the 2022-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and the focus of the 2022 State Budget Policy have become the foundation of the establishment of tourism and supporting SOE holding, Injourney, to save the aviation and tourism industries in Indonesia. By referring to the shareholders' aspiration in the 2020-2024 Roadmap, the Vision and Mission of Tourism Sub-Cluster is "To become the locomotive of recovery and development of Indonesia's ecosystem-based tourism through a holistic, inclusive, and collaborative approach that is able to provide added value and positive contribution toward the national economy".

The Minister of SOE's, Erick Thohir, in the event of Shareholders' Directives on the Establishment of the Tourism and Supporting SOE Holding, stated that Injourney was established to increase the synergy between SOE's in the tourism and supporting sectors, as well as optimize the potential and role of SOE's. Therefore, the establishment of Tourism and Supporting SOE Holding will drive the execution of initiatives, development, competitiveness, and integrated cross-sector funding in the future.

Injourney was established through a long and careful process, from the formation of PMO team for ITE State-Owned Holding and Team for Accelerating the Consolidation of SOEs in Transportation and Tourism Sectors, the transformation of Public Company (Perum) Survai Udara Penas into a Company (Persero) through Government Regulation No. 72/2021 to the establishment of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) through Government Regulation No. 104/2021 marked by the granting of the Republic of Indonesia's Additional State Capital Participation into the Share Capital of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero).

Injourney is a mega-ecosystem that includes all SOE subsidiaries that relate to the tourism and support services industry such as hotels, airports, cargos, and even tourism destinations. Injourney consolidates and capabilities of the national

portofolio dan kapabilitas aviasi dan penerbangan nasional, mempromosikan pariwisata lokal, dan transformasi budaya layanan (*service culture transformation*), melalui anak-anak usaha Injourney.

Untuk melaksanakan strategi pembentukan Holding, telah dilakukan penetapan fungsi pelaksana strategi dan rencana melalui pembentukan beberapa *Project Management Office (PMO)* yang memiliki tanggung jawab utama implementasi kinerja dan program strategis Perusahaan, yakni dengan menjalankan fungsi monitor, analisis, pengawasan, akselerasi, konsultasi, solusi dan pengukuran kinerja. Masing-masing PMO dikepalai oleh *Steering Committee* yang membawahi *Organizing Committee*, *Head of PMO*, dan beberapa *Work Stream: Operation Integration, Business Initiatives, Financial Management, Human Capital, Legal & Risk, dan Internal Communication*. Masing-masing *Work Stream* beranggotakan kepala dan anggota. Dalam cakupan yang lebih luas, para PMO berperan sebagai rekanan dalam menjembatani, menghubungkan, dan mengakselerasi seluruh arahan dan inisiatif strategi Holding.

Injourney dipilih untuk menjadi perusahaan Induk Holding dengan peran sebagai *Strategic Holding*, dengan pertimbangan bahwa Pemerintah tidak perlu mendirikan BUMN baru, 100% kepemilikan Injourney dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, saham seri A akan tetap dimiliki oleh Pemerintah, dan adanya fleksibilitas restrukturisasi organisasi jika diperlukan di masa depan. Pembentukan Holding direncanakan dalam tiga tahapan inbeng. Pertama, tahap I yang ditargetkan selesai pada kuartal II 2021 meliputi pembentukan Holding dan pengalihan saham Seri B milik Negara Republik Indonesia di PT Hotel Indonesia Natour ("HIN") (Persero), PT Sarinah, ("Sarinah"), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko, PT Angkasa Pura I (API), dan PT Angkasa Pura II (APII) sebagai tambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam modal saham Injourney. Tahap II yang meliputi inklusi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) ke dalam Holding melalui mekanisme pengalihan saham Seri B milik Negara Republik Indonesia ke Injourney. Tahap III yang direncanakan selesai pada 2023 meliputi inklusi Garuda melalui mekanisme pengalihan saham Seri B milik Negara Republik Indonesia ke Injourney.

aviation and flights, promoted local tourism, and enabled the service culture transformation through its subsidiaries.

In order to implement its strategies, the Holding has determined the executor for strategy and plan implementation through some Project Management Office (PMO) who will be responsible to focus on the implementation of the Company's performances and strategic programs, by taking a role as the monitor, analyst, supervisor, accelerator, consultant, solution giver, and even performance measurer. Each of PMO is led by Steering Committee, subordinated by Operation Integration, Business Initiatives, Financial Management, Human Capital, Legal & Risk, and Internal Communication. Each of these Work Stream consists of a leader and members. In a larger scale, PMO functions as a partner who bridges, connects, and accelerates all Holding's directives and initiatives.

As per Government's consideration to not establish a new SOE, they have chosen Injourney to be the Parent Holding company that plays a role as Strategic Holding. Thus, the Government owns Injourney 100% in which all A series shares will be owned by them, and if needed, a flexible organization restructuring might be done in the future. The establishment of Holding has been planned to be done in three inbeng stages. The first stage would have been completed by second quarter of 2021; it included the Establishment of the Holding and the transfer of State-Owned B Series shares in PT Hotel Indonesia Natour Natour ("HIN") (Persero), PT Sarinah, ("Sarinah"), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko, PT Angkasa Pura I (API), and PT Angkasa Pura II (APII) as an additional to the National Capital Participation into Injourney's shares capital. The second stage included PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) inclusion into the Holding through transfer mechanism of State-Owned B Series shares into Injourney. The last stage itself has been planned to be completed in 2023, which includes Garuda inclusion through transfer mechanism of State-Owned B Series shares into Injourney.



Hingga akhir tahun 2021, Injourney beranggotakan lima perusahaan subholding dengan portofolio 35 bandara, 147 hotel, 5 kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), *retail* dan *cargo*. Peran subholding Injourney terbagi ke dalam beberapa subkluster, yaitu: *Airport Management*, *Heritage Management*, *Destination Management*, *Retail Management*, dan *Demand Management*. Masing-masing anak perusahaan Injourney telah memiliki keunggulan kompetitif dalam ekosistem pariwisata selama beberapa dekade, yang mencakup penyedia transportasi, manajemen destinasi, dan penyedia layanan pariwisata, yang menjadi keunggulan kompetitif terutama dari sisi *supply*. Keunggulan kompetitif ini menjadi faktor *leverage* bagi potensi menyambut *demand* pariwisata di masa depan.

Strategi dan Kebijakan Strategis

Injourney bersama anak usaha telah menetapkan sejumlah strategi besar (*grand strategy*) serta kebijakan guna menjaga kelangsungan usaha dalam menjawab tantangan pasca COVID-19.

Untuk merealisasikan tema tersebut, Injourney perlu melakukan integrasi, transformasi, serta konsolidasi portofolio berdasarkan pengelompokan jenis usaha anak-anak perusahaan sebagai bagian dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Kebijakan ini menjadi dasar agar Injourney dan anak usaha dapat mencapai keunggulan skala ekonomi dan akumulasi ekonomi secara terkonsolidasi. Dengan demikian, Injourney beserta anak usaha akan siap untuk bertransformasi menjadi perusahaan *world-class* ujung tombak pariwisata Indonesia yang mampu bersaing di pasar internasional.

Kebijakan strategis untuk mengonsolidasi portofolio didasarkan pada tiga pilar inisiatif. Pertama, konsolidasi kapabilitas dengan syarat setiap anak usaha harus memiliki kejelasan model bisnis dengan 3 parameter utama: memiliki produk dan pendapatan yang ditawarkan langsung kepada pasar dan berdaya saing tinggi, memiliki kendali penuh atas sistem produksi utama, dan mampu meningkatkan kapabilitas usaha dan adaptasi terhadap perubahan secara berkesinambungan.

Pilar inisiatif yang kedua adalah promosi daerah pariwisata. Dengan tujuan utama pemulihan ekonomi nasional khususnya sektor aviasi dan pariwisata, anak usaha Injourney harus memanfaatkan peluang pariwisata daerah

By the end of 2021, Injourney consisted of five subholding companies with a portfolio of 35 airports, 147 hotels, 5 Super Priority Destinations, as well as retail and cargo. The roles of these subholdings have been divided into various subclusters, namely: Airport Management, Heritage Management, Destination Management, Retail Management, and Demand Management. For decades, each of these subsidiaries has owned competitive excellences in the tourism ecosystem, such as good transportation supply, destination management, and tourism services that becomes the most prominent in the supply sector. These competitive excellences have become the leverage factor to welcome the potential tourism demand in the future.

Strategy and Strategic Policy

Injourney, along with its subsidiaries have listed some grand strategies as well as policies to maintain business sustainability in order to topple the post-pandemic challenges.

To realize the theme, Injourney needs to make portfolios integration, transformation, and consolidation based on the business type of each subsidiary as a part of the Company's Long-term Plan (RJPP). The policy is the basis for Injourney and the subsidiaries to achieve advantages of economies of scale and consolidated economic accumulation. Thus, Injourney and its subsidiaries will be ready to transform into a world-class company spearheading Indonesian tourism that is able to compete in the international market.

The strategic policy that consolidates the portfolios is based on three initiative pillars. The first pillar is capability consolidation that requires each subsidiary to possess a clear business model with 3 main parameters: owning a product and income that is offered directly to the market and having great competitiveness, having full control on the main production system, and being able to increase the business capability and adapting to any changes in a sustainable way.

The second pillar is about promoting tourism region. The main goal of this pillar is to help national economic recovery, especially in the sector of aviation and tourism. Thus, the subsidiaries shall be able to take the chance to develop local tourism



dengan mengembangkan *tourism hub* yang berkolaborasi dengan seluruh pelaku pariwisata di dalam dan di luar ekosistem total Injourney. Dengan demikian, sinergi antaranak usaha dapat menciptakan *value creation*. Pengembangan *tourism hub* juga didukung pengembangan *platform* pariwisata untuk promosi.

Pilar inisiatif yang ketiga adalah transformasi budaya layanan yang menuntut seluruh anak usaha Injourney untuk memastikan pelayanan terbaik bagi pelaku perjalanan di setiap rantai jasa layanan pariwisata.

Realisasi strategi besar Injourney tentu perlu didukung oleh kesiapan dan kemampuan finansial yang kokoh. Oleh karena itu, Injourney meletakkan fondasi awal penataan modal dan sistem keuangan serta optimasi biaya, dalam rangka upaya mencari dana, memperkuat permodalan, serta memperbaiki kinerja keuangan grup secara konsolidasi. Optimasi biaya secara konsolidasi juga akan menghilangkan *eliminated revenue* dan *hidden cost*, meningkatkan *shared service*, dan meningkatkan efisiensi dalam jangka panjang.

Strategi Keuangan Injourney

Tahun 2021 anak-anak usaha Injourney berhasil melakukan inisiatif strategis dan menorehkan pencapaian-pencapaian terkait tata kelola keuangan. Pendapatan usaha periode 2021 melebihi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Pencapaian ini tidak terlepas dari beberapa inisiatif, antara lain implementasi sistem untuk melindungi pendapatan, inisiatif fokus peningkatan pendapatan, dan *cost leadership/optimization*.

Kedepannya, Injourney berkomitmen untuk meneruskan pencapaian-pencapaian ini dengan menetapkan strategi tata kelola keuangan melalui valuasi perusahaan optimal, sinergi bisnis yang berkelanjutan, dan proses manajemen risiko. Penguatan manajemen permodalan (*capital management*) ditujukan untuk memperkuat neraca dan struktur permodalan dan profitabilitas, termasuk di dalamnya *reprofiling* dan restrukturisasi utang anak usaha, pendanaan PMN, *group fundraising*, *asset recycling*, & optimalisasi *underutilized asset*. Strategi *cash and cost leadership* menopang pengelolaan manajemen kas yang terintegrasi untuk menjaga tingkat likuiditas yang sehat, serta efisiensi dan produktivitas biaya optimal secara konsolidasi.

by creating a tourism hub as well as collaboration with tourism people inside and outside of Injourney's total ecosystem. Therefore, the synergy among subsidiaries will help pursue the value creation. The development of tourism hub shall also be supported by the development of tourism platform in order to make good promotion.

The third pillar is concerning on the transformation of service culture that demands all subsidiaries to ensure that they give the best of services to the travellers in each of their tourism service chain.

In order to truly implement these strategies, Injourney certainly needs to be well-prepared and having stable financial capability. Therefore, the Company has put its initiative foundation in capital management and financial system as well as cost optimization, in order to seek for funding, strengthen the capital, and improve the financial performance in a consolidated manner. Furthermore, a consolidated cost optimization will minimize the eliminated revenue and hidden cost, improve shared service, and increase long-term efficiency.

Injourney's Financial Strategy

In 2021, Injourney's subsidiaries succeeded to conduct initiative strategies and recorded various achievements related to financial governance. The 2021's operating revenue was beyond the expectation of the Company's Work Plan and Budget. This achievement was due to some initiatives such as the implementation of revenue protecting system, focused initiative on revenue improvement, and also cost leadership/optimization.

Going forward, Injourney commits to striving for more achievements by determining good financial governance strategy through an optimized company's evaluation, sustainable business synergy, and well-processed risk management. The strengthening of capital management is aimed to strengthen the account and structure of capitalization and profitability, including reprofiling and restructuring the subsidiaries' debts, funding the National Capital Participation, group fundraising, asset recycling, & optimizing the underutilized asset. Meanwhile, a cash and cost leadership strategy will help support the integrated cash management to maintain a healthy liquidity level, as well as the efficiency and cost-optimized productivity in a consolidated manner.



Kinerja keuangan yang baik sangat ditopang oleh tata kelola keuangan yang kokoh dan terintegrasi. Oleh karenanya, Injourney tengah merancang tata kelola, perencanaan, dan implementasi dengan cakupan *group-wide* dengan target rating keuangan terbaik di industri, serta merancang dan mengimplementasikan *dashboard* keuangan berbasis manajemen data. Selain itu, Injourney juga membangun tata kelola keuangan yang ditopang budaya risiko (*risk culture*), dengan merancang intervensi holistik melalui penguatan fungsi manajemen risiko terintegrasi dan komite investasi, serta pengukuran *risk maturity level*.

Pada tataran teknis, strategi ke depan Injourney antara lain:

- Meningkatkan kemapanan pembiayaan (*financing advantage*) dengan menggalang pendanaan bagi anak usaha dan pendanaan internal bersama;
- Menetapkan strategi pengembangan menyeluruh (*alignment development strategy*) melalui pemberian arahan strategis terpusat dari Injourney, menyelaraskan RKAP dan RJPP bersama seluruh anak usaha, serta penataan *hub-spoke* dan kolaborasi antara *airline – airport – destinasi*;
- Optimasi layanan bersama (*shared services optimization*) melalui pemanfaatan sistem IT bersama, efisiensi *joint procurement*, serta program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang terintegrasi;
- Kolaborasi operasional (*operational engagement*) yang direalisasikan melalui budgeting dan monitoring, menerapkan SLG secara *group holding*, dan mendukung kegiatan operasional secara sinergis antar OpsCo (*support event*);
- Menjalankan sinergi bisnis yang lebih baik (*fostering business synergy*) dengan mengupayakan *sales synergy* (integrasi *loyalty program*), *operational synergy*, dan *marketing synergy*.

Dalam menentukan sejumlah strategi perusahaan, Direksi berperan aktif dalam proses formulasi strategi sejak dalam tahap memberi arahan strategis perusahaan, menyelaraskan strategi keseluruhan grup, menentukan strategi dan kebijakan, hingga memberi evaluasi dan menjalankan fungsi kendali terhadap implementasi strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

A good financial performance is greatly supported by a strong and integrated financial governance. Thus, Injourney has designed such group-wide governance, plans, and implementation with a goal of achieving the best financial performance in the industry, as well as created and implemented financial dashboard based on data management. Furthermore, Injourney has developed financial governance supported by risk culture by designing holistic intervention through an integrated risk management and committee investment, as well as measuring the risk maturity level.

In technical states, Injourney's future strategies include:

- *Improving the financing advantage by doing fundraisings for subsidiaries and collective internal funding;*
- *Determining an aligned development strategy through giving centered strategic directives from Injourney, aligning the Company's Work Plan and Budget and the Company's Long-Term Plan with all subsidiaries, as well as governing the hub-spoke and collaboration between airline – airport – destination;*
- *Conducting shared services optimization by leveraging the collective IT system, the efficient human resources educational program and training;*
- *Realizing operational engagement through budgeting and monitoring, implementing the SLG group holding, and supporting the operational activities among OpsCo synergically (support event);*
- *Fostering business synergy through sales synergy (integrated loyalty program), operational synergy, and marketing synergy.*

In determining a number of corporate strategies, the Board of Directors plays an active role in the strategy formulation process from providing strategic directives to the company, aligning the overall group strategies, determining strategies and policies, to providing evaluations and carrying out control functions on the implementation of the strategies and policies that have been determined.



Pencapaian Realisasi Terhadap Target Tahun 2021

Hingga Desember 2021, Injourney telah melaksanakan berbagai inisiatif antara lain rencana aktivasi *medium service airlines*, kolaborasi dengan Holding Rumah Sakit BUMN terkait KEK GIBB, pelaksanaan event World Superbike dan Persiapan MotoGP 2022, serta penataan Hotel anggota Injourney. Selain itu, melalui *co-borrower*, Injourney mendapat pinjaman modal kerja sebesar Rp500 miliar yang digunakan untuk operasional dan penyelesaian utang PT Survai Udara Penas (Persero) sebesar Rp145 miliar. Dalam periode ini, Injourney juga telah menyiapkan *Calendar of Event* dan kajian destinasi pariwisata baru.

Dalam lingkup kolaborasi antar-Holding dan anggotanya, serta dalam rangka pencegahan penularan virus COVID-19, diberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat khususnya untuk moda transportasi udara. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di tiap daerah berdampak pada penurunan kinerja pada sektor *Airport Management*. Penurunan terjadi pada pergerakan pesawat, penurunan jumlah penumpang dan kargo. Pergerakan pesawat di seluruh bandara Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II tercatat menurun sebesar 9,8%. Meski demikian, penurunan tersebut telah mampu melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2021 dengan angka capaian sebesar 110%. Untuk pergerakan kargo selama tahun 2021, terdapat 1.388.114 ton pergerakan kargo, meningkat 25,5%. Pergerakan kargo mampu melampaui target yang ditentukan RKAP dengan angka realisasi sebesar 120,9%.

Pada sektor *destination development*, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari seluruh pintu masuk di tahun 2021 hanya mencapai 1,48 juta wisatawan, menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang mampu mencapai angka 4,05 juta wisatawan.

Dari sisi *heritage management*, pengguna jasa *heritage park* didominasi oleh wisatawan nusantara sebanyak 257.978 orang dan 243 wisatawan mancanegara pada tahun 2021. Meskipun mendominasi pariwisata kunjungan ke *heritage park*, jumlah wisatawan nusantara dicatat menurun cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2020.

The Achievement of Target Realization in 2021

As of December 2021, Injourney has carried out several initiatives, including the plan to activate medium service airlines, collaboration with SOE Hospital Holding related to GIBB SEZ, implementation of the World Superbike event and preparation of the 2022 MotoGP, as well as arrangement of hotels for Injourney members. In addition, through a co-borrower, Injourney received a working capital loan of Rp500 billion used for operations and settlement of PT Survai Udara Penas (Persero) debt of Rp145 billion. During this period, Injourney has prepared a Calendar of Events and review of new tourism destinations.

Within the scope of collaboration between Holding and its members, as well as in the order to prevent the transmission of the COVID-19 virus, there has been social restriction especially for air transportation. The implementation of this restriction in almost all region has affected the performance of Airport Management. There has been a decline in aircraft traffics, passengers, and cargos. The aircraft traffics at all Angkasa Pura I and II airports have been significantly getting down as much as 9.8%. However, the number already passed the initial target mentioned in the Company's 2021 Work Plan and Budget by 110%. Meanwhile, there were 1,388,114 tons of cargo during 2021; in conclusion, the cargo traffic experienced an increase by 2.5%. The cargo traffic also surpassed the estimated target stated in the Company's 2021 Work Plan and Budget by 120.9%.

Meanwhile, the destination development sector also experienced a decline. In 2021, there were only 1.48 million international tourists, which was significantly lower than the number in 2020 that peaked at 4.05 million visitors.

On the other hand, during 2021, the heritage management sector was dominated by local tourists as much as 257,978 people and there were only 243 international tourists. However, this number of local tourists was still significantly lower compared to 2020.



Pada sektor *demand management*, jumlah kamar hotel yang tersedia untuk dijual sebesar 685.212, turun mengalami penurunan dari realisasi tahun 2020. Penurunan juga terjadi pada jumlah tamu yang datang dengan 171.139 orang pada tahun 2021. Jumlah kamar yang dihuni sepanjang tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 39,1% dibanding realisasi pada tahun 2020.

Pada sektor *retail management*, penjualan retail tahun 2021 mencapai Rp8,301 miliar, turun sebesar Rp12,20 miliar atau 59,5% atau dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang mencapai Rp20,51 miliar. Penurunan ini umumnya dikontribusikan oleh dampak dari pandemi COVID-19 serta proses perubahan konsep Gedung Sarinah yang dibuka kembali pada tahun 2022. Penurunan terjadi baik di segmen perdagangan dan persewaan. Namun demikian, penjualan Sari Valas di tahun 2021 mencapai Rp607,76 miliar, meningkat Rp357,69 miliar atau sebesar 143% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mencapai Rp250,07 miliar.

Furthermore, the demand management sector recorded that there were 685,212 hotel rooms reserved in 2021, which was lower than 2020. There was also a declining number of hotel guests; during 2021, there were only 171,139 people visited hotels. Overall, the number of rooms occupied during 2021 was decreasing by 39.1% compared to the realization in the 2020 periode.

In the retail management sector, retail sales in 2021 was Rp8,301 billion, a decrease of Rp12.20 billion or 59.5% compared to the realization in 2020 of Rp20.51 billion. The decline was mainly caused by the COVID-19 pandemic and the changing concept of Sarinah Building to reopen in 2022. The decline occurred in the trading and rental segment. However, Sari Valas sales in 2021 were recorded at Rp607.76 billion, an increase of Rp357.69 billion or 143% compared to 2020 of Rp250.07 billion.

Pendapatan usaha konsolidasian Injourney dikontribusikan oleh anak-anak perusahaan. Pendapatan konsolidasian Injourney terealisasi sebesar Rp9,73 triliun, mencapai 107,8% dari RKAP konsolidasian dan sedikit menurun sebesar 6,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 yaitu sebesar Rp10,46 triliun. Walaupun mengalami penurunan secara umum akibat kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, Perseroan mencatat pencapaian yang melampaui RKAP pada kinerja pendapatan pada empat anak-anak perusahaan, yakni PT Angkasa Pura I (104,6%), PT Angkasa Pura II (114,1%), PT Sarinah (135,4%), dan PT Taman Wisata Candi (121,5%).

Di tengah upaya memulihkan perekonomian melalui sektor aviasi dan pariwisata, Injourney memandang masa depan dengan penuh optimisme. Dengan keyakinan atas strategi dan kolaborasi serta sinergi dengan Pemerintah, antaranak perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan, kita siap merengkuh masa depan pariwisata Indonesia bertaraf internasional yang berjaya.

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

Secara umum, terdapat empat tantangan umum pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia. Pertama, kualitas infrastruktur pariwisata Indonesia yang

Injourney's consolidated operating revenues are contributed by the subsidiaries. the Company's consolidated revenue was realized at Rp9.73 trillion, reaching 107.8% of the consolidated RKAP and a slight decrease of 6.9% compared to the same period in 2020 of Rp10.46 trillion. Despite the general decline due to the ongoing COVID-19 pandemic, the Company recorded achievements four subsidiaries that surpassed the Work Plan and Budget, they were: PT Angkasa Pura I (104.6%), PT Angkasa Pura II (114.1%), PT Sarinah (135.4%), and PT Taman Wisata Candi (121.5%).

Amids the economic recovery through aviation and tourism sector, Injourney has been very optimistic toward the bright future ahead. Carrying in a strong belief in the strategy and collaboration as well as synergy with the Government, subsidiaries, and all stakeholders, we are ready to seize the bright future of Indonesia's international-standard tourism.

Obstacles and Challenges Faced

Generally, there are four common challenges faced by the Indonesia's tourism industry. First, the quality of tourism infrastructure that needs to be

masih harus dioptimalkan. Kualitas infrastruktur dapat dinilai berdasarkan tiga parameter, yakni aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Kedua, investasi yang diperlukan untuk pengembangan sektor pariwisata membutuhkan investasi yang besar, terutama untuk mengembangkan sepuluh destinasi prioritas hingga tahun 2024 senilai sekitar USD35 miliar. Kebutuhan atas investasi yang diperlukan ditargetkan berasal dari investasi kepariwisataan dari *Foreign Direct Investment* (FDI), *Domestic Direct Investment* (DDI), investasi Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), maupun investasi swasta. Ketiga, sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni merupakan komponen utama sektor pariwisata yang sarat akan pelayanan (*service*). Keempat, implementasi regulasi kerap menjadi tantangan, terutama terkait pembebasan lahan yang akan dikembangkan menjadi destinasi pariwisata. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan relaksasi dan kemudahan dalam berusaha juga menjadi peluang bagi para pelaku pariwisata untuk melakukan pemulihan dan pengembangan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19.

Di sisi lain, sektor aviasi juga memiliki tantangan tersendiri. Pertama, pengelolaan pergerakan penumpang yang belum merata, melebihi kapasitas, dan masih terkonsentrasi di lima bandara utama: Soekarno Hatta, Ngurah Rai, Juanda, Sultan Hasanuddin, dan Kualanamu, yang secara kolektif menguasai 55% pangsa pasar. Pergerakan penumpang perlu dikelola agar lebih merata dan memaksimalkan kapasitas bandara lain, sehingga skala perekonomian yang optimal dapat tercapai. Kedua, konektivitas transportasi yang menghubungkan antardaerah menjadi sangat krusial, terutama bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Pengembangan jaringan penerbangan, optimalisasi dan keseimbangan kapasitas dan infrastruktur menjadi persyaratan terciptanya konektivitas yang baik. Struktur kebandaraan Indonesia saat ini telah membentuk sistem *hub and spoke* yang membagi bandara-bandara berdasarkan hierarki skala pelayanan primer, sekunder, tersier, dan pengumpan. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi domestik antara bandara primer dan sekunder sudah terbentuk dengan baik. Ketiga, keamanan, keselamatan, dan regulasi menuntut Indonesia untuk terus meningkatkan layanan dan menjamin keselamatan penerbangan. Keempat, dinamika pasar yang diwarnai oleh persaingan *low-cost carrier* (LCC) menuntut maskapai domestik untuk

improved. The quality of our infrastructure can be considered by taking a look at three parameters: accessibility, amenity, and attraction. Second, the investment needed to develop this sector is massive, especially to develop the ten super priority destinations until 2024. The estimated investment needed is as much as US\$35 billion. The investment that this country needs is targeted to come from tourism investment from Foreign Direct Investment (FDI) and Domestic Direct Investment (DDI), governmental investment from National Capital Participation, or private investment. The third challenge is the human resources; Indonesia needs excellent human resources that will become the main component in the tourism sector that focuses on service-giving. The last challenge is the regulation implementation, especially those related to land-release. However, Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning about the Law of Job Creation that eases business processes has also become an opportunity for tourism people to plan a recovery and development of tourism sector after the COVID-19 pandemic.

On the other hand, aviation sector has also have its own challenges. First, there are still any unequal passenger traffics, overloaded capacity concentrated only at these five main airports: Soekarno Hatta, Ngurah Rai, Juanda, Sultan Hasanuddin, and Kualanamu that collectively occupy the 55% of the overall market. Thus, the passenger traffic shall be managed well in order to be fair for other airports, as well as optimizing the capacity of less favorite airports; thus, an optimized economic of scale can be achieved. Second, the transportation connectivity across region has become very crucial, especially for an archipelago nation such as Indonesia. The development of flight network and the optimized and balanced capacity as well as infrastructure are the main requirements to create good connectivity. The structure of Indonesia's airports has now been equipped with hub and spoke system that divides the airports based on the hierarchy of primary, secondary, tertiary, and feeder service scale. This indicates that the domestic connection between primary and secondary airports has been well applied. Third, the security, safety, and regulations applied have demanded Indonesia to keep improving their services as well as ensuring the flight safety. Fourth, the dynamic market overshadowed by low-cost carrier (LCC) competition has forced domestic airlines to strengthen their branding



memperkuat *branding* di tengah persaingan yang ketat. Terakhir, pelayanan transportasi udara dituntut untuk berevolusi mengikuti tren makroekonomi dan pengembangan dunia digital, baik dari sisi operasi maupun pelayanan.

Namun demikian, tantangan-tantangan tersebut turut diikuti oleh peluang pengembangan usaha bagi Injourney dan anak usaha. Injourney sebagai Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung memiliki keunikan dan keunggulan spesifik, serta peran strategis untuk melaksanakan pemetaan anak usaha yang sesuai dengan lini bisnis dan mengonsolidasi portofolio. Dengan membawahi anak-anak perusahaan yang telah memiliki model bisnis berkelanjutan dengan daya saing, kapasitas, dan kapabilitas unggul, keunggulan skala ekonomi dan akumulasi kompetensi dari seluruh portofolio anak usaha akan dapat tercapai. Dengan demikian, pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung merupakan solusi holistik, kolaboratif, dan inklusif dari tantangan-tantangan yang ada.

Sebagai upaya mengakselerasi pemulihan akibat COVID-19, manajemen telah menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka akselerasi sektor aviasi & pariwisata. Injourney sebagai Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung pada ekosistem aviasi dan pariwisata memperkuat kolaborasi dan konsolidasi antarlembaga. Pemetaan *subcluster* anak perusahaan ke dalam ekosistem pariwisata ditujukan untuk mempercepat pengembangan proyek/bisnis *existing*, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan portofolio, serta sinergi bisnis antaranak perusahaan. Pada akhirnya, Injourney akan menjadi *one solution platform* penyedia pengalaman pariwisata yang *seamless* bagi *customer* di sepanjang rantai pasok pariwisata di Indonesia, dari tahap promosi dan *awareness*, perencanaan, aksesibilitas dan transportasi, akomodasi, dan destinasi.

Dalam upaya melaksanakan konsolidasi portofolio, Injourney juga telah memetakan sejumlah tantangan lain yang dihadapi selain COVID-19, antara lain:

1. Injourney perlu menyelesaikan serangkaian proses terkait tata kelola keuangan dan pendanaan dalam proses pembentukan Holding, antara lain penerimaan Penyertaan Modal Negara (PMN), restrukturisasi piutang anak usaha, penataan portofolio usaha anak dan cucu perusahaan, serta kondisi keuangan anak usaha yang sempat terdampak pandemi COVID-19;

amids the strict competition. The last challenge is that air transportation services needed to undergo an evolution in order to follow the trend of macroeconomy as well as digitalization, both in operational and services.

However, those challenges have carried new business opportunities for Injourney and subsidiaries to develop more and more. As the SOE Holding in Tourism and Support Services, Injourney posses a specific uniqueness and excellence, as well as plays a strategic role to conduct a subsidiary mapping based on their business line and consolidating their portfolios as well. Hand-in-hand with these subsidiaries that already have sustainable business with great competitiveness, capacity, and excellent capability, the Company will be able to achieve an excellent economic scale and accumulated competency from all subsidiaries' portfolios. Thus, the establishment of SOE Holding in Tourism and Support Services is a holistic, collaborative, an inclusive solutions to topple those challenges.

Injourney, as the SOE Holding in Tourism and Support Services in the ecosystem of aviation and tourism has made powerful collaboration and consolidation across-institution in order to accelerate the post-pandemic recovery. The board of management has determined various strategic actions to accelerate the recovery in aviation and tourism sector. By mapping the subsidiary subcluster into the ecosystem, the company will be able to accelerate the existing project/business development, increase the effectiveness and efficiency of portfolio management, as well as create synergy among the subsidiaries. Eventually, Injourney will become the one solution platform that provides seamless tourism experiences for the customer in all tourism supply chains throughout Indonesia; from the promotion and awareness stage, planning, accesibility, and transportation, accomodation, and destinations.

In order to conduct portfolio consolidation, Injourney has mapped some other challenges faced besides COVID-19, they are:

1. *Injourney shall complete a series of processes related to financial and funding governance during the process of establishing the Holding, such as State Equity Participation receipts, restructuring of subsidiary receivables, structuring the business portfolio of the company's subsidiaries and second-tier subsidiaries, as well as the subsidiaries' financial condition affected by the COVID-19 pandemic;*

2. Belum adanya sistem layanan terstandar bagi seluruh holding dan terintegrasi ke seluruh anak usaha di InJourney yang berpengaruh pada layanan terhadap pengguna jasa yang kurang optimal;
3. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen secara *real time* yang dapat diakses oleh anggota holding;
4. Belum adanya *platform digital* pariwisata yang terintegrasi antarmember dan mudah diakses bagi pengguna jasa;
5. Tuntutan peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan daya saing;
6. Belum adanya *service culture* yang terintegrasi antaranak perusahaan;
7. Belum ada strategi dan program pemasaran yang terintegrasi antaranak perusahaan.

Untuk mendukung aspek teknis, InJourney juga melakukan pengembangan *platform digital* baik untuk mendukung kinerja operasional di lingkup internal maupun wadah promosi layanan pariwisata kepada para pengguna jasa di lingkup eksternal. Pengembangan *platform digital* yang dilakukan InJourney sepanjang tahun 2021 mencakup *e-office*, website resmi InJourney, *platform Rinjani (InJourney Talent Management and Career Path System)*, *payment gateway 'InJourney*, dan *SSO Procurement*. Dengan demikian, pengembangan *platform digital* yang selaras dengan pengelolaan *Human Capital* yang baik diharapkan mampu menjawab setiap tantangan yang dihadapi baik di lingkup internal InJourney maupun seluruh lingkup anak perusahaan InJourney.

InJourney menyiapkan strategi pemulihan sektor pariwisata yang terdiri dari beberapa aspek kepariwisataan yang meliputi aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Dalam hal program atraksi pariwisata, InJourney telah menyiapkan *calendar of events* dalam *three key tourism programs* yaitu *sport, art & music, cultural & culinary* yang dikemas dalam "InJourney Festival".

Prospek Usaha Tahun 2022

InJourney melihat prospek usaha di tahun 2022 sebagai masa bangkitnya sektor aviasi dan pariwisata. The International Air Transport Association (IATA) memprediksi bahwa perkembangan trafik penumpang secara global hingga 2037 akan menjanjikan rata-rata pertumbuhan 3,5% per tahun, atau hampir dua kali dari jumlah penumpang saat ini, dengan potensi pertumbuhan paling tinggi di pasar Asia Pasifik. Pemulihan trafik di masa depan tetap diantisipasi

2. *The absence of standardized service system for all holdings that integrate into all subsidiaries in InJourney has caused less optimized customer service;*
3. *Management Information System to be accessed by Holding members in a real-time has not been integrated;*
4. *The absence of an integrated tourism digital platform between members accessible for service users;*
5. *Demands for improving the quality of human resources to increase competitiveness;*
6. *The absence of integrated service culture among subsidiaries;*
7. *The absence of an integrated marketing strategy and program among subsidiaries.*

To support the technical aspect, InJourney has developed a digital platform to support operational performance in the internal scope and a forum for promoting tourism services to service users in the external scope. Throughout 2021, InJourney's digital platform development included e-office, InJourney's official website, Rinjani platform (InJourney Talent Management and Career Path System), InJourney's payment gateway, and SSO Procurement. Therefore, the development of the digital platform in line with the good Human Capital management is expected to answer all challenges faced within InJourney's internal scope and throughout the subsidiaries.

InJourney has prepared a recovery strategy for the tourism sector consisting of several tourism aspects, including accessibility, amenity, and attraction. As for tourism attraction programs, the Company has prepared a calendar of events in "the three key tourism programs", namely sport, art & music, cultural & culinary events all packed in "InJourney Festival".

Business Prospect of 2022

InJourney sees the business prospect in 2022 as the revival of the aviation and tourism sectors. The International Air Transport Association (IATA) predicted that the development of global passenger traffic by 2037 would reach an average growth of 3.5% per year, or almost twice the current number of passengers, with the highest growth potential in the Asia Pacific market. Future traffic recovery has been anticipated with various strategies and policies of the Company. Despite



dengan berbagai macam strategi dan kebijakan Perseroan. Meskipun mengalami keterpurukan di sektor pariwisata dan pendukung yang signifikan saat pandemi COVID-19, potensi pariwisata di Indonesia cukup menjanjikan.

Sektor aviasi diprediksi membaik pada awal tahun 2022, terutama penerbangan domestik. Pemulihan optimal diprediksi terjadi tahun 2024. Penerbangan internasional diperkirakan membaik pada akhir 2023, dan optimal pada tahun 2026. Proyeksi pergerakan angkutan udara pada tahun 2022 untuk 3 skenario dengan *baseline* tahun 2019 adalah pesimis (44%), sedang (49%) dan optimis (67%).

Kebijakan pelonggaran pembatasan kegiatan, tingkat vaksinasi tinggi yang menjadi *game changer* pemulihan ekonomi, pembukaan rute internasional ke Bali per November 2021, serta kebijakan cuti bersama hari raya Idulfitri 2022 yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi angin segar untuk awal langkah InJourney. Selain itu, Indonesia telah siap menyelenggarakan *event-event* internasional seperti MotoGP, World Superbike (WSBK), dan Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang menjadi momentum pembukaan panggung pariwisata Indonesia kembali ke kancah dunia.

United Nations World Tourism Organization memperkirakan bahwa Indonesia yang saat ini menempati posisi ke-21 dalam hal ukuran pasar pariwisata berpotensi akan naik ke posisi ke-17 di tahun 2030 dengan total nilai pasar sekitar USD42 miliar. Namun demikian, pariwisata 2022 masih sulit diprediksi secara pasti – namun beberapa tren baru akan muncul: upaya inisiatif memberikan keamanan 100% bagi konsumen dari penyedia, penguatan pengujian COVID-19, durasi perjalanan yang lebih lama, serta perjalanan yang lebih sadar iklim dan edukasi.

Pada tahun 2021, InJourney telah menetapkan rencana pemulihan pariwisata Indonesia melalui pengembangan subkluster:

Airport Management

InJourney tengah merencanakan untuk restrukturisasi dan penyehatan keuangan PT Angkasa Pura I yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Selain itu, untuk mempersiapkan KTT G20, InJourney bersama PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II mempersiapkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta sebagai

experiencing a significant slump in the tourism and supporting sectors during the COVID-19 pandemic, the prospect of Indonesia's tourism industry is promising.

The aviation sector is predicted to recover in early 2022, especially domestic flights. Optimal recovery is predicted to occur in 2024. International flight is predicted to improve by the end of 2023, and fully recovered in 2026. In 2022, the projection of aircraft traffic is divided into three scenarios with a 2019 baseline: pessimistic (44%), moderate (49%), and optimistic (67%).

The easing of community activity restrictions, the massive vaccination program as a game-changer for economic recovery, the re-opening of international routes to Bali as of November 2021, as well as the 2022 Eid collective leave assigned by the Government are such a breath of fresh air for InJourney's initial measures. Furthermore, Indonesia has been ready to host various international events such as MotoGP, World Superbike (WSBK), and G20 Summit as the momentum to show off the Indonesian tourism to the world.

United Nations World Tourism Organization estimates that Indonesia, which currently occupies the 21st position in tourism market size, has the potential to rise to 17th position by 2030 with a total market value of around USD 42 billion. However, the tourism state in 2022 is unpredictable – but several new trends will emerge: initiatives to provide 100% safety for consumers from providers, stronger COVID-19 tests, longer travel duration, as well as climate-aware travel and education.

In 2021, InJourney established Indonesia's tourism recovery planning through the development of sub-clusters:

Airport Management

InJourney has planned to restructure and recover the finances of PT Angkasa Pura I, which has been affected by the COVID-19 pandemic. In addition, to prepare for the G20 Summit, InJourney together with PT Angkasa Pura I and PT Angkasa Pura II has prepared I Gusti Ngurah Rai International Airport in Bali and Soekarno Hatta International Airport in Jakarta as gateways to Indonesia, the airports



gerbang Indonesia yang siap untuk menyambut kedatangan para delegasi. Selain itu, Injourney juga tengah mempersiapkan kemitraan strategis untuk Bandara Internasional Kualanamu oleh PT Angkasa Pura II bersama GMR Airports Consortium.

Perusahaan juga mencatat pencapaian kebandarudaraan yang baik melalui PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II, yang telah merealisasikan komitmen bertahan di tengah kondisi penuh tantangan dengan menambahkan nilai tambah tinggi pada *value chain* industri penerbangan yang terintegrasi, terstruktur, dan didukung oleh teknologi informasi terdepan. Dalam upaya menyediakan layanan kebandarudaraan yang aman dan meningkatkan *traffic* di tengah pandemi COVID-19, bandara-bandara di bawah PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II melakukan mitigasi-mitigasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan transportasi udara. Integrasi layanan bandara dengan *Airport Health Center* dilakukan untuk melayani pemeriksaan antigen/PCR di area terminal dengan harga terjangkau serta mekanisme reservasi daring memudahkan penumpang memenuhi persyaratan penerbangan dengan mudah.

PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II pada tahun 2021 telah berhasil mengimplementasikan pengendalian anggaran (*cost leadership*) yang berujung pada efisiensi dan optimasi biaya. Capaian *cost leadership* direalisasikan tanpa mengurangi tingkat pelayanan (LOS & CSI) melalui efisiensi penggunaan utilitas, optimalisasi kontrak pemeliharaan peralatan, efisiensi penggunaan bahan bakar, serta optimasi biaya kalibrasi penerbangan. Namun demikian, di tengah inisiatif-inisiatif efisiensi dan optimasi biaya, apresiasi kami berikan kepada PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II pada tahun 2021 yang tetap berhasil menorehkan prestasi dalam aspek pelayanan melalui penghargaan *Best Airport* versi ASQ dan *Best Hygienes Measures by Region (Asia Pacific)* versi ACI.

Heritage Management

Injourney melalui PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC) tengah merencanakan pengembangan Zona 2 Borobudur dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas di area Taman Wisata Candi Borobudur melalui program-program yang selaras dengan pelestarian, perlindungan dan *visitor management*. Luas lahan yang dikelola mencapai 72 ha, mengusung konsep *Visitor Management Plan*, serta melibatkan

were ready to welcome the delegates' arrival. In addition, Injourney has prepared a strategic partnership for Kualanamu International Airport by PT Angkasa Pura II with GMR Airports Consortium.

The company also recorded good airport achievements through PT Angkasa Pura I and PT Angkasa Pura II which have succeeded in realizing the commitment to survive amid the challenging conditions by adding high added value to the aviation industry value chain that is integrated, structured, and supported by advanced information technology. In an effort to provide secured airport services and increase traffic amid the COVID-19 pandemic, the airports under PT Angkasa Pura I and PT Angkasa Pura II have carried out mitigations to increase public confidence in using air transportation. The integration of airport services with the Airport Health Center is aimed to serve antigen/PCR tests in the terminal area at affordable prices and the online reservation mechanism facilitates passengers to meet flight requirements.

In 2021, PT Angkasa Pura I and PT Angkasa Pura II have successfully implemented cost leadership that led to cost efficiency and cost optimization. Cost leadership has been implemented without lowering the level of service (LOS & CSI) through efficient use of utilities, optimization of equipment maintenance contracts, efficient use of fuel, and optimization of flight calibration costs. However, amid cost efficiency and cost optimization initiatives, we would like to express our appreciation to PT Angkasa Pura I and PT Angkasa Pura II in 2021 for remarkable achievements in the service aspect proven by Best Airport award by ASQ and Best Hygienes Measures by Region (Asia Pacific) award by ACI.

Heritage Management

Injourney through PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC) has been planning to develop Borobudur Zone 2 in order to improve the quality of service and facilities in the area of Borobudur Temple. The development programs will be aligned with the principle of preservation, protection, and visitor management. The managed land area reaches 72 ha, carrying out Visitor Management Plan concept, and involves more than 3,000 kiosks, stalls, and



lebih dari 3.000 kios, lapak, dan jasa sebagai kontribusi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko juga tengah merencanakan pengembangan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Retail Management

Injourney tengah melaksanakan pembangunan berkelanjutan transformasi bisnis Sarinah yang menaungi bisnis ritel, perdagangan, dan properti. Sarinah, yang merupakan pusat perbelanjaan pertama yang historis di Indonesia, telah menjalani revitalisasi dan akan dibuka kembali pada tahun 2022.

Demand Management

Pengelolaan pemasaran, penjualan, dan *branding* terintegrasi dari anggota Holding yang dikelola PT Hotel Indonesia Natour (HIN). Ke depan, Injourney telah menetapkan rencana-rencana strategis dalam rangka menyambut momentum pulihnya pariwisata Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang rencananya akan diselenggarakan pada akhir tahun 2022 juga akan menjadi titik balik yang diharapkan mampu mengakselerasi kebangkitan ekonomi pada sektor pariwisata dan pendukung.

Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, **pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan (KEK) Grand Inna Bali Beach Sanur**, akan menjadi salah satu langkah diversifikasi ekonomi. Injourney tengah merencanakan pengembangan layanan kesehatan satu pintu bertaraf internasional berupa pengembangan rumah sakit internasional. Melalui Injourney, Kementerian BUMN menginisiasi terobosan dan sinergi yang akan mentransformasi area Sanur menjadi destinasi baru pariwisata, kesehatan, dan kebugaran di Asia yang kompetitif, mandiri, dan berdaulat, bahkan menjadi kawasan ekonomi khusus kesehatan pertama Indonesia.

Revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), untuk mendukung marwah TMII dan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di tahun 2022 akan mentransformasi TMII menjadi The New TMII Cultural Park yang berfokus pada: *Community Engagement, Cultural Entertainment Education & Preservation, Tourism dan International Events*. Pengelolaan TMII oleh PT Taman Wisata Candi diawali penyusunan Masterplan Visioning TMII, salah satunya melalui revitalisasi bangunan TMII dengan berkolaborasi dengan PUPR.

services as a contribution to the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Furthermore, PT TWC, in collaboration with the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), has also planned another development in Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Retail Management

Injourney has been conducting sustainable development for Sarinah's business transformation. Sarinah, Indonesia's first historical shopping center, is home to retail business, trading, and property; and recently, it has undergone a revitalization and will reopen in 2022.

Demand Management

Integrated marketing, trading, and branding from Holding members are under the management of PT Hotel Indonesia Natour (HIN). Going forward, Injourney has set several strategic plans to welcome the momentum of Indonesia's tourism recovery. Furthermore, the G20 Summit to be held by the end of 2022 is going to be another turning point to accelerate the economic recovery in the tourism and supporting sectors.

Quoting President Joko Widodo's statement, **the Grand Inna Bali Beach Sanur Special Economic Zone (SEZ) development** will become one of the measures of economic diversification. Injourney has planned to develop an international-standard one-stop health service by constructing an international hospital. Through Injourney, the Ministry of SOEs has initiated a breakthrough and synergy to transform Sanur area into a competitive, independent, integrated new tourism, health, and wellness destination in Asia and becomes Indonesia's first health special economic zone.

The Revitalization of Taman Mini Indonesia Indah (TMII); The revitalization of Taman Mini Indonesia Indah (TMII) to support the pride of TMII and the G20 Summit in 2022 will transform TMII into The New TMII Cultural Park focusing on: *Community Engagement, Cultural Entertainment Education & Preservation, Tourism and International Events*. The management of TMII by PT Taman Wisata Candi is initiated with the preparation of TMII Visioning Masterplan, including through the revitalization of TMII buildings in collaboration with the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR).



Corporate Transformation yang mencakup transformasi *Hotel & Travel Management*, *Indonesia Heritage Management*, dan *Retail*. Transformasi *hotel & travel management* berada di bawah PT Hotel Indonesia Natour, yang pasca-*spin-off* akan mengarah ke bisnis *travel management* dan *asset management & developer*. Platform digital yang akan dikembangkan PT Hotel Indonesia Natour akan menjadi pusat informasi pariwisata, mengembangkan *personalized & complete bundled travel package* dan mendorong *tourism demand* Indonesia. Selain itu, transformasi *heritage management* berada di bawah PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, berupa pengembangan kawasan Zona 2 Borobudur yang akan meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas di area Candi Borobudur melalui program-program yang selaras dengan pelestarian, perlindungan, dan manajemen pengunjung. *Retail transformation* berada di bawah PT Sarinah. Revitalisasi dan pembukaan kembali Mall Sarinah merupakan transformasi bisnis Sarinah yang membuka peluang lebih luas kepada Sarinah untuk mengelola bisnis ritel, trading, dan properti di era bisnis digital, sekaligus berkolaborasi dengan anak perusahaan Injourney lainnya dalam meningkatkan pendapatan, nilai tambah, dan layanan.

Corporate Transformation; *Corporate Transformation includes the transformation of Hotel & Travel Management, Indonesia Heritage Management, and Retail. Hotel & travel management transformation is under PT Hotel Indonesia Natour, which will lead to the travel management and asset management & developer businesses post-spin-off. Meanwhile, the digital platform developed by PT Hotel Indonesia Natour will become the center of tourism information, developing personalized & complete bundled travel packages and encouraging the tourism demand in Indonesia. In addition, the transformation of heritage management is under PT Taman Wisata Candi. The transformation includes the development of the Borobudur Zone 2 area that will help improve the quality of service and facility in Borobudur Temple. The development programs for this area will be aligned with the principle of preservation, protection, and visitor management. As for Retail transformation, it will be handled by PT Sarinah (Persero). The revitalization and re-opening of Sarinah Mall is a form of Sarinah's business transformation that opens up wider opportunities for Sarinah to manage its retail, trading, and property business in the digital era as well as to collaborate with other Injourney's subsidiaries in order to increase revenue, added value, and services*

Penyelenggaraan ajang bergengsi internasional **MotoGP 2022** yang ke depannya dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) akan diselenggarakan di destinasi wisata kelas dunia, Mandalika. Sebagai event MotoGP pertama di Indonesia setelah Grand Prix tahun 1997, event MotoGP 2022 merupakan bagian dari pengembangan *demand creation* KEK Mandalika, upaya pemulihan ekonomi dan pariwisata, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, peningkatan kredibilitas negara, dan mendukung pertumbuhan UMKM.

Strategi pemasaran "**Creating Value from Journey and Joy**" melalui *integrated marketing*, kolaborasi antarlembaga, dan program pariwisata kunci (*sports, art & music, dan cultural & culinary*) untuk meningkatkan *branding* pariwisata Indonesia.

The holding of the prestigious international MotoGP 2022 event under the management of PT Pembangunan Wisata Indonesia (Persero) or the Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) will be held at the world-class tourist destination, Mandalika. As the first MotoGP event in Indonesia after the 1997 Grand Prix, the 2022 MotoGP is part of the development of Mandalika SEZ demand creation, economic and tourism recovery efforts, especially West Nusa Tenggara Province, improvement of the country's credibility, and development of MSMEs.

A marketing strategy called "**Creating Value from Journey and Joy**" is established through an *integrated marketing, cross-institution collaboration, and key tourism program (sports, art & music, and cultural and culinary)* to enhance Indonesia's tourism branding.



Destination Management

Injourney berkolaborasi dengan anak-anak usaha serta berbagai lembaga di Indonesia untuk mengembangkan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Sepanjang tahun 2021, Injourney telah mempersiapkan diri untuk mampu menyelenggarakan event berskala internasional seperti World Superbike (WSBK) 2021, MotoGP, dan event lain yang akan dikelola oleh ITDC yang hingga akhir tahun 2021 masih dalam proses penggabungan ke subkluster Demand Management. Pengembangan kelima DPSP ini mencakup pengembangan bandar udara, jaringan hotel, manajemen destinasi, KEK & infrastruktur kelas dunia yang menawarkan layanan dari aksesibilitas, atraksi dan destinasi, *amenities*.

Prospek industri pariwisata di masa depan tentu akan semakin terbuka dengan dorongan faktor-faktor eksternal, seperti kebijakan dan infrastruktur pendukung, pertumbuhan sektor swasta dan kapabilitas investasi, dan pengembangan kualitas SDM.

Destination Management

Injourney collaborated with the subsidiaries and other institutions in Indonesia to develop 5 Super Priority Tourism Destinations, including Lake Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, and Likupang. In 2021, Injourney prepared to organize international scale events, such as World Superbike (WSBK), MotoGP, and other events under the management of TDC. As of the end of 2021, TDC was in the merging process into the Demand Management sub-cluster. The development of the five Super Priority Tourism Destinations (DPSPs) includes the development of airports, hotel networking, destination management, Special Economic Zone (SEZ) & world-class infrastructure that offers services from accessibility, attraction and destination, as well as amenities.

Prospect of the future tourism industry will be more open driven by external factors, such as supporting policy and infrastructure, private sector development and investment capabilities, as well as the development of quality human resources.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Injourney sebagai Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung memiliki komitmen untuk menjunjung praktik-praktik terbaik tata kelola perusahaan, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 juncto No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

The Implementation of Corporate Governance

As the SOE Holding in Tourism and Support Services, Injourney is committed to upholding the best practices of corporate governance, in accordance with the Minister of Minister of SOE Regulation Number PER-01/MBU/2011 juncto Number PER-09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs and Secretary to the Ministry of SOE Decree Number SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters for Assessing and Evaluating the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. The Company also implements the principles of good corporate governance, including transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality in accordance with the General Guideline for GCG from the National Committee on Governance (KNKG).

regulasi yang berlaku dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris yang mengemban fungsi pengawasan dan pembinaan, serta Direksi yang menjalankan fungsi pengelolaan. Struktur organisasi perusahaan berdasar pada SK No. KEP.002/INJOURNEY/11/2021.

Injourney menjunjung tinggi etika, transparansi, dan integritas dalam kegiatan operasional dan hubungan dengan semua pemangku kepentingan. Piagam Direksi (*Board of Directors' Charter*) yang telah disetujui Dewan Komisaris merupakan pedoman tegas dan jelas atas tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban Direksi dalam melaksanakan perannya di Perusahaan. Penerapan *whistleblowing system* (WBS) yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor PER.005/INJOURNEY/12/2021 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) menunjukkan komitmen Injourney untuk mewujudkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan transparan.

Perusahaan juga telah memiliki Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang antara lain mengatur tentang prinsip, etika dan pakta integritas, dan aspek teknis pengadaan barang dan jasa di Perseroan. Keputusan Direksi tentang Pedoman Pendanaan Internal merupakan pedoman pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dana kepada anak perusahaan maupun antar anak perusahaan.

Setelah diterbitkannya PP 72 Tahun 2021 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perum Survai Udara Penas menjadi Perseroan, pada tanggal 4 Oktober 2021, terdapat pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui SK-336 dan SK-337. Sehingga, Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat sebelumnya pada PT Survai Udara Penas (Persero) diberhentikan dan dibebaskan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*). Pada tanggal 14 Januari 2022, Maya Carolina Watono diangkat sebagai Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata.

The structure of Injourney's governance is in accordance with the applicable regulations in Laws No. 40/2007 concerning about Limited Enterprises that consists of: General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners that carries out monitor and coaching functions, and the Board of Directors that takes the management function. The organization structure of the company itself is referred to Decree No. KEP.002/INJOURNEY/11/2021.

Injourney upholds ethics, transparency and integrity in its operations and relationships with all stakeholders. The Board of Directors' Charter approved by the Board of Commissioners is a strict and clear guideline to the duties, responsibilities, rights and obligations of the Board of Directors in carrying out its roles within the Company. The implementation of whistleblowing system (WBS) as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. PER.005/INJOURNEY/12/2021 on Guidelines for Whistleblowing System demonstrates the Company's commitment to realizing good and transparent corporate governance practices.

The Company also has a Board of Directors' Decree on the Guidelines for Procurement of Goods/Services to regulate principles, ethics, and integrity pacts, as well as technical aspects of the procurement of goods and services in the Company. The decree of the Board of Directors on Guidelines for Internal Funding is a basis for the implementation of funding fulfillment for subsidiaries or inter-subsidiaries.

*After the issuance of Government Regulation No. 72/2021 on the transformation of Public Company (Perum) Survai Udara Penas into Limited Liability Company (Persero), on October 4, 2021, the Company's Board of Directors and Board of Commissioners were appointed through SK-336 and SK-337. Thus, the Board of Directors and Board of Commissioners previously serving at PT Survai Udara Penas (Persero) were dismissed and completely released from responsibility (*volledig acquit de charge*). On January 14, 2022, Maya Carolina Watono was appointed as Marketing and Tourism Program Director.*



Penutup

Kami, jajaran Direksi Injourney, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya Injourney mampu menjawab segala tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang terus memberikan dukungan dan arahan untuk memandu Kami dalam menentukan kebijakan strategis perusahaan. Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada Kementerian BUMN yang memberikan kepercayaan penuh kepada Injourney dalam menentukan arah sektor aviasi dan pariwisata di Indonesia. Kami menghaturkan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh Insan Injourney yang berdedikasi penuh untuk mengikuti setiap jejak langkah bersama Injourney. Tidak lupa, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berkolaborasi, bahu-membahu mewujudkan kembali pariwisata Indonesia yang gemilang.

Closing

We, the Board of Directors, would like to express our gratitude to God the Almighty for His blessings so that Injourney was able to address the challenges faced during 2021. We would also like to thank the Board of Commissioners that has always provided support and directives to guide us in determining the company's strategic policies. We also thank the Ministry of State-Owned Enterprises for the trust to Injourney in determining the direction of the aviation and tourism sectors in Indonesia. We express our greatest appreciation to all Injourney Personnel for their dedication to following every step with Injourney. Lastly, we would like to invite all stakeholders and the communities to collaborate, hand-in-hand, and pursue the goal of glorious Indonesia's tourism.

Jakarta, Juni 2022
Jakarta, June 2022


Bony Oskaria
Direktur Utama
President Director





**Surat Pernyataan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas
Laporan Tahunan PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) Tahun 2021**

*Statement of Board of Commissioner on Accountability of
PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) Annual Report 2021*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dalam Laporan Tahunan PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) tahun buku 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran Isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan.

We, the undersigned, testify that all information in PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) Annual Report fiscal year 2021 is presented in its entirety and we are fully responsible for contents accuracy in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Juni 2022

Jakarta, June 2022

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Triawan Munaf
Komisaris Utama
President Commissioner

Odo R.M. Manuhutu
Komisaris
Commissioner

Elwin Chandra Mochsin
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Wihana Kirana Jaya
Komisaris
Commissioner

Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) Tahun 2021

Statement of Board of Director Members on Accountability of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) Annual Report 2021

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dalam Laporan Tahunan PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) tahun buku 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan.

We, the undersigned, testify that all information in PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) Annual Report fiscal year 2021 is presented in its entirety and we are fully responsible for contents accuracy in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Juni 2022

Jakarta, June 2022

Direksi

Board of Directors



Dony Oskaria
Direktur Utama
President Director

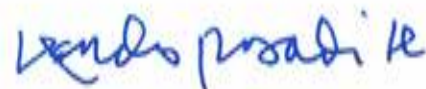


Edwin Hidayat Abdullah
Wakil Direktur Utama
Vice President Director



Maya Watono
Direktur Pemasaran dan Program
Pariwisata

Director of Marketing & Tourism Program



Herdy Harman
Direktur Sumber Daya Manusia dan Digital
Director of Human Capital & Digital



03

Profil Perusahaan

Company Profile

"Injourney sebagai Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung hadir untuk mengembangkan berbagai potensi di sektor aviasi dan pariwisata yang terintegrasi dengan seluruh segmen bisnis Anak Usaha dan didukung beragam Sumber Daya Manusia yang berkualitas"

"Injourney as the State-Owned Holding for Tourism and Supporting Sectors exists to develop various potentials in the aviation and tourism sector integrated with all business segments of its Subsidiaries and is supported by a variety of quality Human Resources"





<p>Nama Perusahaan Company Name</p>	<p>PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)</p> <p>Pada tahun 2021, Perusahaan mengalami perubahan nama dari PT Survai Udara Penas (Persero) atau "PENAS" menjadi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dalam rangka pembentukan perusahaan Holding BUMN Pariwisata & Pendukung oleh Pemerintah Republik Indonesia.</p> <p><i>In 2021, the Company underwent a name change from PT Survai Udara Penas (Persero) or "PENAS" into PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) in order to establish the State-Owned Holding Company for Tourism and Supporting Sectors by the Government of the Republic of Indonesia.</i></p>
<p>Kegiatan Usaha menurut Anggaran Dasar Terakhir</p> <p><i>Business Activities According to the Latest Articles of Association</i></p>	<p>InJourney melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan Holding di bidang pariwisata dan pendukung. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2021, InJourney melakukan kegiatan usaha lain berupa investasi dan konsultasi manajemen dalam sektor transportasi, pariwisata, retail, dan berbagai sektor lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.</p> <p><i>InJourney carries out business activities as a holding company for tourism and supporting sectors. In addition, in accordance with Government Regulation No. 72/2021, InJourney carries out other business activities, including investment and management consulting in the transportation, tourism, retail, and various other sectors related to business activities, as well as optimizing the utilization of the Company's (Persero) resources based on the principles of good corporate governance.</i></p> <p>Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar terakhir, InJourney melakukan kegiatan usaha utama yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas perusahaan Holding termasuk mendirikan atau turut serta dalam badan lain; 2. Aktivitas kantor pusat; 3. Investasi langsung dan tidak langsung; 4. Aktivitas restrukturisasi perusahaan/aset; dan 5. Aktivitas konsultasi manajemen. <p><i>Based on the provisions set forth in the latest Articles of Association, InJourney carries out main business activities, including:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Holding company's activities include establishing or participating in other entities; 2. Head office activities; 3. Direct and indirect investment; 4. The Company/asset restructuring activities; and 5. Management consulting activities. <p>InJourney wajib mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain menjalankan kegiatan usaha utama, InJourney juga dapat melakukan kegiatan usaha lain sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan Perseroan (Persero).</p> <p><i>InJourney is required to optimize the utilization of the Company's resources in accordance with the principles of good corporate governance. In addition to carrying out main business activities, InJourney may also carry out other business activities as an effort to optimize the utilization of resources owned by the Company (Persero).</i></p>
<p>Tanggal Pembentukan Holding Holding Establishment Date</p>	<p>6 Oktober 2021 <i>October 6, 2021</i></p>

Dasar Pembentukan Holding <i>Holding Establishment Basis</i>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) yang perubahan anggaran dasarnya sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Desman,S.H., M. Hum., Nomor 65 tanggal 15 Desember 2021 telah disetujui dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0076120.AH.01.02.TAHUN 2021 <i>Government Regulation No. 104/2021 on the Addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) whose amendment of the articles of association as stated in the Deed of Notary Desman, S.H., M. Hum., Number 65 dated December 15, 2021, has been approved and stipulated by the decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0076120.AH.01.02. 2021</i></p>
Modal Dasar <i>Authorized Capital</i>	<p>Rp260,000,000,000,000</p>
Modal Ditempatkan <i>Paid Up Capital</i>	<p>Rp65,164,367,000,000</p>
Status dan Kepemilikan <i>Status and Ownership</i>	<p>Badan Usaha Milik Negara, 100% milik Republik Indonesia <i>State-Owned Enterprises, 100% owned by the Republic of Indonesia</i></p>
Kantor Pusat <i>Head Office</i>	<p>PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Gedung Sarinah Lantai 14 JI MH Thamrin No.11, Jakarta Pusat, 10350 <i>Sarinah Building Floor 14</i> <i>JI MH Thamrin No.11, Central Jakarta, 10350</i></p>
Layanan Informasi <i>Information Services</i>	<p>Email: corsec@injourney.id Website: www.injourney.id Twitter: @injourneyID Instagram: @injourney.id Facebook: www.facebook.com/injourney.id/ Youtube: Injourney</p>
Jumlah Pegawai <i>Number of Employees</i>	<p>9,830 orang, per 31 Desember 2021 <i>9,830 people, as of December 31, 2021</i></p>
Data Jaringan Kantor <i>Office Network</i>	<p>1 Kantor Pusat 5 Entitas anak <i>1 Head Office</i> <i>5 Subsidiaries</i></p>
Entitas Anak <i>Subsidiaries</i>	<p>PT Angkasa Pura I PT Angkasa Pura II PT Hotel Indonesia Natour PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko PT Sarinah</p>



Logo Perusahaan

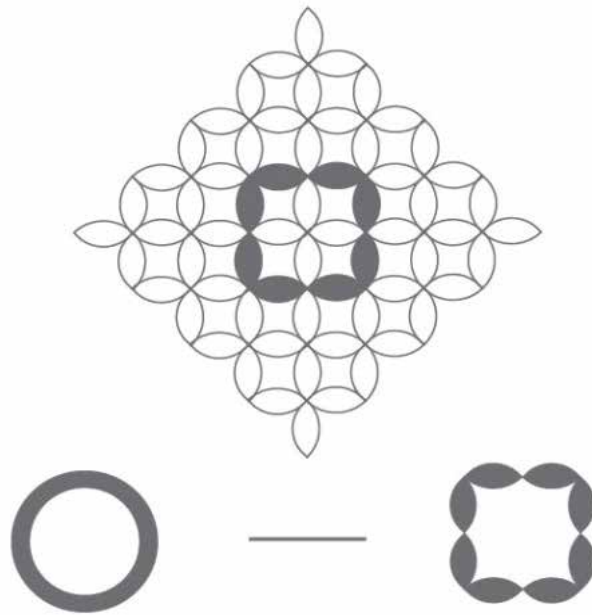
Logo Perusahaan



Injourney dalam logo perusahaan terdiri atas “IN” yang merepresentasikan Indonesia, sekaligus bermakna “Inbound” sebagai harapan perusahaan agar para turis datang dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata pilihan. Injourney memiliki arti “In a Journey” dan “Indonesian Journey” sebagai gambaran pengalaman perjalanan khas Indonesia. Lebih jauh lagi, “Injourney” merupakan gambaran dari seluruh layanan perusahaan yang mencakup transportasi, hotel, pariwisata, dan souvenir. Penamaan Injourney pada logo perusahaan juga bertujuan untuk memberikan kesan modern, global, dan dapat menangkap esensi pengalaman perjalanan customer.

Injourney in the company logo consists of “IN” representing Indonesia, which also means “Inbound” as the company’s expectations for tourist arrivals and makes Indonesia the tourism destination of choice. Injourney means “In a Journey” and “Indonesian Journey” as an overview of Indonesian travel experience.

Furthermore, “Injourney” is an overview of all the company’s services, including transportation, hotel, tourism, and souvenirs. The naming Injourney on the company logo also aims to give a modern, global impression, and can capture the essence of the customers’ travel experience.



Elemen grafis yang digunakan dalam “Injourney” pada huruf “O” terinspirasi dari pola batik kawung yang bermakna kesempurnaan dan merupakan representasi misi Injourney untuk memberikan pengalaman wisata di Indonesia yang sempurna. Pola berantai yang *infinite* atau tak terhingga di logo ini juga memiliki makna saling berkesinambungan, *seamless*, dan *unified* sebagai representasi dari penyatuan tujuh institusi BUMN dalam Injourney untuk mengembangkan pariwisata Indonesia.

Terdapat empat sisi yang diberikan warna berbeda dalam logo “Injourney”. Spektrum warna hangat merah dan jingga merepresentasikan layanan berkualitas serta menjanjikan pengalaman yang hangat dan menyenangkan. Warna biru dan hijau merupakan wujud agar Injourney terus bertumbuh dan dapat memberikan rasa nyaman bagi pelanggan. Keempat warna tersebut dipilih terinspirasi dari keindahan alam Indonesia dan sebagai cerminan Indonesia sebagai negara yang penuh keragaman baik dari segi alam dan budaya.

The graphic elements used in “Injourney” on the letter “O” are inspired by the kawung batik pattern which means perfection and is a representation of Injourney’s mission to provide a flawless travel experience in Indonesia. The infinite chain pattern in the logo has the meaning of being mutually sustainable, seamless, and unified as a representation of the unification of seven State-Owned Enterprises in Injourney to develop Indonesia’s tourism.

There are four sides with different colors in the “Injourney” logo. The warm red and orange color spectrum represents quality service and promises a warm and pleasant experience. The blue and green colors are a manifestation of the ever-growing Injourney to provide a sense of comfort for customers. The chosen four colors were inspired by the natural beauty of Indonesia and as a reflection of Indonesia as a geographically and culturally diverse country.



Riwayat Singkat Perusahaan

A Brief History of the Company

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) (selanjutnya dalam laporan ini disebut "Injourney") terbentuk atas arahan Presiden RI, Joko Widodo dalam rapat terbatas tentang penggabungan BUMN di sektor aviasi dan pariwisata pada tanggal 6 Agustus 2020. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memaparkan pandemi COVID-19 harus menjadi momentum konsolidasi dan transformasi di bidang aviasi dan pariwisata. Penataan rute penerbangan, penentuan hub, penentuan *super hub*, dan pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung diharapkan dapat memberikan akselerasi pada sektor pariwisata dan transportasi Indonesia.

Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas 6 Agustus 2020 tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir yang mengungkapkan akan membentuk Holding BUMN Pariwisata untuk meningkatkan sinergi dan mengoptimalkan potensi di sektor pariwisata dan pendukung.

Sebelum berganti nama, Injourney merupakan perusahaan restrukturisasi dari PT Survai Udara Penas (Persero) atau "PENAS" yang telah beroperasi sejak tahun 1945. Di awal pendirian, PENAS

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) (hereinafter referred to as "Injourney") was established under the direction of the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo in a limited meeting on the merger of State-Owned Enterprises in the aviation and tourism sectors on August 6, 2020. On this occasion, President Joko Widodo explained that the COVID-19 pandemic must be momentum for consolidation and transformation in the tourism and aviation sectors. Structuring flight routes, determining hubs, determining super hubs, and establishing tourism and supporting holding are expected to accelerate the tourism and transportation sector in Indonesia.

President Joko Widodo's statement in a limited meeting on August 6, 2020 was in line with the statement of the Minister of State-Owned Enterprises, Erick Thohir revealing that he would establish a State-Owned Enterprises Tourism Holding to increase synergies and optimize potential in the tourism and supporting sector.

Prior to the name change, Injourney was a restructuring company of PT Survai Udara Penas (Persero) or "PENAS" which had been operating since 1945. At the beginning of its establishment,



menjalankan kegiatan penyediaan kebutuhan potret udara dan pemetaan kebutuhan militer dengan memanfaatkan peralatan peninggalan tentara Jepang. Setelah lima tahun beroperasi, pemerintah membentuk Lembaga Aerial Survey (LAS) yang kemudian diubah menjadi Perusahaan Negara Aerial Survey atau Penas dengan dasar pendirian Peraturan Pemerintah nomor 197 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aerial Survey.

PENAS kemudian berganti menjadi Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara Penas di tahun 1974 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1974. Di tahun 1991, pemerintah meningkatkan status perusahaan sebagai perseroan terbatas sehingga Penas berganti nama menjadi PT Survai Udara Penas (Persero).

Pendirian Injourney dilaksanakan berdasarkan arahan Menteri BUMN melalui Surat Menteri BUMN No. S-761/MBI/09/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Arahan Pemegang Saham tentang Pembentukan Holding BUMN Pariwisata. Kemudian, pada tanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan Surat Menteri BUMN No. 5-959/MBU/10/2020, ditunjuklah PT Survai Udara Penas (Persero) sebagai induk Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung. Transisi

PENAS carried out activities for providing aerial photography and mapping military needs by utilizing equipment left by the Japanese army. After five years of operation, the government established the Institute for Aerial Survey (LAS) which was then transformed into the State Aerial Survey Corporation or Penas on the establishment basis of Government Regulation No. 197/1961 on the Establishment of the State Aerial Survey Corporation.

PENAS then changed to a Public Company (Perum) Survai Udara Penas in 1974 based on Government Regulation No. 46/1974. In 1991, the government raised the company's status as a limited liability company so that Penas changed its name to PT Survai Udara Penas (Persero).

Injourney was established based on the Minister of SOEs directive through the letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-761/MBI/09/2020 dated September 23, 2020 concerning the Direction of the Shareholders regarding the Establishment of SOE Tourism Holding. On October 27, 2020 based on the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. 5-959/MBU/10/2020, PT Survai Udara Penas (Persero) was appointed as the



kegiatan usaha PT Survai Udara Penas (Persero) menjadi PT Aviiasi Pariwisata Indonesia (Persero) diimplementasikan melalui 3 tahap *Roadmap* BUMN 2020-2024, yaitu *survival* dan kelangsungan hidup, restrukturisasi dan *realignment*, serta inovasi dan transformasi.

Melalui PP 72 Tahun 2021, Penas kemudian melakukan pengalihan bentuk usaha menjadi Perseroan. Injourney resmi dibentuk dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviiasi Pariwisata Indonesia.

Melalui Injourney, Pemerintah mempercayakan seluruh pengelolaan aset negara yang berada di bawah kendali 5 Anak Usaha yang terdiri dari 35 bandara, 147 hotel, 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), *retail*, dan *kargo*.

Keberadaan Injourney diharapkan dapat memberi manfaat secara menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan. Manfaat pada para pemangku kepentingan antara lain mampu meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk pajak dan dividen, mendorong angka pertumbuhan penumpang penerbangan dan wisatawan untuk menjelajah berbagai destinasi prioritas, membantu pertumbuhan makro ekonomi, menciptakan potensi lapangan kerja bagi pelaku industri pariwisata dan sektor pendukung, mendukung pemerataan ekonomi di daerah, memberikan layanan berkualitas bagi *customer*, optimalisasi biaya pada sektor aviiasi, menjadi percontohan bagi lingkup industri aviiasi dan pariwisata lain guna mengembangkan standar praktik layanan terbaik, meningkatkan kemampuan seluruh karyawan melalui inovasi bersama dan *transfer knowledge*, serta peluang Insan Injourney untuk berkontribusi membangun bangsa.

holding company for Tourism and Supporting SOE. The transition of PT Survai Udara Penas (Persero) business activities to PT Aviiasi Pariwisata Indonesia (Persero) was implemented through 3 stages of the 2020-2024 SOE Roadmap, namely survival and resilience, restructuring and realignment, and innovation and transformation.

Through Government Regulation No. 72/2021, Penas carried out business transformation into a Company (Perseroan). Injourney was officially established with the issuance of Government Regulation No. 104/2021 dated October 6, 2021 on the addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Aviiasi Pariwisata Indonesia.

Through Injourney, the Government entrusts the entire management of state assets under the control of 5 Subsidiaries consisting of 35 airports, 147 hotels, 5 Super Priority Tourism Destinations (DPSP), retail and cargo.

The existence of Injourney is expected to provide all-encompassing benefits to all stakeholders. Benefits to stakeholders include increasing state revenues in the form of taxes and dividends, encouraging the growth rate of flight passengers and tourists to explore various priority destinations, assisting macroeconomic growth, creating potential employment opportunities for tourism industry players and supporting sectors, supporting economic equity. in the regions, providing quality services for customers, optimizing costs in the aviation sector, being a role model for other aviation and tourism industries in order to develop standards of best service practices, increasing the capabilities of all employees through joint innovation and knowledge transfer, as well as opportunities for Injourney Personnel to contribute to building the nation.

Jejak Langkah

Milestones

Desember 2019:
Pembentukan Tim
December 2019:
Team Set-Up

1

SK-294/MBU/12/2019 Penunjukan Direktur PMO Holding BUMN ITE
SK-294/MBU/12/2019 on the Appointment of PMO Director of EIT SOE Holding

SK-305/MBU/12/2019 Pembentukan Tim Percepatan Konsolidasi BUMN Sektor Transportasi dan Pariwisata
SK-305/MBU/12/2019 on the Formation of the Team for Acceleration of SOEs Consolidation in the Transportation and Tourism Sector

SK-308/MBU/12/2019 Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan 5 DPSP Tanggal 10 Desember 2019
SK-308/MBU/12/2019 on Formation of the 5 DPSP Development Acceleration Team on December 10, 2019.

September 2020:
Perubahan Susunan Keanggotaan
September 2020:
Team Restructure

2

SK-73/MBU/Wk2/09/2020 Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Percepatan Konsolidasi BUMN Sektor Transportasi dan Pariwisata
SK-73/MBU/Wk2/09/2020 on Changes in Membership Composition of the Team for Acceleration of SOEs Consolidation in the Transportation and Tourism Sector

SK-75/MBU/Wk2/03/2020 Susunan Keanggotaan Tim Percepatan Konsolidasi BUMN Sektor Transportasi dan Pariwisata
SK-75/MBU/Wk2/03/2020 on Membership Composition of the Team for Acceleration of SOEs Consolidation in the Transportation and Tourism Sector

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Survei Udara Penas (Persero) Nomor SK-287/MBU/09/2020 tanggal 15 September 2020
Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Survei Udara Penas (Persero) No. SK-287/MBU/09/2020 dated September 15, 2020.

Oktober 2020:
Pengalihan Bentuk Usaha
October 2020:
Business Model Reforms

3

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-317/MBU/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang Permberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Survei Udara Penas
Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-317/MBU/10/2020 dated October 8, 2020 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Survei Udara Penas

Juli 2021:
Pengalihan Bentuk Usaha
July 2021: Business Model Reforms

4

PP 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survei Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Government Regulation No. 72/2021 on Change of PENAS' status into into Company

SK-227/MBU/07/2021 Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Bisnis Maskapai Penerbangan BUMN
SK-227/MBU/07/2021 on the Formation of a Team to Accelerate Business Development of State-Owned Airlines

Agustus 2021:
Pembentukan Perusahaan
August 2021:
Company Establishment

5

Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia RI Nomor AHU-0044775.AH.01.02.TAHUN.2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia Disingkat PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)
Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0044775.AH.01.02.TAHUN.2021 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia Abbreviated as PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)

Oktober 2021:
Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris
October 2021:
Appointing of Board of Directors and Board of Commissioners

6

SK-336 SK-337 Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Injourney
SK-336 SK-337 on Appointment of Injourney's Board of Directors and Board of Commissioners

SKK-92 s.d 97 Surat Kuasa Khusus kepada Injourney
SKK-92 to 97 Special Power of Attorney to Injourney

PP 104 Tahun 2021 PMN RI ke dalam Modal Saham PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)
Government Regulation No. 104/2021 on the addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)

Penambahan Modal Nasional
Capital National Injection

Desember 2021:
Melangkah Ke Depan
December 2021:
Move Forward

7

498/KMK.06/2021 Penetapan Nilai Penambahan PMN RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)
498/KMK.06/2021 on the determination of the addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Perseroan) PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)

PERJ-14/MBU/12/2021 Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham Negara RI pada PT Hotel Indonesia Natour (HIN), PT Sarinah, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II kepada Injourney
PERJ-14/MBU/12/2021 on Agreement on the Transfer of Rights of the Share of the Republic of Indonesia at PT Hotel Indonesia Natour (HIN), PT Sarinah, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, and Ratu Boko, PT Angkasa Pura I, and PT Angkasa Pura II to Injourney

SKK-107/MBU/12/2021 Surat Kuasa Khusus kepada Injourney melakukan tindakan kewenangan saham Seri A
SKK-107/MBU/12/2021 on Special Power of Attorney to Injourney to exercise authority for Series A share.

Januari 2022:
Peluncuran Injourney
January 2022:
Launching Injourney

8

Peluncuran BUMN Holding Jasa Pariwisata dan Pendukung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada 13 Januari 2022 di Kuta Mandalika Lombok
Launching of the Tourism and Supporting SOE Holding by the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo on January 13, 2022 at Kuta Mandalika Lombok



Peristiwa Penting di Tahun 2021

Significant Events in 2021

JULI

Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2021

July:

Issuance of Government Regulation No. 72/2021

Pengalihan bentuk Perum Survai Udara Penas (Persero) menjadi PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) atau "Injourney"

Change of the Company's status from Perum Survai Udara Penas (Persero) into PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) or "Injourney"

AGUSTUS

Perubahan Logo PT Survai Udara Penas (Persero) dan Penetapan Logo Injourney Melalui Surat Menteri BUMN Nomor S-558/MBU/08/2021 tanggal 6 Agustus 2021

August: Amendment of PT Survai Udara Penas' (Persero) Logo and Decision of Injourney's Logo through Ministry of SOE's Letter No. S-558/MBU/08/2021 dated August 6, 2021

01

02

03

OKTOBER

Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2021:

October:

Issuance of Government Regulation No. 104/2021:

Penambahan PMN ke dalam Modal Saham Injourney sebagai penanda terbentuknya Holding Tahap I

The addition of the State Equity Participation into the Share Capital of InJourney to mark the Holding establishment Phase I

Diterbitkannya Surat Kuasa Khusus kepada Perseroan dalam melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan atau hak pemegang saham:

- Untuk PT Hotel Indonesia Natour Nomor: SKK-SKK-92/MBU/10/2021.
- Untuk PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko Nomor: SKK-SKK-93/MBU/10/2021.
- Untuk PT Angkasa Pura II Nomor: SKK-SKK-94/MBU/10/2021.
- Untuk PT Angkasa Pura I Nomor: SKK-SKK-95/MBU/10/2021.
- Untuk PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Nomor: SKK-96/MBU/10/2021.
- Untuk PT Sarinah Nomor: SKK-SKK-97/MBU/10/2021.

Issuance of a Special Power of Attorney to the Company in carrying out actions under the shareholders' authority and/or rights:

- For PT Hotel Indonesia Natour Number: SKK-SKK-92/MBU/10/2021.
- For PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko Number: SKK-SKK-93/MBU/10/2021.
- For PT Angkasa Pura II Number: SKK-SKK-94/MBU/10/2021.
- For PT Angkasa Pura I Number: SKK-SKK-95/MBU/10/2021.
- For PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Number: SKK-SKK-96/MBU/10/2021.
- For PT Sarinah Number: SKK-SKK-97/MBU/10/2021.

SK-336 SK-337 Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Injourney
SK-336 SK-337 on Appointment of Injourney's Board of Directors and Board of Commissioners

NOVEMBER

- **Event perdana Injourney diselenggarakan**
Injourney inaugural event was held
- **Penyiapan SDM dan Organisasi PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)**
Preparation of Human Resources and Organization of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)

Peresmian Pertamina Mandalika Street Circuit oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 12 November 2021
Inauguration of Pertamina Mandalika Street Circuit by the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo on November 12, 2021

Event internasional perdana Injourney World Superbike (WSBK) diselenggarakan di Pertamina Mandalika Street Circuit pada 19 November 2021 hingga 21 November 2021
InJourney's inaugural international event, World Superbike (WSBK) was held at Pertamina Mandalika Street Circuit from November 19, 2021 to November 21, 2021.

Pembentukan struktur organisasi PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)
Establishment of the organizational structure of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)

04

05

DESEMBER

Proses Inbreg Pembentukan Holding Pariwisata dan Pendukung Tahap I Kajian Pembentukan Holding Tahap II –Inklusi ITDC

December :
*Inbreg Process for Establishing Tourism and Supporting SOEs Holding Phase I
Review on Holding Establishment Phase II – ITDC Inclusion*

Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan RI NO. 298/KMK.06/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero).
Issuance of the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 298/KMK.06/2021 dated December 6, 2021 on the Determination of the Value of the Addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero).

Surat Menteri BUMN RI No. S-971/MBU/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)
Letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. S-971/MBU/12/2021 dated December 14, 2021 on Changes in Capital Structure and Amendments to the Articles of Association of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)

Diterbitkannya Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-SKK-107/MBU/12/2021 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak PT Hotel Indonesia Natour, PT Sarinah, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II. Untuk melakukan tindakan dan kewenangan dan atau pemegang saham seri A Dwiwarna sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar masing-masing.
Special Power of Attorney Number. SKK-SKK-107/MBU/12/2021 concerning the Company (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia as the Majority Series B Shareholder of PT Hotel Indonesia Natour, PT Sarinah, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko, PT Angkasa Pura I, and PT Angkasa Pura II was issued to take action and authority and/or shareholders of series A Dwiwarna as regulated in their respective Articles of Association.

Groundbreaking Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan (KEK) Bali International Hospital di Sanur oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 27 Desember 2021
Groundbreaking of the Health Special Economic Zone (SEZ) of Bali International Hospital in Sanur by the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo on December 27, 2021

Proses inklusi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) ke dalam Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung mencakup: Kajian bersama inklusi ITDC ke dalam Holding, Penerbitan PP inklusi ITDC ke dalam Holding, dan Proses transaksi inbreg saham ITDC ke Injourney.
The inclusion process of Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) into the Tourism and Supporting SOEs Holding includes: Joint study of ITDC's inclusion into Holding, Issuance of Government Regulation on the inclusion of ITDC into Holding, and inbreg transaction process of ITDC's share into InJourney.



Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission and Corporate Culture



VISI

"To be the leading tourism ecosystem in the region, providing memorable experience through Indonesian hospitality"

MISI

"To Boost Recovery and accelerate development of travel in Indonesia through collaboration of main industry players and partnerships with private sector in inclusive environment"



Nilai-nilai budaya perusahaan merupakan pedoman bagi PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) dalam berperilaku dan berorganisasi. Nilai "AKHLAK" diterapkan berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara tanggal 1 Juli 2020.

Corporate culture constitutes a guideline for PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) to behave within the organization. "AKHLAK" values are implemented based on the Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. SE-7/MBU/07/2020 on Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises dated July 1, 2020.

(Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

A

Amanah: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Amanah (Trustworthy): Uphold the trust given

K

Kompeten: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Kompeten (Competent): Continue to learn and develop capabilities

H

Harmonis: Saling peduli dan menghargai perbedaan
Harmonis (Harmonious): Mutual care and respect for differences

L

Loyal: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
Loyal (Loyal): Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State

A

Adaptif: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan
Adaptif (Adaptive): Continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing change

K

Kolaboratif: Membangun kerja sama yang sinergis
Kolaboratif (Collaborative): Build synergistic cooperation

Segmen Usaha
Business Segment

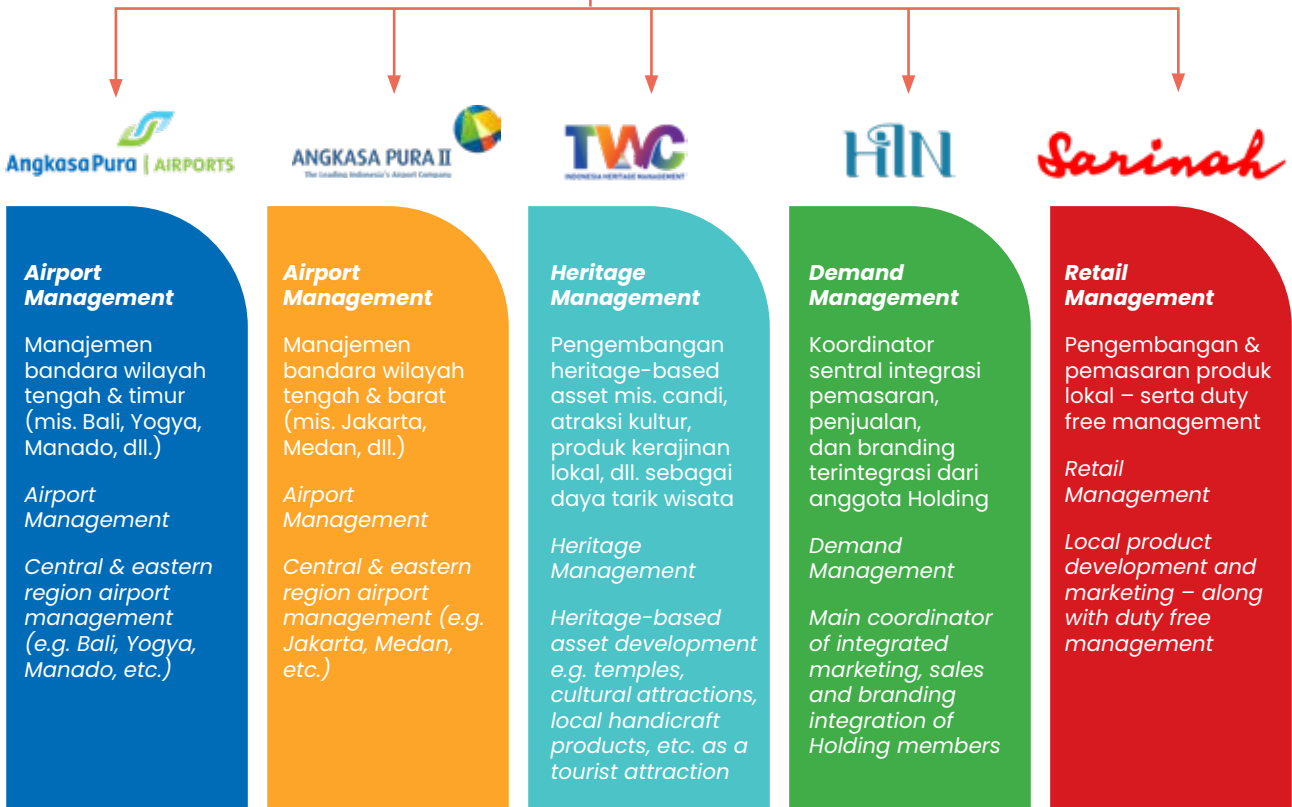
Struktur & Anggota
Structure & Members



Portfolio InJourney | InJourney's Portfolio

- 35 bandara | 35 airports
- 147 hotel | 147 hotels
- 5 kawasan pariwisata | 5 tourism destinations
- Retail
- Cargo

Peran Anggota
Holding
Subholding Roles





Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Dalam upaya memulihkan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19, Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif menetapkan sejumlah target pemulihan pada sektor ekonomi kreatif. Target tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaku pariwisata, ekonomi, kreatif, revitalisasi destinasi pariwisata, dan peningkatan resiliensi serta desain usaha. Untuk memenuhi target-target tersebut, InJourney telah membuat program inisiatif dalam memulihkan sektor pariwisata yang sempat lesu akibat pandemi COVID-19. Mencakup pengembangan bandar udara, hotel, kawasan ekonomi khusus dan infrastruktur serta *destination management*. Kedepannya, InJourney akan melaksanakan sejumlah pengembangan infrastruktur di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Penjelasan terkait pengembangan infrastruktur pada 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) diungkapkan dalam tabel berikut.

5 Super Priority Tourism Destinations (DPSP)

In the pursuit of restoring economic conditions due to the COVID-19 pandemic, the Ministry of Tourism and Creative Economy has set several recovery targets for the creative economy sector. The targets include increasing the capacity of human resources, tourism actors, creative economy, revitalizing tourism destinations, and increasing resilience and business design. To meet the targets, InJourney has created initiative programs to restore the tourism sector which had been sluggish due to the COVID-19 pandemic. The programs include the development of airports, hotels, special economic zones and infrastructure as well as destination management. Henceforward, InJourney will carry out several infrastructure developments in 5 Super Priority Tourism Destinations (DPSP) throughout Indonesia. The description of infrastructure development at 5 Super Priority Tourism Destinations (DPSP) is disclosed in the following table. Prioritas (DPSP) diungkapkan dalam tabel berikut.

Destinasi <i>Destination</i>	Pengembangan Bandar Udara <i>Airport Development</i>	Pengembangan Hotel <i>Hotel Development</i>	Kawasan Ekonomi Khusus & Infrastruktur <i>Special Economic Zone & Infrastructure</i>	Manajemen Destinasi <i>Destination Management</i>
Danau Toba Lake Toba	<ul style="list-style-type: none"> Bandara Internasional Kualanamu Bandara Internasional Sisingamangaraja XII <i>Kualanamu International Airport</i> <i>Sisingamangaraja XII International Airport</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Inna Parapat Hotel & Resort (102 rooms) Grand Inna Medan (132 rooms) Teraskita Boutique (120 rooms) Horison Sky Kualanamu (99 rooms) 	-	<ul style="list-style-type: none"> Toba Caldera Music Festival 2022 Kulinerun Medan
Borobudur	Bandara Internasional Yogyakarta <i>Yogyakarta International Airport</i>	<ul style="list-style-type: none"> Grand Inna Malioboro (227 rooms) Khas Malioboro (141 rooms) Khas Tugu (138 rooms) Manohara Hotel (119 rooms) 	-	<ul style="list-style-type: none"> Outdoor Jazz: A Night of Indonesian Culture Borobudur Marathon Borobudur Lantern Festival International Artist Concert Prambanan Jazz Festival Prambanan Kite Festival International Artist Concert Kulinerun Malioboro

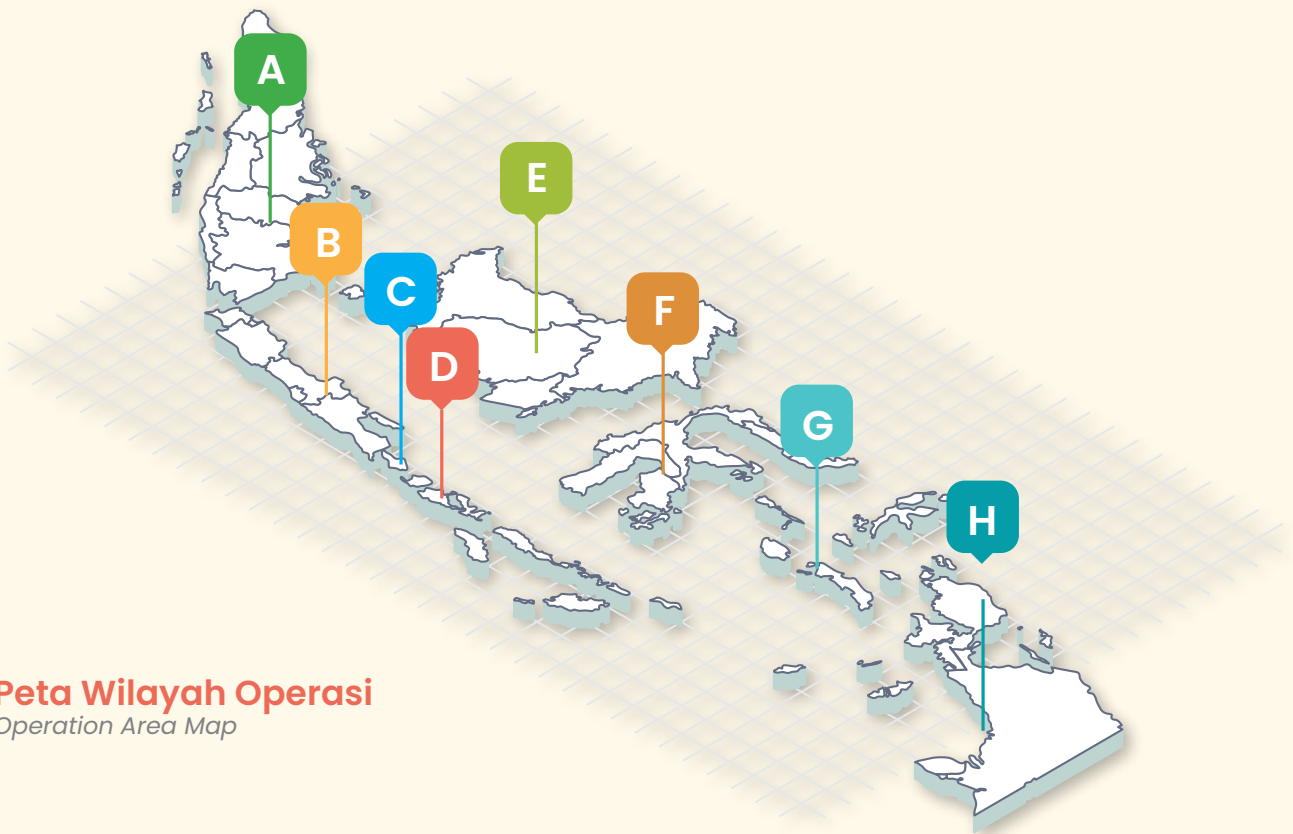
Destinasi <i>Destination</i>	Pengembangan Bandar Udara <i>Airport Development</i>	Pengembangan Hotel <i>Hotel Development</i>	Kawasan Ekonomi Khusus & Infrastruktur <i>Special Economic Zone & Infrastructure</i>	Manajemen Destinasi <i>Destination Management</i>
Mandalika	Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid <i>Zainuddin Abdul Madjid International Airport</i>	<ul style="list-style-type: none"> Grand Inna Malioboro (227 rooms) Khas Malioboro (141 rooms) Khas Tugu (138 rooms) Manohara Hotel (119 rooms) Merumatta Kila Senggigi (215 rooms) Pullman Hotel Mandalika (257 rooms) Teraskita Hotel Mataram (120 rooms) 	<ul style="list-style-type: none"> Mandalika International Street Circuit KEK Mandalika Mandalika SEZ 	<ul style="list-style-type: none"> Mandalika Marathon 10K Mandalika Fun Bike MHA Open Surf Competition Mobile Legend Internasional L'étape by Tour de France Sport Summit Indonesia Mandalika MotoGP Official Pre-season Test Februari 2022 Indonesia Mandalika MotoGP Series Maret 2022
Labuan Bajo	-	<ul style="list-style-type: none"> Meruorah Komodo Labuan Bajo (145 rooms) The Ora Labuan Bajo (23 rooms) 	Pengembangan Destinasi Tana Mori <i>Tana Mori Destination Development</i>	<ul style="list-style-type: none"> Hintimate Concert Labuan Bajo – SLANK International Music Festival
Likupang	Bandara Internasional Sam Ratulangi <i>Sam Ratulangi International Airport</i>	Best Western The Lagoon Manado (185 rooms)	KEK Likupang <i>Likupang SEZ</i>	<ul style="list-style-type: none"> Likupang Triathlon Likupang Fun Walk Experiences

Anak perusahaan:

Subsidiaries:

1. PT Angkasa Pura I
2. PT Angkasa Pura II
3. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
4. PT Hotel Indonesia Natour
5. PT Sarinah





Peta Wilayah Operasi
Operation Area Map

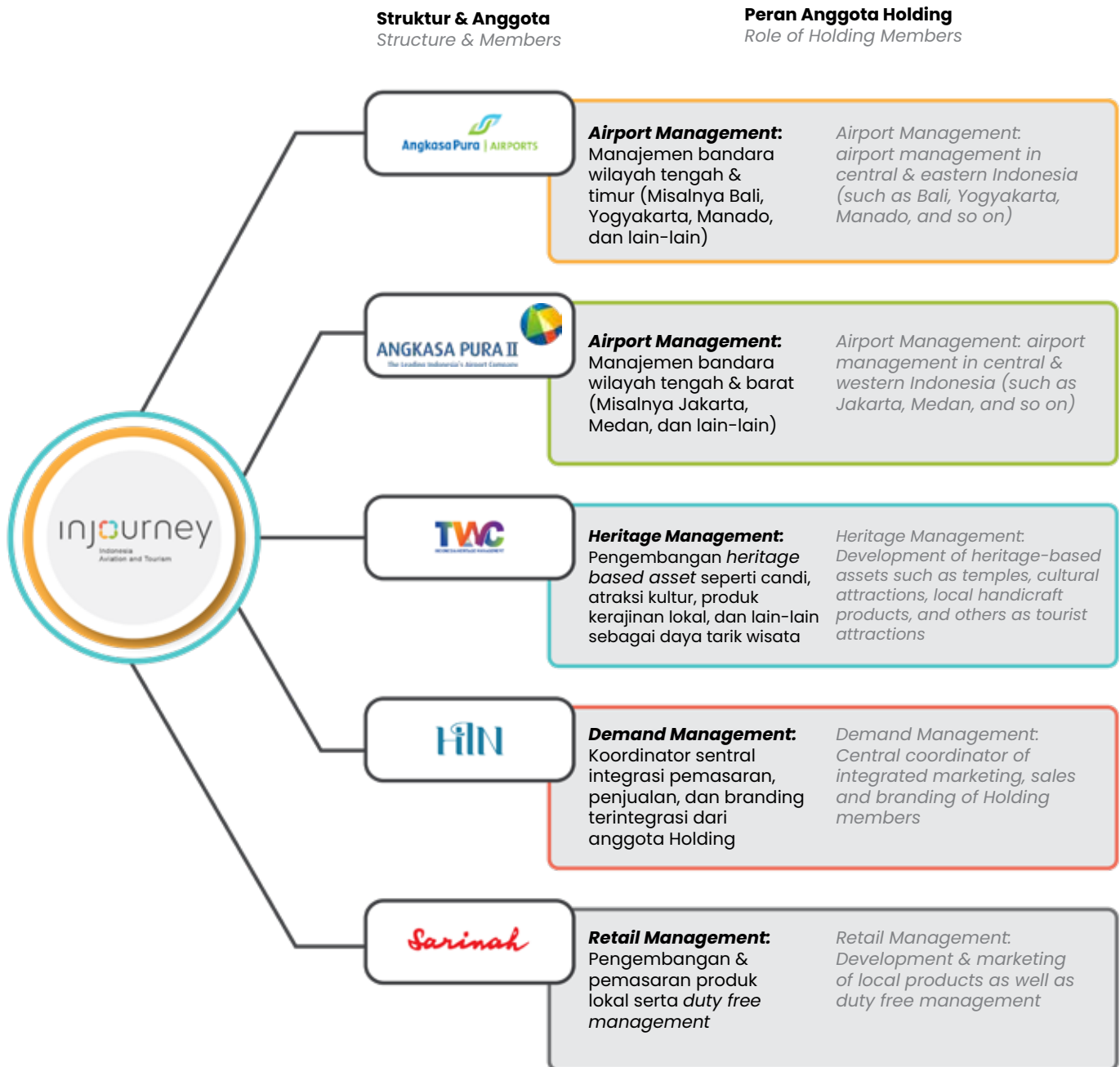
A Wilayah Operasional: Sumatera Operational Area: Sumatra			
1	Bandar Udara Sultan Iskandar Muda <i>Sultan Iskandar Muda Airport - Banda Aceh</i>	PT Angkasa Pura II	Aceh
2	Bandar Udara Kualanamu <i>Kualanamu Airport - Deli Serdang</i> Bandar Udara Silangit <i>Silangit Airport - Siborong-borong</i>	PT Angkasa Pura II	Sumatera Utara North Sumatra
3	Grand Inna Medan Hotel, Khas Parapat Hotel	PT Hotel Indonesia Natour	
4	Bandar Udara Minangkabau <i>Minangkabau Airport - Padang</i>	PT Angkasa Pura II	Sumatera Barat West Sumatra
5	Truntum Padang Hotel, Inna Ombilin Heritage Hotel	PT Hotel Indonesia Natour	
6	Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II <i>Sultan Syarif Kasim II Airport - Pekanbaru</i> Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah <i>Raja Haji Fisabilillah Airport - Tanjung Pinang</i>	PT Angkasa Pura II	Riau
7	Khas Pekanbaru Hotel	PT Hotel Indonesia Natour	
8	Bandar Udara Sultan Thaha <i>Sultan Thaha Airport - Jambi</i>	PT Angkasa Pura II	Jambi
9	Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II <i>Sultan Mahmud Badaruddin II Airport - Palembang</i>	PT Angkasa Pura II	Sumatera Selatan South Sumatra
10	Grand Inna Daira Palembang Hotel, Saka Tanjung Enim Hotel	PT Hotel Indonesia Natour	
11	Bandar Udara Depati Amir <i>Depati Amir Airport - Pangkal Pinang</i> Bandar Udara HAS Hanandjoeddin <i>HAS Hanandjoeddin Airport - Tanjung Pandan</i>	PT Angkasa Pura II	Bangka Belitung
12	Bandar Udara Fatmawati Soekarno <i>Fatmawati Soekarno Airport</i>	PT Angkasa Pura II	Bengkulu
13	Bandar Udara Radin Inten II <i>Radin Inten II Airport</i>	PT Angkasa Pura II	Lampung
B Wilayah Operasional: Jawa Operational Area: Java			
14	Bandar Udara Soekarno-Hatta <i>Soekarno-Hatta Airport</i>	PT Angkasa Pura II	Tangerang
15	Bandar Udara Halim Perdanakusuma <i>Halim Perdanakusuma Airport</i>		
16	PT Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero)	Kantor Pusat <i>Head Office</i>	
17	Mall Sarinah	PT Sarinah	Jakarta
18	Taman Mini Indonesia Indah	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	

19	Grand Inna Samudera Beach Hotel, Jatiluhur Valley Hotel & Resort Hotel	PT Hotel Indonesia Natour	Jawa Barat
20	Bandar Udara Husein Sastranegara <i>Husein Sastranegara Airport</i>	PT Angkasa Pura II	West Java
21	Bandar Udara Kertajati <i>Kertajati Airport</i>		
22	Jenderal Besar Soedirman <i>Bandara Udara Jenderal Besar Soedirman Airport</i>	PT Angkasa Pura II	
23	Candi Borobudur <i>Borobudur Temple</i> Dagi Abhinaya, Manohara Resort	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	Jawa Tengah Central Java
24	Khas Tegal Hotel, Khas Pekalongan Hotel, Khas Semarang Hotel	PT Hotel Indonesia Natour	
25	Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani <i>Jenderal Ahmad Yani Airport</i> Bandar Udara Adi Soemarmo <i>Adi Soemarmo Airport</i>	PT Angkasa Pura I	
26	Bandar Udara Internasional Yogyakarta <i>Yogyakarta International Airport</i>	PT Angkasa Pura I	
27	Bandar Udara Adisutjipto <i>Adisutjipto Airport</i>	PT Angkasa Pura I	
28	Samudera Raksa Museum	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	Yogyakarta
29	Candi Prambanan <i>Prambanan Temple</i> Candi Ratu Boko <i>Ratu Boko Temple</i> The Manohara Hotel	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	
30	Grand Inna Malioboro Hotel, Khas Malioboro, Khas Tugu Hotel	PT Hotel Indonesia Natour	
31	Bandar Udara Banyuwangi <i>Banyuwangi Airport</i>	PT Angkasa Pura II	
32	Bandar Udara Juanda <i>Juanda Airport</i>	PT Angkasa Pura I	Jawa Timur East Java
33	Grand Inna Tunjungan Hotel, Inna Tretes Hotel & Resort, Khas Gresik Hotel, Khas Surabaya Hotel	PT Hotel Indonesia Natour	
C Wilayah Operasional: Bali Operational Area: Bali			
34	Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai	PT Angkasa Pura I	
35	Merusaka Nusa Dua Hotel, Grand Inna Kuta Hotel, Grand Inna Bali Beach Hotel, Inna Bali Heritage Hotel, Inna Sindhu Beach Hotel	PT Hotel Indonesia Natour	Bali
D Wilayah Operasional: Nusa Tenggara Operational Area: Nusa Tenggara			
36	Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid <i>Zainuddin Abdul Madjid Airport - Lombok</i>	PT Angkasa Pura I	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara
37	Merumatta Kila Senggigi Hotel	PT Hotel Indonesia Natour	
38	Bandar Udara El-Tari <i>El-Tari Airport - Kupang</i>	PT Angkasa Pura I	Nusa Tenggara Timur
39	Meruorah Labuan Bajo	PT Hotel Indonesia Natour	East Nusa Tenggara
E Wilayah Operasional: Kalimantan Operational Area: Kalimantan			
40	Bandar Udara Supadio <i>Supadio Airport - Pontianak</i>		Kalimantan Barat West Kalimantan
41	Bandar Udara Tjilik Riwut <i>Tjilik Riwut Airport - Palangkaraya</i>	PT Angkasa Pura II	Kalimantan Tengah Central Kalimantan
42	Bandar Udara Syamsudin Noor <i>Syamsudin Noor Airport - Banjarmasin</i>	PT Angkasa Pura I	Kalimantan Selatan South Kalimantan
43	Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian <i>Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Airport - Balikpapan</i>	PT Angkasa Pura I	Kalimantan Timur East Kalimantan
F Wilayah Operasional: Sulawesi Operational Area: Sulawesi			
44	Bandar Udara Sam Ratulangi <i>Sam Ratulangi Airport - Manado</i>	PT Angkasa Pura I	Sulawesi Utara North Sulawesi
45	Bandar Udara Sultan Hasanuddin <i>Sultan Hasanuddin Airport - Makassar</i>	PT Angkasa Pura I	Sulawesi Selatan South Sulawesi
46	Khas Makassar Hotel	PT Hotel Indonesia Natour	
G Wilayah Operasional: Maluku Operational Area: Maluku			
47	Bandar Udara Pattimura <i>Pattimura Airport - Ambon</i>	PT Angkasa Pura I	Maluku
H Wilayah Operasional: Papua Operational Area: Papua			
48	Bandar Udara Frans Kaisiepo <i>Frans Kaisiepo Airport - Biak</i>	PT Angkasa Pura I	Biak
49	Bandar Udara Sentani <i>Sentani Airport - Jayapura</i>	PT Angkasa Pura I	Sentani



Struktur Grup

Group Structure





Seluruh Anak Usaha memiliki peran strategis yang berbeda dalam ekosistem pariwisata Indonesia sesuai dengan segmen usaha yang dijalankan masing-masing Anak Usaha. InJourney telah menyusun berbagai peranan strategis setiap Anak Usaha yang dibedakan berdasarkan segmen usaha, antara lain:

1. Airport Management

Sektor transportasi udara memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan pariwisata di suatu wilayah. Untuk itu, pengelola infrastruktur transportasi udara memiliki peranan strategis dan kontribusi yang amat besar, khususnya untuk merealisasikan berbagai rencana Pemerintah dalam mengembangkan industri pariwisata. Anak Usaha InJourney yang berperan dalam Airport Management yaitu PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II.

Pengelolaan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Internasional Batam, dan 10 (sepuluh) bandara lainnya yang sebagian besar berada di wilayah tengah dan timur Indonesia berada di bawah PT Angkasa Pura I. Sedangkan Bandara Soekarno Hatta, Bandara Kualanamu Medan, Bandara Internasional Banyuwangi, dan 17 (tujuh belas) bandara lainnya yang sebagian besar berada di wilayah barat Indonesia dikelola oleh PT Angkasa Pura II.

2. Destination Development

InJourney akan mengembangkan perusahaan dengan menambahkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) sebagai Anggota Holding Tahap II. Ke depannya, ITDC akan merealisasikan kinerja dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata yang kegiatannya mencakup kolaborasi keahlian tata ruang dengan keahlian mencari investor untuk berinvestasi di kawasan pariwisata. Salah satu wilayah operasional ITDC adalah Kawasan Pariwisata Nusa Dua yang terkenal sebagai destinasi pariwisata bagi wisatawan mancanegara untuk mencari ketenangan, menikmati keindahan alam, dan menyaksikan kekayaan budaya di Bali. Selanjutnya, ITDC berfokus melaksanakan program pengembangan 3 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Pulau Lombok, KEK TanaMori di Labuan Bajo, dan KEK Likupang di Sulawesi Utara. Pada saat penyusunan Laporan Tahunan ini, ITDC masih sedang dalam proses inklusi.

All Subsidiaries have different strategic roles in the Indonesia's tourism ecosystem according to the business segments run by each Subsidiary. InJourney has compiled various strategic roles for each Subsidiary by business segment, including:

1. Airport Management

Air transportation sector is closely associated to the tourism development in a region. For this reason, air transportation infrastructure manager has a strategic role and substantial contribution, in particular to realize the Government's plans in developing the tourism industry. InJourney's subsidiaries playing a role in Airport Management are PT Angkasa Pura I and PT Angkasa Pura II.

I Gusti Ngurah Rai Airport in Bali, Yogyakarta International Airport, Juanda Airport in Surabaya, Sultan Hasanuddin Airport in Makassar, Batam International Airport, and 10 (ten) other airports, mostly located in the central and eastern regions of Indonesia are under the management of PT Angkasa Pura I. Meanwhile, Soekarno Hatta Airport, Kualanamu Airport in Medan, Banyuwangi International Airport, and 17 (seventeen) other airports mostly located in western Indonesia are under the management of PT Angkasa Pura II;

2. Destination Development

InJourney will develop the company by adding the Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) as a Holding Member Phase II. In the future, ITDC will realize performance in an endeavor to develop tourism destinations whose activities include collaboration of spatial planning expertise with the expertise to find investors to invest in tourism areas. One of ITDC's operational areas is Nusa Dua, well-known as a tourism destination for foreign tourists to seek tranquility, enjoy natural beauty, and witness the rich culture of Bali. Furthermore, ITDC focuses on implementing the development program of 3 Super Priority Tourism Destinations (DPSP), namely Mandalika Special Economic Zone (SEZ) on Lombok Island, TanaMori SEZ in Labuan Bajo, and Likupang SEZ in North Sulawesi. ITDC was in the inclusion process during the preparation of this Annual Report.



3. **Heritage Management**

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko merupakan Anak Usaha InJourney yang berperan dalam mengelola dan mengoptimalkan aset warisan milik Indonesia sebagai sarana edukasi dan tujuan wisata bagi wisatawan dalam negeri dan wisatawan mancanegara. Saat ini, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko masih berperan aktif dalam mengelola tiga aset *heritage* di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Candi Borobudur di Magelang Jawa Tengah dan Candi Prambanan serta Candi Ratu Boko yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko turut melestarikan berbagai budaya yang dimiliki dengan mempertahankan seni pertunjukan Sendratari Ramayana yang rutin dipentaskan di kompleks Candi Prambanan. Lebih jauh lagi, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko diharapkan mampu mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola aset *heritage* baik di dalam dan luar negeri, serta aset *heritage* BUMN.

4. **Demand Management**

Demand Management merupakan salah satu elemen kunci keberhasilan untuk mengintegrasikan ekosistem pariwisata. Sebagai koordinator sentral integrasi pemasaran, penjualan, dan *branding* terintegrasi dari Anggota Holding. Anak Usaha InJourney yang memiliki peran dalam *demand management* adalah PT Hotel Indonesia Natour (HIN). Saat ini, kegiatan usaha HIN adalah mengelola hotel-hotel yang dimiliki oleh BUMN dengan keutamaan layanan yang penuh keramah tamahan khas Indonesia. Ke depannya, HIN diharapkan mampu melakukan transformasi bisnis untuk menyusun berbagai paket pariwisata menarik yang terintegrasi dengan seluruh Anggota Holding di HIN diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk menjadikan Indonesia sebagai pilihan destinasi wisata.

3. **Heritage Management**

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko is an InJourney's subsidiary that plays a role in the management and optimization of Indonesia's heritage assets as heritage assets as a means of education and tourist destination for domestic and foreign tourists. Currently, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko plays an active role in the management of three heritage assets in Central Java and the Special Region of Yogyakarta, namely Borobudur Temple in Magelang, Central Java, Prambanan Temple and Ratu Boko Temple located in the Special Region of Yogyakarta. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko also helps preserve its various cultures by maintaining the performing arts of the Ramayana Ballet that has been staged regularly at Prambanan Temple complex. Furthermore, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko is expected to optimize its ability to manage heritage assets at home and abroad, as well as SOEs heritage assets.

4. **Demand Management**

Demand Management is one of the key elements of success to integrate the tourism ecosystem. As the central coordinator of integrated marketing, sales, and branding of Holding Members. As InJourney's subsidiary, PT Hotel Indonesia Natour (HIN) plays a role in demand management. Currently, HIN's business activity is to manage hotels owned by SOEs with Indonesian hospitality as the service priority. In the future, HIN is expected to carry out a business transformation to compile various appealing tour packages integrated with all Holding Members at HIN to be an attraction for foreign tourists and make Indonesia a tourist destination of choice.

5. Retail Management

Melalui Anak Usaha PT Sarinah, InJourney melaksanakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang retail, seperti pengembangan & pemasaran produk lokal – serta *duty free management*. Sarinah memiliki peran besar dalam memberikan fasilitas bagi UMKM untuk berkembang dan melakukan kurasi terhadap produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pasar. Seluruh kegiatan usaha Sarinah sejalan dengan rencana pengembangan pariwisata yang dicanangkan BUMN untuk bersinergi dengan para pelaku ekonomi UMKM agar kunjungan wisatawan juga dapat memberikan nilai tambah dan *multiplier* ekonomi yang lebih tinggi.

5. Retail Management

Through its subsidiary, PT Sarinah, InJourney carries out a wide range of business activities in the retail sector, such as local product development & marketing – as well as duty free management. Sarinah has a major role in providing facilities for MSMEs to develop and curating the products in accordance with market demand. All of Sarinah's business activities are in line with the tourism development plan launched by State-Owned Enterprise to synergize with MSME economic actors so that tourist visits can provide added value and a higher economic multiplier.

Pemangku Kepentingan

Stakeholders PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) terdiri atas:

Stakeholders

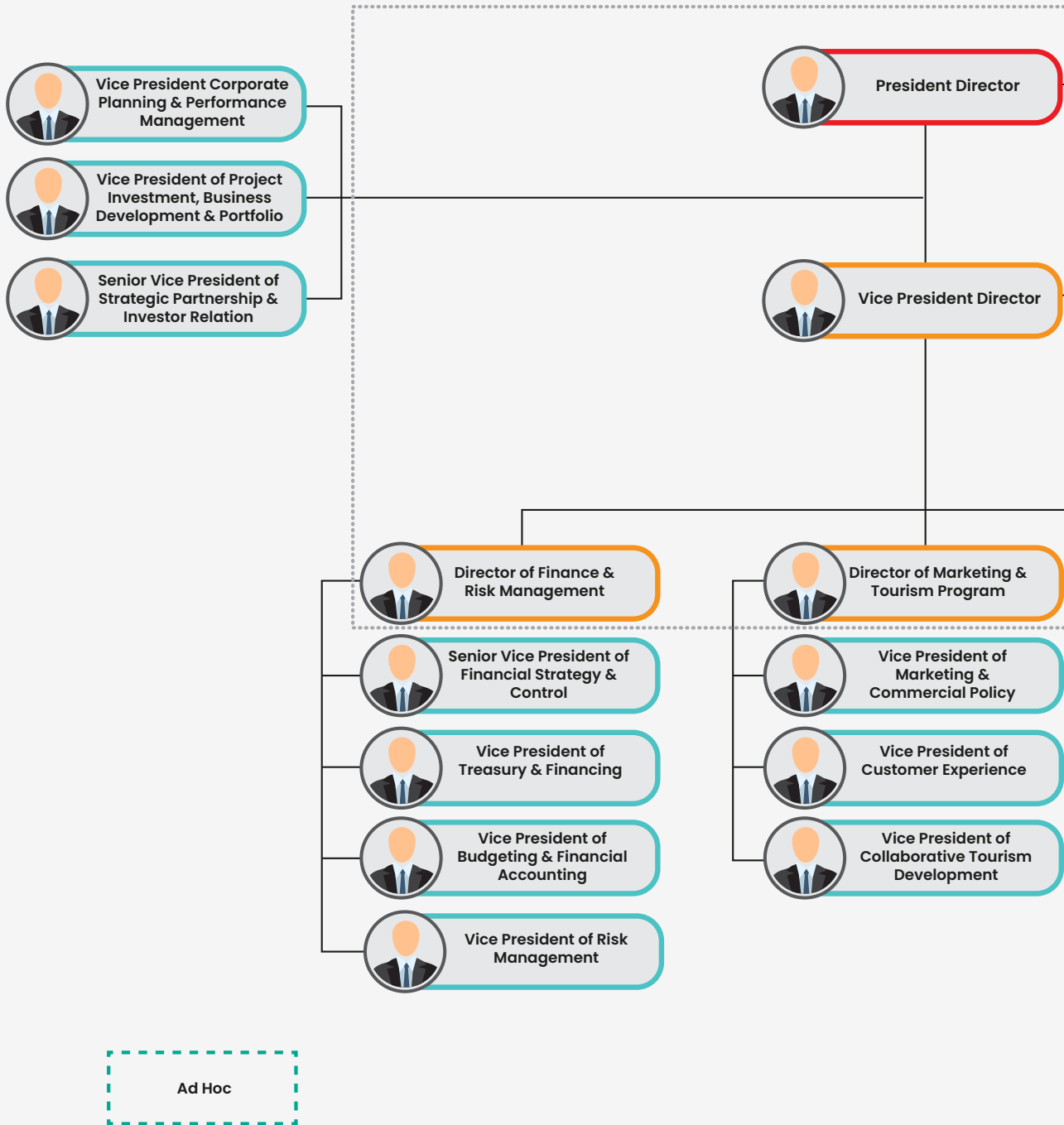
Stakeholders of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) consist of:

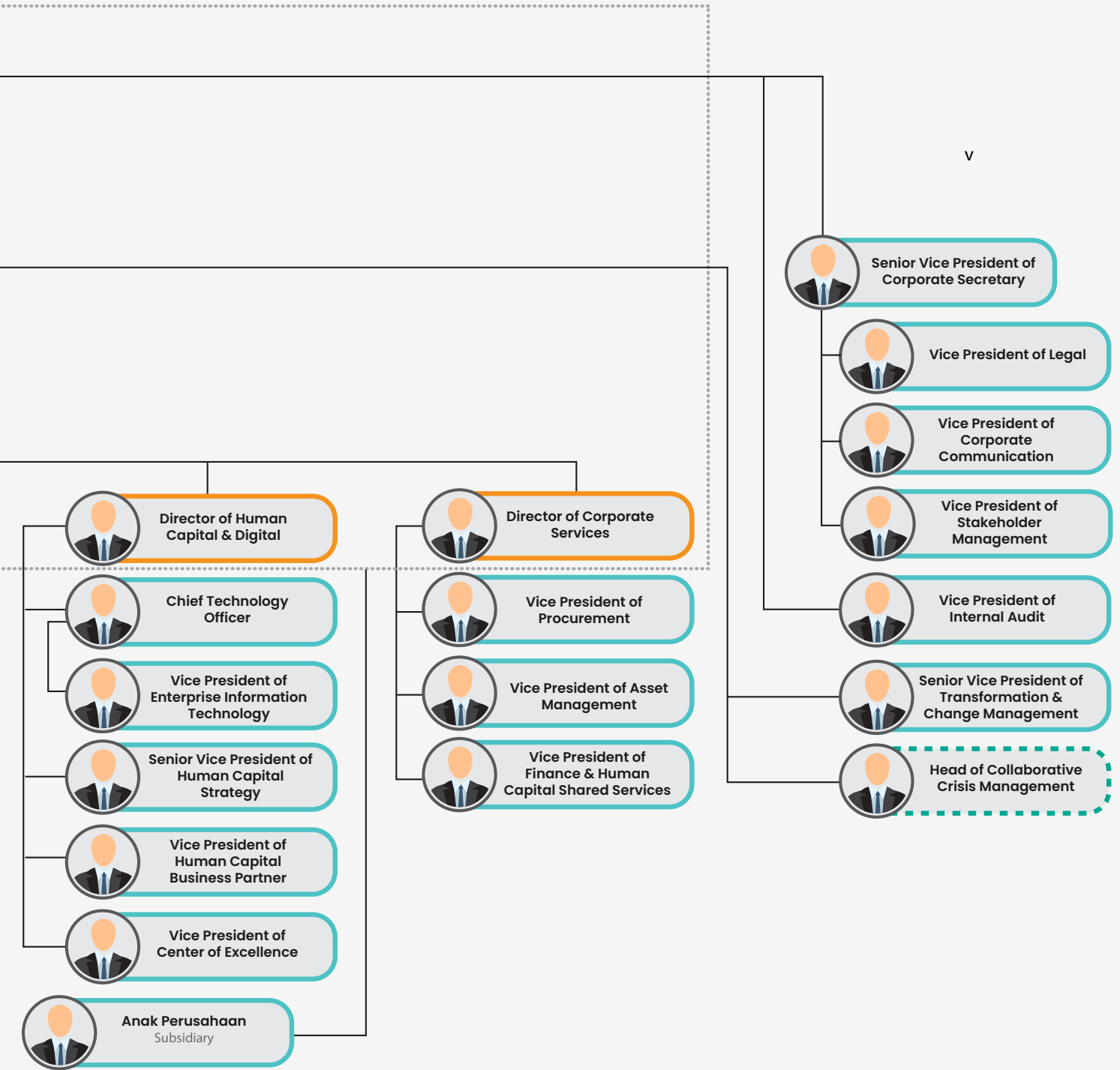
Pemangku Kepentingan Stakeholders	Topik Penting dan Pelibatan Important Topics and Engagement
Masyarakat <i>Community</i>	a. Ketersediaan produk jasa dan pariwisata yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan lengkap b. Membuka lapangan kerja c. Meningkatkan kontribusi terhadap komunitas dan lingkungan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). <i>a. Availability of quality services and complete tourism products at affordable prices b. Open employment c. Increase contribution to community and environment through Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs</i>
Pemerintah <i>Government</i>	a. Memperkuat struktur permodalan dan mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan b. Membangun tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang handal. c. Menciptakan perusahaan yang mandiri dan bersinergi serta meningkatkan kontribusi. <i>a. Strengthening the capital structure and driving the company's business growth b. Establishing good corporate governance and risk management. c. Creating an independent and synergized company and increasing contribution.</i>
Asosiasi, Industri, Perusahaan <i>Association, Industry, Company</i>	a. Memperkuat struktur permodalan dan mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan. b. Membangun tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang handal. c. Memperkuat industri pariwisata dan transportasi di Indonesia. d. Menciptakan perusahaan yang mandiri dan bersinergi serta meningkatkan kontribusi. e. Mendorong akselerasi dan kolaborasi antara BUMN dan swasta serta UMKM di ekosistem pariwisata. <i>a. Strengthening the capital structure and driving the company's business growth. b. Establishing reliable corporate governance and risk management. c. Strengthening the tourism and transportation industry in Indonesia. d. Creating an independent and synergized company and increasing contribution. e. Encouraging acceleration and collaboration between SOEs and private sector as well as MSMEs in the tourism ecosystem.</i>



Struktur Organisasi

Organizational Structure







Profil Direksi
Profile of Board of Directors





Dony Oskaria

Direktur Utama
President Director

Edwin Hidayat Abdullah

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Herdy Harman

Direktur SDM & Digital
Director of Human Capital and Digital

Maya Carolina Watono*

Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata
Director of Marketing and Tourism Program

*Bergabung pada tanggal 14 Januari 2022
Joined in January 14, 2022



Dony Oskaria
Direktur Utama
President Director

Usia/Umur*Age*

52 tahun per Desember 2021

*52 years old per December 2021***Kewarganegaraan***Citizenship*

Warga Negara Indonesia

*Indonesian Citizen***Riwayat Pendidikan***Educational Background*

- Sarjana Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran (1994)
- Magister Administrasi Bisnis di Asian Institute of Management Filipina (2009)
- *Bachelor in International Relations at Padjadjaran University (1994)*
- *Master of Business Administration at Asian Institute of Management Philippines (2009)*

Pengalaman Kerja*Work Experience*

- Managing Director di Bank Mega (2012-2014)
- Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2014 – 2019)
- Anggota dari Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Republik Indonesia (2015 – 2019)
- CEO Hospitality & Entertainment CT Corp (2014 – 2020)
- Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2020 – 2021)
- Komisaris PT Citilink Indonesia (2019 – sekarang)
- Co-Founder RANS Entertainment (2021 – sekarang)
- Direktur Utama PT Aviassi Pariwisata (Persero) atau Injourney (Oktober 2021 – Sekarang)
- *Managing Director at Bank Mega (2012-2014)*
- *Commissioner at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2014 – 2019)*
- *Member of the National Committee for Economy and Industry (KEIN) of the Republic of Indonesia (2015 – 2019)*
- *CEO Hospitality & Entertainment CT Corp (2014 – 2020)*
- *Vice President Director of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2020 – 2021)*
- *Commissioner of PT Citilink Indonesia (2019 – present)*
- *Co-Founder of RANS Entertainment (2021 – present)*
- *President Director of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) or Injourney (October 2021 – Present)*

Dasar Hukum Pengangkatan*Legal Basis of Appointment*

Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-336/MBU/10/2021

*Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-336/MBU/10/2021***Periode Jabatan***Term of Office*

4 Oktober 2021 – Sekarang

October 4, 2021 – Present



Edwin Hidayat Abdullah

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Usia/Umur
Age

50 tahun per Desember 2021

50 years old per December 2021

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah Mada (1995)
- Magister Manajemen Publik di Lee Kuan Yew School of Public Policy (2005)

- Bachelor of Economics from Gadjah Mada University (1995)
- Master of Public Management from Lee Kuan Yew School of Public Policy (2005)

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Analis Ekonomi Industrial Bank of Japan – Indonesia Office (1996 –1998)
- Food Aid Monitor untuk World Food Program di Perserikatan Bangsa-Bangsa (1998 – 1999)
- Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Indonesian Banking Restructuring Agency (1999 – 2004)
- Komisaris Utama di PT Teguhkarsa Wahana Lestari (2006)
- Presiden Direktur di PT Fortius Investment Asia (2005 –2007)
- Presiden Direktur di PT Lentera Lapan Asia (2005 – 2007)
- Senior Advisor untuk BOD di PT Bank Negara Indonesia (Persero) (2007 – 2008)
- Corporate Finance Advisor di PT Timah (Persero) (2007 – 2010)
- Advisor di PT Sarana Multi Infrastruktur (2011)
- Direktur Pengembangan Bisnis dan Investasi di PT Global Perkasa Investindo (2010 – 2015)
- Komisaris di PT Gas Resources Industrindo (2011 – 2015)

- Industrial Economic Analyst Bank of Japan – Indonesia Office (1996 –1998)
- Food Aid Monitor for the World Food Program at the United Nations (1998 – 1999)
- Indonesian Banking Restructuring Agency (1999 – 2004)
- President Commissioner at PT Teguhkarsa Wahana Lestari (2006)
- President Director at PT Fortius Investment Asia (2005 –2007)
- President Director at PT Lentera Lapan Asia (2005 – 2007)
- Senior Advisor to Board of Directors at PT Bank Negara Indonesia (Persero) (2007 – 2008)
- Corporate Finance Advisor at PT Timah (Persero) (2007 – 2010)
- Advisor at PT Sarana Multi Infrastruktur (2011)
- Business Development and Investment Director at PT Global Perkasa Investindo (2010 – 2015)
- Commissioner at PT Gas Resources Industrindo (2011 – 2015)

- Risk Monitoring Committee di PT Bank Sinarmas Tbk (2006 – 2015)
- Komite Audit Independen di PT Duta Pertiwi Tbk (2013 – 2015)
- Komite Audit Independen dan Komisaris di PT Bumi Serpong Damai (2013 – 2015)
- Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (2015 – 2017)
- Komisaris PT Pertamina (Persero) (2016 – 2018)
- Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) (2018 – 2019)
- Komisaris Utama di PT Icon+ (2018 – 2019)
- Komisaris Utama di PT Terminal Petikemas Surabaya (2019 – 2020)
- Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Republik Indonesia (2015 – 2019)
- Vice President Director di PT Angkasa Pura II (Persero) (2019 – 2021)
- Direktur PMO Holding BUMN Indonesia Tourism Ecosystem (2019 – 2021)
- Vice President Director di PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) (2021 – Sekarang)

- Risk Monitoring Committee at PT Bank Sinarmas Tbk (2006 – 2015)
- Independent Audit Committee at PT Duta Pertiwi Tbk (2013 – 2015)
- Independent Audit Committee and Commissioner at PT Bumi Serpong Damai (2013 – 2015)
- President Commissioner of PT Telekomunikasi Seluler (2015 – 2017)
- Commissioner of PT Pertamina (Persero) (2016 – 2018)
- Commissioner of PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) (2018 – 2019)
- President Commissioner at PT Icon+ (2018 – 2019)
- President Commissioner at PT Terminal Petikemas Surabaya (2019 – 2020)
- Deputy of Energy, Logistics, Regions and Tourism in the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia (2015 – 2019)
- Vice President Director at PT Angkasa Pura II (Persero) (2019 – 2021)
- Director of State-Owned Enterprise Indonesia Tourism Ecosystem Holding (2019 – 2021)
- Vice President Director at PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) (2021 – Present)

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-336/MBU/10/2021

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-336/MBU/10/2021

Periode Jabatan
Term of Office

4 Oktober 2021 – Sekarang

October 4, 2021 – Present



Maya Carolina Watono*

Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata
Marketing and Tourism Program Director

*Bergabung pada tanggal 14 Januari 2022
Joined on 14 January 2022

Usia/Umur

Age

39 tahun per Desember 2021

*39 years old per December 2021***Kewarganegaraan**

Citizenship

Warga Negara Indonesia

*Indonesian Citizen***Riwayat Pendidikan**

Educational Background

- Sarjana Psikologi di University of Western Australia (2004)
Bachelor of Psychology from the University of Western Australia (2004)
- Sarjana Pemasaran di University of Western Australia (2004)
Bachelor of Marketing from the University of Western Australia (2004)

Pengalaman Kerja

Work Experience

- Psikolog dan Marketing Case Manager Commonwealth Government's Autism Association of Western Australia (2005 – 2006)
Psychologist and Marketing Case Manager Commonwealth Government's Autism Association of Western Australia (2005 – 2006)
- General Manager Dwi Sapta Group (2007)
General Manager of Dwi Sapta Group (2007)
- CEO Dwi Sapta Group (2008 – 2018)
CEO of Dwi Sapta Group (2008 – 2018)
- Country CEO Dentsu Indonesia (2019 – 2022)
Country CEO of Dentsu Indonesia (2019 – 2022)
- Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata PT Aviassi Pariwisata Indonesia (2022 – sekarang)
Marketing and Tourism Program Director of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (2022 – present)

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis of Appointment

SK-19/MBU/01/2022

*The Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-19/MBU/01/2022***Periode Jabatan**

Term of Office

14 Januari 2022 - Sekarang

January 14, 2022 – Present

Informasi Rangkap Jabatan, Hubungan Afiliasi, dan Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Information on Concurrent Position, Affiliate Relationship, and Changes in the Composition of Members of the Board of Directors.

Selama periode Laporan tahun 2021 tidak terdapat Direksi yang memiliki jabatan rangkap maupun hubungan afiliasi. Pembentukan Anggota Direksi dilakukan pada Oktober 2021 saat peresmian InJourney. Tidak ada perubahan anggota Direksi pada tahun 2021 di luar periode peresmian perusahaan. Pada 14 Januari 2022, terdapat penambahan Anggota Direksi yaitu Direktur Pemasaran dan Pengembangan Pariwisata yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-19/MBU/01/2022. Perubahan komposisi Direksi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Pariwisata. *During the reporting period 2021, all members of the Board of Directors did not have concurrent positions or affiliate relationships. The formation of members of the Board of Directors was carried out in October 2021 at the InJourney inauguration. There was no change in the composition of the Board of Directors members in 2021 outside of the company's inauguration period. On January 14, 2022, there was an additional member of the Board of Directors, namely Marketing and Tourism Development Director who was appointed based on the Decree No. SK-19/MBU/01/2022. The change in the composition of the Board of Directors was made to fill the vacant position of Marketing and Tourism Development Director.*



Herdy Rosadi Harman

Direktur Sumber Daya Manusia dan Digital
Human Capital and Digital Director

Usia/Umur

Age

58 tahun per Desember 2021

*58 years old per December 2021***Kewarganegaraan**

Citizenship

Warga Negara Indonesia

*Indonesian Citizen***Riwayat Pendidikan**

Educational Background

- Sarjana Hukum di Universitas Padjadjaran (1986)
Bachelor of Law from Padjadjaran University (1986)
- Magister Administrasi Bisnis di Asian Institute Management Philippines – Institute Management Bandung TELKOM University (1993)
Master of Business Administration from Asian Institute Management Philippines – Institute Management Bandung TELKOM University (1993)
- Magister Hukum di George Washington University (1998)
Master of Law from George Washington University (1998)
- Vice President Legal & Compliance PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (2006 – 2007)
Vice President Legal & Compliance at PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (2006 – 2007)
- Vice President Regulatory Management PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (2007 – 2012)
Vice President Regulatory Management at PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (2007 – 2012)
- Direktur Human Capital Management PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) (2012 – 2014)
Human Capital Management Director at PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) (2012 – 2014)
- Direktur Human Capital PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (2014 – 2019)
Human Capital Director at PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (2014 – 2019)
- Staf Khusus V Menteri BUMN Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN (2019)
Special Staff V to the Minister of SOEs for Human Resources Development of the Ministry of SOEs (2019)
- Direktur Human Capital PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2019 – 2021)
Human Capital Director at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2019 – 2021)
- Direktur SDM & Digital PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) (2021 – Sekarang)
Director of Human Capital & Digital at PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) (2021 – Present)

Pengalaman Kerja

Work Experience

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis of Appointment

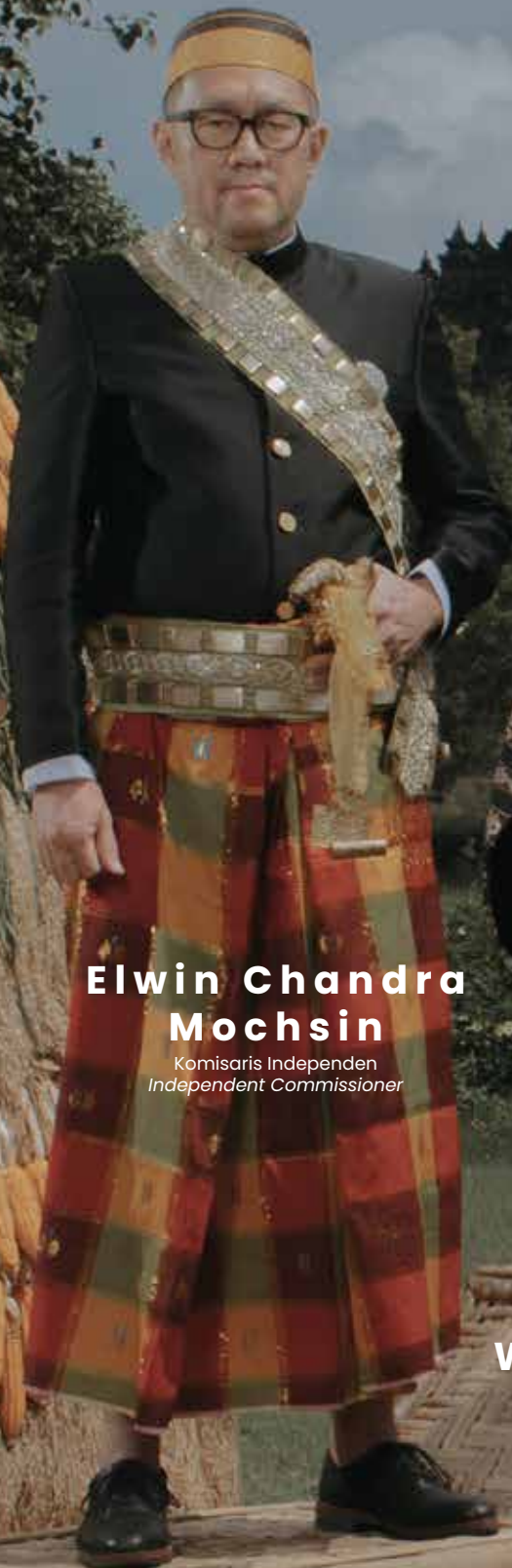
Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-336/MBU/10/2021

*Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.**SK-336/MBU/10/2021***Periode Jabatan**

Term of Office

4 Oktober 2021 – Sekarang

October 4, 2021 – Present



**Elwin Chandra
Mochsin**

Komisaris Independen
Independent Commissioner



**Wihana Kirana
Jaya**

Komisaris
Commissioner



Triawan Munaf

Komisaris Utama
President Commissioner



Profil Dewan Komisaris
Profile of Board of Commissioners

**Odo Rene Mathew
Manuhutu**

Komisaris
Commissioner





Triawan Munaf
Komisaris Utama
President Commissioner

Usia/Umur Age	63 tahun per Desember 2021 63 years old per December 2021	
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen	
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Parahyangan Bandung (1976) • Menempuh pendidikan di School of Computer Technology, London UK (1978 – 1980) • Menempuh pendidikan di Television Training Center, London UK, bidang studi Organization, Business Management and Operational aspects of Commercial Television Organization. (1978 – 1980) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bachelor of Social and Political Sciences, Parahyangan University, Bandung (1976)</i> • <i>He studied at the School of Computer Technology, London, UK (1978 – 1980)</i> • <i>He studied at the Television Training Center, London, UK, majoring in Organization, Business Management and Operational aspects of Commercial Television Organization (1978 – 1980)</i>
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja di berbagai posisi di Fortune Indonesia/Dancer Fitzgerald Sampel (DFS) (1982-1987); • Bekerja sebagai Account Director di AdForce J. Walter Thompson, Jakarta (1987 – 1989); • Mendirikan AdWork! Beriklan dengan Sjahrial Djalil dan Dion Siswandi (1989); • Presiden Direktur/CEO/Direktur Kreatif Eksekutif AdWork! EURO Kemitraan RSCG (1989 – 1999); • Ketua, Penasihat Kreatif dan salah satu pendiri AdWork! EURO RSCG Partnership, Agen Periklanan yang sebagian dimiliki oleh EURO RSCG Worldwide, kemudian menjadi HAVAS (1999 – 2010); • Pendiri dan Ketua Advocado (PT Senopati Guntur) (2011 – Sekarang); • Kepala Badan Ekonomi Kreatif (2015 – 2019); • Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2020 – 2021); • Wakil Ketua Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di KADIN (2021 – Sekarang); • <i>Penasihat Usaha di EAST VENTURES (2020 – Sekarang);</i> • <i>Komisaris di NUSANTICS (2021 – Sekarang);</i> • <i>Senior Advisor di SIRCLO (2021 – Sekarang);</i> • <i>Presiden Komisaris di TipTip (2022 – Sekarang);</i> • <i>Komisaris Utama di PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) (2021-Sekarang).</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>He worked in various positions at Fortune Indonesia/Dancer Fitzgerald Sample (DFS) (1982-1987);</i> • <i>He worked as Account Director at AdForce J. Walter Thompson, Jakarta (1987 – 1989);</i> • <i>He founded AdWork! Advertising with Sjahrial Djalil and Dion Siswandi (1989);</i> • <i>President Director/CEO/Executive Creative Director of AdWork! EURO RSCG Partnership (1989 – 1999);</i> • <i>Chairman, Creative Advisor and co-founder of AdWork! EURO RSCG Partnership, Advertising Agency partially owned by EURO RSCG Worldwide, which eventually became HAVAS (1999 – 2010);</i> • <i>Founder and Chairman of Advocado (PT Senopati Guntur) (2011 – Present);</i> • <i>Head of Creative Economy Agency (2015 – 2019);</i> • <i>President Commissioner at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2020 – 2021);</i> • <i>Vice-Chairman for Tourism and Creative Economy of KADIN (Indonesian Chamber of Commerce) (2021 – Present);</i> • <i>Venture Advisor, EAST VENTURES (2020 – Present);</i> • <i>Commissioner, NUSANTICS (2021 – Present);</i> • <i>Senior Advisor, SIRCLO (2021 – Present);</i> • <i>President Commissioner, TipTip (2022 – Present);</i> • <i>President Commissioner at PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) (2021 – Present).</i>
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-337/MBU/10/2021	<i>The Decree of the Minister of State-Owned Enterprise No. SK-337/MBU/10/2021</i>
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Anggota Komite Audit	<i>Audit Committee Member</i>
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Tidak ada	<i>He has no affiliate relationship</i>
Periode Jabatan Term of Office	4 Oktober 2021 – Sekarang	<i>October 4, 2021 – Present</i>



Wihana Kirana Jaya

Komisaris
Commissioner

Usia/Umur
Age

63 tahun per Desember 2021

63 years old per December 2021

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Riwayat Pendidikan
Educational
Background

- Sarjana Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1983)
- S2 Uang, Bank dan Keuangan, Departemen Ekonomi, Universitas Birmingham, Inggris (1990)
- S3 Ekonomi Departemen Ekonomi, Universitas Monash, Melbourne (2008)
- Profesor, Bidang Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (2010)

- Bachelor of Economics from Faculty of Economics, Gadjah Mada University (1983)
- Master of Money, Banking and Finance, Department of Economics, University of Birmingham, UK (1990)
- Doctoral Degree in Economics, Department of Economics, Monash University, Melbourne (2008)
- Professor in Economics, Gadjah Mada University (2010)

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Kepala Pelatihan Manajemen Sektor Ekonomis Strategis, PUOD, Depdagri (1994-1996)
- Wakil Direktur program Magister Ekonomika Pembangunan (1996-1999)
- Wakil Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (2006-2007)
- Tim Asistensi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (2008-2009)
- Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM
- Konsultan Kerjasama Antar Daerah, USAID (2008-2009)
- Konsultan Desentralisasi Bank Pembangunan Asia (2009-2010)
- Konsultan Keuangan Daerah, Bank Dunia (2010-2011)
- Konsultan AIPEG, AUSAID, Konsultan Desentralisasi Kewenangan, DSF, Bank Dunia (2011)
- Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal, dan Tim Pengarah Kursus Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan (2010-2013)
- Wakil Dekan bidang Mahasiswa, Alumni, Kerjasama dan Pengembangan Usaha, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM (2009-2012)
- Tim optimalisasi Penerimaan Negara, Kemenkeu, Narasumber Menteri Keuangan Desentralisasi Fiskal, Kemenkeu (2012-2015)
- Dekan FEB UGM, pertama di Indonesia memperoleh akreditasi sekolah bisnis dunia AACSB dan menjadi asesor pertama dari Indonesia AACSB di Curtin School of Business (2013-2016)
- Komisararis Independen AXA Mandiri (2015)
- Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi (2016-sekarang)
- Komisararis PT Pelindo IV (2017-2020)
- Advisor dalam ERIA Research Project dengan tema Indonesia Maritime Policy and Progress: An Analytical Review (2018)
- Komisararis PT Angkasa Pura I (2020 - 2021)
- Komisararis PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) (Oktober 2021 - Sekarang)

- Head of Strategic Economic Sector Management Training, PUOD, Ministry of Home Affairs (1994-1996)
- Deputy Director of Master of Development Economics Program (1996-1999)
- Deputy Director of the Center for Economic Studies and Public Policy (2006-2007)
- Regional Financial Assistance Team, Ministry of Home Affairs (2008-2009)
- Director of the Center for Economic Studies and Public Policy, UGM (PSEKP)
- Inter-Regional Cooperation Consultant, USAID (2008-2009)
- Decentralization Consultant of Bank Pembangunan Asia (2009-2010)
- Regional Financial Consultant, World Bank (2010-2011)
- Consultant of AIPEG, AUSAID, Decentralization of Authority Consultant, DSF, World Bank (2011)
- Fiscal Decentralization Assistance Team, and Regional Finance Course Steering Team, Ministry of Finance (2010-2013)
- Deputy Dean for Students, Alumni, Cooperation and Business Development, Faculty of Economics and Business, UGM (2009-2012)
- State Revenue Optimization Team, Ministry of Finance, Resource of the Minister of Finance on Fiscal Decentralization, Ministry of Finance (2012-2015)
- Dean of Faculty of Economics and Business, UGM, first in Indonesia to obtain AACSB world business school accreditation and become the first assessor from Indonesia AACSB at Curtin School of Business (2013-2016)
- Independent Commissioner of AXA Mandiri (2015)
- Special Staff of the Minister of Transportation for the Economy and Transportation Investment (2016-present)
- Commissioner of PT Pelindo IV (2017-2020)
- Advisor for ERIA Research Project with the theme Indonesia Maritime Policy and Progress: An Analytical Review (2018)
- Commissioner of PT Angkasa Pura I (2020-2021)
- Commissioner of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) (2021 - present)

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-337/MBU/10/2021

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-337/MBU/10/2021

Jabatan Rangkap
Concurrent Position

Anggota Komite Audit

Audit Committee Member

Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationship

Tidak ada

He has no affiliate relationship

Periode Jabatan
Term of Office

4 Oktober 2021 - Sekarang

October 4, 2021 - Present



Odo Rene Mathew Manuhutu
Komisaris
Commissioner

Usia/Umur	51 tahun
<i>Age</i>	<i>51 years old</i>
Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
<i>Citizenship</i>	<i>Indonesian Citizen</i>
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • University of Oxford, Diplomacy-International Relations (1998); • Master of Arts & International Relations, The Fletcher School at Tuft University (2006); • Harvard University Kennedy School of Government, Master of Public Administration, Public Policy (2011).
<i>Educational Background</i>	
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Sekolah dan Staf Pimpinan Luar Negeri (Sesparlu) (Desember 2014–April 2018) • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia • Direktur Keselamatan dan Navigasi Maritim (Maret 2018 - Maret 2020) • Direktur Ekonomi Kreatif (Maret - Juni 2020) • Deputi Menteri Koordinator Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Juni 2020 - Sekarang)
<i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Director of Sekolah dan Staf Pimpinan Luar Negeri (Sesparlu) (December 2014–April 2018)</i> • <i>Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs of the Republic of Indonesia</i> • <i>Maritime Safety and Navigation Director (March 2018 - March 2020)</i> • <i>Creative Economy Director (March - June 2020)</i> • <i>Deputy Coordinating Minister for Tourism and Creative Economy (June 2020 - Present)</i>
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-337/MBU/10/2021
<i>Legal Basis of Appointment</i>	<i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-337/MBU/10/2021</i>
Jabatan Rangkap	Anggota Komite Audit
<i>Concurrent Position</i>	<i>Audit Committee Member</i>
Hubungan Afiliasi	Tidak ada
<i>Affiliate Relationship</i>	<i>He has no affiliate relationship</i>
Periode Jabatan	4 Oktober 2021 - Sekarang
<i>Term of Office</i>	<i>October 4, 2021 - Present</i>



Elwin Chandra Mochsin
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Usia/Umur

Age

48 tahun

*48 years old***Kewarganegaraan**

Citizenship

Warga Negara Indonesia

*Indonesian Citizen***Riwayat Pendidikan**

Educational Background

Sarjana Desain Komunikasi Visual ITB (1997)

*Bachelor of Visual Communication Design from ITB (1997)***Pengalaman Kerja**

Work Experience

- Senior Art Director dan Kepala Unit Bisnis di Caberawit Pariwara (1997 – 2000);
 - Founder & Creative Director di *virtualego.com* (2000 – 2003);
 - Dosen Desain Komunikasi Visual di Universitas Bina Nusantara (2000 – 2005);
 - Creative Director di OgilvyOne Jakarta (2002 – 2003);
 - Founder & Creative Director di PT XCR Marketing Communications (2004 – 2006);
 - Founder & Managing Creative Director Celsius Creative Lab (2007 – 2021);
 - Founder & Chairman at Celsius Creative Lab (2021 – Sekarang);
 - President Creative Circle Indonesia (2009 – 2015);
 - Chairman Citra Pariwara (2016 – 2017);
 - Co-Founder TIPS Inovasi Logistik (2016 – sekarang);
 - Communication Director Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) (2017 – 2018);
 - Chairman Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jakarta (2019 – sekarang);
 - Komisaris Independen di PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) (2021 – sekarang);
-
- *Senior Art Director and Head of Business Unit at Caberawit Pariwara (1997 – 2000);*
 - *Founder & Creative Director at virtualego.com (2000 – 2003);*
 - *Lecturer of Visual Communication Design at Bina Nusantara University (2000 – 2005);*
 - *Creative Director at OgilvyOne Jakarta (2002 – 2003);*
 - *Founder & Creative Director at PT XCR Marketing Communications (2004 – 2006);*
 - *Founder & Managing Creative Director at Celsius Creative Lab (2007 – 2021);*
 - *Founder & Chairman at Celsius Creative Lab (2021 – present);*
 - *President of Creative Circle Indonesia (2009 – 2015);*
 - *Chairman of Citra Pariwara (2016 – 2017);*
 - *Co-Founder of TIPS Inovasi Logistik (2016 – present);*
 - *Communication Director of Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) (2017 – 2018);*
 - *Chairman of Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jakarta (2019 – present);*
 - *Independent Commissioner at PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) (2021 – present);*

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis of Appointment

SK Menteri BUMN Nomor: SK-337/MBU/10/2021

*Decree of the Minister of State-Owned Enterprise No. SK-337/MBU/10/2021***Jabatan Rangkap**

Concurrent Position

Ketua Komite Audit di PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)

*Audit Committee Chairman at PT Aviassi Wisata Indonesia (Persero)***Hubungan Afiliasi**

Affiliate Relationship

Tidak ada

*He has no affiliate relationship***Periode Jabatan**

Term of Office

4 Oktober 2021 – Sekarang

October 4, 2021 – Present



Profil Pejabat Eksekutif

Profile of Executive Officers

Achmad Syahir
Vice President Human
Capital Business Partner

Syafrudin
Senior Vice President of
Finance Strategy and Control
**Bergabung tanggal 1 Februari 2022*
**Joined on February 1 2022*

Heru Kurniawan*
Vice President of Procurement
**Bergabung pada tanggal 7 Februari 2022*
**Joined on 7 February 2022*

Yudhaprana Sugarda
Vice President of Project
Investment, Business
Development & Portfolio

Yudi Maisa
Vice President
of Risk Management

Sudarto
Vice President of
Budgeting & Financial
Accounting

Binta Prabasena
Vice President of Corporate
Planning & Performance Management

Bogi Aditya S. Nugroho*
Senior Vice President of Transformation
& Change Management
**Bergabung pada tanggal 17 Januari 2022*
**Joined on 17 January 2022*



Muhammad Urrasyid*

PLT Vice President of Finance
and Human Capital Shared Services
*Bergabung pada tanggal 1 April 2022
*Joined on 1 April 2022



Guntar PM Siahaan

Vice President of Treasury & Financing



Eko Wahyudi

Head of Collaborative
Crisis Management



Garnita Pratiwi

Vice President of Legal



Qodie Ibrahim

Project Controller
*Bergabung pada tanggal 1 Februari 2022
*Joined on 1 February 2022

Indah Permatasari Saugi*

Senior Vice President of Corporate Secretary
*Bergabung pada tanggal 10 Januari 2022
*Joined on 10 January 2022

Robby Saputra

Vice President of Enterprise
Information Technology



Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Platform Digital

Human Resource Development and Digital Platform

Keberlanjutan bisnis sangat berkaitan erat dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sebagai upaya memberikan pelayanan prima, seluruh proses perekrutan SDM dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan mengedepankan prinsip keterbukaan, kesetaraan, meritokrasi, dan kewajaran.

Komposisi karyawan InJourney per 31 Desember 2021 terdiri atas 9.830 orang. Sebanyak 5 orang karyawan berasal dari PT Survai Udara Panas (Persero). Selama tahun 2021, InJourney merekrut karyawan baru sebanyak 5 orang yang merupakan karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan 30 orang karyawan perbantuan yang berasal dari seluruh anak usaha InJourney.

Business sustainability is closely related to quality human resources (HR). As an effort to provide excellent service, the entire Human Resources recruitment process is carried out based on the company's needs and prioritizes the principles of openness, equality, meritocracy, and fairness.

As of December 31, 2021, the composition of InJourney's employees consisted of 9,830 employees. A total of 5 employees came from PT Survai Udara Panas (Persero). During 2021, InJourney recruited 5 new PWKT (Fixed-Term Employment Agreement) employees and 30 assisting employees from all of InJourney's subsidiaries.



Inisiatif Memperkuat *Human Capital* di InJourney

Sepanjang tahun 2021, InJourney berupaya memperkuat sistem internal sebelum melangkah lebih jauh memimpin sektor aviasi dan pariwisata di Indonesia. Adapun inisiatif memperkuat *Human Capital* di InJourney, yaitu:

Human Capital Council

Human Capital Council merupakan perhimpunan pimpinan *Human Capital* di lingkungan grup Perusahaan. *Human Capital Council* diharapkan dapat menjadi forum modernisasi pengelolaan *Human Capital*, meningkatkan kualitas informasi pengelolaan *Human Capital* di seluruh anak perusahaan, serta menjadi wadah pemberian saran dan pengambilan keputusan-keputusan terkait *Human Capital*. Kegiatan *Human Capital Council* dilaksanakan secara rutin setiap satu bulan sekali. Diselenggarakan secara tentatif baik melalui pertemuan langsung maupun daring.

Initiatives to Strengthen Human Capital in InJourney

Throughout 2021, InJourney endeavored to strengthen its internal system before going any further to lead the aviation and tourism sectors in Indonesia. The initiatives to strengthen Human Capital in InJourney include:

Human Capital Council

Human Capital Council is an association of Human Capital leaders within the Company group. Human Capital Council is expected to be a forum for modernizing Human Capital management, improving the quality of information on Human Capital management in all subsidiaries, as well as being a forum for providing advice and making decisions related to Human Capital. Human Capital Council activities are carried out regularly once a month and tentatively either through face-to-face or online meetings.

Workshop Human Capital

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Digital menyelenggarakan *Workshop Human Capital* yang diselenggarakan pada 8 November 2021. Acara ini dihadiri oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Digital beserta seluruh jajaran di lingkup *InJourney Group*. Pada kesempatan tersebut, seluruh jajaran Human Capital membahas *Human Capital Architecture InJourney Group* yang direalisasikan melalui *Human Capital Framework* dan *Human Capital MOVE-FORWARD*.

InJourney Talks #1

InJourney Talks hadir sebagai upaya mempererat silaturahmi antara seluruh Insan *InJourney*. Acara yang diselenggarakan di Sasono Langen Budoyo TMII pada 15 Desember 2021 ini, berfokus pada pengenalan *InJourney* di kalangan member. Sekaligus menjadi kesempatan perdana BoD *InJourney* menyapa seluruh Insan *InJourney* baik di lingkup *online* maupun *offline*.

Workshop Human Capital

The Directorate of Human Resources and Digital held a *Human Capital Workshop* on November 8, 2021. The event was attended by Human Capital and Digital Director and all ranks within *InJourney Group*. On such occasion, all ranks of Human Capital discussed *Human Capital Architecture of InJourney Group* realized through *Human Capital Framework* and *Human Capital MOVE-FORWARD*.

InJourney Talks #1

InJourney Talks is present as an effort to strengthen the relationship between all *InJourney* personnel. The event, which was held at Sasono Langen Budoyo TMII on December 15, 2021, put an emphasis on introducing *InJourney* among members. In addition, It was also the first opportunity for *InJourney's* BoD to greet all *InJourney's* Personnel *online* and *offline*.



Komposisi Karyawan berdasarkan Level Organisasi

Employee Composition By Organizational Level

Tabel Komposisi Karyawan *InJourney* berdasarkan Level Organisasi Tahun 2020-2021
Table of *InJourney* Staff Composition Based on Organizational Level 2020-2021

(dalam satuan orang)
in a unit of persons

Level Jabatan Position Level	2021	2020
BOD-1	111	1
BOD-2	292	0
BOD-3	589	0
Staf/Officer	3,411	1



Komposisi Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Composition By Education Level

Tabel Komposisi Karyawan Injourney Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021
Table of Injourney Staff Composition Based on Education Level 2021

(dalam satuan orang)
in number of persons

Pendidikan Education Level	2021	2020
S2 atau lebih Master or higher	296	1
S1 atau D4 Bachelor or D4	3,291	1
D1 - D3	2,301	0
SD – SMA Elementary - High School	3,942	0

Komposisi Karyawan berdasarkan Rentang Usia

Staff Composition based on Age Group

Tabel Komposisi Karyawan Injourney Berdasarkan Rentang Usia Tahun 2021
Table of Injourney Staff Composition Based on Age Group 2021

(dalam satuan orang)
in number of persons

Rentang Usia	2021
	Total
41 - 56	2.629
31 - 40	4.511
20 - 30	2.690
Jumlah	9.830

Komposisi Karyawan berdasarkan Wilayah Kerja

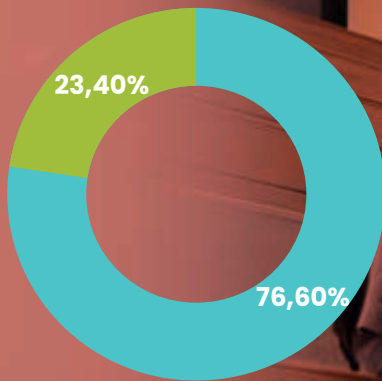
Employee Composition By Work Area

Tabel Perbandingan Jumlah Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2020 – 2021 (dalam satuan orang)
Table of Comparison of Employee Numbers by Work Area 2020 - 2021 (in number of persons)

URAIAN DESCRIPTION	TAHUN YEAR	
	2021	2020
Angkasa Pura I	3,231	3,407
Angkasa Pura II	5,411	5,637
Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko	208	248
Sarinah	288	306
Hotel Indonesia Natour	458	2,304
Injourney	37	5
TOTAL	9,830	11,907

Komposisi Karyawan Injourney Berdasarkan Gender

Composition of Injourney's Employees by Gender



- Pria: 7.530 orang (76,60%)
Male: 7,530 people (76.60%)
- Wanita: 2.300 orang (23,40%)
Female: 2,300 people (23.40%)

Injourney berkomitmen dalam praktik perekrutan dan ketenagakerjaan talenta-talenta terbaik dengan mengedepankan kesempatan yang setara dan antidiskriminasi, baik terkait gender, suku bangsa, maupun indikator keberagaman lainnya. Injourney memenuhi hak-hak normatif karyawan, kebebasan berserikat, serta kesempatan untuk mengembangkan karir dan kompetensi.

Keterwakilan perempuan dan milenial dalam komposisi karyawan dan manajemen akan menunjang memiliki parameter indikator pengembangan talenta. Pada KPI tahun 2021, target rasio proporsi perempuan adalah 7% dengan realisasi 27,7%, dalam *nominated talent* dan target 5% rasio milenial dengan pencapaian 11% dalam *nominated talent*. Sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir, perempuan dan generasi muda milenial memiliki peran penting bagi transformasi BUMN. Injourney akan berupaya memenuhi target-target KPI yang ditetapkan tentang keterwakilan perempuan dan milenial dalam *nominated talent*.

InJourney is committed to recruit and employ the best talents by prioritizing equal opportunity and anti-discrimination, related to gender, ethnicity, and other indicators of diversity. Injourney fulfills employees' normative rights, freedom of association, as well as opportunities for career development and competence.

The representation of women and millennials in the composition of employees and management will support indicator parameters for talent development. In the 2021 Key Performance Indicators, the targeted ratio for proportion of women was 7% with a realization of 27.7% in the nominated talent and 5% for the targeted millennial ratio with an achievement of 11% in the nominated talent. In accordance with the directive of the Minister of SOEs, Erick Thohir, women and millennials play a key role in the transformation of State-Owned Enterprises. Injourney strives to meet the KPI targets set on the representation of women and millennials in the nominated talent.

Erick Thohir:

“Bagi saya generasi milenial bukanlah beban dan ancaman, tapi justru menjadi inspirasi energi. Generasi muda harus diberikan kesempatan ini, bukan hanya sebagai eksekutor, tetapi sebagai pemikir dan juga pemimpin. Dalam pengembangan talenta, saya juga memastikan kesetaraan gender terjadi di mana target direksi perempuan sebanyak 15 persen dan kami harapkan 25 persen pada 2023 mendatang”

Erick Thohir's:

“For me, the millennial generation is not a burden and a threat, but rather an inspiration for energy. The younger generation should be given this opportunity, not only as executors, but also as thinkers and leaders. In talent development, I also ensure gender equality where the target for female directors is 15 percent and we expect that the target will be 25 percent in 2023.”



Pengembangan Digital Platform

Pengembangan IT di lingkup InJourney dilakukan sejalan dengan upaya transformasi digital di lingkup BUMN atau yang lebih dikenal dengan INDI 4.0. Selain itu, InJourney akan melakukan konsolidasi *capability* IT dan *assessment* IT *Maturity Level* di Holding dan Sub Holding. Sehingga nantinya, berbagai layanan aviasi dan pariwisata dapat diakses oleh pengguna melalui satu aplikasi.

Pembentukan InJourney pada akhir tahun 2021 dimanfaatkan sebagai momentum untuk menyusun berbagai rencana pada pengembangan IT. Fokus pengembangan IT akan dilaksanakan pada tahun 2022. Secara garis besar, Unit Enterprise Information Technology berfokus untuk mengembangkan SSO Procurement, Human Capital, Finance & Accounting.

InJourney terus berupaya mengembangkan berbagai platform digital untuk mendukung kegiatan operasi yang unggul dan menjawab tantangan perkembangan digitalisasi dalam kegiatan perkantoran. Adapun program inisiatif yang telah direncanakan, antara lain:

E-Office

Di tahun 2021, InJourney tengah mengembangkan sistem administrasi perkantoran digital dalam menunjang pengelolaan administrasi perusahaan. Pola kerja yang berubah sejak pandemi melanda dunia menyebabkan seluruh kinerja perkantoran dituntut untuk memiliki sistem pengelolaan, penyimpanan, dan pengontrolan dokumen serta persuratan yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

Digital Platform Development

IT development within InJourney is carried out in accordance with digital transformation efforts within SOEs or better known as INDI 4.0. In addition, InJourney carries out consolidation on IT capability and assesses IT Maturity Level in Holding and Sub Holding. Thus, aviation and tourism services can be accessed by users through an application.

As of the end of 2021, InJourney establishment was used as a momentum to formulate a variety of plans for IT development. IT development will be implemented in 2022. In general, the Enterprise Information and Technology Unit put an emphasis on developing SSO Procurement, Human Capital, Finance & Accounting.

InJourney continues to strive to develop various digital platforms to support excellent operations and respond to the challenges of digitalization development in office activities. The planned initiative programs include:

E-Office

In 2021, InJourney developed digital office administration system to support the management of company administration. Due to changing work patterns since the pandemic hit the global economy, all office performances are required to have a system for managing, storing, and controlling documents and correspondence that can be accessed anywhere and anytime.



Dalam penyusunannya, *E-Office* merupakan hasil kolaborasi antara Unit Information Technology yang berperan membangun sistem dan Unit Human Capital yang melakukan *mapping organization structure*. *E-Office* telah diterapkan pada lingkup Holding dan dalam tahap pengembangan lebih lanjut untuk dapat dimanfaatkan juga oleh seluruh anak usaha. Kedepannya, *E-Office* menjadi sistem yang terintegrasi antara Holding dan seluruh grup usaha.

During the preparation, E-Office is the product of a collaboration between the Information Technology Unit playing a role in establishing the system and Human Capital Unit carrying out the organizational structure mapping. E-Office has been implemented within the Holding and is in the stage of further development to be used by all subsidiaries. Henceforward, E-Office will become an integrated system between Holding and all business groups.

“Website Injourney”



Dalam upaya meningkatkan visibilitas, kredibilitas, serta memberikan berbagai informasi menarik terkait kegiatan Injourney, Injourney tengah mengembangkan situs web perusahaan yang dapat diakses melalui <https://Injourney.id/>. Unit Enterprise Information Technology berkolaborasi dengan Corporate Secretary dalam menyusun konten pada *website* dan rencana pengembangan lebih lanjut. Situs perusahaan memberikan informasi rencana perjalanan dan informasi tata kelola perusahaan. Lebih lanjut, situs perusahaan Injourney akan menjadi media bagi wisatawan untuk merencanakan perjalanan wisata, menentukan destinasi, akomodasi, dan membeli cinderamata. Seluruh layanan dan produk yang ditawarkan kepada wisatawan merupakan hasil dari lini usaha Injourney. Situs Injourney juga akan terintegrasi dengan Tourism Collaborative Platform (TCP), Injourney's tourism service in the form of *mobile apps*.

In an effort to increase visibility, credibility, and provide various interesting information related to Injourney's activities, Injourney has developed a company website that can be accessed through <https://Injourney.id/>. The Enterprise Information Technology Unit carries out collaboration with Corporate Secretary in compiling content on the website and further development plan. The company's website provides information on travel plan and corporate governance. Furthermore, Injourney's website serves as a platform for tourists to plan their trips, determine destinations, accommodation, and buy souvenirs. All services and products offered to tourists are the outcomes of Injourney's line of business. Injourney's website is integrated with Tourism Collaborative Platform (TCP), Injourney's tourism service in the form of mobile apps.

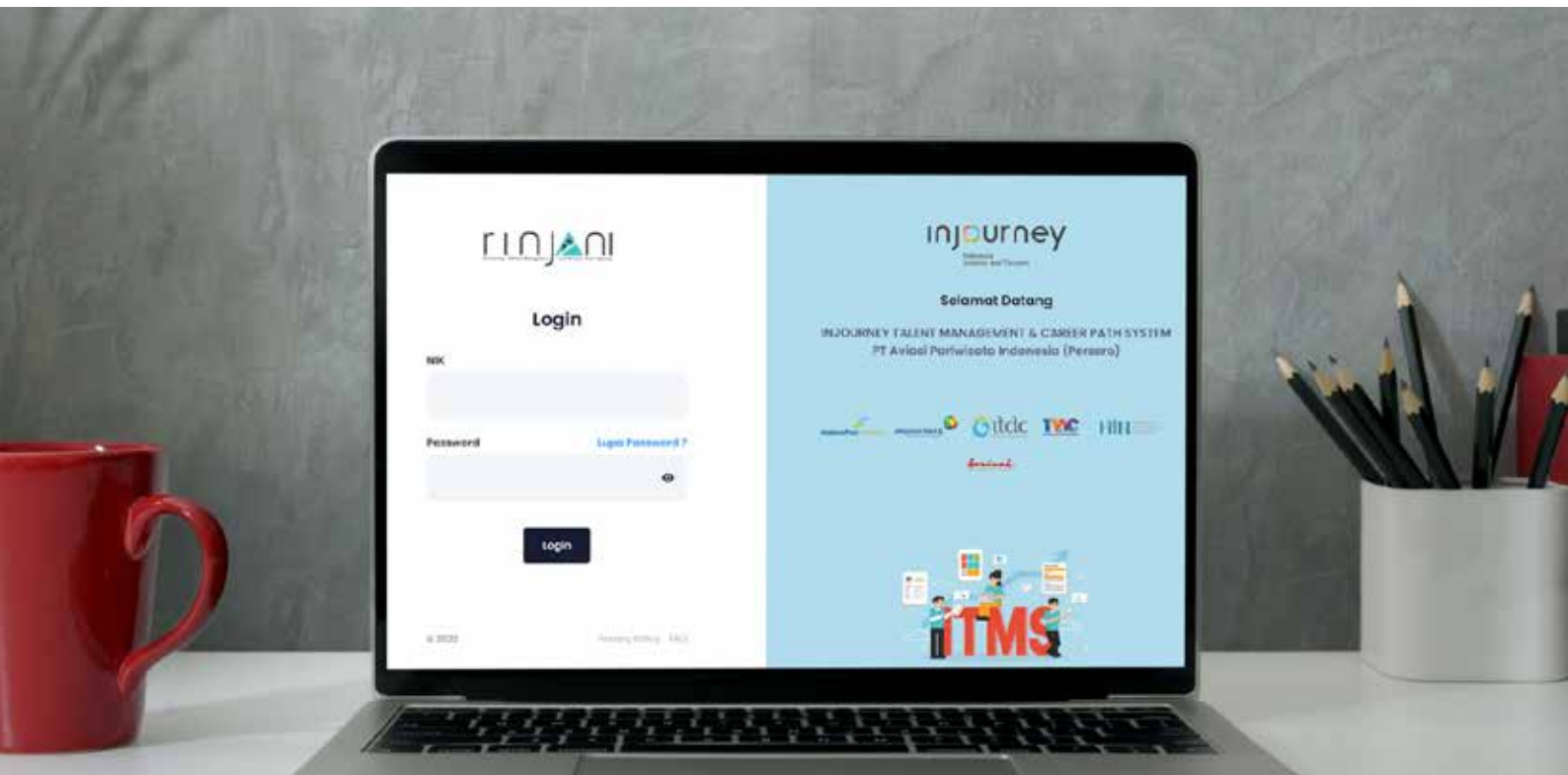


Injourney Talent Management and Career Path System “Rinjani”

Pada saat penyusunan laporan, Injourney tengah mengembangkan *Talent Management and Career Path System* atau yang dikenal dengan “Rinjani”. Sebuah sistem pengelolaan talenta Insan Injourney yang mengintegrasikan fungsi *Talent Planning, Talent Acquisition, Talent Development & Talent Retention* melalui platform digital.

Injourney Talent Management and Career Path System “Rinjani”

During the preparation of this report, Injourney has developed Talent Management and Career Path System, also known as “Rinjani”. The talent management system for Injourney Personnel incorporates Talent Planning, Talent Acquisition, Talent Development & Talent Retention functions through a digital platform.



Dalam Rinjani, terdapat *tools* pengelolaan sumber daya manusia Injourney dalam menentukan pola karir/*talent planning*. Sistem ini memungkinkan semua Insan Injourney telah memiliki *database* yang terintegrasi melalui *Application Programming Interface (API)*. Ke depannya, dengan adanya “Rinjani” perusahaan dapat melihat kebutuhan organisasi dengan rencana karir karyawan, menentukan pola pembinaan karyawan, tersedianya karyawan dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, serta menjaga motivasi karyawan untuk terus berani mengembangkan karir.

Rinjani features Injourney’s human resource management tools in determining career/talent planning patterns. The system allows all Injourney Personnel to have an integrated database through Application Programming Interface (API). In the future, with the existence of “Rinjani”, the company can determine the organization’s needs with employee career plans, determine pattern of employee development, availability of employees with competencies that meet the Company’s needs, and maintain employees motivation to continue to develop their careers.

Payment Gateway 'Injourney'

Untuk mendukung Perhelatan MotoGP yang akan dilaksanakan pada Maret 2022, Injourney melakukan kolaborasi dengan Livin Mandiri untuk sistem penjualan tiket MotoGP. Dengan memanfaatkan *platform mobile apps* Livin Mandiri yang terintegrasi dengan *Payment Gateway 'Injourney'* dan didukung XPlorin yang merupakan *platform* sub holding Injourney. Kolaborasi antar *platform* ini diharapkan menjadi capaian pendapatan bagi Injourney.

SSO Procurement, HR, Finance and Accounting

Hingga akhir tahun 2021, proses *SSO Procurement, HR, Finance and Accounting* masih dalam tahap pengembangan, dan diharapkan dapat digunakan pada tahun 2022. Dalam pengembangan usaha yang lebih lanjut, Injourney akan mengimplementasikan *Shared Services Operation (SSO) Procurement, Human Resource and Accounting*. Melalui *SSO Procurement, Human Resource, and Accounting* diharapkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa dapat mempermudah proses *procurement* secara grup, meningkatkan *cost saving*, serta efisiensi pengadaan barang dan jasa. Ketentuan terkait pengadaan barang dan jasa di Injourney telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP.01/INJOURNEY/09/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Hingga proses penulisan Laporan Tahunan ini, proses pengembangan *SSO Procurement, Human Resource, and Accounting* berada dalam tahap pengkajian dari hasil rekomendasi *in-depth interview* untuk penerapan *SSO Procurement, Human Resource, and Accounting*.

Payment Gateway 'Injourney'

To support the MotoGP event held in March 2022, Injourney carried out collaboration with Livin Mandiri on the MotoGP ticket sales system. By utilizing Livin Mandiri mobile apps platform integrated with Payment Gateway 'Injourney' and supported by XPlorin, Injourney's sub holding platform. The collaboration between the platforms is expected to achieve the Company's target revenue.

SSO Procurement, HR, Finance and Accounting

As of the end of 2021, SSO Procurement, HR, Finance and Accounting process is under development stage, and is expected to be used in 2022. In further business development, Injourney will implement Shared Services Operation (SSO) Procurement, Human Resource and Accounting. Through SSO Procurement, Human Resource, and Accounting, it is expected that the entire process of procurement of goods and services can facilitate the group procurement process, increase cost saving, and efficiency in the procurement of goods and services. Provisions on the procurement of goods and services in Injourney are stipulated in the Decree of the Board of Directors No. SKEP.01/INJOURNEY/09/2021 on Guidelines for Procurement of Goods and Services. During the preparation of this Annual Report, SSO Procurement, Human Resource, and Accounting development process is in the review phase from the results of in-depth interview recommendations for the implementation of SSO Procurement, Human Resource, and Accounting.



Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Composition

Injourney adalah perusahaan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung yang 100% kepemilikannya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN.

Injourney is an aviation and tourism holding company which is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises.

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Total Issued and Paid-up Shares	Kepemilikan Saham Share Ownership	Total
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	65,164,367	100%	Rp65,164,367,000,000

Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Yayasan

Subsidiaries, Associated Entities and Foundations

Sebagai holding pariwisata Indonesia, Injourney memiliki 5 anak perusahaan yang akan memberikan layanan terbaik bagi seluruh pengguna jasa. Injourney belum memiliki entitas asosiasi maupun yayasan sepanjang tahun 2021

As an Indonesia tourism holding, Injourney has 5 subsidiaries to provide the best service for all service users. Injourney does not have any associates or foundations throughout 2021

Anak Perusahaan PT Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero) per 31 Desember 2021
PT Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero) Subsidiaries as of December 31, 2021

Nama Name	Persentase Kepemilikan Saham Injourney pada Entitas Anak Shares Owned	Jumlah Aset (Rp) Total Assets (Rupiah)
PT Angkasa Pura I	99.99998%	6,414,411,000
PT Angkasa Pura II	99.99999%	15,971,651,000
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko	99.9996%	249,999,000
PT Hotel Indonesia Natour	99.999%	101,699,000
PT Angkasa Pura I	99.998%	46,849,000

Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Name and Address of Supporting Agencies/ Professions

Peran Role	Nama Lembaga Name Of Agency	Jasa Yang Diberikan Services Provided
Notaris Notary	Desman, S.H.,M.H. Jl. Muara Karang Raya No. 10 Jakarta Utara, 14450 Telp(021) 663 0328 (Hunting) 666 00923 Fax. (021)	Membuat akta dan perubahannya serta mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM Making the deed and its amendments and publishing notification to the Minister of Law and Human Rights



PT Angkasa Pura I

Grha Angkasa Pura I, Kota Baru Bandar
Kemayoran Blok BI2 Kav.2 Jakarta Pusat, DKI
Jakarta – Indonesia 10610

PT Angkasa Pura I didirikan dengan nama awal Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran yang didirikan pada 20 Februari 1962 dan diresmikan berdasarkan PP No. 33 tahun 1962. Angkasa Pura I berfokus pada bidang usaha layanan jasa kebandarudaraan dan layanan jasa terkait bandara di wilayah tengah dan timur Indonesia.

PT Angkasa Pura I was established with the initial name Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran on February 20, 1962 and was inaugurated based on Government Regulation No. 33/1962. Angkasa Pura I put emphasis on the business lines of airport services and airport-related services in the central and eastern regions of Indonesia.





Bandar Udara Di Bawah Kelola Angkasa Pura I:

Business Activities of Angkasa Pura I

1. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali
2. Bandar Udara Juanda – Surabaya
3. Bandar Udara Sultan Hasanuddin – Makassar
4. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan – Balikpapan
5. Bandar Udara Frans Kaisiepo – Biak
6. Bandar Udara Sam Ratulangi – Manado
7. Bandar Udara Syamsudin Noor – Banjarmasin
8. Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani – Semarang
9. Bandar Udara Adisutjipto – Yogyakarta
10. Bandar Udara Adi Soemarmo – Surakarta
11. Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid – Lombok
12. Bandar Udara Pattimura – Ambon
13. Bandar Udara El-Tari – Kupang
14. Bandar Udara Internasional Yogyakarta – Kulon Progo
15. Bandar Udara Sentani – Jayapura

Anak Perusahaan Angkasa Pura I:



Komposisi Kepemilikan Saham PT Angkasa Pura I Per 31 Desember 2021
Share Ownership of PT Angkasa Pura I as of December 31, 2021

Pemegang Saham <i>Shareholder</i>	Penyertaan Modal <i>Equity Capital</i>	Lembar Saham <i>Shares</i>	Persentase <i>Percentage</i>
Pemerintah Indonesia <i>Government of The Republic of Indonesia</i>	1,000	1	0.00002
PT Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero)	6,414,411,000	6,414,411	99.99998
Total	6,414,412,000	6,414,412	100

Kegiatan Usaha Angkasa Pura I

A. Kegiatan usaha utama:

1. Penyediaan, pengusahaan, dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
2. Penyediaan, pengusahaan, dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
3. Penyediaan, pengusahaan, dan pengembangan jasa pelayanan penerbangan;
4. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, navigasi, listrik, air, dan instalasi limbah buangan;
5. Penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan dan kawasan industri serta Gedung/bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara;

Business Activities of Angkasa Pura I

A. Main business activities:

1. *Provision, operation and development of facilities for aircraft landing, take-off, parking and hangar services;*
2. *Provision, operation and development of terminal facility for passenger, cargo and postal transportation services;*
3. *Provision, operation, and development of aviation services;*
4. *Provision, operation and development of electronic, navigation, electricity, water and waste treatment facilities;*
5. *Provision of land for constructions, fields and industrial estates as well as building/structure to ensure smooth air traffic.*

6. Penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan dan pelayanan penerbangan;
7. Penyediaan jasa pelayanan yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan yang meliputi penyediaan hangar udara, perbengkelan pesawat udara, jasa *ramp*, jasa pelayanan penumpang dan bagasi, jasa penanganan kargo dan surat, pelayanan jasa *load control*, komunikasi dan operasi penerbangan, pelayanan jasa pengamanan, pelayanan jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat udara, penyediaan dan pendistribusian bahan bakar pesawat udara;
8. Penyediaan jasa pelayanan yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara yang meliputi jasa penyediaan penginapan/hotel, jasa penyediaan toko, penyediaan restoran dan bar (*cafe*), jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir, jasa perawatan pada umumnya (kegiatan jasa yang melayani pembersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor di bandar udara), jasa penyediaan otomatisasi pelaporan keberangkatan penerbangan;
9. Jasa penunjang kegiatan bandar udara lainnya, meliputi penjualan bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor di bandar udara, jasa pelayanan pengangkutan barang, penumpang di terminal kedatangan dan pemberangkatan jasa pelayanan pos jasa pelayanan telekomunikasi, jasa tempat bermain dan rekreasi, jasa aluan wisata, agen perjalanan, bank untuk pelayanan jasa perbankan di bandar udara, penukaran uang, jasa pelayanan angkutan darat, penitipan barang, jasa advertensi, *first class lounge*, *business class lounge*, dan *VIP room*, *hairdresser and beauty salon*, *agrobisnis service*, *nursery*, asuransi, jasa penyediaan ruangan, *vending machine*, jasa pengelolaan limbah buang, jasa pelayanan kesehatan, jasa penyediaan kawasan industri, jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara.

Usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan yang berada di luar daerah lingkungan kerja bandar udara, meliputi usaha properti, pergudangan, perkantoran, perhotelan, perumahan, apartemen, bursa mobil, bengkel, restoran, SPBU, pusat perbelanjaan dan bisnis pariwisata, resort, olahraga dan rekreasi, rumah sakit, pendidikan dan penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perusahaan serta optimalisasi pemanfaatan dana Perusahaan melalui pasar modal dan pasar uang.

6. *Provision of consulting, education and training services related to airports and aviation services;*
7. *Provision of services that directly support aviation activities, including the provision of hangar, aircraft repair shop, ramp services, passenger and baggage services, cargo and mail handling services, load control services, communication and flight operations, security services, aircraft maintenance and repair services, aircraft fuel supply and distribution services;*
8. *Provision of services that directly or indirectly support airport activities, including accommodation/hotel provision services, shop provision services, restaurant and bar (cafe) provision, vehicle placement/parking services, general maintenance services (cleaning service and maintenance of buildings and offices at airports), services for providing automatic flight departure reporting.*
9. *Other airport activity support services, including sales of vehicle fuel and lubricants at airports, freight transport services, services for passengers at arrival and departure terminals, postal services, telecommunication services, playground and recreation services, travel services, travel agents, ATM for banking services at airports, money changers, land transportation services, baggage storage, advertising services, first-class lounges, business class lounges and VIP rooms, hairdressers and beauty salons, agribusiness services, nursery room, insurance, space provision services, vending machines, waste management services, health services, industrial estate provision services, other services that directly or indirectly support airport activities.*

Businesses in order to optimize the utilization of the Company's resources outside the airport work area, including property, warehousing, office, hotel, housing, apartment, car exchange, workshop, restaurant, gas station, shopping center and tourism business, resort, sport and recreation, hospital, education and research, telecommunication infrastructure and energy resources, rental services and operations of facilities and infrastructure owned by the Company as well as optimize the utilization of the Company funds through capital market and financial market.



PT Angkasa Pura II

PT Angkasa Pura II, Soekarno-Hatta International
Airport Building 600
PO BOX 1001/BUSH, Jakarta 19120

PT Angkasa Pura II merupakan salah satu anak usaha Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di 20 bandara yang tersebar di seluruh wilayah barat Indonesia.

PT Angkasa Pura II is a subsidiary of the State-Owned Enterprise engaged in airport services and airport-related services at 20 airports spreading throughout western Indonesia.



Bandar Udara Di Bawah Kelola Angkasa Pura II:

Airports Under the Management of Angkasa Pura II:

1. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh
2. Bandar Udara Kualanamu – Deli Serdang
3. Bandar Udara Silangit – Siborong-borong
4. Bandar Udara Minangkabau – Padang
5. Bandar Udara Sultan Thaha – Jambi
6. Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II – Palembang
7. Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II – Pekanbaru
8. Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah – Tanjung Pinang
9. Bandar Udara Depati Amir – Pangkal Pinang
10. Bandar Udara Supadio – Pontianak
11. Bandar Udara Soekarno-Hatta – Tangerang
12. Bandar Udara Halim Perdanakusuma – Jakarta
13. Bandar Udara Husein Sastranegara – Bandung
14. Bandar Udara Banyuwangi – Banyuwangi
15. Bandar Udara Kertajati – Subang
16. Bandar Udara Tjilik Riwut – Palangkaraya
17. Bandar Udara Fatmawati Soekarno – Bengkulu
18. Bandar Udara Radin Inten II – Lampung
19. Bandar Udara HAS Hanandjoeddin – Tanjung Pandan
20. Bandara Udara Jenderal Besar Soedirman – Purbalingga

Anak Perusahaan Angkasa Pura II:

Subsidiaries of Angkasa Pura II:



Komposisi Kepemilikan Saham PT Angkasa Pura II Per 31 Desember 2021

Share Ownership of PT Angkasa Pura II as of December 31, 2021

Pemegang Saham <i>Shareholder</i>	Penyertaan Modal <i>Equity Capital</i>	Lembar Saham <i>Shares</i>	Persentase <i>Percentage</i>
Pemerintah Indonesia <i>Government of The Republic of Indonesia</i>	1,000	1	0,00001
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	15,971,651,000	15,971,651	99,99999
Total	15,971,652,000	15,971,652	100

Produk dan Layanan

Products and Services

A. Pelayanan jasa kebandarudaraan mencakup layanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas;

1. Penyediaan, pengusahaan dan/atau pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, maneuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
2. Penyediaan, pengusahaan dan/atau pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos;
3. Penyediaan, pengusahaan dan/atau pengembangan fasilitas elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan; dan

A. *Airport services include aircraft, passenger, freight, and postal services consisting of;*

1. *Provision, operation and/or development of facilities for aircraft landing, take-off, parking and hangar services;*
2. *Provision, operation and/or development of terminal facility for passenger, cargo and postal transportation services;*
3. *Provision, operation and/or development of electronic, electricity, water and waste treatment facilities; and*



4. Penyediaan, pengusahaan dan/ atau pengembangan lahan untuk bangunan, lapangan dan kawasan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

B. Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara, meliputi kegiatan:

1. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, terdiri atas:
 - a. Penyediaan hanggar pesawat udara;
 - b. Perbengkelan pesawat udara;
 - c. Pergudangan;
 - d. Katering pesawat udara;
 - e. Pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (Ground Handling);
 - f. Pelayanan penumpang dan bagasi;
 - g. Penanganan kargo dan pos;
 - h. Pelayanan jasa load control;
 - i. Komunikasi dan operasi penerbangan di darat;
 - j. Pelayanan jasa pengamanan;
 - k. Pelayanan penyediaan dan/atau pendistribusian bahan bakar pesawat udara.
2. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang, terdiri atas:
 - a. Penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel;
 - b. Penyediaan toko dan restoran;
 - c. Penyimpanan kendaraan bermotor;

4. *Provision, operation and/or development of land for constructions, fields and industrial estates as well as building/ structure to ensure smooth air traffic.*

B. *Airport Related Services, including:*

1. *Airport related services to support aircraft operation services at airports, consisting of:*
 - a. *Provision of hangars;*
 - b. *Aircraft repair shop;*
 - c. *Warehousing;*
 - d. *Aircraft catering;*
 - e. *Ground Handling;*
 - f. *Passenger and baggage services;*
 - g. *Cargo and postal handling;*
 - h. *load control services;*
 - i. *communication and flight operations on the ground;*
 - j. *Security services;*
 - k. *Aircraft fuel supply and/or distribution services.*
2. *Services to support passenger and goods services, consisting of:*
 - a. *Provision of accomodation/hotel and transit hotel;*
 - b. *Provision of shop and restaurant;*




- d. Pelayanan kesehatan;
e. Perbankan dan/atau penukaran uang;
f. Transportasi darat;
g. Perawatan pada umumnya (kegiatan jasa yang melayani pembersihan dan/atau pemeliharaan, Gedung dan perkantoran/*maintenance building*).
3. Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara, terdiri atas:
- a. Penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - b. Penyediaan fasilitas perkantoran;
 - c. Penyediaan fasilitas olahraga;
 - d. Penyediaan fasilitas Pendidikan dan pelatihan;
 - e. Penjualan/pengisian bahan bakar dan/atau pelumas kendaraan bermotor;
 - f. Periklanan;
 - g. Jasa pelayanan telekomunikasi;
 - h. Jasa aluan wisata;
 - i. Agen perjalanan;
 - j. Penitipan barang;
 - k. *Lounge* dan/atau *VIP room*;
 - l. *Beauty salon*;
 - m. *Agrobisnis service*;
 - n. *Nursery*;
 - o. Asuransi;
 - p. *Vending machine*;
 - q. Perkeretaapian khusus;
 - r. Jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung memberikan nilai tambah bagi kegiatan bandar udara.
- c. *Vehicle placement*;
- d. *Health service*;
- e. *Banking and/or money exchange*;
- f. *Land transportation*;
- g. *General maintenance (cleaning service and/or maintenance of buildings and offices)*
3. *Services to provide added value for airport operations, consisting of:*
- a. *Provision of playground and recreation areas*;
 - b. *Provision of office facility*;
 - c. *Provision of sports facility*;
 - d. *Provision of education and training facility*;
 - e. *Sales/refueling and/or vehicle lubricant*;
 - f. *Advertising*;
 - g. *telecommunication service*;
 - h. *Travel service*;
 - i. *Travel agent*;
 - j. *Baggage storage*;
 - k. *Lounge and/or VIP room*;
 - l. *Beauty salon*;
 - m. *Agrobusiness service*;
 - n. *Nursery*;
 - o. *Insurance*;
 - p. *Vending machine*;
 - q. *Special Railways*;
 - r. *Other services that directly or indirectly provide added value to airport activities.*



PT Taman Wisata Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

Jl. Raya Yogya-Solo KM. 16, Prambanan, Sleman,
D.I Yogyakarta 55561



PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko lahir sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap upaya untuk melestarikan dan menjaga harta peninggalan sejarah dan budaya. Kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan kawasan peninggalan sejarah, khususnya candi-candi dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial budaya dan masyarakat, sejalan dengan tugas utama untuk mendukung pelestarian peninggalan sejarah candi.

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko was established due to the Government's concern for efforts to preserve and protect historical and cultural heritage. The concern was manifested in the management of historical heritage areas, especially temples, while taking into account environmental, socio-cultural and community aspects, in line with the main task of supporting the preservation of historical temple heritage.

Destination, Service and Attraction under the management of PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko:

1. Heritage Destination

- Borobudur Temple
- Prambanan Temple
- Ratu Boko Temple

2. Culture Destination

- Borobudur Study Center
- Siwarka Park
- Samudera Raksa Museum
- Taman Mini Indonesia Indah

3. Amenities

- Manohara Resto
- Dagi Abhinaya
- Rama Shinta Garden Resto
- The Manohara Hotel
- Royal Besaran

4. Attraction

- Sendratari Ramayana
- Roro Jonggrang
- Prambanan Jazz
- Borobudur Symphony

Komposisi Kepemilikan Saham PT Taman Wisata Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko per 31 Desember 2021
Share Ownership of PT Taman Wisata Borobudur Prambanan Ratu Boko as of December 31, 2021

Pemegang Saham Shareholder	Penyertaan Modal Equity Capital	Lembar Saham Shares	Persentase Percentage
Pemerintah Indonesia <i>Government of The Republic of Indonesia</i>	1,000	1	0.0004
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	249,999,000	249,999	99.9996
Total	250,000,000	250,000	100

Kegiatan usaha PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, antara lain:

1. Mengelola lingkungan Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Ratu Boko serta peninggalan sejarah dan purbakala lainnya sebagai taman wisata, termasuk kegiatan-kegiatan perencanaan teknis, pemeliharaan dan pengawasan lingkungannya, satu dan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Merencanakan, mengembangkan, dan memanfaatkan prasarana, sarana & fasilitas umum lainnya di lingkungan Taman Wisata Candi untuk kegiatan pariwisata;
3. Melakukan kegiatan usaha lainnya di bidang pariwisata.

Sejalan dengan RJPP PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko tahun 2020 – 2024, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko akan membagi mengelola 4 pilar bisnis yang berbeda, yaitu:

1. *Heritage Park*: Pilar bisnis utama sebagai pengelola cagar budaya pasca pugar yang ada di Indonesia dan di luar negeri, meliputi *temple, palace, building*;
2. *Cultural Park*: Pengembangan destinasi berbasis taman budaya dan alam, yang meliputi *cultural village, food park, art & craft village, cultural beach*;
3. *Tourism Amenities*: Pilar bisnis penunjang terkait, akomodasi, transportasi, dan hiburan yang meliputi penginapan (*homestay & hotel*), *transport & parking, retail & cinema*.
4. *Attraction*: Pilar bisnis berupa aktivitas seni dan budaya yang berhubungan dengan pariwisata, meliputi *art performance, cultural adventure, tour travel*, dan *event organizer*.

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko business activities include:

1. *Managing the environment of Borobudur Temple, Prambanan Temple, and Ratu Boko Temple as well as other historical and pre-historical heritage as a tourism park, including technical planning activities, maintenance, and environmental supervision, one and another in accordance with the applicable laws and regulations;*
2. *Planning, developing and utilizing public infrastructures and other facilities within the Temple Parks for tourism activities;*
3. *Conducting other business activities on tourism; and*

In accordance with the 2020–2024 RJPP, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko manages 4 different business pillars, including:

1. *Heritage Park: main business pillar as the manager of post-restored cultural heritage in Indonesia and abroad, including temple, palace, and building;*
2. *Cultural Park: Development of destinations based on cultural park and nature, including cultural village, food park, art & craft village, cultural beach;*
3. *Tourism Amenities: Supporting business pillars, accommodation, transportation and entertainment, including lodging (homestay & hotel), transport & parking, retail & cinema.*
4. *Attraction: The business pillar in the form of art and cultural activities related to tourism, including art performance, cultural adventure, tour travel, and event organizer.*

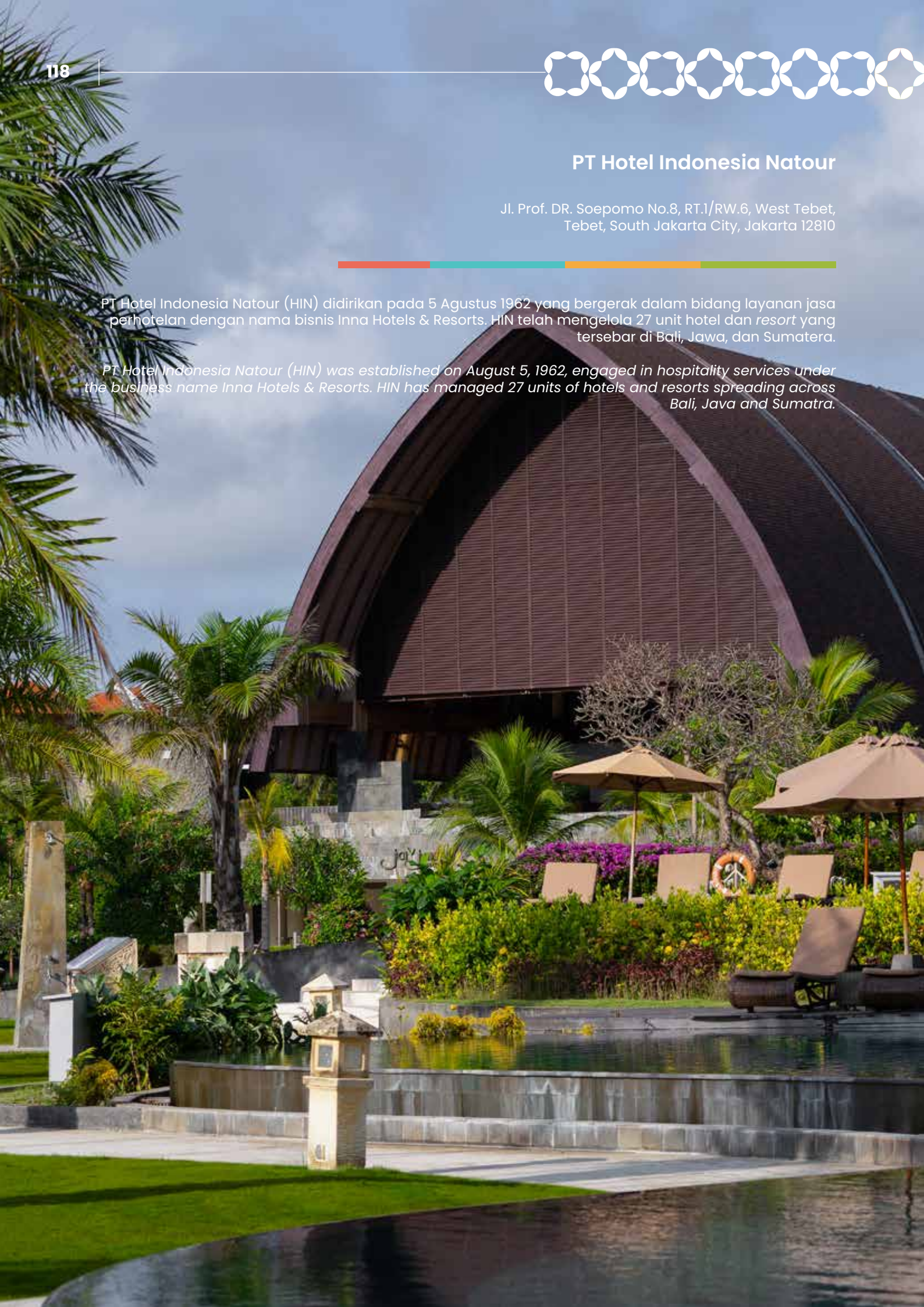


PT Hotel Indonesia Natour

Jl. Prof. DR. Soepomo No.8, RT.1/RW.6, West Tebet,
Tebet, South Jakarta City, Jakarta 12810

PT Hotel Indonesia Natour (HIN) didirikan pada 5 Agustus 1962 yang bergerak dalam bidang layanan jasa perhotelan dengan nama bisnis Inna Hotels & Resorts. HIN telah mengelola 27 unit hotel dan resort yang tersebar di Bali, Jawa, dan Sumatera.

PT Hotel Indonesia Natour (HIN) was established on August 5, 1962, engaged in hospitality services under the business name Inna Hotels & Resorts. HIN has managed 27 units of hotels and resorts spreading across Bali, Java and Sumatera.



Hotel di bawah pengelolaan HIN:*Hotels under HIN management.*

Meruska Nusa Dua, Meruorah Labuan Bajo, Merumatta Kila Senggigi, Grand Inna Kuta, Grand Inna Bali Beach, Grand Inna Malioboro, Grand Inna Medan, Truntum Padang, Grand Inna Tunjungan, Grand Inna Samudera Beach, Inna Bali Heritage, Inna Tretes Hotel & Resort, Inna Sindhu Beach, Inna Ombilin Heritage, Khas Tegal, Khas Pekalongan, Khas Gresik, Khas Parapat, Khas Pekanbaru, Khas Surabaya, Khas Malioboro, Khas Makassar, Khas Tugu, Khas Semarang, Jatiluhur Valley Hotel & Resort, Grand Inna Daira Palembang, Saka Tanjung Enim – Private for PTBA Only.

Komposisi Kepemilikan Saham PT Hotel Indonesia Natour Per 31 Desember 2021*Share Ownership of PT Hotel Indonesia Natour as of December 31, 2021*

Pemegang Saham <i>Shareholder</i>	Penyertaan Modal <i>Equity Capital</i>	Lembar Saham <i>Shares</i>	Persentase <i>Percentage</i>
Pemerintah Indonesia <i>Government of The Republic of Indonesia</i>	1,000	1	0.001
PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)	101,699,000	101,699	99.999
Total	101,700,000	101,700	100

HIG

truntum
PADANG

MERU KHAS



PT Sarinah

Gedung Sarinah, Jl. M. H. Thamrin No. 11, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350



Sarinah adalah anak usaha Injourney yang bergerak di bidang ritel. Didirikan berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 17 Agustus 1962 dengan nama PT Department Store Indonesia, Sarinah di bawah Injourney diharapkan menjadi pelopor bisnis ritel BUMN terbesar dan modern di Indonesia. Pada awal berdirinya, Sarinah diharapkan berfungsi sebagai distributor, stimulator, stabilisator harga, bahkan sebagai integrator yang mempunyai peran sebagai penghubung antara kepentingan produsen dan kepentingan konsumen dalam sistem distribusi nasional, sehingga dapat berpartisipasi dalam perubahan struktur perekonomian Indonesia.

Sarinah is a subsidiary of Injourney engaged in retail. Sarinah was established based on Deed No. 33 dated August 17, 1962 under the name PT Department Store Indonesia. Under Injourney, Sarinah is expected to be the pioneer of the largest and modern SOE retail business in Indonesia. At early establishment, Sarinah was expected to serve as a distributor, stimulator, price stabilizer, and integrator which play a role as a liaison between producer and consumer interests in the national distribution system in order to participate in changing the structure of the Indonesia's economy.

Komposisi Kepemilikan Saham PT Sarinah Per 31 Desember 2021
Share Ownership of PT Sarinah as of December 31, 2021

Pemegang Saham Shareholder	Penyertaan Modal Equity Capital	Lembar Saham Shares	Persentase Percentage
Pemerintah Indonesia <i>Government of The Republic of Indonesia</i>	1,000	1	0.002
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	46,849,000	46,849	46,849
Total	46,850,000	46,850	100



Lini Bisnis Sarinah

1. Retail

Sarinah sebagai 'Rumah Warisan Budaya Indonesia' menawarkan berbagai koleksi produk-produk kerajinan tangan, seni lukis, garmen tradisional (batik), kayu gaharu & kayu cendana melalui *department store* Sarinah.

2. Property & Hospitality

Dalam memberikan pengalaman yang berkesan bagi konsumen, Sarinah membangun sejumlah restoran di pusat perbelanjaan Sarinah. Layanan Sarinah juga merambah sektor properti melalui Layanan Hotel Sari Pacific dan Hotel Braga.

3. Trading & Sourcing

Melalui Divisi Perdagangan, Sarinah memastikan seluruh produk kemitraan dengan UMKM yang dipasarkan Sarinah telah memperoleh publisitas dan pangsa pasar yang tepat. Sarinah telah mengembangkan sejumlah produk seperti produk kerajinan tangan, *furniture* kayu, kain batik, dan aneka karya seni khas Indonesia untuk merambah pasar mancanegara.

Business Line of Sarinah

1. Retail

Sarinah as the 'Indonesian Cultural Heritage House' offers vast line of handicraft products, paintings, traditional garments (batik), agarwood & sandalwood through the Sarinah department store.

2. Property & Hospitality

In providing a memorable experience for consumers, Sarinah has constructed a number of restaurants in the Sarinah shopping center. Sarinah's services have penetrated the property sector through Hotel Sari Pacific and Hotel Braga.

3. Trading & Sourcing

Through the Trade Division, Sarinah ensures that all partnership products with MSMEs marketed by Sarinah have received the right publicity and market share. Sarinah has developed a number of products such as handicrafts, wooden furniture, batik cloth, and a variety of Indonesian artworks to reach foreign markets.

Kronologis Pencatatan Obligasi dan Sukuk

Bond and Sukuk Listing Chronology

Hingga akhir tahun 2021, Injourney belum melakukan penjualan dan pencatatan obligasi maupun sukuk.

As of the end of 2021, Injourney has not issued bond and sukuk trade and listing.



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Penghargaan

Awards

Tingkat Internasional Penghargaan International Awards	
<p>Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang meraih penghargaan dalam ajang Airport Service Quality (ASQ) Award 2020 yang diselenggarakan oleh Airports Council International (ACI) pada 1 Maret 2021 dalam kategori "Best Airport by Size in Asia Pacific – dengan traffic 2 hingga 5 juta penumpang per tahun"</p> <p><i>Jenderal Ahmad Yani Airport – Semarang won an award at the Airport Service Quality (ASQ) Award 2020 organized by Airports Council International (ACI) on March 1, 2021 in the category "Best Airport by Size in Asia Pacific – with traffic of 2-5 million passengers per year"</i></p>	<p>Bandara Sultan Hasanuddin Makassar meraih penghargaan dalam ajang Airport Service Quality (ASQ) Award 2020 yang diselenggarakan oleh Airports Council International (ACI) pada 1 Maret 2021 dalam kategori "Best Airport by Size in Asia Pacific – dengan traffic 5 hingga 15 juta penumpang per tahun"</p> <p><i>Sultan Hasanuddin Airport – Makassar won an award at the Airport Service Quality (ASQ) Award 2020 organized by Airports Council International (ACI) on March 1, 2021 in the category "Best Airport by Size in Asia Pacific – with traffic of 5-15 million passengers per year"</i></p>
<p>Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan meraih penghargaan dalam ajang Airport Service Quality (ASQ) Award 2020 yang diselenggarakan oleh Airports Council International (ACI) pada 1 Maret 2021 dalam kategori "Best Airport by Size in Asia Pacific – dengan traffic 5 hingga 15 juta penumpang per tahun"</p> <p><i>SAMS Sepinggan Airport – Balikpapan won an award at the Airport Service Quality (ASQ) Award 2020 organized by Airports Council International (ACI) on March 1, 2021 in the category "Best Airport by Size in Asia Pacific – with traffic of 5-15 million passengers per year"</i></p>	<p>Bandara Internasional Yogyakarta meraih penghargaan dalam ajang Airport Service Quality (ASQ) Award 2020 yang diselenggarakan oleh Airports Council International (ACI) pada 1 Maret 2021 dalam kategori "Best Airport by Size in Asia Pacific – dengan traffic 5 hingga 15 juta penumpang per tahun"</p> <p><i>Yogyakarta International Airport won an award at the Airport Service Quality (ASQ) Award 2020 organized by Airports Council International (ACI) on March 1, 2021 in the category "Best Airport by Size in Asia Pacific – with traffic of 5-15 million passengers per year"</i></p>
<p>Bandara Adi Soemarmo Surakarta meraih penghargaan dalam ajang Airport Service Quality (ASQ) Award 2020 yang diselenggarakan oleh Airports Council International (ACI) pada 1 Maret 2021 dalam kategori "Best Airport by Size in Asia Pacific – dengan traffic 2 hingga 5 juta penumpang per tahun"</p> <p><i>Adi Soemarmo Airport – Surakarta won an award at the Airport Service Quality (ASQ) Award 2020 organized by Airports Council International (ACI) on March 1, 2021 in the category "Best Airport by Size in Asia Pacific – with traffic of 2-5 million passengers per year"</i></p>	<p>Bandara Pattimura Ambon meraih penghargaan dalam ajang Airport Service Quality (ASQ) Award 2020 yang diselenggarakan oleh Airports Council International (ACI) pada 1 Maret 2021 dalam kategori "Best Airport by Size in Asia Pacific – dengan traffic di bawah 2 juta penumpang per tahun"</p> <p><i>Pattimura Airport – Ambon won an award at the Airport Service Quality (ASQ) Award 2020 organized by Airports Council International (ACI) on March 1, 2021 in the category "Best Airport by Size in Asia Pacific – with traffic under 2 million passengers per year"</i></p>
<p>PT Angkasa Pura I meraih penghargaan "Silver Winner" dalam ajang The Best Contact Center Indonesia Award 2021 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) pada 25 Oktober 2021 dalam kategori "The Best Contact Center Operations"</p> <p><i>PT Angkasa Pura I won Silver Winner award at The Best Contact Center Indonesia Award 2021 organized by Indonesia Contact Center Association (ICCA) on October 25, 2021 in the category "The Best Contact Center Operations"</i></p>	<p>PT Angkasa Pura I meraih penghargaan "Bronze Winner" dalam ajang The Best Contact Center Indonesia Award 2021 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) pada 25 Oktober 2021 dalam kategori "The Best Agent Inbound"</p> <p><i>PT Angkasa Pura I won Bronze Winner award at The Best Contact Center Indonesia Award 2021 organized by Indonesia Contact Center Association (ICCA) on October 25, 2021 in the category "The Best Agent Inbound"</i></p>



<p>PT Angkasa Pura II meraih penghargaan dalam ajang Airport Service Quality (ASQ) Award 2020 yang diselenggarakan oleh Airports Council International (ACI) pada 1 Maret 2021 dalam kategori "Best Hygiene Measures Asia – Pacific" untuk 6 bandara di bawah kelola Angkasa Pura II, yaitu:</p> <p><i>PT Angkasa Pura II won an award at the Airport Service Quality (ASQ) Award 2020 organized by Airports Council International (ACI) on March 1, 2021 in the category "Best Hygiene Measures Asia - Pacific" for 6 airports under the management of Angkasa Pura II, including:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Bandara Soekarno – Hatta (Tangerang);• Bandara Sultan Thaha (Jambi);• Bandara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru);• Bandara Supadio (Pontianak);• Bandara Depati Amir (Pangkalpinang);• Bandara Kualanamu (Medan)	<p>Bandara Soekarno Hatta memperoleh penghargaan "Health Accreditation" dari Airport Council International (ACI) dan Safe Travel Barometer pada 21 November 2021 .</p> <p><i>Soekarno Hatta Airport received "Health Accreditation" award from Airport Council International (ACI) and Safe Travel Barometer on November 21, 2021.</i></p>
<p>Bandara Soekarno Hatta memperoleh penghargaan kategori "World's Best Staff Airport 2021" dari Skytrax World Airport Awards 2021</p> <p><i>Soekarno Hatta Airport received an award in the category "World's Best Staff Airport 2021" from Skytrax World Airport Awards 2021</i></p>	<p>PT Angkasa Pura II meraih 3 kategori penghargaan dalam ajang Digital Technology & Innovation (Digitech) Award 2021 dalam kategori:</p> <ul style="list-style-type: none">• "The Best ICT Business Strategy"• "The Best IT Leadership dalam kategori Port & Logistics Industries"• "The Best Chief Executive Officer for Digital Transformation" <p><i>PT Angkasa Pura II won 3 award categories at Digital Technology & Innovation (Digitech) Award 2021 in the categories:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• "The Best ICT Business Strategy"• "The Best IT Leadership in the category of Port & Logistics Industries"• "The Best Chief Executive Officer for Digital Transformation"
<p>PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko memperoleh penghargaan dalam ajang TOP CSR Award 2021.</p> <p><i>PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko received an award at TOP CSR Award 2021.</i></p>	



Sertifikasi

Certification

Nama Sertifikasi Certification Name	Penerima Awardee	Tanggal Berlaku Validity
Sertifikat Bandar Udara (SBU) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia <i>Airport Certificate (SBU) from the Directorate General of Transportation, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia</i>	Bandar Udara El Tari Kupang	11 September 2020 – 30 Juli 2025
	Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali	5 Juni 2020 – 30 Juli 2025
	Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta	16 Oktober 2020 – 30 Juli 2025
	Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar	7 Juli 2020 – 7 Juli 2025
	Bandar Udara Juanda Surabaya	22 Juni 2020 – 30 Juli 2025
	Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan	10 Agustus 2020 – 30 Juli 2025
	Bandar Udara Pattimura Ambon	21 September 2020 – 31 Oktober 2025
	Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang	10 Juli 2020 – 2 September 2025
	Bandar Udara Sentani	10 Februari 2020 – 10 Februari 2025
	Bandar Udara Yogyakarta	26 April 2019 – 26 April 2024
	Bandar Udara Adi Soemarmo Surakarta	30 Juli 2020 – 30 Juli 2025
	Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarbaru	30 Juli 2020 – 30 Juli 2025
	Bandar Udara Sam Ratulangi Kota Manado	30 Juli 2020 – 30 Juli 2025
	Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid Lombok	Proses Tandatanganan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan RI Signed by the Directorate General of Transportation, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia
Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak	Proses Tandatanganan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan RI Signed by the Directorate General of Transportation, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia	



Nama Sertifikasi Certification Name	Penerima Awardee	Tanggal Berlaku Validity
<p>Sertifikasi ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Certification</p> <p>Ruang Lingkup: Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)</p> <p>Scope: <i>Airport Passenger Services (PJP2U), Aircraft Landing, Parking, and Hangar Services (PJP4U), Aircraft Cargo and Postal Services (PJKP2U)</i></p>	<p>1. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali 2. Bandar Udara Juanda – Surabaya 3. Bandar Udara Sultan Hasanuddin – Makassar 4. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan – Balikpapan 5. Bandar Udara Frans Kaisiepo – Biak 6. Bandar Udara Sam Ratulangi – Manado 7. Bandar Udara Syamsudin Noor – Banjarmasin 8. Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani – Semarang 9. Bandar Udara Adisutjipto – Yogyakarta 10. Bandar Udara Adi Soemarmo – Surakarta 11. Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid – Lombok 12. Bandar Udara Pattimura – Ambon 13. Bandar Udara El Tari – Kupang 14. Bandar Udara Yogyakarta – Kulon Progo 15. Bandar Udara Sentani – Jayapura</p>	<p>DAKKS 19 November 2021 – 18 November 2024</p> <p>DAKKS November 19, 2021 – November 18, 2024</p> <p>KAN 17 November 2021 – 16 November 2024</p> <p>KAN November, 17 2021 – November, 16 2024</p>
<p>Sertifikasi ISO 45001:2018 ISO 45001:2018 Certification</p> <p>Assessor: <i>Sucofindo International Certification Services</i></p>	<p>Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali Bandar Udara Juanda Surabaya Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Bandar Udara Adi Soemarmo – Surakarta Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang Bandar Udara Yogyakarta – Kulon Progo Bandar Udara Sentani</p>	<p>2021–2024 2022–2025 2022–2025 2022–2025 2022–2025 2022–2025 2022–2025</p>
<p>Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Bendera Emas</p> <p><i>Gold Flag Occupational Health and Safety Management System (SMK3) Certification</i></p> <p>Assessor: Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia</p> <p><i>Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia</i></p> <p>Ruang Lingkup: Pengelola Bandara</p> <p>Scope: <i>Airport Operator</i></p>	<p>Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin Bandar Udara Juanda Surabaya Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta Bandar Udara Sam Ratulangi Manado Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak Bandar Udara El Tari Kupang Bandar Udara Pattimura Ambon Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan – Balikpapan Bandar Udara Adi Soemarmo – Surakarta Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani – Semarang Bandar Udara Yogyakarta – Kulon Progo Bandar Udara Sentani – Jayapura Sentani Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid Lombok</p>	
<p>ISO 9001:2015 Quality Management Certification</p> <p>Assessor: British Standards Institution</p>	<p>PT Angkasa Pura II</p> <p>Airport Health Accreditation (AHA) Green Star Category</p>	<p>4 Desember 2021 – 3 Desember 2024 December 4, 2021 – December 3, 2024</p> <p>11 November 2021 – 11 November 2022 November 11, 2021 – November 11, 2022</p>



04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

“Restrukturisasi BUMN sektor aviasi dan pariwisata dilakukan melalui pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, yakni Injourney. Injourney merupakan mega ekosistem yang meliputi seluruh anak perusahaan BUMN yang terkait dengan industri pariwisata dan pendukung, seperti hotel, bandara, kargo, hingga destinasi wisata yang bertujuan menjadi katalis usaha pemulihan ekonomi nasional.”

“The restructuring of State-Owned Enterprises in the aviation and tourism sectors is carried out through the establishment of Tourism and Supporting SOE Holding, Injourney. As a a mega ecosystem, Injourney includes all SOE subsidiaries related to the tourism and supporting industries, such as hotels, airports, cargo, to tourist destinations that aim to be a catalyst to accelerate the national economic recovery.”







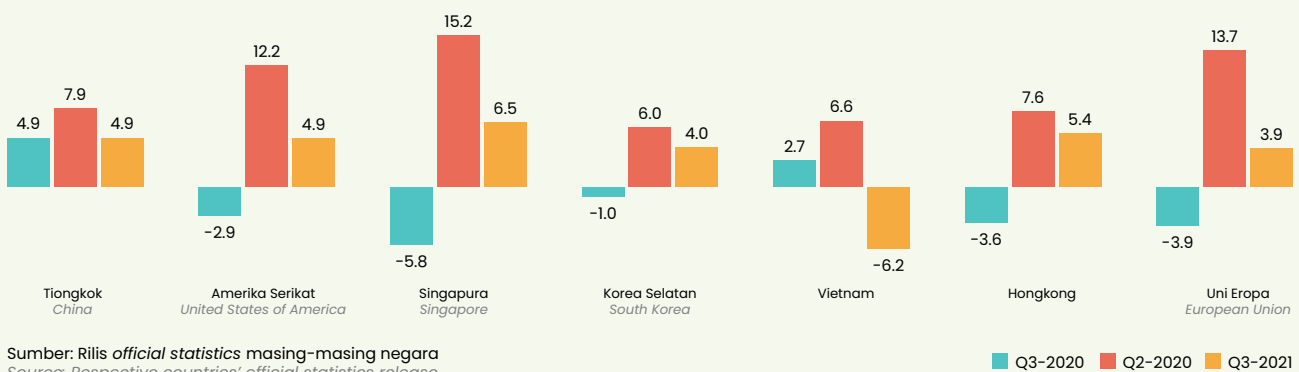
Tinjauan Ekonomi

Economic Overview

Perekonomian global masih mengalami beberapa tantangan pada tahun 2021. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 sebesar 5,9%, dengan realisasi *rebound* ke sekitar 5,5%. Pertumbuhan ekonomi global masih dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, terlebih terkait varian Delta dan varian Omicron yang menghambat aktivitas perniagaan dan perjalanan global. Tiongkok yang merupakan ekonomi terbesar dunia masih memberlakukan kebijakan *zero-tolerance* untuk COVID-19. Kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) di seluruh dunia turut memberikan dampak kontraksi ekonomi, menurunnya konsumsi, dan disruption rantai pasok global. Selain itu, krisis energi di beberapa negara dan beberapa hambatan pada rantai pasok global turut mendorong inflasi, terutama di negara-negara berkembang. Beberapa mitra dagang strategis Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang masih positif, antara lain Singapura (6,5%), Tiongkok dan Amerika Serikat (kisaran 4,9%), Hongkong (5,4%), dan Uni Eropa (3,9%).

The global economy experienced several challenges in 2021. The International Monetary Fund (IMF) projects 5.9% global economic growth for 2021, with a rebound to around 5.5%. Global economic growth was still affected by the COVID-19 pandemic, especially with the presence of Delta and Omicron variants, hampering global trade and travel activities. China, the world's largest economy, maintained zero-tolerance policy for COVID-19. Social distancing policies across the globe had an impact on economic contraction, decreased consumption, and disruption of global supply chains. In addition, the energy crisis in several countries and several constraints on global supply chains also contributed to inflation, especially in developing countries. Several strategic trading partners of Indonesia recorded positive economic growth, including Singapore (6.5%), China and the United States (around 4.9%), Hong Kong (5.4%), and the European Union (3.9%).

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Mitra Dagang Indonesia (year on year)
Economic Growth Development of Several Indonesian Trading Partners (year on year)



Prospek ekonomi global masih dibayangkan dampak penerapan pembatasan mobilitas, ketidakpastian pasar keuangan global, kekhawatiran gelombang COVID-19, serta antisipasi rencana kebijakan pengurangan stimulus moneter dari The Fed. Kondisi tersebut mendorong pengalihan aliran modal kepada

The outlook for the global economy was overshadowed by the impact of the mobility restrictions implementation, uncertainty in global financial markets, fears of the COVID-19 wave, as well as the anticipation of the Fed's planning to scale back its monetary stimulus. This condition drives the diversion of capital flows to financial

aset keuangan yang lebih dianggap aman, dan berdampak ke terbatasnya aliran modal ke negara berkembang.

Menghadapi kondisi yang penuh tantangan, Pemerintah Indonesia segera merespon dengan mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal, moneter, makro-mikroprudensial, inklusi, struktural, dan kebijakan lainnya. Namun demikian, perbaikan ekonomiterusberlanjut,terutamaolehpeningkatan kinerja ekspor, belanja fiskal, dan investasi non bangunan. Indonesia sendiri mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,96%, lebih tinggi dari tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 2,07%. Tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) dicatat meningkat 5,02% (y-o-y) pada kuartal ke-empat tahun 2021. Hal ini mengindikasikan perekonomian Indonesia yang mulai menggeliat. Berdasarkan daerah, kontribusi pertumbuhan ekonomi masih disumbang oleh pulau Jawa yang memiliki struktur spasial ekonomi terbesar di Indonesia. Berdasarkan sektor, lima sektor kontributor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

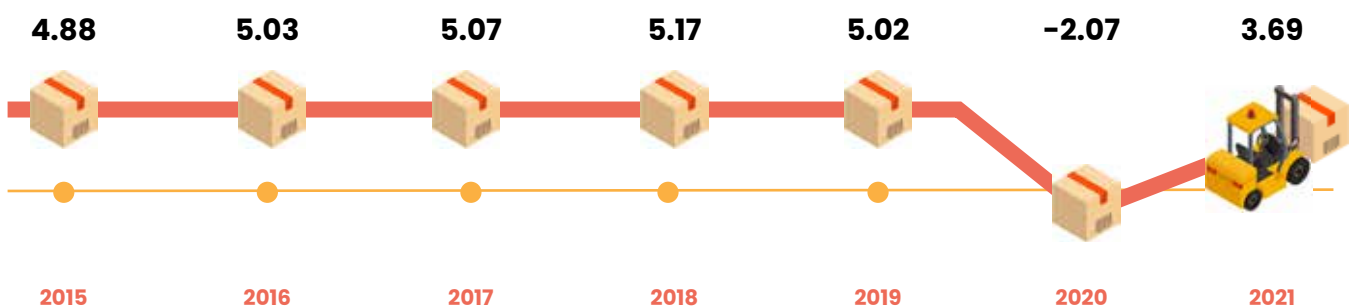
Kebijakan Amerika Serikat untuk normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga dan pengetatan likuiditas dolar berdampak ke negara dengan sistem ekonomi terbuka, seperti Indonesia. Dampak dirasakan dengan adanya defisit transaksi berjalan. Hal ini diantisipasi Pemerintah dengan perbaikan-perbaikan fundamental perekonomian, sehingga Indonesia masih sanggup tumbuh lebih baik dibandingkan negara-negara lain seperti Jepang dan Singapura.

assets that are considered safer and has an impact on limited capital flows to developing countries.

Facing challenging conditions, the Indonesian Government promptly responded by issuing various fiscal, monetary, macro-microprudential, inclusion, structural and other policies. Nevertheless, the economy showed continued improvement, particularly improvements in export performance, fiscal spending and non-construction investment. Indonesia recorded a realization of economic growth of 3.96%, higher than 2020 which contracted by 2.07%. The Gross Domestic Product (GDP) was recorded to increase by 5.02% (y-o-y) in the fourth quarter of 2021. This indicates that the Indonesian economy has expanded. By region, the contribution of economic growth was contributed by the island of Java, which has the largest economic spatial structure in Indonesia. By sector, the five main contributory sectors supporting Indonesia's economic growth include manufacturing, agriculture, trade, construction, and mining.

The United States' policy to normalize monetary policy by raising interest rates and tightening dollar liquidity has an impact on countries with open economic systems, such as Indonesia. The impact can be seen from the current account deficit, anticipated by the Government with improvements in economic fundamentals. Thus, Indonesia was able to grow better than other countries, such as Japan and Singapore.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2015-2021 (Persen)
Gross Domestic Product (GDP) 2015-2021 (Percent)





Sepanjang tahun 2021, Pemerintah Indonesia dengan gencar melaksanakan program vaksinasi secara masif sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Our World in Data pada saat laporan ini ditulis, vaksin COVID-19 telah diberikan kepada 10,9 miliar masyarakat di dunia. Indonesia menempati posisi ke-5 secara global untuk tingkat vaksinasi tertinggi. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, capaian vaksinasi nasional mencapai 280 juta dosis vaksin COVID-19, atau memenuhi target WHO sebesar minimal 40% penduduk negara di akhir tahun 2021.

Throughout 2021, the Indonesian Government aggressively implemented a massive vaccination program as an effort to prevent the spread of COVID-19 and accelerate economic recovery. Based on information released by Our World in Data during the preparation of this report, the COVID-19 vaccine has been administered to 10.9 billion people in the world. Indonesia ranks 5th globally for the highest vaccination rate. Based on information released by the Ministry of Health, the national vaccination achievement reached 280 million doses of COVID-19 vaccine, or met the WHO target of at least 40% of the country's population by the end of 2021.

Tinjauan Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia

Overview of Indonesia's Aviation and Tourism Industries

Menurut International Civil Aviation Organization (ICAO), pasar penerbangan global telah tumbuh secara eksponen dari 1,67 miliar jumlah penumpang di tahun 2000 menjadi 4,41 miliar di tahun 2019. Jika dilihat berdasarkan jumlah kunjungan berdasarkan moda transportasi yang digunakan, sebanyak 10,87% wisatawan mancanegara menggunakan transportasi udara pada Desember 2021. Pemberlakuan wajib tes PCR sebagai syarat perjalanan udara dan wajib antigen juga turut memengaruhi angka perjalanan wisatawan.

According to the International Civil Aviation Organization (ICAO), the global aviation market has grown exponentially from 1.67 billion passengers in 2000 to 4.41 billion in 2019. When viewed based on the number of visits by mode of transportation, 10.87% of foreign tourists used air transportation in December 2021. Mandatory PCR and antigen tests as a requirement for air travel also affected total number of travellers.

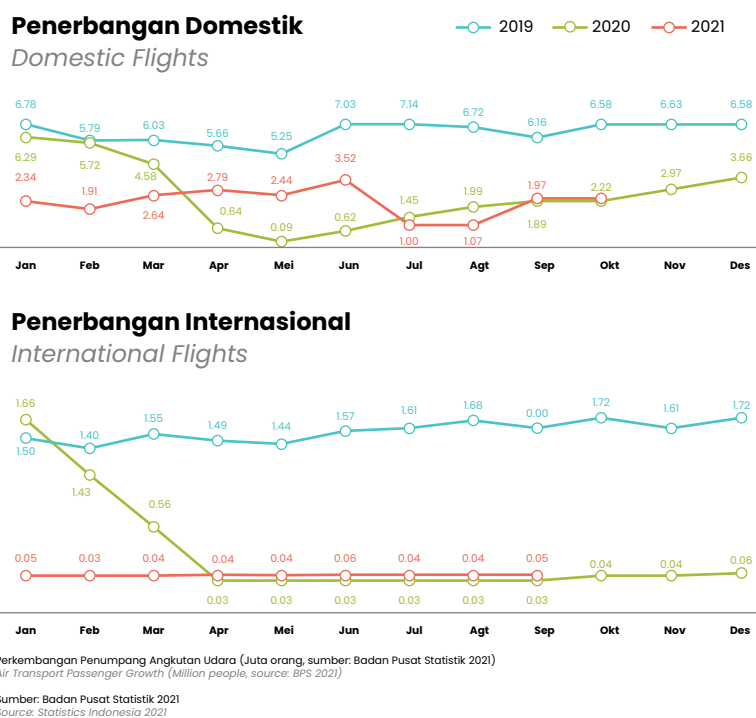


Di triwulan III 2021, pertumbuhan penerbangan domestik Indonesia tercatat sebesar -54% dibanding triwulan II, atau sebesar -24% dibanding tahun 2020. Penerbangan internasional pada triwulan III, turun -7% dibandingkan triwulan II, atau naik 4% dari tahun 2020.

Pertumbuhan pariwisata dan jumlah wisatawan mancanegara yang kuat menjadi peluang bagi maskapai domestik untuk dapat meningkatkan pangsa pasar, terutama untuk *inbound market* yang sebagian besar masih ditangkap oleh maskapai asing. Untuk menyambut peluang tersebut, maskapai domestik perlu mengatasi tantangan-tantangan antara lain: *branding* perusahaan di pasar luar negeri, serta biaya operasional yang tinggi, terutama biaya tetap (*fixed cost*).

In the third quarter of 2021, Indonesia's domestic flight growth was recorded at -54% compared to the second quarter, or at -24% compared to 2020. Total international flights in the third quarter fell by -7% compared to the second quarter, or increased by 4% compared to 2020.

Tourism growth and growing number of foreign tourists are opportunities for domestic airlines to increase market share, especially for the inbound market largely captured by foreign airlines. To welcome this opportunity, domestic airlines need to overcome challenges, including company branding in foreign markets and high operational costs, especially fixed costs.

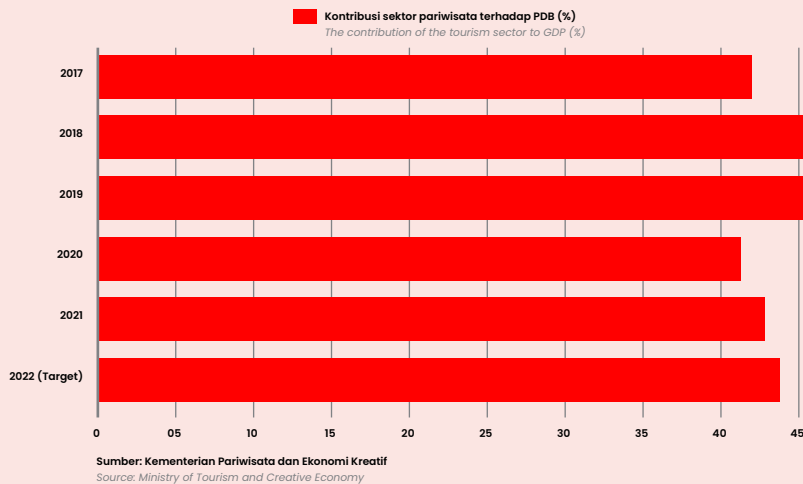


Industri pariwisata Indonesia pada tahun 2021 juga masih berupaya menggeliat naik, terutama terkait dampak pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi PDB Pariwisata diperkirakan meningkat 37,4% dari tahun 2020, sehingga mencapai angka 4,2% terhadap total PDB Indonesia pada tahun 2021. Tidak hanya itu, devisa pariwisata juga meningkat sebesar 4% dibandingkan tahun 2020, yakni dari US\$320 juta menjadi US\$360 juta.

In 2021, Indonesia's tourism industry endeavored to rebound, especially from the impact of the ongoing COVID-19 pandemic. The Central Statistics Agency (BPS) recorded that the contribution of tourism sector to GDP is estimated to increase by 37.4% from 2020, reaching 4.2% of Indonesia's total GDP in 2021. Moreover, foreign exchange in tourism sector has also increased by 4% compared to 2020, from US\$320 million to US\$360 million.



Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDB tahun 2017–2021 Contribution of Tourism Sector to GDP in 2017–2021



Menghadapi kondisi yang masih penuh volatilitas, Pemerintah Indonesia berupaya melakukan berbagai cara dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi stimulus bagi bangkitnya perekonomian Indonesia. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diluncurkan untuk mengurangi dampak COVID-19 pada perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, program PEN juga bertujuan untuk menanggulangi dampak penurunan aktivitas masyarakat pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Bagi sektor formal, Pemerintah Indonesia merencanakan strategi pemulihan ekonomi Indonesia di berbagai sektor secara menyeluruh. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021 telah menetapkan prioritas pada (i) pembangunan ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, (ii) pembangunan yang merata dan berkeadilan. Terdapat 6 Fokus Kebijakan APBN 2022 dengan tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Presiden Joko Widodo secara khusus memberikan arahan pada rapat terbatas tanggal 6 Agustus 2020, bahwa saat pandemi merupakan momentum transformasi bidang pariwisata dan penerbangan untuk menata lebih baik rute penerbangan, penentuan hub, penentuan *super hub*, kemudian juga penggabungan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung sehingga fondasi ekonomi di sektor pariwisata dan transportasi akan semakin kokoh, baik, dan segera pulih.

Arahan Presiden Joko Widodo tersebut didukung oleh banyak pengamatan. Berdasarkan indeks Travel & Tourism Competitiveness Index 2019 (World Economic Forum), dalam segi kekayaan alam dan budaya, Indonesia merupakan negara

Facing volatile conditions, the Indonesian Government endeavored to take various measures and implement policies as a stimulus for the revival of the Indonesian economy. The National Economic Recovery (PEN) Program was launched to reduce the impact of COVID-19 on the economy. In addition to handling the health crisis, the PEN program also aimed to overcome the impact of the decline in community activities on the economy, especially the informal sector or MSMEs. For the formal sector, the Indonesian Government set a comprehensive strategy for Indonesia’s economic recovery in various sectors. The 2021 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) has set priorities on (i) productive, independent, and competitive economic structure, (ii) equitable and fair development. There are 6 Policy Focuses on the 2022 State Budget with the theme “Economic Recovery and Structural Reform”. President Joko Widodo specifically gave directions at a closed meeting on August 6, 2020, that the pandemic is a momentum for the transformation of the tourism and aviation sectors to better organize flight routes, determine hubs, determine super hubs, and also combine aviation and tourism SOEs so that the economic foundation in the tourism and transportation sectors will be stronger, better, and soon recover.

President Joko Widodo’s directives have been supported by many observations. Based on the Travel & Tourism Competitiveness Index 2019 (World Economic Forum), in terms of natural and cultural wealth, Indonesia is the richest country

terkaya di antara negara ASEAN lainnya. Terlebih, pertumbuhan pariwisata yang diukur dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia dalam dua dekade terakhir masih memiliki potensi untuk mengungguli negara-negara lainnya. United Nations World Tourism Organization (UNWTO) memprediksi bahwa Indonesia yang saat ini menempati posisi ke-21 dalam hal ukuran pasar pariwisata berpotensi akan naik ke posisi ke-17 di tahun 2030 dengan total nilai pasar sekitar USD42 miliar.

Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selama tahun 2021 ada 1,56 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Angka ini turun sebesar 61,48% dibandingkan dengan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2020 sebesar 4,05 juta. Penurunan jumlah wisatawan mancanegara masih sangat kuat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, dan serangkaian kebijakan yang harus diterapkan untuk menekan laju penularan COVID-19. Di tengah keadaan ini, wisatawan nusantara menjadi secercah harapan penggerak roda pariwisata Indonesia. BPS mencatat peningkatan wisatawan nusantara pada tahun 2021 sebesar 12% dibandingkan dengan tahun 2021.

Meskipun mengalami penurunan dari segi perjalanan baik lokal dan internasional, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang mengalami kenaikan hingga 51,57%. Capaian tersebut merupakan capaian tertinggi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia sejak Maret 2020. Pembatasan perjalanan darat dan udara menciptakan perubahan pola konsumsi masyarakat. Munculnya tren *staycation* sebagai alternatif liburan selama pandemi menjadi faktor pendukung meningkatnya TPK di sejumlah wilayah di Indonesia.

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan TPK hotel bintang pada Desember 2021 mengalami peningkatan secara bulanan sebesar 3,74 poin dibandingkan 47,8% pada November 2021. Kenaikan tertinggi terjadi pada TPK hotel klasifikasi bintang di Bali yang melesat sebesar 10,00 poin, disusul oleh Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jambi dengan masing-masing sebesar 6,91 poin, 6,74 poin, dan 6,64 poin.

Namun demikian, tantangan-tantangan tersebut turut diikuti oleh peluang pengembangan usaha bagi Injourney dan anak usaha. Sebelum

among other ASEAN countries. Moreover, tourism growth, as measured by the number of foreign tourist arrivals in Indonesia in the last two decades, has the potential to outperform other countries. The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) predicts that Indonesia, which currently occupies the 21st position in terms of tourism market size, has the potential to rise to 17th position in 2030 with a total market value of around USD 42 billion.

Based on data from the Ministry of Tourism and Creative Economy, the total foreign tourist visits in 2021 was 1.56 million foreign tourist visits, a decrease of 61.48% compared to those in 2020 of 4.05 million. The decline in total foreign tourists was mainly due to the impact of the COVID-19 pandemic and a series of policies that must be implemented to reduce the transmission rate of COVID-19. Amid the difficult situation, domestic tourists are a ray of hope to drive the wheels of Indonesia's tourism. BPS recorded an increase in domestic tourists in 2021 by 12% compared to 2021.

Despite the decline in local and international travelers, the room occupancy rate (TPK) for star-rated hotels has increased to 51.57%, which was the highest achievement since the COVID-19 pandemic hit Indonesia in March 2020. Restrictions on land and air travel have created changes in people's consumption patterns. The emergence of the staycation trend as an alternative to vacations during the pandemic has contributed to the increase in the room occupancy rate (TPK) in several regions in Indonesia.

Data released by the Central Statistics Agency indicated that Room Occupancy Rate (TPK) in star-rated hotels in December 2021 has increased by 3.74 points on a monthly basis compared to 47.8% in November 2021. The highest increase occurred in the Room Occupancy Rate (TPK) for star-class hotels in Bali, which shot up by 10.00 points, followed by North Sumatra, Central Java, and Jambi with 6.91 points, 6.74 points and 6.64 points, respectively.

However, the challenges were accompanied by business development opportunities for Injourney and its subsidiaries. Prior to joining the tourism



bergabung di bawah holding pariwisata dan pendukung, masing-masing anak usaha Injourney merupakan badan usaha mandiri yang telah terbukti memiliki model bisnis yang berkelanjutan dengan daya saing tinggi, baik dari aspek rencana jangka panjang, potensi pasar, pembiayaan, lokasi, aset, strategi, desain, dan operasi. Keunggulan yang masing-masing anak usaha miliki masih berdiri sendiri dan belum ada dalam keselarasan. Oleh karena itu, Injourney sebagai Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung memiliki keunikan dan keunggulan spesifik. Dengan membawahi anak-anak perusahaan yang telah lama berkiprah di sektor aviasi dan pariwisata, Injourney memiliki peran strategis untuk melaksanakan pemetaan anak usaha yang sesuai dengan lini bisnis, konsolidasi portofolio, potensi pasar, aset, kapasitas, permodalan, budaya perusahaan, serta menyelaraskannya ke dalam *Key Performance Indicator* (KPI) yang selaras (*shared KPI*). Dengan demikian, keunggulan skala ekonomi dan akumulasi kompetensi dari seluruh portofolio anak usaha akan dapat tercapai, dan pada akhirnya dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi akibat COVID-19 di sektor aviasi dan pariwisata.

Kondisi penuh tantangan inilah yang ditangkap sebagai peluang oleh Pemerintah, dan direspon melalui pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung.

Tinjauan Operasi

Operational Review

Sektor aviasi dan pariwisata memiliki peluang untuk berkontribusi pada pencapaian optimalisasi potensi sektoral dan lintas sektor, serta menjadi katalis pengembangan Indonesia yang lebih inklusif. Target sektor pariwisata Indonesia adalah "*Quality Tourism Experience*" yang berfokus tidak hanya pada pertumbuhan dan volume, namun juga pada kualitas *experience*, *human capital*, dan preservasi lingkungan untuk meraih "*World-class Tourism Ecosystem*" yang berkelanjutan. Untuk mendukung tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program peningkatan kinerja sektor kepariwisataan melalui penguatan

and supporting holding, each Injourney subsidiary was an independent business entity that has proven to have a sustainable business model with high competitiveness, both in terms of long-term planning, market potential, financing, location, assets, strategy, design, and operation. The excellences of the stand-alone companies were unaligned. Therefore, Injourney as a Tourism and Supporting SOE Holding has unique and specific excellence. Through supervision on subsidiaries that have long been active in the aviation and tourism sector, Injourney plays a strategic role to carry out subsidiaries mapping according to business lines, portfolio consolidation, market potential, assets, capacity, capital, corporate culture into shared Key Performance Indicators (KPIs). Thus, the advantages of economies of scale and the accumulation of competencies from the entire portfolio of subsidiaries can be achieved, and eventually can accelerate the economic recovery from the impact of COVID-19 in the aviation and tourism sectors.

The Government has turned the challenging conditions into opportunities through the establishment of the Tourism and Supporting SOE Holding.

The aviation and tourism sectors have the opportunity to contribute to the achievement of sectoral and cross-sectoral potential optimization, and become a catalyst for the development of a more inclusive Indonesia. Indonesia's tourism sector target is Quality Tourism Experience focusing not only on growth and volume, but also on quality of experience, human capital, and environmental preservation to achieve a sustainable World-class Tourism Ecosystem. To support the goal, the Indonesian Government launched a program to improve the tourism sector performance by strengthening capacities and capabilities in the

kapasitas dan kapabilitas di daerah-daerah, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional.

Di tengah kondisi perekonomian yang perlu dipulihkan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan melaksanakan kajian bersama Penambahan Modal Negara (PMN) ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) dalam rangka membentuk Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 turut memuat target-target untuk sektor pariwisata Indonesia, yang dalam jangka panjang berfokus untuk meningkatkan devisa dan nilai tambah bagi negara melalui pariwisata, mempersiapkan destinasi, industri, dan masyarakat dalam rangka pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan daya dukung lingkungan, dan meningkatkan citra pariwisata yang berdaya saing.

Selanjutnya, *Roadmap* Kementerian BUMN sektor pariwisata membuat rencana restrukturisasi BUMN dalam rangka mengakselerasi inisiatif strategis sektor pariwisata dan pendukung, yakni:

1. Pengembangan destinasi pariwisata yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan, mencakup pengembangan ekosistem pariwisata, pengembangan investasi pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, pengembangan amenities, aksesibilitas, konektivitas, dan atraksi;
2. Pengembangan aktivitas pemasaran yang berorientasi pada pelanggan, mencakup pemasaran *branding* dan pemasaran destinasi pariwisata nasional prioritas berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan berbasis segmentasi pasar untuk meningkatkan penjualan pariwisata;
3. Pengembangan industri pariwisata untuk meningkatkan jumlah dan daya saing industri pariwisata, mencakup pembangunan kerja sama industri pariwisata, deregulasi perundang-undangan terkait, diversifikasi produk pariwisata, pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi serta komunikasi pariwisata;

regions, as well as increasing productivity and competitiveness in the international market.

Amid the economic recovery, the Indonesian Government through the Ministry of SOEs and the Ministry of Finance carried out a joint review on the Addition of State Equity Participation (PMN) to the Share Capital of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) in order to establish the Tourism and Supporting SOE Holding. The 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) also includes targets for the Indonesia's tourism sector, that put an emphasis on increasing foreign exchange and added value in the long run for the country through tourism, preparing destinations, industries and communities to develop the tourism industry and creative economy, increase human resource capacity, increase environmental carrying capacity, and improve the image of competitive tourism.

Furthermore, the Roadmap of the Ministry of SOEs in the tourism sector covers planning for restructuring SOEs to accelerate strategic initiatives for the tourism and supporting sectors, including:

- 1. Development of superior, competitive, and sustainable tourism destinations, including the development of tourism ecosystems, development of tourism investment, development of sustainable tourism destinations, development of amenities, accessibility, connectivity, and attractions;*
- 2. Development of customer-oriented marketing activities, including branding marketing and marketing of priority national tourism destinations based on information and communication technology, and based on market segmentation to increase tourism sales;*
- 3. Development of the tourism industry to increase the amount and competitiveness of the tourism industry, including the development of tourism industry collaboration, deregulation, diversification of tourism products, management of data, information, and tourism information and communication technology;*



4. Pengembangan kelembagaan, yang mencakup peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata nasional melalui pengelolaan SDM pariwisata berbasis kompetensi, pengelolaan kebijakan berdasarkan penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas perguruan tinggi pariwisata, peningkatan tata kelola pariwisata nasional, serta pemberdayaan masyarakat sekitar.

Restrukturisasi BUMN pariwisata dilakukan melalui pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, yakni Injourney. Injourney merupakan mega ekosistem yang meliputi seluruh anak perusahaan BUMN yang terkait dengan industri pariwisata dan pendukung, seperti hotel, bandara, kargo, hingga destinasi wisata yang bertujuan menjadi katalis usaha pemulihan ekonomi nasional. Per 31 Desember 2021, Injourney beranggotakan 5 (lima) perusahaan *subholding* dengan portofolio 35 bandara, 147 hotel, 5 kawasan pariwisata, *retail* dan *cargo*. Kelima *subholding* tersebut adalah PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, PT Hotel Indonesia Natour, dan PT Sarinah.

Masing-masing anak usaha Injourney merupakan badan usaha mandiri yang telah terbukti memiliki model bisnis yang berkelanjutan dengan daya saing tinggi, baik dari aspek rencana jangka panjang, potensi pasar, pembiayaan, lokasi, aset, strategi, desain, dan operasi. Namun demikian, keunggulan yang masing-masing anak usaha miliki masih berdiri sendiri dan belum ada dalam keselarasan. Oleh karena itu, untuk membentuk sebuah sinergi ekosistem total pariwisata Indonesia, Injourney memiliki peran strategis menyelaraskan model bisnis dan Key Performance Indicator (KPI). Dengan demikian, keunggulan skala ekonomi dan akumulasi kompetensi dari seluruh portofolio anak usaha akan dapat tercapai, dan pada akhirnya dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi akibat COVID-19 di sektor aviasi dan pariwisata. Dengan demikian, Injourney beserta anak usaha akan siap untuk bertransformasi menjadi perusahaan world-class ujung tombak pariwisata Indonesia yang mampu bersaing di pasar internasional.

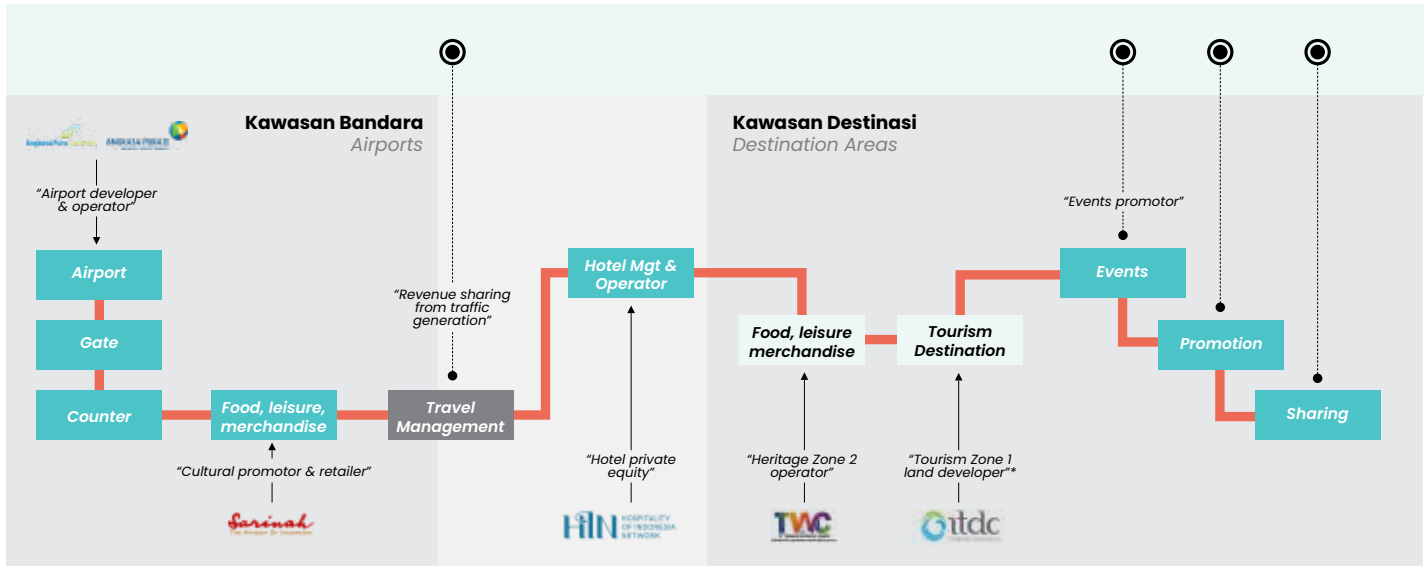
4. *Institutional development, including improvement of quality of human resources and national tourism institutions through competency-based tourism human resource management, policy management based on research and development, increasing the capacity and capability of universities for tourism management, improving national tourism governance, and empowering surrounding communities.*

Tourism SOEs restructuring was carried out through the establishment of the Tourism and Supporting SOE Holding, Injourney. As a mega ecosystem, Injourney covers all SOE subsidiaries related to the tourism and supporting industries, such as hotels, airports, cargo, to tourist destinations that aim to be a catalyst for the national economic recovery. As of December 31, 2021, Injourney consists of 5 (five) subholding companies with a portfolio of 35 airports, 147 hotels, 5 tourism, retail and cargo areas. The five subholdings include PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, PT Hotel Indonesia Natour, dan PT Sarinah.

Each Injourney subsidiary was an independent business entity that has proved to have a sustainable business model with high competitiveness, both in terms of long-term planning, market potential, financing, location, assets, strategy, design, and operation. The excellences of the stand-alone companies were unaligned. Therefore, to establish a synergy of the total Indonesia's tourism ecosystem, Injourney plays a strategic role to align business model and Key Performance Indicator (KPI). For this reason, the advantages of economies of scale and the accumulation of competencies from the entire portfolio of subsidiaries can be achieved, and eventually can accelerate the economic recovery from the impact of COVID-19 in the aviation and tourism sectors. Thus, Injourney and its subsidiaries are ready to transform into a world-class company spearheading Indonesia's tourism to compete in the international market.

Konsolidasi Portofolio – Peran Injourney & Anggota Holding

Portfolio Consolidation – Injourney & Subholding's Role



*Dalam proses penggabungan
*Under inclusion process

Peran *subholding* Injourney terbagi ke dalam beberapa subkluster, yaitu:

1. *Airport Management*, yaitu berbagai aktivitas terkait pengelolaan bandara di bawah kendali PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Pengelolaan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Internasional Batam, dan 10 (sepuluh) bandara lainnya yang sebagian besar berada di wilayah tengah dan timur Indonesia berada di bawah PT Angkasa Pura I. Sedangkan Bandara Soekarno Hatta, Bandara Kualanamu Medan, Bandara Internasional Banyuwangi, dan 17 (tujuh belas) bandara lainnya yang sebagian besar berada di wilayah barat Indonesia dikelola oleh PT Angkasa Pura II;
2. *Heritage Management*, atau pengembangan *heritage-based asset* (candi, atraksi kultur, produk kerajinan lokal, dll) sebagai daya tarik wisata yang dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko;
3. *Destination Development*, atau pengembangan destinasi wisata (Mandalika, Labuan Bajo, dll.), termasuk *content creator* untuk pariwisata Indonesia yang akan dikelola oleh Indonesia Tourism Destination Corporation (ITDC) (pada saat penyusunan Laporan Tahunan ini masih sedang dalam proses inklusi);

Injourney's sub-holding role is divided into several sub-clusters, including:

1. *Airport Management*, namely various activities related to airport management under the control of PT Angkasa Pura I and PT Angkasa Pura II. I Gusti Ngurah Rai Airport in Bali, Yogyakarta International Airport, Juanda Airport in Surabaya, Sultan Hasanuddin Airport in Makassar, Batam International Airport, and 10 (ten) other airports, mostly located in the central and eastern regions of Indonesia are under the management of PT Angkasa Pura I. Meanwhile, Soekarno Hatta Airport, Kualanamu Airport in Medan, Banyuwangi International Airport, and 17 (seventeen) other airports mostly located in western Indonesia are under the management of PT Angkasa Pura II;
2. *Heritage Management*, or the development of *heritage-based assets*, including temples, cultural attractions, local handicraft products as tourist attractions under the management of PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan and Ratu Boko;
3. *Destination Development*, or the development of tourist destinations (Mandalika, Labuan Bajo, etc.), including *content creators* for Indonesia's tourism under the management of Indonesia Tourism Destination Corporation (ITDC) (it was in the inclusion process during the preparation of this Annual Report);



4. *Demand Management*, atau pengelolaan pemasaran, penjualan, dan *branding* terintegrasi dari anggota Holding yang dikelola PT Hotel Indonesia Natour (HIN);
5. *Retail Management*, atau pengembangan & pemasaran produk lokal – serta *duty free management* yang dikelola oleh PT Sarinah.

Penjelasan kinerja lebih lengkap masing-masing *subholding* dapat dibaca lebih lanjut di Laporan Tahunan masing-masing *subholding*.

Kebijakan strategis Injourney berorientasi pada konsolidasi portofolio, yaitu penataan portofolio anak usaha berdasarkan pengelompokan jenis usaha dengan tujuan agar tercapainya *economies of scale* dan akumulasi kompetensi. Dengan demikian setiap anak usaha di masa depan diharapkan akan menjadi perusahaan berkelas dunia yang mampu bersaing dengan perusahaan sejenis, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di kawasan Asia Tenggara dan pasar internasional.

4. *Demand Management*, or *integrated marketing, sales, and branding management* from Holding members under the management of PT Hotel Indonesia Natour (HIN);
5. *Retail Management*, or *local product development & marketing* – as well as *duty free management*, under the management of PT Sarinah.

Further information on the performance of each *subholding* can be seen in the Annual Report of each *subholding*.

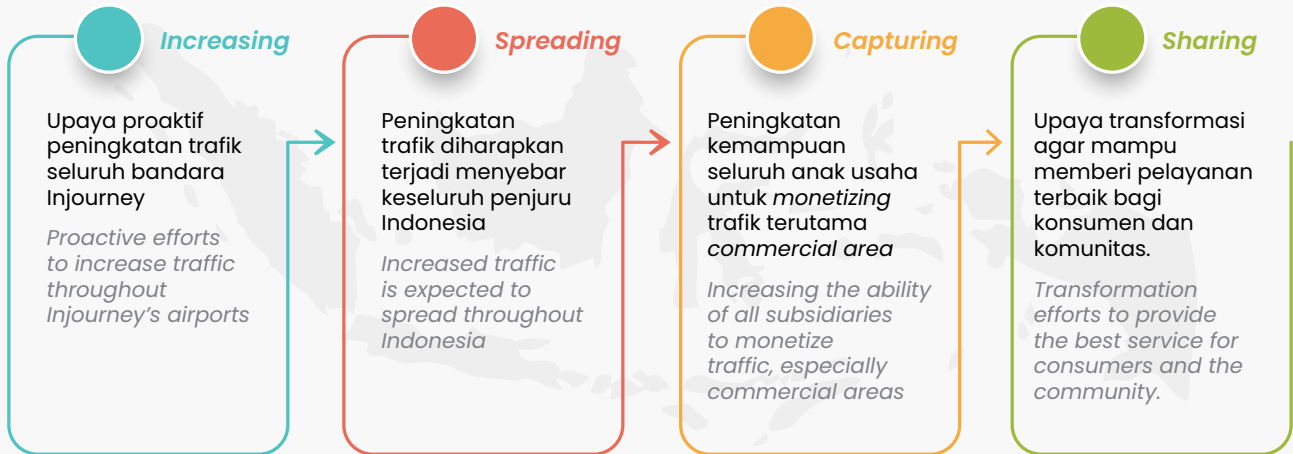
Injourney's strategic policy focuses on portfolio consolidation, namely structuring the portfolio of subsidiaries by business type grouping with the aim of achieving *economies of scale* and accumulation of competence. Thus, each subsidiary is expected to become a world-class company that is able to compete with similar companies, not only domestically but also in Southeast Asia and the international market.





Injourney memiliki tema strategis “Winning the Traffic” yang terdiri dari empat prinsip:

Injourney has a strategic theme “Winning the Traffic” consisting of four principles:



Masing-masing key project berdasarkan subkluster dalam pembahasan di bawah ini bersifat on progress dan rencana ke depan.

Each key project based on the subclusters discussed below is on progress and future plan.



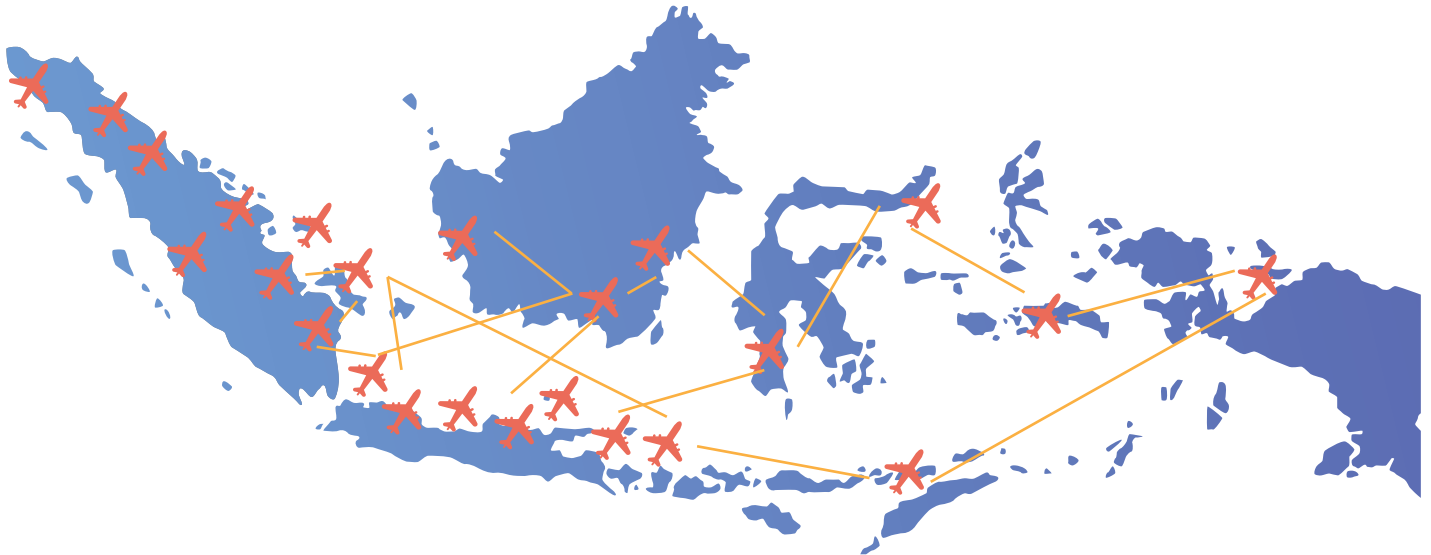


AIRPORT MANAGEMENT

Injourney memiliki rencana strategis mengembangkan bandara-bandara di Indonesia menjadi *Tourism Hub* dengan mendorong pemerataan pertumbuhan trafik seluruh bandara Injourney di pelosok Indonesia. Selain itu, kolaborasi dengan pelaku pariwisata lokal untuk mendorong pertumbuhan trafik bandara ke seluruh daerah akan meningkatkan promosi pariwisata daerah. *Subholding* di bawah subkluster ini adalah Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Penjelasan kinerja lebih lengkap masing-masing subholding dapat dibaca lebih lanjut di Laporan Tahunan masing-masing subholding.

AIRPORT MANAGEMENT

Injourney has a strategic plan to develop airports in Indonesia into Tourism Hubs by encouraging equitable traffic growth for all Injourney airports in remote parts of Indonesia. In addition, collaboration with local tourism actors to encourage the growth of airport traffic throughout the region will increase the promotion of regional tourism. The subholdings under the sub-cluster include Angkasa Pura I and Angkasa Pura II. Further information on the performance of each subholding can be seen in the Annual Report of each subholding.



Untuk mencapai hal-hal tersebut: **setiap bandara perlu:**

- Secara **proaktif** menjaring kemitraan pariwisata lokal (pemda, destinasi, hotel, belanja, dan *events*)
- Menjadi **"lobby"** dan **"digital concierge"** wisata regional
- Pusat pengembangan **"bundling"** dan **"gimmick"** wisata lokal
- Menjadi **generator promosi** wisata lokal ke pasar pariwisata
- Menjadi titik awal dan akhir **experience** wisata regional

To achieve the goals, all airports are required to:

- *Proactively attracting local tourism partnerships (local government, destinations, hotels, shopping, and events)*
- *Being a regional tourism's "lobby" and "digital concierge"*
- *Local tourism "bundling" and "gimmick" development center*
- *Being a promotion generator of local tourism to the tourism market*
- *Being a starting and ending point of regional tourism experience*

Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada Bandara I Gusti Ngurah Rai – Denpasar (Angkasa Pura I) dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Angkasa Pura II)

Konferensi Tingkat Tinggi G20 Bali, Indonesia 2022 adalah pertemuan ke-17 Kelompok Dua Puluh (G20) yang dijadwalkan akan berlangsung di Bali pada tahun 2022. Pelaksanaan G20 2022 akan terbagi ke dalam kuartal, yakni: (a) Q1 dilaksanakan secara daring; (b) Q2 dilaksanakan secara *hybrid*, dan (c) Q3 dan Q4 akan dilaksanakan secara luring. Rencana tersebut dapat berubah bergantung pada kecepatan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia.

Injourney berkoordinasi dengan pihak Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Kementerian Keuangan RI, Bank Indonesia dan pihak *stakeholder* terkait lainnya dalam persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20. Pelaksanaan layanan protokoler terhadap delegasi mengikuti mekanisme yang dibuat oleh pihak Kementerian Keuangan RI.

Preparation for the G20 Summit at I Gusti Ngurah Rai Airport – Denpasar (Angkasa Pura I) and Soekarno-Hatta International Airport (Angkasa Pura II)

The 2022 G20 Bali Summit, Indonesia is the 17th meeting of the Group of Twenty (G20), scheduled to take place in Bali in 2022. The 2022 G20 Summit implementation is divided into quarters, namely: (a) the event is held online in Q1; (b) the event is held on a hybrid basis in Q2, and (c) the event is held offline in Q3 and Q4. The planning is subject to change depending on the pace of vaccination in Indonesia.

Injourney coordinated with the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Ministry of Finance, Bank Indonesia and other relevant stakeholders in preparation for the G20 Summit. The implementation of protocol services for delegates adheres to the mechanism made by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.



Kemitraan Strategis Bandara Internasional Kualanamu (Angkasa Pura II)

PT Angkasa Pura II telah menyelesaikan *Proses Seleksi Mitra* dalam upaya pengembangan Bandar Udara Internasional Kualanamu melalui pemilihan mitra strategis dan tanggal 23 November 2021 AP II telah mengumumkan GMR Airports Consortium sebagai pemenang tender. Penandatanganan perjanjian dilaksanakan pada 23 Desember 2021 di Kementerian BUMN.

Kualanamu International Airport Strategic Partnership (Angkasa Pura II)

PT Angkasa Pura II has completed the Partner Selection Process in an effort to develop Kualanamu International Airport through the selection of strategic partners and on November 23, 2021, AP II has announced the GMR Airports Consortium as the tender winner. The MoU was signed on December 23, 2021 at the Ministry of SOEs.



HERITAGE MANAGEMENT

Pengelolaan Candi Borobudur

Pengembangan Kawasan Zona 2 Borobudur oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas di area Taman Wisata Candi Borobudur melalui program-program yang selaras dengan pelestarian, perlindungan dan *visitor management*.

HERITAGE MANAGEMENT

Borobudur Temple Management

Borobudur Zone 2 Area is under development by PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko to improve the quality of services and facilities in the Borobudur Temple Tourism Park area through programs aligned with conservation, protection and visitor management.



Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Pengelolaan TMII oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dengan diawali penyusunan Masterplan Visioning TMII, salah satunya melalui revitalisasi bangunan TMII bekerjasama dengan PUPR dalam mendukung rencana Konferensi Tingkat Tinggi G20, didukung oleh legalitas yang transparan serta penyesuaian SO TMII.

Development of Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

The management of TMII by PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko begins with the preparation of TMII Visioning Masterplan, including through TMII building revitalization in collaboration with PUPR in supporting the plan for the G20 Summit, supported by transparent legality and adjustment of TMII SO.

DEMAND MANAGEMENT

Integrasi aset-aset yang tergabung di dalam ekosistem InJourney akan memberikan nilai tambah dari masing-masing anak perusahaan. InJourney melakukan *Demand Creation* dengan cara mempersiapkan destinasi-destinasi untuk menjadi daya tarik wisata baru. Infrastruktur pariwisata sebagai bagian dari *tourism accessibility* menjadi pokok utama dari rencana kerja untuk memberikan pengalaman berwisata yang tidak terlupakan.

DEMAND MANAGEMENT

The integration of assets incorporated into InJourney ecosystem will provide added value for each subsidiary. InJourney conducts Demand Creation by preparing destinations to become new tourist attractions. Tourism infrastructure as part of tourism accessibility is the main point of the work plan to provide a memorable travel experience.





aktivitas dan kerjasama yang dilakukan oleh salah satu anggota holding dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota holding. Subkluster *Demand Management* mengatur sentralisasi integrasi pemasaran, penjualan, dan *branding* terintegrasi dari anggota Holding.

RETAIL MANAGEMENT

Rencana Pembukaan Sarinah dan Pembentukan Joint Venture (JV)

Pembangunan berkelanjutan transformasi bisnis memberikan peluang kepada Sarinah. Sarinah, yang memiliki nilai historis sebagai pusat perbelanjaan modern pertama di Indonesia, saat ini mengelola bisnis ritel, *trading* dan properti untuk berkiprah bisnis di era digital, sekaligus berkolaborasi dengan anggota holding dalam meningkatkan *revenue*, *added value* dan *services*.

collaborations by a holding member to provide benefits to all holding members. Demand Management sub-cluster carries out management of centralized integration of marketing, sales, and integrated branding of Holding members.

RETAIL MANAGEMENT

Sarinah Opening Plan and Joint Venture (JV) Establishment

Sustainable development of business transformation provides an opportunity for Sarinah. Sarinah, which has historical value as the first modern shopping center in Indonesia, currently manages retail, trading and property businesses to engage in business in the digital era, while collaborating with holding members in increasing revenue, added value and services.



Kawasan Ekonomi Eksklusif "KEK" Kesehatan Sanur

Kementerian BUMN menginisiasi terobosan dan sinergi yang akan mentransformasi area Sanur, Bali, menjadi destinasi baru pariwisata, kesehatan, dan kebugaran di Asia yang kompetitif, mandiri, dan berdaulat, bahkan menjadi kawasan ekonomi khusus kesehatan pertama di Indonesia.

Di tahun 2019, sekitar 2 juta orang Indonesia melakukan wisata kesehatan ke luar negeri, menghabiskan dana sebesar Rp97,5 triliun, untuk mendapatkan layanan kesehatan, mulai dari: *health screening*, pengobatan kanker, layanan kardiovaskular, layanan neurologi, layanan ortopedi, transplantasi organ, pengobatan penyakit kritis, hingga layanan kecantikan.

Sanur Health Special Economic Zone "SEZ"

The Ministry of SOEs initiated breakthroughs and synergies to transform Sanur area in Bali into a competitive, independent, and sovereign new tourism, health and wellness destination in Asia and became the first special health economic zone in Indonesia.

In 2019, around 2 million Indonesians went on health tours abroad, spending Rp 97.5 trillion to obtain health services, ranging from: health screening, cancer treatment, cardiovascular services, neurology services, orthopedic services, organ transplants, critical illness treatment, to beauty services.

Transformasi Hotel Indonesia Natour (HIN)

Berdasarkan rancangan *business plan*, pengembangan HIN pasca *spin-off* akan mengarah ke bisnis *Travel Management dan Asset Management & Developer*. *Online platform* yang mampu membantu HIN menjadi pusat informasi pariwisata, mengembangkan *personalized & complete bundled travel package* dan mendorong *tourism demand* Indonesia.

Hotel Indonesia Natour (HIN) Transformation

Based on the *business plan* design, the post-*spin-off* HIN development will lead to the *Travel Management and Asset Management & Developer businesses*. An *online platform* that is able to help HIN become a *tourism information center*, develop *personalized & complete bundled travel packages* and encourage Indonesian *tourism demand*.

DESTINATION DEVELOPMENT

Program Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang diprioritaskan Pemerintah dan menjadi mandat bagi Injourney meliputi Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Pengembangan kelima DPSP ini mencakup pengembangan bandar udara, jaringan hotel, manajemen destinasi, KEK & infrastruktur kelas dunia yang menawarkan layanan dari aksesibilitas, atraksi dan destinasi, serta *amenities*. Dengan demikian, *customer* akan mendapatkan pelayanan pariwisata terbaik dari hulu hingga hilir.

DESTINATION DEVELOPMENT

The Development Program for 5 Super Priority Tourism Destinations (DPSP) which is prioritized by the Government and is a mandate for Injourney that includes Toba Lake, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, and Likupang. The development of these five DPSPs includes the development of airports, hotel chains, destination management, SEZs & world-class infrastructure that offers services from accessibility, attractions and destinations, and amenities. Thus, customers will get the best tourism services from upstream to downstream.

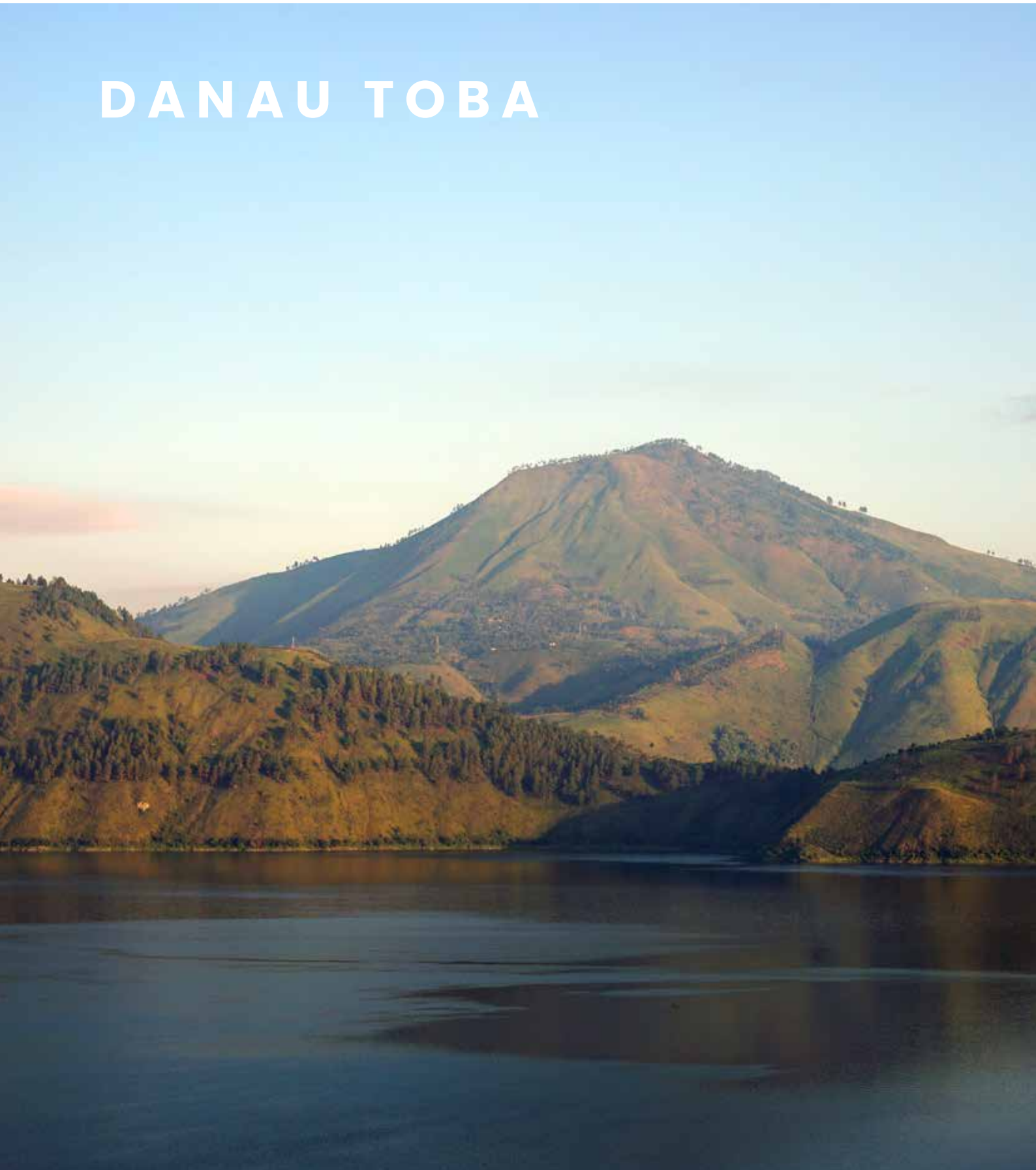
Beberapa infrastruktur yang akan dikembangkan dalam rangka mendukung pemulihan pariwisata Indonesia di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) berkolaborasi dengan anak-anak perusahaan dan lembaga-lembaga Pemerintah, yaitu:

Several infrastructures will be developed in order to support Indonesia's tourism recovery in 5 Super Priority Tourism Destinations (DPSP) in collaboration with subsidiaries and government institutions, namely:





DANAU TOBA





Terletak di Sumatera Utara, destinasi Danau Toba mengusung tema *"Eco-Resort dan Luxury Destination"*, dan meliputi atraksi dan destinasi *Nature Tourism, Sport Tourism (diving & snorkeling), Conservation & Marine Park, dan Marina & Lagoon*. Aksesibilitas dan konektivitas akan didukung antara lain oleh pembangunan infrastruktur dasar dan properti dalam kawasan, layanan penerbangan menuju Bandara Sam Ratulangi. Dari aspek *amenities*, akan dilakukan peningkatan kualitas dan kapasitas Best Western the Lagoon Manado dan hotel-hotel lainnya.

Located in North Sumatra, the Lake Toba destination carries the theme "Eco-Resort and Luxury Destination", and includes attractions and destinations for Nature Tourism, Sport Tourism (diving & snorkeling), Conservation & Marine Park, and Marina & Lagoon. Accessibility and connectivity will be supported, among others, by the development of basic infrastructure and properties within the area, and flight services to Sam Ratulangi Airport. In the aspect of amenities, there will be an increase in the quality and capacity of Best Western the Lagoon Manado and other hotels.



Destination Management

- Toba Caldera Music Festival 2022
- Kulineran Medan



BOROBUDUR





Telah lama menjadi destinasi unggulan, Borobudur di Jawa Tengah mengusung tema “*Cultural & Heritage*” yang akan menyajikan atraksi *art, culture & performance (night attraction)*, *sport tourism*, dan *nature tourism*. Aksesibilitas dan konektivitas akan ditunjang oleh Bandara Internasional Yogyakarta. Aspek *amenities* dan atraksi akan ditunjang oleh ketersediaan antara lain Manohara Hotel, Homestay Balkondes Borobudur, Grand Inna Malioboro, Khas Malioboro, Khas Tugu dan penyediaan *retail shop*. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko akan berperan sebagai pengelola atraksi dalam kawasan Borobudur, seperti sendratari dan pementasan lainnya.

Having long been a leading destination, Borobudur in Central Java carries the theme “Cultural & Heritage” to present art, culture & performance (night attractions), sport tourism, and nature tourism attractions. Accessibility and connectivity will be supported by Yogyakarta International Airport. Aspects of amenities and attractions will be supported by the availability of Manohara Hotel, Homestay Balkondes Borobudur, Grand Inna Malioboro, Khas Malioboro, Khas Tugu and the provision of retail shops. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko will act as the manager of attractions in the Borobudur area, such as traditional dances and other performances.

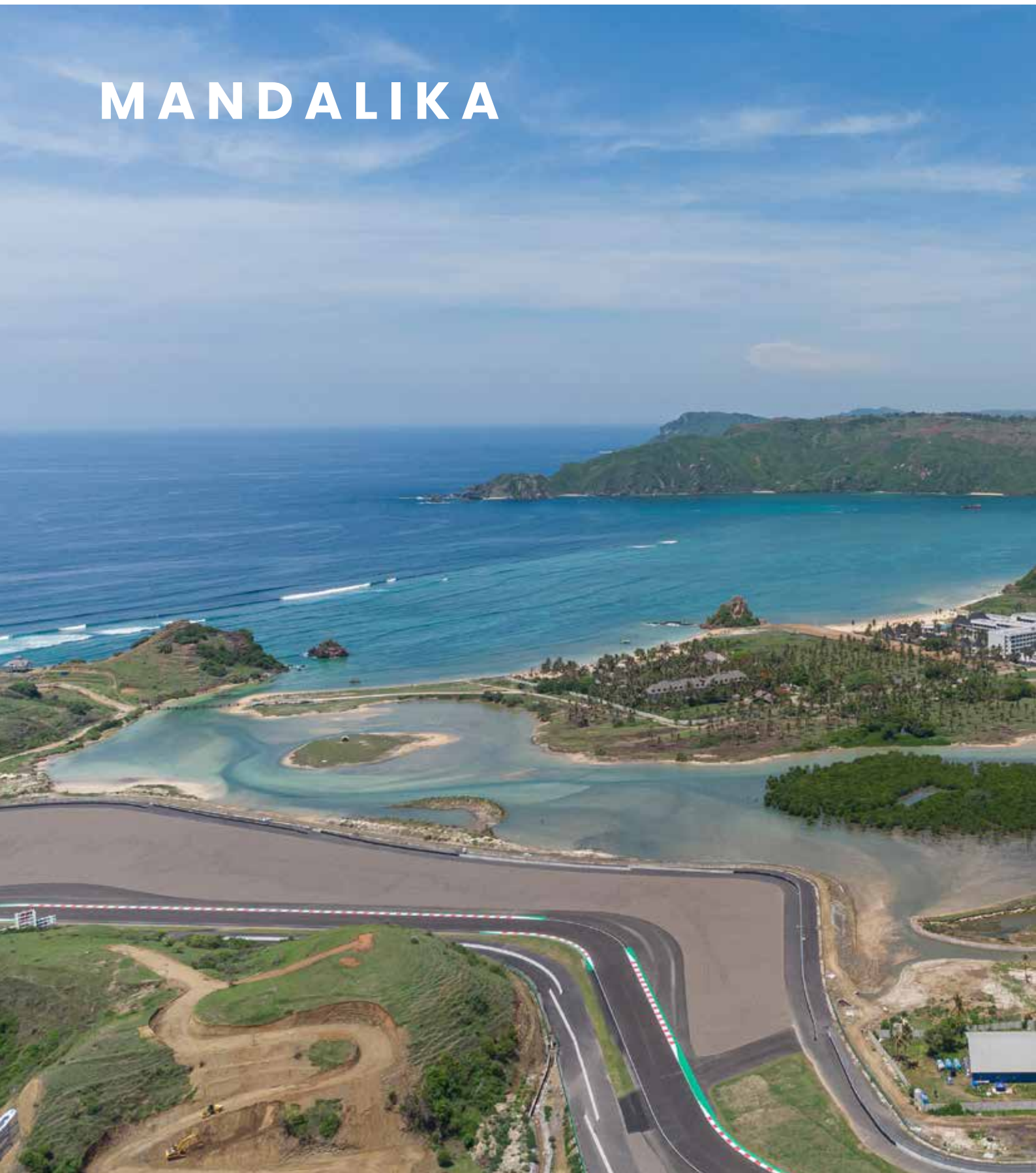


Destination Management

- Outdoor Jazz: A Night of Indonesian Culture
- Borobudur Marathon
- Borobudur Lantern Festival
- International Artist Concert
- Prambanan Jazz Festival
- Prambanan Kite Festival
- International Artist Concert
- Kulinerun Malioboro



MANDALIKA





“Nature, Sport, & Attraction” adalah tema besar pengembangan destinasi Mandalika yang mencakup *Nature Tourism, Sport Tourism (MotoGP, World Superbike “WSBK”, Golf, Watersport), Theme Park District, Cruise & Marina District*. Aksesibilitas Mandalika, Lombok–Nusa Tenggara Barat akan didukung Bandara International Lombok Zainuddin Abdul Madjid, sedangkan aspek *amenities* akan didukung oleh Merumatta Kila Senggigi, Pullman Hotel mandalika, dan Teraskita Hotel Mataram.

“Nature, Sport, & Attraction” is the big theme of Mandalika destination development, covering: *Nature Tourism, Sport Tourism (MotoGP, World Superbike “WSBK”, Golf, Watersport), Theme Park District, Cruise & Marina District*. The accessibility of Mandalika, Lombok–West Nusa Tenggara will be supported by Lombok Zainuddin Abdul Madjid International Airport, while the amenities aspect will be supported by Merumatta Kila Senggigi, Pullman Hotel Mandalika, and Teraskita Hotel Mataram.



KEK & Infrastruktur

- Mandalika International Street Circuit
- KEK Mandalika



Destination Management

- Mandalika Marathon 10K
- Mandalika Fun Bike
- MHA Open Surf Competition
- Mobile Legend International
- L'étape by Tour de France
- Sport Summit Indonesia
- Mandalika MotoGP Official Pre-season Test, uariari 2022
- Indonesia Mandalika MotoGP Series Maret 2022



LABUAN BAJO





Pengembangan destinasi Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dengan tema “*Nature and Adventure*” akan menyajikan berbagai atraksi, seperti *Nature Tourism, Nomadic and Adventure Tourism, Komodo Sanctuary, Eco-Theme Park, dan Marina and Cruise Terminal*. Aksesibilitas dan konektivitas akan ditunjang oleh Bandara Komodo Labuan Bajo dan peningkatan frekuensi penerbangan ke Bandara Labuan Bajo. Aspek *amenities* dan atraksi akan ditunjang oleh ketersediaan antara lain oleh Hotel Inaya Bay, Meruorah Komodo Labuan Bajo, The Ora Labuan Bajo serta penyediaan *retail shop*.

The development of Labuan Bajo destination, East Nusa Tenggara, with the theme “Nature and Adventure” will present various attractions, such as Nature Tourism, Nomadic and Adventure Tourism, Komodo Sanctuary, Eco-Theme Park, and Marina and Cruise Terminal. Accessibility and connectivity will be supported by Komodo Labuan Bajo Airport and an increase in flight frequency to Labuan Bajo Airport. Aspects of amenities and attractions will be supported by the availability of Inaya Bay Hotel, Meruorah Komodo Labuan Bajo, The Ora Labuan Bajo and the provision of retail shops.



KEK & Infrastruktur

- Pengembangan Destinasi TanaMori



Destination Management

- Hintimate Concert Labuan Bajo – SLANK
- International Music Festival



LIKUPANG





Terletak di Sulawesi Utara, destinasi Likupang mengusung tema “Eco-Resort dan Luxury Destination”, dan meliputi atraksi dan destinasi *Nature Tourism, Sport Tourism (diving & snorkeling), Conservation & Marine Park*, dan *Marina & Lagoon*. Aksesibilitas dan konektivitas akan didukung antara lain oleh pembangunan infrastruktur dasar dan properti dalam kawasan, layanan penerbangan menuju Bandara Sam Ratulangi. Dari aspek *amenities*, akan dilakukan peningkatan kualitas dan kapasitas Best Western the Lagoon Manado dan hotel-hotel lainnya.

Located in North Sulawesi, Likupang destination carries the theme “Eco-Resort and Luxury Destination”, covering attractions and destinations of Nature Tourism, Sport Tourism (diving & snorkeling), Conservation & Marine Park, and Marina & Lagoon. Accessibility and connectivity will be supported by the development of basic infrastructure and properties within the region, flights heading to Sam Ratulangi airport. In terms of amenities, quality and capacity of Best Western the Lagoon Manado and other hotels will be improved.

**KEK & Infrastruktur**

- KEK Likupang

**Destination Management**

- Likupang Triathlon
- Likupang Fun Walk Experiences



Kinerja Keuangan Komprehensif

Comprehensive Financial Performance

Informasi tinjauan kinerja keuangan komprehensif disajikan secara konsolidasian berdasarkan Laporan Keuangan 2021 PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan nomor Laporan No. 00436/2.1030. AU.1/06/1155-1/1/IV/2022 yang dilampirkan pada bagian akhir laporan ini.

Penurunan dan capaian pendapatan usaha di bawah RKAP tahun 2021 umumnya terkait dengan dampak pandemi COVID-19, yang tidak hanya berdampak pada penurunan *traffic* sektor *airport management*, namun juga beberapa sektor pariwisata lainnya, seperti, *heritage management*, *demand management*, dan *retail management*.

ASET

Pada akhir tahun 2021, total aset Injourney tercatat sebesar Rp94,5 triliun menurun dari tahun 2020 sebesar Rp97,7 triliun. Aset yang dimiliki oleh PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) per 31 Desember 2021 terdiri atas 8% aset lancar dan 92% Aset tidak lancar. Komposisi Aset tidak lancar lebih besar dibandingkan aset tidak lancar dikarenakan Sebagian besar dari Aset alat produksi di PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II yang meliputi bangunan, lapangan dan peralatan yang merupakan kelompok dari aset tidak lancar. Jumlah Aset Perusahaan per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp94.538 Miliar yang mana mengalami penurunan sebesar Rp3.206 Miliar atau 3,3% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp97.744 miliar. Penurunan yang significant terdapat pada Piutang Usaha dan pajak dibayar dimuka untuk aset lancar dan aset tetap untuk aset tidak lancar.

Information on a comprehensive financial performance review is presented on a consolidated basis based on the 2021 Financial Report of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) ended on December 31, 2021 and has been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners with Report No. 00436/2.1030. AU.1/06/1155-1/1/IV/2022 as attached in the end of this report.

The decline and achievement of operating income under the 2021 RKAP were generally related to the impact of the COVID-19 pandemic, in decreasing traffic in the airport management sector and several other tourism sectors, such as heritage management, demand management, and retail management.

ASSET

As of the end of 2021, Injourney's total assets were recorded at Rp94.5 trillion, a decrease from 2020 of Rp97.7 trillion. Assets owned by PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) as of December 31, 2021 consisted of 8% current assets and 92% non-current assets. The composition of non-current assets was higher than non-current assets because most of the production equipment assets at PT Angkasa Pura I and PT Angkasa Pura II, including buildings, fields and equipment were categorized as non-current assets. As of December 31, 2021, the Company's total assets were recorded at Rp94,538 billion, decreased by Rp3,206 billion or 3.3% compared to 2020 of Rp97,744 billion. A significant decrease was found in Accounts Receivable and prepaid taxes for current assets and fixed assets for non-current assets.

Aset (Dalam ribuan Rp)
(In thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Aset lancar <i>Current assets</i>	7,423,731,978	9,477,484,582	(21.7)
Aset tidak lancar <i>Non-current assets</i>	87,114,082,570	88,266,327,353	(1.3)
Total aset <i>Total assets</i>	94,537,814,548	97,743,811,935	(3.3)

Aset Lancar

Total aset lancar pada akhir tahun 2021 tercatat senilai Rp7,4 triliun, turun dari tahun 2020 sebesar Rp9,5 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya *full impairment*/pencadangan penurunan piutang usaha atas salah satu customer berelasi yang dinilainya signifikan di PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II.

Current Assets

As of the end of 2021, total current assets were recorded at Rp7.4 trillion, which decreased from 2020 of Rp9.5 trillion. This was due to the presence of full impairment/allowance for the decrease in account receivable for one of the related customers with significant value at PT Angkasa Pura I and PT Angkasa Pura II.

Aset Lancar (Dalam ribuan Rp)
(In thousands Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Kas dan setara kas <i>Cash and cash equivalents</i>	3,725,597,431	4,040,130,634	(7.8)
Investasi jangka pendek <i>Short term investment</i>	86,231,618	96,115,483	(10.3)
Piutang usaha-pihak berelasi <i>Accounts receivable-related parties</i>	576,651,735	1,408,190,577	(59.1)
Piutang usaha-pihak ketiga <i>Accounts receivable-third parties</i>	1,057,789,779	1,266,921,606	(16.5)
Piutang lain-lain-pihak berelasi <i>Other receivables-related parties</i>	20,185,129	11,250,625	79.4
Piutang lain-lain-pihak ketiga <i>Other receivables-third parties</i>	86,493,036	80,135,460	7.9
Persediaan <i>Inventories</i>	57,950,557	58,570,944	(1.1)
Uang muka <i>Advance Payment</i>	120,884,222	59,218,636	104.1
Biaya dibayar dimuka <i>Prepaid expenses</i>	85,532,423	68,503,538	24.9
Pendapatan yang masih harus diterima <i>Accrued revenues</i>	297,333,970	672,805,226	(55.8)
Pajak dibayar dimuka <i>Prepaid taxes</i>	1,280,690,665	1,706,651,487	(25.0)
Aset lancar lainnya <i>Other current assets</i>	28,391,413	8,990,366	215.8
Jumlah aset lancar <i>Total current assets</i>	7,423,731,978	9,477,484,582	(21.7)



Aset Tidak Lancar

Total aset tidak lancar pada akhir tahun 2021 tercatat senilai Rp87,1 triliun, turun dari tahun 2020 sebesar Rp88,3 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan nilai buku aset tetap oleh penyusutan umur manfaatnya dimana disatu sisi pada tahun 2021 peroleh aset baru tidak terlalu signifikan di entitas anak.

Non-Current Assets

As of the end of 2021, total non-current assets were recorded at Rp87.1 trillion, which decreased from 2020 of Rp88.3 trillion. The decrease was due to a decrease in the book value of property, plant and equipment due to the depreciation of their useful period, where on the one hand in 2021 the acquisition of new assets was not too significant in the subsidiary.

Aset Tidak Lancar (Dalam ribuan Rp) (In thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Estimasi tagihan pajak Estimated claims for tax refund	516,235,090	754,485,213	(31.6)
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	1,979,570,515	822,547,722	140.7
Investasi jangka panjang Long term investment	90,667,078	96,459,038	(6.0)
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama Investments of associates and joint ventures	2,505,628,933	543,135,885	361.3
Uang muka pembelian tanah Advance for land purchase	1,960,000	3,316,002,785	(99.9)
Properti investasi Investment property	221,442,982	200,254,077	10.6
Aset tetap Fixed assets	80,788,882,877	81,017,446,756	(0.3)
Aset hak guna Right of Use Assets	682,329,661	1,189,172,546	(42.6)
Aset tak berwujud Intangible Assets	226,151,607	248,792,419	(9.1)
Aset tidak lancar lain-lain Other non-current assets	101,213,827	78,030,912	29.7
Jumlah aset tidak lancar Total non-current assets	87,114,082,570	88,266,327,353	(1.3)

LIABILITAS

Pada akhir tahun 2021, total liabilitas Injourney tercatat sebesar Rp59,2 triliun, naik dari tahun 2020 sebesar Rp54,1 triliun. Kenaikan ini seiring dengan Peningkatan signifikan disebabkan oleh adanya kenaikan atas pinjaman bank jangka panjang dan penerbitan obligasi dan sukuk di sisi liabilitas jangka panjang pada entitas anak.

LIABILITIES

As of the end of 2021, Injourney's total liabilities were recorded at Rp59.2 trillion, which increased from 2020 of Rp54.1 trillion. The increase was in line with the significant increase caused by an increase in long-term bank loans and the issuance of bonds and sukuk in long-term liabilities in subsidiaries.

Liabilitas (Dalam ribuan Rp)
Liability (In thousands of Rupiah)

Uraian <i>Description</i>	2021	2020	Δ%
Liabilitas jangka pendek <i>Current Liability</i>	11,520,232,627	12,012,617,303	(4.1)
Liabilitas jangka panjang <i>Non-Current Liability</i>	46,817,749,801	42,128,749,009	11.1
Total liabilitas Total liability	58,337,982,428	54,141,366,312	7.8



Liabilitas Jangka Pendek

Total liabilitas jangka pendek pada akhir tahun 2021 tercatat senilai Rp11,5 triliun, turun dari tahun 2020 sebesar Rp12 triliun. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh penurunan dikarenakan terdapat pelunasan pokok pinjaman obligasi dan sukuk yang telah direklasifikasi ke bagian jangka pendek pinjaman jangka Panjang pada entitas anak.

Current Liability

As of the end of 2021, total current liabilities were recorded at Rp11.5 trillion, which decreased from 2020 of Rp12 trillion. The decrease was mainly due to the repayment of principal on bonds and sukuk which have been reclassified into current portion of long-term loans to subsidiaries.

Liabilitas Jangka Pendek (Dalam ribuan Rp)

Current Liability (In thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Utang usaha-pihak berelasi <i>Accounts payable-related parties</i>	184,107,523	86,026,246	114.0
Utang usaha-pihak ketiga <i>Accounts payable-third parties</i>	596,402,658	574,746,766	3.8
Utang lain-lain-pihak berelasi <i>Other payables-related parties</i>	866,199,845	777,952,157	11.3
Utang lain-lain-pihak ketiga <i>Other payables-third parties</i>	2,718,321,020	3,552,947,057	(23.5)
Beban akrual-pihak berelasi <i>Accrued expenses-related parties</i>	1,329,666	1,196,959	1.1
Beban akrual-pihak ketiga <i>Expense accrued-third party</i>	3,000,712,890	2,693,754,819	11.4
Utang pajak <i>Tax Payables</i>	210,284,807	386,030,249	(45.5)
Pendapatan diterima di muka <i>Prepaid income</i>	361,941,337	252,505,413	43.3
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek <i>Short-term employee benefits liability</i>	304,519,387	199,345,092	52.8
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya- jangka pendek <i>Debt from banks and other financial institutions- short term</i>	1,722,245,844	656,946,836	162.2
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: <i>Long-term liabilities maturing within one year.</i>			
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya- jangka panjang <i>Loans from banks and other financial institutions- long term</i>	1,463,087,314	511,104,533	186.3
Utang obligasi dan sukuk ijarah <i>Bonds payable and sukuk ijarah</i>	0	2,090,000,000	N/A
Surat utang jangka menengah <i>Medium term debt securities</i>	0	50,000,000	N/A
Liabilitas sewa <i>Lease liability</i>	91,080,336	180,061,176	(49.4)
Total liabilitas jangka pendek Total current liabilities	11,520,232,627	12,012,617,303	(4.1)

Liabilitas Jangka Panjang

Total liabilitas jangka pendek pada akhir tahun 2021 tercatat senilai Rp46,8 triliun, naik dari tahun 2020 sebesar Rp42,1 triliun. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh penerbitan obligasi dan sukuk serta penarikan fasilitas pinjaman bank jangka Panjang oleh entitas anak.

Non-Current Liabilities

As of the end of 2021, total current liabilities were recorded at Rp46.8 trillion, which increased from 2020 of Rp42.1 trillion. The increase was mainly due to the issuance of bonds and sukuk as well as the withdrawal of long-term bank loan facilities by subsidiaries.

Liabilitas Jangka Panjang (Dalam ribuan Rp) Non-Current Liability (In thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun: <i>Non-current liabilities net of maturities within one year:</i>			
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya <i>Debt from banks and other financial institutions</i>	35,337,790,753	31,880,566,856	10.8
Utang obligasi dan sukuk ijaarah <i>Bonds payable and sukuk ijarah</i>	7,505,553,188	5,901,247,132	27.2
Surat utang jangka menengah <i>Medium term debt securities</i>	-	45,000,000	(100.0)
Liabilitas sewa <i>Lease liability</i>	525,528,288	921,886,213	(43.0)
Utang jangka panjang lainnya <i>Other long term debt</i>	459,867,588	401,640,420	14.5
Liabilitas imbalan kerja <i>Employee benefit liability</i>	2,275,765,106	2,211,096,518	2.9
Liabilitas pajak tangguhan <i>Deferred tax liability</i>	262,115,001	231,024,839	13.5
Pendapatan ditangguhkan <i>Deferred income</i>	429,331,717	419,486,510	2.3
Pendapatan diterima di muka <i>Unearned Revenue</i>	1,430,585	96,432,946	(98.5)
Utang provisi <i>Provisions payable</i>	20,367,575	20,367,575	-
Total liabilitas jangka panjang Total non-current liabilities	46,817,749,801	42,128,749,009	11.1



EKUITAS

Pada akhir tahun 2021, total ekuitas Injourney tercatat sebesar Rp36,1 triliun, yang terdiri dari modal saham sebesar Rp65,1 triliun, dan laba ditahan sebesar Rp5,7 triliun. Total ekuitas tahun 2021 menurun dari tahun 2020 sebesar Rp43,6 triliun. Ekuitas mengalami penurunan sebesar 17,0% YoY seiring dengan penurunan saldo laba belum dicadangkan dari kinerja rugi usaha yang dialami oleh perusahaan.

EQUITY

As of the end of 2021, Injourney's total equity was recorded at Rp36.1 trillion, consisting of share capital of Rp65.1 trillion, and retained earnings of Rp5.7 trillion. Total equity in 2021 decreased from 2020 of Rp43.6 trillion. Equity decreased by 17.0% YoY in line with the decrease in unappropriated retained earnings from operating loss performance experienced by the company.

Ekuitas (Dalam ribuan Rp) Equity (In thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1.000.000 (Angka Penuh) Modal Dasar - 260.000.000 Saham (2020 dan 2019: 26.000 Saham) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 65.164.367 Saham (2020 dan 2019: 13.000 saham) <i>Share Capital - Par Value Rp1,000,000 (Full Amount)</i> <i>Authorized Capital - 260,000,000 Shares (2020 and 2019: 26,000 Shares)</i> <i>Issued and Paid Up Capital - 65,164,367 Shares (2020 and 2019: 13,000 shares)</i>	65,164,366,785	13,000,000	501,164.4
Tambahan modal disetor <i>Additional paid-in capital</i>	(28,765,976,052)	0	(N/A)
Proforma ekuitas yang timbul dari proforma yang timbul dari transaksi restrukturisasi <i>Pro forma equity arising from restructuring transactions</i>	0	43,748,607,061	(100.0)
Saldo laba-dicadangkan <i>Appropriated retained earnings</i>	2,111,085	2,111,085	-
Saldo laba-belum dicadangkan <i>Unappropriated retained earnings</i>	(202,320,210)	(161,272,523)	25.5
Penghasilan komprehensif lain <i>Other comprehensive income</i>	(44,891)	0	(N/A)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk <i>Equity Attributable to the Owner of the Parent Entity</i>	36,198,136,717	43,602,445,623	(17.0)
Kepentingan non-pengendali <i>Non-controlling interests</i>	1,695,403	0	N/A
Total ekuitas <i>Total equity</i>	36,199,832,120	43,602,445,623	(17.0)

Profitabilitas

Injourney mencatat kinerja profitabilitas yang menurun pada tahun 2021, yang dapat dilihat dari perolehan laba kotor senilai Rp5,7 triliun dan laba tahun berjalan senilai Rp(8,3) triliun. Penurunan ini disebabkan karena dampak pandemic COVID-19 selama satu tahun di 2021, dimana pada 2020 lalu dampak baru terjadi di triwulan II 2020 pada entitas anak.

Profitability

Injourney recorded a declining profitability performance in 2021, as seen from the gross profit of Rp5.7 trillion and profit for the year of Rp8.3 trillion. The decrease was due to the impact of the COVID-19 pandemic for one year in 2021, where in 2020, the impact only occurred in the second quarter of 2020 on subsidiaries.

Profitabilitas (Dalam ribuan Rp) Profitability (In thousands of Rupiah)

Uraian	2021	2020	Δ%
Pendapatan usaha <i>Operating Revenue</i>	9,732,833,584	10,459,370,952	(6.9)
Beban pokok pendapatan <i>Cost of revenue</i>	(8,760,520,441)	(8,596,807,551)	1.9
Laba bruto <i>Gross profit</i>	972,313,143	1,862,563,401	(47.8)
Beban pemasaran <i>Marketing Expenses</i>	(2,723,905,528)	(2,924,433,679)	(6.9)
Beban umum dan administrasi <i>General and Administrative Expenses</i>	(3,719,845,907)	(2,295,803,182)	62.0
Beban lain-lain <i>Other Expenses</i>	(343,911,418)	(332,469,003)	3.4
Pendapatan lain-lain <i>Other income</i>	333,655,168	245,722,171	35.8
Rugi usaha <i>Operating loss</i>	(5,481,694,542)	(3,444,420,292)	59.1
Pendapatan keuangan <i>Finance Income</i>	83,921,402	287,045,767	(70.8)
Beban keuangan <i>Finance Expenses</i>	(2,780,798,012)	(2,428,517,557)	14.5
Bagian rugi entitas asosiasi <i>Equity loss of associate entities</i>	(131,478,148)	(111,252,384)	18.2
Rugi sebelum beban pajak final dan manfaat pajak penghasilan badan <i>Loss before final tax expense and corporate income tax benefits</i>	(8,310,049,300)	(5,697,144,466)	45.9
Rugi operasi yang diberhentikan <i>Dismissed operation loss</i>	(84,116,150)	0	(N/A)
Rugi sebelum pajak <i>Loss before tax</i>	(8,394,165,450)	(5,697,144,466)	47.3
Pajak final Pajak final <i>Final Tax</i>	(162,275,156)	(161,967,871)	0.2
Rugi sebelum pajak penghasilan badan <i>Loss before corporate income tax</i>	(8,556,440,606)	(5,859,112,337)	46.0
Pajak kini <i>Current tax</i>	(103,946,324)	(59,471,136)	74.8
Pajak tangguhan <i>Deferred Tax</i>	1,124,222,719	769,075,093	46.2
Rugi tahun berjalan setelah efek penyesuaian proforma <i>Current year's loss after pro forma adjustment effect</i>	(7,536,164,211)	(5,149,508,380)	46.3



Uraian	2021	2020	Δ%
Rugi komprehensif lain Other comprehensive loss			
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi <i>Items that will not be Reclassified to Profit or Loss</i>			
Kerugian aktuarial dari pengukuran kembali atas program imbalan pascakerja <i>Actuarial loss from remeasurement on post-employment benefit plans</i>	(26,253,220)	(950,501,934)	(97.2)
Manfaat (beban) pajak terkait <i>Related tax benefits (expenses)</i>	2,801,877	125,177,547	(97.8)
Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi <i>Items that will be Reclassified to Profit or Loss</i>			
Perubahan nilai wajar investasi jangka pendek dan jangka panjang <i>Changes in fair value of short term and long term investment</i>	(1,431,252)	3,394,139	(142.2)
Laba (rugi) komprehensif entitas asosiasi <i>Comprehensive Profit (Loss) of Associated Entity</i>	1,693,562	72,543	2,234.6
Rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak Other comprehensive loss for the year after tax	(23,189,033)	(821,857,705)	(97.2)
Total rugi komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian proforma Total comprehensive loss for the year after the effects of pro forma adjustments	(7,559,353,244)	(5,971,366,085)	26.6
Penyesuaian proforma rugi tahun berjalan Adjustment of the pro forma loss for the year	7,495,116,524	5,141,954,769	45.8
Total rugi tahun berjalan sebelum efek penyesuaian proforma yang dapat diatribusikan Total loss for the year before attributable pro forma adjustment effects			
Pemilik entitas induk <i>Owner of the Parent Entity</i>	(41,047,687)	(7,553,611)	443.4
Kepentingan non-pengendali <i>Non-Controlling Interests</i>	0	0	(N/A)
Penyesuaian proforma rugi komprehensif tahun berjalan Adjustment of the pro forma comprehensive loss for the year	7,518,260,666	5,963,812,474	(N/A)
Total rugi komprehensif tahun berjalan sebelum efek penyesuaian proforma yang dapat didistribusikan Total comprehensive loss for the year before distributable pro forma adjustment effects			
Pemilik entitas induk <i>Owner of parent entity</i>	(41,092,578)	(7,553,611)	444.0
Kepentingan non-pengendali <i>Non-controlling interests</i>	0	0	(N/A)





Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Injourney pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp9,7 triliun, turun dari tahun 2020 senilai Rp10,5 triliun. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian dan perjalanan masyarakat karena pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020 dan masih berlangsung hingga akhir tahun 2021.

Operating revenues

In 2021, Injourney's operating revenue was recorded at Rp9.7 trillion, which decreased from 2020 of Rp10.5 trillion. The decrease was mainly due to the decline in economic activity and public travel due to the COVID-19 pandemic since March 2020 and will continue until the end of 2021.

Pendapatan Usaha (Dalam ribuan Rp)

Operating Revenues (In thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Pendapatan usaha Operating Revenues	9,732,833,584	10,459,370,952	(6.9)

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp(8,7) triliun turun dari tahun 2020 senilai Rp(8,5) triliun. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh biaya operasional bandara yang besar yang tidak diimbangi dengan pendapatan karena pandemi COVID-19.

Cost of Revenue

In 2021, cost of revenue was recorded at Rp8.7 trillion, which decreased from 2020 of Rp8.5 trillion. The decrease was mainly due to the large airport operating costs which were not offset by revenue due to the COVID-19 pandemic.

Beban Pokok Pendapatan (Dalam ribuan Rp)

Cost of Revenue (in thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Beban pokok pendapatan Cost of Revenue	(8,760,520,441)	(8,596,807,551)	1.9

Laba Bruto

Laba (rugi) kotor pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp972,3 miliar, turun dari tahun 2020 senilai Rp1,9 triliun. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh penurunan jumlah pendapatan dan tingginya beban pokok pendapatan sehingga mengakibatkan laba kotor perusahaan menurun.

Gross profit

In 2021, gross profit (loss) was recorded at Rp.972.3 billion, which decreased from 2020 of Rp.1.9 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in total revenue and a high cost of revenue resulting in a decrease in the company's gross profit.

Laba Bruto (Dalam ribuan Rp)

Laba Bruto (In thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Laba (rugi) kotor Gross profit (loss)	972,313,143	1,862,563,401	(47.8)

Pendapatan (Beban) Usaha

Pendapatan (beban) usaha pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp(6,4) triliun, naik dari tahun 2020 senilai Rp(5,3) triliun. Kenaikan beban usaha Kenaikan beban usaha utamanya disebabkan oleh pencadangan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih pihak berelasi khususnya PT Garuda Indonesia pada PT Angkasa Pura I sebesar 300 miliar dan PT Angkasa Pura II sebesar 1,2 triliun.

Operating Income (Expense)

In 2021, operating income (expenses) was recorded at Rp6.4 trillion, which increased from 2020 of Rp5.3 trillion. The increase in operating expenses was mainly due to the provision for impairment losses on bad debts from related parties, particularly PT Garuda Indonesia at PT Angkasa Pura I amounting to Rp300 billion and PT Angkasa Pura II amounting to Rp1.2 trillion.

Pendapatan (Beban) Usaha (Dalam ribuan Rp)

Operating Income (Expense) (In thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Beban pemasaran Marketing Expenses	(2,723,905,528)	(2,924,433,679)	(6.9)
Beban umum dan administrasi General and Administrative Expenses	(3,719,845,907)	(2,295,803,182)	62.0
Beban lain-lain Other Expenses	(343,911,418)	(332,469,003)	
Pendapatan lain-lain Other Income	333,655,168	245,722,171	35.8
Total beban usaha Total operating expenses	(6,454,007,685)	(5,306,983,693)	21.6

Rugi Usaha

Rugi usaha pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp(5,5) triliun, naik dari tahun 2020 senilai Rp(3,4) triliun. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh penurunan jumlah pendapatan dan pencadangan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih pihak berelasi khususnya PT Garuda Indonesia.

Operating Loss

In 2021, operating loss was recorded at Rp5.5 trillion, which increased 2020 of Rp3.4 trillion. The increase was mainly due to a decrease in total revenue and the provision for impairment losses on bad debts from related parties, especially PT Garuda Indonesia.

Laba (Rugi) Usaha (Dalam ribuan Rp)

Operating Profit (Loss) (In thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Rugi usaha Operating loss	(5,481,694,542)	(3,444,420,292)	59.1



Pendapatan (Beban) Non-Usaha

Pendapatan (beban) non-usaha pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp(2,8) triliun, naik dari tahun 2020 senilai Rp(2,3) triliun. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya beban keuangan (bunga pinjaman) seiring dengan peningkatan jumlah pinjaman jangka panjang.

Non-Operating Income (Expense)

In 2021, non-operating income (expenses) in 2021 was recorded at Rp2.8 trillion, which increased from 2020 of Rp2.3 trillion. The increase was mainly due to the increase in financial costs (borrowing interest) in line with the increase in the amount of long-term loans.

Pendapatan (Beban) Non-Usaha (Dalam ribuan Rp) Non-Operating Income (Expenses) (In thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Pendapatan keuangan <i>Finance Income</i>	83,921,402	287,045,767	(70.8)
Beban keuangan <i>Finance Expenses</i>	(2,780,798,012)	(2,428,517,557)	14.5
Bagian rugi entitas asosiasi <i>Equity loss of associate entities</i>	(131,478,148)	(111,252,384)	18.2
Pendapatan (beban) non-usaha Non-operating income (expenses)	(2,828,354,758)	(2,252,724,174)	25.6

Rugi Tahun Berjalan setelah Efek Penyesuaian Proforma

Rugi tahun berjalan setelah efek penyesuaian proforma pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp(7,5) triliun, naik dari tahun 2020 senilai Rp(5,1) triliun. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh penurunan jumlah pendapatan dan pencadangan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih pihak berelasi khususnya PT Garuda Indonesia dan meningkatnya beban keuangan atas bunga pinjaman.

Current Year Loss after Proforma Adjustment Effect

In 2021, the current year's loss after the pro forma adjustment effect was recorded at Rp7.5 trillion, which increased from 2020 of Rp5.1 trillion. The increase was mainly due to a decrease in total revenue and allowance for impairment losses on bad debts from related parties, especially PT Garuda Indonesia and an increase in the financial burden on loan interest.

Rugi Tahun Berjalan setelah Efek Penyesuaian Proforma (Dalam ribuan Rp) Current Year Loss after Proforma Adjustment Effect (In thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Rugi sebelum beban pajak final dan manfaat pajak penghasilan badan <i>Loss before final tax expense and corporate income tax benefits</i>	(8,310,049,300)	(5,697,144,466)	45.9
Rugi operasi yang diberhentikan <i>Dismissed operation loss</i>	(84,116,150)	0	(N/A)
Rugi sebelum pajak <i>Loss before tax</i>	(8,394,165,450)	(5,697,144,466)	47.3
Pajak final <i>final tax</i>	(162,275,156)	(161,967,871)	0.2
Rugi sebelum pajak penghasilan badan <i>Loss before corporate income tax</i>	(8,556,440,606)	(5,859,112,337)	46.0
Pajak kini <i>Current tax</i>	(103,946,324)	(59,471,136)	74.8
Pajak tangguhan <i>Deferred Tax</i>	1,124,222,719	769,075,093	46.2
Rugi tahun berjalan setelah efek penyesuaian proforma Current year's loss after pro forma adjustment effect	(7,536,164,211)	(5,149,508,380)	46.3

Rugi Komprehensif Lain

Rugi Komprehensif Lain pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp(23,2) miliar, turun dari tahun 2020 senilai Rp(821,9) miliar.

Other Comprehensive Loss

In 2021, Other Comprehensive Loss was recorded at Rp23.2 billion, which decreased from 2020 of Rp821.9 billion.

Rugi Komprehensif Lain (Dalam ribuan Rp)

Other Comprehensive Loss (In thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi <i>Items that will not be Reclassified to Profit or Loss</i>			
Kerugian aktuarial dari pengukuran kembali atas program imbalan pascakerja <i>Actuarial losses from remeasurement of post-employment benefit plans</i>	(26,253,220)	(950,501,934)	(N/A)
Manfaat (beban) pajak terkait <i>Related tax benefits (expenses)</i>	2,801,877	125,177,547	(97.8)
Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi <i>Items to be reclassified to profit or loss</i>			
Perubahan nilai wajar investasi jangka pendek dan jangka panjang <i>Changes in fair value short term and long term investment</i>	(1,431,252)	3,394,139	(142.2)
Laba (rugi) komprehensif entitas asosiasi <i>Actuarial Profit (Loss) on Associated Entities</i>	1,693,562	72,543	2,234.6
Rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak Other comprehensive loss for the year after tax	(23,189,033)	(821,857,705)	(97.2)

Rugi Komprehensif Periode Berjalan

Rugi komprehensif periode berjalan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp7,5 triliun, naik dari tahun 2020 senilai Rp5,9 triliun.

Comprehensive Loss for the Period

In 2021, the comprehensive loss for the current period was recorded at Rp7.5 trillion, which increased from 2020 of Rp5.9 trillion.

Rugi Komprehensif Periode Berjalan (Dalam ribuan Rp)

Comprehensive Loss for the Period (In thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Total rugi komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian proforma Total comprehensive loss for the year after the effects of pro forma adjustments	(7,559,353,244)	(5,971,366,085)	26.6
Penyesuaian proforma rugi tahun berjalan <i>Adjustment of the pro forma loss for the year</i>	7,495,116,524	5,141,954,769	45.8
Total rugi tahun berjalan sebelum efek penyesuaian proforma yang dapat diatribusikan Total loss for the year before attributable pro forma adjustment effects			
Pemilik entitas induk <i>Owner of the Parent Entity</i>	(41,047,687)	(7,553,611)	443.4
Keentingan non-pengendali <i>Non-Controlling Interests</i>	0	0	(N/A)



Uraian Description	2021	2020	Δ%
Penyesuaian proforma rugi komprehensif tahun berjalan <i>Adjustment of the pro forma comprehensive loss for the year</i>	7,518,260,666	5,963,812,474	26.1
Total rugi komprehensif tahun berjalan sebelum efek penyesuaian proforma yang dapat didistribusikan Total comprehensive loss for the year before distributable pro forma adjustment effects			
Pemilik entitas induk <i>Owner of the Parent Entity</i>	(41,092,578)	(7,553,611)	444.0
Kepentingan non-pengendali <i>Non-Controlling Interests</i>	0	0	(N/A)

ARUS KAS

Kas dan setara kas mencakup kas dan simpanan yang sewaktu-waktu dapat dicairkan. Pengelolaan kas senantiasa dikelola secara efektif dan efisien, untuk memastikan jalannya kegiatan operasional sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Perseroan mencatat kas dan setara kas pada awal tahun 2021 senilai Rp4,04 triliun. Pada akhir tahun 2021, penurunan bersih kas dan setara kas tercatat senilai Rp312,7 miliar.

CASH FLOW

Cash and cash equivalents include cash and deposits which can be withdrawn at any time. Cash management has always been effective and efficient to ensure that operational activities are carried out in accordance with the work plan that has been set. The company recorded cash and cash equivalents in early 2021 of Rp4.04 trillion. As of the end of 2021, the decrease in cash and cash equivalents - net was recorded at Rp312.7 billion.

Arus Kas (Dalam ribuan Rp) Cash Flow (in thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi <i>Net Cash Flow From (Used For) Operating Activities</i>	(3,208,197,490)	(5,561,214,952)	(42.3)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi <i>Net cash received from (used for) investing activities</i>	(2,280,017,802)	(6,046,580,060)	(62.3)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan <i>Net cash received from (used for) funding activities</i>	5,175,483,542	6,261,113,198	(17.3)
Dampak bersih perubahan nilai tukar valuta asing kas dan setara kas <i>Net impact of changes in foreign exchange rates on cash and cash equivalents</i>	(1,801,453)	(3,993,241)	(54.9)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas <i>Net increase (decrease) in cash and cash equivalents</i>	(312,731,750)	(5,346,681,814)	(94.2)
Kas dan setara kas awal tahun <i>Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year</i>	4,040,130,634	9,390,805,689	(57.0)
Kas dan setara kas akhir tahun <i>Cash and Cash Equivalents at the End of the Year</i>	3,725,597,431	4,040,130,634	(7.8)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp3,2 triliun, turun dari tahun 2020 senilai Rp5,5 triliun. Hal ini disebabkan oleh restrukturisasi pembayaran ke pihak ketiga (vendor) adanya restitusi pajak.

Cash Flow from Operating Activities

In 2021, cash flow from operating activities was recorded at Rp3.2 trillion, which decreased from 2020 of Rp5.5 trillion. This was due to tax refunds in restructuring payments to third parties (vendors).

Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Dalam ribuan Rp)

Cash Flows from Operating Activities (In thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Penerimaan dari pelanggan <i>Cash received from customers</i>	9,578,200,283	9,464,152,219	1.2
Pembayaran kas kepada pemasok dan pihak ketiga lainnya <i>Cash payments to suppliers and other third parties</i>	(7,401,984,546)	(8,781,961,632)	(15.7)
Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi <i>Cash flow from operating activities</i>	2,176,215,737	682,190,587	219.0
Penghasilan bunga <i>Interest income</i>	81,624,374	276,110,846	(70.4)
Pembayaran bunga <i>Interest payment</i>	(2,824,873,509)	(2,480,093,303)	13.9
Restitusi pajak <i>Tax refund</i>	562,099,391	15,502,703	3,525.8
Pembayaran pajak penghasilan <i>Income tax payment</i>	(292,977,043)	(725,786,259)	(59.6)
Pembayaran lainnya <i>Other payments</i>	(39,183,000)	(38,541,000)	1.7
Pembayaran kepada karyawan <i>Payment to employees</i>	(2,871,103,440)	(3,290,598,526)	(12.7)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Net cash flows received from (used for) operating activities	(3,208,197,490)	(5,561,214,952)	(42.3)



Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi pada tahun 2021 tercatat senilai Rp(2,28) triliun, turun dari tahun 2020 senilai Rp(6,0) triliun. Hal ini disebabkan oleh penundaan beberapa rencana investasi karena dampak COVID-19.

Cash Flow from Investing Activities

Cash flow from investing activities in 2021 was recorded at Rp2.28 trillion, decreased from 2020 of Rp6.0 trillion. This was due to the delay of several investment planning due to the impact of COVID-19.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Dalam ribuan Rp) Cash Flows from Investing Activities (In thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Hasil pelepasan aset tetap <i>Result of disposal of fixed assets</i>	106,246,512	94,933,683	11.9
Perolehan aset tetap dan properti investasi <i>Acquisition of fixed assets and investment properties</i>	(2,493,336,411)	(6,550,048,810)	(61.9)
Hasil penjualan aset keuangan lainnya <i>Proceeds from sale of other financial assets</i>	0	20,000,000	(100.0)
Penerimaan dari investasi jangka pendek <i>Revenue from short-term investments</i>	43,203,865	597,246,828	(92.8)
Pengeluaran untuk investasi jangka pendek <i>Expenditure for short term investment</i>	(33,320,000)	(27,500,000)	21.2
Perolehan aset tak berwujud <i>Acquisition of intangible assets</i>	(11,690,965)	(116,611,761)	(90.0)
Penerimaan dari investasi jangka panjang <i>Revenue from long-term investment</i>	5,164,000	20,000,000	(74.2)
Pengeluaran untuk investasi jangka panjang <i>Expenditure for long term investment</i>	0	(8,600,000)	(100.0)
Penerimaan dari pelepasan entitas anak <i>Proceeds from disposal of subsidiaries</i>	439,998,887	0	100.0
Penerimaan kas yang dibatasi penggunaannya <i>Restricted cash receipts</i>	0	9,000,000	(100.0)
Penambahan investasi asosiasi <i>Addition of investment in associates</i>	(366,283,690)	(85,000,000)	330.9
Penerimaan dividen <i>Dividend Receipt</i>	30,000,000	0	1.0
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Net cash flows received from (used for) investing activities	(2,280,017,802)	(6,046,580,060)	(62.3)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2021 tercatat senilai Rp5,2 triliun, turun dari tahun 2020 senilai Rp6,3 triliun. Hal ini disebabkan oleh penundaan pengeluaran untuk investasi, sehingga dana yang dibutuhkan dari pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang juga berkurang.

Cash Flow from Funding Activities

Cash flow from funding activities in 2021 was recorded at Rp5.2 trillion, decreased from 2020 of Rp6.3 trillion. This was due to delays in expenditure on investment, reducing funds needed from short-term and long-term loans.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (Dalam ribuan Rp) Cash Flow from Funding Activities (In thousands of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Pencairan utang bank jangka pendek <i>Disbursement of short-term bank loans</i>	1,402,991,008	531,038,666	164.2
Pembayaran utang bank jangka pendek <i>Payment of short-term bank loans</i>	0	(32,000,000)	(100.0)
Pencairan utang bank jangka panjang <i>Disbursement of long-term bank loans</i>	4,936,281,720	4,543,160,015	8.7
Pembayaran utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang <i>Payment of long-term bank and other financial institution debt</i>	(519,275,042)	(909,386,387)	(42.9)
Penerimaan utang obligasi dan sukuk ijarah <i>Receipt of bonds payable and sukuk ijarah</i>	1,611,900,000	2,250,000,000	(28.4)
Pembayaran utang obligasi dan sukuk ijarah <i>Payment of bonds payable and sukuk ijarah</i>	(2,090,000,000)	0	(N/A)
Pembayaran liabilitas sewa <i>Payment of lease liability</i>	(151,356,132)	(134,862,836)	12.2
Pembayaran biaya transaksi utang bank <i>Payment of bank debt transaction cost</i>	(4,500,000)	(8,000,000)	(43.8)
Pembayaran biaya transaksi utang obligasi <i>Payment of bond payable transaction cost</i>	(1,623,508)	(3,462,000)	(53.1)
Pembayaran dividen tunai kepada kepentingan non- pengendali <i>Payment of cash dividends to non-controlling interests</i>	0	(43,799)	(100.0)
Penerimaan dari (pembayaran kepada) pihak berelasi <i>Receipts from (payments to) related parties</i>	(8,934,504)	24,669,539	(136.2)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan <i>Net cash flows received from (used for) funding activities</i>	5,175,483,542	6,261,113,198	(17.3)



Kemampuan Membayar Utang

Ability to Pay Debt

Rasio-rasio kemampuan membayar utang dan kolektibilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya. Secara umum, kinerja rasio keuangan pada tahun 2021 menunjukkan keuangan Perseroan masih dalam keadaan yang sehat dan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Ratios of ability to pay debt and collectibility measure the company's ability to pay its debt obligations. In general, the performance of financial ratios in 2021 indicated that the Company had a sound financial condition and was able to meet its short term and long term debt obligations.

Kemampuan Membayar Utang (%)

Ability to Pay Debt (%)

Uraian Description	2021	2020
Laba/rugi terhadap Ekuitas (ROE) Return on equity (ROE)	(37,4)%	(23,8)%
Laba/rugi terhadap Jumlah Aset (ROA) Return on asset	(8,8) %	(5,3)%
Laba/rugi terhadap Investasi (ROI) Return on investment	(1,6) %	0,8%
Laba/rugi Bersih terhadap Pendapatan Operating margin	(84,2) %	(49,4)%
EBITDA margin	(13,2) %	5,9%
BOPO	153,2%	127,9%
Rasio Lancar Current ratio	69,6%	82,1%
Rasio Kas Cash ratio	30,3%	34,6%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to equity ratio	1,68	1,24
Rasio Liabilitas terhadap EBITDA Debt to EBITDA ratio	(-45,27)	87,63
Periode Kolektibilitas Collection period	79	96
IBD to EBITDA	(35,21)	66,59
IBD to Equity	1,30	0,94
Perputaran Aset Asset Turnover	12,17	13,25

Struktur Modal

Capital Structure

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk merupakan modal yang dikelola oleh Perusahaan. Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi.

Komposisi struktur modal tahun 2021 yang dimiliki oleh Perseroan adalah 61,7% berasal dari Liabilitas dan 38,3% berupa Ekuitas.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Equity attributable to the owner of the parent entity is capital managed by the Company. The main objective of the Company's capital management is to ensure the maintenance of a healthy capital ratio to support the business and maximize shareholder value. The Company manages its capital structure and makes adjustments based on changes in economic conditions.

The composition of capital structure in 2021 owned by the Company was 61.7% from Liabilities and 38.3% from Equity.

Struktur Modal Capital Structure

Uraian Description	2021	2020	Δ%
Liabilitas Liability			
Liabilitas jangka pendek <i>Current Liability</i>	11,520,232,627	12,012,617,303	(4.1)
Liabilitas jangka panjang <i>Non-Current Liability</i>	46,817,749,801	42,128,749,009	11.1
Total liabilitas Total Liabilities	58,337,982,428	54,141,366,312	7.8
Ekuitas Equity			
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1.000.000 (Angka Penuh) Modal Dasar - 260.000.000 Saham (2020 dan 2019: 26.000 Saham) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 65.164.367 Saham (2020 dan 2019: 13.000 saham)	65,164,366,785	13,000,000	501,164.4
<i>Share Capital - Par Value Rp1,000,000 (Full Amount) Authorized Capital - 260,000,000 Shares (2020 and 2019: 26,000 Shares) Issued and Paid Up Capital - 65,164,367 Shares (2020 and 2019: 13,000 shares)</i>			
Tambahan modal disetor <i>Additional paid-in capital</i>	(28,765,976,052)	0	(N/A)
Proforma ekuitas yang timbul dari proforma yang timbul dari transaksi restrukturisasi <i>Pro forma equity arising from restructuring transactions</i>	0	43,748,607,061	(100.0)



Uraian Description	2021	2020	Δ%
Saldo laba-dicadangkan <i>Appropriated retained earnings</i>	2,111,085	2,111,085	-
Saldo laba-belum dicadangkan <i>Unappropriated retained earnings</i>	(202,320,210)	(161,272,523)	25.5
Penghasilan komprehensif lain <i>Other comprehensive income</i>	(44,891)	0	(N/A)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk <i>Equity Attributable to The Owner of Parent Entity</i>	36,198,136,717	43,602,445,623	(17.0)
Kepentingan non-pengendali <i>Non-controlling interests;</i>	1,695,403	0	(N/A)
Total ekuitas <i>Total Equity</i>	36,199,832,120	43,602,445,623	(17.0)
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1.000.000 (Angka Penuh) Modal Dasar - 260.000.000 Saham (2020 dan 2019: 26.000 Saham) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 65.164.367 Saham (2020 dan 2019: 13.000 saham)	65,164,366,785	13,000,000	501,164.4
<i>Share Capital - Par Value Rp1,000,000 (Full Amount) Authorized Capital - 260,000,000 Shares (2020 and 2019: 26,000 Shares) Issued and Paid Up Capital - 65,164,367 Shares (2020 and 2019: 13,000 shares)</i>			
Tambahan modal disetor <i>Additional paid-in capital</i>	(28,765,976,052)	0	(N/A)

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts After Date of Accounting Statements

Tidak ada peristiwa/kejadian penting setelah tanggal neraca yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

No significant events after the balance sheets date have a significant effect on the overall financial statements.

Rencana Strategis ke Depan dan Prospek Usaha 2022

Future Strategic Plan and 2022 Business Prospect

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN PROYEKSI AWAL TAHUN DAN TARGET TAHUN 2022 COMPARISON BETWEEN TARGET AND PROJECTION AT THE BEGINNING OF THE FINANCIAL YEAR AND TARGET FOR 2022

Perseroan telah menetapkan serangkaian target kinerja pada awal tahun 2021. Tabel ini bawah ini menjabarkan pencapaian target-target tersebut, beserta target berikutnya pada tahun 2022.

The Company has set a series of performance targets in early 2021. The table below describes the target achievements, along with the next targets in 2022.

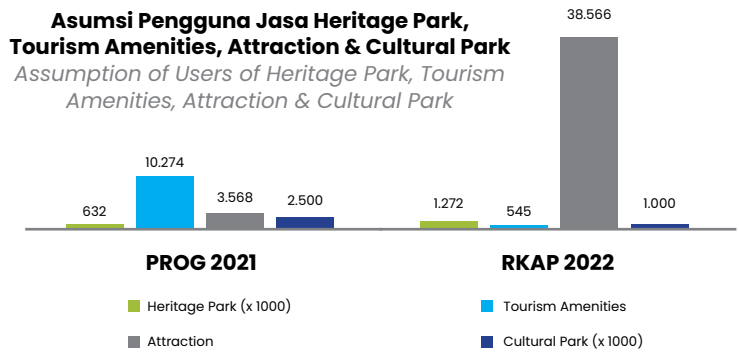
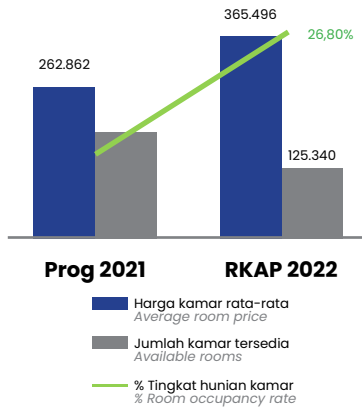
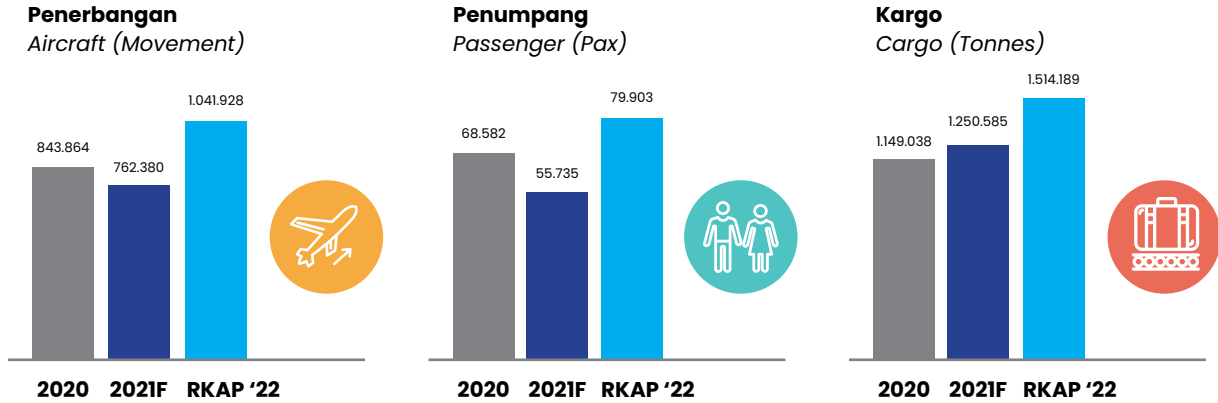
Perbandingan antara Target dan Proyeksi Awal Tahun dan Target Tahun 2022

Comparison between Target and Projection at the Beginning of the Financial Year and Target for 2022

Uraian Description	2021			Target 2022	Realisasi 2021 vs Target 2022 (%) Realization 2021 vs Target 2022 (%)
	Target	Realisasi (dalam miliar rupiah) Realization (In Billion Rupiah)	%		
Pendapatan usaha Operating revenues	9.031	9.732	107,8%	14.884	150
Laba (rugi) kotor Gross profit	96	972	1.012,5%	15.620	(103)
Laba (rugi) periode berjalan Profit (loss) for the period	(7.582)	(7.536)	99,4%	(4.077)	205
EBITDA EBITDA	(1.137)	(1.725)	151,7%	3.300	252
CFO CFO	(2.737)	(3.028)	110,6%	(859)	124
Total Aset Total Asset	(108.845)	(94.538)	86,9%	113.305	120



Trafik Pesawat, Penumpang & Kargo 2020-2022
Airplane, Passenger and Cargo Traffic 2020-2022



Realisasi trafik 2021 pergerakan pesawat dan penumpang tahun 2021 turun sebesar masing-masing 10% dan 19%, sedangkan kargo naik sebesar 9%. Untuk RKAP Tahun 2022, baik pergerakan pesawat, penumpang dan kargo mengalami kenaikan masing-masing sebesar 37% (pesawat), 43% (penumpang) dan 21% (kargo).

Traffic realization in 2021, aircraft and passenger movements in 2021 decreased by 10% and 19%, respectively, while cargo movement increased by 9%. In the 2022 RKAP, aircraft, passenger and cargo movements increased by 37% (aircraft), 43% (passengers) and 21% (cargos).

Pengguna jasa *Heritage Park*, *Tourism Amenities*, *Attraction* dan *Cultural Park* diproyeksikan akan naik masing-masing sebesar 101%, 1.770%, 981% dan 20% dari prognosa 2021.

Heritage Park, *Tourism Amenities*, *Attraction* and *Cultural Park* service users are projected to increase by 101%, 1.770%, 981% and 20%, respectively from the 2021 prognosis.

Produksi perhotelan, diukur dari total tamu (lokal dan internasional) datang sebesar -90% dan kamar siap jual sebesar 20% dari prognosa tahun 2021.

Hospitality production, measured by total guests (local and international) arriving by -90% and rooms ready for sale by 20% of the 2021 prognosis.

RENCANA STRATEGIS KE DEPAN

Menyongsong kebangkitan sektor pariwisata di tahun 2022 yang akan datang, Injourney akan mengusung tema besar dari strategi yang bertajuk “Winning the Traffic”, dan secara serentak tengah menjalankan serangkaian proyek strategis yang mendukung akselerasi sektor aviasi & pariwisata. Sebagian dari proyek-proyek pengembangan strategis ini rencananya akan dilaksanakan oleh anak-anak perusahaan dari subkluster yang tengah dalam proses pembentukan, yakni *airline management* dan *destination management*.

Restrukturisasi (PT Angkasa Pura I)

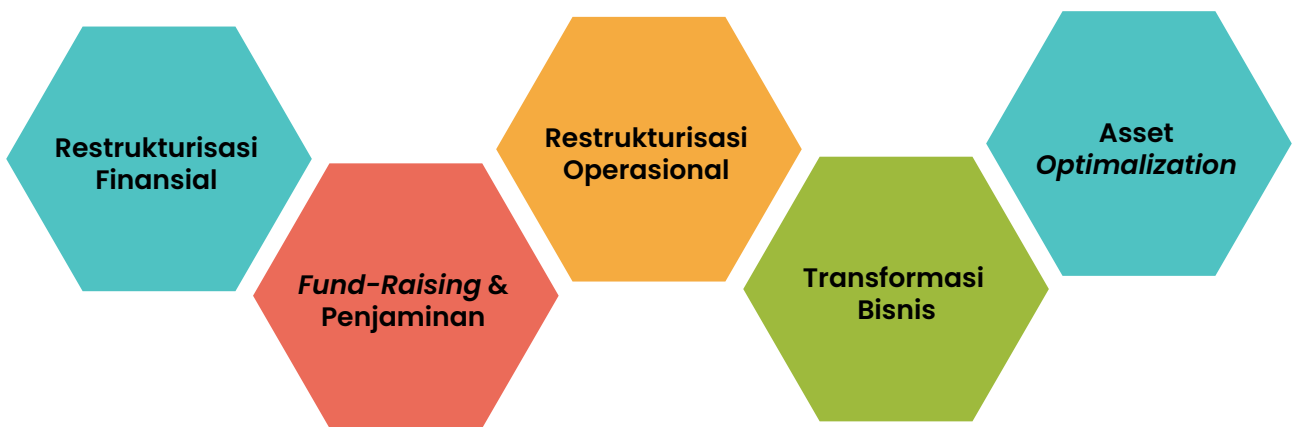
Perseroan mendukung strategi jangka panjang perusahaan untuk optimalisasi kinerja dan penyehatan PT Angkasa Pura I. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengajuan *loan repackaging*.

FUTURE STRATEGIC PLAN

Welcoming the revival of the tourism sector in 2022, Injourney will carry the major theme of the strategy “Winning the Traffic”, and simultaneously carry out a series of strategic projects that support the acceleration of the aviation & tourism sector. Several strategic development projects to be carried out by the subsidiaries of the sub-clusters that are in the establishment process include airline management and destination management.

Restructuring (PT Angkasa Pura I)

The Company supports the company’s long-term strategy to optimize the performance and turnaround of PT Angkasa Pura I, including through loan repackaging.



SURVIVE

Fokus utama menjaga arus kas, melunasi hutang dan memperkuat neraca

The focus is mainly on maintaining cash flow, paying off debt and strengthening the balance sheet.

RECOVER

Fokus utama pengembangan konektivitas dan perluasan pasar

Main focus is mainly on connectivity development and market expansion

SUSTAIN

Operational excellence, maximize revenue & customer experience, financial performance improvement



Pengembangan Bisnis Maskapai Penerbangan

Adanya potensi *supply-demand gap* di industri penerbangan domestik mulai tahun 2022, memberikan peluang kepada maskapai milik BUMN yang saat ini mengelola bisnis *charter* untuk memasuki bisnis penerbangan berjadwal, sekaligus mengisi segmen *airline* BUMN di kelas *medium services*.

Sponsorship Acquisition Program (Mandalika)

Injourney memiliki rencana strategis pelaksanaan Mandalika GP Series di sebuah destinasi pariwisata kelas dunia yang dikelola oleh BUMN pengembang kawasan pariwisata. Program ini didukung di tingkat tertinggi, yakni oleh Presiden Republik Indonesia, dan telah berkomitmen untuk memastikan bahwa Program Nasional ini akan mendukung 3 bidang utama:

1. Menggerakkan Sektor Pariwisata (*re-start*)
2. Memastikan bahwa Event MotoGP dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kredibilitas negara
3. Memastikan bahwa *multiplier effects* dapat tercapai

Event ini juga melibatkan dan mendukung UMKM atau usaha kecil menengah untuk mempromosikan dan mendukung ketahanan ekonomi masyarakat.

Airline Business Development

There was a potential *supply-demand gap* in the domestic aviation industry beginning in 2022, providing opportunities for state-owned airlines that currently manage the *charter* business to enter the *scheduled flight* business, as well as fill the *SOE airline* segment in the *medium services* class.

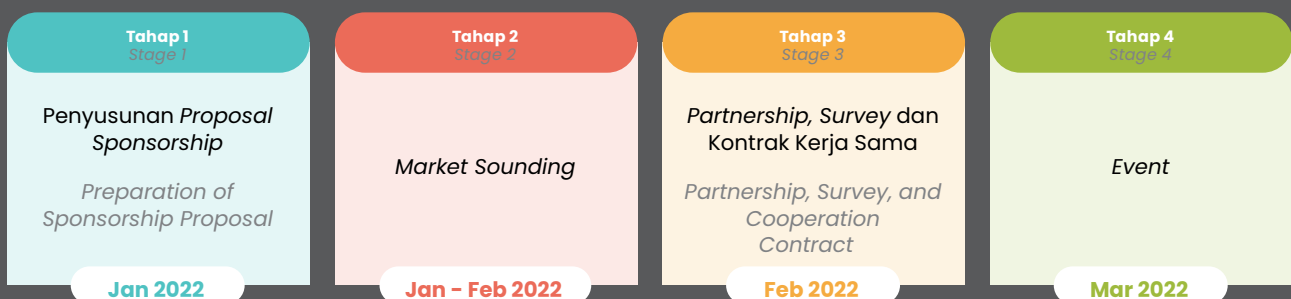
Sponsorship Acquisition Program (Mandalika)

Injourney has a strategic plan for holding the Mandalika GP Series in a world-class tourism destination under the development of a state-owned tourism development company. The Program is supported by the President of the Republic of Indonesia, and has committed to ensuring that the National Program will support 3 main areas:

1. Mobilizing the Tourism Sector (*re-start*)
2. Ensuring that MotoGP Events can be used to increase the country's credibility
3. Ensure that *multiplier effects* can be achieved

The event also involves and supports MSMEs or small and medium enterprises to promote and support the economic resilience of the community.

Project Timeline (Jan - Feb 2022)

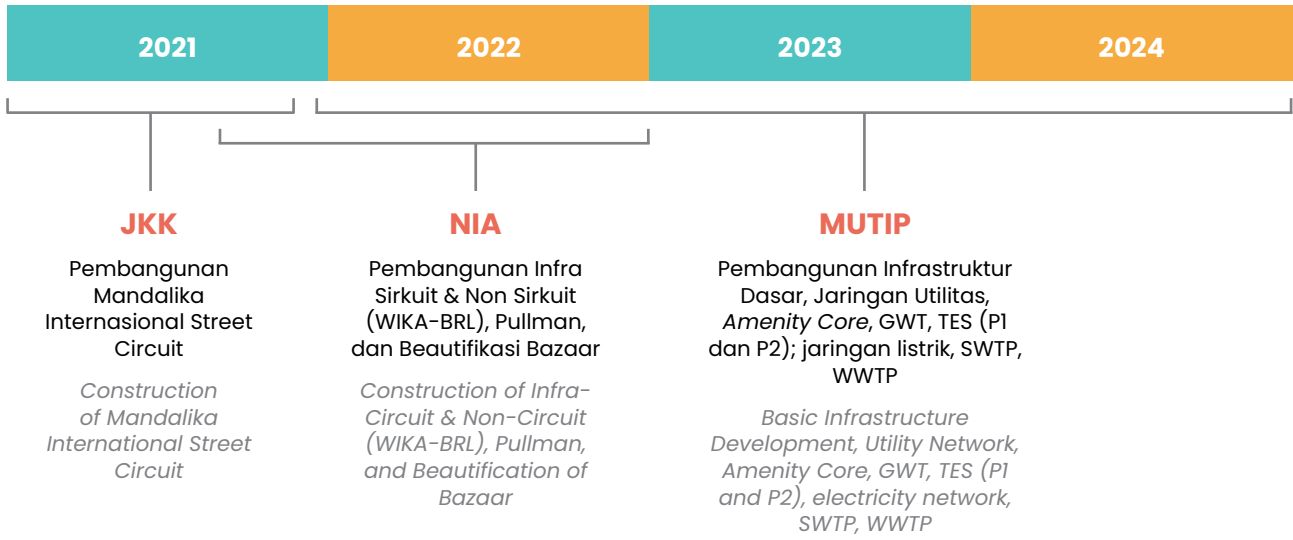


Pengembangan Infrastruktur The Mandalika

Dalam rangka mempercepat pengembangan KEK Mandalika dan tujuan *multiplier effect* dari pengembangan tersebut, diperlukan upaya untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata baru di The Mandalika

Infrastructure Development of The Mandalika

In order to accelerate the development of the Mandalika SEZ and the multiplier effect goal of the development, efforts are needed to accelerate sustainable infrastructure development to support the development of new tourism destinations in The Mandalika.

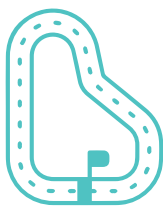


Event MotoGP 2022

Dalam rangka mempercepat pengembangan KEK Mandalika dan tujuan *multiplier effect* dari pengembangan tersebut, diperlukan upaya untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata baru di The Mandalika

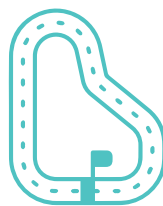
The 2022 MotoGP Event

The first 2021 MotoGP race will be held in a world-class tourism destination under the management of a state-owned tourism development company.



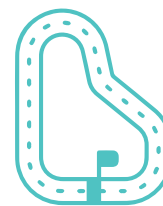
Event MotoGP pertama Indonesia setelah Grand Prix tahun 1997

Indonesia's first MotoGP event after the 1997 Grand Prix



Bagian dari pengembangan *demand creation* KEK Mandalika

Part of the Mandalika SEZ demand creation development



Upaya pemulihan ekonomi dan pariwisata, khususnya Provinsi NTB

Efforts to restore the economy and tourism, especially the Province of NTB



PMN untuk Pengembangan Kawasan TanaMori

Dalam rangka mendukung pengembangan kawasan TanaMori, NTT sebagai lokasi penyelenggaraan *side event* G20 tahun 2022, ASEAN Summit tahun 2023, dan event nasional maupun internasional lainnya

State Equity Participation (PMN) for the Development of the TanaMori Area

In effort to support the TanaMori area development, NTT as the location for the 2022 G20 side event, the 2023 ASEAN Summit, and other national and international events.

2020 | 2021 | 2022

Pengusulan KEK

SEZ proposal

Fokus utama pengusulan kawasan TanaMori menjadi KEK Pariwisata

The focus is mainly proposing the TanaMori area to become a Tourism SEZ

2020 | 2021 | 2022

Perencanaan dan Basic Design

Planning and Basic Design

Penyusunan Detail Masterplan, dokumen Basic Design dan DED untuk pembangunan Infrastruktur dan lahan seluas 20 ha untuk fasilitas MICE, Obs Deck dan Beach Villa

Preparation of Detailed Masterplan, Basic Design and DED documents for infrastructure development and 20 ha of land for MICE, Obs Deck and Beach Villa facilities

2022 | 2023

Konstruksi

Construction

Persiapan *side event* G20 tahun 2022, ASEAN Summit tahun 2023, dan event nasional maupun internasional lainnya

Preparation for the 2022 G20 side event, 2023 ASEAN Summit, and other national and international events



Prospek Usaha

Business prospect

Sektor aviasi dan pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terpuruk akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang telah terjadi sejak awal tahun 2020. Sepanjang tahun 2021, Pemerintah berupaya untuk memulihkan perekonomian berupa penerapan berbagai kebijakan stimulus ekonomi dan kampanye "New Normal" dengan tetap menerapkan kebijakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker ketika keluar rumah, peluncuran aplikasi PeduliLindungi yang dapat menelusuri rute perjalanan setiap individu, hingga upaya vaksinasi skala Nasional.

Akselerasi pemulihan sektor pariwisata direalisasikan Pemerintah melalui pemberlakuan *travel bubble* bilateral dan regional yang telah diuji coba pada 24 Januari 2022 untuk wilayah Batam-Bintan-Singapura. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), memperkirakan nilai PDB sektor pariwisata tahun 2022 dapat mencapai angka 4,3%, lebih tinggi dari perkiraan capaian 2021 sebesar 4,2%. Nilai devisa pariwisata tahun 2022 diperkirakan dapat mencapai US\$407 juta – US\$1,7 miliar. United Nations World Tourism Organization (UNWTO) memprediksi bahwa Indonesia yang saat ini menempati posisi ke-21 dalam hal ukuran pasar pariwisata berpotensi akan naik ke posisi ke-17 di tahun 2030 dengan total nilai pasar sekitar USD42 miliar.

The aviation and tourism sector is one of the hardest-hit sectors due to the impact of the COVID-19 pandemic since the beginning of 2020. Throughout 2021, the Government endeavored to restore the economy through the implementation of various economic stimulus policies and the "New Normal" campaign by consistently implementing health protocol policies such as wearing masks when leaving the house, launching PeduliLindungi application which can track individual's travel route, to national-scale vaccination.

The government has realized the acceleration of recovery in the tourism sector through the implementation of a bilateral and regional travel bubble that was tested on January 24, 2022 for Batam-Bintan-Singapore area. The Ministry of Tourism and Creative Economy (Kemenparekraf), estimates that the GDP value of the tourism sector in 2022 can reach 4.3%, higher than the estimated 2021 achievement of 4.2%. The foreign exchange earnings from tourism in 2022 is estimated to reach US\$407 million - US\$1.7 billion. The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) predicts that Indonesia, which currently occupies the 21st position in tourism market size, has the potential to rise to 17th position by 2030 with a total market value of around USD 42 billion.



Berdasarkan The World Tourism Organization (UNWTO), pariwisata 2022 masih akan sulit diprediksi, terutama karena pandemi yang masih berlangsung dengan terus munculnya varian baru, krisis energi dan krisis keamanan di beberapa negara. Namun demikian, InJourney melihat prospek usaha di tahun 2022 sebagai masa bangkitnya sektor pariwisata. Tahun 2021 merupakan masa transisi, baik bagi masyarakat, Pemerintah, pemilik usaha, dan pemulihan sektor pariwisata. Percepatan pemulihan sektor pariwisata Indonesia didukung dengan membentuk InJourney sebagai perusahaan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung. Dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan di tahun 2021, kami berupaya mempersiapkan diri menyambut kebangkitan sektor pariwisata tahun 2022 dengan menyiapkan berbagai regulasi dan fondasi. Digalakkannya pemberian vaksin dan *booster* yang menjadi *game changer* pemulihan ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri diharapkan dapat meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara.

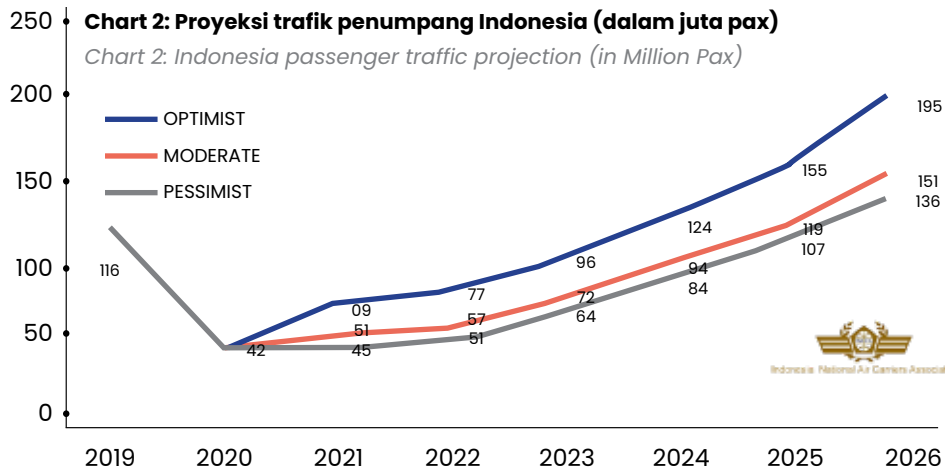
Pembukaan rute internasional ke Bali per November 2021, pencabutan kebijakan karantina bagi wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, serta kebijakan cuti bersama hari raya Idulfitri 2022 yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi angin segar untuk awal langkah InJourney. Selain itu, Indonesia telah siap menyelenggarakan *event-event* internasional seperti MotoGP, World Super (WSBK), dan Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan menjadi momentum pembukaan panggung pariwisata Indonesia kembali ke kancah dunia.

Wisatawan mancanegara ditargetkan mencapai 1,8 juta – 3,6 juta pada tahun 2022. Wisatawan nusantara masih akan menjadi andalan pemulihan sektor pariwisata pada tahun 2022. Menparekraf menargetkan 260–280 juta target pergerakan wisatawan nasional pada tahun 2022. Kebijakan perizinan mudik pada masa Idul Fitri 2022 juga menjadi angin segar jumlah perjalanan dan kunjungan di sejumlah tempat wisata Indonesia.

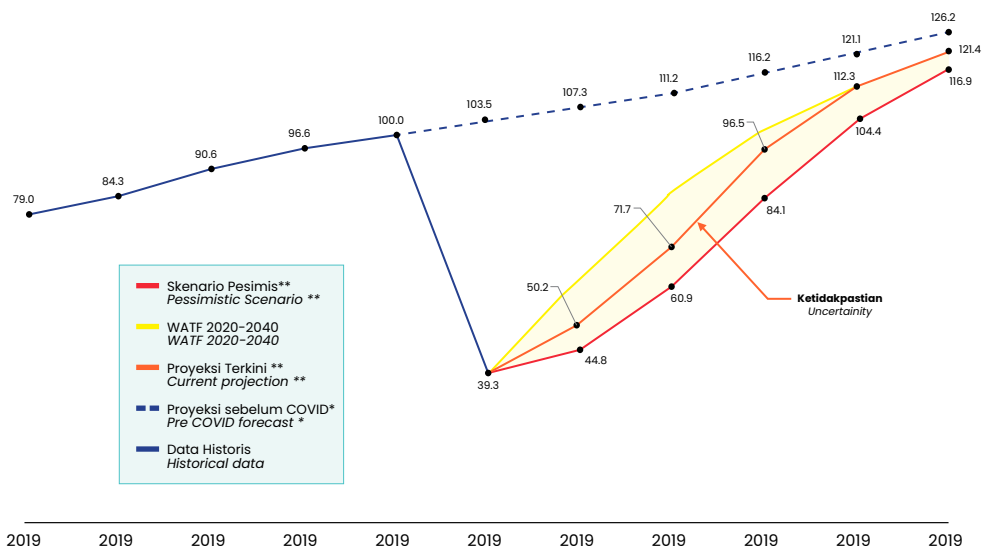
According to The World Tourism Organization (UNWTO), tourism in 2022 was difficult to predict, especially due to the ongoing pandemic with the emergence of new variants, energy crises and security crises in several countries. However, InJourney sees the business prospects in 2022 as a period of the revival of tourism sector. 2021 is a transition period for the community, the government, business owners, and the tourism sector recovery. The acceleration of Indonesia's tourism sector recovery has been supported by the establishment of InJourney as the Tourism and Supporting SOE Holding company. In less than 3 months in 2021, we have prepared to welcome the tourism sector revival in 2022 through various regulations and foundations. The massive vaccination program, as a game-changer for national and global economic recovery, is expected to increase total travel volume of domestic and foreign tourists.

The opening of international routes to Bali as of November 2021, the lifting of all quarantine requirements for foreign tourists visiting Indonesia and the joint leave policy for the 2022 Eid al-Fitr holiday set by the Government is a breath of fresh air for InJourney's initial steps. In addition, Indonesia is ready to hold international events such as MotoGP, World Super (WSBK), and the G20 Summit as the momentum for opening the stage for Indonesia's tourism to return to the international arena.

Foreign tourists were targeted to reach 1.8 million–3.6 million in 2022. Domestic tourists were the mainstay of the tourism sector recovery in 2022. The Minister of Tourism and Creative Economy set a target of 260–280 million domestic tourist movements in 2022. The government's policy allowing homecoming travel during the 2022 Eid Al-Fitr period was also a breath of fresh air for total trips and visits to several Indonesia's tourist attractions.



Proyeksi Trafik Penumpang Indonesia berdasarkan kajian INACA untuk tahun 2022-2026
 Indonesian Passenger Traffic Projection based on INACA for 2022-2026



Proyeksi Trafik Penumpang secara global berdasarkan Airport Council International (ACI) untuk tahun 2022-2025
 Global Passenger Traffic Projection based on Airport Council International (ACI) for 2022-2025

Selain itu, terdapat 8 (delapan) tren masa kini yang dapat berkontribusi memacu perkembangan industri aviasi dan pariwisata global, antara lain:

1. Penggunaan media sosial secara masif menjadi alat promosi yang sangat efektif untuk mendorong minat perjalanan yang menawarkan opsi personalisasi perjalanan;

In addition, there are 8 (eight) current trends that contribute to spurring the development of the global aviation and tourism industry, including:

1. Massive use of social media as an effective promotional tool to drive travel interest offering personalized travel options;



2. Demografi umur yang mendominasi pariwisata mulai beralih ke generasi milenial yang cenderung tertarik pada: a) *experiential travelling*, yang menitikberatkan pada pengalaman baru di setiap perjalanan, b) preferensi penggunaan layanan daring dalam proses perencanaan dan pemesanan; dan c) preferensi terhadap kemewahan akomodasi yang masih terjangkau.
 3. Peningkatan penggunaan teknologi digital seperti *e-marketplace*,
 4. Penerapan inisiatif transformasi digital lintas industri pariwisata yang mendukung efektivitas dan efisiensi bisnis;
 5. Pembentukan model bisnis baru dan promosi berbasis tema skala besar (MotoGP, Jazz Gunung Bromo, dan lain sebagainya);
 6. Penguatan *loyalty program* di industri pariwisata;
 7. Peralihan sektor pariwisata ke arah penawaran layanan; dan
 8. Pengalaman pariwisata yang terintegrasi dan holistik dan bersifat *end-to-end*, melibatkan seluruh aspek perjalanan pelanggan.
2. *The shift in dominant age demographics for tourism to the millennial generation who is likely to be interested in: a) experiential traveling, focusing on new experiences in every trip, b) preferences for using online services in the planning and booking process; and c) preference for affordable luxury accommodation.*
 3. *Increased use of digital technology such as e-marketplaces,*
 4. *Implementing digital transformation initiatives across the tourism industry that support business effectiveness and efficiency;*
 5. *Establishment of new business models and large-scale theme-based promotions (MotoGP, Jazz Gunung Bromo, and so on);*
 6. *Strengthening loyalty programs in the tourism industry;*
 7. *The shift of the tourism sector towards services offering; and*
 8. *Integrated, holistic and end-to-end tourism services and experiences, involving all aspects of the customer journey.*

Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

PANGSA PASAR

Injourney adalah satu-satunya Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung yang membawahi sejumlah anak usaha dalam sektor aviasi, pelayanan kebandarudaraan, akomodasi, destinasi pariwisata, dan *retail*. Dengan demikian pangsa pasar Injourney mencakup pengguna jasa maskapai penerbangan, *customer* hotel, serta wisatawan dalam negeri dan wisatawan mancanegara.

MARKET SHARE

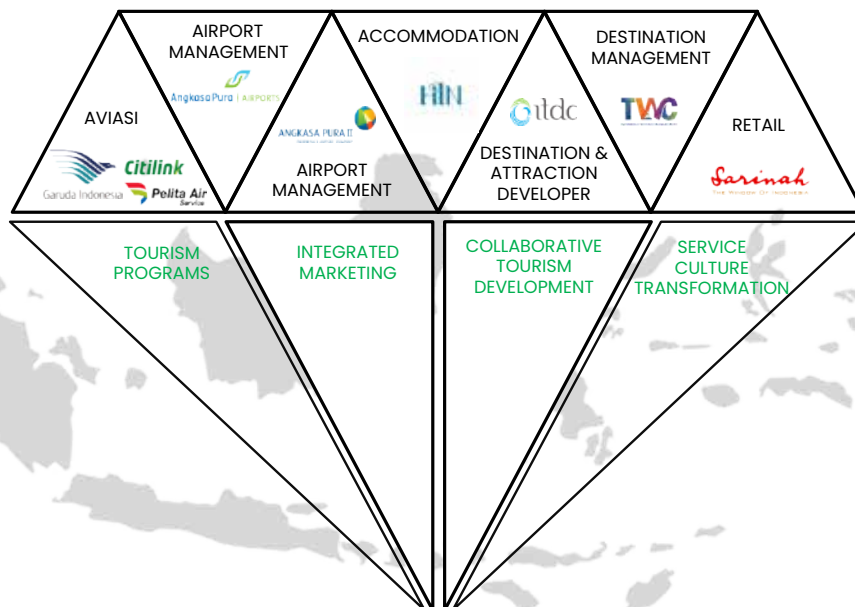
Injourney is the only Tourism and Supporting SOE Holding to oversee several subsidiaries in the aviation, airport services, accommodation, tourism destinations, and retail sectors. Thus, Injourney's market share includes airline service users, hotel customers, as well as domestic and foreign tourists.

STRATEGI PEMASARAN

Injourney mengembangkan pelayanan optimal dalam sektor pariwisata dengan mengkolaborasikan layanan Aviasi, *Airport Management*, Akomodasi, Pengelolaan Destinasi & Atraksi, *Heritage Management*, dan *Retail*. Melalui strategi "*Creating value from Journey and Joy*" bersama seluruh anak usaha, Injourney berharap dapat meningkatkan produk pariwisata, meningkatkan nilai ekonomi sektor pariwisata, dan membangun integrasi layanan pariwisata yang kuat.

MARKETING STRATEGY

Injourney provides optimal services in the tourism sector by collaborating Aviation, Airport Management, Accommodation, Destinations & Attractions Management, Heritage Management, and Retail services. Through the strategy of "Creating value from Journey and Joy" together with all of its subsidiaries, Injourney expects to increase tourism products, increase the economic value of the tourism sector, and build a strong integration of tourism services.



Creating value from journey and joy



Dalam upaya mendukung keberhasilan manajemen pariwisata berkelanjutan, Injourney bersama dengan seluruh pemangku kepentingan diantaranya pemerintah, pelaku pariwisata, bisnis, dan masyarakat lokal menerapkan 4 pilar pemasaran yaitu *tourism program, integrated marketing, collaborative tourism development, dan service culture transformation*. Upaya tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan seluruh anak usaha Injourney dengan beberapa kegiatan promosi diantaranya:

- *Integrated Online Travel Platform*
- *Synergised marketing effort*
- *Branding guidelines*
- *Bundling Package & incentive programs (Injourney Points)*
- *Commercial Strategy*
- *Increase in online media awareness*
- *Active Calendar of Tourism Programs throughout the year*

TIGA PROGRAM PARIWISATA UNGGULAN

Seluruh kolaborasi antara Injourney dan anak usaha mengedepankan tiga program pariwisata unggulan yaitu:

1. Olahraga

Wisata olahraga merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dalam perkembangan industri pariwisata global. Kegiatan yang ditawarkan dalam pariwisata olahraga adalah aktivitas olahraga yang melibatkan wisatawan untuk berpartisipasi dan penyelenggaraan acara olahraga yang dapat disaksikan baik oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Di tahun 2021, Injourney dan Anak Usaha telah membuat perencanaan penyelenggaraan berbagai event olahraga yang akan diselenggarakan sepanjang tahun 2022. Beberapa daftar acara olahraga yang telah direncanakan dapat dilihat dalam tabel berikut.

In an effort to support the success of sustainable tourism management, Injourney together with all stakeholders, including the government, tourism players, businesses, and local communities implement 4 marketing pillars, namely tourism programs, integrated marketing, collaborative tourism development, and service culture transformation. The efforts are carried out in an integrated manner with all Injourney subsidiaries through several promotional activities, including:

- *Integrated Online Travel Platform*
- *Synergised marketing effort*
- *Branding guidelines*
- *Bundling Package & incentive programs (Injourney Points)*
- *Commercial Strategy*
- *Increase in online media awareness*
- *Active Calendar of Tourism Programs throughout the year*

THREE LEADING TOURISM PROGRAMS

All collaborations between Injourney and its subsidiaries put forward three leading tourism programs, as follows:

1. Sport

Sports tourism is one of the fastest growing sectors in the development of the global tourism industry. Activities offered in sports tourism involve tourists to participate and organize sporting events to be witnessed by domestic and foreign tourists. In 2021, Injourney and its Subsidiaries made planning to organize various sporting events to be held throughout 2022. A list of scheduled sporting events can be seen in the following table.

Nama Program Program Name	Destinasi Destination	Sub-Holding	Waktu Penyelenggaraan Holding Time
MotoGP	Mandalika	ITDC*	Maret <i>March</i>
Indonesia Marathon	Bali	HIN	Juni <i>June</i>
Toba Run	Toba	HIN	September <i>September</i>
L'etape Borobudur (Bike)	Borobudur	TWC	Oktober <i>October</i>
WBSK	Mandalika	ITDC	November <i>November</i>
Mandalika Utara Trail	Mandalika	ITDC	Desember <i>December</i>

* Masih sedang dalam proses inklusi per tanggal 31 Desember 2021
* Still in inclusion process as at 31 December 2021

2. Seni & Musik

Program wisata seni dan musik menawarkan berbagai kegiatan berupa pagelaran seni, pameran, film, dan pertunjukan konser yang mendatangkan sejumlah artis dalam dan luar negeri. Kegiatan yang akan direalisasikan Injourney pada tahun 2022 dalam acara pagelaran seni dan musik terlampir dalam tabel berikut.

2. Art & Music

Art and music tourism program offers various activities in the form of art performances, exhibitions, films, and concert performances that bring in a number of domestic and foreign artists. Injourney will realize several art and music performances in 2022 as can be seen in the following table.

Nama Program Program Name	Destinasi Destination	Sub-Holding	Waktu Penyelenggaraan Holding Time
Bali International Film Festival	Bali	ITDC*	Juni <i>June</i>
Toba Lake Music Festival	Toba	HIN	Juli <i>July</i>
Merah Putih Drone Show	Borobudur	TWC	Agustus <i>August</i>
Art Moments	Jakarta	Sarinah	Agustus <i>August</i>
Prambanan Jazz Festival	Prambanan	TWC	Oktober <i>October</i>
New Year Music Concert	Labuan Bajo	HIN	Desember <i>December</i>

3. Budaya & Kuliner

Sektor wisata budaya dan kuliner memiliki keidentikan dalam menawarkan ciri khas yang tidak dapat ditemui di tempat lain. Melalui wisata budaya, wisatawan dapat menikmati ciri khas Indonesia melalui pandangan mata seperti mengunjungi sejumlah tempat bersejarah, tempat ibadah, maupun menyaksikan penyelenggaraan upacara adat. Sementara melalui wisata kuliner, wisatawan dapat menelusuri kekayaan Indonesia melalui indera perasa dengan menikmati berbagai hidangan Indonesia yang kaya rasa. Program yang direncanakan dalam memperkenalkan budaya dan kuliner dapat dilihat dalam tabel berikut.

3. Culture & Culinary

Cultural and culinary tourism sectors offer distinctive feature that cannot be found anywhere else. Through cultural tourism, tourists can enjoy Indonesia's distinctive features through their eyes, such as visiting a number of historical places, places of worship, or witnessing traditional ceremonies. Meanwhile, through culinary tourism, tourists can explore the richness of Indonesia through the sense of taste by enjoying various Indonesian dishes that are rich in taste. The scheduled program to introduce culture and culinary can be seen in the following table.



Nama Program <i>Program Name</i>	Destinasi <i>Destination</i>	Sub-Holding	Waktu Penyelenggaraan <i>Holding Time</i>
Borobudur Coffee Festival	Borobudur	TWC	Mei <i>May</i>
Launch Sarinah	Jakarta	Sarinah	Juni <i>June</i>
Bali Cultural Festival	Bali	ITDC	Juli <i>July</i>
Panggung Karya Indonesia	Jakarta	Sarinah	September <i>September</i>
JelajaHIN Jajanan	Toba	HIN	Oktober <i>October</i>

Informasi Material dan Hubungan Afiliasi

Material Information and Affiliate Relationship

Informasi terkait transaksi dengan pihak berelasi dapat dibaca di Laporan Keuangan Konsolidasian Catatan 44, yang dilampirkan di bagian akhir Laporan ini.

Information on transactions with related parties can be seen in the Consolidated Financial Statements Note 44, as attached at the end of this Report.

Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Changes to the Provisions of Laws and Regulations

Tidak ada perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan di tahun 2021.

There are no changes to the provisions of the laws and regulations that have a significant effect on the Company in 2021.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Changes in Accounting Policies

Berikut adalah amendemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, yaitu:

1. PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
2. Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2;
3. PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
4. PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd;
5. PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
6. PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penyajian Laporan Keuangan;
7. PSAK 13 (Penyesuaian Tahunan 2021): Properti Investasi;
8. PSAK 48 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penurunan Nilai Aset;
9. PSAK 66 (Penyesuaian Tahunan 2021): Pengaturan Bersama; dan
10. ISAK 16 (Penyesuaian Tahunan 2021): Perjanjian Konsesi Jasa.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

The following are amendments and adjustments to financial accounting standards (SAK) as well as interpretations of SAKs effective for the financial year beginning on or after January 1, 2021, namely:

1. PSAK 22 (Amendemen 2019): Business Combination: Definition of Business;
2. Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62 and Amendment PSAK 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2;
3. PSAK 110 (Adjustment 2020): Accounting for Sukuk
4. PSAK 111 (Adjustment 2020): Accounting for Wa'd ;
5. PSAK 112: Accounting for Endowments;
6. PSAK 1 (Annual Adjustment 2021): Presentation of Financial Statements;
7. PSAK 13 (Annual Adjustment 2021): Investment Properties;
8. PSAK 48 (Annual Adjustment 2021): Impairment of Asset Value;
9. PSAK 66 (Annual Adjustment 2021): Joint Arrangements; and
10. ISAK 16 (Annual Adjustment 2021): Service Concession Agreement.

The implementation of the standards does not have a significant impact on the amounts reported in the current period or the previous year.





05

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Injourney

*Good Corporate Governance
Implementation in Injourney*

"Injourney mempererat sinergi bersama Anak Usaha dan Pemangku Kepentingan dengan menyusun fondasi yang kuat melalui struktur tata kelola perusahaan yang baik."

"Injourney strengthens synergy with Subsidiaries and Stakeholders by building a strong foundation through a good corporate governance structure."



Dasar Penerapan dan Struktur Tata Kelola

Implementation Basis and Governance Structure

Dasar Kebijakan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (“GCG”)

Bagi Injourney, penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan sebuah dasar dalam memberikan pelayanan terbaik untuk setiap pengalaman perjalanan wisatawan. Melalui tata kelola perusahaan yang baik, Injourney berupaya mengelola perusahaan secara profesional, transparan, efisien, serta mampu memberikan kepercayaan bagi para Pemegang Saham.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) di Injourney mengacu pada Surat Edaran OJK No. 32 / SEOJK.04 / 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Injourney juga menerapkan prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) serta kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan (*equality*) sesuai dengan Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Injourney sebagai BUMN Holding Pariwisata dan Pendukung berkomitmen untuk menjunjung praktik-praktik terbaik tata kelola perusahaan, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, dan telah diubah oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.

Struktur dan Mekanisme GCG

Struktur tata kelola di Injourney mengikuti regulasi yang berlaku dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Di tahun 2021, Injourney telah menyusun struktur GCG yang akan diresmikan dan berlaku pada Laporan tahun 2022.

Policy Basis for Good Corporate Governance (“GCG”) Implementation

For Injourney, the implementation of good corporate governance is a basis in providing the best service for every tourist travel experience. Through good corporate governance, Injourney strives to manage the company in a professional, transparent, efficient manner, and is able to give trust to the Shareholders.

In implementing good corporate governance (GCG), Injourney refers to OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on the Good Governance Manual for Publicly Listed Companies. The Company also implements the principles of good corporate governance, including transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality in accordance with the General Guideline for GCG from the National Committee on Governance (KNKG).

As the Tourism and Supporting SOE Holding, Injourney is committed to upholding the best practices of corporate governance, in accordance with the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, as amended by the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/2012 on Amendments to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

GCG Structure and Mechanism

GCG structure at Injourney adheres to the applicable regulations in Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies consisting of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. In 2021, Injourney prepared a GCG structure to be formalized and applicable in the 2022 Report.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Injourney terdiri dari RUPS Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP), RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) apabila diperlukan. Pelaksanaan RUPST tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan terkait BUMN Perseroan (Persero) lain yang berlaku.

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh keputusan yang menyangkut kegiatan operasional perusahaan ditentukan. RUPS memiliki wewenang dalam menyetujui penerbitan laporan keuangan dan laporan tahunan, penentuan jumlah Remunerasi Direksi dan Komisaris, menunjuk auditor independen, membayar dividen dan keuntungan, merubah anggaran dasar, serta delegasi wewenang terhadap Dewan Komisaris dan Direksi dalam tindak lanjut dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Pelaksanaan RUPS RKAP untuk Tahun Buku 2021 dan Realisasinya

Pelaksanaan RUPS RKAP PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) Tahun Buku 2021 berlangsung secara daring. Seluruh hasil keputusan RUPS telah disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Surat Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021.

Injourney's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) consists of f GMS for discussion of the Company Work Plan and Budget (RUPS RAKP), GMS for Approval of Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements, and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), if necessary. The convening of AGMS refers to has complied with the Company's Articles of Association, Law Number 19 of 2003 concerning BUMN and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and other applicable regulations related to State-Owned Enterprises (SOEs).

All resolutions on the company's operational activities are determined through General Meeting of Shareholders (GMS). GMS has the authority to approve the issuance of financial statement and annual report, determine the amount of remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners, appoint an independent auditor, pay dividend and profit, amend the articles of association, as well as delegate authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors in the follow-up and approval of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

Implementation of GMS on Company Work Plan and Budget for Fiscal Year 2021 and its Realization

GMS on Company Work Plan and Budget (RUPS RKAP) of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) for fiscal year 2021 was carried out online. All resolutions of the GMS have been submitted to Shareholders through the Approval Letter for the Revised Company Work Plan and Budget (RKAP) of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) 2021 on December 20, 2021.



Keputusan RUPS RKAP untuk Tahun Buku 2021
Resolutions of the GMS on Company Work Plan and Budget for Fiscal Year 2021

Agenda Pertama/ Agenda Item I

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021
Ratification of the Company Work Plan and Budget (RKAP) 2021

Keputusan/ Resolution

Mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021 dengan pokok-pokok sebagai berikut:
To ratify the Company Work Plan and Budget 2021, as per the following:

a. Laporan Laba Rugi Konsolidasian/ Consolidated Income Statement

Pendapatan/ Income	Rp9,309,137 million
Beban Usaha/ Operating expenses	Rp(13.948.985) million
Laba (Rugi) Usaha/ Operating Profit (Loss)	Rp(4,639,848) million
Pendapatan (Beban) Diluar Usaha/ Non-Operating Income (Expenses)	Rp(2,771,761) million
Laba (Rugi) Sebelum Pajak/ Profit (Loss) Before Tax	Rp(7,411,609) million
Pajak Penghasilan/ Income tax	Rp(173,189) million
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	Rp(7,238,419) million

b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/ Consolidated Statement of Financial Position

Aset/ Asset	
Aset Lancar/ Current assets	Rp11,281,509 million
Aset Tidak Lancar/ Non-Current Assets	Rp94,651,896 million
Jumlah Aset/ Total assets	Rp105,933,405 million
Liabilitas dan Ekuitas/ Liability and equity	
Liabilitas Jangka Pendek/ Short-term liabilities	Rp11,887,357 million
Liabilitas Jangka Panjang/ Long-Term Liabilities	Rp53,346,904 million
Ekuitas/ Equity	Rp40,699,143 million
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas/ Total Liabilities and Equity	Rp105,933,405 million



c. Laporan Arus Kas Konsolidasian/ *Consolidated Statement of Cash Flows*

Kas dari Aktivitas Operasi/ <i>Cash from Operating Activities</i>	Rp(2,529,352) million
Kas dari Aktivitas Investasi/ <i>Cash from Investing Activities</i>	Rp(5,921,468) million
Kas dari Aktivitas Pendanaan/ <i>Cash from Funding Activities</i>	Rp9,057,690 million
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas/ <i>Net Increase in Cash and Cash Equivalents</i>	Rp606,870 million
Kas dan Setara Kas Akhir / <i>Final Cash and Cash Equivalents</i>	Rp4,647,001 million

d. Investasi/ *Investation*

Total Investasi/ <i>Total Investment</i>	Rp5,101,562 million
---	----------------------------

e. Tingkat Kesehatan Perusahaan/ *Soundness Level*

Mengacu pada Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, Kinerja PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) Tahun Buku 2021 (Audited), dapat digolongkan ke dalam Kategori SEHAT "A" dengan Skor 69.

Referring to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. 100/MBU/2002 dated June 4, 2002 on Assessment of State-Owned Enterprises Soundness Level, the Performance of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) for Fiscal Year 2021 (Audited) can be classified into "A" HEALTHY Category with a score of 69.



Agenda Kedua/ Agenda Item 2

Persetujuan dan Pengesahan *Key Performance Indicators (KPI)* antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021

Approval and Ratification of *Key Performance Indicators (KPI)* between the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders in 2021

Keputusan/ *Resolution*

Menyetujui *Key Performance Indicators (KPI)* untuk RKAP PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) Tahun 2021 sebagaimana terlampir dengan mempertimbangkan revisi/perubahan RKAP tahun 2021.

To approve Key Performance Indicators (KPI) for the Company Work Plan and Budget (RKAP) of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) 2021 as attached by taking into account the revision/change of the 2021 RKAP.

Agenda Ketiga/ Agenda Item 3

Arahan Pemegang Saham terkait Persetujuan dan Pengesahan Kontrak *Key Performance Indicators (KPI)*

Shareholders' Directives related to Approval and Ratification of *Key Performance Indicators (KPI)* Contract

Keputusan/ *Keputusan*

Dewan Komisaris dan Direksi diminta untuk menuangkannya dalam Kontrak Manajemen yang ditandatangani bersama oleh Wakil Menteri BUMN II, Dewan Komisaris dan Direksi serta melaporkan realisasinya kepada Pemegang Saham secara berkala dan/ atau sesuai dengan rencana pencapaian target KPI.

The Board of Commissioners and the Board of Directors are tasked to include Key Performance Indicators in Management Contract jointly signed by the Deputy Minister of SOE II, the Board of Commissioners and the Board of Directors and to report its realization to the Shareholders on a regular basis and/or in accordance with the KPI target achievement plan.





RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 dan Realisasinya

PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) merupakan perusahaan yang baru dibentuk pada tanggal 4 Oktober 2021 sehingga informasi terkait RUPS RKAP untuk Tahun Buku 2020 dan realisasinya tidak dapat disampaikan pada laporan ini.

Pelaksanaan RUPS RKAP untuk Tahun Buku 2019 dan Realisasinya

RUPS RKAP Tahun Buku 2019 dan realisasinya tidak dapat dilaporkan karena perusahaan tidak memiliki dan tidak melaksanakan RUPS RKAP karena merupakan perusahaan yang baru berdiri pada 4 Oktober 2021.

General Meeting of Shareholders to Approve the Annual Report and Ratify the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2020 and its Realization

PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) is a newly established company. It was established on October 4, 2021, so that the Company does not provide information regarding GMS on Company Work Plan and Budget for Fiscal Year 2020 and its realization in this report.

Implementation of GMS on Company Work Plan and Budget (RUPS RKAP) for Fiscal Year 2019 and its Realization

GMS on Company Work Plan and Budget (RUPS RKAP) for Fiscal Year 2019 and its Realization cannot be reported. The company did not have and did not carry out RUPS RKAP for Fiscal Year 2019 because it is a newly established company on October 4, 2021.





Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Sebagai organ tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris bertugas untuk melaksanakan pengawasan secara umum dan/atau khusus berdasarkan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab terhadap Pemegang Saham. Dengan demikian, Injourney memiliki Dewan Komisaris dengan integritas yang tinggi, berkomitmen tinggi dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab, serta memiliki wawasan yang luas. Dalam menjalankan seluruh tugasnya, Dewan Komisaris tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan dan harus mampu bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat terhadap seluruh kebijakan serta pengelolaan Perseroan yang dijalankan Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Injourney menguraikan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris menjadi 3 garis besar yaitu tugas Dewan Komisaris, kewenangan Dewan Komisaris, dan kewajiban Dewan Komisaris. Penjelasan terkait tugas, kewenangan, dan kewajiban Dewan Komisaris diungkapkan sebagai berikut:

- a. Tugas Dewan Komisaris
 1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi;
 2. Memberikan arahan, masukan, nasihat terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan agar sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;
 3. Memantau pengelolaan risiko dan efektivitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di lingkungan Perusahaan.

As the Company's governance organ, the Board of Commissioners is tasked to carry out general and/or specific supervision based on the Articles of Association and provide advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners has responsibilities to Shareholders. Thus, Injourney has Board of Commissioners with high integrity, highly committed to fulfilling duties and responsibilities, and broad insight. In carrying out all its duties, the Board of Commissioners is not allowed to have a conflict of interest and must be able to act independently.

Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners is tasked to supervise and provide advice on all policies and management of the Company carried out by the Board of Directors. In carrying out its duties, the Board of Commissioners must comply with the Articles of Association of State-Owned Enterprise and the provisions of laws and regulations and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness in accordance with Law No. 19/2003 on State-Owned Enterprises. Injourney outlines the duties and responsibilities of the Board of Commissioners into 3 (three), namely duties of the Board of Commissioners, authority of the Board of Commissioners, and obligations of the Board of Commissioners. The explanation on the duties, authorities, and obligations of the Board of Commissioners is disclosed as follows:

- a. Duties of the Board of Commissioners
 1. Carry out supervision on policy and management of the Company by the Board of Directors;
 2. Provide direction, input, advice on the policies of the Board of Directors in carrying out the management of the Company in accordance with the Company's Articles of Association;
 3. Monitor risk management and the effectiveness of good corporate governance (GCG) principles implementation within the Company.



b. Kewenangan Dewan Komisaris

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

b. Authority of the Board of Commissioners

1. Examine books, letters, and other documents, examine cash position for verification purposes and other securities and examine the assets of the Company;
2. Enter the yards, buildings, and offices used by the Company;
3. Demand explanation from the Board of Directors and/or other officials with regard to any issues concerning the management of the Company;
4. Be informed of any policy and actions which have been and which will be taken by the Board of Directors;
5. Demand the Board of Directors and/or other officials under the level of the Board of Directors, with the knowledge of the Board of Directors, to attend the meeting of the Board of Commissioners;
6. Appoint and dismiss a Secretary to the Board of Commissioners, if deemed necessary;
7. Suspend the members of the Board of Directors in accordance with the provisions of this Articles of Association;



8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

8. *Form the Audit Committee and other committees, if considered necessary, with due observance of the capability of the company;*
9. *Utilize experts for certain matters and within a certain period of time on the account of the Company, if considered necessary;*
10. *Perform the management actions over the Company in certain conditions for a certain period of time in accordance with the provisions of this Articles of Association;*
11. *Attend the Meeting of the Board of Directors and give viewpoint towards the matters being discussed;*
12. *Perform other supervisory authorities to the extent they do not contradict with the statutory regulations, the Articles of Association and/or the resolutions of the GMS.*



c. Kewajiban Dewan Komisaris

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;

c. *Obligations of the Board of Commissioners*

1. *Provide advice to the Board of Directors in performing the management of the Company;*
2. *Review and analyze as well as sign the Company's Long-Term Plan and Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association;*
3. *Provide opinion and suggestion to the General Meeting of Shareholders on the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) regarding the reasons for the Board of Commissioners to sign the RJPP and RKAP;*
4. *Keep up with the progress of the Company's activities, provide opinions and advice to the GMS with regard to every issue considered important for the management of the Company;*
5. *Report to the General Meeting of Shareholders if there is any indication of decreasing performance of the Company;*
6. *Review and analyze the periodic reports and the Annual Report prepared by the Board of Directors as well as execute the Annual Report;*
7. *Provide explanation, opinion and advice to the GMS with regard to the Annual Report, if requested;*
8. *Prepare an annual work programs and include the programs in the Company's Work Plan and Budget (RKAP);*



9. Membentuk Komite Audit;
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
12. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
15. Menyusun Piagam/Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris (BOC Charter).

Selama periode Januari s.d September 2021, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) (dh. PT Survai Udara Penas (Persero)) hanya memiliki 1 (satu) Komisaris yaitu Sdr. Sudarto. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Nomor: SK- 337/MBU/10/2021 Tanggal 4 Oktober 2021, susunan Dewan Komisaris Injourney adalah sebagai berikut:

9. *Form the Audit Committee;*
10. *Propose to the GMS for the appointment of Public Accountant;*
11. *Draw up the minutes of meeting of the Board of Commissioners and keep their copies;*
12. *Report to the Company with regard to their and/or their families share ownership in the Company aforesaid and in other companies;*
13. *Provide report regarding the supervisory duties which have been performed during the recently passed financial year to the GMS;*
14. *Perform other obligations in the framework of supervisory duties and advice provision, to the extent it does not contradict to the statutory regulations, the Articles of Association and/or the resolutions of the GMS;*
15. *Prepare Charter/Guidelines and work procedures of the Board of Commissioners (BOC Charter).*

During the period from January to September 2021, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) (dh. PT Survai Udara Penas (Persero)) only has 1 (one) Commissioners, Mr. Sudarto. Furthermore, in accordance with the Shareholders' Decision of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) No. SK-337/MBU/10/2021 dated October 4, 2021, the composition of the Board of Commissioners of Injourney is as follows:



Tugas Dewan Komisaris Berdasarkan Jabatan
Duties of The Board of Commissioners by Position

No.	Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Pembagian Tugas Division of Duties
1.	Sudarto	Komisaris / <i>Commissioner</i>	8 Oktober 2020–4 Oktober 2021 / <i>8 October 2020–4 October 2021</i>	Komisaris Utama yang mengkoordinasikan bidang-bidang tugas Dewan Komisaris, melaksanakan pengawasan di bidang Nominasi dan Remunerasi serta merangkap sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Anggota Komite Audit serta Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG <i>President Commissioner in charge of coordinating the duties of the Board of Commissioners, carrying out supervision on Nomination and Remuneration. The incumbent concurrently serves as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Member of the Audit Committee as well as the Business Risk Management, Investment & GCG Committee.</i>
2.	Triawan Munaf	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	4 Oktober 2021 – sekarang <i>October 4, 2021 – Present</i>	Anggota Dewan Komisaris yang bertugas melaksanakan pengawasan di bidang Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG serta merangkap sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG dan Anggota Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Board of Commissioners in charge of carrying out supervision on Business Risk Management, Investment & GCG. The incumbent concurrently serves as Chairman of the Business Risk Management, Investment & GCG Committee and Member of the Audit Committee as well as the Nomination and Remuneration Committee.</i>
3.	Wihana Kirana Jaya	Komisaris <i>Commissioner</i>	4 Oktober 2021 – sekarang <i>October 4, 2021 – Present</i>	Anggota Dewan Komisaris yang bertugas melaksanakan pengawasan di bidang Kemitraan Strategis Perusahaan serta merangkap sebagai Anggota Komite Audit, Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG serta Komite Nominasi dan Remunerasi. <i>Member of the Board of Commissioners in charge of carrying out supervision on Corporate Strategic Partnerships. The incumbent concurrently serves as Member of the Audit Committee, Business Risk Management, Investment & GCG Committee as well as the Nomination and Remuneration Committee.</i>
4.	Odo Rene Mathew Manuhutu	Komisaris <i>Commissioner</i>	4 Oktober 2021 – sekarang <i>October 4, 2021 – Present</i>	Anggota Dewan Komisaris yang bertugas melaksanakan pengawasan di bidang Audit serta merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG serta Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Board of Commissioners in charge of carrying out supervision on Audit. The incumbent concurrently serves as Chairman of the Audit Committee and Member of the Business Risk Management, Investment & GCG Committee as well as the Nomination and Remuneration Committee.</i>
4.	Elwin Chandra Mochsin	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	4 Oktober 2021 – sekarang <i>October 4, 2021 – Present</i>	Anggota Dewan Komisaris yang bertugas melaksanakan pengawasan di bidang Audit serta merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG serta Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Board of Commissioners in charge of carrying out supervision on Audit. The incumbent concurrently serves as Chairman of the Audit Committee and Member of the Business Risk Management, Investment & GCG Committee as well as the Nomination and Remuneration Committee.</i>





Board Charter Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Board Charter Dewan Komisaris. Namun pada saat Laporan Tahunan ini ditulis, Board Charter Dewan Komisaris masih dalam proses pengesahan. Sehingga informasi terkait Board Charter Dewan Komisaris belum dapat disampaikan pada Laporan Tahun 2021.

Rapat Dewan Komisaris

Sebagai upaya menentukan arahan bagi perusahaan, Dewan Komisaris diwajibkan untuk melaksanakan rapat berkala setidaknya satu kali dalam sebulan. Di tahun 2021, Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak dua kali. Terdiri atas rapat gabungan dengan Direksi pada 9 November 2021 dan rapat internal yang dilaksanakan pada 15 Desember 2021 dengan agenda Penetapan dan Pengisian Anggota-Anggota Komite Dewan Komisaris yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Informasi terkait rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada halaman 281 bagian rapat gabungan.

Board of Commissioners Charter

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners is stipulated in the Charter of the Board of Commissioners. However, during the preparation of this Annual Report, the Board of Commissioners Charter was in the ratification process. Thus, information on the Charter of the Board of Commissioners cannot be submitted in the 2021 Report.

Board of Commissioners Meeting

In an effort to determine direction of the company, the Board of Commissioners must hold regular meetings at least once a month. In 2021, the Board of Commissioners held two meetings, consisting of joint meeting with the Board of Directors on November 9, 2021 and internal meeting on December 15, 2021 with the agenda to appoint and fill the position of Committee Members of the Board of Commissioners attended by all members of the Board of Commissioners. Information on joint meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors can be seen on page 281 joint meeting section.

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Attendance Rate of the Board of Commissioners in Internal Meetings

Peserta Rapat Meeting participant	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Triawan Munaf	Komisaris Utama President Commissioner	1	1	100%
Wihana Kirana Jaya	Komisaris Commissioner	1	1	100%
Odo Rene Mathew Manuhutu	Komisaris Commissioner	1	1	100%
Elwin Chandra Mochsin	Komisaris Independen Independent Commissioner	1	1	100%

Agenda Dewan Komisaris Tahun 2021 Agenda of the Board of Commissioners Meeting in 2021

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda
15 Desember 2021 December 15, 2021	Ruang Rapat HIN Lantai 39, Menara BCA HIN Meeting Room 39th Floor, BCA Tower	Penetapan dan Pengisian Anggota-Anggota Komite Dewan Komisaris Appointment and filling of committee members of the board of commissioners



Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Pelatihan dan peningkatan kompetensi dilaksanakan secara berkala sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kompetensi Dewan Komisaris dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Di tahun 2021, Injourney memberikan pelatihan Onboarding Commissioner Angkatan III kepada Elwin Chandra Mochsin pada tanggal 16 Desember 2021.

Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris yang Baru Diangkat

Anggota Dewan Komisaris Baru diwajibkan untuk mengikuti orientasi sebagai dasar untuk memahami kegiatan usaha serta kondisi Perusahaan. Di tahun 2021, terdapat pemberian program orientasi bagi Dewan Komisaris baru yaitu Elwin Chandra Mochsin yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2021.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Pemegang Saham dapat memberikan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun pada laporan tahun 2021, belum terdapat penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris. Informasi terkait penilaian kinerja Dewan Komisaris akan disampaikan pada Laporan Tahun 2022.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Tahun 2021 merupakan tahun awal bagi Injourney sebagai perusahaan Holding. Berbagai langkah dan penyesuaian masih terus dilaksanakan baik oleh Dewan Komisaris maupun seluruh jajaran yang membantu kinerja Dewan Komisaris. Sehingga belum terdapat informasi terkait penilaian kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Training and Competency Enhancement for Members of the Board of Commissioners

Training and competency enhancement are performed on a regular basis as an effort to improve the understanding and competence of the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities. In 2021, Injourney provided training for Onboarding Commissioner Batch III to Elwin Chandra Mochsin on December 16, 2021.

Orientation Program for Newly Appointed Members of the Board of Commissioners

Newly appointed members of the Board of Commissioners must attend orientation program as a basis for understanding the business activities and conditions of the Company. In 2021, orientation program for the new Board of Commissioners, Elwin Chandra Mochsin was held on December 16, 2021.

Performance Evaluation of the Board of Commissioners

Shareholders have the authority to assess the performance of the Board of Commissioners at the General Meeting of Shareholders (GMS). However, in the 2021 annual report, there has been no assessment of the performance of the Board of Commissioners. Information on the performance evaluation of the Board of Commissioners will be submitted in the 2022 Annual Report.

Performance Evaluation of Committees Under the Board of Commissioners and Basis of Assessment

2021 is the initial year for Injourney as a holding company. The Board of Commissioners and its ranks carried out various measures and adjustments to support the performance of the Board of Commissioners. Thus, there was no information on the performance evaluation of the Committees under the Board of Commissioners and the Basis of Assessment



Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ perusahaan yang secara kolektif bertanggung jawab pada manajemen Perseroan. Direksi memiliki kewajiban untuk mengelola bisnis dengan memperhatikan keseimbangan antara kegiatan Perusahaan dan kepentingan stakeholder. Wewenang yang dimiliki Direksi di antaranya adalah untuk merumuskan strategi operasional dan bisnis Perseroan, rencana jangka panjang, serta rencana tahunan sesuai visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Board of Commissioners is the organ of the Company which is collectively responsible for the management of the Company. The Board of Directors has an obligation to manage the business by taking into account the balance between the Company's activities and the interests of stakeholders. The authorities of the Board of Directors include formulating the Company's operational and business strategies, long-term plan, and annual plan in accordance with the company's vision, mission and values.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Seluruh anggota Direksi memiliki ruang lingkup tugas dan tanggung jawab berbeda yang diatur berdasarkan Surat Peraturan Direksi Nomor KEP.002/INJOURNEY/11/2021 Tentang Organisasi Perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Pemaparan lebih lengkap terkait ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direksi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

All members of the Board of Directors have different scopes of duties and responsibilities as stipulated in the Board of Directors Regulation No. KEP.002/INJOURNEY/11/2021 on the Company Organization of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). Further information on the scope of duties and responsibilities of the Board of Directors can be seen in the following table.

Selama periode Januari s.d September 2021, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) (dh. PT Survai Udara Penas (Persero)) hanya memiliki 1 (satu) Direksi yaitu Sdr. Daulat Musa. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Nomor: SK- 337/MBU/10/2021 Tanggal 4 Oktober 2021, susunan Direksi Injourney adalah sebagai berikut:

During the period from January to September 2021, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) (dh. PT Survai Udara Penas (Persero)) only has 1 (one) Director, Mr. Daulat Musa. Furthermore, in accordance with the Shareholders' Decision of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) No. SK-337/MBU/10/2021 dated October 4, 2021, the composition of the Board of Directors of Injourney is as follows:



Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
Scope of Work and Responsibilities of Members of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Daulat Musa	Plt. Direktur <i>Acting President Director</i>	1. Memimpin dan mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan serta melaksanakan sebagian tugas Direksi (<i>Board of Director</i>) dalam merencanakan, menganalisis, merumuskan kebijakan, membina penyelenggaraan dan mengendalikan kegiatan korporasi non direktorat yaitu sekretariat perusahaan, legal, komunikasi perusahaan, pengelolaan <i>stakeholder</i> dan internal audit;
Dony Oskaria	Direktur Utama <i>President Director</i>	<p>2. Khusus Internal Audit mempunyai tugas membantu Direktur Utama (<i>President Director</i>) dalam melakukan pengawasan pelaksanaan tugas seluruh unit kerja di lingkungan Perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikan sesuai dengan rencana dan program serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi (<i>Board of Directors</i>) berdasarkan ketentuan yang berlaku;</p> <p>3. Direktur Utama (<i>President Director</i>) dan Wakil Direktur Utama (<i>Vice President Director</i>) secara bersama-sama juga mempunyai tugas memimpin dan mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan serta melaksanakan sebagian tugas Direksi (<i>Board of Director</i>) dalam merencanakan, menganalisis, merumuskan kebijakan, membina penyelenggaraan dan mengendalikan kegiatan korporasi non direktorat yaitu perencanaan strategis perusahaan dan pengelolaan kinerja perusahaan, perencanaan investasi, pengembangan bisnis dan portofolio, serta kerja sama strategis dan pengelolaan hubungan dengan investor.</p> <p>1. <i>Lead and manage the company in accordance with the interests and objectives of the company and carry out some of the duties of the Board of Directors in planning, analyzing, formulating policies, fostering the implementation and controlling of non-directorate corporate activities, namely corporate secretariat, legal, corporate communication, stakeholder management and internal audit ;</i></p> <p>2. <i>Specifically, Internal Audit is tasked to assist the President Director in supervising the implementation of the duties of all work units within the Company and provide suggestions for improvement in accordance with the plans, programs and policies set by the Board of Directors based on applicable regulations;</i></p> <p>3. <i>President Director and Vice President Director are jointly tasked to lead and manage the company in accordance with the interests and objectives of the company as well as carry out some of the duties of the Board of Directors in planning, analyzing, formulating policies, fostering the implementation and control of non-directorate corporate activities, including corporate strategic planning and corporate performance management, investment planning, business and portfolio development, strategic collaboration and investor relationship management.</i></p>



Edwin Hidayat Abdullah	Wakil Direktur Utama <i>Vice President Director</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Direktur Utama (<i>Vice President Director</i>) mempunyai tugas memimpin dan mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan serta melaksanakan sebagian tugas Direksi (<i>Board of Director</i>) dalam merencanakan, menganalisis, merumuskan kebijakan, membina penyelenggaraan dan mengendalikan kegiatan korporasi non direktorat yaitu transformasi perusahaan dan manajemen perubahan serta pengelolaan krisis secara kolaboratif;2. Direktur Utama (<i>President Director</i>) dan Wakil Direktur Utama (<i>Vice President Director</i>) secara bersama-sama juga mempunyai tugas memimpin dan mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan serta melaksanakan sebagian tugas Direksi (<i>Board of Director</i>) dalam merencanakan, menganalisis, merumuskan kebijakan, membina penyelenggaraan dan mengendalikan kegiatan korporasi non direktorat yaitu perencanaan strategis perusahaan dan pengelolaan kinerja perusahaan, perencanaan investasi, pengembangan bisnis dan portofolio, serta kerja sama strategis dan pengelolaan hubungan dengan investor. <ol style="list-style-type: none">1. <i>Vice President Director is tasked to lead and manage the company in accordance with the interests and objectives of the company as well as carry out some of the duties of the Board of Directors in planning, analyzing, formulating policies, fostering the implementation and controlling of non-directorate corporate activities, including corporate transformation, collaborative change management and crisis management;</i>2. <i>President Director and Vice President Director are jointly tasked to lead and manage the company in accordance with the interests and objectives of the company as well as carry out some of the duties of the Board of Directors in planning, analyzing, formulating policies, fostering the implementation and controlling non-directorate corporate activities, including corporate strategic planning and corporate performance management, investment planning, business and portfolio development, as well as strategic collaboration and investor relationship management.</i>
Herdy Harman	Direktur SDM dan Digital <i>Human Capital and Digital Director</i>	<p>Direktorat Sumber Daya Manusia & Digital dipimpin oleh Direktur Sumber Daya Manusia & Digital yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Direksi (<i>Board of Director</i>) dalam merencanakan, menganalisis, merumuskan kebijakan, membina penyelenggaraan dan mengendalikan kegiatan strategi <i>human capital</i>, pengelolaan <i>human capital</i>, digitalisasi perusahaan, <i>enterprise</i> teknologi informasi, dan <i>center of excellence</i>.</p> <p><i>Directorate of Human Resources & Digital is led by Human Capital & Digital Director in charge of carrying out some of the duties of the Board of Directors in planning, analyzing, formulating policies, fostering the implementation and controlling human capital strategy activities, human capital management, company digitalization, enterprise information technology, and center of excellence.</i></p>



Board Charter Direksi

Dalam memimpin perusahaan, Direksi memiliki pedoman Board Charter/Board Manual yang mengatur tentang

1. Direksi sebagai organ Perusahaan;
2. Larangan rangkap jabatan;
3. Komposisi Direksi;
4. Masa jabatan;
5. Jabatan Direksi Lowong dan Anggota Direksi Berhalangan serta Pelaksanaan Tugas Direksi/Pengurus Perusahaan;
6. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Direksi Serta Pembagiannya;
7. Kuasa Bertindak untuk dan Atas Nama Direksi dalam Mewakili Perseroan;
8. Rapat Direksi;
9. Program Pengenalan Anggota Direksi Baru;
10. Etika Jabatan;
11. Pengambilan Keputusan Direksi;
12. Penilaian Kinerja Direksi;
13. Organ Pendukung Direksi.

Rapat Direksi dan Rapat Gabungan

Secara berkala Direksi melaksanakan rapat internal dalam menentukan kebijakan terkait keberlangsungan perusahaan. Di tahun 2021, Direksi melaksanakan 10 rapat internal.

Board of Directors Charter

In leading the company, the Board of Directors has a Board Charter/Board Manual to regulate:

1. *The Board of Directors as an organ of the Company;*
2. *Prohibition of concurrent positions;*
3. *Composition of the Board of Directors;*
4. *Terms of Office;*
5. *Vacant Position of the Board of Directors and Absentee Members of the Board of Directors and the implementation of the duties of the Board of Directors/Company Management;*
6. *Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors and its Division;*
7. *Power of Attorney to act for and on behalf of the Board of Directors in Representing the Company;*
8. *Board of Directors meeting;*
9. *Orientation program for newly appointed members of the Board of Directors;*
10. *Ethical Position;*
11. *Decision Making of the Board of Directors;*
12. *Performance Evaluation of the Board of Directors;*
13. *Supporting Organs of the Board of Directors.*

Board of Directors Meeting and Joint Meeting

Periodically, the Board of Directors holds internal meetings to determine policies related to the sustainability of the company. In 2021, the Board of Directors held 10 internal meetings.

Tingkat Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Internal Attendance Rate of Members of the Board of Directors in Internal Meetings

Peserta Rapat Meeting participant	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Dony Oskaria	Direktur Utama <i>President Director</i>	10	8	80%
Edwin Hidayat Abdullah	Wakil Direktur Utama <i>Vice President Director</i>	10	9	90%
Herdy Harman	Direktur SDM dan Digital <i>Human Capital and Digital Director</i>	10	9	90%





Agenda Rapat Direksi Tahun 2021
Agenda of the Board of Directors Meeting in 2021

No	Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Agenda
1.	26 Oktober 2021 <i>October 26, 2021</i>	Ruang Rapat HIN Lantai 39, Menara BCA <i>HIN Meeting Room 39th Floor, BCA Tower</i>	Pembahasan Administrasi dan Legal	<i>Administrative and Legal Discussion</i>
2.	2 November 2021 <i>November 2, 2021</i>	Ruang Rapat HIN Lantai 39, Menara BCA <i>HIN Meeting Room 39th Floor, BCA Tower</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Neraca Konsolidasi; • Pendanaan Holding; • Launching Task Force Tahap II Injourney Group; • Rencana Syukuran & Visioning Workshop; • Rencana Penandatanganan Pelita. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Consolidated Balance Sheet;</i> • <i>Holding Funding;</i> • <i>Launching of Task Force Phase II Injourney Group;</i> • <i>Plan to Hold Ceremony & Visioning Workshop;</i> • <i>Plan to sign MoU with Pelita</i>
3.	9 November 2021 <i>November 9, 2021</i>	Ruang Rapat ITDC Lt.39, Menara BCA <i>ITDC Meeting Room 39th Floor, BCA Tower</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan RKAP Tahun 2021 Injourney; • Skema <i>Management Fee</i>; • Izin Penggunaan Logo untuk <i>Merchandise</i>; • Perubahan Logo HIN; • Pembentukan Anak Usaha Angkasa Pura I – Batam Airport. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Proposed RKAP 2021 Injourney;</i> • <i>Management Fee Scheme;</i> • <i>Permission to Use Logo for Merchandise;</i> • <i>HIN Logo Redesign;</i> • <i>Establishment of Angkasa Pura I Subsidiary – Batam Airport.</i>



4.	16 November 2021 <i>November 16, 2021</i>	Ruang Rapat ITDC Lt. 39, Menara BCA <i>ITDC Meeting Room 39th Floor, BCA Tower</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Materi Paparan BoD di Raker Wamen BUMN II; • Rencana Penandatanganan Pelita; • Persiapan Pelaksanaan Audit Tahun Buku 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Discussion on BoD Presentation Materials at the Vice Minister of SOEs II Work Meeting</i> • <i>Plan to sign MoU with Plan;</i> • <i>Preparation for Audit in Financial Year 2021</i>
5.	24 November 2021 <i>November 24, 2021</i>	Ruang Rapat ITDC Lt.39, Menara BCA <i>ITDC Meeting Room 39th Floor, BCA Tower</i>	<i>Update Issue Operasional</i>	<i>Update on Operational Issue</i>
6.	30 November 2021 <i>November 30, 2021</i>	Via Zoom Meeting <i>Via Zoom Meeting</i>	<p>Persetujuan Setoran Modal PT Angkasa Pura II Railink;</p> <p>Usulan Penetapan Batasan Kewenangan (<i>Threshold</i>) Terkait Kerja Sama Anak Perusahaan Eks BUMN.</p>	<p><i>Approval for Capital Injection of PT Angkasa Pura II to PT Railink</i></p> <p><i>Proposed Determination of Threshold of Authority Related to Collaboration with Ex-SOE Subsidiaries.</i></p>
7.	7 Desember 2021 <i>December 7, 2021</i>	Ruang Rapat ITDC Lt.39 Menara BCA <i>ITDC Meeting Room 39th Floor, BCA Tower</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tourism Collaborative Platform dan Shared Service.</i> • <i>Injourney Talk Show</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tourism Collaborative Platform dan Shared Service.</i> • <i>Injourney Talk Show</i>
8.	14 Desember 2021 <i>December 14, 2021</i>	RR ITDC Lt.39 Menara BCA <i>ITDC Meeting Room 39th Floor, BCA Tower</i>	<i>Update Acara 'Injourney Talks'</i>	<i>Update on 'Injourney Talks' Event</i>
9.	16 Desember 2021 <i>December 16, 2021</i>	Ruang Rapat Nusa Dua ITDC Lt.39, Menara BCA <i>Nusa Dua ITDC Meeting Room 39th Floor, BCA Tower</i>	Pembahasan Sub Holding Aviasi dan Kargo	<i>Discussion on Aviation and Cargo Sub Holdings</i>
10.	21 Desember 2021 <i>December 21, 2021</i>	RR ITDC Lt.39 Menara BCA <i>ITDC Meeting Room 39th Floor, BCA Tower</i>	<p>Usulan Persetujuan Pemegang Saham Revisi RKAP Tahun 2021 Injourney Group</p> <p>Usulan Pembagian Kewenangan Pelaksanaan <i>Management Fee</i> di Injourney.</p>	<p><i>Proposed Shareholders' Approval of the 2021 Revised RKAP of Injourney Group</i></p> <p><i>Proposed Distribution of Authority for Implementation of Management Fee in Injourney.</i></p>



Selain menentukan kebijakan melalui rapat internal, Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan rapat gabungan sebanyak satu kali selama tahun 2021.

In addition to establishing policies through internal meetings, the Board of Commissioners and Board of Directors held joint meetings once during 2021.

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dalam Rapat Gabungan
Attendance Rate of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors in Joint Meeting

Peserta Rapat Meeting participants	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendances	% Kehadiran % Attendance
Triawan Munaf	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	1	1	100%
Wihana Kirana Jaya	Komisaris <i>Commissioner</i>	1	1	100%
Odo Rene Mathew Manuhutu	Komisaris <i>Commissioner</i>	1	1	100%
Elwin Chandra Mochsin	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	1	1	100%
Dony Oskaria	Direktur Utama <i>President Director</i>	1	1	100%
Edwin Hidayat Abdullah	Wakil Direktur Utama <i>Vice President Director</i>	1	1	100%
Herdy Harman	Direktur SDM dan Digital <i>Human Capital and Digital Director</i>	1	1	100%

Agenda dan Keputusan Rapat Gabungan Tahun 2021
Agenda and Resolutions in Joint Meeting 2021

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Agenda
9 November 2021 <i>November 9, 2021</i>	Kantor InJourney, Menara BCA Lt. 39 <i>InJourney Office, BCA Tower Floor 39</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi 2. Revisi RKAP 2021 3. Pengajuan Pinjaman 4. Audit KAP Tahun Buku 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Organizational structure</i> 2. <i>Revised RKAP 2021</i> 3. <i>Loan Application</i> 4. <i>KAP Audit for Financial Year 2021</i>





Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Direksi

Selama tahun 2021, belum terdapat pelatihan yang diberikan kepada Direksi. Program pelatihan dan peningkatan kompetensi Direksi akan difokuskan Injourney pada tahun 2022. Ke depannya, secara berkala Direksi akan memperoleh pelatihan dan peningkatan kompetensi Direksi. Pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi Direksi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Direksi dalam mengambil setiap kebijakan bagi perusahaan.

Program Orientasi bagi Direksi Baru

Tahun 2021 merupakan tahun pembentukan Injourney sebagai Perseroan Terbatas. Sehingga dalam Laporan Tahun 2021 belum ada program orientasi bagi Direksi Baru. Meski demikian, Injourney telah mengatur tata pelaksanaan program orientasi bagi Direksi Baru untuk diterapkan pada tahun 2022. Di Injourney, pelaksanaan program orientasi bagi Direksi Baru dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. Dengan tujuan memberikan pemahaman Direksi terhadap lingkup bisnis perusahaan, tugas dan tanggung jawab Direksi, serta berbagai pemahaman lain guna memperkaya wawasan Direksi terhadap Perusahaan.

Penilaian Kinerja Direksi dan Penilaian Kinerja Unit di Bawah Direksi

Kinerja Direksi dinilai oleh Pemegang Saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, pada periode Laporan Tahun 2021, belum terdapat penilaian kinerja bagi Direksi. Direksi Injourney juga belum melakukan penilaian Kinerja Komite di bawah Direksi. Penilaian kinerja Komite di bawah Direksi direncanakan akan dilaksanakan tahun 2022.

Training and Competency Enhancement Program of Board of Directors

During 2021, there was no training for the Board of Directors. Injourney's training and competency enhancement program will be held in 2022. In the future, the Board of Directors will periodically receive training and competency enhancement. Training and competency enhancement for the Board of Directors is expected to increase the ability of the Board of Directors in establishing policies for the company.

Orientation Program for Newly Appointed Board of Directors

2021 is the year of Injourney establishment as a Limited Liability Company. In 2021 Annual Report, there was no orientation program for the New Board of Directors. However, Injourney has arranged an orientation program for the New Board of Directors to be implemented in 2022. At Injourney, the orientation program for the New Board of Directors is performed by Corporate Secretary. The program objectives are to provide understanding to the Board of Directors on the company's business scope, duties and responsibilities of the Board of Directors, and various other understandings in order to enrich the Board of Directors's insight into the Company.

Performance Evaluation for the Board of Directors and Units Under the Board of Directors

Performance of the Board of Directors is assessed by the Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS). However, in the reporting period, there has been no performance evaluation for the Board of Directors. In addition, Injourney's Board of Directors has not assessed Performance of the Committees under the Board of Directors. Performance evaluation of the Committees under the Board of Directors will be carried out in 2022.



Nominasi dan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination and Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Prosedur Nominasi Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi

Proses Nominasi dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Melalui kewenangan Pemegang Saham, pemilihan Dewan Komisaris dilakukan pada saat RUPS. Pemilihan Dewan Komisaris didasari oleh integritas, kemampuan memimpin, dan pengalaman kerja. Penetapan Dewan Komisaris Injourney dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-337/MBU/10/2021. Seluruh Dewan Komisaris ditunjuk langsung oleh Kementerian BUMN sehingga Injourney tidak melaksanakan tahapan seleksi bagi calon anggota Dewan Komisaris. Namun sebagai perusahaan Holding, Injourney melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris pada Anggota Holding.

Proses Nominasi dan Pengangkatan Direksi

Seluruh jajaran Direksi Injourney dipilih berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-336/MBU/10/2021. Direksi yang terpilih telah memenuhi syarat dan ketentuan perusahaan serta disetujui oleh seluruh Pemegang Saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham. Injourney tidak melakukan proses penentuan pengangkatan Direksi karena seluruh Direksi di Injourney memperoleh penunjukan langsung dari Kementerian BUMN. Adapun proses seleksi Direksi yang dilakukan Injourney dilakukan untuk menentukan jajaran Direksi pada Anggota Holding.

Nomination Procedure for Appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nomination and Appointment Process of the Board of Commissioners

Through the Shareholders' authority, the selection of the Board of Commissioners is carried out at the GMS. The selection of the Board of Commissioners is based on integrity, leadership ability, and work experience. The appointment of Injourney's Board of Commissioners is based on Decree No. SK-337/MBU/10/2021. All members of Board of Commissioners were appointed directly by the Ministry of SOEs. Thus, Injourney did not carry out the selection phases for prospective members of the Board of Commissioners. However, as a holding company, Injourney appoints and dismisses the Board of Commissioners of the Holding Members.

Nomination and Appointment Process of Board of Directors

All members of the Board of Directors of Injourney were selected based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-336/MBU/10/2021. The elected members of the Board of Directors have complied with the company's terms and conditions and were approved by all Shareholders at the General Meeting of Shareholders. Injourney did not carry out the appointment process of the Board of Directors because all members of the Board of Directors in Injourney were directly appointed by the Ministry of SOEs. The selection process for the Board of Directors conducted by Injourney is carried out to determine the Board of Directors for the Holding Members.



Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan, efektivitas manajemen risiko, dan potensi pendapatan perusahaan. Seluruh kebijakan terkait remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan jumlah remunerasi Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/06/2018 yang mencakup faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Besaran jumlah remunerasi dapat diajukan oleh Dewan Komisaris yang kemudian dipertimbangkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Persetujuan remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris harus sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN dan kesepakatan seluruh Pemegang Saham pada saat RUPS. Injourney telah memetakan struktur penetapan remunerasi Dewan Komisaris yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

The determination of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out by considering the company's financial performance, risk management effectiveness, and the company's revenue potential. All policies related to remuneration for the Board of Commissioners and Directors refer to the Minister of SOE Regulation No. PER-06/MBU/06/2018 dated June 4, 2018 regarding the Third Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of BUMN.

Remuneration for the Board of Commissioners

The determination of the amount of remuneration for the Board of Commissioners is carried out in accordance with the Regulation of the Minister of SOE Number PER-06/MBU/06/2018 which includes business scale factors, business complexity factors, inflation rates, company conditions and capabilities, and other factors that are relevant and do not conflict with legislation.

The amount of remuneration can be proposed by the Board of Commissioners which is then considered by the Nomination and Remuneration Committee. Approval of remuneration received by the Board of Commissioners must be in line with the Regulation of the Minister of SOEs and the agreement of all Shareholders at the GMS. Injourney has mapped out the structure for determining the remuneration for the Board of Commissioners which can be seen in the following table.

Struktur Penetapan Remunerasi
Remuneration Determination Structure

No.	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan Determination	Keterangan Notes
1.	Honorarium <i>Honorarium</i>	Rp132,750,000/bulan (45% dari Direktur Utama) <i>Rp132,750,000/month (45% from President Director)</i>	a. Komisaris Utama: 100% b. Komisaris: 90% dari Komisaris Utama <i>a. President Commissioner: 100%</i> <i>b. Commissioner: 90% of President Commissioner</i>
2.	Tunjangan <i>Allowance</i>		
	Tunjangan Hari Raya <i>Religious Festivity Allowance</i>	Diberikan sebesar satu bulan honorarium <i>Given one month's honorarium</i>	Sesuai dengan PER.001/INJOURNEY/12/2021 <i>According to PER.001/INJOURNEY/12/2021</i>
	Tunjangan Transportasi <i>Transportation Allowance</i>	Diberikan sebesar 20% dari honorarium satu bulan <i>Given at 20% of the honorarium for one month</i>	Sesuai dengan PER.001/INJOURNEY/12/2021 <i>According to PER.001/INJOURNEY/12/2021</i>
	Asuransi Purna Jabatan <i>Pension Insurance</i>	Diberikan sebesar 25% dari honorarium dalam satu tahun <i>Given at 25% of the honorarium in one year</i>	Sesuai dengan PER.001/INJOURNEY/12/2021 <i>According to PER.001/INJOURNEY/12/2021</i>



3. Fasilitas

Facilities

Fasilitas Kesehatan	Asuransi kesehatan	Sesuai dengan PER.001/INJOURNEY/12/2021
---------------------	--------------------	---

<i>Health Facilities</i>	<i>Health Insurance</i>	<i>According to PER.001/INJOURNEY/12/2021</i>
--------------------------	-------------------------	---

Fasilitas Bantuan Hukum	Bantuan hukum berupa pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan	Sesuai dengan PER.001/INJOURNEY/12/2021 <i>According to PER.001/INJOURNEY/12/2021</i>
-------------------------	--	--

Legal Aid Facility

Legal assistance in the form of financing for the services of a lawyer/legal consultant office which includes the examination process as witnesses, suspects, and defendants in the judiciary

4. Tantiem/Insentif Kinerja

Bonus/ Incentive

Tantiem/Insentif Kinerja	Diberikan sebesar 45% dari besaran yang diterima Direktur Utama berdasarkan RKAP	Sesuai dengan PER.001/INJOURNEY/12/2021 <i>According to PER.001/INJOURNEY/12/2021</i>
--------------------------	--	--

Bonus/ Incentive

Given at 45% of the amount received by the President Director based on the RKAP

<i>Long Term Incentive</i>	Tidak ada	-
----------------------------	-----------	---

There isn't any

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2021 (Dalam Rupiah)
Remuneration of the Board of Commissioners in 2021 (In Rupiah)

Nama Name	Jabatan Position	Honor Honor	Tunjangan / Transportation		
			Transportasi Transportation	Hari Raya*) Holiday*)	Asuransi Purna Jabatan Post-Service Insurance
Triawan Munaf	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Rp132,750,000	Rp26,550,000	0	Rp398,250,000
Wihana Kirana Jaya	Komisaris <i>Commissioner</i>	Rp119,475,000	Rp23,895,000	0	Rp358,425,000
Odo Rene Mathew Manuhutu	Komisaris <i>Commissioner</i>	Rp119,475,000	Rp23,895,000	0	Rp358,425,000
Elwin Chandra Mochsin	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Rp119,475,000	Rp23,895,000	0	Rp358,425,000

Catatan: *) Injourney baru memulai kegiatan operasional sejak 4 Oktober 2021. Laporan Tahun 2021 hanya memuat remunerasi Dewan Komisaris selama 3 bulan yaitu Oktober, November, dan Desember, sehingga tunjangan hari raya dan tantiem akan diberikan tahun 2022.

Notes: *) Injourney has only started operational activities since October 4, 2021. The 2021 report only contains the remuneration of the Board of Commissioners for 3 months, namely October, November, and December, so that holiday allowances and tantiem will be given in 2022.



Remunerasi Direksi

Proses penetapan remunerasi yang diterima oleh Direksi diajukan oleh Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi. Usulan remunerasi tersebut disesuaikan dan disahkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam menentukan remunerasi Direksi, Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Directors' Remuneration

The process of determining the remuneration received by the Board of Directors is proposed by the Board of Commissioners with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee. The remuneration proposal is adjusted and approved at the General Meeting of Shareholders. In determining the remuneration of the Board of Directors, the Company refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of BUMN.

Struktur Penetapan Remunerasi Remuneration Determination Structure

No.	Jenis Remunerasi/Fasilitas Remuneration Type/ Facilities	Keterangan Notes
1.	Gaji <i>Income</i>	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama memperoleh 100% sesuai dengan PER.001/INJOURNEY/12/2021; Wakil Direktur Utama 90% dari gaji Direktur Utama; Anggota Direksi Lainnya 85% dari gaji Direktur Utama. <ul style="list-style-type: none"> President Director earns 100% in accordance with PER.001/INJOURNEY/12/2021; Deputy President Director 90% of the salary of the President Director; Other members of the Board of Directors 85% of the salary of the President Director.
2.	Tunjangan <i>Allowance</i>	
	Hari Raya Keagamaan <i>Religious Festivity Allowance</i>	Memperoleh satu kali gaji <i>Get one time salary</i>
	Perumahan <i>Housing</i>	Direksi memperoleh tunjangan perumahan sebesar Rp27,500,000 <i>Directors receive housing allowance of Rp27,500,000</i>
	Asuransi Purna Jabatan <i>Pension Insurance</i>	Diberikan sebesar 25% dari honorarium dalam satu tahun <i>Given at 25% of the honorarium in one year</i>
3.	Fasilitas <i>Facilities</i>	
	Kendaraan <i>Conveyance</i>	Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 PER.001/INJOURNEY/12/2021. <i>In accordance with the provisions stipulated in Article 8 PER.001/INJOURNEY/12/2021.</i>
	Kesehatan <i>Health</i>	Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 PER.001/INJOURNEY/12/2021. <i>In accordance with the provisions stipulated in Article 9 PER.001/INJOURNEY/12/2021.</i>
	Bantuan Hukum <i>Legal Aid</i>	Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 PER.001/INJOURNEY/12/2021. <i>In accordance with the provisions stipulated in Article 10 PER.001/INJOURNEY/12/2021.</i>

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Direksi (Dalam Rupiah)
Nominal Amount/Component of Remuneration for Directors (In Rupiah)

Nama Name	Jabatan Position	Gaji Salary	Tunjangan/ Allowance		
			Perumahan Housing	Asuransi Purna Jabatan Pension Insurance	Hari Raya*) Religious Festivity Allowance*)
Dony Oskaria	Direktur Utama <i>President Director</i>	Rp295,000,000	Rp27,500,000	Rp73,750,000	0
Edwin Hidayat Abdullah	Wakil Direktur Utama <i>Vice President Director</i>	Rp265,500,000	Rp27,500,000	Rp66,375,000	0
Herdy Harman	Direktur SDM dan Digital <i>Human Capital and Digital Director</i>	Rp250,750,000	Rp27,500,000	Rp62,687,500	0

Catatan: *) Injourney baru memulai kegiatan operasional sejak 4 Oktober 2021 sehingga pada Laporan Tahun 2021 hanya memuat remunerasi Direksi selama 3 bulan yaitu Oktober, November, dan Desember, sehingga THR dan Tantiem akan diberikan tahun 2022.

Note: *) Injourney has only started operational activities since October 4, 2021 so that the 2021 Report only contains the remuneration of the Directors for 3 months, namely October, November, and December, so that THR and Tantiem will be given in 2022.

Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board

Injourney tidak bergerak di kegiatan usaha syariah. Dengan demikian, Injourney tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Injourney is not engaged in sharia business activities. Thus, Injourney does not have a Sharia Supervisory Board.



Profil dan Kualifikasi Sekretaris Dewan Komisaris

Injourney memiliki satu orang Sekretaris Dewan Komisaris. Informasi lengkap terkait profil dan kualifikasi Sekretaris Dewan Komisaris dapat dilihat dalam paparan berikut.

Profile and Qualifications of Secretary to the Board of Commissioners

Injourney has one Secretary to the Board of Commissioners. Further information on profile and qualifications of the Secretary to the Board of Commissioners can be seen in the following description.

Nama <i>Name</i>	Muhammad Yusuf
Jabatan <i>Position</i>	Sekretaris Dewan Komisaris <i>Secretary to the Board of Commissioners</i>
Usia <i>Age</i>	39 tahun <i>39 years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lulus Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta (2003); • Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia (2007); • Magister Akuntansi Universitas Indonesia (2011). <ul style="list-style-type: none"> • <i>Diploma III State College of Accountancy (STAN), Jakarta (2003);</i> • <i>Bachelor in Accounting from University of Indonesia (2007);</i> • <i>Master of Accounting from University of Indonesia (2011).</i>
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-001/DEKOM/11/2021 <i>Decree of the Board of Commissioners No. SK-001/DEKOM/11/2021</i>
Pengalaman Kerja dan Periodenya <i>Work Experience and Period</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT Berdikari (Persero) (Februari 2012 – Juli 2013); • Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT Perkebunan Nusantara II (September 2013 – April 2016); • Staf Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (April 2015 – April 2016); • Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT Surveyor Indonesia (Persero) (September 2016 – Desember 2017); • Anggota Komite PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (November 2019 – Agustus 2020); • Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (Agustus 2020 – November 2021); • Sekretaris Dewan Komisaris PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) (November 2021 – Sekarang) <ul style="list-style-type: none"> • <i>Staff of the Board of Commissioners/Supervisory Board at PT Berdikari (Persero) (February 2012 – July 2013);</i> • <i>Secretary to the Board of Commissioners/Supervisory Board at PT Perkebunan Nusantara II (September 2013 – April 2016);</i> • <i>Staff of the Board of Commissioners/Supervisory Board at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (April 2015 – April 2016);</i> • <i>Secretary to the Board of Commissioners/Supervisory Board at PT Surveyor Indonesia (Persero) (September 2016 – December 2017);</i> • <i>Committee member at PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (November 2019 – August 2020);</i> • <i>Secretary to the Board of Commissioners/Supervisory Board at PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (August 2020 – November 2021)</i> • <i>Secretary to the Board of Commissioners at PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) (November 2021 – Present)</i>
Periode dan Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris	2021-2024 (3 tahun)
<i>Period and Term of Office of Secretary to the Board of Commissioners</i>	<i>2021-2024 (3 years)</i>

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary to the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan usaha Milik Negara, penunjukan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan langsung oleh Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris dapat berasal dari luar Perusahaan dengan masa jabatan maksimum 3 tahun dan dapat diangkat kembali dalam waktu maksimal 2 tahun.

The Secretary to the Board of Commissioners is tasked with assisting the Board of Commissioners in carrying out their duties. Based on the Minister of SOE Regulation Number PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises, the appointment and dismissal of the Secretary to the Board of Commissioners is carried out directly by the Board of Commissioners. The Secretary to the Board of Commissioners may come from outside the Company with a maximum term of 3 years and can be reappointed within a maximum of 2 years.



Muhammad Yusuf
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Realization of Execution of Duties by the Secretary to the Board of Commissioners

Throughout 2021, the Secretary to the Board of Commissioners has carried out the following duties:

1. *Preparing joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
2. *Drawing the minutes of the Board of Commissioners meeting in accordance with the provisions of the Company's articles of association;*
3. *Administering the documents of the Board of Commissioners, such as incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;*
4. *Preparing the Draft Work Plan and Budget for the Board of Commissioners*
5. *Preparing Draft Reports for the Board of Commissioners;*
6. *Carrying out other duties of the Board of Commissioners.*



Komite Audit

Audit Committee

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dalam mengawasi dan memberikan nasihat terhadap kinerja Direksi. Berdasarkan SK Dewan Komisaris Injourney Nomor SK-003/DEKOM/12/2021, Komite Audit terdiri atas satu orang Ketua Komite Audit dan dibantu oleh Anggota Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris yang kemudian dilaporkan pada saat RUPS. Komite Audit dapat menjabat selama 3 tahun atau sesuai dengan kebijakan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee in supervising and providing advice on the performance of the Board of Directors. Based on the Decree of the Board of Commissioners of Injourney No. SK-003/DEKOM/12/2021, the Audit Committee consists of one Chairman and members. The appointment and dismissal of the Audit Committee are carried out by the Board of Commissioners to be reported at the GMS. The terms of office of Audit Committee is 3 years or according to the policy of the Board of Commissioners.

Profil dan Kualifikasi Komite Audit

PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) memiliki Komite Audit yang terdiri atas Ketua Komite Audit, Wakil Komite Audit, dan Anggota Komite Audit. Injourney telah membentuk Komite Audit yang terdiri dari 6 orang. Informasi lebih lanjut terkait profil dan pengalaman Komite Audit dapat dilihat melalui tabel berikut.

Profile and Qualifications of Audit Committee

PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) has an Audit Committee consisting of the Chairman of the Audit Committee, Deputy of the Audit Committee, and Members of the Audit Committee. Injourney has formed an Audit Committee consisting of 6 people. Further information regarding the profile and experience of the Audit Committee can be seen in the following table.

Nama <i>Name</i>	Elwin Chandra Mochsin
Jabatan <i>Position</i>	Ketua Komite Audit <i>Ketua Komite Audit</i>
Profil <i>Profile</i>	Informasi terkait profil Elwin Chandra Mochsin dapat dilihat pada halaman 96 - 97 dalam Laporan ini. <i>Information related to Elwin Chandra Mochsin's profile can be found on the 96 - 97 in this Report.</i>
Periode dan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Audit	2022-2024 (3 tahun)
Audit Committee Membership Period and Term	2022-2024 (3 years)



Nama <i>Name</i>	Triawan Munaf
Profil <i>Profile</i>	Informasi terkait profil Triawan Munaf dapat dilihat pada halaman 90 - 91 dalam Laporan ini. <i>Information related to Triawan Munaf's profile can be seen on the 90 - 91 in this Report.</i>
Jabatan <i>Position</i>	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>
Periode dan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Audit <i>Audit Committee Membership Period and Term</i>	2022-2024 (3 tahun) <i>2022-2024 (3 years)</i>

Nama <i>Name</i>	Odo Rene Mathew Manuhutu
Profil <i>Profile</i>	Informasi terkait profil Odo Rene Mathew Manuhutu dapat dilihat pada halaman 94 -95 dalam Laporan ini. <i>Information related to Odo Rene Mathew Manuhutu's profile can be found on the 94 -95 in this Report.</i>
Jabatan <i>Position</i>	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>
Periode dan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Audit <i>Audit Committee Membership Period and Term</i>	2022-2024 (3 tahun) <i>2022-2024 (3 years)</i>

Nama <i>Name</i>	Wihana Kirana Jaya
Profil <i>Profile</i>	Informasi terkait profil Wihana Kirana Jaya dapat dilihat pada halaman 92 - 93 dalam Laporan ini. <i>Informasi terkait profil Wihana Kirana Jaya dapat dilihat pada halaman 92 - 93 dalam Laporan ini.</i>
Jabatan <i>Position</i>	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>
Periode dan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Audit <i>Audit Committee Membership Period and Term</i>	2022-2024 (3 tahun) <i>2022-2024 (3 years)</i>



Nama <i>Name</i>	Yeti Wulandari
Jabatan <i>Position</i>	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>
Usia <i>Age</i>	47 tahun <i>47 years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lulus Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta (1997); • Lulus Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta (2002); • Lulus Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia (2013). <ul style="list-style-type: none"> • <i>Graduated from Diploma III State College of Accountancy (STAN), Jakarta</i> • <i>Graduated with Diploma IV from State College of Accountancy (STAN),</i> • <i>Graduated with Master of Information Technology, Faculty of Computer Science, University of Indonesia (2013).</i>
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK Dewan Komisaris Injourney Nomor SK-001/INJ/DEKOM/01/2022 <i>Decree of the Board of Commissioners of Injourney Number SK-001/INJ/DEKOM/01/2022</i>
Pengalaman Kerja dan Periodeanya <i>Work Experience and Period</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian BUMN (Kasubbag Perencanaan dan Pengembangan SI/TI) (1998 – 2009); • Sekretaris Komite Audit di PT Pos Indonesia (Persero) (2009 – 2013); • Kementerian Keuangan (Kasubbag Strategi Komunikasi) Pengalaman Pekerjaan di Komite Audit BUMN (2009 – 2016); • Komite Audit di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (2010 – 2013); • Komite Audit di Perum Percetakan Negara RI (2011 – 2013); • Sekretaris Dewan Pengawas Perum Percetakan Negara RI (2013 – 2014); • Komite Audit di Perum Percetakan Negara RI (2014 – 2016); • Komite Audit di Perum DAMRI (2016 – 2018); • Kabid Pengelolaan Data Fakir Miskin di Kementerian Sosial RI (2016 – 2020); • Komite Audit Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia (2018 – 2020); • Komite Audit PT Angkasa Pura Solusi (2020 – sekarang); • Kepala Subbidang Komunikasi dan Publikasi Kementerian Keuangan RI (2020 – sekarang); • Dosen PKN STAN (2020 – sekarang). <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ministry of SOEs (Head of Planning and Development of IS/IT) (1998 – 2009);</i> • <i>Secretary of the Audit Committee at PT Pos Indonesia (Persero) (2009 – 2013);</i> • <i>Ministry of Finance (Head of Communication Strategy Subdivision) Work Experience in BUMN Audit Committee (2009 – 2016);</i> • <i>Audit Committee at PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (2010 – 2013);</i> • <i>Audit Committee at Perum Percetakan Negara RI (2011 – 2013);</i> • <i>Secretary to the Supervisory Board of the Republic of Indonesia Printing Press (2013 – 2014);</i> • <i>Audit Committee at Perum Percetakan Negara RI (2014 – 2016);</i> • <i>Audit Committee at Perum DAMRI (2016 – 2018);</i> • <i>Head of Data Management for the Poor at the Indonesian Ministry of Social Affairs (2016 – 2020);</i> • <i>Audit Committee of the Indonesian Aviation Navigation Service Provider (Perum LPPNPI) or AirNav Indonesia (2018 – 2020);</i> • <i>PT Angkasa Pura Solusi Audit Committee (2020 – present);</i> • <i>Head of Communication and Publication Sub-Sector of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2020 – present);</i> • <i>PKN STAN Lecturer (2020 – present).</i>
Periode dan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Audit	2022-2024 (3 tahun)
<i>Audit Committee Membership Period and Term</i>	<i>2022-2024 (3 years)</i>



Nama <i>Name</i>	Herwan Ng
Jabatan <i>Position</i>	Anggota Komite Audit/ <i>Anggota Komite Audit</i>
Usia <i>Age</i>	49 tahun/ <i>49 tahun</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Akuntansi Untar (1995); • S2 MBA Edinburgh Business School, Heriot Watt University (2010).
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK Dewan Komisaris Injourney Nomor SK-001/INJ/DEKOM/01/2022 <i>SK Dewan Komisaris Injourney Nomor SK-001/INJ/DEKOM/01/2022</i>
Pengalaman Kerja dan Periodenya <i>Work Experience and Period</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Senior Manager PwC (1995 – 2005) • Finance Director Rio Tinto Indonesia (2005 – 2019) • Komisaris Independen Hewlett Packard (2016); • Komite Audit PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2018) • Komite Audit PT Vale Indonesia Tbk (2019) • Komite Audit PT Goodyear Indonesia Tbk (2019) • Senior Advisor Grant Thornton (2019) • Managing Director & Senior Advisor di AWR Lloyd (2019 – 2020) • Komite Audit PT Archi Indonesia Tbk (2021) • Komite Audit PT Caterpillar Finance Indonesia (2021) • Komite Audit PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk (2021) • Komite Audit Samudera Indonesia Tbk (2021) • Komite Pengawasan Risiko PT Caterpillar Finance Indonesia (2021) • Komite Pengawasan Risiko PT Maybank Indonesia Finance (2021)
Periode dan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Audit <i>Audit Committee Membership Period and Term</i>	2022-2024 (3 tahun)/ <i>2022-2024 (3 years)</i>



Informasi Rangkap Jabatan Komite Audit

Rangkap jabatan Komite Audit telah diatur sesuai Peraturan Menteri PER-10/MBU/10/2020. Selama periode pelaporan buku terdapat 6 orang Komite Audit yang mengemban jabatan rangkap baik di dalam maupun luar Perusahaan. Informasi terkait rangkap jabatan Komite Audit dapat dilihat dalam tabel berikut.

Information on Concurrent Positions of the Audit Committee

The concurrent positions of the Audit Committee have been regulated in accordance with Ministerial Regulation PER-10/MBU/10/2020. During the book reporting period, there were 6 members of the Audit Committee who held concurrent positions both inside and outside the Company. Information related to the concurrent positions of the Audit Committee can be seen in the following table.

Nama Name	Jabatan Positions	Rangkap Jabatan di Injourney Concurrent Positions in Injourney	Jabatan Lain & Nama Instansi Other Positions and Agency Names
Elwin Chandra Mochsin	Ketua Komite Audit <i>Chairman of the Audit Committee</i>	Komisaris Independen Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Anggota Komite Manajemen Risiko, Investasi & GCG <i>Independent Commissioner</i> <i>Member of the Nomination and Remuneration Committee</i> <i>Member of Committee and the Risk Management, Investment, and GCG Committee</i>	Founder Celcius
Triawan Munaf	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>	Komisaris Utama Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Anggota Komite Manajemen Risiko, Investasi & GCG <i>President Commissioner</i> <i>Chairman of the Nomination and Remuneration Committee</i> <i>Member of Committee and the Risk Management, Investment, and GCG Committee</i>	Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kamar Dagang dan Industri Indonesia <i>Deputy Chairperson for Tourism and Creative Economy, Indonesian Chamber of Commerce and Industry</i>
Odo Rene Mathew Manuhutu	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>	Komisaris Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Anggota Komite Manajemen Risiko, Investasi & GCG <i>Commissioner</i> <i>Member of the Nomination and Remuneration Committee</i> <i>Member of Committee and the Risk Management, Investment, and GCG Committee</i>	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi <i>Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi</i>



Wihana Kirana Jaya	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>	Komisaris Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Ketua Komite Manajemen Risiko, Investasi & GCG <i>Commissioner</i> <i>Member of the Nomination and Remuneration Committee</i> <i>Chairman of Committee and the Risk Management, Investment, and GCG Committee</i>	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta <i>Deputy for Tourism and Creative Economy Coordination of the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment Dean of the Faculty of Economics and Business, Gadjah Mada University, Yogyakarta</i>
Yeti Wulandari	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>	-	Dosen di PKN STAN <i>Lecturer at PKN STAN</i>
Herwan Ng	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>	-	Komite Audit di GOTO <i>Audit Committee at GOTO</i>

Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan afiliasi terhadap Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Komite Audit bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu.

Independence of the Audit Committee

Members of the Audit Committee have no affiliation with the Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The duties and responsibilities of the Audit Committee are independent and not influenced by the interests of certain parties.

Rapat dan Realisasi Kegiatan Komite Audit

Seluruh nasihat dan saran kepada Dewan Komisaris dirumuskan melalui Rapat Komite Audit. Pelaksanaan Rapat Komite Audit dilakukan setiap satu kali dalam satu bulan. Komite Audit baru terbentuk di tahun 2022. Dengan demikian, informasi rapat dan realisasi kegiatan Komite Audit baru disampaikan di tahun 2022.

Meetings and Realization of Audit Committee Activities

All advice and suggestions to the Board of Commissioners are formulated through the Audit Committee Meeting. The Audit Committee Meeting is held once a month. The new Audit Committee was formed in 2022. Thus, information on meetings and the realization of the activities of the Audit Committee will only be submitted in 2022.



Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi perusahaan. Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi dapat berlangsung selama 3 tahun atau sesuai dengan kebijakan Dewan Komisaris.

The Nomination and Remuneration Committee is a committee formed by the Board of Commissioners to supervise all activities related to the nomination and remuneration of the company. The Nomination and Remuneration Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The term of office of the Nomination and Remuneration Committee can last for 3 years or in accordance with the policy of the Board of Commissioners.

Profil dan Kualifikasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri atas 5 orang yang mengemban jabatan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi serta Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Pemaparan lebih lanjut terkait profil dan pengalaman Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat dalam infografis berikut.

Nomination and Remuneration Committee Profile and Qualifications

The Nomination and Remuneration Committee consists of 5 people who hold positions as Chair of the Nomination and Remuneration Committee and Members of the Nomination and Remuneration Committee. Further explanation regarding the profile and experience of the Nomination and Remuneration Committee can be seen in the following infographic.

Nama/ Name	Triawan Munaf
Profil/ Profile	Informasi terkait profil Triawan Munaf dapat dilihat pada halaman 90 - 91 dalam Laporan ini. <i>Information related to Triawan Munaf's profile can be seen on the 90 - 91 in this Report.</i>
Jabatan/ Position	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Chairman of the Nomination and Remuneration Committee</i>
Periode dan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi	2022-2024 (3 tahun)/ <i>2022-2024 (3 years)</i>
Nomination and Remuneration Committee Membership Period and Term	



Nama/ Name	Wihana Kirana Jaya
Profil/ Profile	Informasi terkait profil Wihana Kirana Jaya dapat dilihat pada halaman 92 – 93 dalam Laporan ini. <i>Information regarding Wihana Kirana Jaya's profile can be found on the 92 – 93 in this Report.</i>
Jabatan/ Position	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Nomination and Remuneration Committee</i>
Periode dan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee Membership Period and Term</i>	2022-2024 (3 tahun)/ 2022-2024 (3 years)
Nama/ Name	Elwin Chandra Mochsin
Profil/ Profile	Informasi terkait profil Elwin Chandra Mochsin dapat dilihat pada halaman 96 – 97 dalam Laporan ini. <i>Information related to Elwin Chandra Mochsin's profile can be found on the 96 – 97 in this Report.</i>
Jabatan/ Position	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Nomination and Remuneration Committee</i>
Periode dan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee Membership Period and Term</i>	2022-2024 (3 tahun)/ 2022-2024 (3 years)
Nama/ Name	Odo Rene Mathew Manuhutu
Profil/ Profile	Informasi terkait profil Odo Rene Mathew Manuhutu dapat dilihat pada halaman 94 – 95 dalam Laporan ini. <i>Information regarding Odo Rene Mathew Manuhutu's profile can be found on the 94 – 95 in this Report.</i>
Jabatan/ Position	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Nomination and Remuneration Committee</i>
Periode dan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee Membership Period and Term</i>	2022-2024 (3 tahun)/ 2022-2024 (3 years)



Nama/ Name	Emmy Junianti
Jabatan/ Position	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Nomination and Remuneration Committee</i>
Usia/ Age	45 tahun/ 45 years old
Domisili/ Domicile	Jakarta
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational background	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas MPU-Tantular Jakarta (1998 – 2003); • S2 Magister Manajemen, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2020 – sekarang). • <i>S1 Bachelor of Economics, Faculty of Economics, MPU-Tantular University Jakarta (1998 – 2003);</i> • <i>Masters Degree in Management, Bhayangkara University, Greater Jakarta (2020 – present).</i>
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris Injourney Nomor SK-003/INJ/DEKOM/01/2022 <i>Decree of the Board of Commissioners of Injourney Number SK-003/INJ/DEKOM/01/2022</i>
Pengalaman Kerja dan Periode Work Experience and Period	<ul style="list-style-type: none"> • Employee PT LGEIN Cibitung Factory (1996 – 2005); • Supervisor PT LGEIN Cibitung Factory (2006 – 2009); • HRBP Manager, PT LGEIN Cibitung Factory (2010 – 2021); • Trainer & Consultant, PT Ide Inspirasi Manajemen (2013 – sekarang); • Secretary Yayasan Al-Manaar Al-Syamil (2014 – 2019); • Chairman Yayasan SDMLIST Jakarta (2016 – 2020); • Trainer Program CHRG SDMLIST Jakarta (2016 – sekarang); • Trainer Program IRPP Profindo Utama (2018 – sekarang); • Badan Pengawas, Yayasan SDMLIST Jakarta (2020 – sekarang); • Founder & CEO, PT Siap Kerja Profesional (2022 – sekarang). • <i>Employees of PT LGEIN Cibitung Factory (1996 – 2005);</i> • <i>Supervisor of PT LGEIN Cibitung Factory (2006 – 2009);</i> • <i>HRBP Manager, PT LGEIN Cibitung Factory (2010 – 2021);</i> • <i>Trainer & Consultant, PT Ide Inspirasi Manajemen (2013 – present);</i> • <i>Secretary of Al-Manaar Al-Syamil Foundation (2014 – 2019);</i> • <i>Chairman of the Jakarta SDMLIST Foundation (2016 – 2020);</i> • <i>CHRG SDMLIST Jakarta Trainer Program (2016 – present);</i> • <i>Profindo Utama IRPP Program Trainer (2018 – present);</i> • <i>Supervisory Board, Jakarta SDMLIST Foundation (2020 – present);</i> • <i>Founder & CEO, PT Ready for Professional Work (2022 – present).</i>
Periode dan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Membership Period and Term	2022-2024 (3 tahun)/ 2022-2024 (3 years)

Informasi Rangkap Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Information on Concurrent Positions of the Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan di Injourney Position at Injourney	Rangkap Jabatan di Injourney Concurrent Position at Injourney	Jabatan Lain & Nama Instansi Other Positions and Agency Names
Triawan Munaf	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Chairman of the Nomination and Remuneration Committee</i>	Komisaris Utama Anggota Komite Audit <i>President Commissioner</i> <i>Audit Committee Member</i>	Pendiri dan Ketua Advocado <i>Founder and Chairman of Advocado</i>
Wihana Kirana Jaya	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Nomination and Remuneration Committee</i>	Komisaris Anggota Komite Audit <i>Commissioner</i> <i>Audit Committee Member</i>	Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi <i>Special Staff of the Minister of Transportation for Economy and Transportation Investment</i>
Elwin Chandra Mochsin	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Nomination and Remuneration Committee</i>	Komisaris Ketua Komite Audit <i>Commissioner</i> <i>Chairman of the Audit Committee</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Co-Founder TIPS Inovasi Logistik • Chairman P3I Jakarta • Co-Founder of TIPS Logistics Innovation • Chairman P3I Jakarta
Odo Rene Mathew Manuhutu	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Nomination and Remuneration Committee</i>	Komisaris Anggota Komite Audit <i>Commissioner</i> <i>Audit Committee Member</i>	Deputi Menteri Koordinator Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI <i>Deputy Coordinating Minister for Tourism and Creative Economy at the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia</i>
Emmy Junianti	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Nomination and Remuneration Committee</i>	-	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengawas Yayasan SDMLIST Jakarta; • Trainer Program CHRG SDMLIST Jakarta & Program IRPP Profindo Utama; • Founder & CEO PT Siap Kerja Profesional. • the Supervisory Board of the Jakarta SDMLIST Foundation; • Trainer for CHRG SDMLIST Jakarta Program & IRPP Profindo Utama Program; • Founder & CEO of PT Ready to Work Professionally.



Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Komite Nominasi dan Remunerasi terhadap Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Perusahaan menjamin bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi & Remunerasi baru terbentuk di tahun 2022. Dengan demikian, informasi rapat dan realisasi kegiatan Komite Nominasi & Remunerasi baru disampaikan di tahun 2022.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Komisaris, Direksi, Pejabat eksekutif dan pegawai secara menyeluruh. Seluruh tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi telah diungkapkan dalam piagam (charter) Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun tugas Komite Nominasi dan Remunerasi terbagi menjadi dua yaitu fungsi nominasi dan fungsi remunerasi yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee carries out its duties and responsibilities professionally and independently. There is no affiliation between the Nomination and Remuneration Committee and the Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The Company guarantees that there is no conflict of interest in the Nomination and Remuneration Committee.

Nomination and Remuneration Committee Training

The Nomination and Remuneration Committee was recently formed in 2022. Thus, information on meetings and realization of the activities of the Nomination and Remuneration Committee will be submitted in 2022.

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is responsible for evaluating as well as compiling and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the nomination and remuneration system/policy for Commissioners, Directors, executive officers and employees as a whole. All duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee have been disclosed in the Nomination and Remuneration Committee charter. The duties of the Nomination and Remuneration Committee are divided into two, namely the nomination function and the remuneration function, which are described in the following table.

Fungsi Nominasi

Nomination Function

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang disusun sebagai bahan evaluasi; 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; 4) Memberikan usulan/rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 5) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan GCG. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding: <ol style="list-style-type: none"> a) Composition of the positions of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; b) Policies and criteria required in the nomination process; and c) Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. 2) Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on benchmarks prepared as evaluation material; 3) Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the capacity building program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; 4) Provide proposals/recommendations for candidates for members of the Board of Directors and/or candidates for members of the Board of Commissioners who meet the requirements to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders; 5) Prepare and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the system and procedure for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders; 6) Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the Independent Parties who will become members of the Audit Committee and the Risk Management, Investment, and GCG Committee. |
|---|--|

Fungsi Remunerasi

Remuneration Function

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan <i>peer group</i>, sasaran, dan strategi jangka Panjang perusahaan, dan potensi pendapatan perusahaan di masa yang akan datang; 2) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a) Struktur remunerasi; b) Kebijakan remunerasi; c) Besaran remunerasi; <p>Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;</p> 3) Menyampaikan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a) Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; b) Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. 4) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi; 6) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluating the remuneration system/policy based on performance, risk, fairness with <i>peer groups</i>, long-term goals and strategies of the company, and the potential for future earnings of the company; 2) Prepare and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding: <ol style="list-style-type: none"> a) Remuneration structure; b) Remuneration policy; c) Amount of remuneration; <p>The structure, policy, and amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors mentioned above are evaluated by the Nomination and Remuneration Committee at least once a year;</p> 3) Submit evaluation results and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding: <ol style="list-style-type: none"> a) Remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders; b) Remuneration policy for executive officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors. 4) Ensure that the remuneration policy is in accordance with applicable regulations; 5) Conduct regular evaluations of the implementation of the remuneration policy; 6) Assisting the Board of Commissioners in conducting performance appraisals in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. |
|--|---|



Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi belum diselenggarakan pada periode Laporan Tahun 2021. Belum diselenggarakannya rapat Komite Nominasi dan Remunerasi disebabkan karena pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi baru dilakukan pada awal tahun 2022. Meski demikian, Injourney telah membuat sejumlah kebijakan dalam penyelenggaraan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, antara lain:

- a. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun;
- b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dan dari mayoritas jumlah tersebut merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi serta 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;
- c. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Anggota Komite Senior yang ditunjuk/disepakati dalam rapat;
- d. Pengambilan keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara;
- e. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara), tanpa menghitung suara dari anggota yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;

Nomination and Remuneration Committee Meeting

The Nomination and Remuneration Committee meeting has not been held in the 2021 Report period. The Nomination and Remuneration Committee meeting has not yet been held due to the formation of the Nomination and Remuneration Committee which was only carried out in early 2022. However, Injourney has made a number of policies in holding the Nomination and Remuneration Committee meeting, among others:

- a. Meetings of the Nomination and Remuneration Committee are held in accordance with the needs of the Company, at least 4 (four) times a year;*
- b. The Nomination and Remuneration Committee meeting can only be held if attended by a majority and the majority of the number is the Chair of the Nomination and Remuneration Committee and 1 (one) Executive Officer in charge of human resources or a party holding a managerial position under the Board of Directors in charge of human resources. ;*
- c. The meeting is chaired by the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, and if the Chairman of the Committee is unable to attend, the meeting is chaired by a Senior Committee Member who is appointed/agreed upon at the meeting;*
- d. Nomination and Remuneration Committee meeting decisions are made based on deliberation and consensus. In the event that consensus deliberation does not occur, then the decision is made based on the majority vote with the principle of 1 (one) person 1 (one) vote;*
- e. If the decision is made by voting, there are an equal number of votes, then the decision is made based on the majority of votes with the principle of 1 (one) person 1 (one) vote), without counting the votes of the members who come from the Executive Officer in charge of human resources. or parties holding managerial positions under the Board of Directors in charge of human resources;*



- f. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite dan dikomunikasikan dengan baik;
- g. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
- h. Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam butir f tersebut di atas disampaikan secara tertulis oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris;
- i. Kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi.

- f. The results of the Nomination and Remuneration Committee meeting are stated in a minutes of meeting signed by all members of the Committee and well communicated;*
- g. Dissenting opinions that occur in Committee meetings must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the dissenting opinions;*
- h. The minutes of the meeting as referred to in point f above shall be submitted in writing by the Nomination and Remuneration Committee to the Board of Commissioners;*
- i. The attendance of the members of the Nomination and Remuneration Committee at the meeting is reported in the quarterly reports and the annual report of the Nomination and Remuneration Committee..*

Realisasi Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi baru terbentuk pada tahun 2022. Dengan demikian, informasi rapat dan realisasi kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi baru dapat disampaikan dalam Laporan Tahun 2022.

Realization of Nomination and Remuneration Committee Activities

The Nomination and Remuneration Committee was only formed in 2022. Thus, information on meetings and the realization of the activities of the Nomination and Remuneration Committee can only be submitted in the 2022 Report.



Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG

Business Risk Management, Investment & GCG Committee

Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG (KMRIG) bertanggung jawab untuk bekerja secara independen membantu Dewan Komisaris. Secara garis besar, KMRIG bertugas untuk melakukan pemantauan kegiatan manajemen risiko dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko. KMRIG melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris SK-002/INJ/Dekom/01/2022 dengan masa jabatan selama 3 tahun.

The Business Risk Management, Investigation & GCG Committee (KMRIG) is responsible for working independently to assist the Board of Commissioners. Broadly speaking, KMRIG is tasked with monitoring risk management activities and providing input to the Board of Commissioners on the formulation and improvement of risk management policies. KMRIG carries out its duties and responsibilities based on the Decree of the Board of Commissioners SK-002/INJ/Dekom/01/2022 with a term of office of 3 years.

**Profil dan Kualifikasi Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG****Profile and Qualifications of the Business Risk Management, Investment & GCG Committee**

Nama/ Name	Wihana Kirana Jaya
Profil/ Profile	Informasi terkait profil Wihana Kirana Jaya dapat dilihat pada halaman 92 - 93 dalam Laporan ini. <i>Information regarding Wihana Kirana Jaya's profile can be found on the 92 - 93 in this Report.</i>
Jabatan/ Position	Ketua Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG <i>Head of Business, Investment & GCG Risk Management Committee</i>
Periode dan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Risiko Usaha, Investasi & GCG	2022-2024 (3 tahun) / 2022-2024 (3 tahun)
<i>Period and Term of Office of Business Risk, Investment & GCG Committee Membership</i>	
Nama/ Name	Triawan Munaf
Profil/ Profile	Informasi terkait profil Triawan Munaf dapat dilihat pada halaman 90 - 91 dalam Laporan ini. <i>Information related to Triawan Munaf's profile can be seen on the 90 - 91 in this Report.</i>
Jabatan/ Position	Anggota Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG <i>Member of the Business, Investment & GCG Risk Management Committee</i>
Periode dan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Risiko Usaha, Investasi & GCG	2022-2024 (3 tahun) / 2022-2024 (3 years)
<i>Period and Term of Office of Business Risk, Investment & GCG Committee Membership</i>	
Nama/ Name	Odo Rene Mathew Manuhutu
Profil/ Profile	Informasi terkait profil Odo Rene Mathew Manuhutu dapat dilihat pada halaman 94 -95 dalam Laporan ini. <i>Information related to Odo Rene Mathew Manuhutu's profile can be found on the 94 -95 in this Report.</i>
Jabatan/ Position	Anggota Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG <i>Member of the Business, Investment & GCG Risk Management Committee</i>
Periode dan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Risiko Usaha, Investasi & GCG	2022-2024 (3 tahun) / 2022-2024 (3 years)
<i>Period and Term of Office of Business Risk, Investment & GCG Committee Membership</i>	



Nama/ Name	Elwin Chandra Mochsin
Profil/ Profile	<p>Informasi terkait profil Elwin Chandra Mochsin dapat dilihat pada halaman 96 - 97 dalam Laporan ini.</p> <p><i>Information related to Elwin Chandra Mochsin's profile can be found on the 96 - 97 in this Report.</i></p>
Jabatan/ Position	<p>Anggota Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG</p> <p><i>Member of the Business, Investment & GCG Risk Management Committee</i></p>
Periode dan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Risiko Usaha, Investasi & GCG	<p>2022-2024 (3 tahun) / 2022-2024 (3 years)</p> <p><i>Period and Term of Office of Business Risk, Investment & GCG Committee Membership</i></p>
Nama/ Name	Widia Praptiwi
Jabatan/ Position	<p>Anggota Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG</p> <p><i>Member of the Business, Investment & GCG Risk Management Committee</i></p>
Usia/ Age	<p>47 tahun</p> <p><i>47 years old</i></p>
Domisili/ Position	Jakarta
Kewarganegaraan	Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1992 - 1997); • Magister Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia (2001 - 2004). <p><i>Educational background</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bachelor of Accounting, Faculty of Economics, University of Indonesia (1992 - 1997);</i> • <i>Masters in Accounting, University of Indonesia (2001 - 2004).</i>
Dasar Hukum Penunjukan	<p>SK Dewan Komisaris Injourney Nomor SK-002/INJ/DEKOM/01/2022</p> <p><i>Legal Basis of Appointment</i></p> <p><i>SK Injourney Board of Commissioners Number SK-002/INJ/DEKOM/01/2022</i></p>
Pengalaman Kerja dan Periode	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Audit HIN (2015-2018, 2019-2021) • Pengajar SI Akuntansi di Universitas Krisnadwipayana (2015-sekarang) • Komite Manajemen Risiko PT Telkom (2018-2019) <p><i>Work Experience and Period</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>HIN Audit Committee (2015-2018, 2019-2021)</i> • <i>Lecturer in SI Accounting at Krisnadwipayana University (2015-present)</i> • <i>PT Telkom Risk Management Committee (2018-2019)</i>
Periode dan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG	<p>2022-2024 (3 tahun) / 2022-2024 (3 years)</p> <p><i>Period and Term of Office of Business Risk, Investment & GCG Committee Membership</i></p>

Nama/ Name	Muhammad Romli
Jabatan/ Position	Anggota Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG <i>Member of the Business, Investment & GCG Risk Management Committee</i>
Usia/ Usia	44 tahun/ 44 years old
Domisili/ Domicile	Jakarta
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational background	<ul style="list-style-type: none"> • D4 STAN (2000); • Sarjana Akuntansi STIE Dharma Putra (2004); • Magister Sains Corporate Finance Universitas Indonesia (2013).
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris Injourney Nomor SK-002/INJ/DEKOM/01/2022 <i>SK Injourney Board of Commissioners Number SK-002/INJ/DEKOM/01/2022</i>
Pengalaman Kerja dan Periodenya Work Experience and Period	<ul style="list-style-type: none"> • Economist pada The Indonesia Economic Intelligence (IEI) (2006-sekarang); • Konsultan Keuangan BRIngin Life (2008); • Penulis Pidato Presiden dalam Nota Keuangan dan RAPBN (2008-2011); • Penulis Pidato dan Artikel Menteri Keuangan (2008-2011); • Reviewer dari Jurnal Business and Bureaucracy, Universitas Indonesia (2014-2016); • Dosen Tidak Tetap pada Pusdiklat Keuangan, Kementerian Keuangan dan STIE Bisnis Indonesia Jakarta (2015); • Staf Ahli Bidang Kajian Ekonomi Strategis pada Deputy V, Kantor Staf Presiden (2015-2016); • Kepala Subbidang Investasi, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (2015-2016); • Komite Manajemen Risiko dan SDM PT Angkasa Pura II (Persero) (2017-2021); • Analisis Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Risiko BUMN pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI (2018- sekarang).
Periode dan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG	2022-2024 (3 tahun)
Period and Term of Office of Business Risk, Investment & GCG Committee Membership	2022-2024 (3 years)



Informasi Rangkap Jabatan Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG

Information on Concurrent Positions of the Business Risk Management, Investment & GCG Committee

Nama Name	Jabatan Position	Rangkap Jabatan di Injourney Concurrent Position in Injourney	Jabatan Lain & Nama Instansi Other Positions and Agency
Wihana Kirana Jaya	Ketua Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG <i>Head of Business, Investment & GCG Risk Management Committee</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama • Anggota Komite Audit • President Commissioner • Audit Committee Member 	Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi <i>Special Staff of the Minister of Transportation for Economy and Transportation Investment</i>
Triawan Munaf	Anggota Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG <i>Member of the Business, Investment & GCG Risk Management Committee</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris • Anggota Komite Audit • Committee • Audit Committee Member 	Pendiri dan Ketua Advocado <i>Founder and Chairman of Advocado</i>
Odo Rene Mathew Manuhutu	Anggota Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG <i>Member of the Business, Investment & GCG Risk Management Committee</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris • Ketua Komite Audit • Committee • Chairman of the Audit Committee 	Deputy Menteri Koordinator Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia <i>Deputy Coordinating Minister for Tourism and Creative Economy at the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia</i>
Elwin Chandra Mochsin	Anggota Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG <i>Member of the Business, Investment & GCG Risk Management Committee</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris • Anggota Komite Audit • Committee • Audit Committee Member 	<ul style="list-style-type: none"> • Co-Founder TIPS Inovasi Logistik • Chairman P3I Jakarta • Co-Founder of TIPS Logistics Innovation • Chairman of P3I Jakarta
Widya Pratiwi	Anggota Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG <i>Member of the Business, Investment & GCG Risk Management Committee</i>	-	Dosen Akuntansi di Universitas Krisnadwipayana <i>Lecturer in Accounting at Krisnadwipayana University</i>
Muhammad Romli	Anggota Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG <i>Member of the Business, Investment & GCG Risk Management Committee</i>	-	Analis Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Risiko BUMN pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia <i>Analyst of State Equity Participation (PMN) and BUMN Risk at the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia</i>



Independensi Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG

Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG terhadap Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Perusahaan menjamin bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG.

Pelatihan Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG

Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG belum melaksanakan pelatihan sepanjang tahun 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG (KMRIG) telah dituangkan dalam piagam (charter) yang berisi pedoman pelaksanaan tugas bagi KMRIG. Secara garis besar KMRIG memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya secara independen, membantu Dewan Komisaris dalam menentukan kebijakan terkait manajemen risiko usaha, investasi, dan GCG, serta bertanggung jawab langsung terhadap Dewan Komisaris. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan KMRIG, antara lain:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko strategis, operasional, keselamatan, kesehatan, keamanan lingkungan, bisnis, hukum, kepatuhan dan keuangan;
2. Melakukan monitoring implementasi manajemen risiko dan melakukan koordinasi dengan Unit Manajemen Risiko;
3. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko;

Independence of the Business, Investment & GCG Risk Management Committee

The Business, Investment & GCG Risk Management Committee carries out its duties and responsibilities professionally and independently. There is no affiliation between the Business Risk Management, Investment & GCG Committee and the Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company guarantees that there is no conflict of interest in the Business Risk Management, Investment & GCG Committee.

Business Risk Management, Investment & GCG Committee Training

The Business Risk Management, Investment & GCG Committee has not carried out training throughout 2021.

Duties and Responsibilities of the Business, Investment & GCG Risk Management Committee

The duties and responsibilities of the Business Risk Management, Investment & GCG Committee (KMRIG) have been set out in a charter which contains guidelines for the implementation of tasks for KMRIG. In general, KMRIG is responsible for carrying out its duties independently, assisting the Board of Commissioners in determining policies related to business risk management, investment, and GCG, and is directly responsible to the Board of Commissioners. The tasks carried out by KMRIG include:

1. *Provide input to the Board of Commissioners regarding the preparation and improvement of risk management policies related to strategic, operational, safety, health, environmental, business, legal, compliance and financial risk control;*
2. *Monitoring the implementation of risk management and coordinating with the Risk Management Unit;*
3. *Evaluating the effectiveness of the implementation of risk control and mitigation carried out by the Risk Management Unit;*



4. Melakukan evaluasi manajemen risiko atas tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris antara lain RJPP, RKAP, investasi, dan aksi korporasi lainnya;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan dan pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Perseroan;
6. Melakukan diskusi dan/atau koordinasi dengan Unit Internal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris;
7. Melaksanakan tugas tambahan lain dari Dewan Komisaris yang berkenaan dengan fungsi Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG;
8. Dalam hal Direksi menganggap perlu menggunakan konsultan manajemen risiko independen untuk melakukan penelaahan kembali atas proses manajemen risiko yang telah diterapkan Perseroan, maka tugas KMRIG adalah:
 - a) Memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan;
 - b) Melakukan monitoring pekerjaan konsultan melalui Unit Manajemen Risiko;
 - c) Menyampaikan laporan kegiatan kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Rapat Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG

Pada periode pelaporan tahun 2021, belum terdapat rapat yang diselenggarakan oleh Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG karena pembentukan KMRIG baru dilakukan pada awal tahun 2022. Namun, untuk menunjang dan memantau kinerja Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG, Injourney telah menyiapkan pedoman penyelenggaraan rapat bagi KMRIG, yaitu:

1. KMRIG mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam satu bulan;
2. Rapat dipimpin oleh Ketua KMRIG atau Anggota KMRIG jika Ketua KMRIG berhalangan hadir;
3. Panggilan rapat dapat dilakukan oleh Ketua KMRIG atau anggota KMRIG;
4. Rapat dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka atau dalam bentuk telekonferensi melalui alat atau teknologi informasi yang tersedia;

4. Conduct risk management evaluations on the actions of the Board of Directors that require approval/response from the Board of Commissioners, including RJPP, RKAP, investments, and other corporate actions;
5. Monitoring and evaluating the preparation and achievement of the Company's Key Performance Indicators (KPI);
6. Conduct discussions and/or coordination with Internal Units related to the implementation of the duties of the Board of Commissioners;
7. Carry out other additional duties from the Board of Commissioners related to Business Risk Management, Investment & GCG functions;
8. In the event that the Board of Directors considers it necessary to use an independent risk management consultant to review the risk management process that has been implemented by the Company, then the duties of KMRIG are:
 - a) Provide input on the criteria and competence of consultants;
 - b) Monitoring the work of consultants through the Risk Management Unit;
 - c) Submit activity reports to the Board of Commissioners on a regular basis.

Business, Investment & GCG Risk Management Committee Meeting

In the 2021 reporting period, there have been no meetings held by the Business Risk Management, Investment & GCG Committee because the establishment of KMRIG was only carried out in early 2022. However, to support and monitor the performance of the Business Risk Management, Investment & GCG Committee, Injourney has prepared guidelines holding meetings for KMRIG, namely:

1. KMRIG holds regular meetings at least once a month;
2. The meeting is chaired by the Chairperson of KMRIG or members of KMRIG if the Chairperson of KMRIG is unable to attend;
3. Meeting invitations can be made by the Chairperson of KMRIG or members of KMRIG;
4. Meetings can be held in the form of face-to-face meetings or in the form of teleconferences through available tools or information technology;



5. Rapat KMRIG dapat dihadiri oleh Anggota Komisaris dan/atau Anggota Komite lainnya;
 6. KMRIG dapat meminta Direksi, Pegawai Perseroan ataupun pihak luar untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan;
 7. Setiap rapat KMRIG dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota KMRIG yang hadir. Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh KMRIG kepada Dewan Komisaris;
 8. Tanda tangan undangan dan risalah rapat dapat dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang sah dan ditetapkan Perseroan;
 9. Kehadiran anggota KMRIG dalam rapat dilaporkan ke dalam laporan triwulanan dan tahunan KMRIG.
5. *KMRIG Meetings may be attended by members of the Board of Commissioners and/or other Committee members;*
 6. *KMRIG may ask the Board of Directors, Company employees or outside parties to attend the meeting and provide the necessary information;*
 7. *Each KMRIG meeting is stated in the minutes of the meeting signed by all KMRIG members present. The minutes of the meeting are submitted in writing by KMRIG to the Board of Commissioners;*
 8. *The signature of the invitation and minutes of the meeting can be done using an information technology system that is legal and determined by the Company;*
 9. *The attendance of KMRIG members at meetings is reported in KMRIG's quarterly and annual reports.*

Realisasi Kegiatan Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG

Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG baru terbentuk di tahun 2022. Dengan demikian, informasi rapat dan realisasi kegiatan Komite Manajemen Risiko Usaha, Investasi & GCG baru disampaikan di tahun 2022.

Realization of Business, Investment & GCG Risk Management Committee Activities

The Business, Investment & GCG Risk Management Committee was only formed in 2022. Thus, information on meetings and the realization of the Business Risk Management, Investment & GCG Committee activities was only submitted in 2022.



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan. Penunjukan Sekretaris Perusahaan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor PERJJ.01.1/AVIATA-SDM/01/2022. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan mencakup:

1. Membantu Direksi dalam mengelola Pemegang Saham & Pemangku Kepentingan (termasuk Pemerintah, Kementerian BUMN, dan Kementerian lainnya);
2. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas perusahaan dengan adanya keterbukaan informasi dengan akuntabilitas yang baik;
3. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi penyusunan kebijakan komunikasi dan pembinaan relasi perusahaan dan sistem tata kerja komunikasi & protocol;
4. Mengatur penyelenggaraan agenda dan aksi korporat (RUPS, Right Issues, dll);
5. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan tata usaha perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance);
6. Mengelola administrasi, surat menyurat, arsip-arsip perusahaan, serta kerumahausahaan perusahaan.
7. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan atau sewaktu-waktu apabila diminta;
9. Sebagai penghubung atau Liaison Officer;
10. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat dengan Dewan Komisaris, dan RUPS;
11. Mengelola dan melaksanakan program-program terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

In carrying out all duties and responsibilities, the Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary. The appointment of the Corporate Secretary is based on the Decree of the Board of Directors Number PERJJ.01.1/AVIATA-SDM/01/2022. The duties and responsibilities of the Corporate Secretary include:

1. *Assisting the Board of Directors in managing shareholders and stakeholders (including the Government, Ministry of SOEs, and other Ministries);*
2. *Increase the credibility and accountability of the company by providing information disclosure with good accountability;*
3. *Directing, monitoring, and evaluating the preparation of communication policies and fostering corporate relations and communication & protocol work systems;*
4. *Manage the implementation of corporate agendas and actions (GMS, Right Issues, etc.);*
5. *Assisting the President Director in managing corporate governance and good corporate governance;*
6. *Manage administration, correspondence, company files, and corporate housekeeping;*
7. *Ensuring that the Company complies with regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles;*
8. *Providing information needed by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and or at any time if requested;*
9. *Acting as a Liaison Officer;*
10. *Administering and keeping company documents including but not limited to Register of Shareholders, Special Register and minutes of Board of Directors meetings, meetings with the Board of Commissioners, and GMS;*
11. *Managing and implementing programs related to Social and Environmental Responsibility (TJSL).*



Indah Permatasari Saugi

Senior Vice President of Corporate Secretary

**Bergabung pada tanggal 10 Januari 2022*

**Joined on 10 January 2022*



Profil dan Riwayat Hidup Singkat Senior Vice President of Corporate Secretary

Profile and Brief Curriculum Vitae of Senior Vice President of Corporate Secretary

Nama/ <i>Name</i>	Indah Permatasari Saugi
Jabatan/ <i>Position</i>	Senior Vice President of Corporate Secretary
Usia/ <i>Age</i>	39 tahun/ <i>39 years old</i>
Domisili/ <i>Domicile</i>	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Sarjana Hukum Universitas Pelita Harapan (2001)
<i>Educational background</i>	<i>Bachelor of Law from Pelita Harapan University (2001)</i>
Dasar Hukum Penunjukan	PERJJ.01.1/AVIATA-SDM/01/2022
<i>Legal Basis of Appointment</i>	
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Melli Darsa & Co (2006 – 2016); • Corporate Secretary di PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2016 – 2017); • Director and Head of Corporate Secretary di AirAsia (2017 –2021) • PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) (2022 – Sekarang)
<i>Work experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Melli Darsa & Co (2006 – 2016); • Corporate Secretary at PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2016 – 2017); • Director and Head of Corporate Secretary at AirAsia (2017 –2021) • PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) (2022 – Present)
Periode Jabatan	2022 – Sekarang/ <i>2022 – Present</i>
<i>Term of Office</i>	

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Tahun 2021 Sekretaris Perusahaan belum melaksanakan pelatihan. Belum adanya pelatihan bagi Sekretaris Perusahaan disebabkan karena Injourney baru terbentuk pada Oktober 2021 dan pengangkatan Senior Vice President of Corporate Secretary baru dilaksanakan pada Januari 2022. Sehingga tidak terdapat pelatihan yang dikhususkan bagi Sekretaris Perusahaan pada tahun 2021. Seluruh pelatihan dan pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Corporate Secretary Competency Development

In 2021 the Corporate Secretary has not carried out training. The absence of training for the Corporate Secretary is due to the fact that Injourney was only formed in October 2021 and the appointment of the Senior Vice President of Corporate Secretary has only been carried out in January 2022. So there is no specific training for the Corporate Secretary in 2021. All training and competency development of the Corporate Secretary will be carried out in 2022.



Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan telah dilaksanakan dengan baik pada tahun 2021. Berikut adalah capaian kegiatan Sekretaris Perusahaan di tahun 2021:

1. Mengelola akun media sosial resmi perusahaan dalam membuat konten dan sebagainya;
2. Membuat siaran pers terkait program aksi korporasi;
3. Melakukan branding Injourney melalui media;
4. Menjalankan tugas sebagai media relations & media monitoring;
5. Membuat media internal;
6. Menyusun program sponsorship;
7. Menyusun Company Profile;
8. Berkolaborasi dalam program komunikasi dengan Sub Holding;
9. Mendukung program komunikasi Kementerian BUMN;
10. Menyusun Piagam/Charter Dewan Komisaris dan Piagam/Charter Direksi;
11. Menyusun Board Manual
12. Terlibat dalam penyusunan Pedoman Good Corporate Governance (GCG);
13. Menyusun Pedoman Kode Etik;
14. Melakukan Self Assessment;
15. Menjalankan proses administrasi surat menggunakan aplikasi e-office;
16. Menyusun standar proses permohonan penandatanganan surat oleh Direksi;
17. Menyediakan kebutuhan perusahaan secara berkala.
18. Membangun dan membina relasi dengan stakeholders untuk menunjang proses bisnis perusahaan.
19. Melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta monitoring dan evaluasinya.

Realization of Corporate Secretary Activities

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary have been carried out properly in 2021. The following are the achievements of the Corporate Secretary's activities in 2021:

- 1. Manage the company's official social media accounts in creating content and so on;*
- 2. Making press releases related to corporate action programs;*
- 3. Doing Injourney branding through the media;*
- 4. Carry out duties as media relations & media monitoring;*
- 5. Create internal media;*
- 6. Develop sponsorship programs;*
- 7. Compile Company Profile;*
- 8. Collaborating on communication programs with Sub Holding;*
- 9. Support the communication program of the Ministry of SOEs;*
- 10. Prepare the Board of Commissioners Charter/ Charter and Board of Directors Charter;*
- 11. Compiling Manual Boards*
- 12. Involved in the preparation of Good Corporate Governance (GCG) Guidelines;*
- 13. Develop Code of Ethics Guidelines;*
- 14. Conducting Self-Assessment;*
- 15. Running the mail administration process using the e-office application;*
- 16. Prepare the standard for the application process for signing a letter by the Board of Directors;*
- 17. Provide company needs on a regular basis.*
- 18. Build and maintain relationships with stakeholders to support the company's business processes.*
- 19. Carry out Social and Environmental Responsibility activities as well as monitoring and evaluation.*



Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Unit Audit Internal merupakan organ yang bekerja untuk melaksanakan sistem pengendalian internal Perusahaan. Kinerja Unit Audit Internal berada di bawah pengawasan Direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Di tahun 2021, terdapat 2 orang yang menjadi Unit Audit Internal. Terdiri atas Internal Auditor Team Leader dan Senior Auditor. Dengan demikian, pada Laporan Tahun 2021 belum dapat disampaikan informasi terkait profil Vice President of Internal Audit dan struktur organisasi Unit Audit Internal. Pembentukan Unit Audit Internal yang baru dilakukan pada akhir tahun 2021 menyebabkan informasi terkait pengembangan kompetensi dan realisasi kinerja tahun 2021 juga tidak dapat disampaikan.

Sertifikasi Unit Audit Internal

Sebagai fungsi pengawas di lingkup internal Perusahaan, Unit Audit Internal telah melaksanakan sejumlah sertifikasi guna mengoptimalkan pengawasan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Sertifikasi yang diikuti oleh Unit Internal Audit yaitu:

The Internal Audit Unit is an organ that works to implement the Company's internal control system. The performance of the Internal Audit Unit is under the supervision of the Board of Directors in carrying out its supervisory function. In 2021, there are 2 people who become the Internal Audit Unit. Consists of Internal Auditor Team Leader and Senior Auditor. Thus, the 2021 Report has not yet been able to convey information regarding the profile of the Vice President of Internal Audit and the organizational structure of the Internal Audit Unit. The formation of the Internal Audit Unit which was only carried out at the end of 2021 caused information related to competency development and realization of performance in 2021 also to be unable to be conveyed.

Internal Audit Unit Certification

As a supervisory function within the Company's internal scope, the Internal Audit Unit has carried out a number of certifications to optimize supervision in accordance with applicable regulations and standards. The certifications followed by the Internal Audit Unit are:

Nama Peserta Participant Name	Jabatan Position	Tanggal Sertifikasi Certification Date	Nama Sertifikasi & Penyelenggara Certification Name & Organizer
Muhammad Saktioko	Internal Auditor Team Leader	12 Okt 2017 <i>October, 12 2017</i>	Certified Information System Auditor (CISA) dari Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
		25 Sep 2014 <i>September, 25 2014</i>	Dasar Dasar Audit dari PPAK STAN <i>Fundamentals of Auditing from PPAK STAN</i>
Minda Aviani	Senior Auditor	2019	QIA Tingkat Dasar <i>Basic QIA</i>



Piagam Unit Audit Internal dan Kode Etik Auditor

Pembentukan Piagam Internal Audit disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Surat Peraturan Direksi Nomor PER.005/INJOURNEY/03/2022. Unit Audit Internal diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan Kode Etik Auditor dan Piagam Internal Audit yang telah disusun Perusahaan. Piagam Internal Audit berisi tentang pedoman dan panduan bagi Unit Audit Internal terkait pelaksanaan tugas pengawasan. Adapun isi dari Piagam Unit Audit Internal memuat tentang:

1. Pendahuluan: berisi latar belakang, visi, dan misi Audit Internal;
2. Organisasi: terdiri atas struktur dan kedudukan, fungsi, wewenang, larangan, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, serta dukungan;
3. Ruang lingkup tugas dan jaminan kualitas;
4. Standar pelaksanaan penugasan;
5. Pola hubungan kerja antara Auditor Internal dengan Direktur Utama, Direksi, Audit, Auditor Eksternal, Komite Audit, dan Anak Perusahaan/Afiliasi.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal yaitu:

1. Mengelola kegiatan pengawasan melalui penjamin dan konsultasi di seluruh unit kerja Perseroan, anak perusahaan, dan entitas lain dimana perusahaan memiliki kendali dan/atau kepentingan;
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unit Audit Internal;
3. Mengevaluasi dan melaporkan secara periodik kepada Direktur Utama serta Dewan Komisaris melalui Komite Audit, atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), manajemen risiko, dan pengendalian internal;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas pada seluruh unit kerja dalam organisasi perusahaan, anak perusahaan, serta entitas lain dimana perusahaan memiliki kendali dan/atau kepentingan;

Internal Audit Unit Charter and Auditor Code of Ethics

The establishment of the Internal Audit Charter was approved by the Board of Commissioners through the Board of Directors' Decree Number PER.005/INJOURNEY/03/2022. The Internal Audit Unit is required to work in accordance with the Auditor's Code of Ethics and the Internal Audit Charter that has been prepared by the Company. The Internal Audit Charter contains guidelines and guidelines for the Internal Audit Unit regarding the implementation of supervisory duties. The contents of the Internal Audit Unit Charter contain:

1. *Introduction: contains the background, vision, and mission of Internal Audit;*
2. *Organization: consists of structure and position, function, authority, prohibition, requirements, appointment and dismissal, and support;*
3. *Scope of work and quality assurance;*
4. *Standard of assignment implementation;*
5. *The pattern of working relationships between Internal Auditors and the President Director, Directors, Auditees, External Auditors, Audit Committees, and Subsidiaries/Affiliates.*

Description of Internal Audit Unit Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit are:

1. *Manage supervisory activities through assurance and consultation in all work units of the company, subsidiaries, and other entities in which the company has control and/or interest;*
2. *Develop and implement the Annual Supervision Work Program (PKPT) and the Work Plan and Budget (RKA) of the Internal Audit Unit;*
3. *Evaluate and report periodically to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee, on the implementation of good corporate governance (GCG), risk management, and internal control;*
4. *Conduct inspections and assessments of the efficiency and effectiveness of all work units within the company's organization, subsidiaries, and other entities in which the company has control and/or interest;*



5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada seluruh tingkatan manajemen;
6. Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil kegiatan audit internal dan eksternal yang telah disarankan kepada auditi;
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan;
8. Melaksanakan penugasan asuran, konsultasi, dan investigasi sesuai dengan ruang lingkup penugasan;
9. Melaksanakan penugasan lain atas permintaan dan perintah oleh Direktur Utama.

5. *Provide suggestions for improvement and objective information on the audited activities at all levels of management;*
6. *Monitor and report on the implementation of follow-up on the results of internal and external audit activities that have been suggested to the auditee;*
7. *Develop a program to evaluate the quality of the Internal Audit activities carried out;*
8. *Carry out the assignment of assurance, consultation, and investigation in accordance with the scope of the assignment;*
9. *Carry out other assignments at the request and orders of the President Director.*

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Penerapan Sistem Pengendalian Internal merupakan sebuah cerminan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan adanya Sistem Pengendalian Internal, Injourney telah meminimalisasi potensi tindak kecurangan (fraud) di lingkup internal, melaksanakan bisnis secara efektif dan efisien, serta taat terhadap hukum dan prosedur tata kelola perusahaan yang berlaku. Sistem Pengendalian Internal di Injourney mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 Pasal 26 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

The implementation of the Internal Control System is a reflection of good corporate governance. With the Internal Control System, Injourney has minimized the potential for fraud in the internal sphere, carried out business effectively and efficiently, and complied with applicable laws and corporate governance procedures. The Internal Control System in Injourney refers to the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 Article 26 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Dalam upaya menjamin implementasi rencana keuangan dan operasional dapat berjalan dengan baik, Injourney memiliki sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional. Pengendalian Keuangan dan Operasional Perusahaan melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Insan Injourney untuk berpedoman pada prinsip-prinsip Internal Control-Integrated Framework yang diterbitkan oleh The Committee of Sponsoring Organization (COSO) of the Treadway Commission. Prinsip-prinsip COSO mencakup:

1. Mengamankan aset (security objectives);

Financial and Operational Control

In an effort to ensure the implementation of financial and operational plans can run well, Injourney has a Financial and Operational Control system. The Company's Financial and Operational Control involves the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all Injourney Personnel to be guided by the principles of the Internal Control-Integrated Framework published by The Committee of Sponsoring Organization (COSO) of the Treadway Commission. COSO principles include:

1. *Securing assets (security objectives);*

2. Berupaya melakukan operasi Perusahaan yang efisien dan efektif (operational objectives);
3. Mengembangkan keandalan dan kelengkapan informasi akuntansi/finansial dan manajemen (information objectives); dan
4. Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance objectives).

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan belum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal karena penerapan sistem pengendalian internal baru akan efektif berlaku pada tahun 2022.

2. *Strive to conduct efficient and effective Company operations (operational objectives);*
3. *Develop the reliability and completeness of accounting/financial and management information (information objectives); and*
4. *Ensure compliance with policies and procedures as well as applicable laws and regulations (compliance objectives).*

Evaluation of Internal Control System Implementation

The company has not evaluated the implementation of the internal control system because the implementation of the new internal control system will be effective in 2022.

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko di Injourney mengacu pada Peraturan Direksi Nomor PER.004/INJOURNEY/12/2021 tentang Pedoman Manajemen Risiko PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero). Penetapan dan pelaksanaan sistem Manajemen Risiko di PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) mengacu kepada sistem dan struktur Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000:2018 tentang Manajemen Risiko. Tujuan adanya Sistem Manajemen Risiko bagi Perusahaan mencakup:

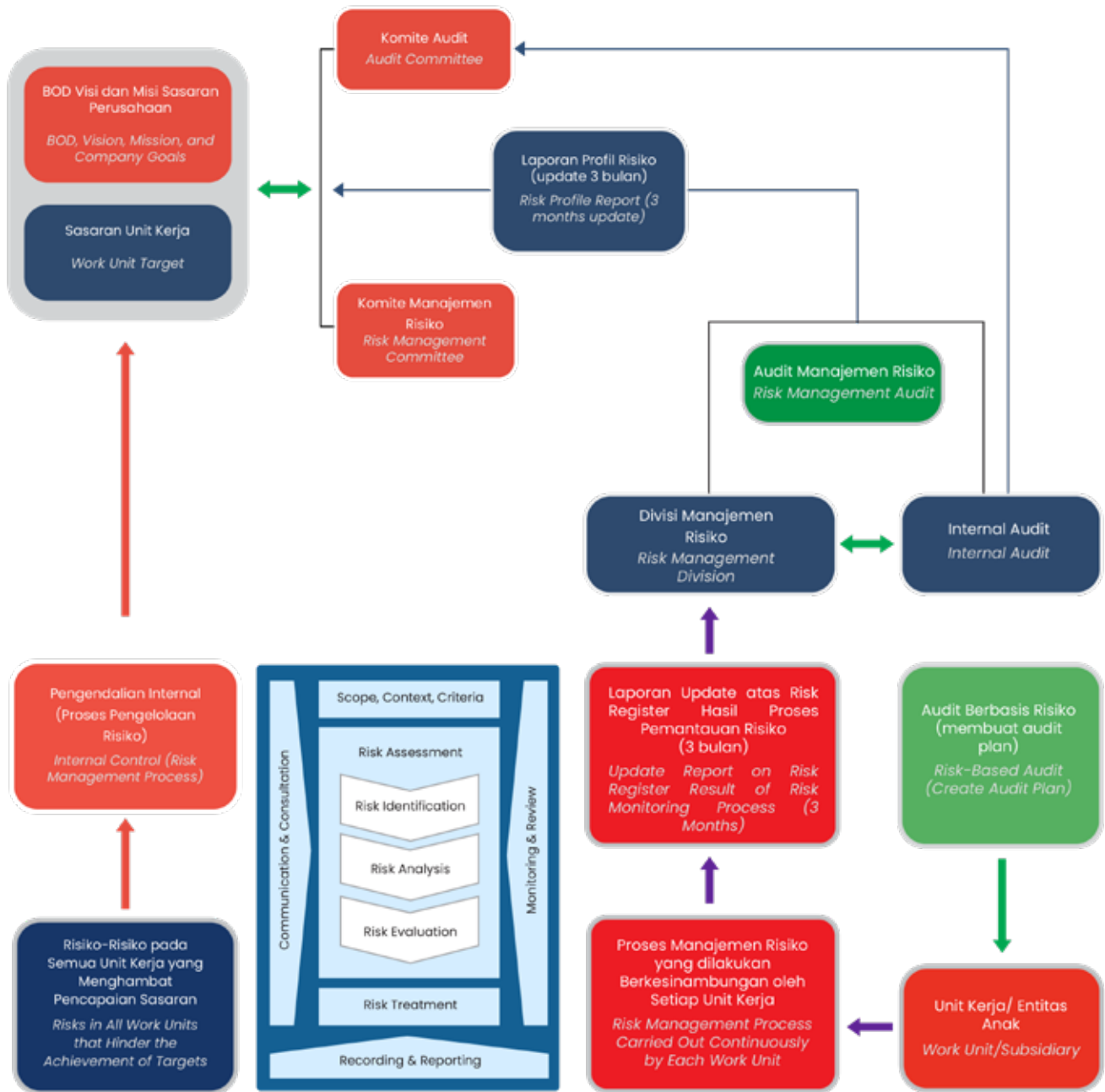
1. Memberikan arah dalam penerapan Manajemen Risiko mulai dari identifikasi, pengukuran, penentuan perlakuan, pelaksanaan Aktivitas Pengendalian (Control), Komunikasi, dan Pemantauan (Monitoring);
2. Sebagai media pengembangan, sosialisasi, dan penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko dan peraturan pendukung lainnya dalam bidang Manajemen Risiko secara berkala;
3. Sebagai panduan bagi Internal Audit dalam melaksanakan Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit).

The implementation of the Risk Management System at Injourney refers to the Board of Directors Regulation Number PER.004/INJOURNEY/12/2021 concerning the Risk Management Guidelines for PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero). The establishment and implementation of the Risk Management system at PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) refers to the system and structure of the Indonesian National Standard (SNI) ISO 31000:2018 regarding Risk Management. The objectives of the Risk Management System for the Company include:

1. *Provide direction in the application of Risk Management starting from identification, measurement, determination of treatment, implementation of Control, Communication, and Monitoring Activities;*
2. *As a medium for the development, dissemination, and improvement of Risk Management Policies and other supporting regulations in the field of Risk Management on a regular basis;*
3. *As a guide for Internal Audit in carrying out a Risk Based Audit (Risk Based Audit).*

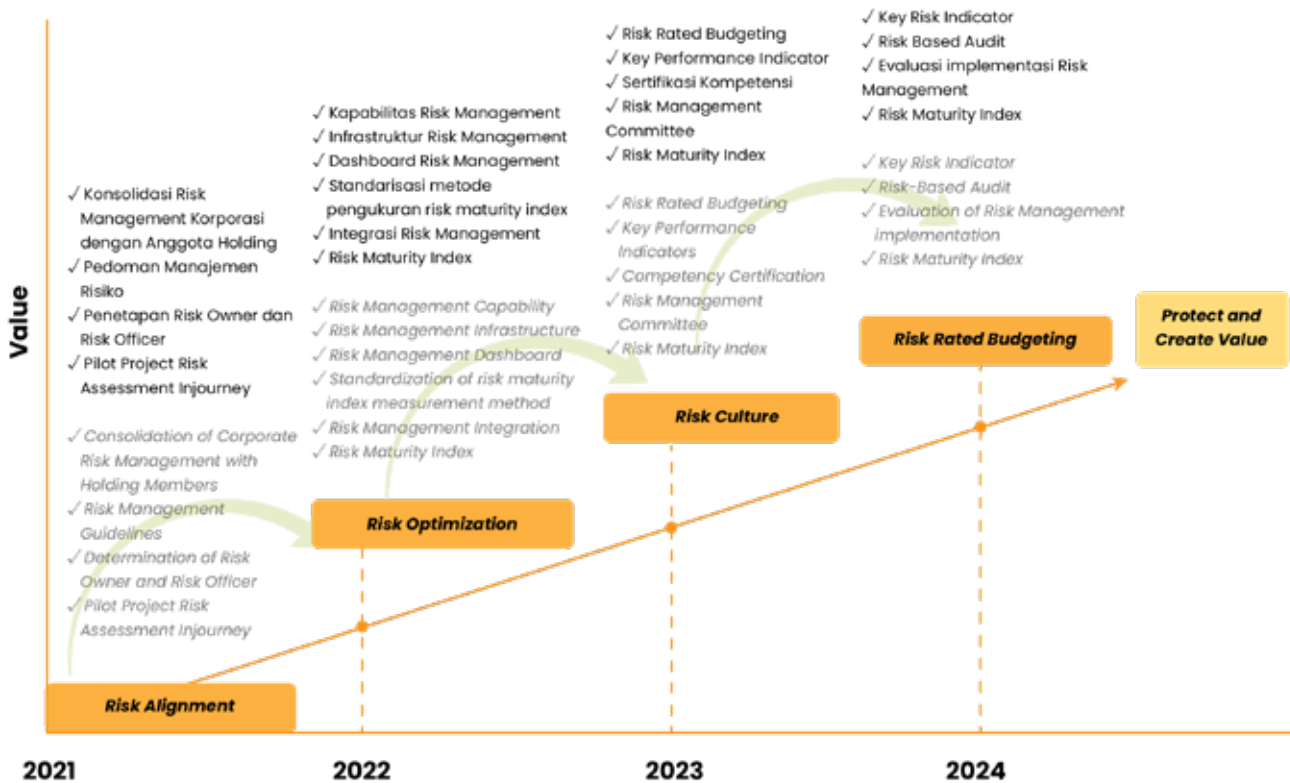


Alur Sistem Manajemen Risiko Injourney
Injourney Risk Management System Flow



Tidak hanya membentuk alur sistem manajemen risiko, Injourney juga telah menyusun Roadmap Risk Management untuk periode tahun 2021 – 2024.

Not only forming a risk management system flow, Injourney has also compiled a Risk Management Roadmap for the period 2021 – 2024.



Profil Risiko dan Pengelolaannya

Pengelolaan risiko dilakukan sesuai dengan aturan PER.004/INJOURNEY/12/2021 tentang Pedoman Manajemen Risiko PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) dimana semua unit menjalankan fungsi dan tugas sesuai peran yang tertuang dalam pedoman dimaksud dari mulai penetapan prinsip, kerangka kerja, sampai dengan proses manajemen risiko.

Pengelolaan dilakukan melalui sinergi dari mulai identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko serta proses monitoring dan pelaporan seluruh member Injourney untuk selanjutnya diagregasi ke dalam satu frame yang menjadi representasi dari Injourney secara grup.

Pengesahan pembentukan perusahaan yang terjadi di Q4 tahun 2021 membuat Injourney berfokus pada penyelesaian isu-isu risiko terutama internal process. Sehingga isu-isu strategis akan diselesaikan perusahaan pada tahun 2022. Unit Manajemen Risiko telah memetakan berbagai profil risiko yang dihadapi Injourney di tahun 2021 melalui paparan berikut.

Risk Profile and Management

Risk management is carried out in accordance with the rules PER.004/INJOURNEY/12/2021 concerning the Risk Management Guidelines for PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) where all units carry out their functions and duties according to the roles contained in the guidelines, starting from the establishment of principles, frameworks, up to risk management process.

Management is carried out through synergies starting from risk identification, risk analysis, and risk evaluation as well as the monitoring and reporting process for all Injourney members to be further aggregated into a single frame that represents Injourney as a group.

The approval of the company formation that took place in Q4 2021 made Injourney focus on resolving risk issues, especially internal processes. So that the company's strategic issues will be resolved in 2022. The Risk Management Unit has mapped out various risk profiles faced by Injourney in 2021 through the following explanation.



Matriks Analisis Risiko <i>Risk Analysis Matrix</i>		Dampak <i>Impact</i>				
		Kecil (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Mayor (4)	Ekstrim (5)
		<i>Insignificant (1)</i>	<i>Minor (2)</i>	<i>Moderate (3)</i>	<i>Major (4)</i>	<i>Extreme (5)</i>
Kemungkinan <i>Possibility</i>	Terus menerus (5) <i>Always (5)</i>	5	10	15	20	25
	Sering (4) <i>Often (4)</i>	4	8	12	16	20
	Kadang-kadang (3) <i>Sometimes (3)</i>	3	6	9	12	15
	Tidak biasa (2) <i>Rarely (2)</i>	2	4	6	8	10
	Jarang (1) <i>Almost Never (1)</i>	1	2	3	4	5

Risk Appetite

Risk Tolerance

Realisasi capaian risiko residual tahun 2021 untuk top 10 risiko adalah 100%. Dari Top 10 risiko yang diidentifikasi pada tahun 2021 Realisasi risiko residualnya adalah sebagai berikut:

- 60% (6 risiko) berada pada batas toleransi (Risk Tolerance);
- 30% (3 Risiko) berada pada selera risiko (Risk Appetite);
- 10 % (1 risiko) berada di atas batas toleransi yaitu risiko terkait target pendapatan anak usaha PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko.

The realization of residual risk achievement in 2021 for the top 10 risks is 100%.

Of the Top 10 risks identified in 2021, the residual risk realization is as follows:

- *60% (6 risks) is within Risk Tolerance;*
- *30% (3 risks) is within Risk Appetite;*
- *10% (1 risk) is above Risk Tolerance, namely the risk related to the revenue target of subsidiary, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko*

Unit Manajemen Risiko juga telah memetakan 10 risiko yang berdampak pada perusahaan di tahun 2021 yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

The Risk Management Unit has also mapped 10 risks that will impact the company in 2021 which can be seen in the following table.





No	Kode Risiko Risk Code	Jenis Risiko Risk Type	Deskripsi Risiko Risk Description	Tingkat Risiko RKAP 2021 Revisi Risk Level of RKAP 2021 Revised
1	API-001	Risiko Operasional <i>Operational Risk</i>	Kesulitan pemenuhan kewajiban Perusahaan <i>Difficulty in fulfilling the Company's obligations</i>	High
2	API - 003	Risiko Keuangan <i>Financial Risk</i>	Tertundanya penerimaan pendapatan dari mitra usaha <i>Delayed receipt of income from business partners</i>	Extreme High
3	API - 004	Risiko Keuangan <i>Financial Risk</i>	Penurunan trafik <i>Traffic drop</i>	Extreme High
4	AP2 - 001	Risiko Keuangan <i>Financial Risk</i>	Risiko terganggunya likuiditas perusahaan <i>Risk of disruption of company liquidity</i>	Extreme High
5	AP2 - 002	Risiko Keuangan <i>Financial Risk</i>	Risiko tidak tercapainya EBITDA <i>Risk of not achieving EBITDA</i>	High
6	AP2 - 003	Risiko Keuangan <i>Financial Risk</i>	Risiko penurunan pendapatan karena melonjaknya kembali kasus COVID-19 (Gelombang 3) <i>Risk of falling revenue due to the resurgence of COVID-19 cases (Wave 3)</i>	High
7	TDC - 001	Risiko Keuangan <i>Financial Risk</i>	Tidak tercapainya target pendapatan <i>Not achieving the revenue target</i>	High
8	TWC - 006	Risiko Keuangan <i>Financial Risk</i>	Target pendapatan anak usaha tidak tercapai <i>Subsidiary income target is not achieved</i>	High
9	SRH - 008	Risiko Keuangan <i>Financial Risk</i>	Ketidaktercapaian pemenuhan atas omset penjualan impor <i>Non-fulfillment of import sales turnover</i>	High
10	HIN - 004	Risiko Keuangan <i>Financial Risk</i>	Gagal bayar hutang perusahaan <i>Failed to pay company debt</i>	Extreme High



Risiko Residual 2021		Keterangan
Residual Risk 2021		
Rencana	Realisasi	Information
Plan	Realization	
Medium	Medium	Telah dibuat kebijakan perpanjangan <i>Term of Payment</i> pada Vendor/Pihak ketiga <i>Term of Payment extension policy has been made to Vendors/Third Parties</i>
Medium	Medium	Telah dibuat kesepakatan penyelesaian pembayaran PSC dengan beberapa <i>airline</i> dan IATA <i>PSC payment settlement agreements have been made with several airlines and IATA</i>
Extreme High	Low	Capaian trafik tahun 2021 adalah 10% diatas RKAP revisi, dari target 25,9 juta pax tercapai 28,5 juta Pax. <i>Traffic achievement in 2021 is 10% above the revised RKAP, from the target of 25.9 million Pax reached 28.5 million Pax.</i>
High Risk	Medium	Realisasi pendapatan tahun 2021 2% diatas RKAP revisi serta realisasi fasilitas pembiayaan dari Bank Mandiri sebesar Rp400 miliar <i>Realized revenue in 2021 2% above the revised RKAP and realization of financing facilities from Bank Mandiri of Rp400 billion</i>
Medium	Low	EBITDA (excl CKPN Garuda) terealisasi Rp606,635 miliar lebih baik 160,7% dari EBITDA yang dianggarkan pada RKAP Revisi <i>EBITDA (excl CKPN Garuda) realized Rp606.635 billion, 160.7% better than the EBITDA budgeted in the Revised RKAP</i>
Medium	Medium	Pendapatan Usaha Tahun 2021 terealisasi Rp5,447 triliun atau tercapai 2% di atas RKAP Revisi <i>Operating Income in 2021 realized IDR 5.447 trillion or achieved 2% above the Revised RKAP</i>
High	Low	Realisasi pendapatan tahun 2021 adalah 25% di atas RKAP revisi dari target Rp258 miliar tercapai Rp323 miliar <i>Realized revenue in 2021 is 25% above the revised RKAP from the target of IDR 258 billion, reaching IDR 323 billion</i>
High	High	Target pendapatan anak usaha hanya tercapai 66% dari RKAP <i>The subsidiary's income target is only 66% of the RKAP</i>
Medium	Medium	Perdagangan (+64,0M): penjualan yang lebih tinggi pada bisnis impor beras (+102,2M) dan ekspor (+0,6M). Akan tetapi penjualan yang lebih rendah pada bisnis impor sakarin (-9,8M), <i>import duty free</i> (-28,9M), dan distribusi (-0,2M) <i>Trade (+64.0M): higher sales in rice import (+102.2M) and export (+0.6M) businesses. However, lower sales in saccharin import business (-9.8M), import duty free (-28.9M), and distribution (-0.2M)</i>
High	Medium	Pada Tahun 2021 Perusahaan telah melakukan Novasi atas Pinjaman-Pinjaman Jangka Pendek dan Jangka Panjangnya atas Hutang Bank Kredit Investasi dan <i>Medium Term Notes</i> (MTN IV dan V) serta Novasi atas utang-utang Kontraktor serta sewa lahan Nusa Dua dengan ITDC <i>In 2021 the Company has made a Novation of its Short-Term and Long-Term Loans on Investment Bank Loans and Medium Term Notes (MTN IV and V) as well as Novation of Contractors' debts and Nusa Dua land lease with ITDC</i>



Review atas Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko diwajibkan untuk melaksanakan review berkala sebagai upaya antisipasi terhadap berbagai perubahan situasi, kondisi, dan perkembangan eksternal dan internal Perusahaan. Selain itu, Komite Manajemen Risiko juga mengkaji tingkat efektivitas penerapan Sistem Manajemen Risiko melalui upaya berikut:

1. Metodologi Asesmen Risiko (Risk Assessment);
2. Implementasi sistem informasi Manajemen Risiko;
3. Ketepatan kebijakan, pedoman, prosedur, instruksi kerja dan penetapan Selera Risiko (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance).

Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa Sistem Manajemen Risiko di Injourney telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang berlaku. Setiap member memiliki risiko yang berbeda sesuai dengan industri yang dijalankan mengingat Injourney adalah Holding Pariwisata dan Pendukung yang terdiri dari beberapa perusahaan dengan bisnis beragam. Pengelompokan taksonomi risiko dilakukan berdasarkan analisis atas ukuran dan kompleksitas masing-masing anggota yang menghasilkan standar – standar dalam menentukan efektivitas tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internalnya.

Review on Risk Management

The Risk Management Committee is required to carry out periodic reviews as an effort to anticipate various changes in the Company's external and internal situations, conditions, and developments. In addition, the Risk Management Committee also reviews the effectiveness of the implementation of the Risk Management System through the following efforts:

1. Risk Assessment Methodology (Risk Assessment);
2. Implementation of the Risk Management information system;
3. Accuracy of policies, guidelines, procedures, work instructions and determination of Risk Appetite and Risk Tolerance.

The Board of Commissioners and the Board of Directors consider that the Risk Management System at Injourney has been running well and in accordance with applicable regulations and procedures. Each member has different risks according to the industry they run, considering that Injourney is a Tourism and Support Holding which consists of several companies with diverse businesses. Risk taxonomy is grouped based on an analysis of the size and complexity of each member which produces standards in determining the effectiveness of risk management governance and internal control.

Perkara Penting

Important Matters

Selama tahun 2021 tidak terdapat kasus perkara penting yang dihadapi oleh Injourney.

During 2021 there were no important cases faced by Injourney.

Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

Injourney tidak menerima sanksi administratif baik yang diberatkan kepada Perusahaan, Dewan Komisaris, dan Direksi yang diberikan oleh otoritas pasar modal, perbankan, dan otoritas lain selama tahun 2021.

Injourney did not receive any administrative sanctions either imposed on the Company, the Board of Commissioners, and the Board of Directors given by the capital market, banking and other authorities during 2021.

Kode Etik

Code of Ethics

Pedoman Perilaku atau kode etik merupakan sebuah standar bagi insan Injourney untuk berperilaku dalam menjalankan bisnis perusahaan. Kode etik di Injourney memegang peranan penting baik dalam kegiatan usaha di lingkup internal maupun dalam memberikan standar pelayanan pariwisata Indonesia bagi wisatawan sejalan dengan visi dan misi Perusahaan.

The Code of Conduct or code of ethics is a standard for Injourney people to behave in running the company's business. The code of ethics in Injourney plays an important role both in internal business activities and in providing Indonesian tourism service standards for tourists in line with the Company's vision and mission.

Pokok-Pokok Kode Etik

PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) sedang memproses peraturan terkait pokok-pokok kode etik. Sehingga pengungkapan terkait pokok-pokok kode etik baru akan disampaikan pada Laporan tahun 2022.

Code of Conduct

PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) is currently processing regulations related to the points of the code of ethics. So that disclosures related to the points of the new code of ethics will be submitted in the 2022 Report.

Sosialisasi dan Penerapan Kode Etik

Penyebarluasan informasi kode etik perusahaan dilakukan kepada seluruh Insan Injourney melalui tahapan orientasi pegawai baru dan sosialisasi berkala terkait kode etik melalui situs web perusahaan, buku panduan pegawai, dan sign board yang tersebar di setiap wilayah operasional Perusahaan. Lebih jauh lagi, Injourney menjadikan kode etik sebagai budaya berperilaku sehingga Insan Injourney diharapkan mampu menerapkan budaya perilaku tersebut baik di lingkungan internal maupun saat memberikan pelayanan terbaik dalam menjalankan bisnis.

Dissemination and Implementation of the Code of Ethics

Dissemination of information on the company's code of ethics is carried out to all Injourney Personnel through the stages of orientation for new employees and periodic socialization of the code of ethics through the company's website, employee manuals, and sign boards spread across every operational area of the Company. Furthermore, Injourney makes the code of ethics a culture of behavior so that Injourney Personnel are expected to be able to apply this culture of behavior both in the internal environment and when providing the best service in running a business.



Hingga akhir tahun 2021, peraturan terkait kode etik sedang dalam tahap penyusunan. Seluruh peraturan terkait kode etik akan berlaku pada tahun 2022 setelah diresmikan oleh Direksi. Ke depannya, Injourney akan melaksanakan upaya sosialisasi penerapan kode etik baik di lingkup Holding maupun seluruh anak usaha. Sehingga seluruh Insan Injourney akan berpedoman pada kode etik yang terstandarisasi.

Kepatuhan terhadap Kode Etik

Pada penerapan kode etik yang akan berlaku di tahun 2022, Injourney menjamin Seluruh Dewan Komisaris, Direksi, dan Insan Injourney telah mematuhi dan menjalankan kode etik secara berkelanjutan. Injourney juga akan melaksanakan sosialisasi terkait penerapan kode etik di lingkup Holding dan anak usaha. Sehingga nantinya diharapkan realisasi kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct) telah dipahami dan disepakati oleh Perusahaan dan seluruh Insan Injourney.

Until the end of 2021, regulations related to the code of ethics are still in the drafting stage. All regulations related to the code of ethics will take effect in 2022 after being promulgated by the Board of Directors. In the future, Injourney will carry out efforts to socialize the implementation of the code of ethics both within the Holding and all subsidiaries. So that all Injourney Personnel will be guided by a standardized code of ethics.

Compliance with the Code of Ethics

In implementing the code of ethics which will take effect in 2022, Injourney ensures that the entire Board of Commissioners, Board of Directors, and Injourney Personnel have complied and implemented the code of ethics in a sustainable manner. Injourney will also carry out socialization related to the implementation of the code of ethics within the Holding and its subsidiaries. So that later it is hoped that the realization of compliance with the Code of Conduct has been understood and agreed upon by the Company and all Injourney Personnel.

Informasi Kepemilikan Saham oleh Karyawan

Shareholding Information by Employees

Kepemilikan saham PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) sepenuhnya merupakan milik Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja baik berupa kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP).

The share ownership of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) is wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, there is no long-term performance-based compensation policy in the form of management stock ownership program (MSOP) and employee stock ownership program (ESOP).

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System atau WBS) PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) dibentuk untuk mendukung terciptanya Good Corporate Governance (GCG). Sistem pelaporan pelanggaran juga menjadi alat mitigasi potensi risiko, menciptakan lingkungan perseroan yang bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta mengatur perilaku etis seluruh insan perusahaan dalam menjalankan/mengelola Perseroan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor PER.005/INJOURNEY/12/2021 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System), penerapan WBS ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi para stakeholder serta insan PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan baik finansial maupun non-finansial yang dapat merusak citra dan keberlangsungan usaha PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero);
2. Sebagai upaya dalam pengungkapan pelanggaran di PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) yang tidak sesuai dengan standar etika dan hukum;
3. Mendorong PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) untuk menghindarkan diri dari tindak kecurangan (fraud), pelanggaran hukum dan pelanggaran etika, serta pelanggaran lainnya karena semakin besar potensi tindakan-tindakan pelanggaran tersebut untuk terdeteksi dan dilaporkan;
4. Tersedianya mekanisme untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum permasalahan tersebut meluas atau menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
5. Mengurangi risiko yang dihadapi PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero), akibat dari terjadinya segala bentuk pelanggaran;
6. Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

Violation Reporting System (Whistleblowing System or WBS) PT Aviassi Tourism Indonesia (Persero) was established to support the creation of Good Corporate Governance (GCG). The violation reporting system is also a means of mitigating potential risks, creating a clean corporate environment from collusion, corruption and nepotism (KKN) practices, and regulating the ethical behavior of all company personnel in running/managing the Company. Based on the Decree of the Board of Directors Number PER.005/INJOURNEY/12/2021 concerning Guidelines for the Whistleblowing System, the implementation of WBS is determined with the following objectives:

- 1. Creating a conducive working climate and becoming a means for stakeholders and PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) people to report things that can cause financial and non-financial losses to the company that can damage the image and business continuity of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero);*
- 2. As an effort to disclose violations at PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) that are not in accordance with ethical and legal standards;*
- 3. Encouraging PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) to avoid fraud, law violations and ethical violations, as well as other violations because the potential for these violations to be detected and reported is greater;*
- 4. Availability of a mechanism to deal with the problem of violations internally first, before the problem expands or becomes a public violation problem;*
- 5. Reducing the risks faced by PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero), resulting from the occurrence of all forms of violations;*
- 6. Realizing Good Corporate Governance (GCG).*



Prosedur Pelaporan Pelanggaran

Tim Pengelola Whistleblowing System menerima seluruh laporan pelanggaran dari setiap Insan Injourney tanpa memandang tingkat jabatan, gender, dan Unit/Divisi tertentu. Pelapor wajib melampirkan bukti pelanggaran berupa dokumen, barang bukti, atau bentuk bukti pelanggaran lain yang dapat dilaporkan melalui e-mail wbs.legal@injourney.co.id atau mengirimkan bukti pelanggaran melalui surat yang diberi kode WBS pada sudut kanan atas amplop bukti. Barang bukti tersebut ditujukan kepada Direktur Utama atau Vice President Legal dalam hal terlapor selain Direksi. Apabila terlapor merupakan Direksi, bukti tersebut dapat ditujukan kepada Komisaris Utama dan dikirimkan ke alamat perusahaan berikut:

Violation Reporting Procedure

The Whistleblowing System Management Team receives all reports of violations from each Injourney Personnel regardless of position level, gender, and certain Unit/Division. The reporter is required to attach evidence of violation in the form of documents, evidence, or other forms of evidence of violation that can be reported via e-mail at wbs.legal@injourney.co.id or send evidence of violation by letter with the code WBS in the upper right corner of the evidence envelope. The evidence is addressed to the President Director or Vice President Legal in the event that the reported party is other than the Board of Directors. If the reported party is a member of the Board of Directors, the evidence can be addressed to the President Commissioner and sent to the following company address:

PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)

Gedung Sarinah Lantai 14
Sarinah Building 14th Floor
Jl. MH Thamrin No.11, Jakarta Pusat, 10350
MH Thamrin Street 11th, Central Jakarta 10350

Selain menyerahkan barang bukti, untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, pelapor juga diwajibkan menempuh langkah berikut:

- a) Memberikan informasi terkait data diri, sedikitnya memuat alamat, nomor telepon, facsimile atau alamat e-mail (dengan opsi pelapor sebagai anonim);
- b) Memberikan informasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan mencakup masalah yang diadukan, pihak yang terlibat, lokasi kejadian, waktu kejadian, kronologi dugaan kasus pelanggaran dan bukti, informasi terkait pelaporan kasus baik yang pernah disampaikan kepada orang atau pihak lain, serta informasi apakah kasus serupa pernah terjadi.

In addition to submitting evidence, to speed up and simplify the follow-up process for complaints, the complainant is also required to take the following steps:

- a) *Provide information related to personal data, at least containing the address, telephone number, facsimile or e-mail address (with the option of reporting as anonymous);*
- b) *Provide initial information that can be accounted for including the problem being complained of, the parties involved, the location of the incident, the time of the incident, the chronology of the alleged violation cases and evidence, information related to reporting cases that have been submitted to other people or parties, as well as information on whether similar cases have occurred.*



Injourney menjamin kerahasiaan identitas pelapor, materi isi laporan, dan keamanan dari segala bentuk ancaman yang dapat terjadi. Kami menjamin perlindungan bagi pelapor dari berbagai perlakuan yang merugikan berupa pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi, pelecehan ataupun tindak diskriminasi. Seluruh jaminan perlindungan tersebut telah diatur dalam Keputusan Direksi Nomor PER.005/INJOURNEY/12/2021. Pihak telapor juga memperoleh hak yang sama selama proses tindak lanjut dugaan pelanggaran. Selama belum terdapat putusan terhadap tindak pelanggaran yang terjadi, pihak telapor juga memiliki jaminan kerahasiaan identitas, azas praduga tak bersalah, dan hak pembelaan atas bukti pelanggaran yang ditemukan.

Penanganan Pengaduan

Tim Pengelola Whistleblowing System dapat memproses sejumlah bentuk pengaduan yang dilaporkan seluruh insan Injourney. Jenis-jenis pengaduan yang dapat dilaporkan melalui WBS yaitu:

1. Penyalahgunaan fasilitas Perusahaan;
2. Pengancaman;
3. Penyelewengan uang Perusahaan;
4. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kepentingan lain di luar Perusahaan;
5. Penggelapan aset Perusahaan;
6. Penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi;
7. Pelanggaran etika dan perbuatan asusila;
8. Pembocoran rahasia Perusahaan;
9. Pemerasan;
10. Pencurian;
11. Penipuan;
12. Kecurangan;
13. Pelanggaran disiplin;
14. Benturan kepentingan;
15. Korupsi.

Injourney guarantees the confidentiality of the reporter's identity, the content of the report, and security from all forms of threats that may occur. We guarantee protection for whistleblowers from various adverse treatments in the form of unfair dismissal, demotion or promotion, intimidation, harassment or discrimination. The entire guarantee of protection has been regulated in the Decree of the Board of Directors Number PER.005/INJOURNEY/12/2021. The reported party also has the same rights during the follow-up process for the alleged violation. As long as there is no decision on the violation that has occurred, the reported party also has a guarantee of identity confidentiality, the principle of presumption of innocence, and the right to defend the evidence of the violation found.

The handling of complaints

The Whistleblowing System Management Team can process a number of complaints that are reported by all Injourney personnel. The types of complaints that can be reported through the WBS are:

1. *Misuse of Company facilities;*
2. *Threats;*
3. *Misappropriation of Company money;*
4. *Misuse of position for personal or group interests or other interests outside the Company;*
5. *embezzlement of Company assets;*
6. *Acceptance, giving, and requesting gratuities;*
7. *Violation of ethics and immoral acts;*
8. *Disclosure of Company secrets;*
9. *Extortion;*
10. *Theft;*
11. *Fraud;*
12. *Fraud;*
13. *Discipline violations;*
14. *Conflict of interest;*
15. *Corruption.*



Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pengelolaan pengaduan dilakukan oleh Tim Pengelola Whistle Blowing Sistem yang penunjukannya dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor PER.005/INJOURNEY/12/2021 Tim Pengelola Whistle Blowing System terdiri atas pengarah dan pelaksana. Tim pengarah dipimpin oleh Dewan Komisaris sebagai Pengawas dan Direksi sebagai Penanggung Jawab. Sementara itu tim pelaksana tersusun atas Vice President of Internal Auditor sebagai ketua, Vice President of Legal sebagai Wakil Ketua, dan Vice President of Human Capital Business Partner sebagai Administrator yang mengelola berbagai pengaduan yang diterima.

Complaints Managing Parties

The management of complaints is carried out by the Whistle Blowing System Management Team, the appointment of which is based on the Decree of the Board of Directors Number PER.005/INJOURNEY/12/2021. The Whistle Blowing System Management Team consists of directors and implementers. The steering team is led by the Board of Commissioners as the Supervisor and the Board of Directors as the Person in Charge. Meanwhile, the implementation team consists of the Vice President of Internal Auditor as chairman, Vice President of Legal as Deputy Chair, and Vice President of Human Capital Business Partner as Administrator who manages various complaints received.

Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pengelola Whistleblowing System Membership Structure and Duties of the Whistleblowing System Management Team

No	Susunan Anggota Membership	Kedudukan dalam Tim Team Position	Penjelasan Tugas Anggota Penjelasan Tugas Anggota
1	Pengarah/ <i>Director</i>		
2	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Pengawas <i>Supervisor</i>	Mengawasi dan memberikan nasihat atas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) <i>Supervise and provide advice on the implementation of the Whistleblowing System (Whistleblowing System)</i>
3	Direksi <i>Directors</i>	Penanggung Jawab <i>Person Responsible</i>	Memutuskan tindak lanjut penanganan pelaporan yang disampaikan Pelaksana <i>Deciding on the follow-up to the handling of reports submitted by the Executor</i>
4	Pelaksana/ <i>Executor</i>		
5	Vice President of Internal Auditor <i>Vice President of Internal Auditor</i>	Ketua <i>Chairman</i>	a) Bertanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran yang dilakukan Pelapor; b) Mengakomodir anggota dalam melaksanakan tugas. <i>a) Responsible for following up on reports of violations committed by the Whistleblower;</i> <i>b) Accommodating members in carrying out their duties.</i>
6	Vice President of Legal <i>Vice President of Legal</i>	Wakil Ketua <i>Vice Chairman</i>	
7	Vice President of Human Capital Business Partner <i>Vice President of Human Capital Business Partner</i>	Administrator <i>Administrator</i>	a) Menerima setiap pelaporan dugaan pelanggaran; b) Melakukan validasi dan verifikasi terhadap laporan berupa data pelapor dan unsur <i>what, where, when, who, how</i> (4W1H); c) Mengadministrasikan dokumen pelaporan dugaan pelanggaran. <i>a) Receive any reports of alleged violations;</i> <i>b) Validate and verify reports in the form of reporting data and elements of what, where, when, who, how (4W1H);</i> <i>c) Administering documents for reporting alleged violations.</i>



Hasil Penanganan Pengaduan

Tim Pengelola Whistleblowing System membuat laporan setiap enam bulan sekali kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Komisaris Utama dan Direksi. Tidak terdapat pengaduan pelanggaran selama tahun 2021. Untuk itu, tidak terdapat informasi terkait penyelesaian pengaduan.

Seluruh member Injourney memiliki berbagai tingkat maturitas manajemen risiko yang berbeda. Pada hasil pemetaan yang dilakukan Unit Manajemen Risiko, anak usaha yang telah memenuhi tingkat maturitas manajemen risiko yaitu Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Ke depannya, Injourney akan melakukan penilaian maturitas manajemen risiko menggunakan parameter yang standar. Sehingga holding dapat mengetahui risk maturity index pada setiap anak perusahaan.

Complaint Handling Results

The Whistleblowing System Management Team makes a report every six months to the President Director and copied to the President Commissioner and the Board of Directors. There were no complaints of violations during 2021. For this reason, there is no information regarding the settlement of complaints.

All Injourney members have different levels of risk management maturity. Based on the results of the mapping conducted by the Risk Management Unit, the subsidiaries that have met the risk management maturity level are Angkasa Pura I and Angkasa Pura II. In the future, Injourney will conduct a risk management maturity assessment using standard parameters. So that the holding can find out the risk maturity index for each subsidiary.

Kebijakan Anti-korupsi

Anti-corruption Policy

Injourney meyakini bahwa penguatan pemahaman bisnis yang beretika diperlukan sebagai landasan dasar bagi seluruh Insan Injourney dalam menjalankan bisnis yang sehat. Meskipun baru memulai kegiatan operasional sejak Oktober 2021, Injourney telah menekankan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Insan Injourney untuk senantiasa menjunjung tinggi persaingan kerja yang adil, bisnis berintegritas, profesionalisme, serta menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG). Injourney menaati kebijakan anti korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Injourney menjunjung tinggi segala kepentingan perusahaan dengan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, mengesampingkan kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok atau golongan tertentu.

Di tahun 2021, Injourney belum dapat melaporkan informasi terkait kebijakan, program, prosedur pengaduan, pelatihan, dan sosialisasi terkait anti-korupsi. Hal tersebut disebabkan karena Injourney merupakan perusahaan yang baru terbentuk pada akhir tahun 2021. Kebijakan anti-korupsi Injourney belum masuk ke dalam program quick wins terkait peraturan perusahaan. Meski demikian, kebijakan anti-korupsi akan masuk tahap drafting pada tahun 2022.

Injourney believes that strengthening ethical business understanding is needed as the basic foundation for all Injourney Personnel in running a healthy business. Although only starting operational activities since October 2021, Injourney has emphasized the Board of Commissioners, Board of Directors, and all Injourney Personnel to always uphold fair work competition, business with integrity, professionalism, and conduct business in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Injourney complies with the anti-corruption policy based on Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Injourney upholds all the interests of the company by avoiding all forms of actions that can cause conflicts of interest, overriding personal, family, and certain groups or groups' interests.

In 2021, Injourney has not been able to report information related to anti-corruption policies, programs, complaints procedures, training, and outreach. This is because Injourney is a company that was only formed at the end of 2021. Injourney's anti-corruption policy has not been included in the quick wins program related to company regulations. However, the anti-corruption policy will enter the drafting stage in 2022.



06

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility

“Berdampak pada seluruh pemangku kepentingan menjadi dasar Injourney untuk terus tumbuh dan berbagi manfaat”

“Giving impact to all stakeholders is the basis for Injourney to continue growing and sharing benefits with others.”





Kebijakan dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Injourney

Injourney's Social and Environmental Policy and Responsibility

Injourney merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu, Injourney berupaya memenuhi segala kebijakan yang telah ditentukan Pemerintah dalam tata kelola perusahaan, termasuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Melalui realisasi program TJSL, Injourney tidak hanya berupaya memenuhi kewajiban sebagai BUMN yang taat pada regulasi. Namun, Injourney juga berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam upaya mewujudkan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The Agenda 2030 for Sustainable Development*) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kementerian BUMN telah menetapkan langkah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan melibatkan seluruh Badan Usaha Milik Negara untuk berpartisipasi.

Di tahun 2021, Injourney telah menentukan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) yang berfokus pada 8 tujuan. Selain berfokus pada 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Injourney turut melaksanakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 baik di lingkup holding, anak usaha, wilayah operasional, serta di lingkup masyarakat luas.

Injourney is a part of a State-Owned Enterprise (SOE). Hence, it strives to fulfill each requirement from the government in term of corporate governance, including the program of Social and Environmental Responsibility (TJSL). Through this program, Injourney does not only strive to fulfill government policy as an SOE that is obedient to the regulation. But it also strives to give benefits to the public and environment.

In its virtue to realize the Agenda 2030 for Sustainable Development set by the United Nations (UN), the SOE Ministry has set the steps of Sustainable Development Purpose by involving all SOEs to participate.

In 2021, Injourney has set targets focused on 8 SDGs. Besides these, Injourney has partaken steps in COVID-19 prevention in the environment of holding, subsidiaries, operational areas and the greater public.



Komitmen Tanggung Jawab Sosial di Injourney

Commitment for Social and Environmental Responsibility at Injourney

Di tahun 2021, Injourney sedang dalam proses penyusunan pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penerapan kebijakan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Injourney masih mengikuti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Seluruh anak usaha Injourney di tahun 2021 masih melaksanakan komitmen terkait tanggung jawab sosial secara terpisah sesuai dengan kebijakan yang berlaku di masing-masing perusahaan.

In 2021, Injourney is on its way to formulate guidelines for Social and Environmental Responsibilities (TJSL). Policy implementation related to TJSL at Injourney still follows the SOE Ministry Regulation No. PER-5/MBU/04/2021 on SOE Social and Environmental Responsibilities. All subsidiaries of Injourney in 2021 still apply commitments related to social responsibilities separately according to the prevailing policies in each company.

Metode dan Ruang Lingkup *Due Diligence* terhadap Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan

Due Diligence Method and Coverage Area on Social, Economic and Environmental Impacts from the Company Activities

Injourney belum secara khusus melaksanakan pengukuran *due diligence* untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Ke depannya, Injourney akan berupaya untuk terus melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan dalam merumuskan program TJSL. Dengan mempertimbangkan pendapat para Pemangku Kepentingan, Injourney berharap akan mampu menciptakan program TJSL yang terarah dan tepat sasaran.

Injourney has yet to specifically conduct measurement of due diligence in the Social and Environmental Responsibilities (TJSL) Program. Going forward, Injourney will strive to continue involving every stakeholder in formulating TJSL Program. By considering their inputs and opinions, Injourney hopes to create a well directed and on-target TJSL program.



Pemangku Kepentingan yang Terdampak Kegiatan Perusahaan

Stakeholders Affected by the Company Activities

Injourney memahami bahwa kegiatan usaha di seluruh wilayah operasional akan memberikan dampak bagi Para Pemangku Kepentingan. Untuk itu, menjalin hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan merupakan sebuah langkah menciptakan lingkungan kerja yang harmonis di tengah masyarakat. Lebih jauh lagi, Injourney berharap dapat melibatkan Pemangku Kepentingan khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasi untuk mampu berkontribusi dalam rantai bisnis Injourney sesuai kompetensi yang dimiliki tiap individu.

Injourney belum melaksanakan identifikasi terhadap pemangku kepentingan di tahun 2021. Ke depannya, Injourney akan melakukan identifikasi pemangku kepentingan di lingkup usaha Injourney dengan melibatkan anak usaha.

Injourney understands company activities in every operational area would affect Stakeholders. So having good relationship with all stakeholders is an important step to creating harmonious work environment in the society. Furthermore, Injourney hopes to involve all Stakeholders, especially the public in the company operational area surroundings to be able to contribute in the Injourney business chain according to each personnel's competency.

Injourney has yet to conduct stakeholders' identification in 2021. Going forward, Injourney will identify them together with its subsidiaries.

Praktik Operasi yang Adil

Fair Operational Activities

Kebijakan

Praktik operasi yang adil direalisasikan Injourney melalui Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*), Pedoman Good Corporate Governance (GCG), *Board Manual*, dan *whistleblowing system* (WBS).

Sasaran

Injourney berupaya melaksanakan penerapan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil di lingkup perusahaan dengan lingkup sasaran program antara lain para pemegang saham, para pemangku kepentingan, dan Insan Injourney.

Realisasi Kegiatan Praktik Operasi yang Adil

Pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS)

Injourney menerapkan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai upaya menghindari tindak fraud di lingkup holding dan seluruh anak usaha. Meskipun belum memiliki WBS yang terintegrasi, Injourney memastikan bahwa tata kelola WBS telah diterapkan di seluruh lingkup Injourney Group. Ke depannya, Injourney akan mengembangkan WBS terintegrasi. Sehingga penanganan kasus WBS di lingkup Injourney dapat dilakukan secara seragam. Informasi terkait WBS diungkapkan lebih lengkap dalam laporan ini pada halaman 269 - 274

Persaingan yang Jujur dan Adil

Injourney berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat dengan menerapkan persaingan yang jujur dan adil di setiap lini bisnis perusahaan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Injourney menentang keras segala bentuk kecurangan dalam perusahaan.

Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM)

Human Rights Practice

Kebijakan

Dalam penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), Injourney menjunjung tinggi ketentuan hukum dan prinsip terkait HAM yang berkaitan erat dengan hak asasi karyawan. Penerapan HAM di lingkup Injourney berdasar pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antar Perusahaan dan Insan Injourney.

Policy

Injourney practises fair operational activities through Company Code of Conduct, Code of Good Corporate Governance (COCG), Board Manual, and Whistleblowing System (WBS).

Target

Injourney strives to do social responsibility related to fair practice in the company environment with target coverage, among others: shareholders, stakeholders, and personnel of Injourney. Realisasi Kegiatan Praktik Operasi yang Adil

Realization of Fair Operational Activities through Whistleblowing System (WBS)

Practice of Whistleblowing System (WBS)

Injourney implements Whistleblowing System (WBS) as effort to avoid fraud in the area of the holding and every subsidiary. Despite not having integrated WBS system yet, Injourney ensures that WBS governance has been practised in all operational areas of Injourney Group. Moving forward, Injourney will develop integrated WBS. So that WBS can be practised uniformly in Injourney. Information related to WBS is further elaborated on page 269 - 274 of this report.

Honest and Fair Competition

Injourney continues to create healthy business climate by practising honest and fair competition in every line of its business. In line with the Law No. 5/1999 on Prohibition of Monopoly Practise and Unhealthy Business Competition, Injourney strongly rejects any form of foul practice in the company.

Policy

In practising the human rights, Injourney upholds legal terms and principles related to human rights of the employees. The practice refers to Mutual Work Agreement (PKB) between the company and the Injourney personnel.



Sasaran

Tanggung jawab dalam penerapan Hak Asasi Manusia berdampak terhadap seluruh Insan Injourney.

Realisasi Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM)

Penerapan HAM dituangkan melalui Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berisi tentang pemenuhan hak dan kewajiban, baik hak atas imbal balik yang telah disepakati, hak cuti, hak untuk berserikat dan terlibat dalam beberapa keputusan khususnya menyangkut ketenagakerjaan dan K3, atau kewajiban yang mengikat karyawan.

Lingkungan Hidup

Environment

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup meliputi pengelolaan energi, penggunaan air, pengelolaan limbah padat dan cair, serta penghijauan. Di tahun 2021, Injourney belum memiliki kebijakan terkait lingkungan hidup. Injourney juga belum melaksanakan pengukuran terhadap penggunaan energi, air, pengelolaan limbah, dan upaya penghijauan. Pengukuran dan penerapan TJSI bidang lingkungan hidup pada anak perusahaan dilaksanakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing perusahaan.

Ketenagakerjaan

Manpower

Kebijakan

Injourney memahami bahwa perlindungan terhadap hakseluruh Insan Injourney nantinya akan berdampak pada hubungan kerja yang harmonis dan dapat menciptakan sinergi berkelanjutan antar perusahaan dan karyawan. Dalam bidang ketenagakerjaan, Injourney merealisasikan perlindungan terhadap kesetaraan gender dan kesempatan kerja, kesetaraan memperoleh pendidikan dan pelatihan, hubungan industrial, dan remunerasi.

Sasaran

Penerapan TJSI bidang ketenagakerjaan menyasar seluruh Insan Injourney sebagai penerima manfaat

Target

The responsibility to uphold human rights target to impact all Injourney personnel.

Realization of Human Rights Practice

Practice of human rights is regulated in Company Regulation and Mutual Work Agreement (PKB), consisting of fulfillment of rights and responsibilities, be it rights on the agreed paybacks, rights for leave, rights to form union and rights to participate in some decisions, especially related to manpower and K3 or responsibilities that bind employees.

Based on the Law No. 32/2009 on Environment Protection and Management, the efforts to manage environment include management of energy, water, solid and liquid waste and reforestation and greeneries. In 2021, Injourney has yet produce a policy pertaining to the environment. Injourney also has not implemented measurement related to the implementation of TJSI as it is conducted separately according to prevailing policy in each company.

Policy

Injourney understands that rights protection for all Injourney personnel would result in a harmonious work environment and sustainable synergy between the company and employees. In terms of manpower, Injourney practised gender equality and provides equal opportunities for work, education and training enhancement, industrial relation, and remuneration.

Target

TJSI implementation related to employees' targets to affect all Injourney personnel as benefit receivers.



Realisasi TJSL Ketenagakerjaan

- Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja**
 Injourney menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam setiap praktik bisnisnya. Seluruh Insan Injourney memiliki kesempatan yang setara dalam bekerja tanpa memandang gender, suku, agama, dan kondisi fisik. Dalam proses perekrutan karyawan, Injourney menggunakan indikator hasil seleksi, kemampuan tiap individu, dan kebutuhan perusahaan dengan tetap menerapkan prinsip kesetaraan.
- Kesetaraan Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan**
 Seluruh Insan Injourney memiliki kesempatan yang setara dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sesuai peminatan setiap individu. Injourney tengah merencanakan pembentukan aplikasi *talent management* dan *career path system* yang dapat menganalisa kebutuhan organisasi dengan rencana karir karyawan, menentukan pola pembinaan karyawan, tersedianya karyawan dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, serta menjaga motivasi karyawan untuk terus berani mengembangkan karir.

Realization of Manpower Related TJSL

- Equality in Gender and Work Opportunity**
Injourney upholds equality principle in every business practice. Every Injourney personnel has equal opportunity to work regardless gender, race, religion, and physical condition. In the process of employee recruitment, Injourney uses selection result indication, skills of each personnel and the needs of the company by sticking to the principle of equality.
- Equality in Obtaining Education and Training**
Each Injourney person has an equal opportunity in developing and enhancing competency according to each of their interest. Injourney is in the middle of developing application for talent management and career path system which would analyze organization need with employees' career plans, determine employees guide pattern, provide employees' with suitable competency that the company needs, and maintain their motivation to continue being courageous in developing career.



- **Hubungan Industrial**

Hubungan industrial di InJourney diwujudkan melalui surat perjanjian kerja yang ditandatangani pihak perwakilan perusahaan dan karyawan pada saat memulai hubungan kerja.

- **Remunerasi**

InJourney memastikan bahwa pemberian remunerasi pada Insan InJourney memperhatikan prinsip yang sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku, kompetensi individu, capaian kinerja, serta tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada tiap individu.

- **Industrial Relations**

Industrial relation at InJourney is implemented through work agreement letter signed by the company representative and employee when commencing the work relation.

- **Remuneration**

InJourney ensures the remuneration for InJourney personnel puts into regards principles those are in line with the prevailing law, each of their competencies, work performance as well as duties and responsibilities given to them.

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Social and Public Development

InJourney melakukan realisasi program TJSL dengan melibatkan seluruh anak usaha. Pengungkapan realisasi program TJSL dalam Laporan Tahun 2021 merupakan program yang telah dijalankan oleh anak usaha. Realisasi TJSL ini dibedakan menjadi 4 pilar yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola. Selain memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya di sekitar wilayah operasional holding dan anak usaha, InJourney juga memiliki program TJSL bagi seluruh Insan InJourney sebagai penerima manfaat.

InJourney realizes TJSL program by involving all subsidiaries. The disclosure of TJSL program realization in 2021 Report is programs run by the subsidiaries. The realization is differentiated into 4 pillars: social pillar, economic pillar, environmental pillar, legal and governance pillar. Besides giving benefits for the surrounding public, especially in the area of the holding and subsidiaries operations, InJourney also has TJSL program for every InJourney personnel as benefit receiver.

Realisasi Program TJSL Pilar Sosial

Social Pillar in TJSL Program Realization

Bidang Pendidikan / Education Field

1. Program Beasiswa Diploma III Pariwisata Tahun 2021

InJourney melalui anak usaha Angkasa Pura I memberikan kesempatan bagi siswa dan siswi berprestasi untuk memperoleh beasiswa penuh berkuliah di Universitas Mataram Lombok di jurusan pariwisata konsentrasi kebandarudaraan. Selain beasiswa, fasilitas pengembangan diri berupa kursus Bahasa Inggris, program pembinaan mental, fisik, dan disiplin, bakti sosial, pembinaan *soft skill*, dan keagamaan juga diberikan untuk meningkatkan kemampuan siswa. Di tahun 2021 terdapat 58 mahasiswa penerima manfaat program beasiswa yang diseleksi melalui 2 gelombang terdiri atas 29 orang per gelombang seleksi. Melalui program beasiswa ini, Angkasa Pura I telah merealisasikan dana sebesar Rp3,7 miliar.

1. Diploma III Scholarship Program in Tourism Year 2021

InJourney through subsidiary Angkasa Pura I gives opportunity for outstanding students to receive full scholarship in Mataram Lombok University with Tourism Major specialized in airport management. Besides scholarship, the students are also given self development programs in form of English Course, development programs related to mental, physical and discipline, social service, soft skill, and religion to enhance their capacity. In 2021, there are 58 students receiving this scholarship selected in 2 batches comprising 29 people per batch. Through this program, Angkasa Pura I has disbursed fund of Rp 3.7 billion.

2. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Bersama FHCI

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat merupakan program anak usaha Injourney yaitu Angkasa Pura I. Magang Mahasiswa Bersertifikat dilaksanakan selama 6 bulan menjalin kerja sama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dalam proses perekrutan mahasiswa magang. Pada gelombang 1 program magang mahasiswa, terdapat 5 mahasiswa yang lolos dan ditempatkan di wilayah kerja Angkasa Pura I. Sementara itu, untuk program magang gelombang 2, terdapat 8 mahasiswa yang lolos dan akan ditempatkan di wilayah kerja Angkasa Pura I pada Oktober 2021 hingga April 2022.

2. Undergraduate Certified Internship Program with FHCI

Undergraduate Certified Internship Program is a program of Injourney subsidiary, Angkasa Pura I. It is a 6-month program cooperating with Forum Human Capital Indonesia (FHCI) for the recruitment process. In the selection process batch I, there are 5 undergraduate students who pass the selection and are placed in Angkasa Pura I work areas. Meanwhile in the selection batch 2, there are 8 who pass the process and are placed in the Angkasa Pura I work areas in the October 2021 to April 2022 period.

3. Program Magang Praktek Kerja Lapangan, Magang Reguler, Magang Fresh Graduate, dan On Job Training

Angkasa Pura I memiliki beberapa program magang yang dibedakan berdasarkan golongan pendidikan dan jangka waktu magang. Program praktek kerja lapangan dikhususkan bagi siswa SMA/SMK sederajat dengan masa magang mulai dari satu hingga tiga bulan. Program magang reguler diberikan kepada mahasiswa D3-S1 yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan masa magang minimal tiga bulan hingga enam bulan yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan mahasiswa ataupun perusahaan. Sementara itu, untuk *On Job Training* dikhususkan bagi siswa Taruna dari institusi pendidikan Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) dan Politeknik Penerbangan yang berlangsung selama enam bulan.

3. Field Practice Internship Program, Regular Internship, Fresh Graduate Internship and On the Job Training.

Angkasa Pura I has several internship programs differed based on the educational background and internship duration. Field practice is specifically for graduates from high school/vocational school or the level with internship length from one to three months. Regular internship program is for Diploma III – Bachelor students coming from state and private universities with duration of a minimum three to six months, which could be extended according to the students' or company's needs. Meanwhile, On the Job Training is specifically for cadets of Indonesia Aviation Polytechnic (PPI) and Aviation Polytechnic for six months.

4. Bantuan Beasiswa untuk Sekolah Rakyat Angkasa Pura II;

Pendidikan & Latihan Kebandarudaraan *Cargo Handling* di Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug Tangerang yang dilaksanakan selama 8 hari dari tanggal 6 Desember 2021 sampai 13 Desember 2021 yang diikuti oleh 25 peserta dari 4 Bandara yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Kualanamu, Husein Sastranegara yang direkrut dari lulusan SLTA, *Fresh Graduate*, dan berprestasi di lingkungan sekitar Bandara.

4. Scholarship Assistance for Public School of Angkasa Pura II

Education and Training on Cargo Handling in Indonesia Aviation Polytechnic (PPI) Curug Tangerang held for 8 days from 6 December 2021 to 13 December 2021, attended by 25 participants from 4 Airports, namely Soekarno-Hatta Airport, Halim Perdanakusuma, Kualanamu, Husein Sastranegara recruited among high school graduates, fresh graduates, and outstanding students in the airport surroundings.

5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Masyarakat

Injourney menyadari bahwa pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat begitu penting. Melalui program pengembangan sarana dan

5. Development of Public Education Facility and Infrastructure

Injourney realizes that quality education for the public is very important. Through development program of public education facility and



prasarana pendidikan yang direalisasikan oleh anak usaha, Angkasa Pura II. Injourney berupaya mendukung para pelajar untuk memberikan bantuan fasilitas pendidikan. Di tahun 2021, anak usaha Injourney telah melakukan upaya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat dengan memberikan bantuan laptop untuk menunjang kegiatan belajar bagi siswa disabilitas di Aceh dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta UIN Serang, bantuan material untuk SDN 10926 Sidodadi Ramunia dan SDN 101918 Kualanamu, serta bantuan pembangunan ruang kelas SMA Cendekia Bandung.

6. Pengembangan Keterampilan Masyarakat

Selain memberikan bantuan pendidikan formal, anak usaha Injourney merealisasikan sejumlah program pengembangan keterampilan bagi masyarakat. Dengan adanya program pengembangan keterampilan bagi masyarakat, Injourney berharap masyarakat dapat mengembangkan potensi secara mandiri dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun program keterampilan masyarakat yang diberikan sepanjang tahun 2021, yaitu:

- Program Pendampingan & Pelatihan Kampung Ramah Anak di Dusun Sabrangowo Borobudur;
- Program Pendampingan & Pelatihan Asah Talenta untuk anak-anak pelaku wisata di Borobudur;
- Program Siswa Inovatif di SMK Negeri 1 Kalasan;
- Pelatihan Santriwati Perempuan Anak Generasi Kemajuan Utama.

7. Pembinaan Narapidana

Melalui anak usaha Angkasa Pura I, Injourney mendukung program pembinaan narapidana di Lapas IIA Salemba dengan memberikan bantuan pengadaan alat pertukangan dan las. Pengadaan alat pertukangan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh narapidana dalam mengasah keterampilan sehingga mampu melanjutkan kehidupan yang lebih baik selepas masa hukuman selesai.

Bidang Kesehatan / Health Field

1. Program Pelayanan Kesehatan Keliling

Program Layanan Kesehatan Keliling merupakan salah satu program TJSL unggulan di Angkasa Pura I. Fokus dari program layanan kesehatan keliling yaitu mendukung peningkatan umur harapan hidup ibu hamil,

infrastructure realized by the subsidiary, Angkasa Pura II. Injourney strives to support the students through education facility. In 2021, Injourney subsidiary donate laptops to help the study process for the disabled students in Aceh and Sultan Ageng Tirtayasa University as well as in UIN Serang; material donation for State Elementary School SDN 10926 Sidodadi Ramunia and SDN 101918 Kualanamu as well as assistance to build classrooms in high school SMA Cendekia Bandung.

6. Community Competency Development

Besides helping through formal education, Injourney subsidiaries hold a number of public competency development programs, through which it hopes the public could develop their potentials independently and it could benefit the people. The programs along 2021 are:

- *Child Friendly Village Monitoring & Training in Sabrangowo Borobudur Village*
- *Talent Sharpening Monitoring & Training for tourism practitioners' children in Borobudur*
- *Innovative Student Program at state vocational school SMK Negeri 1 Kalasan*
- *Training for female Islamic school students Main Advanced Generation*

7. Prison Training

Injourney subsidiary Angkasa Pura I supports prison training for inmates in Lapas IIA Salemba by procuring carpentry and welding tools to enhance training process. It is hoped that the procurement of carpentry tools can be used by the inmates in honing skills so that they are able to continue a better life after the sentence is over.

1. Mobile Health Service Program

The Mobile Health Service Program is one of the leading TJSL programs at Angkasa Pura I. The focus of the mobile health service program is to help increase life expectancy of pregnant women, mothers giving birth, and babies. The



ibu melahirkan, dan bayi. Program layanan kesehatan keliling juga bermanfaat untuk menurunkan angka prevalensi gizi buruk pada bayi dan balita. Lebih jauh lagi, program layanan kesehatan keliling berfokus untuk menjangkau masyarakat yang tidak dicakup oleh layanan kesehatan yang memadai. Sehingga layanan kesehatan yang diberikan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasi Angkasa Pura I. Realisasi program layanan kesehatan keliling di tahun 2021 yaitu Rp1,9 miliar.

2. Bantuan Alat Kesehatan

Program bantuan alat kesehatan dilakukan sebagai upaya anak usaha Injourney dalam memberikan kemudahan bagi kaum difabel untuk mampu menunjang aktivitas sehari-hari. Dalam program ini Injourney telah membagikan sedikitnya 30 unit kursi roda kepada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Riau, bantuan kursi roda *celebral palsy* bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Aceh, dan pemberian bantuan pembuatan kaki palsu untuk pejuang Komando Merah Putih di wilayah Yogyakarta.

3. Sosialisasi Pencegahan & Pengobatan Penyalahgunaan Narkoba diikuti oleh Kaum Milenial di sekitar Bandara Halim Perdanakusuma

Dalam upaya menghindari generasi muda dari penyalahgunaan narkoba, anak usaha Injourney, Angkasa Pura II melakukan program sosialisasi pencegahan & pengobatan penyalahgunaan narkoba menjalin kerja

mobile health service program is also useful to reduce the prevalence of malnutrition in infants and toddlers. Furthermore, the mobile health service program focuses on reaching people who are not covered by adequate health services. So that the health services provided are expected to help the community in improving the quality of public health around the operational area of Angkasa Pura I. The realization of the mobile health service program in 2021 is Rp 1.9 billion.

2. Medical Device Assistance

The medical device assistance program is carried out as an effort by Injourney subsidiary to provide convenience for people with disabilities in their daily activities. In this program, Injourney has distributed at least 30 units of wheelchairs to the Indonesian Association of People with Disabilities (PPDI) Riau Province, assistance for cerebral palsy wheelchairs in collaboration with the Aceh Province Social Service and providing assistance for the manufacture of prosthetic limbs for Komando Merah Putih fighters in the Yogyakarta area.

3. Campaign on Drug Abuse Prevention & Treatment, joined by Millennials around Halim Perdanakusuma Airport

In an effort to prevent the younger generation from drug abuse, Injourney subsidiary, Angkasa Pura II conducts a campaign on the prevention & treatment of drug abuse



sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan LSM Yayasan Rekan Sebaya sebagai pemateri. Acara ini diikuti oleh 50 peserta dengan rentang usia 14 – 23 tahun di lingkup sekitar Bandara Halim Perdanakusuma.

in collaboration with the National Narcotics Agency (BNN) and Rekan Sebaya Foundation as presenters. The event is attended by 50 participants aged 14 – 23 years in the vicinity of Halim Perdanakusuma Airport.

Bantuan Sosial & Kegiatan Keagamaan

Social & Religious Assistance

1. Program Sembako Gratis

Dalam upaya berbagi manfaat kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi, Angkasa Pura I telah merealisasikan bantuan sembako gratis sepanjang tahun 2021. Pada triwulan IV tahun 2021, Angkasa Pura I telah merealisasikan bantuan sembako gratis hingga Rp1,4 miliar. Program sembako gratis diharapkan dapat membantu mengurangi beban ekonomi penerima manfaat. Disamping itu, Angkasa Pura I juga berharap dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di sekitar wilayah kerja perusahaan.

1. Free Nine Staple Food (Sembako)

In an effort to share with the people around the operational area, Angkasa Pura I gives free nine staples along 2021. In the fourth quarter of 2021, it has distributed staples worth Rp 1.4 billion. The program is hoped to reduce economic burden of the families. Besides, Angkasa Pura I also hopes to maintain good relationship with the people and stakeholders around the company business area.

Selain memberikan bantuan sembako gratis di lingkup Angkasa Pura I, Injourney memberikan bantuan sembako bagi masyarakat yang direalisasikan oleh anak usaha, yaitu PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko di sekitar Taman Mini Indonesia Indah (TMII), masyarakat sekitar The Manohara Hotel Yogyakarta, masyarakat

Another Injourney subsidiary, TWC also distributes free staples to people living around Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Manohara Hotel Yogyakarta and around various airports, namely Sultan Thaha, Husein Sastranegara, Kualanamu and Halim Perdanakusuma. Also for members of Opiba (Pedicab Riders Community) in Sleman, orphanages around



sekitar Bandara Sultan Thaha, Bandara Husein Sastranegara, Bandara Kualanamu, Bandara Halim Perdanakusuma, sembako untuk Opiba (Paguyuban Tukang Becak) di Sleman, sembako untuk panti asuhan sekitar wilayah Candi Prambanan, dan 1.000 paket sembako di Jember.

2. Bantuan bagi Korban Bencana

Melalui setiap anak usaha, Injourney merealisasikan bantuan berupa sembako, obat-obatan, vitamin, pakaian layak, dan alat kesehatan diharapkan mampu meringankan beban masyarakat di wilayah bencana seperti gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, Belitung, Jakarta Timur, Tanjung Pinang, Tanjung Pandan, Kota dan Kabupaten Tangerang, Sintang, dan korban kebakaran di Desa Gani Aceh Besar. Selain memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok masyarakat, bantuan juga pemberian bantuan berupa mesin penyedot air bekerja sama dengan PMI Kota Tangerang dan Kelurahan Benda diharapkan mampu membantu masyarakat menanggulangi banjir.

3. Bantuan Kegiatan Keagamaan

Program bantuan kegiatan keagamaan diberikan sebagai dukungan Injourney terhadap kenyamanan beribadah bagi masyarakat di lingkup operasi anak usaha. Di tahun 2021 Injourney melalui anak usaha telah memberikan sejumlah bantuan kegiatan keagamaan antara lain berupa bantuan

Candi Prambanan and 1,000 staple packages in Jember.

2. Assistance for Disaster Victims

Through each subsidiary, Injourney distributes assistance in the form of nine staples, medicines, vitamin, proper clothes and medical devices that are hoped to ease people difficulties in disaster areas, such as earthquake in West Sulawesi, flood in South Kalimantan, Belitung, East Jakarta, Tanjung Pinang, Tanjung Pandan, Tangerang City and Regency, Sintang and fire in Gani Aceh Besar Village. Besides staples, assistance also comes in the form of water pump, in collaboration with Tangerang Indonesian Red Cross (PMI) of Tangerang City and Benda Sub District to help tackle flood.

3. Religious Activities Assistance

The religious activity assistance program is provided as Injourney's support for the religious service convenience of the community in the operational area of the subsidiaries. In 2021, Injourney through its subsidiaries has provided a number of assistance for religious activities, including prayer equipment assistance,





peralatan solat, bantuan kegiatan santunan anak yatim, bantuan renovasi Masjid Teknik Universitas Gadjah Mada dan Masjid Boenyamin Universitas Jenderal Soedirman, dukungan kegiatan natal, bantuan renovasi GKJ Gondokusuman Yogyakarta, dan bantuan 40 ekor sapi untuk acara kurban di lingkup Angkasa Pura II.

4. Bantuan Sarana dan Prasarana Umum

Sebagai upaya melibatkan diri dengan masyarakat di sekitar wilayah kerja, Injourney melalui anak usaha merealisasikan sejumlah bantuan sarana dan prasarana umum yang diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat. Adapun bantuan sarana dan prasarana umum yang diberikan yaitu bantuan pembangunan jembatan di Tanjung Pinang, bantuan pembangunan fasilitas umum untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Bekasi dan Desa Borobudur, bantuan fasilitas untuk Warung Naik Kelas di Banyuwangi, bantuan untuk pembangunan Hetero Space Surakarta, bantuan kursi di Kampung Bunyahrejo Yogyakarta, bantuan sumur bor untuk RW 02 Kelurahan Sukaraja, dan bantuan Gedung Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak.

5. Program Sinergi BUMN untuk Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)

Sebagai upaya mendukung kesiapan wilayah Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Injourney melalui PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko bersama BUMN membangun fasilitas Gardu Pandang di Puncak Duwet Desa Ngadiharjo, bantuan kran air siap minum di area wisata Candi Borobudur, dan revitalisasi Toilet Kinara Kinari.

Realisasi Program TJSI Pilar Ekonomi

Economic Pillar in TJSI Program Realization

Program Pengembangan Kapasitas dan Produk UKM *Capacity Development Program and MSMEs Products*

1. Program Pelatihan UMKM

Injourney melalui anak usaha yaitu Angkasa Pura II dan Sarinah memberikan dukungan bagi seluruh UMKM binaan untuk terus mengembangkan produk dan kapasitasnya. Agar mampu bersaing baik dalam skala nasional maupun internasional, secara berkala para pelaku UMKM diberikan sejumlah pelatihan terkait pengembangan kemampuan, pengetahuan tentang kebutuhan pasar, *branding*, metode penjualan daring, serta strategi pemasaran produk. Pada

assistance for orphanage activities, renovation assistance for the Teknik Mosque of Gadjah Mada University and the Boenyamin Mosque of Jenderal Soedirman University, support for Christmas activities, assistance for renovation of GKJ Gondokusuman Yogyakarta, and assistance of 40 cows for sacrificial events within the scope of Angkasa Pura II.

4. Public Facilities and Infrastructure

As an effort to mingle with the surrounding residents, Injourney through subsidiaries provides and constructs public facilities and infrastructures hopes to support the public activities. The assistance is in the form of bridge construction in Tanjung Pinang, public facility construction for Bekasi Penitentiary and Borobudur Village, facility assistance for Warung Naik Kelas (Upgraded Small Shops) in Banyuwangi, assistance for Heterospace construction in Surakarta, chairs procurement in Bunyahrejo Village in Yogyakarta, drilled well construction for RW 02 community in Sukaraja Sub District and assistance of Integrated Child Protection Building.

5. SOE Synergy Program for Super Priority Tourism Destinations (DPSP)

As an effort to support Borobudur areas as one of the Super Priority Tourism Destinations (DPSP), Injourney through PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko cooperating with SOEs builds Viewing Post facility in Puncak Duwet Desa Ngadiharjo, provides drinkable tap water facility in Borobudur Temple area and revitalization of Kinara Kinari Toilet.

1. MSMEs Training Program

Injourney through subsidiary Angkasa Pura II and Sarinah provides trainings for the foster MSMEs (Medium, Small and Micro Enterprises) to continuously develop products and their capacities to be able to compete in the national and international scale. Frequently, the MSMEs practitioners are given a number of training related to competency development, knowledge about market needs, branding, online sales method and product marketing strategy. In 2021, the holding of MSMEs training



tahun 2021, penyelenggaraan pelatihan UMKM dilaksanakan melalui 2 metode yaitu pelatihan daring dan pelatihan langsung. Pelatihan tersebut antara lain:

- Pelatihan *webinar series* "UMKM Bangkit Ekonomi Melejit *Marketing in Crisis, Trick Set-Up* Tampilan Logo/Kemasan Lebih Menarik, Membuat *Brand* Lebih Hidup dengan *Branding Digital* dan Membangun Peta Bisnis dengan *Business Model Canvas*" bekerja sama dengan Rumah BUMN Kota Tangerang;
- Rumah BUMN Kota Tangerang mengadakan pelatihan *online* dengan tema Panduan Promosi dan Berjualan di TikTok;
- Pelatihan dan *workshop* bagi 15 UMKM Mitra Binaan, dengan Tema "Pelatihan Desain dan *Upgrade* Kemasan Produk" pada tanggal 22-23 November 2021 di Hotel Pakons Prime Kota Tangerang;
- Pelatihan dan *workshop copywriting* bagi 32 UMKM Mitra Binaan dan Member Rumah BUMN Kota Tangerang pada tanggal 25 November 2021 di APSPACE Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang;
- Kegiatan Sosialisasi Pasar Digital (PaDi) untuk UMKM secara daring;
- Pelatihan untuk mitra binaan dengan tema "Strategi Digital Entrepreneurship di Masa Pandemi" di Jakarta Timur;
- Mengikutsertakan mitra binaan dalam *sharing session* di Rumah BUMN Yogyakarta;
- Pelatihan Kewirausahaan Pengolahan Pisang Tanduk untuk 33 pelajar dan mahasiswa di Jambi.

is done through 2 methods: online and offline trainings. They are, among others:

- *Webinar training series* "MSMEs Rise, Economy Surpasses Marketing in Crisis, More Attractive Logo/Packaging Set-Up Trick, Making Brands Livelier with Digital Branding and Building Business Plan with Canvas Business Model" cooperating with SOEs House of Tangerang City Administration.
- Tangerang City SOEs Households online training themed Marketing and Sales Guides on TikTok;
- Training and workshop for 15 foster MSMEs themed "Design Training and Product Packaging Upgrade" on 22-23 November 2021 at Hotel Pakons Prime in Tangerang City;
- Copywriting Training and Workshop for 32 foster MSMEs and members of the Tangerang City SOEs House on 25 November 2021 at APSPACE Terminal 3 Soekarno Hatta Airport in Tangerang;
- Campaign on Digital Market (PaDi) for MSMEs, conducted online;
- Training for foster MSMEs themed "Digital Entrepreneurship Strategy during Pandemic" in East Jakarta;
- Involves foster MSMEs in sharing session in Yogyakarta SOEs House;
- Training on Entrepreneurship of Tanduk Banana Processing for 33 students in Jambi



2. Program Bantuan Pendanaan UMKM

Sebagai bentuk dukungan perusahaan pada pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Injourney melalui Angkasa Pura I memberi bantuan berupa pinjaman modal dan hibah pembinaan kepada pelaku UMKM Mitra Binaan. Bantuan pinjaman modal diharapkan dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas produk dan kapasitas usaha. Pada triwulan IV tahun 2021, Angkasa Pura I telah menyalurkan bantuan pinjaman modal sebesar Rp350 juta ke 8 Mitra Binaan dan bantuan pengembangan kapasitas usaha sebesar Rp148 juta.

Selain itu, melalui PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Injourney menyalurkan pinjaman Pendanaan UMK pada 41 mitra binaan dan beberapa sektor usaha di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Karanganyar untuk wilayah Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul serta Kabupaten Sleman untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Program Pameran UMKM

Dalam upaya mempromosikan berbagai produk UMKM binaan, Injourney melalui anak usaha secara rutin menyertakan UMKM binaan dalam sejumlah pameran. Di tahun 2021, pameran yang diikuti UMKM binaan antara lain Pameran Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Ramadhan Fest 1422 H di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Paviliun Ekraft Jambi 2021, Airport Year End Festival 2021, dan Festival Bumi Berdaya yang diinisiasi Rumah BUMN Yogyakarta.

2. MSMEs Funding Program

As a form of company support for MSMEs (Medium, Small and Micro Enterprises), Injourney through Angkasa Pura I provides assistance in the form of capital loans and coaching grants to foster MSMEs. Capital loan assistance is expected to assist MSMEs in improving product quality and business capacity. In the fourth quarter of 2021, Angkasa Pura I has distributed capital loan assistance of Rp 350 million to 8 foster partners and assistance for business capacity development of Rp 148 million.

In addition, through PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan and Ratu Boko, Injourney distributes SMEs (Small and Medium Enterprises) funding loans to 41 foster partners and several business sectors in the Magelang Regency, Klaten Regency and Karanganyar Regency in Central Java and Bantul Regency areas and Sleman Regency in Central Java and Bantul Regency areas.

3. MSMEs Exhibition Program

To promote various products of foster MSMEs, Injourney through subsidiaries regularly involves them in a number of exhibitions. In 2021, exhibitions joined are, among others, Pameran Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia (Local Products Pride Movement Exhibition) at Terminal 3 in Soekarno Hatta Airport, Ramadhan Fest 1422 H at Sultan Mahmud Badaruddin II Airport, Paviliun Ekraft Jambi 2021, Airport Year End Festival 2021, and Festival Bumi Berdaya (Power Earth Festival) initiated by Yogyakarta SOEs House in Special Region of Yogyakarta Province.

Riset dan Pengembangan Teknologi Informasi

Information Technology Research and Development

1. Pekerjaan Pendukung Pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung

Sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor S-761/MBU/09/2020 terkait Arahan Pemegang Saham tentang Pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, Angkasa Pura I melaksanakan sejumlah program strategis dalam mendukung pembentukan Holding

1. Supporting System for the Making of Tourism SOEs Holding and the Support

In line with the Letter of SOEs Ministry No. S-761/MBU/09/2020 related to the Shareholders Direction on the Making of Tourism SOEs Holding and the Support, Angkasa Pura I holds a number of strategic programs to support the realization of the government plan. The



BUMN Pariwisata dan Pendukung. Adapun realisasi kegiatan yang dilaksanakan Angkasa Pura I mencakup pekerjaan jasa konsultasi pembentukan dan kesiapan organisasi, kajian bisnis dan verifikasi aset, jasa konsultasi kajian *PMO*, *Aviation and Travel Recovery Roadmap* dan *Value Capture from Synergies Holding* BUMN Pariwisata dan Pendukung. Angkasa Pura I telah merealisasikan anggaran sebesar Rp12,3 miliar dalam mendukung program pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung.

activities include consultation service on the forming and organization readiness, business analysis and asset verification, consultation service of PMO analysis, Aviation and Travel Recovery Roadmap and Value Capture from Synergies of the Tourism SOEs Holding and the Support. Angkasa Pura I has disbursed budget of Rp 12.3 billion for the programs.



2. Riset dan Inovasi melalui Indonesia Aviation and Tourism Research Institute (IATRI)

Dalam upaya meningkatkan layanan terbaik bagi para pengguna jasa, Angkasa Pura I tergabung dalam Indonesia Aviation and Tourism Research Institute (IATRI) yang bekerja sama dengan 8 BUMN sektor aviasi dan pariwisata. Adapun realisasi program IATRI mencakup launching IATRI, Penyusunan blueprint IATRI, Pembentukan forum komunikasi pengembangan dan pengelolaan riset dan inovasi (struktur organisasi IATRI), dan pembentukan data center IATRI.

3. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi di Wilayah Kerja Angkasa Pura I

Sebagai upaya menjaga kualitas layanan yang dapat mengikuti perkembangan zaman, Angkasa Pura I menerapkan sejumlah inovasi berbasis pengembangan teknologi informasi antara lain implementasi HCIS

2. Research and Innovation through Indonesia Aviation and Tourism Research Institute (IATRI)

To provide best service experience for customers, Angkasa Pura I, joined in the Indonesia Aviation and Tourism Research Institute (IATRI), cooperating with 8 SOEs running in aviation and tourism sector. The realization of the programs include the launching of IATRI, IATRI blueprint making, the forming of communication forum to develop and manage research and innovation (IATRI organization structure) and the making of IATRI data center.

3. Development of Information Technology System in the Angkasa Pura I Working Areas

As an effort to update quality service along with the technology advancement, Angkasa Pura I applies a score of innovation based on information technology, such as implementation of HCIS Advance/



Advance/ Pengembangan aplikasi Great Day, pengembangan aplikasi New TNDE, implementasi SAP *Electronic Payment (e-Payment)*, *re-engineering* infrastruktur jaringan data Angkasa Pura I, design & build *Airport Operation Control Center (AOCC)* di Yogyakarta International Airport, sistem backup data, pengelolaan infrastruktur wifi di 15 bandara, serta pengembangan *mobile application passenger assistant*.

Great Day Application Development, New TNDE application development, implementation of SAP Electronic Payment (e-Payment), infrastructure re-engineering of the Angkasa Pura I data network, design & build Airport Operation Control Center (AOCC) in Yogyakarta International Airport, data backup system, wifi infrastructure management in 15 airports and development of mobile application passenger assistant.

Realisasi Program TJSL Pilar Lingkungan

Environmental Pillar in TJSL Program Realization

Implementasi Energi Surya di Lingkungan Bandara

Penggunaan energi bersih direalisasikan Angkasa Pura I melalui pemanfaatan energi surya sebagai penerangan jalan umum dan perimeter bandar udara. Implementasi *solar energy* dilaksanakan di tiga bandar udara, yaitu Bandar Udara Syamsudin Noor – Banjarmasin yang telah dipasang 620 tiang lampu yang terintegrasi dengan *solar cell* pada area parkir kendaraan roda 4 dan roda 2. Di Bandar Udara Sultan Hasanuddin – Makassar telah dipasang 180 tiang pada area jalan masuk bandar udara dan jalan perimeter airside. Sementara itu, di Bandar Udara Adi Soemarmo – Surakarta penerapan *solar cell* untuk penerangan jalan telah diterapkan di 17 tiang.

Solar Energy Use in the Airport Vicinity

Angkasa Pura I uses clean solar powered energy for public road lighting and airport perimeter road. The use of solar energy is practiced in three airports, including Syamsudin Noor in Banjarmasin that has set 620 light poles integrated with solar cell in car and motorcycles parking areas. Sultan Hasanuddin Airport in Makassar has set 180 light poles on airport entrance road and airside perimeter road. While Adi Soemarmo Airport in Surakarta has applied solar cell powered for road lighting in 17 poles.

Kegiatan Pemantauan Lingkungan

1. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL – RPL)

Setiap 6 bulan sekali, seluruh cabang bandara Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL – RPL) kepada sejumlah Instansi Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab pada sektor lingkungan hidup. Adapun pemantauan yang dilakukan mencakup pemantauan kualitas udara, energi, kebisingan, air, pencemaran tanah, limbah, lingkungan alamiah, serta sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat.

2. Penyusunan Dokumen Lingkungan/ Addendum Dokumen Lingkungan

Dalam proses pengembangan seluruh bandar udara yang dikelola, Angkasa Pura I senantiasa mengurus segala legalitas terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai arahan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4

Environment Monitoring Activity

1. *Management and Monitoring of Environment (RKL – RPL)*

Once in every 6 months, all Branch Airports of PT Angkasa Pura I and PT Angkasa Pura II reports the result of management and monitoring of environment (RKL – RPL) to a number of regional government administration institutions in charge of environment matters. The monitoring is done to check the quality of air, energy, noise, water, soil pollution, waste, natural environment, public condition related to their social situation, economy, culture and health.

2. *Environmental Document/Environmental Document Addendum*

In the development process of all the managed airports, Angkasa Pura I always prepares the legality aspects related to protection and management of environment in line with the direction from the Environment and Forestry Ministry Regulation No. 4/2001

tahun 2021 tentang Daftar Nama dan/atau Usaha Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

on List of Names and/or Business Activities that Must Have Environmental Impact Analysis, Environmental Management and Monitoring Efforts or Statement Letter of Ability to Manage and Monitor Environment.

Aksi Mitigasi <i>Mitigation Action</i>	Ton CO ₂		Keterangan <i>Description</i>
	2021	2020	
Penghijauan <i>Reforestation</i>	341,201	337,638	13 Bandara (SRG, LOP, BPN, BDJ, SOC, JOG, YIA, SUB, AMQ, BIK, DPS, UPG, MDC)
PJU Sollar Cell	953	951	10 Bandara (SRG, BDJ, UPG, KOE, BPN, SOC, JOG, DJJ, SUB, DPS)
Lampu LED <i>LED Lamps</i>	9,871	5,232	15 Bandara
Green Building	14,093	-	YIA
Manajemen Energi <i>Energy Management</i>	8,344		DPS
Total	374,463	343,820	

3. Rencana Aksi Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK)

Sebagai upaya penanganan perubahan iklim pada sektor transportasi, Angkasa Pura I telah melaksanakan upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Rencana aksi yang dilakukan mencakup kegiatan penghijauan, konservasi energi, dan manajemen energi. Angkasa Pura I telah melaksanakan inventarisasi emisi GRK melalui Airport Carbon Emission Reporting Tools (ACERT).

3. Greenhouse Gas Reduction Action Plan

As an endeavor to tackle climate change in transportation sector, Angkasa Pura I has done efforts to reduce greenhouse gas. The action plan done include reforestation, energy conservation and energy management. Angkasa Pura I has done inventory of greenhouse gas emission using Airport Carbon Emission Reporting Tools (ACERT).

Pengelolaan Bahaya Satwa Liar di Bandara dan Sekitar Bandara (*Wildlife Hazard Management*)

Wilayah operasional dan topografi bandara yang beragam menyebabkan berbagai risiko yang dihadapi berbeda-beda. Salah satu masalah dalam kegiatan operasional bandara adalah munculnya satwa liar yang dapat menimbulkan risiko keselamatan penerbangan. Sebagai upaya dalam mengelola bahaya satwa liar di bandara, Angkasa Pura I mengidentifikasi risiko bahaya satwa liar melalui Sistem Manajemen Keselamatan. Melalui Sistem Manajemen Keselamatan, Angkasa Pura I telah memetakan sejumlah bandara yang paling berpotensi terhadap ancaman satwa liar dan berupaya melakukan sejumlah tindak pencegahan gangguan satwa liar di area bandara.

Wildlife Hazard Management

The various operational areas and topography of the airport cause various different risks. One of the problems in airport operational activities is the emergence of wild animals that can pose a risk to flight safety. As an effort to manage wildlife hazards at airports, Angkasa Pura I identifies risks to wildlife hazards through the Safety Management System. With the Safety Management System, Angkasa Pura I has mapped a number of airports that have the most potential wildlife threats and taken a number of precautions to prevent wildlife disturbances in the airport area.



Kegiatan Penghijauan

Injourney dan seluruh anak usaha turut membantu pemerintah dalam berbagai kegiatan penghijauan. Injourney menyadari bahwa lingkungan yang asri pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada masyarakat seperti meningkatkan ekonomi melalui hasil produksi buah-buahan dan meningkatkan daya tarik wisata. Sepanjang tahun 2021, sedikitnya Injourney telah menyalurkan sejumlah bantuan berupa pemberian 4.500 bibit tanaman produktif dan pohon peneduh yang dibagikan kepada masyarakat di Aceh, Pangkal Pinang, Jambi, Taman Indraloka, Pulau Dompok, dan Bantaran Danau Bulakan.

Konservasi Mangrove

Dalam upaya menjaga lingkungan dari ancaman abrasi di wilayah pesisir, Injourney melalui anak usahanya yaitu Angkasa Pura II turut memberikan bantuan berupa bibit mangrove dan melaksanakan upaya penanaman mangrove di sekitar wilayah operasi anak usaha yang berdekatan dengan pesisir antara lain Tajung Pinang, Padang, dan Hutan Percut Sei Tuan Deli Serdang. Injourney memberikan bantuan berupa 15.000 bibit mangrove dalam program konservasi mangrove.

Bantuan Bibit Ikan

Injourney berupaya membantu masyarakat dalam memanfaatkan kegunaan sungai dan danau sebagai area produktif melalui program bantuan bibit ikan. Sedikitnya, bantuan 50.000 bibit ikan telah disebar di Danau Bulakan dan Waduk Jatiluhur.

Reforestation/Greeneries Effort

Injourney and all of its subsidiaries helped the government in various reforestation activities. Injourney realizes that a conserved environment will ultimately provide benefits to the community such as increasing the economy with fruit harvest and adding to the tourist attractions. Throughout 2021, Injourney has distributed a number of aids in the form of the provision of at least 4,500 productive plant seeds and shade trees which are distributed to communities in Aceh, Pangkal Pinang, Jambi, Indraloka Park, Dompok Island, and Bulakan Lake.

Mangrove Conservation

In an attempt to protect the environment from the threat of abrasion in coastal areas, Injourney also provides assistance in the form of mangrove seedlings and carries out mangrove planting activity around the operating areas of subsidiaries adjacent to the coast, including Tajung Pinang, Padang, and the Percut Sei Tuan Deli Serdang Forest. Injourney provides assistance in the form of 15,000 mangrove seedlings in the mangrove conservation program.

Fish Seeds Assistance

Injourney seeks to assist the community in utilizing the use of rivers and lakes as productive areas through a fish seeds assistance program. At least 50,000 fish seeds have been distributed in Bulakan Lake and Jatiluhur Reservoir.



Realisasi Program TJSI Pilar Hukum dan Tata Kelola

Legal and Governance Pillar in TJSI Program Realization

Bantuan Sarana & Prasarana Menjaga Lingkungan

Lingkungan yang bersih dan nyaman akan membantu masyarakat untuk lebih produktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Injourney memberikan sejumlah bantuan berupa 15 titik sarana air bersih di Desa Gintung Cileje Bogor, bantuan akses air bersih bagi masyarakat di Dusun Tunggu Gunung Kidul, bantuan 3 unit motor gerobak sampah bagi Yayasan Sabilul Huda Ar Rahmat Bogor, 3 unit bentro sampah bagi masyarakat di Sumatera Barat, dan bantuan perlengkapan relawan Gunung Rimba Laut (Gurila).

Penilaian (Assessment) GCG Periode Tahun 2020

Assessment GCG telah dilakukan oleh anak usaha Angkasa Pura I secara rutin setiap 2 tahun sekali dalam menilai penerapan GCG di perusahaan. Adapun aspek yang dinilai mencakup komitmen terhadap GCG secara berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta aspek-aspek lainnya. Penilaian GCG pada tahun 2020 mencapai 95,23% dengan predikat sangat baik. Angka penilaian di tahun 2020 meningkat jika dibandingkan dengan periode tahun 2018 yaitu sebesar 91,58%. Ke depannya, assessment GCG juga akan dilaksanakan seluruh anak usaha dan Injourney.

Penilaian Sistem Kepatuhan

Sistem kepatuhan dirancang untuk memantau dan memastikan ketaatan perusahaan terhadap seluruh peraturan yang berlaku. Dengan melakukan penilaian sistem kepatuhan, perusahaan dapat mempersempit dampak risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Di tahun 2021, anak usaha Injourney yaitu Angkasa Pura I memperoleh capaian tingkat kepatuhan korporat sebesar 95,65%. Pada semester II tahun 2021, pelaksanaan sistem kepatuhan terdiri atas pemutakhiran kepatuhan semester II tahun 2021 yang dilaksanakan sejak 24 Desember 2021 hingga 11 Januari 2022, dan penilaian kepatuhan semester II yang dilaksanakan pada Januari 2022.

Facilities & Infrastructure Assistance to Protect the Environment

A clean and comfortable environment will help people to be more productive in living their daily lives. To that end, Injourney provides a number of assistance in the form of 15 points of clean water facilities in Gintung Village, Cileje Bogor, access to clean water for the community in the Dusun Tunggu Gunung Kidul, assistance of 3 units of garbage motor carts for the Sabilul Huda Ar Rahmat Foundation in Bogor, 3 units for trash carts for the communities in West Sumatra, and equipment assistance for Gunung Rimba Laut (Gurila) volunteers.

GCG Assessment for the 2020 Period

The GCG assessment has been carried out by a subsidiary of Angkasa Pura I regularly every 2 years in assessing the implementation of GCG in the company. The aspects assessed include commitment to sustainable GCG, Shareholders and GMS, Board of Commissioners, Directors, Information Disclosure and Transparency, as well as other aspects. The GCG assessment in 2020 reached 95.23% with a very good predicate. The assessment figure in 2020 increased when compared to the 2018 period, which was 91.58%. Going forward, the GCG assessment will also be carried out by all subsidiaries and Injourney.

Compliance System Assessment

The compliance system is designed to monitor and ensure the company's compliance with all applicable regulations. By conducting a compliance system assessment, the company narrows the impact of compliance risk with the laws and regulations. In 2021, Injourney's subsidiary, Angkasa Pura I, achieves a corporate compliance level of 95.65%. In the second semester of 2021, the implementation of the compliance system includes updating the compliance of the second semester of 2021 which will be carried out from 24 December 2021 to 11 January 2022, and the second semester of compliance assessment which will be carried out in January 2022.



Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Unggulan

Featured Social Environmental Responsibility Program

Asah Talenta

Talent Sharpening

Program Asah Talenta merupakan salah satu program TJSL unggulan yang diinisiasi oleh anak usaha Injourney yaitu PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Program Asah Talenta adalah program pendampingan pengembangan bakat talenta yang dikhususkan bagi anak-anak pelaku wisata di kawasan Borobudur dan Prambanan seperti pedagang, kusir andong, pengemudi becak, dan pemandu wisata.

Berlangsung selama 5 bulan, Asah Talenta dilaksanakan dengan menjalain kerja sama bersama Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai pengajar. Materi yang diberikan antara lain adalah pelatihan seni tari dan teater yang dilaksanakan secara rutin antara 2-3 kali seminggu selepas pulang sekolah. Dengan adanya program Asah Talenta, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko berharap dapat mengarahkan minat dan bakat anak-anak pelaku wisata, memperkenalkan anak-anak pada kampus seni, hingga menghasilkan calon talenta bidang seni pertunjukan untuk mendukung pariwisata di Borobudur.

The Talent Sharpening Program is one of the leading TJSL programs initiated by Injourney subsidiaries, namely PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan and Ratu Boko. The program is a talent development mentoring program specifically for children who are tourism practitioners in the Borobudur and Prambanan areas such as traders, horse cart drivers, pedicab drivers, and tour guides.

Lasting for 5 months, Asah Talenta is carried out by collaborating with the Yogyakarta Institute of the Arts as the educator. The material provided includes dance and theater education which is carried out regularly between 2-3 times a week after school. With the Talent Sharpening program, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan and Ratu Boko hope to direct the interests and talents of tourism players, introduce children to art campuses, and produce potential talents in the performing arts sector to support tourism in Borobudur.



Kampung Ramah Anak

Child Friendly Village

Program Kampung Ramah Anak dilaksanakan di Dusun Sabrangrowo, Desa Borobudur yang merupakan program yang bertujuan untuk membentuk lingkungan masyarakat yang ramah anak dan mengembangkan potensi masyarakat dalam bidang pendidikan, sosial, kewirausahaan, dan pariwisata berbasis lokal. Kampung Ramah Anak diharapkan menjadi salah satu daya tarik wisata dengan rencana pengembangan sejumlah fasilitas yaitu taman bacaan masyarakat, *Natural Space Children Garden*, Taman Dolanan Anak Tradisional, Taman Tertib Lalu Lintas, dan Warung Kejujuran.

Lebih jauh lagi, Program Kampung Ramah Anak juga akan memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui pelatihan literasi pembentukan perpustakaan dan taman bacaan, edukasi pola asuh anak bagi ibu rumah tangga, pelatihan pengolahan hasil kebun sebagai produk unggulan, pelatihan *digital marketing*, pembangunan sarana dan prasarana taman bermain anak, *track* sepeda, dan berbagai aktivitas lain yang menunjang pembangunan kampung ramah anak.

The Child Friendly Village Program is implemented in Sabrangrowo Hamlet, Borobudur Village which is a program that aims to form a child-friendly community environment and develop community potential in the fields of education, social, entrepreneurship, and local-based tourism. The Child Friendly Village is expected to become a tourist attraction with plans to develop a number of facilities, namely a community reading park, Natural Space Children's Garden, Traditional Children's Play Park, Traffic Order Park, and Honesty Shop.

Furthermore, the Child Friendly Village Program will also provide assistance to the community through literacy training in the establishment of libraries and reading gardens, parenting education on child care for housewives, training on processing garden products as superior products, digital marketing training, construction of development facilities and infrastructure, such as children's playgrounds, bicycle tracks, and various other activities that support the development of child-friendly villages.

Siswa Inovatif

Injourney melalui anak usahanya, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko merealisasikan program "Siswa Inovatif". Program "Siswa Inovatif" dilaksanakan sebagai upaya memberikan kesempatan bagi siswa khususnya di SMK Negeri 1 Kalasan untuk menunjukkan kemampuan sebagai *entrepreneur* muda yang tangguh dan mandiri. Secara keseluruhan, anggaran yang berhasil direalisasikan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko untuk program TJSL mencapai Rp2,27 miliar atau 103,77% lebih tinggi dari RKA Revisi Tahun 2021.

Innovative Students

Injourney through its subsidiaries, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan and Ratu Boko, has carried out the "Siswa Inovatif" program. The "Siswa Inovatif" program is implemented as an effort to provide opportunities for students, especially at SMK Negeri 1 Kalasan to show their abilities as young tough and independent entrepreneurs. The budget that PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko has successfully disbursed for the TJSL program reaches Rp2.27 billion or 103.77% higher than the 2021 Revised RKA





Sarinah Pandu

Program “Sarinah Pandu” merupakan sebuah program peningkatan kapasitas bagi para pelaku bisnis usaha kecil menengah (UKM). Upaya peningkatan kapasitas bagi pelaku UKM ini menyasar para pelaku usaha/UKM yang dinilai telah siap secara bisnis, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat lebih kepada masyarakat serta konsumen atau pelaku UKM yang telah melakukan bisnis dengan prinsip *triple bottom line* (*Profit, People, Planet*).

Program “Sarinah Pandu” sejalan dengan transformasi bisnis dan *brand* Sarinah dalam meningkatkan kapasitas UMKM agar mampu bersaing dan memikat pasar baik domestik maupun internasional. Sejalan dengan agenda kerja “Sarinah Pandu”, Sarinah meloloskan 20 UMKM pilihan dari kategori *food & beverage*, kosmetik dan perfumeri, *wellness*, *fashion*, dan *art* untuk mengikuti program pelatihan yang akan dilaksanakan pada Maret 2022. Di tahun 2021, Sarinah telah melaksanakan program orientasi bagi peserta “Sarinah Pandu”. Tujuan diadakannya kelas orientasi antara lain untuk menilai kebutuhan peserta dan mengenal lebih jauh peserta dan fasilitator, serta sesi pemberian saran program-program yang diharapkan peserta untuk difasilitasi oleh “Sarinah Pandu”. Sarinah telah menyusun program kerja “Sarinah Pandu” yang akan direalisasikan pada tahun 2022 yang dapat dilihat dalam paparan berikut.

The “Sarinah Pandu” program is a capacity building program for small and medium enterprises (SMEs). Efforts to increase capacity for SMEs are targeting business actors/SMEs who are considered business ready, environmentally friendly, and provide more benefits to the community as well as consumers or SMEs who have been doing business with the triple bottom line principle (Profit, People, Planet).

The “Sarinah Pandu” program is in line with the transformation of Sarinah’s business and brand in increasing the capacity of MSMEs to be able to compete and attract both domestic and international markets. In line with the “Sarinah Pandu” work agenda, Sarinah has passed 20 selected MSMEs from the food & beverage, cosmetics and perfumery, wellness, fashion, and art categories to participate in a training program that will be held in March 2022. In 2021, Sarinah has implemented an orientation program for “Sarinah Pandu” participants. The purpose of holding an orientation class is, among others, to assess the needs of participants and to get to know more about participants and facilitators, as well as a session to provide suggestions for programs that the participants expect “Sarinah Pandu” to facilitate. Sarinah has compiled a work program “Sarinah Pandu” which will be realized in 2022 with the following description.

Program Kerja Sarinah Pandu 2022

Sarinah Pandu Work Program 2022

Sarinah Pandu

Kegiatan dalam rangka menumbuhkembangkan Keunggulan UMKM Nasional dan membumikan Visi, Misi Sarinah

Activities to Develop Potentials of National MSMEs and to do Grounding of Sarinah Vision and Mission

Agenda Kerja Sarinah Pandu 2022

Sarinah Pandu 2022 Work Agenda

3 Batch/tahun
3 Batch/year

1 Batch: 20
UMKM Pilihan
1 Batch: 20
selected MSMEs

UMKM Cross
Category
Cross Category
MSMEs

Narasumber:
Praktisi dan
Instansi Pilihan
Sources:
Practitioners and
Institution of
Choice

Fokus Kepada:
Ritel. Digitalisasi
dan
siap ekspor
Focuses on Retail,
Digitalization and
Export Readiness

Kombinasi kelas
dan
E-Learning
Combination
of Class and
E-Learning

Tujuan Kerja Jangka Panjang Sarinah Pandu

Long Term Work Goals of Sarinah Pandu:

- Meluluskan Produk dan brand UMKM teratas dan terunggul per kategori (F&B, kosmetik dan perfumeri, *weness, fashion, art*) yang akan dikurasi, dipamerkan dan dijual baik secara luring maupun daring pada gerai di dalam maupun luar negeri
- *To pass outstanding MSMEs products and brands per category (food & beverage, cosmetics and perfumery, wellness, fashion, and art) that will be curated, exhibited and sold online and offline in the international and national outlets*
- Menciptakan model dan modul untuk direplikasi dan di *roll out* mitra *onboarder* secara kolaboratif selama program ini di *branded* Sarinah Pandu
- *To create model and study material for replication purpose within onboard roll out scheme as long as the product and brand development is assisted by Sarinah Pandu*

Bersama Menanggulangi COVID-19

Together Tackling COVID-19

Melalui kolaborasi bersama seluruh anak usaha, Injourney berupaya meminimalisasi penyebaran COVID-19. Injourney turut mendukung berbagai kebijakan pemerintah terkait pemutusan persebaran COVID-19 sebagai upaya percepatan ekonomi khususnya pada sektor aviasi dan pariwisata. Injourney membagi berbagai program TJSI untuk menanggulangi COVID-19 dalam 3 upaya yaitu Pencegahan COVID-19 di Lingkup Internal, Pencegahan COVID-19 di Wilayah Operasi, dan Pencegahan COVID-19 di Masyarakat.

Through collaboration with all subsidiaries, Injourney seeks to minimize the spread of COVID-19. Injourney also supports various government policies related to stopping the spread of COVID-19 as an effort to accelerate the economy, especially in the aviation and tourism sectors. Injourney shares various TJSI programs to deal with COVID-19 in 3 attempts, namely COVID-19 Prevention in the Internal Scope, COVID-19 Prevention in Operational Areas, and COVID-19 Prevention in the Community.

Pencegahan COVID-19 di Lingkup Internal

COVID-19 Prevention in Internal Scope

Pemberlakuan Sistem *Work from Home* (WFH) bagi Insan Injourney

Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 masih menghambat aktivitas khususnya di perkantoran. Dalam upaya menghindari persebaran COVID-19 di lingkup kantor, Injourney memberlakukan

Work from Home (WFH) for Injourney Personnel

In 2021, the COVID-19 pandemic will still hamper activities, especially in offices. In an effort to avoid the spread of COVID-19 within the office, Injourney applies a Work from Home (WFH) system for



sistem *Work from Home* (WFH) bagi seluruh Insan Injourney sesuai dengan dasar ketentuan Surat Edaran nomor EDR.001/INJOURNEY/11/2021 tentang Pelaksanaan *Work From Office* (WFO) dan *Work From Anywhere* (WFA) di lingkungan PT Aviata Pariwisata Indonesia (Persero). Penerapan pelaksanaan WFH dilakukan setiap 3 hari dalam satu minggu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan oleh Koordinator *Task Force* Pelaksana Operasional yang diperbarui melalui link <https://bit.ly/AviataEmployeeSchedule>.

Penerapan WFH dan WFA di Injourney serta seluruh anak usaha tidak dapat berlaku sama. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sistem kerja dan aturan perusahaan yang berbeda dan kegiatan operasional anak usaha yang berbeda antara lain layanan bandar udara, perhotelan, maupun *retail* yang mewajibkan interaksi langsung dengan *customer*. Selama penerapan WFH, Injourney menjamin bahwa seluruh Insan Injourney tetap memperoleh pendapatan yang utuh meskipun bekerja dari rumah.

Pemberlakuan Protokol Kesehatan di Lingkup Kantor

Sejak pandemi COVID-19 menyebar pada tahun 2020, seluruh anak perusahaan Injourney telah menerapkan protokol kesehatan di lingkup internal. Protokol kesehatan meliputi penggunaan masker setiap berada di kantor, mencuci tangan dan menggunakan sanitizer setiap selesai berinteraksi dengan banyak orang termasuk sesama Insan Injourney, dan menjaga jarak setiap saat. Lebih jauh lagi, bagi karyawan Injourney yang memberikan layanan langsung kepada customer diwajibkan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan kaca mata pelindung/pelindung wajah. Seluruh alat pelindung seperti pelindung wajah, masker, sarung tangan, dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan disediakan oleh Injourney. Security juga akan melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan bagi seluruh karyawan sejak di pintu masuk area kerja dengan syarat suhu tubuh di bawah 38°C. Dari sisi manajemen perusahaan, kantor melakukan penyesuaian ruang kerja dan bisnis sesuai dengan panduan jarak fisik yang berlaku. Injourney mengatur penggunaan peralatan makan sekali pakai dan penyediaan makanan dan minuman dalam kemasan untuk dibawa pulang dan atau dimakan di tempat bagi Insan Injourney.

Vaksinasi bagi Insan Injourney

Sebagai upaya melindungi seluruh Insan Injourney dari paparan COVID-19, Injourney melalui anak usaha memberikan vaksinasi bagi seluruh pegawai khususnya bagi pegawai yang memiliki aktivitas tinggi berinteraksi langsung dengan customer. Di akhir tahun 2021, lebih dari 23.000 pegawai yang bekerja di seluruh lini usaha Injourney memperoleh vaksinasi.

all Injourney Personnel in accordance with the basic provisions of Circular Letter No. EDR.001/INJOURNEY/11/2021 regarding the Implementation of Work from Office (WFO) and Work from Anywhere (WFA) within PT Aviata Pariwisata Indonesia (Persero). The implementation of WFH is carried out every 3 days in one week according to the schedule planned by the Coordinator of the Operational Implementing Task Force which is updated via the link <https://bit.ly/AviataEmployeeSchedule>.

The implementation of WFH and WFA in Injourney and all subsidiaries cannot be applied the same. This is influenced by various factors such as different work systems and company rules and different operational activities of subsidiaries, including airport, hotel and retail services that require direct interaction with customers. During the implementation of WFH, Injourney ensures that all Injourney Personnel continue to earn a complete income even though they are working from home.

Health Protocol Enforcement in Office Areas

Since the COVID-19 pandemic started in 2020, all Injourney subsidiaries have implemented internal health protocols. The health protocol includes the use of masks at all times in the office, washing hands and using sanitizers after interacting with many people including fellow Injourney Personnel, and maintaining distance at all times. Furthermore, Injourney employees who provide direct services to customers are required to use Personal Protective Equipment (PPE) and protective eyewear/face protection. All protective equipment such as face shields, masks, gloves, and Personal Protective Equipment (PPE) for employees are provided by Injourney. Security will also conduct a health condition check for all employees from the entrance to the work area and only allows entrance only when the body temperature is below 38°C. From the company's management side, the office makes adjustments to its workspace and business in accordance with the applicable physical distance guidelines. Injourney regulates the use of disposable tableware and the provision of packaged food and beverages to take home and or eat on site for Injourney Personnel.

Vaccination for Injourney Personnel

In an effort to protect all Injourney personnel from COVID-19 exposure, Injourney through its subsidiaries provides vaccinations for all employees, especially for employees who have high direct interactions with customers. By the end of 2021, more than 23,000 employees working across Injourney's business lines are vaccinated.

Pencegahan COVID-19 di Wilayah Operasi

COVID-19 Prevention in Operational Areas

Penggunaan Aplikasi “PeduliLindungi”

The Use of “PeduliLindungi” Application

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, Injourney mewajibkan penggunaan aplikasi “PeduliLindungi” baik bagi seluruh Insan Injourney maupun customer sebagai alat *assessment* baik untuk customer maupun seluruh Insan Injourney. Aplikasi “PeduliLindungi” dapat mendeteksi rute perjalanan, interaksi, informasi vaksinasi, hasil test COVID-19, hingga kewajiban mengisi e-HAC bagi pelaku perjalanan domestik dan internasional.

As a compliance form with the government regulations, Injourney requires the use of the “PeduliLindungi” application for all Injourney personnel and customers as an assessment tool for both customers and all Injourney Personnel. The “PeduliLindungi” application can detect travel routes, interactions, vaccination information, COVID-19 test results, to the obligation menu to fill out e-HAC for domestic and international travelers.



Penerapan Protokol Kesehatan Ketat di Bandara, Hotel, dan Destinasi Pariwisata

Strict Health Protocols Implementation at Airports, Hotels and Tourism Destinations

Strict Health Protocols Implementation at Airports, Hotels and Tourism Destinations

Seluruh anak usaha Injourney menerapkan standar dan protokol kesehatan yang berbeda. Penerapan protokol kesehatan yang berbeda amat wajar, sebab Injourney memiliki lini bisnis yang berbeda pada tiap anak usaha. Sebagai contoh, Angkasa Pura I melakukan rekayasa alur keberangkatan penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai, di sisi lain Bandara SAMS Sepinggan menjalin kerja sama dengan Satgas COVID-19 untuk melakukan swab antigen acak bagi penumpang. Seluruh bandara yang dikelola anak usaha telah menerapkan kebijakan wajib antigen yang berlaku 1 x 24 jam dan PCR yang berlaku 3 x 24 jam bagi seluruh pengguna jasa penerbangan. Sementara itu, anak usaha PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko memberlakukan pembatasan jumlah pengunjung Candi Borobudur dan Prambanan hingga 25% pengunjung atau 1.500 pengunjung per hari.

All Injourney subsidiaries apply different health standards and protocols. The application of different health protocols is very reasonable, because Injourney has a different business line for each subsidiary. For example, Angkasa Pura I engineers the passenger departure flow at I Gusti Ngurah Rai Airport, on the other hand, SAMS Sepinggan Airport collaborates with the COVID-19 Task Force to conduct random antigen swabs for passengers. All airports managed by subsidiaries have implemented a mandatory antigen policy which is valid for 1 x 24 hours and PCR which is valid for 3 x 24 hours for all flight service users. Meanwhile, the TWC subsidiary imposes a limit on the number of visitors to Borobudur and Prambanan Temples to 25% or 1,500 visitors per day.





Menyediakan Alat Pencegah Penyebaran COVID-19 *Provision of COVID-19 Spread Prevention Tools*

Injourney berupaya menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh Insan Injourney dan *customer* dari paparan COVID-19 di wilayah operasional anak usaha Injourney. Langkah-langkah yang dilakukan Injourney bersama anak usaha dalam mencegah penyebaran COVID-19 antara lain dengan menyediakan stasiun *hand sanitizer* dan wastafel, petunjuk/rambu pembatasan kapasitas pada bangku, lift, dan marka lantai untuk menjaga jarak pada antrian, melaksanakan protokol kebersihan dan disinfeksi pada fasilitas umum, mengatur jadwal rutin bagi staf untuk melakukan pembersihan secara berkala, mengurai keramaian terutama pada titik pintu masuk dan keluar, memasang papan/*acrylic* pembatas antara *customer* dan *customer service* di area layanan pelanggan, serta mengelola berbagai limbah secara efisien.

Injourney strives to maintain the health and safety of all Injourney Personnel and customers from COVID-19 exposure in the operational area of Injourney's subsidiaries. The steps taken by Injourney and its subsidiaries in preventing the spread of COVID-19 include providing hand sanitizer stations and sinks, instructions/signs to limit capacity on benches, lifts, and floor markings to maintain distance in queues, implementing hygiene and disinfection protocols at public facilities, arranging a routine schedule for staff to carry out regular cleaning, breaking down crowds, especially at entry and exit points, installing a barrier board/acrylic between the customer and customer service in the customer service area, and managing various wastes efficiently.

Penerapan Protokol Kesehatan Jelang MotoGP 2022

Implementation of Health Protocols Ahead of MotoGP 2022

Meskipun ITDC masuk dalam pengembangan perusahaan tahap 2, Injourney telah mempersiapkan penguatan protokol kesehatan sebagai upaya perlindungan menyeluruh bagi peserta, penonton, Insan Injourney dan seluruh pihak yang terlibat dalam perhelatan MotoGP yang akan dilaksanakan pada Maret 2022 mendatang. Di The Nusa Dua, penerapan protokol kesehatan telah berlaku sejak pintu gerbang utama. ITDC memastikan seluruh pengunjung telah menggunakan masker dan dalam kondisi sehat.

Pada saat penyelenggaraan MotoGP di tahun 2022, ITDC memberlakukan sistem pembatasan interaksi hanya dalam satu kelompok yang sama (*bubble*) dan karantina bagi peserta MotoGP untuk meminimalisasi persebaran COVID-19. Bagi para penonton event MotoGP diwajibkan telah menerima vaksinasi dosis 2 sebelum dapat menonton langsung perhelatan MotoGP. Dalam penyelenggaraan MotoGP perdana pada Maret mendatang, jumlah penonton dibatasi hanya mencapai 25.000 orang. Seluruh penonton wajib mengikuti seluruh prosedur mulai dari *screening* dengan aplikasi PeduliLindungi, melakukan tes rapid antigen atau PCR, penukaran tiket, hingga prosedur wajib masker saat menonton MotoGP. Berbagai upaya maksimal yang diterapkan seluruh pihak dalam event MotoGP diharapkan mampu meminimalisasi persebaran COVID-19 di era New Normal.

Although ITDC is in phase 2 of the company's development, Injourney has prepared the strengthening of health protocols as a comprehensive protection effort for participants, spectators, Injourney personnel and all parties involved in the MotoGP event which will be held in March 2022. In Nusa Dua, the implementation of health protocols has been in effect from the main gate. ITDC ensures that all visitors are wearing masks and are in good health.

At the time of holding MotoGP in 2022, ITDC imposes a system of limiting interactions within the same group (bubble) and quarantine for MotoGP participants to minimize the spread of COVID-19. MotoGP event spectators are required to have received 2 vaccinations before being able to watch the MotoGP event live. In the MotoGP inauguration in March, the number of spectators is limited to only 25,000 people. All spectators must follow all procedures, starting from screening with the PeduliLindung application, conducting rapid antigen or PCR tests, exchanging tickets, to the mandatory mask procedure when watching MotoGP. The maximum efforts implemented by all parties in the MotoGP event are expected to be able to minimize the spread of COVID-19 in the New Normal era.



Pencegahan COVID-19 di Masyarakat

Selain berfokus pada Insan Injourney dan pengguna layanan anak usaha, Injourney juga turut memberikan sejumlah bantuan alat kesehatan dan edukasi pencegahan penyebaran COVID-19 kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi Injourney melalui upaya berikut:

1. Bantuan masker dan *hand sanitizer* bekerja sama dengan Ikatan Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia di Banda Aceh;
2. Bantuan tandon cuci tangan dan *hand sanitizer* untuk SDN 38 Sungai Raya Kalimantan Barat dan Alat Pelindung Diri untuk Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
3. Bantuan peralatan APD untuk Satgas COVID-19 Desa Kebondalem Kidul;
4. Program Sinergi BUMN dengan memberikan Fasilitas Belajar *Online* (FBO) pada masa pandemi COVID-19 untuk Siswa SD, SMP, SMA di wilayah Yogyakarta dan Klaten.
5. Pemberian santunan anak-anak Yatim korban COVID-19 di Pakanewon, Prambanan, Sleman;
6. 1.000 paket bantuan ke rumah warga yang tengah menjalani isolasi mandiri (Isoman) di sekitar Bandara Soekarno-Hatta.

COVID-19 Prevention in the Community

In addition to focusing on Injourney personnel and users of subsidiary services, Injourney also provides a number of medical equipment assistance and education to prevent the spread of COVID-19 to communities around Injourney's operational areas through the following efforts:

1. *Provision of masks and hand sanitizers in collaboration with the Independent Association of Indonesian Professional Social Workers in Banda Aceh;*
2. *Assistance in the form of hand washing and hand sanitizer reservoirs for SDN 38 Sungai Raya West Kalimantan and Personal Protective Equipment for Makasar District, East Jakarta;*
3. *Assistance of PPE equipment for the COVID-19 Task Force in Kebondalem Kidul Village;*
4. *SOE Synergy Program by providing Online Learning Facilities (FBO) during the COVID-19 pandemic for elementary, middle, and high school students in the Yogyakarta and Klaten areas.*
5. *Charity for orphans who have been infected by COVID-19 in Pakanewon, Prambanan, Sleman;*
6. *1,000 aid packages to the homes of residents who are undergoing self-isolation around Soekarno-Hatta Airport.*



Referensi SEOJK 16/POJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Emiten atau Perusahaan Publik

Reference To SEOJK 16/POJK.04/2021 Regarding The Form and Content Of Reports Of Issuers Or Public Companies

No.	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Content of the Annual Report	Halaman Page
	Ikhtisar Data Keuangan Penting Financial Highlights	
	<p><i>Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 tahun, paling sedikit memuat, pendapatan, laba (rugi), jumlah aset, liabilitas, ekuitas, dan rasio-rasio keuangan.</i></p> <p><i>Financial information is presented in a comparative form over a period of 3 (three) financial years; if the Issuer or Public Company has been established less than 3 years, the information shall include at least includes revenue, profit (loss), total assets, liabilities; equity, and financial ratios.</i></p>	10 – 13
	Informasi Saham Information on Shares	
	<p>Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:</p> <p>a. jumlah saham yang beredar;</p> <p>b. kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan;</p> <p>c. harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan</p> <p>d. volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.</p> <p>e. Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek.</p> <p><i>Issued shares for each quarter presented in a comparative form of at least 2 financial years at least include:</i></p> <p><i>a. number of outstanding shares;</i></p> <p><i>b. market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares are listed;</i></p> <p><i>c. the highest, lowest, and closing share price based on the Stock Exchange where the shares are listed; and</i></p> <p><i>d. trading volume at the Stock Exchange where the shares are listed.</i></p> <p><i>e. Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on the stock exchange.</i></p>	Tidak ada Not available
	<p>Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1.</p> <p><i>In the event of corporate action causes changes in shares such as stock split, reverse stock, stock dividend, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion stock, and increasing and decreasing interests; information on shares as stated in point 1.</i></p>	108
	<p>Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/ atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/ atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.</p> <p><i>In the event of suspension and/or delisting in the financial year, the Issuer or Public Company shall explain the reasons for the suspension and/or delisting.</i></p>	108
	<p>Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3, dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan Tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.</p> <p><i>In the event that suspension and/or delisting as referred to point 3 is still ongoing until the end of the Annual Report period, the Issuer or Public Company shall explain the actions taken to resolve the suspension and/or delisting.</i></p>	108



No.	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Content of the Annual Report	Halaman Page
Laporan Direksi Report of the Board of Directors		
	<p>Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. strategi dan kebijakan strategis; b. peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis; c. proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi; d. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; e. kendala yang dihadapi. <p><i>Performance of Issuer or Public Company, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. strategies and Strategic Policy; b. the role of the Board of Directors in the formulation of strategies and strategic policy; c. processes carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of strategies and strategic policy; d. comparison between realization and target; and e. obstacle faced by Issuer or Public Company. 	28 - 50
	<p>Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p><i>Views on business prospect of Issuer or Public Company; and</i></p>	28 - 50
	<p>Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p><i>Implementation of good governance of Issuer or Public Company.</i></p>	48 - 49
Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners		
	<p>Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi yang dilakukan oleh Direksi.</p> <p><i>Performance evaluation of the Board of Directors regarding management of Issuer or Public Company, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Company carried out by the Board of Directors.</i></p>	16 - 27
	<p>Pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi.</p> <p><i>Views on business prospect of Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors.</i></p>	16 - 27
	<p>Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p><i>Views on the implementation of governance of Issuer or Public Company.</i></p>	26 - 27
Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profile of Issuer or Public Company		
	<p>Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku.</p> <p><i>Name of Issuer or Public Company, including name change, reason of the change, and effective date of the name change in the financial year.</i></p>	56 - 57
	<p>Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik, dan alamat situs web.</p> <p><i>Access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office that allows public to obtain information regarding Issuer or Public Company, including: address; phone number, email address, and web address.</i></p>	57, 109, 112, 116, 118, 120
	<p>Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p><i>Brief history of Issuer or Public Company.</i></p>	60 - 62
	<p>Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) atau nilai-nilai perusahaan.</p> <p><i>Vision and mission of Issuer or Public Company and its corporate culture or values;</i></p>	66
	<p>Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan.</p> <p><i>Business activities according to the latest article of association, business activities conducted within the financial year, and type of goods and/or services.</i></p>	56, 67 - 69, 73 - 75



No.	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Content of the Annual Report	Halaman Page
	<p>Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.</p> <p><i>Operational area of Issuer or Public Company; operational area is an area or region for carrying out operational activities or the range of operational activities.</i></p>	70 - 71
	<p>Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.</p> <p><i>Organizational structure of Issuer or Public Company in the form of a chart, at least until 1 (one) level below the Board of Directors, including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, along with name and position.</i></p>	76 - 77
	<p>Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.</p> <p><i>A list of industry association memberships on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance.</i></p>	108
	<p>Profil Direksi, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; b. foto terbaru; c. usia; d. kewarganegaraan; e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> • riwayat jabatan, meliputi informasi: <ul style="list-style-type: none"> • dasar hukum pengangkatan; • rangkap jabatan; f. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; g. hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung; dan h. perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. <p><i>Profile of the Board of Directors, at least includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. name and position in accordance with the duties and responsibilities; b. recent photograph; c. age; d. citizenship; e. education background and/or certification; <ul style="list-style-type: none"> • position history, including information on: <ul style="list-style-type: none"> • legal basis of appointment • concurrent positions; f. work experience and period of service inside and outside Issuer or Public Company; g. affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners. h. changes in the composition of members of the Board of Directors and the reasons for the changes. 	78 - 87



No.	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Content of the Annual Report	Halaman Page
	<p>Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan jabatan; b. foto terbaru; c. usia; d. kewarganegaraan; e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f. riwayat jabatan, meliputi informasi: <ul style="list-style-type: none"> • dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; • dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen; • rangkap jabatan; dan • pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; g. hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung; h. pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 periode; dan i. perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. <p><i>Profile of the Board of Commissioners, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. name and position; b. recent photograph; c. age; d. citizenship; e. education background and/or certification; f. position history, including information on: <ul style="list-style-type: none"> • legal basis for appointment as a member of the Board of Commissioners; • legal basis for appointment as Independent Commissioner; • concurrent positions; • work experience and period of service inside and outside Issuer or Public Company; g. affiliation with other members of the Board of Commissioners, major and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners. h. independence statement of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served for more than 2 terms; and i. changes in the composition of members of the Board of Directors and the reasons for the changes. 	88 - 97
	<p>Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya.</p> <p><i>In the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the financial year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the composition of the latest and previous members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.</i></p>	85
	<p>Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku.</p> <p><i>Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contract) in the financial year.</i></p>	101 - 103
	<p>Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih; b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham; dan c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5%. <p><i>Names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the financial year, at least includes information on:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. shareholders owning 5% or more shares of Issuer or Public Company; b. members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares in Issuers or Public Companies; and c. public shareholders group who has ownership less than 5% of shares of the Issuer or Public Company. 	108



No.	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Content of the Annual Report	Halaman Page
	<p>Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p> <p><i>The percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year. If all members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.</i></p>	108
	<p>Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: kepemilikan institusi lokal; institusi asing; individu lokal; dan individu asing.</p> <p><i>Number of shareholders and percentage of ownership at the end of the financial year based on the classification: local institution ownership; foreign institution ownership; local individual ownership; and foreign individual ownership.</i></p>	108
	<p>Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.</p> <p><i>Information on major and controlling shareholders of Issuer or Public Company, either directly or indirectly, to the individual owners, presented in the form of a scheme or chart.</i></p>	108
	<p>Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.</p> <p><i>Name of subsidiary, associated company, joint venture where Issuer or Public Company has a jointly controlled entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture.</i></p>	108 - 121
	<p>Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).</p> <p><i>Chronology of share listing, number of shares, par value, and offering price from the beginning of listing to the end of the financial year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, stock dividend, bonus shares, and changes in the par value of shares, implementation of conversion stock, implementation of capital additions and subtractions (if any).</i></p>	Tidak ada Not available
	<p>Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18, yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbalance hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada).</p> <p><i>Information on the listing of other securities other than securities as referred to in point 18), that have not matured within the financial year at least includes name of securities, issuance year, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any).</i></p>	Tidak ada Not available
	<p>Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: nama dan alamat; periode penugasan; informasi jasa audit dan/ atau non audit yang diberikan; biaya jasa (<i>fee</i>); dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut.</p> <p><i>Information on the use of public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and its networks/associations/alliances include: Name and address; Assignment period; Information on audit and/or non-audit services provided; audit and/or non-audit fee for each assignment during the financial year. If the appointed AP and KAP and its network/association/alliance do not provide non-audit services, then the matter shall be disclosed.</i></p>	321



No.	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Content of the Annual Report	Halaman Page
	<p>Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. <i>Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.</i></p>	108
Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis		
	<p>Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; b. pendapatan/penjualan; dan c. profitabilitas. <i>Overview of operations per business segment according to the type of industry of Issuer or Public Company, at least includes: a. production, including process, capacity, and growth; b. sales/revenue; and c. profitability.</i></p>	128 - 155
	<p>Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; c. ekuitas; d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan e. arus kas. <i>Comprehensive financial performance, including comparison of financial performance in the last 2 (two) financial years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least includes: a. current assets, non-current assets, and total assets; b. current liabilities, non-current liabilities, and total liabilities; c. equity; d. revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and e. cash flow.</i></p>	156 - 173
	<p>Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan. <i>Ability to pay debts or liabilities by presenting the relevant ratio calculations.</i></p>	174
	<p>Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan. <i>Collectability level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations.</i></p>	157
	<p>Struktur modal dan kebijakan manajemen atas struktur modal tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud. <i>Capital structure and management policy on capital structure along with the basis for determining the policy.</i></p>	175
	<p>Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: a. tujuan dari ikatan tersebut; b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; c. mata uang yang menjadi denominasi; dan d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. <i>Discussion on material commitment for capital goods investment with description, at least includes: a. objectives of the commitment; b. expected source of funds to fulfill the commitment; c. the denominated currency; and d. steps planned by Issuer or Public Company to protect the position of related currency from any risks.</i></p>	176



No.	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Content of the Annual Report	Halaman Page
	<p>Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis investasi barang modal; b. tujuan investasi barang modal; dan c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan. <p><i>Discussion on capital goods investment realized in the latest financial year, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. types of capital goods investment; b. objectives of capital goods investment; and c. values of the issued capital goods investment. 	172
	<p>Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada).</p> <p><i>Material information and facts occurring after the due date of accountant report (if any).</i></p>	176
	<p>Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.</p> <p><i>Business prospects of Issuer or Public Company related to the general conditions of industry, economy, and international market as well as quantitative supporting data from reliable data sources.</i></p>	177 - 186
	<p>Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendapatan/penjualan; b. laba (rugi); c. struktur modal; atau d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik. <p><i>Comparison between target/projection at the beginning of the financial year and realization, including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. revenue/sales; b. profit (loss); c. capital structure; or d. other matters deemed important to Issuer or Public Company. 	187 - 188
	<p>Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 tahun mendatang, mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendapatan/penjualan; b. laba (rugi); c. struktur modal; d. kebijakan dividen; atau e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; <p><i>Target/projection to be achieved by issuer or Public Company for the following 1 year, including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. revenue/sales; b. profit (loss); c. capital structure; d. dividend policy; or e. other matters deemed important to Issuer or Public Company. 	177 - 178
	<p>Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.</p> <p><i>Marketing aspects of goods and/or services of Issuer or Public Company, at least including marketing strategy and market share.</i></p>	180 - 190
	<p>Uraian mengenai dividen selama 2 tahun buku terakhir, paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; b. tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d. jumlah dividen per tahun yang dibayar. <p><i>Description on dividends for the last 2 financial years, at least including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. dividend policy, including information on the percentage of total dividends distributed to net income; b. date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends; c. amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and d. amount of paid dividends per year. 	Tidak ada Not available



No.	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Content of the Annual Report	Halaman Page
	<p>Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan:</p> <p>a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan</p> <p>b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.</p> <p><i>Realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:</i></p> <p><i>a. in the event that during the financial year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the financial year; and</i></p> <p><i>b. if there is a change in the use of proceeds as regulated in the Financial Services Authority Regulation on the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change.</i></p>	<p>Tidak ada Not available</p>
	<p>Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat:</p> <p>a. tanggal, nilai, dan objek transaksi;</p> <p>b. nama pihak yang melakukan transaksi;</p> <p>c. sifat hubungan afiliasi (jika ada);</p> <p>d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi;</p> <p>e. pemenuhan ketentuan terkait; dan</p> <p>f. dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum; dan • peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai; <p>g. untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan;</p> <p>h. untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;</p> <p>i. dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p> <p><i>Material information (if any) on investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, that occur during the financial year, at least includes:</i></p> <p><i>a. date, value, and object of transaction;</i></p> <p><i>b. name of the party making the transaction;</i></p> <p><i>c. nature of affiliated relationship (if any);</i></p> <p><i>d. description on fairness of the transaction;</i></p> <p><i>e. compliance with related provisions; and</i></p> <p><i>f. if there is an affiliated relationship, other than disclosing the information as referred to in letter (a) to letter (e), the Issuer or Public Company shall also disclose information on:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>statement of the Board of Directors that the affiliate transaction has been through adequate procedures to ensure that the affiliated transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices;</i> • <i>role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions.</i> <p><i>g. as for the routine, repeated, and/or sustainable affiliated or material transactions that are parts of operational activities conducted to gain revenues, there shall be an added information stating that those transactions are routine, repeated, and/or sustainable affiliated or material transactions that are parts of operational activities conducted to gain revenues;</i></p> <p><i>h. as for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS to approve the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions shall be added;</i></p> <p><i>i. if there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this matter shall be disclosed.</i></p>	<p>190</p>



No.	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Content of the Annual Report	Halaman Page
	<p>Perubahan ketentuan peraturan perundangundangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).</p> <p><i>Changes in the provisions of laws and regulations that have a significant impact on Issuer or Public Company and its impact on financial statements (if any).</i></p>	190
	<p>Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).</p> <p><i>Changes in accounting policies, reasons, and impact on financial statements (if any).</i></p>	191
<p>Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Governance</p>		
	<p>Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), paling sedikit memuat:</p> <p>a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 tahun sebelum tahun buku meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan • keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; <p>b. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p> <p><i>Issuer or Public Company governance shall at least include a brief description of:</i></p> <p>a. <i>Information on GMS resolutions in the financial year and 1 year before the financial year, including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>GMS resolution in the financial year and 1 year before the financial year realized in the financial year; and</i> • <i>GMS resolutions in the financial year and 1 year before the financial year that have not been realized and the reasons for not realizing the resolutions;</i> <p>b. <i>If Issuer or Public Company uses an independent party during the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed.</i></p>	195 - 199
	<p>Direksi, paling sedikit memuat:</p> <p>a. tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;</p> <p>b. pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi;</p> <p>c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;</p> <p>d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi;</p> <p>e. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;</p> <p>f. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p> <p><i>Board of Directors, at least includes:</i></p> <p>a. <i>duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;</i></p> <p>b. <i>statement that the Board of Directors has Board of Directors Charter;</i></p> <p>c. <i>policy and frequency of BOD meetings, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and attendance rate of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;</i></p> <p>d. <i>training and/or competency development of members of the Board of Directors;</i></p> <p>e. <i>Board of Directors' appraisal on the performance of the committees supporting the implementation of the Board of Directors' duties;</i></p> <p>f. <i>If Issuer or Public Company does not have committees to support the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.</i></p>	210 - 220

No.	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Content of the Annual Report	Halaman Page
	<p>Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris; kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris; penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku. <p><i>Board of Commissioners, at least includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>duties and responsibilities of the Board of Commissioners;</i> <i>statement that the Board of Commissioners has the Board of Commissioners Manual or Charter;</i> <i>policy and frequency of Board of Commissioners meetings, joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors and attendance rate of members of the Board of Commissioners in the meetings, including attendance at the GMS;</i> <i>training and/or competency development of members of the Board of Commissioners;</i> <i>performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners;</i> <i>the Board of Commissioners' appraisal on the performance of the Committees to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners.</i> 	200 - 219
	<p>Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. <p><i>Nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least include:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>nomination procedure, including a brief description of the nomination policies and processes of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and</i> <i>procedures and implementation of remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</i> 	221 - 227
	<p>Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar (jika ada).</p> <p><i>Sharia Supervisory Board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association.</i></p>	227
	<p>Komite audit, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; usia; kewarganegaraan; riwayat pendidikan; riwayat jabatan; periode dan masa jabatan anggota komite audit; pernyataan independensi komite audit; pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite audit. <p><i>The audit committee, at least includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>name and position in committee membership;</i> <i>age;</i> <i>citizenship;</i> <i>educational background;</i> <i>position history;</i> <i>period and tenure of the audit committee members;</i> <i>independence statement of the audit committee;</i> <i>training and/or competency development attended in the financial year (if any);</i> <i>policy and frequency of audit committee meetings and attendance rate of audit committee members in the meetings; and</i> <i>implementation of the audit committee's activities in the financial year in accordance with the audit committee guidelines or charter.</i> 	230 - 235



No.	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Content of the Annual Report	Halaman Page
	<p>Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b. usia; c. kewarganegaraan; d. riwayat pendidikan; e. riwayat jabatan; f. periode dan masa jabatan anggota komite; g. pernyataan independensi komite; h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i. uraian tugas dan tanggung jawab; j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>); k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan m. dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) sampai dengan huruf (l), mohon dijelaskan alasannya. <p><i>Nomination and remuneration committee or function of Issuer or Public Company, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. name and position in the committee membership; b. age; c. citizenship; d. educational background; e. position history; f. period and tenure of the committee members; g. independence statement of the committee; h. training and/or competency development attended in the financial year (if any); i. description of duties and responsibilities; j. statement that the committee has guidelines or charter; k. policy and frequency of meetings and attendance rate of the committee members at the meeting; l. brief description of the implementation of activities in the financial year; and m. in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company as referred to in letter (i) to letter (l), shall disclose the reason. 	236 - 243
	<p>Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.</p> <p><i>Other committees owned by Issuer or Public Company to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees to support the functions and duties of the Board of Commissioners.</i></p>	244 - 251
	<p>Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama; b. domisili; c. riwayat jabatan; d. riwayat pendidikan; e. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan f. uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. <p><i>Corporate secretary, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. name; b. domicile; c. position history; d. educational background; e. training and/or competency development attended in the financial year; and f. brief description on the implementation of corporate secretary's duties in the financial year. 	252 - 255



No.	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Content of the Annual Report	Halaman Page
	<p>Unit audit internal, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. nama kepala unit audit internal;b. riwayat jabatanc. kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku;e. struktur dan kedudukan unit audit internal;f. uraian tugas dan tanggung jawab;g. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; danh. uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit. <p><i>Internal audit unit, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a. name of the Internal Audit Unit head;b. position history;c. qualification or certification as an internal audit (if any);d. training and/or competency development attended in the financial year;e. structure and position of the internal audit unit;f. description of duties and responsibilities;g. statement that the internal audit unit has guidelines or charter; andh. brief description on the implementation of the internal audit unit's duties in the financial year, including policy and frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee.	256 - 258
	<p>Uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal control</i>) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan lainnya;b. tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; danc. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal. <p><i>Description on internal control system applied by Issuer or Public Company, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a. financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;b. review on effectiveness of the internal control system; andc. statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system.	256 - 259
	<p>Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko;b. jenis risiko dan cara pengelolaannya;c. tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko; dand. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko. <p><i>Risk management system implemented by Issuer or Public Company, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a. general description on the risk management system of Issuer or Public Company;b. types of risks and management methods;c. review on effectiveness of the risk management system of Issuer or Public Company; andd. statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system.	259 - 266
	<p>Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pokok perkara/gugatan;b. status penyelesaian perkara/gugatan; danc. pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik. <p><i>Legal proceedings that have a material impact faced by Issuer or Public Company, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least include:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a. merits of case/lawsuit;b. status of the case/lawsuit settlement; andc. impact on the condition of Issuer or Public Company.	266
	<p>Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada).</p> <p><i>Information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities in the financial year (if any).</i></p>	267



No.	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Content of the Annual Report	Halaman Page
	<p>Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pokok-pokok kode etik; b. bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan c. pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan. <p><i>Information on the code of conduct of Issuer or Public Company, including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. key Principles of Code of conduct; b. the form of dissemination of the code of conduct and its enforcement efforts; and c. statement that the code of conduct applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuer or Public Company. 	267 - 268
	<p>Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>).</p> <p><i>Brief description on the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP).</i></p>	268
	<p>Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan b. pelaksanaan atas kebijakan dimaksud. <p><i>Brief description on information disclosure policy regarding:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners shall be no later than 3 working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of Public Company; and b. implementation of the policy. 	Tidak ada Not available
	<p>Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. cara penyampaian laporan pelanggaran; b. perlindungan bagi pelapor; c. penanganan pengaduan; d. pihak yang mengelola pengaduan; dan e. hasil dari penanganan pengaduan. <p><i>Description on whistleblowing system in Issuer or Public Company, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. method of submitting a violation report; b. protection for whistleblowers; c. complaint handling; d. the party in charge to manage complaint; and e. result of complaint handling. 	269 - 274
	<p>Uraian mengenai kebijakan antikorupsi, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan b. pelatihan/sosialisasi antikorupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; <p><i>Description on Anti-Corruption Policy of Issuer or Public Company, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. programs and procedures to overcome corruption practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in Issuer or Public Company; and b. anti-corruption training/socialization to all employees of Issuer or Public Company. 	275
	<p>Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau b. penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). <p><i>Implementation of Public Company governance guidelines for Issuer that issues equity securities or Public Company, including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. statement regarding the recommendations that have been realized; and/or b. description on recommendations that have been realized, along with reasons and alternative implementations (if any). 	Tidak ada Not available



No.	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Content of the Annual Report	Halaman Page
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik <i>Social and Environmental Responsibilities of Issuer or Public Company</i>		
	<p>Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.</p> <p><i>Information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.</i></p>	<p>Di tahun 2021 Injourney belum memiliki Laporan Keberlanjutan, sehingga informasi terkait upaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diungkapkan di halaman 276 – 305</p> <p><i>In 2021 Injourney does not yet have a Sustainability Report, so information related to Social and Environmental Responsibility efforts is disclosed on the page 276 – 305</i></p>
	<p>Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p><i>The Sustainability Report as referred to in point 1, must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as stated in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular.</i></p>	<p><i>In 2021 Injourney does not yet have a Sustainability Report, so information related to Social and Environmental Responsibility efforts is disclosed on the page 276 – 305</i></p>
Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit <i>Audited Annual Financial Report</i>		
	<p>Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundangundangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek.</p> <p><i>The annual financial statements included in the Annual Report shall be prepared in accordance with Indonesian financial accounting standards and have been audited by a public accountant registered in the Financial Services Authority. The annual financial report shall contain a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation on the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector regulating the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.</i></p>	<p>Terlampir <i>Attached</i></p>
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan <i>Statement Letter of the Board of Directors and f the Board of Commissioners Members on Accountability for Annual Report</i>		
	<p>Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p><i>Statement letter of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners Members on Accountability for Annual Report shall be prepared in accordance with the format of Statement Letter of the Board of Directors and the Board of Commissioners Members on Accountability for Annual Report as set forth in Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular.</i></p>	<p>52 – 53</p>



 **Bali**





07

Laporan Keuangan Konsolidasi

Consolidated Financial Statement



**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta
1 Januari 2020/ 31 Desember 2019**

***PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020, and
January 1, 2020/ December 31, 2019***

Daftar Isi	Halaman/ <u>Page</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2021 and 2020, and January 1, 2020/ December 31, 2019</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020, SERTA
1 JANUARI 2020/ 31 DESEMBER 2019**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECMEBER 31, 2021 AND 2020, AND
JANUARY 1, 2020/ DECEMBER 31, 2019**

**PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

We, the undersigned:

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | Nama/ <i>Name</i> | : | Dony Oskaria |
| | Alamat Kantor/ <i>Office Address</i> | : | Puri Sentra Niaga Blok B-36
Jl. Raya Kalimalang, Jakarta Timur
Jl. Samudra No. 39, Cipulir Kebayoran Lama
Jakarta |
| | Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu
Identitas Lain/ <i>Domicile as stated in ID
Card</i> | : | Jakarta |
| | Nomor Telepon/ <i>Phone Number</i> | : | 021 – 29065224 |
| | Jabatan/ <i>Position</i> | : | Direktur Utama/ <i>President Director</i> |
| 2. | Nama/ <i>Name</i> | : | Edwin Hidayat Abdullah |
| | Alamat Kantor/ <i>Office Address</i> | : | Puri Sentra Niaga Blok B-36
Jl. Raya Kalimalang, Jakarta Timur
Jl. Widya Chandra XIII No 1-D
Kebayoran Baru, Jakarta |
| | Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu
Identitas Lain/ <i>Domicile as stated in ID
Card</i> | : | Kebayoran Baru, Jakarta |
| | Nomor Telepon/ <i>Phone Number</i> | : | 021 – 29065224 |
| | Jabatan/ <i>Position</i> | : | Wakil Direktur Utama/ <i>Vice President Director</i> |

Menyatakan bahwa:

State that:

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1. | Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dan entitas anak ("Perusahaan"); | 1. | <i>We are responsible for the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) and Subsidiaries ("the Company");</i> |
| 2. | Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. | <i>The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. | a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. | a. <i>All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;</i> |
| | b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan | b. | <i>The Company's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, nor do not omit material information or facts; and</i> |
| 4. | Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dan aplikasinya di dalam Perusahaan. | 4. | <i>We are responsible for the Company's internal control system and its application.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

This statement letter is made truthfully

Jakarta, 14 April 2022 / April 14, 2022

Atas Nama dan Mewakili Direksi/ *On Behalf on the Board of Directors*

Direktur Utama/ *President Director*

Wakil Direktur Utama/ *Vice President Director*

DONY OSKARIA

EDWIN HIDAYAT ABDULLAH

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

Puri Sentra Niaga Blok B/36
Jalan Kalimalang
Jakarta - 13620, INDONESIA
P : 021-29065224



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00436/2.1030/AU.1/06/1155-1/1/IV/2022

RSMIndonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Board of Commissioner and Directors

PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) ("the Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Seperti diungkapkan dalam Catatan 1.b dan 4 atas laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 28 Desember 2021 Perusahaan efektif menjadi pemegang saham mayoritas pada PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Hotel Indonesia Natour, PT Sarinah, dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Perusahaan mencatat transaksi tersebut dengan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.38 tentang Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Oleh karena itu laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah disajikan kembali seolah-olah transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali telah terjadi sejak tanggal 1 Januari 2020. Kami telah mereviu penyesuaian untuk penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, untuk menerapkan akuntansi kombinasi bisnis entitas sepengendali secara retrospektif, seperti yang

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

As disclosed in Notes 1.b and 4 to the consolidated financial statements, on December 28, 2021 the Company effectively became controlling shareholder of PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Hotel Indonesia Natour, PT Sarinah, and PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. The Company has recorded this transaction by using pooling of interest method in accordance with Statement of Financial Accounting Standard No.38 concerning Business Combination of Entities under Common Control. Accordingly, the consolidated financial statements as of December 31, 2020 and January 1, 2020/ December 31, 2019, and for the year ended December 31, 2020 have been restated as if business combination transaction of entities under common control has occurred since January 1, 2020. We have reviewed the restatement adjustments applied to the restated the consolidated financial statements as of December 31, 2020 and January 1, 2020/ December 31, 2019, and for the year ended December 31, 2020, to retrospectively apply the accounting for business combination of entities under common control, as described in Note 4 to the

dijelaskan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian. Berdasarkan rewiu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa penyesuaian tersebut tidak diterapkan dengan tepat.

Laporan keuangan konsolidasian PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor-auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan konsolidasian tersebut.

consolidated financial statements. Based on our reviews, nothing has come to our attention that causes us to believe that such restatement adjustments have not been properly applied.

The consolidated financial statements of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2020 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on those consolidated financial statements.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Eishennoraz

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1155/
Public Accountant License Number: AP.1155

Jakarta, 14 April/April 14, 2022



00436

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Per 31 Desember 2021 dan 2020, serta
1 Januari 2020/ 31 Desember 2019
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2021 and 2020, and
January 1, 2020/ December 31, 2019
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/		
	Rp	Rp	*) December 31, 2019 *)	Rp	
ASET				ASSETS	
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS	
Kas dan Setara Kas	5, 44, 48	3,725,597,431	4,040,130,634	9,390,805,689	Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka Pendek	6, 44, 48	86,231,618	96,115,483	702,362,313	Short-Term Investment
Piutang Usaha	7, 48				Trade Receivables
Pihak Berelasi	44	576,651,735	1,408,190,577	554,348,956	Related Parties
Pihak Ketiga		1,057,789,779	1,266,921,606	1,442,644,463	Third Parties
Piutang Lain-lain	8, 48				Other Receivables
Pihak Berelasi	44	20,185,129	11,250,625	35,920,164	Related Parties
Pihak Ketiga		86,493,036	80,135,460	150,050,300	Third Parties
Persediaan	9	57,950,557	58,570,944	107,352,766	Inventories
Uang Muka	10	120,884,222	59,218,636	111,234,315	Advances
Biaya Dibayar di Muka	11	85,532,423	68,503,538	205,955,177	Prepaid Expenses
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	12	297,333,970	672,805,226	804,805,867	Accrued Revenue
Pajak Dibayar di Muka	13.a	1,280,690,665	1,706,651,487	1,194,732,040	Prepaid Taxes
Aset Lancar Lainnya		28,391,413	8,990,366	74,457,125	Other Current Assets
TOTAL ASET LANCAR		7,423,731,978	9,477,484,582	14,774,669,175	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Estimasi Tagihan Pajak	13.b	516,235,090	754,485,213	459,333,258	Estimated Claims for Refundable Tax
Aset Pajak Tangguhan	13.f	1,979,570,515	822,547,722	179,700,328	Deferred Tax Assets
Investasi Jangka Panjang	14	90,667,078	96,459,038	103,601,902	Long Term Investments
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	15	2,505,628,933	543,135,885	563,351,529	Investment in Associates and Joint Venture
Uang Muka Pembelian Tanah	16	1,960,000	3,316,002,785	3,316,002,785	Advance for Land Acquisition
Properti Investasi	17	221,442,982	200,254,077	227,014,572	Investment Properties
Aset Tetap	18	80,788,882,877	81,017,446,756	77,524,247,963	Fixed Assets
Aset Hak-Guna	19	682,329,661	1,189,172,546	123,655,413	Right-of-Use Assets
Aset Takberwujud		226,151,607	248,792,419	189,574,836	Intangible Assets
Aset Tidak Lancar Lain-lain	20	101,213,827	78,030,912	228,612,906	Other Non-Current Assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		87,114,082,570	88,266,327,353	82,915,095,492	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		94,537,814,548	97,743,811,935	97,689,764,667	TOTAL ASSETS

* Disajikan Kembali dalam Catatan 4

* As Restated in Note 4

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Per 31 Desember 2021 dan 2020, serta
1 Januari 2020/ 31 Desember 2019
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2021 and 2020, and
January 1, 2020/ December 31, 2019
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	31 Desember/		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019	
	December 31, 2021	December 31, 2020 *)	January 1, 2020/ December 31, 2019 *)	
	Rp	Rp	Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha	21, 48			Trade Payables
Pihak Berelasi	44	184,107,523	86,026,246	Related Parties
Pihak Ketiga		596,402,658	574,746,766	Third Parties
Utang Lain-lain	22, 48			Other Payables
Pihak Berelasi	44	866,199,845	777,952,157	Related Parties
Pihak Ketiga		2,718,321,020	3,552,947,057	Third Parties
Beban Akrual	24, 48			Accrued Expenses
Pihak Berelasi	44	1,329,666	1,196,959	Related Parties
Pihak Ketiga		3,000,712,890	2,693,754,819	Third Parties
Utang Pajak	13.c	210,284,807	386,030,249	Taxes Payable
Pendapatan Diterima di Muka	25	361,941,337	252,505,413	Unearned Revenues
Liabilitas Imbalan Kerja				Short-Term Employees
Jangka Pendek		304,519,387	199,345,092	Benefits Liabilities
Utang Bank dan Lembaga				Short-Terms Bank and Other Financial
Keuangan Lainnya - Jangka Pendek	23, 44, 48	1,722,245,844	656,946,836	Institutions Loans
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh				Current Maturities of Long-Term
Tempo dalam Waktu Satu Tahun:				Liabilities:
Utang Bank Jangka Panjang dan				Long-Term Bank and
Lembaga Keuangan Lainnya	26, 48	1,463,087,314	511,104,533	Other Financial Institutions Loans
Utang Obligasi dan Sukuk Ijaarah	27, 48	--	2,090,000,000	Bonds Payable and Sukuk Ijarah
Surat Utang Jangka Menengah	28, 48	--	50,000,000	Medium Term Notes
Liabilitas Sewa	19	91,080,336	180,061,176	Lease Liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		11,520,232,627	12,012,617,303	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Jangka Panjang Setelah				Long-Term Liabilities - Net Of
Dikurangi Bagian yang Jatuh				Current Maturities:
Tempo dalam Waktu Satu Tahun:				Long-Term Bank and
Utang Bank Jangka Panjang dan				Other Financial Institutions Loans
Lembaga Keuangan Lainnya	26	35,337,790,753	31,880,566,856	Bonds Payable and Sukuk Ijarah
Utang Obligasi dan Sukuk Ijaarah	27	7,505,553,188	5,901,247,132	Medium Term Notes
Surat Utang Jangka Menengah	28, 47	--	45,000,000	Lease Liabilities
Liabilitas Sewa	19	525,528,288	921,886,213	Other Long-Term Liabilities
Utang Jangka Panjang Lainnya	29, 48	459,867,588	401,640,420	Employee Benefits Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja	31	2,275,765,106	2,211,096,518	Deferred Tax Liabilities
Liabilitas Pajak Tangguhan	13.f	262,115,001	231,024,839	Deferred Revenue
Pendapatan Ditangguhkan		429,331,717	419,486,510	Advances from Customers
Pendapatan Diterima di Muka		1,430,585	96,432,946	Provisions Payables
Utang Provisi	30	20,367,575	20,367,575	--
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		46,817,749,801	42,128,749,009	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		58,337,982,428	54,141,366,312	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal				Capital Stock - Par Value
Rp1.000.000 (Angka Penuh)				Rp1,000,000 (Full Amount)
Modal Dasar - 260.000.000 Saham				Authorized Capital - 260,000,000 Shares
(2020 dan 2019: 26.000 Saham)				(2020 and 2019: 26,000 Shares)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -				Issued and Fully Paid -
65.164.367 Saham				65,164,367 Shares
(2020 dan 2019: 13.000 Saham)	32	65,164,366,785	13,000,000	(2020 and 2019: 13,000 Shares)
Tambahan Modal Disetor	33	(28,765,976,052)	--	Additional Paid in Capital
Proforma Ekuitas yang Timbul dari				Proforma Equity Arising from
Transaksi Restrukturisasi		--	43,748,607,061	Restructuring Transactions
Entitas Sepengendali				of Entities Under Common Control
Saldo Laba				Retained Earnings
Dicadangkan		2,111,085	2,111,085	Appropriated
Belum Dicadangkan		(202,320,210)	(161,272,523)	Unappropriated
Penghasilan Komprehensif Lain		(44,891)	--	Other Comprehensive Income
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan				Equity Attributable to Owner of
Kepada Pemilik Entitas Induk		36,198,136,717	43,602,445,623	the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	34	1,695,403	--	Non Controlling Interests
TOTAL EKUITAS		36,199,832,120	43,602,445,623	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		94,537,814,548	97,743,811,935	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Disajikan Kembali dalam Catatan 4

*) As Restated in Note 4

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT AND LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2021 Rp	2020 *) Rp	
PENDAPATAN	35	9,732,833,584	10,459,370,952	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	36	(8,760,520,441)	(8,596,807,551)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		972,313,143	1,862,563,401	GROSS PROFIT
Beban Pemasaran	37	(2,723,905,528)	(2,924,433,679)	Marketing Expenses
Beban Umum dan Administrasi	38	(3,719,845,907)	(2,295,803,182)	General and Administrative Expenses
Beban Lain-lain	40	(343,911,418)	(332,469,003)	Other Expenses
Pendapatan Lain-lain	39	333,655,168	245,722,171	Other Income
RUGI USAHA		(5,481,694,542)	(3,444,420,292)	OPERATING LOSS
Pendapatan Keuangan	41	83,921,402	287,045,767	Finance Income
Beban Keuangan	42	(2,780,798,012)	(2,428,517,557)	Finance Costs
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	15	(131,478,148)	(111,252,384)	Equity Loss of Associates Entities
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN MANFAAT PAJAK PENGHASILAN BADAN		(8,310,049,300)	(5,697,144,466)	LOSS BEFORE FINAL TAX EXPENSE AND INCOME TAX BENEFIT
RUGI OPERASI YANG DIHENTIKAN		(84,116,150)	--	LOSS OF DISCONTINUED OPERATIONS
RUGI SEBELUM PAJAK		(8,394,165,450)	(5,697,144,466)	LOSS BEFORE TAX
Pajak Final		(162,275,156)	(161,967,871)	Final Tax Expense
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN		(8,556,440,606)	(5,859,112,337)	LOSS BEFORE CORPORATE INCOME TAX
Pajak Kini		(103,946,324)	(59,471,136)	Current Tax
Pajak Tanggungan		1,124,222,719	769,075,093	Deferred Tax
RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA		(7,536,164,211)	(5,149,508,380)	LOSS FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT
RUGI KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE LOSS
Pos yang Tidak akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi				Items That will Not be Reclassified to Profit or Loss
Kerugian Aktuarial dari Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pascakerja		(26,253,220)	(950,501,934)	Actuarial Losses from Remeasurement on the Post-Employment Benefits Program
Manfaat (Beban) Pajak Terkait		2,801,877	125,177,547	Related Tax Benefits (Expense)
Pos yang akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi				Items That will Not be Reclassified to Profit or Loss
Perubahan Nilai Wajar				Changes in Fair Value of
Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang		(1,431,252)	3,394,139	Short-Term and Long-Term Investment
Laba (Rugi) Komprehensif Entitas Asosiasi		1,693,562	72,543	Comprehensive Income (Loss) of Associate
RUGI KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(23,189,033)	(821,857,705)	OTHER COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR AFTER TAX
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA		(7,559,353,244)	(5,971,366,085)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR YEAR AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT
Penyesuaian Proforma Rugi Tahun Berjalan		7,495,116,524	5,141,954,769	Proforma Adjustment of Loss for the Year
TOTAL RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN:				TOTAL LOSS FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		(41,047,687)	(7,553,611)	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali		--	--	Non-Controlling Interests
		(41,047,687)	(7,553,611)	
Penyesuaian Proforma Rugi Komprehensif Tahun Berjalan		7,518,260,666	5,963,812,474	Proforma Adjustment of Comprehensive Loss for the Year
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN:				TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		(41,092,578)	(7,553,611)	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali		--	--	Non-Controlling Interests
		(41,092,578)	(7,553,611)	

*) Disajikan Kembali dalam Catatan 4

*) As Restated in Note 4

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CHANGES IN EQUITY**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang Dapat Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Parent Entity

Catatan	Proforma Ekuitas yang Timbul dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/										Jumlah Ekuitas/ Total Equity Rp
	Modal Disetor/ Share Capital Rp	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid - in Capital Rp	Proforma Ekuitas yang Timbul dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/	Penghasilan Komprehensif Lain/ Others Comprehensive Income Rp	Dicadangkan/ Appropriated Rp	Saldo labar/ Retained Earnings Belum Dicadangkan/ Unappropriated Rp	Total/ Total Rp	Kepentingan Non Pengendali/ Non Controlling Interests Rp	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019		
	13,000,000	--	--	--	2,111,085	(153,485,779)	(138,374,694)	--	(138,374,694)		
Proforma Ekuitas yang Timbul dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/	--	--	49,825,941,689	--	--	--	49,825,941,689	--	Proforma Equity Arising from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control		
	13,000,000	--	49,825,941,689	--	2,111,085	(153,485,779)	49,887,566,995	--	49,887,566,995		
Penyesuaian Saldo Awal atas Penerapan Penerapan PSAK 71 Setelah Pajak Efek Penyesuaian Proforma	--	--	(113,522,154)	--	--	(233,133)	(233,133)	--	Beginning Balance Adjustment for Implementation of PSAK 71 - Net of Tax Effect of Proforma Adjustment		
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	(821,857,705)	--	--	--	(821,857,705)	--	Others Comprehensive Income		
Rugi Tahun Berjalan	--	--	(5,141,954,769)	--	--	(7,553,611)	(5,149,508,380)	--	Loss for the Year		
SALDO PER 31 DESEMBER 2020 *)	13,000,000	--	43,748,607,061	--	2,111,085	(161,272,523)	43,602,445,623	--	43,602,445,623		
Akuisisi Saham Entitas Sepengendali/	65,151,366,785	(28,765,976,052)	(36,230,346,395)	--	--	--	155,044,338	1,695,403	Acquisition of Under Common Entities Shares		
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	(23,144,142)	(44,891)	--	--	(23,189,033)	--	Others Comprehensive Income		
Rugi Tahun Berjalan	--	--	(7,495,116,524)	--	--	(41,047,667)	(7,536,164,211)	--	Loss for the Year		
SALDO PER 31 DESEMBER 2021	65,164,366,785	(28,765,976,052)	--	(44,891)	2,111,085	(202,320,210)	36,198,136,717	1,695,403	36,199,832,120		

*) Disajikan Kembali dalam Catatan 4

*) As Restated in Note 4

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements taken as a whole

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2021 Rp	2020 *) Rp	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan		9,578,200,283	9,464,152,219	Cash Received from Customers
Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Pihak Ketiga		(7,401,984,546)	(8,781,961,632)	Cash Paid to Suppliers and Third Parties
Kas yang Dihasilkan dari Aktivitas Operasi		2,176,215,737	682,190,587	Cash Provided from Operating Activities
Penghasilan Bunga		81,624,374	276,110,846	Interest Received
Pembayaran Bunga		(2,824,873,509)	(2,480,093,303)	Payment of Interest
Restitusi Pajak		562,099,391	15,502,703	Tax Restitution
Pembayaran Pajak Penghasilan		(292,977,043)	(725,786,259)	Payment of Tax Income
Pembayaran Lainnya		(39,183,000)	(38,541,000)	Received from Other Income
Pembayaran kepada Karyawan		(2,871,103,440)	(3,290,598,526)	Payment to Employee
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		(3,208,197,490)	(5,561,214,952)	Net Cash Flows Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Hasil Pelepasan Aset Tetap	18	106,246,512	94,933,683	Proceeds from Disposal of Fixed Assets
Perolehan Aset Tetap dan Properti Investasi	17, 18, 49	(2,493,336,411)	(6,550,048,810)	Acquisitions of Fixed Assets and Investment Property
Hasil Penjualan Aset Keuangan Lainnya		--	20,000,000	Proceeds from the Sale of Other Financial Assets
Penerimaan dari Investasi Jangka Pendek	6	43,203,865	597,246,828	Receipt from Short-Term Investment
Pengeluaran untuk Investasi Jangka Pendek		(33,320,000)	(27,500,000)	Payment for Short-Term Investment
Perolehan Aset Takberwujud		(11,690,965)	(116,611,761)	Acquisitions of Intangible Assets
Penerimaan dari Investasi Jangka Panjang	14	5,164,000	20,000,000	Receipt from Long-Term Investment
Pengeluaran untuk Investasi Jangka Panjang		--	(8,600,000)	Payment for Long-Term Investment
Penerimaan dari Pelepasan Entitas Anak		439,998,887	--	Receipts from Disposal of Subsidiaries
Penerimaan Kas yang Dibatasi Penggunaannya		--	9,000,000	Restricted Cash Receipts
Penambahan Investasi Asosiasi	15, 49	(366,283,690)	(85,000,000)	Addition of Investment in Associates
Penerimaan Dividen	15	30,000,000	--	Dividend Receipt
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(2,280,017,802)	(6,046,580,060)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Pencairan Utang Bank Jangka Pendek		1,402,991,008	531,038,666	Drawdown of Short Term Bank Loans
Pembayaran Utang Bank Jangka Pendek		--	(32,000,000)	Payment of Short Term Bank Loans
Pencairan Utang Bank Jangka Panjang		4,936,281,720	4,543,160,015	Drawdown of Long Term Bank Loans
Pembayaran Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Jangka Panjang		(519,275,042)	(909,386,387)	Payment of Long Term Bank and Finance Institutions Loans
Penerimaan Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah		1,611,900,000	2,250,000,000	Receipt of Bonds Payable and Sukuk Ijarah
Pembayaran Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah		(2,090,000,000)	--	Payment of Bonds and Sukuk Ijarah
Pembayaran Liabilitas Sewa		(151,356,132)	(134,862,836)	Payment of Lease Liabilities
Pembayaran Biaya Transaksi Utang Bank		(4,500,000)	(8,000,000)	Payment of Bank Debt Transaction Fee
Pembayaran Biaya Transaksi Utang Obligasi		(1,623,508)	(3,462,000)	Payment of Bonds Payable Transaction Fee
Pembayaran Dividen Tunai kepada Kepentingan Non-pengendali		--	(43,799)	Cash Dividend Paid to Non-Controlling Interest
Penerimaan dari (Pembayaran kepada) Pihak Berelasi		(8,934,504)	24,669,539	Receipts from (Payment to) Related Parties
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		5,175,483,542	6,261,113,198	Net Cash Flows Provided by Financing Activities
PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS		(312,731,750)	(5,346,681,814)	DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
DAMPAK DARI PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		(1,801,453)	(3,993,241)	EXCHANGE RATES FLUCTUATION EFFECTS ON CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		4,040,130,634	9,390,805,689	CASH DAN CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	5	<u>3,725,597,431</u>	<u>4,040,130,634</u>	CASH DAN CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

*) Disajikan Kembali dalam Catatan 4
Tambahkan informasi arus kas disajikan dalam Catatan 49

*) As Restated in Note 4
Additional information of cash flow presented in Note 49

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Umum

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebelumnya bernama PT Survai Udara Penas (Persero) ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 31 Mei 1961 sesuai Peraturan Pemerintah No. 197 tahun 1961 dengan status Perusahaan Negara (PN) bernama Perusahaan Negara Aerial Survey disingkat Penas. Pada tahun 1974 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46/1974 bentuk perusahaan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Penas. Pada tahun 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48, status perusahaan ditingkatkan menjadi Perusahaan Terbatas (Persero) bernama PT Survai Udara Penas (Persero) yang berorientasi profit. Badan hukum PT Survai Udara Penas (Persero) sebagai Perusahaan Terbatas (Persero) dimuat dalam Akta Notaris Muhani Salim, S.H., No. 203 tanggal 30 Desember 1992. Perubahan nama PT Survai Udara Penas (Persero) menjadi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dilakukan berdasarkan Akta No. 23 tanggal 9 Agustus 2021 oleh Desman, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan AHU-AH.01.03-0438677 tanggal 19 Agustus 2021.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta No.65 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0076120.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021 (Catatan 1.b).

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan utama Perusahaan adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding di bidang pariwisata dan pendukung, melaksanakan kegiatan investasi dan konsultasi manajemen pada sektor transportasi, pariwisata, retail, dan sektor lain yang terkait dengan kegiatan usaha, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Perusahaan berkedudukan di Puri Sentra Niaga Blok B-36 Jl. Kalimalang, Jakarta Timur.

1. General

1.a. Establishment and General Information

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) previously named PT Survai Udara Penas (Persero) (the "Company") was established on May 31, 1961 in accordance with Government Regulation No. 197 year 1961 with the status of a State Company (PN) named the State Company Aerial Survey abbreviated Penas. In 1974 based on Government Regulation no. 46/1974 the form of the company changed to Public Company (Perum) Penas. In 1991 based on Government Regulation No. 48, the status of the Company was upgraded to a Limited Company (Persero) named PT Survai Udara Penas (Persero) which was profit oriented. The legal entity of PT Survai Udara Penas (Persero) as a Limited Liability Company (Persero) is contained in the Notary Deed of Muhani Salim, S.H., No. 203 dated December 30, 1992. The name change of PT Survai Udara Penas (Persero) to PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) was based on Deed No. 23 dated August 9, 2021 by Desman, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The amendment has been accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by decree AHU-AH.01.03-0438677 dated August 19, 2021.

The Articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No.65 dated December 15, 2021 was made in presence of Desman, S.H., M.Hum., Notary in Jakarta, which the Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-0076120.AH.01.02.TAHUN 2021 on December 28, 2021 (Note 1.b).

Based on article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's main activities are to carry out business activities as a holding company in the tourism and supporting sectors, carry out investment and management consulting activities in the transportation, tourism, retail and other sectors related to business activities, as well as optimize utilization of Company resources based on the principles of good corporate governance.

The Company is domiciled at Puri Sentra Niaga Blok B-36 Jl. Kalimalang, East Jakarta.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1.b. Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung

Pada tahun 2021, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi membentuk Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung di bawah PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) yang sebelumnya bernama PT Survai Udara Penas (Persero), yang berganti nama seiring dengan penunjukkan PENAS sebagai induk Holding Pariwisata. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara ("Penas") menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Tugas dan tujuan Holding BUMN Pariwisata Dalam PP Nomor 72 Tahun 2021 tersebut, dijelaskan mengenai maksud dan tujuan pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung di bawah PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), yaitu melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding di bidang pariwisata dan pendukung, melaksanakan kegiatan investasi dan konsultasi manajemen pada sektor transportasi, pariwisata, retail, dan sektor lain yang terkait dengan kegiatan usaha, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk tahap pertama, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) menjadi pemimpin Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung yang beranggotakan PT Angkasa Pura I ("AP I"), PT Angkasa Pura II ("AP II"), PT Hotel Indonesia Natour ("HIN"), PT Sarinah ("Sarinah") dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko ("TWC"). PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) akan menjadi pemimpin dari Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung yang merupakan Holding bersifat ekosistem untuk mengintegrasikan berbagai fungsi dalam menunjang sektor pariwisata.

Selanjutnya untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan, ditetapkanlah PP No. 104 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada AP I, AP II, HIN, Sarinah dan TWC yang kemudian dinilai penyertaan tersebut melalui Keputusan

1.b. Holding for Tourism and Supporting SOEs

In 2021, the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) officially formed a Tourism and Supporting SOEs Holding under PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) previously named PT Survai Udara Penas (Persero), which changed its name along with the appointment of PENAS as the holding company for Tourism. This refers to Government Regulation (PP) Number 72 of 2021 dated July 1, 2021 concerning Amendments to Government Regulation Number 48 of 1991 concerning the Transfer of the Form of a Public Company (Perum) Survai Udara ("Penas") to a State Owned Enterprises (Persero). Duties and objectives of Holding Tourism SOEs In PP Number 72 in 2021, it is explained about the tasks and objectives of establishing Tourism and Supporting SOEs Holdings under PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), namely carrying out business activities as holding companies in the tourism and supporting sectors, carrying out activities investment and management consulting in the transportation, tourism, retail, and other sectors related to business activities, as well as optimizing the utilization of Company resources based on the principles of good corporate governance.

For the first stage, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) became the leader of the Tourism and Supporting SOEs Holding consisting of PT Angkasa Pura I ("AP I"), PT Angkasa Pura II ("AP II"), PT Hotel Indonesia Natour (HIN), PT Sarinah ("Sarinah") and PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan and Ratu Boko. ("TWC"). PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) will be the leader of the Tourism and Supporting SOEs Holding which is an ecosystem holding to integrate various functions in supporting the tourism sector.

Furthermore, to strengthen the capital structure and increase the Company's business capacity, Government Regulation No. 104 of 2021 dated October 6, 2021 concerning the addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation to the Share Capital of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) has been enacted from the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia. Indonesia's participation in AP I, AP II, HIN, Sarinah and TWC which assessed for participation through

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Menteri Keuangan RI No. 498/KMK.06/2021 tanggal 6 Desember 2021 sebesar total Rp65.151.366.785.

Setelah melalui Perjanjian No. PERJ-14/MBU/12/2021 No. Perji-14/AVIATA-BUMN/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada AP I, AP II, HIN, Sarinah dan TWC kepada dan dalam rangka penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan ("inbreg"), dibuatlah Akta No.65 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0076120.AH. 01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Dengan demikian Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung efektif terbentuk setelah Perusahaan menjadi pemegang saham mayoritas dan menerima Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-107/MBU/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 dari Pemerintah RI terkait pemberian kuasa khusus kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada AP I, AP II, HIN, Sarinah dan TWC.

1.c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	Triawan Munaf	--	President Commissioner and Independent Commissioner
Komisaris	Odo Rene Mathew Manuhutu	Sudarto	Commissioner
Komisaris	Wihana Kirana Jaya	--	Commissioner
Komisaris Independen	Elwin Chandra Mochsin	--	Independent Commissioner
Dewan Direksi			Board of Directors
Direktur Utama	Dony Oskaria	Daulat Musa	President Director
Wakil Direktur Utama	Edwin Hidayat Abdallah	--	Vice President Director Human Capital and Digital Director
Direktur SDM dan Digital	Herdy Rosadi Harman	--	

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 498/KMK.06/2021 dated December 6, 2021, amounting to a total of Rp65,151,366,785.

After going through the Agreement No. PERJ-14/MBU/12/2021 No. Perji-14/AVIATA-BUMN/12/2021 dated December 14, 2021 regarding the Agreement on the Transfer of Rights to the Shares of the Republic of Indonesia at AP I, AP II, HIN, Sarinah and TWC to and in the context of adding the Republic of Indonesia State Equity Participation to the Company's Share Capital ("inbreg"), a Deed No. 65 dated December 15, 2021 was made in presence of Desman, S.H., M.Hum., Notary in Jakarta, which the Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-0076120.AH. 01.02. YEAR 2021 on December 28, 2021.

Therefore the Tourism and Supporting SOEs Holding is effectively formed after the Company becomes the majority shareholder and receives a Special Power of Attorney Number: SKK-107/MBU/12/2021 dated December 14, 2021 from the Government of the Republic of Indonesia regarding the granting of special powers to the Company to take actions that become the authority and/or rights of Series A Dwiwarna Shareholder in AP I, AP II, HIN, Sarinah and TWC.

1.c. Board of Commissioners, Directors and Employees

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebanyak 13.549 dan 14.836 orang (tidak diaudit).

The number of employees of the Company and subsidiaries as of December 31, 2021 and 2020 were 13,549 and 14,836, respectively (unaudited).

1.d. Entitas Anak

Perusahaan memiliki pengendalian entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

1.d. Subsidiaries

The Company has consolidated control of subsidiaries as follows:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan Usaha Utama/ Business Activities	Presentase Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung Percentage of Ownership (Direct and Indirect)		Total Aset (dalam Ribuan Rupiah)/ Total Assets (In Thousand Rupiah)	
			2021	2020	2021	2020
			%	%	Rp	Rp
PT Angkasa Pura I (AP I)	Jakarta	Jasa	99.99	99.99	42,627,524,784	42,576,844,851
PT Angkasa Pura Logistik (APL)	Jakarta	Logistik	99.72	99.72	458,037,854	771,435,978
PT Angkasa Pura Hotel (APH)	Jakarta	Hotel	99.99	99.99	649,566,966	665,991,075
PT Angkasa Pura Properti (APP1)	Jakarta	Properti	99.96	99.96	295,290,473	615,551,087
PT Angkasa Pura Suport (APS1)	Jakarta	Jasa	99.81	99.81	1,194,271,156	1,316,709,758
PT Angkasa Pura Retail (APR)	Jakarta	Trading	97.50	97.50	121,718,145	70,646,915
PT Gapura Angkasa (GA)	Jakarta	Jasa	7.76	7.76	1,086,021,000	1,438,530,000
PT Angkasa Pura II (AP II)	Tangerang	Jasa	99.99	99.99	41,764,049,000	44,435,973,000
PT Gapura Angkasa (GA)	Jakarta	Jasa	46.62	46.62	1,086,021,000	1,438,530,000
PT Angkasa Pura Kargo (APK)	Tangerang	Logistik	99.95	99.95	485,409,000	449,962,000
PT Angkasa Pura Propertindo (APP2)	Tangerang	Properti	99.93	99.93	190,155,000	215,527,000
PT Angkasa Pura Aviasi (APA)	Tangerang	Jasa	100.00	99.00	26,325,000	27,296,000
PT Angkasa Pura Solusi (APS2)	Tangerang	Jasa	99.99	99.99	1,021,353,000	954,716,000
PT Angkasa Pura Solusi Integra (APSI)	Tangerang	Jasa	80.00	80.00	33,353,000	25,358,000
PT Angkasa Pura Solusi Digital (APSD)	Tangerang	Jasa	99.00	99.00	146,071,000	65,281,000
PT Hotel Indonesia Natour (HIN)	Jakarta	Hotel	99.99	99.99	8,766,245,762	9,820,801,061
PT Hotel Indonesia Group (HIG)	Jakarta	Hotel	51.00	51.00	1,037,299	1,657,550
PT Hotel Indonesia Properti (HIPRO) *)	Jakarta	Properti	--	--	--	--
PT Sarinah (Sarinah)	Jakarta	Perdagangan	99.99	99.99	514,231,153	275,692,809
PT Sari Valuta Asing (Sari Valas)	Jakarta	Perdagangan	99.99	99.99	7,206,101	6,401,927
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC)	Yogyakarta	Jasa	99.99	99.99	802,410,733	700,878,268
PT Bhumi Visatanda Indonesia (BVI)	Yogyakarta	Jasa	99.98	99.98	9,158,146	9,158,146
PT Manajemen CBT Nusantara (MCN)	Magelang	Perdagangan	51.22	33.33	2,056,882	2,056,882

*) Pada tahun 2021, HIN mendirikan HIPRO dan di tahun yang sama melepas kepemilikannya sebesar 99% ke PT Wijaya Karya Realty.

*) In 2021, HIN established HIPRO and in the same year relinquished its 99% ownership to PT Wijaya Karya Realty.

PT Angkasa Pura I ("AP I")

AP I pertama kali didirikan dalam bentuk Perusahaan Negara dengan nama Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 33 Tahun 1962.

PT Angkasa Pura I ("AP I")

AP I was first established as a State Company by the name of the State Enterprise (PN) Angkasa Pura Kemayoran by the Indonesian Government Regulation (PP) No. 33 Year 1962.

Anggaran Dasar AP I beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham AP I No. 66 tanggal 15 Desember 2021 mengenai perubahan struktur pemegang saham AP I. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 13 Januari 2022.

The Articles of Association of AP I have changed several times, most recently based on the Deed of Statement of Decision of the Shareholders of AP I No. 66 dated December 15, 2021 concerning the change of the shareholder structure of AP I. The amendment to the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights dated January 13, 2022.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham AP I pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jenis Saham/ Type of Shares	Lembar Saham/ Shares	Kepemilikan/ Ownership %	Total/ Total Rp
Pemerintah Indonesia/ <i>Government of The Republic of Indonesia</i>	Seri A Dwiwarna	1	0.00002	1,000
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	6,414,411	99.99998	6,414,411,000
Total		6,414,412	100	6,414,412,000

PT Angkasa Pura II (“AP II”)

AP II sebelumnya bernama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1984.

Anggaran Dasar AP II telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris I Ketut R. Herawan, S.H., M.Kn., No. 91 tanggal 22 Desember 2021 mengenai perubahan nama AP II dan struktur pemegang saham AP II. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 4 Januari 2022 melalui keputusan No. AHU-AH.01.03-0004213.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham AP II pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jenis Saham/ Type of Shares	Lembar Saham/ Shares	Kepemilikan/ Ownership %	Total/ Total Rp
Pemerintah Indonesia/ <i>Government of The Republic of Indonesia</i>	Seri A Dwiwarna	1	0.00001	1,000
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	15,971,651	99.99999	15,971,651,000
Total		15,971,652	100	15,971,652,000

PT Hotel Indonesia Natour (“HIN”)

HIN merupakan perubahan nama dari PT Hotel Indonesia Internasional (Persero) setelah bergabungnya PT National Hotel & Tourism (Persero) (“PT Natour”) ke dalam PT Hotel Indonesia Natour (Persero). Kedua HIN tersebut merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa kepariwisataan, khususnya hotel dan restoran. Penggabungan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1998.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The details of the shareholders and their share ownerships of AP I as of December 31, 2021 are as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jenis Saham/ Type of Shares	Lembar Saham/ Shares	Kepemilikan/ Ownership %	Total/ Total Rp
Pemerintah Indonesia/ <i>Government of The Republic of Indonesia</i>	Seri A Dwiwarna	1	0.00002	1,000
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	6,414,411	99.99998	6,414,411,000
Total		6,414,412	100	6,414,412,000

PT Angkasa Pura II (“AP II”)

AP II previously named Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng, was established by Government Regulation (PP) No. 20 Year 1984.

AP II articles of association have been amended several times, the latest amendments through Notarial Deeds No. 91 dated December 22, 2020 of I Ketut R. Herawan, S.H., M.Kn., regarding change of AP II’s name and AP II shareholder structure. Such Amendment of Article of Association has been approved by Ministry of Law and Human Rights in decision letter No.AHU-AH.01.03-0004213 dated January 4, 2022.

The details of the shareholders and their share ownerships of AP II as of December 31, 2021 are as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jenis Saham/ Type of Shares	Lembar Saham/ Shares	Kepemilikan/ Ownership %	Total/ Total Rp
Pemerintah Indonesia/ <i>Government of The Republic of Indonesia</i>	Seri A Dwiwarna	1	0.00001	1,000
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	15,971,651	99.99999	15,971,651,000
Total		15,971,652	100	15,971,652,000

PT Hotel Indonesia Natour (“HIN”)

HIN is a name change from PT Hotel Indonesia Internasional (Persero) after the joining of PT National Hotel & Tourism (Persero) (“PT Natour”) into PT Hotel Indonesia Natour (Persero). The two companies are State-Owned Enterprises (SOEs) engaged in tourism services, especially hotels and restaurants. The merger was carried out based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 27 of 1998.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tahun 2021, anggaran dasar HIN mengalami perubahan berdasarkan Akta Penyesuaian Kegiatan Usaha KBLI HIN, Notaris Lenny Faisyah, S.H.,M.Kn No. 69 tanggal 25 Agustus 2021 yang berisikan penambahan jenis usaha dan perubahan pada pasal 3, maksud dan tujuan HIN adalah melakukan usaha dibidang industri jasa perhotelan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh HIN untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai HIN dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham HIN pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jenis Saham/ Type of Shares	Lembar Saham/ Shares	Kepemilikan/ Ownership %	Total/ Total Rp
Pemerintah Indonesia/ Government of The Republic of Indonesia	Seri A Dwiwarna	1	0.001	1,000
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	101,699	99.999	101,699,000
Total		101,700	100	101,700,000

PT Sarinah (“Sarinah”)

Sarinah didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 17 Agustus 1962 dengan nama PT Departement Store Indonesia dan diubah dengan nama PT Departement Store Indonesia (DSI) Sarinah dengan Akta No. 50 tanggal 18 Oktober 1962 dan Akta No. 89 tanggal 29 Januari 1963 ketiganya dari Notaris Eliza Pondaag.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan No. S-973/MBU/12/2021 dan No. S-081/PD/12/2021 tentang perubahan anggaran dasar, telah diputuskan bahwa Negara Republik Indonesia mengalihkan seluruh saham seri B pada perseroan dalam rangka penambahan modal Negara Republik Indonesia pada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero).

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Sarinah pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

In 2021, the articles of association of HIN underwent changes based on the Deed of Adjustment of KBLI Business Activities of HIN, Notary Lenny Faisyah, S.H., M.Kn No. 69 dated August 25, 2021 which contains additional types of business and changes to article 3, the aims and objectives of HIN are to conduct business in the hospitality service industry and optimize the use of resources owned by HIN to produce high quality and powerful goods and/or services. strong competitiveness to gain/pursue profits in order to increase the value of HIN by applying the principles of a Limited Liability Company.

The details of the shareholders and their share ownerships of HIN as of December 31, 2021 are as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jenis Saham/ Type of Shares	Lembar Saham/ Shares	Kepemilikan/ Ownership %	Total/ Total Rp
Pemerintah Indonesia/ Government of The Republic of Indonesia	Seri A Dwiwarna	1	0.001	1,000
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	101,699	99.999	101,699,000
Total		101,700	100	101,700,000

PT Sarinah (“Sarinah”)

Sarinah was established based on Deed No. 33 dated August 17, 1962 under the name PT Department Store Indonesia and changed to PT Department Store Indonesia (DSI) Sarinah with Deed No. 50 dated October 18, 1962 and Deed No. 89 dated January 29, 1963 all three from Notary Eliza Pondaag.

Based on the Decision of the Shareholders of the Company's Company No. S-973/MBU/12/2021 and No. S-081/PD/12/2021 concerning amendments to the articles of association, it has been decided that the Republic of Indonesia shall transfer all series B shares to the company in order to increase the capital of the Republic of Indonesia in PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero).

The details of the shareholders and their share ownerships of Sarinah as of December 31, 2021 are as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pemegang Saham/ Shareholders	Jenis Saham/ Type of Shares	Lembar Saham/ Shares	Kepemilikan/ Ownership %	Total/ Total Rp
Pemerintah Indonesia/ Government of The Republic of Indonesia	Seri A Dwiwarna	1	0.002	1,000
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	46,849	99.998	46,849,000
Total		46,850	100	46,850,000

**PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko (“TWC”)**

TWC didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1980 dengan Akta Notaris No. 19 tanggal 15 Juli 1980 oleh Soeleman Ardjosasmita S.H., Notaris di Jakarta, semula dengan nama PT Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan. Dengan masuknya kawasan Ratu Boko menjadi bagian dari Taman Wisata, maka nama Perusahaan berubah menjadi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) sesuai dengan Akta Notaris No. 15 tanggal 3 Agustus 1994 oleh Soekeimi, S.H.

Anggaran dasar TWC telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham TWC No. S-974/MBU/12/2021 tanggal 14 Desember 2021.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham TWC pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko (“TWC”)**

TWC was established based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 7 year 1980 with Notarial Deed No. 19 dated July 15, 1980 by Soeleman Ardjosasmita S.H., Notary in Jakarta, originally under the name PT Taman Wisata Candi Borobudur and Prambanan. With the inclusion of the Ratu Boko area as part of the Taman Wisata, the Company's name changed to PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan and Ratu Boko (Persero) in accordance with Notarial Deed No. 15 dated August 3, 1994 by Soekeimi, S.H.

TWC articles of association have been amended several times. The latest amendments based on the Decision of the Shareholders of TWC No. S-974/MBU/12/2021 dated December 14, 2021.

The details of the shareholders and their share ownerships of TWC as of December 31, 2021 are as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jenis Saham/ Type of Shares	Lembar Saham/ Shares	Kepemilikan/ Ownership %	Total/ Total Rp
Pemerintah Indonesia/ Government of The Republic of Indonesia	Seri A Dwiwarna	1	0.0004	1,000
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	249,999	99.9996	249,999,000
Total		250,000	100	250,000,000

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anaknya secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”.

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the “Group”

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

2.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan

2. Significant Accounting Policies

2.a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan
Indonesia (DSAK – IAI).

**2.b. Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan
Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

**2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar
Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku
Efektif pada Tahun Berjalan**

Berikut adalah amendemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, yaitu:

- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd;
- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Standards (ISAK) issued by the Financial
Accounting Standard Board – Indonesian
Institute of Accountant (DSAK – IAI).

**2.b. Basis of Presentation and Preparation of the
Consolidated Financial Statement**

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

**2.c. New and Revised Statements and
Interpretation of Financial Accounting
Standards Effective in the Current Year**

The following are amendment and improvements to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 22 (Amendment 2019): Business Combinations regarding Definition of Business;
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62, and Amendment PSAK 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2;
- PSAK 110 (Improvement 2020): Accounting for Sukuk;
- PSAK 111 (Improvement 2020): Accounting for Wa'd; and
- PSAK 112: Accounting for Wakaf;

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 13 (Penyesuaian Tahunan 2021): Properti Investasi;
- PSAK 48 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 66 (Penyesuaian Tahunan 2021): Pengaturan Bersama; dan
- ISAK 16 (Penyesuaian Tahunan 2021): Perjanjian Konsesi Jasa.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anaknya seperti disebutkan pada Catatan 1.d.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan, yakni Perusahaan terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Perusahaan memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Perusahaan mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Perusahaan secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal kehilangan pengendalian.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam Grup terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- PSAK 1 (Annual Improvement 2021): Presentation of Financial Statements;
- PSAK 13 (Annual Improvement 2021): Investment Properties;
- PSAK 48 (Annual Improvement 2021): Impairment of Assets
- PSAK 66 (Annual Improvement 2021): Joint Arrangement; and
- ISAK 16 (Annual Improvement 2021): Service Concession Arrangements.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

2.d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements in comprise the financial statements of the Company and its subsidiary as described in Note 1.d.

A subsidiary is an entity controlled by the Company, which the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (which substantive rights) are considered when assessing whether the Company controls another entity.

The Group's consolidated financial statements in Corporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its subsidiaries are directly and indirectly controlled. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Company effectively obtains control of the acquired business, until that loses control.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transaction between entities of the group are eliminated in full.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- a. Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- c. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d. Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- e. Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
- f. Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Group attributed the profit or loss each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (which transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration received or paid is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group losses control, the Group:

- a. *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- b. *Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- c. *Recognizes the fair value of the consideration received, (if any) from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- d. *Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- e. *Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other FAS's, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; and*
- f. *Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

2.e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu Grup yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup.

Karena transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.

Bila entitas yang menerima bisnis kemudian melepas entitas bisnis yang sebelumnya diperoleh, akun tambahan modal disetor yang dicatat sebelumnya, tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

2.f. Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

2.e. Business Combinations of Entities Under Common Control

Business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of the entities that are in the same group, not a change of ownership in terms of economic substance, so that the transaction can not result in a gain or loss for the Group as a whole or the individual entity within the Group.

Due to business combination transactions of entities under common control does not lead to change in economic substance of ownership on the exchanged asset, liability, shares or other exchange ownership instrument, then the transferred asset or liability (in its legal form) is recorded at its carrying amount as well as a business combination under the pooling of interest method.

An entity that receives the business, in a business combination of entities under common control, recognizes the difference between the amount of the consideration transferred and the carrying amount of each transaction of a business combination of entities under common control in equity under additional paid-in capital.

If the entity that received the business, subsequently dispose the business entity acquired previously, the additional paid-in capital recorded before, can not be recognized as a realized gain or loss nor reclassified to retained earning.

2.f. Financial Instrument Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas dengan menggunakan dua dasar yaitu: model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Group's financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

Financial assets are classified into these categories on the basis of both: the Group's business model for managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial assets.

i. Financial Assets Measured at Amortized Costs

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

- *The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the financial assets in order to collect contractual cash flows (held to collect); and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

insignificant in value or infrequent in nature.

ii. *Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")*

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and*
- *The contractual term of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

The financial assets are measured at fair value, where the changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment losses, and foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

iii. *Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")*

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or FVTOCI. Hence, these are measured at FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - i. Jumlah penyisihan kerugian; dan
 - ii. Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

- Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
- Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.
- Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:
 - i. The amount of the loss allowance; and
 - ii. The amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.
- Contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- It eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau

- Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or

- *A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Group's key management personnel.*

Derecognition of Financial Assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Group recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Group retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is reclassified to profit or loss.

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Group retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Derecognition of Financial Liabilities

The Group derecognizes financial liabilities, if and only if the Group obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan. Aset keuangan yang berupa investasi pada instrumen ekuitas tidak dilakukan penurunan nilai.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kredatnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan
- iii. Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Impairment of Financial Assets

The Group recognized expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI, lease receivables, contract assets or loan commitments and financial guarantee contracts. Financial asset in form of investment in equity instrument is not impaired.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then 12 months expected credit loss is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

- i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;
- ii. Time value of money; and
- iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal.

Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment.

For example, a financial asset with 'investment grade' according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Reclassification

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required the Group to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. The Group does not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost.

This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

2.g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

2.h. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- i. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- ii. Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*
- iii. Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement and are not issued as collateral and are not restricted in use.

2.h. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2.i. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

2.j. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The amount of any write-down of inventories to net realisable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realisable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

2.i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the useful life of each expense on a straight-line method (straight-line method).

2.j. Investments in Associates

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies (significant influence).

Investment in associates accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- a. Jika investasi menjadi entitas anak, Grup mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 22 dan PSAK 65;
- b. Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar; dan
- c. Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

2.k. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Klasifikasi pengaturan bersama terdiri atas operasi bersama dan ventura bersama.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama. Ventura bersama merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama. Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

2.l. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Group discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- a. If the investment becomes a subsidiary, the Group account for its investment in accordance with PSAK 22 and PSAK 65;*
- b. If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value; and*
- c. When the Group discontinue the use of the equity method, the Group account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.*

2.k. Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control. The classification of joint arrangement consists of joint operation and joint venture.

The Group classified joint arrangement as joint venture. Joint venture represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers. A joint venturer recognize its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

2.l. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Selanjutnya, properti investasi diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah yang tidak disusutkan) dan rugi penurunan nilai. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 20 tahun.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

- Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
- Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk dijual, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi;
- Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

Investment properties are initially measured at cost, including the purchase price and any directly attributable expenses (legal service fees, property transfer taxes, and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement. Furthermore, investment properties are measured at cost less accumulated depreciation (except land which is not depreciated) and impairment losses. The carrying amount includes the cost of replacing an existing investment property at the time the cost is incurred, if the recognition criteria are met and does not include the daily cost of using the investment property. Buildings are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives of 20 years.

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, there the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, include:

- *Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;*
- *Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;*
- *End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; and*
- *Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.*

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

2.m. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap berupa tanah, setelah pengakuan awal diukur dengan menggunakan model revaluasi. Nilai wajar tanah biasanya ditentukan melalui penilaian berdasarkan bukti pasar yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*). Tanah diakui sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>	
Bangunan Lapangan	5 - 80	<i>Buildings/Fields</i>
Bangunan Gedung	10 - 40	<i>Buildings</i>
Pesawat	30	<i>Aircraft</i>
Kendaraan Bermotor	5 - 10	<i>Vehicles</i>
Mesin dan Peralatan	3 - 15	<i>Machinery and Equipments</i>
Perlengkapan Terminal dan Gedung	5 - 15	<i>Terminal dan Building Equipments</i>
Instalasi dan Jaringan	5 - 20	<i>Installation and Network</i>
<i>Overlay</i>	1.5 - 20	<i>Overlay</i>
Renovasi Bangunan	10	<i>Buildings Renovation</i>
Lain-lain	1 - 20	<i>Others</i>

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset Dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset dalam penyelesaian. Biaya perolehan aset dalam

2.m. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Fixed assets comprised of land, after the initial recognition are measured using the revaluation model. The fair value of land is usually determined through an assessment based on market evidence conducted by a qualified professional appraiser.

Depreciation is recognized using the straight-line method. Land is recognized at acquisition cost and not depreciated. Estimated useful lives of the assets are as follows:

Self-constructed fixed assets are presented as part of the fixed assets under "Assets Under Construction" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of construction in progress. Cost construction in progress shall exclude any internal profits, cost

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

penyelesaian tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

2.n. Sewa

Pada tanggal inisiasi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasi, Grup menilai apakah:

- a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasi – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- b. Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- c. Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

At the end of each reporting period, the Group made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

2.n. Lease

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- a. *The contract involves the use of an identified asset – this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;*
- b. *The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- c. *The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decisionmaking rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:

- Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
- Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Grup Sebagai Penyewa (Lessee)

Pada tanggal inisiasi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks liabilitas sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti penghentian jika Grup cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari utang sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak guna sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Periode penyusutan untuk aset hak-guna dengan opsi beli yang dieksekusi tersebut mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:

- *The Group has the right to operate the asset; or*
- *The Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

The Group as Lessee

At inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following: fixed payments, variable lease payments that depend on an index, amounts expected to be payable under a residual value guarantee and the exercise price under a purchase option, optional renewal period or penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

After the commencement date, the Group measures right-of-use assets at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.

If the lease transfers ownership of the underlying asset at the end of the lease term or if the cost of acquisition of the asset rights indicates the lessee will exercise the call option, then the right of use asset will be depreciated from the beginning of the lease term to the end of the underlying asset's useful life. The depreciation periods for the right-of-use assets with buy options executed should refer to the policy for the property, plant and equipment.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup. Umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Setelah pengakuan awal liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Grup menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah berdasarkan sewa-per-sewa.

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui pada metode garis lurus dan dibebankan pada laba rugi. Pembayaran sewa terkait dengan sewa yang dikecualikan tersebut diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Sewa aset bernilai rendah adalah sewa untuk perlengkapan umum seperti komputer, laptop, telepon genggam, dan perlengkapan kantor lainnya, serta aset lain yang harga barunya tidak lebih dari plafon nilai rendah yang ditetapkan oleh kebijakan Grup.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Group's incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

After the initial acquisition of a lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Group applies the exemption for short term lease; and low value leased asset on a lease by-lease basis.

Furthermore, payments associated with contracts included in the exception, which are payments associated with all short-term leases and certain leases of all low-value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in profit or loss. The lease payments associated with those leases will be recognized as an expense on a straightline basis over the lease term.

Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets are those of general equipments which comprise of computers, tablets, mobile phones and small items of office supplies, and other assets which have value less than the maximum amount of low value set in the Group's policy.

Grup Sebagai Pemberi Sewa (Lessor)

Sewa dimana Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

2.o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset Takberwujud dengan Umur Manfaat Terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus.

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut:

Perangkat Lunak Komputer, Izin dan Lisensi serta Hak Paten; 25 % garis lurus.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

Aset Takberwujud dengan Umur Manfaat Tidak Terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat aset takberwujud dengan umur tak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset takberwujud dengan umur tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

The Group as Lessor

Leases where the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as operating leases. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as expense over the lease term on the same basis as rental income. Operating lease income is recognized as income on a straight-line basis over the lease term.

2.o. Intangible Assets

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite.

Intangible Asset with Finite Useful Life

Intangible asset with finite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method.

Amortisation is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value, over its useful economic life as follows:

Software, Permissions and License as well as Patent; 25% straight line.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial year-end.

Intangible Asset with Indefinite Useful Life

Intangible assets with unlimited useful life are not amortized. The useful life of an intangible asset with an indefinite that is not being amortized is reviewed annually to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If they do not, the change in the useful life assessment from indefinite to finite is accounted for on a prospective basis.

Intangible asset with indefinite life is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2.p. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

2.q. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2.p. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

2.q. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a. pengakuan awal *goodwill*; atau
- b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Tax benefits related to tax loss that can be carried back to recover current tax of prior periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a. the initial recognition of goodwill; or*
- b. the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a. Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b. Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.r. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020 untuk tahun 2021 dan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 untuk tahun 2020.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a. *The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b. *The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *the same taxable entity; or*
 - ii. *different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a. *Has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and*
- b. *Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

2.r. Employee Benefits

Short-Term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short-term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Omnibus Law No. 11/2020 for year 2021 and Labor Law No.13/2003 for year 2020.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- a. Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- b. Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang Lainnya

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Pengukuran liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya konsisten dengan pengukuran liabilitas imbalan pascakerja kecuali untuk keuntungan/kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya diakui pada laba rugi.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation is determined by discounting the benefit.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- a. *When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and*
- b. *When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.*

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

Other Long Term Post-Employment Benefits

The Group provides other long-term employee benefits. The measurement of other long-term employee benefit liabilities is consistent with the measurement of post employment benefit liabilities except for actuarial gain/loss in other long-term employee benefit liability is recognised on profit or loss.

2.s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

- a. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
 - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan.
 - Kontrak memiliki substansi komersial
 - Besar kemungkinan Grup akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan
- b. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- c. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
- d. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
- e. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

2.s. Revenue and Expense Recognition

Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax (VAT). In determining revenue recognition, the Group perform analysis transaction through the following five steps of assessment:

- a. *Identify contracts with customers, with certain criteria as follows:*
 - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract*
 - *The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred*
 - *The contract has commercial substance*
 - *It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred*
- b. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
- c. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.*
- d. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
- e. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pendapatan dari penjualan barang diakui ketika pengendalian dialihkan kepada pelanggan. Terdapat kondisi di mana pertimbangan diperlukan berdasarkan lima indikator pengendalian di bawah ini:

- a. Pelanggan telah memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset dan memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari barang.
- b. Pelanggan memiliki kewajiban kini untuk membayar sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak penjualan.
- c. Pelanggan telah menerima barang. Penjualan barang dapat tergantung pada penyesuaian berdasarkan inspeksi terhadap pengiriman oleh pelanggan. Dalam hal ini, penjualan diakui berdasarkan estimasi terbaik Grup terhadap kualitas dan/atau kuantitas saat pengiriman, dan penyesuaian kemudian dicatat dalam akun pendapatan. Secara historis, perbedaan antara kualitas dan kuantitas, estimasi dan/atau *actual* tidak signifikan.
- d. Pelanggan telah memiliki hak kepemilikan legal atas barang.
- e. Pelanggan telah menerima kepemilikan fisik atas barang.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

2.t. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Revenue from sales of goods is recognized when control transfers to the customer. There may be circumstances when judgement is required based on the five indicators of control below:

- a. The customer has the significant risks and rewards of ownership and has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, the goods.*
- b. The customer has a present obligation to pay in accordance with the terms of the sales contract.*
- c. The customer has accepted the goods. Sales of goods may be subject to adjustment based on the inspection of shipments by the customer. In these cases, sales are recognized based on the Group's best estimate of the grade and/or quantity at the time of shipment, and any subsequent adjustments are recorded against revenue. Historically, the differences between estimated and actual grade and/or quantity are not significant.*
- d. The customer has legal title to the goods.*
- e. The customer has physical possession of the goods.*

Expenses are recognized as incurred on an accruals basis.

2.t. Transactions in Foreign Currency

In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The Group's functional currency is Rupiah.

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, which middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2021 and 2020 as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021 Rp	2020 Rp	
1 Arab Emirates Dirham (AED)	3.874	3.746	1 Arab Emirates Dirham (AED)
1 Australia Dollar (AUD)	10.344	10.771	1 Australia Dollar (AUD)
1 Brunei Darussalam Dollar (BND)	10.534	10.644	1 Brunei Darussalam Dollar (BND)
1 Canadian Dollar (CAD)	11.139	11.019	1 Canadian Dollar (CAD)
1 Swiss Franc (CHF)	15.544	15.982	1 Swiss Franc (CHF)
1 China Yuan (CNY)	2.238	2.161	1 China Yuan (CNY)
1 Uni Europa (EUR)	16.127	17.330	1 Uni Europa (EUR)
1 Great British Poundsterling (GBP)	19.200	19.085	1 Great British Poundsterling (GBP)
1 Hongkong Dollar (HKD)	1.830	1.819	1 Hongkong Dollar (HKD)
1 Japannese Yen (JPY)	124	136	1 Japannese Yen (JPY)
1 Korea Won (KRW)	12	13	1 Korea Won (KRW)
1 Malaysia Ringit (MYR)	3.416	3.492	1 Malaysia Ringit (MYR)
1 New Zealand Dollar (NZD)	9.729	10.116	1 New Zealand Dollar (NZD)
1 Philipinas Peso (PHP)	280	294	1 Philipinas Peso (PHP)
1 Russian Rubel (RUB)	238	233	1 Russian Rubel (RUB)
1 Saudi Arabia Real (SAR)	3.801	3.759	1 Saudi Arabia Real (SAR)
1 Singapura Dollar (SGD)	10.534	10.644	1 Singapura Dollar (SGD)
1 Thailand Bath (THB)	428	470	1 Thailand Bath (THB)
1 Turkish Lira (TRY)	1.550	2.395	1 Turkish Lira (TRY)
1 Taiwan Dollar (TWD)	513	473	1 Taiwan Dollar (TWD)
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	14.269	14.105	1 United Stated Dollar (USD)
1 Vietnam Dong (VND)	0,63	0,63	1 Vietnam Dong (VND)

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.u. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

2.u. Transactions with Related Parties

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a. *A person or a close member of that persons family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b. *One entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others;*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party;*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan pada Catatan 44.

2.v. Provisi

Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban menyebabkan arus keluar sumber daya serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

All significant transactions and balances with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in Note 44.

2.v. Provisions

A provision is recognized when Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount of the obligation can be estimated reliably.

The amount recognized as a provision shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period, by taking into account the risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances. Where a provision is measured using the estimated cash flows to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Grup menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi provisi.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

2.w. Sukuk

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas: (a). aset berwujud tertentu; (b). manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; (c). jasa yang sudah ada maupun yang akan ada; (d). aset proyek tertentu; atau (e). kegiatan investasi yang telah ditentukan.

Grup menerapkan PSAK No. 110 (Penyesuaian 2020) "Akuntansi Sukuk" dalam melakukan transaksi sukuk. PSAK No. 110 (Penyesuaian 2020) diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk.

Sukuk ijarah adalah sukuk yang menggunakan akad ijarah. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang menggunakan akad mudharabah.

Grup Sebagai Penerbit

Sukuk Ijarah

Pengakuan awal sukuk ijarah dilakukan pada saat sukuk ijarah diterbitkan. Sukuk ijarah diakui pada saat Grup menjadi pihak terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah.

Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto, dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

If some or all of the expenditure to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognized when, it is virtually certain that reimbursement will be received when the Group settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognized for the reimbursement shall not exceed the amount of the provisions.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the most current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2.w. Sukuk

Sukuk are the sharia securities represented by a certificate or evidence of ownership of equal denomination and representing individual ownership interest in (not separated or divided): (a). particular intangible assets; (b).existing or future benefits of particular intangible assets; (c).existing or future services; (d).particular project assets; or (e).determined investment activity.

Group adopted PSAK No. 110 (Improvement 2020) "Accounting Sukuk" in the sukuk transaction. PSAK No. 110 (Improvement 2020) is applied to an entity who enters sukuk Ijarah sukuk mudaraba transactions, either as sukuk issuers and investors.

Sukuk ijarah is a sukuk using ijarah's contract. Sukuk mudaraba is sukuk using a mudaraba's contract.

Group as Issuer

Sukuk Ijarah

Initial recognition is done at the time of sukuk ijarah issued. Sukuk Ijarah is recognized when the Group becomes a party bound by the provisions of sukuk ijarah issuance.

Sukuk Ijarah is recognized at its nominal amount, adjusted with any premium or discount, and the transaction costs related with the issuance.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal yang disebabkan karena penyesuaian yang tersebut diatas, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah. Amortisasi tersebut tidak diakui sebagai beban ijarah, tetapi diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah.

Beban Ijarah diakui pada saat terutang.

Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Grup menyajikan sukuk ijarah menjadi liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek.

**3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi Kritis**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap, Properti Investasi dan Aset Takberwujud

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

After initial recognition, if the carrying amount is different from the nominal value due to the adjustments mentioned above, the difference is amortized using a straight line method over the period of sukuk ijarah. Amortization is not recognized as an ijarah's expense, but is recognized as an issuance expense of sukuk ijarah.

Ijarah expense recognized when due.

Sukuk Ijarah is presented as a liability at a net of premium or discount and unamortized transaction costs. Group presents Sukuk Ijarah as long-term liabilities and short-term liabilities.

**3. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Judgment**

The preparation of the Group consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

i. Accounting Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets, Investment Properties and Intangible Assets

The Group reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets and intangible assets based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Nilai tercatat aset tetap dan properti investasi disajikan dalam Catatan 17 dan 18.

Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja dan beban pensiun yang masih harus dibayar tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja dan beban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja dan cadangan dana pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi mengenai asumsi dan jumlah liabilitas dan beban imbalan pascakerja serta dana pensiun diungkapkan pada Catatan 31.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan pengurangan biaya tertentu ketika mengestimasi penyisihan pajak penghasilan Grup. Terdapat transaksi dan perhitungan yang memungkinkan penentuan pajak akhir menjadi tidak pasti selama kegiatan usaha normal. Dimana perhitungan pajak akhir dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada penetapan pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang ditangguhkan dalam periode penentuan pajak tersebut.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned. Carrying amounts of fixed assets and investment properties are disclosed in Notes 17 and 18.

Estimated Pension Expenses and Post Employment Benefits

The present value of post-employment benefits obligations and accrued pension expenses depends on several factors that are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine net pension cost (income) include the discount rate and salary increase rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amount of post-employment benefits and pension expenses.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period, this is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related obligation.

Key assumptions for post-employment benefit obligations and other pension fund reserves are based in part on current market conditions. Information regarding the assumptions and Additional information and total liabilities and post-employment benefits expenses and include pension funds are disclosed in Note 31.

Income Tax

Judgements and assumptions are required in determining the deduction of certain costs when estimating the Groups income tax allowances. There are transactions and calculations that allow the determination of the final tax to be uncertain during the normal course of business. Where the final tax calculation of these matters differs from the amount previously recorded, the difference will have an impact on the determination of income tax and with holding tax withheld during the tax determination period.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kerugian pajak yang dapat dikompensasikan kembali, penyisihan modal dan perbedaan temporer diakui hanya ketika hal-hal tersebut diperhitungkan untuk dapat dipulihkan, yang tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi produksi, jumlah penjualan barang dan jasa, harga komoditas, biaya operasi, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen modal lainnya di masa depan.

Rugi Penurunan Nilai Piutang

Pada tanggal pelaporan Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Grup mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, Grup membandingkan risiko gagal bayar pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya.

Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah jika instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan kondisi ekonomik dan bisnis yang memburuk dalam jangka waktu panjang, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Deferred tax assets, including those arising from recoverable tax losses, capital allowance, temporary differences are recognized only when they are calculated to be recoverable, depending on the formation of sufficient future taxable profit. The assumption of forming future taxable income depends on management's estimate of future cash flows. This depends on estimated future production, total sales of goods and services, commodity prices, operating costs, capital expenditures, dividends and other capital management transactions.

Impairment Loss on Receivables

At the reporting date, the Group assesses whether the credit risk on financial instruments has increased significantly since initial recognition. When making this assessment, the Group considers changes in default risk that occurs over the life of the financial instruments, not changes in the amount of expected credit losses. In making this assessment, the Group compares the risk of default at the reporting date with the risk of default at initial recognition and considers reasonable and supportable information that is available free of charge.

The credit risk of a financial instrument is considered low if the financial instrument has a low risk of default, the borrower has strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and economic and business conditions deteriorate in the long term, but not always, deteriorate capacity. the borrower to meet its contractual cash flow obligations.

Fair Value of Financial Instruments

Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, management judgment is required to

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar. Pengungkapan lebih lanjut tentang nilai wajar terdapat dalam Catatan 48.

ii. Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.f dan 48.

4. Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Berdasarkan Akta No.65 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, mengenai Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal oleh Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) yang berasal dari Pengalihan Seluruh Saham Milik Negara Republik Indonesia pada entitas:

- PT Angkasa Pura I
- PT Angkasa Pura II
- PT Hotel Indonesia Natour
- PT Sarinah
- PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0076120.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

establish fair values. The judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long term derivatives and discount rates, prepayment rates, and default rate assumptions. The other disclosures on fair value are presented in Note 48.

ii. Judgements in Applying the Accounting Policies

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Notes 2.f and 48.

4. Restructuring Transaction Among Entities under Common Control

Based on Deed No.65 dated December 15, 2021 made in presence of Desman, S.H., M.Hum., Notary in Jakarta, regarding Execution of the State Equity Participation by the State of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) derived from the Transfer of All Shares owned by the State of the Republic of Indonesia to the entities below:

- PT Angkasa Pura I
- PT Angkasa Pura II
- PT Hotel Indonesia Natour
- PT Sarinah
- PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of Indonesian Republic with his Decree No. AHU-0076120.AH.01.02.TAHUN 2021 dated December 28, 2021.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Dengan transaksi ini, Perusahaan telah melakukan kombinasi bisnis atau akuisisi dengan entitas-entitas tersebut yang merupakan entitas dalam pengendalian yang sama dengan Perusahaan, yaitu entitas di bawah pengendalian Pemerintah Republik Indonesia. Kombinasi bisnis ini diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK 38 tentang Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

Perusahaan sebagai entitas yang menerima bisnis mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor sebagai "Selisih Nilai Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" sebesar (Rp28.765.976.052) (Catatan 33).

Demikian pula laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan laporan posisi keuangan per 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 telah disajikan kembali seolah-olah transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali telah terjadi sejak saldo awal tahun perbandingan yang disajikan atau tanggal 1 Januari 2020. Jumlah tercatat ekuitas dan laba komprehensif entitas-entitas tersebut sebelum tanggal efektif disajikan sebagai penyesuaian proforma pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, serta laporan posisi keuangan konsolidasian per 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019.

Laporan keuangan konsolidasi yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 sebelum dan setelah disajikan kembali adalah sebagai berikut:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

By this transaction, the Company has carried out a business combination or acquisition with those entities which entities under common control as the Company, which is an entity under control of the Government of the Republic of Indonesia. This acquisition is recognized in the carrying amount based on the pooling of interest method in accordance with the PSAK 38 concerning Business Combination of Entities Under Common Control.

The Company as an entity that receives business recognizes the difference between the amount of consideration transferred and the carrying amount of each business combination transaction between entities under common control in equity and presents it under additional paid-in capital as "Difference in Value of Business Combination between Entities under Common Control" amounting to (Rp28,765,976,052) (Note 33).

In addition, the financial statements for the year ended December 31, 2020 and statement of financial position as of January 1, 2020/ December 31, 2019 have been restated as if a business combination transaction between entities under common control had occurred since comparative beginning balance presented or January 1, 2020. The carrying amount of equity and comprehensive income of those entities before the effective date is presented as a pro forma adjustment in the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020 and consolidated statement of financial position as of January 1, 2020/ December 31, 2019.

The consolidated financial statements for the years ended December 31, 2020 and January 1, 2019/ December 31, 2019 before and after being restated are as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

<u>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>		<u>1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 / January 1, 2020/ December 31, 2019</u>		<u>CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION</u>
	<u>Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported Rp</u>	<u>Disajikan Kembali/ As Restated Rp</u>	<u>Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported Rp</u>	<u>Disajikan Kembali/ As Restated Rp</u>	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	86,413	4,040,130,634	380,156	9,390,805,689	Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka Pendek	--	96,115,483	--	702,362,313	Short Term Investments
Piutang Usaha					Trade Receivables
Pihak Berelasi	--	1,408,190,577	--	554,348,956	Related Parties
Pihak Ketiga	--	1,266,921,606	--	1,442,644,463	Third Parties
Piutang Lain-lain					Other Receivables
Pihak Berelasi		11,250,625	--	35,920,164	Related Parties
Pihak Ketiga	2,464,197	80,135,460	1,274,874	150,050,300	Third Parties
Persediaan	--	58,570,944	--	107,352,766	Inventories
Uang Muka	42,595	59,218,636	42,595	111,234,315	Advance Payments
Biaya Dibayar di Muka	22,527	68,503,538	22,527	205,955,177	Prepaid Expenses
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	--	672,805,226	--	804,805,867	Accrued Revenue
Pajak Dibayar di Muka	2,344,409	1,706,651,487	1,746,674	1,194,732,040	Prepaid Taxes
Aset Lancar Lainnya	--	8,990,366	--	74,457,125	Total Current Assets
TOTAL ASET LANCAR	4,960,141	9,477,484,582	3,466,826	14,774,669,175	NON CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Estimasi Tagihan Pajak	--	754,485,213	--	459,333,258	Estimated Claims for Refundable Tax
Aset Pajak Tangguhan	10,202,745	822,547,722	14,575,350	179,700,328	Deferred Tax Assets
Investasi Jangka Panjang	--	96,459,038	--	103,601,902	Long Term Investments
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	--	543,135,885	10,499,250	563,351,529	Investment in Associates and Joint Venture
Uang Muka Pembelian Tanah	--	3,316,002,785	--	3,316,002,785	Advance for Land Acquisition
Properti Investasi	--	200,254,077	--	227,014,572	Investment Properties
Aset Tetap	17,057,247	81,017,446,756	18,489,961	77,524,247,963	Fixed Assets
Aset Hak-Guna	--	1,189,172,546	--	123,655,413	Right-of-Use Assets
Aset Takberwujud	--	248,792,419	1,991,000	189,574,836	Intangible Assets
Aset Tidak Lancar Lain-lain	387,647	78,030,912	387,647	228,612,906	Other Non Current Assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	27,647,639	88,266,327,353	45,943,208	82,915,095,492	TOTAL NON CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	32,607,780	97,743,811,935	49,410,034	97,689,764,667	TOTAL ASSETS

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

<u>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>		<u>1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 / January 1, 2020/ December 31, 2019</u>		<u>CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION</u>
	<u>Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported Rp</u>	<u>Disajikan Kembali/ As Restated Rp</u>	<u>Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported Rp</u>	<u>Disajikan Kembali/ As Restated Rp</u>	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha					Trade Payables
Pihak Berelasi	514,364	86,026,246	514,364	117,958,999	Related Parties
Pihak Ketiga	2,501,232	574,746,766	2,693,127	711,081,014	Third Parties
Utang Lain-lain					Other Payables
Pihak Berelasi	--	777,952,157	--	--	Related Parties
Pihak Ketiga	28,087,202	3,552,947,057	26,913,031	5,773,499,628	Third Parties
Beban Akrua					Accrued Expenses
Pihak Berelasi	1,401,469	1,196,959	2,899,977	2,695,467	Related Parties
Pihak Ketiga	7,367,486	2,693,754,819	5,892,582	2,827,744,977	Third Parties
Utang Pajak	6,588,612	386,030,249	6,288,845	551,764,205	Taxes Payable
Pendapatan Diterima di Muka	--	252,505,413	--	338,733,217	Unearned Revenues
Liabilitas Imbalan Kerja					Short-term employee Benefit Liabilities
Jangka Pendek	--	199,345,092	--	270,774,824	
Utang Bank dan Lembaga					Short-Terms Bank and Other Financial Institutions Loans
Keuangan Lainnya - Jangka Pendek	--	656,946,836	--	157,908,170	
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun:					Long Term Liabilities - Net of Current Maturities:
Utang Bank Jangka Panjang dan Lembaga Keuangan Lainnya	--	511,104,533	--	538,975,837	Long-Term Bank and Other Financial Institutions Loans
Utang Obligasi	--	2,090,000,000	--	--	Bonds Payable
Surat Utang Jangka Menengah	--	50,000,000	--	50,000,000	Medium Term Notes
Liabilitas Sewa	--	180,061,176	--	--	Lease Liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	46,460,365	12,012,617,303	45,201,926	11,341,136,338	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun:					Long Term Liabilities Net of Current Portion:
Utang Bank Jangka Panjang dan Lembaga Keuangan Lainnya	131,540,006	31,880,566,856	141,862,666	28,225,128,282	Long-Term Bank and Other Financial Institutions Loans
Utang Obligasi	--	5,901,247,132	--	5,734,753,938	Bonds Payable
Surat Utang Jangka Menengah	--	45,000,000	--	45,000,000	Medium Term Notes
Liabilitas Sewa	--	921,886,213	--	--	Lease Liabilities
Utang Jangka Panjang Lainnya	720,136	401,640,420	720,136	392,628,160	Other Long Term Payables
Liabilitas Imbalan Kerja	48,710	2,211,096,518	--	1,139,604,872	Employee Benefits Liabilities
Liabilitas Pajak Tanggahan	--	231,024,839	--	602,390,517	Deferred Tax Liabilities
Pendapatan Ditangguhkan	--	419,486,510	--	419,390,748	Deferred Income
Pendapatan Diterima di Muka	--	96,432,946	--	102,164,817	Unearned Revenues
Utang Provisi	--	20,367,575	--	--	Provisions Payables
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	132,308,852	42,128,749,009	142,582,802	36,661,061,334	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	178,769,217	54,141,366,312	187,784,728	48,002,197,672	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1.000.000 (Angka Penuh)					Capital Stock - Par Value Rp1,000,000 (Full Amount)
Modal Dasar - 26.000 Saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 13.000 Saham	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	Authorized Capital - 26,000 Shares Issued and Fully Paid - 13,000 Shares
Proforma Ekuitas yang Timbul dari Entitas Sepengendali	--	43,748,607,061	--	49,825,941,689	Proforma Capital Arising Under Common Control
Saldo Laba					Retained Earnings
Dicadangkan	2,111,085	2,111,085	2,111,085	2,111,085	Appropriated
Belum Dicapadangkan	(161,272,522)	(161,272,523)	(153,485,779)	(153,485,779)	Unappropriated
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	(146,161,437)	43,602,445,623	(138,374,694)	49,687,566,995	Total Equity Attributable to Owners of the Parent
Kepentingan Non Pengendali	--	--	--	--	Non-Controlling Interest
TOTAL EKUITAS	(146,161,437)	43,602,445,623	(138,374,694)	49,687,566,995	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	32,607,780	97,743,811,935	49,410,034	97,689,764,667	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

<u>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN</u>	<u>2020</u>		<u>CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME</u>
	<u>Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported Rp</u>	<u>Disajikan Kembali/ As Restated Rp</u>	
PENDAPATAN	19,737,003	10,459,370,952	
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(17,437,657)	(8,596,807,551)	REVENUES
LABA BRUTO	2,299,346	1,862,563,401	COST OF REVENUES
Beban Pemasaran	--	(2,924,433,679)	Marketing Expenses
Beban Umum Dan Administrasi	(3,721,374)	(2,295,803,182)	General and Administrative Expenses
Beban Lain-Lain	(35,229)	(332,469,003)	Other Expenses
Pendapatan Lain-Lain	1,766,528	245,722,171	Other Income
LABA (RUGI) USAHA	309,271	(3,444,420,292)	OPERATING INCOME (LOSS)
Pendapatan Keuangan	31,537	287,045,767	Finance Income
Beban Keuangan	(3,521,812)	(2,428,517,557)	Finance Costs
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	--	(111,252,384)	Equity Loss of Associate Entities
RUGI SEBELUM PAJAK	(3,181,004)	(5,697,144,466)	LOSS BEFORE TAX
Pajak Final	--	(161,967,871)	Final Tax
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	(3,181,004)	(5,859,112,337)	LOSS BEFORE CORPORATE INCOME TAX
Pajak Kini	--	(59,471,136)	Current Tax
Manfaat Pajak Penghasilan Badan	(4,372,605)	769,075,093	Income Tax Benefit
RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH PENYESUAIAN PROFORMA	(7,553,609)	(5,149,508,380)	LOSS FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT
RUGI KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK			OTHER COMPREHENSIVE INCOME AFTER TAX
Pos yang Tidak akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi			Item that Will Not be Reclassified to Profit or Loss:
Kerugian Aktuarial Dari Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pascakerja	--	(950,501,934)	Actuarial Losses from Remeasurement on the Post-Employment Benefits Program
Manfaat (Beban) Pajak Terkait	--	125,177,547	Related Tax Benefits (Expense)
Pos yang akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi			Items That will Not be Reclassified to Profit or Loss
Kenaikan Nilai Wajar atas Investasi pada Instrumen Ekuitas - Neto	--	3,394,139	Increase Investments in Equity Instruments - Net
Rugi Komprehensif Entitas Asosiasi	--	72,543	Comprehensive Loss of Associate Entities
RUGI KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	--	(821,857,705)	OTHER COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR AFTER TAX
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH PENYESUAIAN PROFORMA	(7,553,609)	(5,971,366,085)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR YEARS AFTER PROFORMA
Penyesuaian Proforma Rugi Tahun Berjalan	--	5,141,954,769	Proforma Adjustment of Loss for the Year
TOTAL RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PERFORMA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN:			TOTAL LOSS FOR THE CURRENT YEAR BEFORE ATTRIBUTABLE PERFORMANCE EFFECTS:
Pemilik Entitas Induk	--	(7,553,611)	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	--	--	Non-Controlling Interests
	(7,553,611)		
Penyesuaian Proforma Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	--	5,963,812,474	Proforma Adjustment of Comprehensive Loss for the Year
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN:			TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT
Pemilik Entitas Induk	--	(7,553,611)	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	--	--	Non-Controlling Interests
	(7,553,611)		

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KONSOLIDASIAN**

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ <i>Equity Attributable to Owners of the Parent</i>						Total
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Fully Paid-in Capital</i>	Tambahan Modal Disetor/ <i>Additional Paid-in Capital</i>	Modal Proforma Yang Timbul Karena Penyajian Kembali Laporan Keuangan/ <i>Proforma Capital Arising From Restatement of Financial Statement</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i>		
				Telah Dicapangkan/ <i>Appropriated</i>	Belum Dicapangkan/ <i>Unappropriated</i>		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Dilaporkan Sebelumnya							
SALDO PER 31 DESEMBER 2019	13,000,000	--	--	--	2,111,085	(153,485,779)	(138,374,694)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	--	--	--	(7,553,612)	(7,553,612)
Penyesuaian	--	--	--	--	--	(233,133)	(233,133)
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	13,000,000	--	--	--	2,111,085	(161,272,524)	(146,161,439)
Disajikan Kembali							
SALDO PER 31 DESEMBER 2019 SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	13,000,000	--	--	--	2,111,085	(153,485,779)	(138,374,694)
Efek Penyesuaian Proforma	--	--	49,825,941,689	--	--	--	49,825,941,689
SALDO 1 JANUARI 2020/ SALDO PER 31 DESEMBER 2019	13,000,000	--	49,825,941,689	--	2,111,085	(153,485,779)	49,687,566,995
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Proforma	--	--	(5,963,812,474)	--	--	(7,553,611)	(5,971,366,085)
Efek Penyesuaian Proforma	--	--	(113,522,154)	--	--	--	(113,522,154)
Penyesuaian Saldo Awal atas Penerapan PSAK 71 Setelah Pajak	--	--	--	--	--	(233,133)	(233,133)
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	13,000,000	--	43,748,607,061	--	2,111,085	(161,272,523)	43,602,445,623

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANEKADARIAN
KONSOLIDASIAN**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
Untuk Tahun-tahun Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribu Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

		2020		
		Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	Disajikan Kembali/ As Restated	
		Rp	Rp	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Rp	Penerimaan Kas dari Pelanggan	21,315,963	9,464,152,219	Cash Received from Customers
	Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Pihak Ketiga	(21,624,125)	(8,781,961,632)	Cash Paid to Suppliers and Third Parties
	Kas yang Dihilangkan dari Aktivitas Operasi	(308,162)	682,190,587	Cash Provided from Operating Activities
	Penghasilan Bunga	14,419	276,110,846	Interest Received
	Pembayaran Bunga	--	(2,480,093,303)	Payment of Interest
	Penerimaan Pajak	--	15,502,703	Receipt of Tax
	Pembayaran Pajak Penghasilan	--	(725,786,259)	Payment of Tax Income
	Pembayaran Lainnya	--	(38,541,000)	Received from Other Income
	Pembayaran Kepada Karyawan	--	(3,290,598,526)	Payment to Employee
	Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(293,743)	(5,561,214,952)	Net Cash Flows Used in Operating Activities
	ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
	AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
	Hasil Pelepasan Aset Tetap	--	94,933,683	Proceeds from Disposal of Fixed Assets
	Pembelian Aset Tetap dan Investasi	--	(6,550,048,810)	Acquisitions of Fixed Assets and Investment Property
	Hasil Penjualan Aset Keuangan Lainnya	--	20,000,000	Proceeds from the Sale of Other Financial Assets
	Penerimaan dari Investasi Jangka Pendek	--	597,246,828	Receipt from Short-Term Investment
	Pengeluaran untuk Investasi Jangka Pendek	--	(27,500,000)	Payment for Short-Term Investment
	Perolehan Aset Takberwujud	--	(116,611,761)	Acquisitions of Intangible Assets
	Penerimaan dari Investasi Jangka Panjang	--	20,000,000	Receipt from Long-Term Investment
	Pengeluaran untuk Investasi Jangka Panjang	--	(8,600,000)	Payment for Long-Term Investment
	Penerimaan Kas yang dibatasi penggunaannya	--	9,000,000	Restricted Cash Receipts
	Pengambahan Investasi Asosiasi	--	(85,000,000)	Addition of Investment in Associates
	Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	--	(6,046,580,060)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
	ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
	AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
	Pencairan Utang Bank Jangka Pendek	--	531,038,666	Drawdown of Short Term Bank Loans
	Pembayaran Utang Bank Jangka Pendek	--	(32,000,000)	Payment of Short Term Bank Loans
	Pencairan Utang Bank Jangka Panjang	--	4,543,160,015	Drawdown of Long Term Bank Loans
	Pembayaran Utang Bank Jangka Panjang	--	(909,386,387)	Payment of Long Term Bank Loans
	Penerimaan Utang Obligasi	--	2,250,000,000	Receipt of Bonds Payable
	Sewa Pembiayaan	--	(134,862,836)	Lease Payables
	Pembayaran Biaya Transaksi Utang Bank	--	(8,000,000)	Payment of Bank Debt Transaction Fee
	Pembayaran Biaya Transaksi Utang Obligasi	--	(3,462,000)	Payment of Bonds Payable Transaction Fee
	Pembayaran Dividen Tunai kepada Kepentingan Non-pengendali	--	(43,799)	Cash Dividend Payment to Non-controlling Interest
	Penerimaan dari Pihak Berelasi	--	24,669,539	Receipts from Related Parties
	Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	--	6,261,113,198	Net Cash Flows Provided by Financing Activities
	PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS	(293,743)	(5,346,681,814)	DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
	DAMPAK DARI PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	--	(3,993,241)	EXCHANGE RATES FLUCTUATION EFFECTS ON CASH AND CASH EQUIVALENTS
	KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	380,156	9,390,805,689	CASH DAN CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
	KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	86,413	4,040,130,634	CASH DAN CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. Kas dan Setara Kas

5. Cash and Cash Equivalents

	2021 Rp	2020 Rp	
Kas	3,099,148	3,704,935	Cash
Bank	2,759,653,283	2,620,389,682	Banks
Deposito Berjangka	962,845,000	1,416,036,017	Time Deposits
Total	3,725,597,431	4,040,130,634	Total
Kas			Cashes
Rupiah	2,958,842	3,557,815	Rupiah
Dolar AS	71,166	65,574	US Dollar
Dolar Singapura	26,292	24,652	Singapore Dollar
Kas Mata Uang Asing Lainnya	42,848	56,894	Other Cash in Foreign Currency
Subtotal	3,099,148	3,704,935	Subtotal
Bank			Banks
Pihak Berelasi			Related Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	702,183,977	929,283,100	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	546,978,977	121,381,915	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	545,834,425	864,729,256	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	373,806,488	394,154,536	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRISyariah Tbk)	217,629,658	90,214,563	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, and PT Bank BRISyariah Tbk)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	--	35	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
	<u>2,386,433,525</u>	<u>2,399,763,405</u>	
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	163,536,633	10,111,329	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18,834,424	8,505,225	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,061,532	1,302,873	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRISyariah Tbk)	314,359	--	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, and PT Bank BRISyariah Tbk)
	<u>183,746,948</u>	<u>19,919,427</u>	
Dolar Singapura			Singapore Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	119,270	116,724	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	27,637	1,386,939	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	<u>146,907</u>	<u>1,503,663</u>	
Euro			Euro
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21,270	129,640	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	<u>21,270</u>	<u>129,640</u>	
Subtotal	2,570,348,650	2,421,316,135	Subtotal

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021 Rp	2020 Rp	
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Rupiah			Rupiah
PT Bank DKI	57,208,805	17,595,964	PT Bank DKI
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	52,725,664	3,854,047	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	45,594,083	115,003,788	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	17,320,193	16,272,572	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mega Tbk	3,981,185	2,392,612	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3,144,097	3,222,968	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	3,097,977	2,431,018	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	1,732,783	50,173	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1,056,296	274,986	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank MNC Internasional Tbk	630,000	63,379	PT Bank MNC Internasional Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	559,656	1,052,649	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	399,000	8,120,433	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	396,554	397,159	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	177,749	16,042,848	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	160,502	669,193	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT Bank KB Bukopin Tbk	57,168	1,986,247	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	31,124	31,501	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	4,603	81,616	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
	<u>188,277,439</u>	<u>189,543,153</u>	
Dolar AS			US Dollar
Citibank N.A.	724,000	4,664,212	Citibank N.A.
PT Bank Central Asia Tbk	301,832	307,268	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	1,362	2,573	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	--	4,546,555	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	--	9,786	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
	<u>1,027,194</u>	<u>9,530,394</u>	
Subtotal	<u>189,304,633</u>	<u>199,073,547</u>	Subtotal
Total	<u>2,759,653,283</u>	<u>2,620,389,682</u>	Total
Deposito Berjangka			Time Deposits
<u>Pihak Berelasi</u>			<u>Related Parties</u>
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	369,461,000	285,941,605	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	176,500,000	659,500,000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	161,084,000	75,281,912	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	112,800,000	36,500,000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	5,000,000	20,000,000	PT Bank Mandiri Taspen
	<u>824,845,000</u>	<u>1,077,223,517</u>	
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	246,837,500	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	<u>--</u>	<u>246,837,500</u>	
Subtotal	<u>824,845,000</u>	<u>1,324,061,017</u>	Subtotal

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021 Rp	2020 Rp	
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	102,000,000	20,000,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank KB Bukopin Tbk	25,000,000	5,100,000	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Mega Tbk	5,000,000	60,400,000	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	5,000,000	--	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	1,000,000	2,000,000	PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	--	2,500,000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	--	1,975,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Subtotal	138,000,000	91,975,000	Subtotal
Total	962,845,000	1,416,036,017	Total
Total	3,725,597,431	4,040,130,634	Total
Tingkat Suku Bunga			Interest Rate
Rupiah			Rupiah
Deposito Berjangka	2.00% - 7.75%	3.00% - 8.37%	Time Deposit
Deposito <i>On Call</i>	--	6.00% - 7.60%	Deposit <i>On Call</i>
Dolar AS			US Dollar
Deposito <i>On Call</i>	--	1.50% - 3.20%	Deposit <i>On Call</i>

Deposito merupakan deposito berjangka waktu sampai dengan 3 bulan.

Time deposits are time deposits with maturities of up to 3 months.

6. Investasi Jangka Pendek

6. Short Term Investments

a. Investasi Jangka Pendek Terdiri dari:

a. Short Term Investments Consist of:

	2021 Rp	2020 Rp	
Deposito Berjangka > 3 Bulan	36,320,000	--	<i>Time Deposit > 3 months</i>
Obligasi	10,417,500	23,493,015	<i>Bonds</i>
Reksadana	39,494,118	72,622,468	<i>Mutual Fund</i>
Total	86,231,618	96,115,483	Total

**1) Deposito Berjangka Lebih dari 3 Bulan
Sampai dengan 1 Tahun – Biaya
Perolehan Diamortisasi**

**1) Time Deposits above 3 Months up to 1
Year – Amortised Cost**

	2021		2020		
	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Value</i>	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Value</i>	
Rupiah					Rupiah
Pihak Berelasi					<i>Related Parties</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20,000,000	20,000,000	--	--	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13,320,000	13,320,000	--	--	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,000,000	3,000,000	--	--	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total	36,320,000	36,320,000	--	--	Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**2) Obligasi – Nilai Wajar diukur Melalui
Penghasilan Komprehensif Lain**

	2021		2020	
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Rupiah				
<u>Pihak Berelasi</u>				
FR0028 (2005), 10% ORI (IDR) 7%, 2030 TINS (IDR) 8.5%, 2022	5,000,000	5,462,500	5,000,000	5,393,950
	--	--	4,000,000	4,006,000
Subtotal	5,000,000	5,462,500	9,000,000	9,399,950
Rupiah				
<u>Pihak Ketiga</u>				
BEXI04BCN7	5,000,000	4,955,000	--	--
Subtotal	5,000,000	4,955,000	--	--
Dolar AS				
<u>Pihak Berelasi</u>				
PLN (USD) 5.5%, 2021	--	--	9,670,000	14,093,065
Total	10,000,000	10,417,500	18,670,000	23,493,015

**2) Bonds – Fair Value through Other
Comprehensive Income**

	2021		2020	
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Rupiah				
<u>Related Parties</u>				
FR0028 (2005), 10% ORI (IDR) 7%, 2030 TINS (IDR) 8.5%, 2022	5,000,000	5,462,500	5,000,000	5,393,950
	--	--	4,000,000	4,006,000
Subtotal	5,000,000	5,462,500	9,000,000	9,399,950
Rupiah				
<u>Third Parties</u>				
BEXI04BCN7	5,000,000	4,955,000	--	--
Subtotal	5,000,000	4,955,000	--	--
US Dollar				
<u>Related Party</u>				
PLN (USD) 5.5%, 2021	--	--	9,670,000	14,093,065
Total	10,000,000	10,417,500	18,670,000	23,493,015

3) Reksadana

	2021		2020	
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Biaya Perolehan Diamortisasi				
Rupiah				
RDT Panin 12	7,500,000	7,500,000	10,000,000	10,000,000
RDT Panin 2	--	--	20,000,000	20,000,000
Subtotal	7,500,000	7,500,000	30,000,000	30,000,000
Nilai Wajar Diukur Melalui Laba Rugi				
Rupiah				
SAM Indonesia Equity Fund	30,000,000	24,396,780	30,000,000	25,056,425
HPAM Flexi Plus	10,000,000	7,597,338	10,000,000	7,981,033
Panin Infrastruktur	--	--	10,000,000	9,585,010
Subtotal	40,000,000	31,994,118	50,000,000	42,622,468
Total	47,500,000	39,494,118	80,000,000	72,622,468

	2021		2020	
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Amortized Cost				
Rupiah				
RDT Panin 12	7,500,000	7,500,000	10,000,000	10,000,000
RDT Panin 2	--	--	20,000,000	20,000,000
Subtotal	7,500,000	7,500,000	30,000,000	30,000,000
Fair Value Through Profit or Loss				
Rupiah				
SAM Indonesia Equity Fund	30,000,000	24,396,780	30,000,000	25,056,425
HPAM Flexi Plus	10,000,000	7,597,338	10,000,000	7,981,033
Panin Infrastruktur	--	--	10,000,000	9,585,010
Subtotal	40,000,000	31,994,118	50,000,000	42,622,468
Total	47,500,000	39,494,118	80,000,000	72,622,468

b. Tingkat Suku Bunga

	2021 Rp	2020 Rp
Rupiah:		
Deposito	2.75% - 3.25%	--
Obligasi	7.00% - 8.10 %	7.00% - 8.50%
Dolar AS		
Obligasi	--	2.60% - 3.60%

b. Interest Rate

	2021 Rp	2020 Rp
Rupiah:		
Deposits	2.75% - 3.25%	--
Bonds	7.00% - 8.10 %	7.00% - 8.50%
US Dollar		
Bonds	--	2.60% - 3.60%

**c. Keuntungan yang Belum Direalisasi dari
Investasi – Nilai Wajar diukur Melalui
Penghasilan Komprehensif Lain**

	2021 Rp	2020 Rp
Nilai Wajar Pada Awal Tahun	4,823,015	(84,600)
Penambahan Nilai Wajar Investasi	--	702,623
Pengurangan Nilai Wajar Investasi	(11,832,972)	--
Reklasifikasi atas Klasifikasi dan Pengukuran Dari Tersedia untuk Dijual Menjadi Nilai Wajar Diukur Melalui Laba Rugi	8,670,000	1,902,906
Keuntungan Belum Direalisasi yang Diakui Sebagai Penghasilan Komprehensif Lain	(1,242,543)	2,302,086
Nilai Wajar pada Akhir Tahun	417,500	4,823,015

**c. Unrealized Gains from Investment – Fair
Value through Other Comprehensive
Income**

	2021 Rp	2020 Rp
Fair Value at Beginning Year	4,823,015	(84,600)
Additional of Fair Value Investments	--	702,623
Disposal of Fair Value Investments	(11,832,972)	--
Reclassification For Classification and Measurement from Available For Sale to Fair Value Through Profit or Loss	8,670,000	1,902,906
Unrealized Gain are Recognized as Other Comprehensive Income	(1,242,543)	2,302,086
Fair Value at Year End	417,500	4,823,015

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Nilai wajar seluruh aset keuangan berdasarkan harga penawaran yang berlaku dalam pasar yang aktif dan input selain harga pasar yang dapat diobservasi.

The fair value of all financial assets is based on the current bid price in active markets and observable inputs other than quoted prices.

7. Piutang Usaha

7. Account Receivables

a. Berdasarkan Pelanggan

a. By Customers

	2021 Rp	2020 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 44)	2,292,873,995	1,709,645,226
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1,716,222,260)	(301,454,649)
Subtotal	<u>576,651,735</u>	<u>1,408,190,577</u>
Pihak Ketiga	1,852,103,955	1,787,578,820
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(794,314,176)	(520,657,214)
Subtotal	<u>1,057,789,779</u>	<u>1,266,921,606</u>
Total	<u>1,634,441,514</u>	<u>2,675,112,183</u>

Related Parties (Note 44)
Allowance for Impairment Losses
Subtotal

Third Parties
Allowance for Impairment Losses
Subtotal

Total

b. Berdasarkan Umur

b. By Aging

	2021 Rp	2020 Rp
Belum Jatuh Tempo	508,795,218	386,627,227
Telah Jatuh Tempo		
1-30 Hari	172,788,627	158,907,433
31-60 Hari	95,795,206	193,985,653
61-90 Hari	373,553,380	559,482,830
91-180 Hari	300,114,817	707,937,363
181-365 Hari	754,633,240	781,961,274
Lebih dari 365 Hari	1,939,297,462	708,322,266
Subtotal	<u>4,144,977,950</u>	<u>3,497,224,046</u>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2,510,536,436)	(822,111,863)
Total	<u>1,634,441,514</u>	<u>2,675,112,183</u>

Not yet due
Overdue
1-30 days
31-60 days
61-90 days
91-180 days
181-365 days
Over 365 days

Subtotal

Allowance for Impairment Losses

Total

c. Berdasarkan Mata Uang

c. By Currencies

	2021 Rp	2020 Rp
Rupiah	4,066,033,289	3,446,243,855
Mata Uang Asing	78,944,661	50,980,191
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2,510,536,436)	(822,111,863)
Total	<u>1,634,441,514</u>	<u>2,675,112,183</u>

Rupiah
Foreign Currencies
Allowance for Impairment Losses

Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo Awal	822,111,863	439,138,462
Divestasi HIPRO, entitas anak HIN	(1,336,846)	--
Penyesuaian Sehubungan dengan Penerapan Awal PSAK 71	--	41,508,057
Penambahan	1,731,613,260	357,758,730
Pemulihan	(4,397,841)	(14,754,053)
Penghapusan	(37,454,000)	(1,539,333)
Saldo Akhir	<u>2,510,536,436</u>	<u>822,111,863</u>

Beginning Balance
Divestment of HIPRO, HIN subsidiary
Adjustment in Relation to Implementation of PSAK 71

Addition

Recovery

Write-Off

Ending Balance

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada tahun 2021, Piutang Usaha pihak berelasi kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1.502.545.845 sudah dinyatakan macet dan atas semua saldo piutang tersebut telah dilakukan cadangan penurunan nilai. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan masih dalam proses pengadilan sampai tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, piutang usaha sebesar Rp50.000.000 dijaminan untuk fasilitas pinjaman jangka pendek PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Catatan 23).

In 2021, accounts Receivable from related parties to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp1,502,545,845 have been declared loss and an allowance for impairment of all receivables has been provided. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk has filed for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and is still in the court process until the completion date of these consolidated financial statements.

Management believes that the allowance for impairment losses on trade receivables is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

As of December 31, 2021 and 2020, trade receivables amounting to Rp50,000,000 are used for collateral for short-term loan facility of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Note 23).

8. Piutang Lain-lain

8. Other Receivables

a. Berdasarkan Pelanggan

a. By Customers

	2021 Rp	2020 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 44)	60,871,512	25,700,284	<i>Related Parties (Note 44)</i>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	<u>(40,686,383)</u>	<u>(14,449,659)</u>	<i>Allowance for Impairment Losses</i>
Subtotal	20,185,129	11,250,625	<i>Subtotal</i>
Pihak Ketiga	115,103,133	121,202,591	<i>Third Parties</i>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	<u>(28,610,097)</u>	<u>(41,067,131)</u>	<i>Allowance for Impairment Losses</i>
Subtotal	86,493,036	80,135,460	<i>Subtotal</i>
Total	<u>106,678,165</u>	<u>91,386,085</u>	<i>Total</i>

b. Berdasarkan Umur

b. By Aging

	2021 Rp	2020 Rp	
Belum Jatuh Tempo	24,743,607	24,545,052	<i>Not yet due</i>
Telah Jatuh Tempo			<i>Overdue</i>
< 1 Tahun	33,512,316	23,476,071	<i>< 1 year</i>
1 - 2 Tahun	65,670,972	70,450,004	<i>1 - 2 years</i>
> 2 Tahun	52,047,750	28,431,748	<i>> 2 years</i>
Subtotal	175,974,645	146,902,875	<i>Subtotal</i>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	<u>(69,296,480)</u>	<u>(55,516,790)</u>	<i>Allowance for Impairment Losses</i>
Total	<u>106,678,165</u>	<u>91,386,085</u>	<i>Total</i>

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal	55,516,790	41,830,765	<i>Beginning Balance</i>
Divestasi HIPRO, entitas anak HIN	(2,765,063)	--	<i>Divestment of HIPRO, HIN subsidiary</i>
Penyesuaian Sehubungan dengan Penerapan Awal PSAK 71	--	4,867,030	<i>Adjustment in Relation to Implementation of PSAK 71</i>
Penambahan	18,343,468	8,818,995	<i>Addition</i>
Pemulihan	(1,798,715)	--	<i>Recovery</i>
Saldo Akhir	69,296,480	55,516,790	<i>Ending Balance</i>

Berdasarkan hasil penelaahan kolektibilitas akun piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain di atas adalah cukup.

Piutang lain-lain pihak ketiga terutama merupakan piutang yang timbul dari pembayaran pada pegawai, jaminan, talangan, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia ("LPPNPI") dan pihak lain di luar kegiatan utama Grup.

Piutang pegawai merupakan kekurangan pembayaran biaya berobat yang ditanggung oleh Grup yang akan ditagihkan kemudian kepada pegawai. Piutang pegawai juga berisikan piutang atas pembayaran gaji karyawan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat ("BIJB") yang akan ditagihkan ke BIJB dan biaya sertifikasi petugas keamanan bandara (*aviation security*) yang ditanggung oleh Grup yang akan ditagihkan dengan cara pemotongan gaji bulanan pegawai *aviation security*.

Based on the review of the collectibility of the other receivables at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment loss of other receivables is sufficient.

Other receivables third parties mainly represents receivables arise from payment to employee, deposits, temporary loan, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia ("LPPNPI") and others outside the Group's main business.

Employee receivables represent underpayment of medical expenses borne by the Group which will be billed later to employees. Employee receivables also contain receivables for payment of salaries of PT Bandarudara Internasional Jawa Barat ("BIJB") employees which will be billed to BIJB and airport security officer certification fees (*aviation security*) borne by the Group which will be billed by deducting the monthly salary of *aviation security* employees.

9. Persediaan

9. Inventories

	2021 Rp	2020 Rp	
Suku Cadang Pemeliharaan	18,799,700	27,021,418	<i>Maintenance Sparepart</i>
Barang Dagang	15,485,867	5,098,246	<i>Merchandise</i>
Alat Kantor dan Percetakan	11,657,477	9,027,683	<i>Office and Equipment</i>
Bahan Bakar	3,751,508	3,497,070	<i>Fuel</i>
Persediaan Hotel dan Lounge	3,482,925	5,346,107	<i>Hotel and Lounge</i>
Elektronika	2,466,000	2,722,980	<i>Electronics</i>
Mekanikal dan Pendingin Udara	1,954,000	2,559,004	<i>Mechanical and Air Conditioning</i>
Keamanan dan Pemadam Kebakaran	547,000	610,297	<i>Secure and Firefighter</i>
Pemeliharaan Alat Besar	257,000	302,239	<i>Large Tool Maintenance</i>
Lain-lain	1,669,215	4,411,208	<i>Others</i>
Subtotal	60,070,692	60,596,252	<i>Subtotal</i>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2,120,135)	(2,025,308)	<i>Allowance for Impairment Losses</i>
Total	57,950,557	58,570,944	<i>Total</i>

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Persediaan 31 Desember 2021 dan 2020 telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat bencana alam, kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungjawaban sebesar Rp1.969.360 dan Rp5.000.000.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungjawabkan.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal	2,025,308	2,378,084	Beginning Balance
Penambahan	299,294	1,868,282	Addition
Penghapusan	(204,467)	(2,221,058)	Write-Off
Saldo Akhir	2,120,135	2,025,308	Ending Balance

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan di atas adalah cukup.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat yang dijaminan sehubungan dengan liabilitas apapun.

Inventories of December 31, 2021 and 2020 are covered by insurance against losses from natural disasters, fire and other risks with a liability value of Rp1,969,360 and Rp5,000,000.

Management believes that the sum insured amount is adequate to cover possible losses from such risk.

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

Based on the review at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment loss of inventories is sufficient.

As of December 31, 2021 and 2020, there are no collateral for any obligations.

10. Uang Muka

10. Advances

	2021 Rp	2020 Rp	
Pembelian	93,451,080	22,546,503	Purchases
Karyawan	7,975,000	20,371,202	Employee
Dinas dan Operasional	1,204,495	5,628,604	Service and Operation
Lain-lain	18,449,000	10,867,680	Other
Subtotal	121,079,575	59,413,989	Subtotal
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(195,353)	(195,353)	Allowance for Impairment Losses
Total	120,884,222	59,218,636	Total

Akun ini merupakan beban yang dibayar terlebih dahulu untuk kepentingan operasional Grup yang akan dipertanggungjawabkan atau akan jatuh tempo dalam tahun berikutnya.

Uang muka pembelian merupakan uang muka pembelian beras dan *duty free*. Uang muka digunakan untuk pembelian barang dagangan, aset bernilai rendah, operasional dan lain-lain.

This account represents expenses paid in advance for the benefit of the Group's operations that will be accounted for or due within the next year.

Advances for purchases represent advances for the purchase of rice and duty free. Advances are used for the purchase of merchandise, low value assets, operations and others.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

11. Biaya Dibayar di Muka

11. Prepaid Expenses

	2021 Rp	2020 Rp	
Asuransi	50,361,698	40,078,662	Insurance
Umum	8,283,853	5,398,343	General
Pegawai	1,974,904	860,295	Personnel
Sewa	1,828,506	2,086,903	Rent
Lain-lain	23,083,462	20,079,335	Others
Total	85,532,423	68,503,538	Total

Beban umum dibayar di muka terdiri dari biaya pemeliharaan dan utilitas.

General purpose of prepaid expenses are consist of maintenance expenses and utility.

Asuransi terutama adalah asuransi dibayar di muka atas aset tetap Grup.

Insurance mainly represents prepaid expenses insurance for fixed assets of the Group.

Beban dibayar di muka lain-lain terutama sehubungan dengan pemakaian persediaan.

Prepaid expenses are mainly consist of the use of supplies.

12. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

12. Accrued Revenues

	2021 Rp	2020 Rp	
Aeronautika	283,354,355	314,928,840	Aeronautika
Non-Aeronautika	176,009,498	442,946,193	Non-Aeronautika
Lain-lain	4,567,437	7,408,116	Others
Subtotal	463,931,290	765,283,149	Subtotal
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(166,597,320)	(92,477,923)	Allowance for Impairment Losses
Total	297,333,970	672,805,226	Total

Pendapatan yang masih harus diterima untuk aeronautika mencakup pendapatan-pendapatan atas Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U), Jasa *Aviobridge* dan *Extended Fee*.

Accrued revenues of aeronautical consist of Aircraft Landing, Placing and Storing Service (PJP4U), Aircraft Passengers Handling Service (PJP2U), Cargo and Post Services (PJKP2U), Aviobridge Services and Extended Fee.

Pendapatan yang masih harus diterima untuk non-aeronautika mencakup pendapatan-pendapatan atas jasa sewa ruang, pemakaian jasa gudang, sewa tanah, konsesi, parkir, pemakaian listrik/telepon/air, pemakaian premium lounge dan jasa lainnya.

Accrued revenues of non-aeronautical consist of revenues for space rental services, use of warehouse, land rental, concessions, parking, electricity/telephone/water, the use of premium lounges and other services.

Pendapatan yang masih harus diterima lain-lain merupakan akrual atas pendapatan bunga deposito.

Other accrued revenues consist of the interest income on deposits

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal	92,477,923	--	Beginning Balance
Penambahan	74,119,397	92,477,923	Addition
Saldo Akhir	166,597,320	92,477,923	Ending Balance

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai di atas adalah cukup.

Based on the review at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment loss of inventories is sufficient.

13. Perpajakan

13. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid taxes

	2021 Rp	2020 Rp	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Pajak Penghasilan Badan:			Corporate Income Taxes:
Lebih Bayar	--	235,282	Overpayment
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	2,006,574	2,109,127	Value Added Tax (VAT)
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Pajak Penghasilan:			Income Taxes:
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1,278,684,091	1,704,307,078	Value Added Tax (VAT)
Total	1,280,690,665	1,706,651,487	Total

b. Estimasi Tagihan Pajak

b. Estimated Claims for Refundable Tax

	2021 Rp	2020 Rp	
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Pajak Penghasilan:			Income Taxes:
Pasal 28A Tahun 2021	137,978,286	--	Article 28A Year 2021
Pasal 28A Tahun 2020	378,256,804	466,435,704	Article 28A Year 2020
Pasal 28A Tahun 2019	--	288,049,509	Article 28A Year 2019
Total	516,235,090	754,485,213	Total

c. Utang Pajak

c. Tax Payables

	2021 Rp	2020 Rp	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Pajak Penghasilan:			Income Taxes:
Pasal 4(2)	66,431	66,431	Article 4(2)
Pasal 15	21,777	21,777	Article 15
Pasal 21	1,004,169	1,051,889	Article 21
Pasal 23	567,028	1,100,469	Article 23
SKPKB PPN yang Diangsur	4,141,747	4,348,048	Installment SKPKB VAT
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Pajak Penghasilan:			Income Taxes:
Pasal 4(2)	24,050,038	35,320,967	Article 4(2)
Pasal 21	49,358,819	54,567,180	Article 21
Pasal 22	153,093	2,189,986	Article 22
Pasal 23	13,754,988	26,907,282	Article 23
Pasal 25	2,378,593	1,609,216	Article 25
Pasal 26	--	76,809	Article 26
Pasal 29	20,915,142	8,880,367	Article 29
Pajak PB 1	4,771,937	9,342,186	PB Tax 1
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	80,177,854	237,400,889	Value Added Tax (VAT)
PPh 15, STP dan Lainnya	8,923,192	3,146,754	PPh 15, STP, and Others
Total	210,284,807	386,030,249	Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

d. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan

d. Corporate Income Tax Benefit (Expense)

	2021 Rp	2020 Rp	
Pajak Kini			Current Tax
Perusahaan	--	--	The Company
Entitas Anak			Subsidiaries
Tahun Berjalan	(83,682,606)	(59,471,136)	Current Year
Penyesuaian Periode Sebelumnya	(20,263,718)	--	Adjustment from Prior Year
Subtotal	(103,946,324)	(59,471,136)	Subtotal
Pajak Tangguhan			Deferred Tax
Perusahaan	(1,931,615)	(4,372,605)	The Company
Entitas Anak	1,126,154,334	773,447,698	Subsidiaries
Subtotal	1,124,222,719	769,075,093	Subtotal
Total	1,020,276,395	709,603,957	Total

e. Taksiran Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan taksiran rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

e. Provision for income tax

The reconciliation between profit before corporate income tax, as presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and the Company's estimated tax loss is as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Rugi Sebelum Pajak			Loss Before Corporate Income Tax
Penghasilan Badan Menurut			in Consolidated Statement
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan			of Profit or Loss and
Komprehensif Lain Konsolidasian	(8,556,440,606)	(5,859,112,337)	Other Comprehensive Income
Dikurangi:			Less:
Rugi Entitas Anak Sebelum			Loss of Subsidiaries Before
Beban Pajak Penghasilan Badan			Corporate Income Tax Expense
dan Efek Eliminasi serta Proforma	(8,517,324,531)	(5,855,931,331)	and Elimination and Proforma Effect
Rugi Perusahaan Sebelum			Loss Before Corporate Income Tax
Pajak Penghasilan Badan Setelah			After Expenses (Revenues)
Beban (Penghasilan) yang Pajaknya			Subjected to Final Tax
Bersifat Final	(39,116,075)	(3,181,006)	Attributable to the Company
Ditambah (Dikurangi):			Add (Deduct):
<u>Beda Tetap:</u>			<u>Permanent Difference:</u>
Sumbangan	450	300	Donation
Konsumsi	22,673	1,461	Consumption
Umum Lainnya	69,958	307	Other General
PPH 21	645,765	547	Income Tax Article 21
Administrasi Bank	--	132,346	Bank Administration
Denda Keterlambatan Pokok	6,987	7,692	Principal Late Penalty
Pendapatan Jasa Giro	(15,690)	(14,409)	Bank Interest Income
Beban Bunga	--	3,389,467	Interest Expense
Beban Pajak Tabungan Giro	3,138	2,882	Bank Interest Tax
<u>Beda Waktu:</u>			<u>Timing Difference:</u>
Imbalan Pascakerja	65,834	--	Post-employment Benefit
Subtotal	799,115	3,520,592	Subtotal
Rugi Fiskal 2021	(38,316,960)	--	Fiscal Loss 2021
Laba Fiskal 2020	339,586	339,586	Fiscal Income 2020
Rugi Fiskal 2019	(6,824,194)	(6,824,194)	Fiscal Loss 2019
Rugi Fiskal 2018	(2,776,399)	(2,776,399)	Fiscal Loss 2018
Rugi Fiskal 2017	(1,883,785)	(1,883,785)	Fiscal Loss 2017
Rugi Fiskal 2016	--	(14,332,419)	Fiscal Loss 2016
Total Rugi Fiskal	(11,144,792)	(25,477,211)	Total Fiscal Loss
Dikurangi:			Deducted:
Pajak Dibayar di Muka			Prepaid Tax
Pajak Penghasilan Pasal 23	--	235,282	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Badan Lebih Bayar	--	(235,282)	Corporate Income Tax Overpayment

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Perhitungan taksiran pajak penghasilan kena pajak pada akhir tahun menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

The calculation of estimated taxable income at the end of the year is used as a basis in filing the annual corporate income tax return.

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam group menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Based on the Taxation Laws of Indonesia, entities within the group calculate and pay tax on the basis of self assesment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

Rekonsiliasi antara hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan badan dengan tarif pajak yang berlaku dan manfaat pajak penghasilan sebagai berikut:

The reconciliation between the result of the multiplication of accounting income before corporate income tax with the current tax rate and income tax benefit is as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Rugi Sebelum Pajak			<i>Loss Befor Corporate Income Tax</i>
Penghasilan Badan Menurut			<i>in Consolidated Statement</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan			<i>of Profit or Loss and</i>
Komprehensif Lain Konsolidasian	(8,556,440,606)	(5,859,112,337)	<i>Other Comprehensive Income</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Rugi Entitas Anak Sebelum			<i>Loss of Subsidiaries Before</i>
Beban Pajak Penghasilan Badan			<i>Corporate Income Tax Expense</i>
dan Efek Eliminasi serta Proforma	(8,517,324,531)	(5,855,931,331)	<i>and Elimination and Proforma Effect</i>
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan -			<i>Income Before Income Tax Expense -</i>
Perusahaan	(39,116,075)	(3,181,006)	<i>The Company</i>
Beban Pajak Penghasilan - Perusahaan	--	--	<i>Income Tax Expense - The Company</i>
Pajak Tangguhan - Perusahaan	(1,931,615)	(4,372,605)	<i>Deferred tax - The Company</i>
Pajak Tangguhan - Entitas Anak	1,126,154,334	773,447,698	<i>Deferred tax - Entity Subsidiaries</i>
Beban Pajak Penghasilan - Entitas Anak	(103,946,324)	(59,471,136)	<i>Income Tax Expense - Entity Subsidiaries</i>
Beban Pajak Penghasilan Konsolidasian	1,020,276,395	709,603,957	<i>Income Tax Expense Consolidation</i>

f. Aset Pajak Tangguhan

Perhitungan beban (manfaat) dan aset pajak tangguhan sebagai berikut:

f. Deferred Tax Assets

The calculation of deferred tax expense (benefit) and deferred tax assets is as follows:

	1 Januari / January 1, 2021 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) Ke Laba Rugi / Credited (Charged) to Profit or Loss Rp	Dikreditkan ke Ekuitas / Credited to Equity Rp	Penyesuaian Tarif Pajak / Tax Rate Adjustment Rp	Divestasi / Divestment Rp	31 Desember / December 31, 2021 Rp	
Liabilitas Pajak Tangguhan							<i>Deferred Tax Liabilities</i>
Entitas Anak	(231,024,839)	(33,873,162)	2,783,000	--	--	(262,115,001)	<i>Subsidiaries</i>
Aset Pajak Tangguhan							<i>Deferred Tax Assets</i>
Entitas Anak	812,344,977	1,079,759,773	9,888,252	79,680,715	(10,386,994)	1,971,286,723	<i>Subsidiaries</i>
Perusahaan :							<i>The Company :</i>
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha	287,575	--	--	(34,509)	--	253,066	<i>Allowance for Impairment of Trade Receivable</i>
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Lain-lain	1,668,378	--	--	(202,405)	--	1,465,972	<i>Allowance for Impairment of Other Receivable</i>
Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan	39,257	--	--	(4,711)	--	34,546	<i>Allowance for Impairment of Inventories</i>
Penyisihan Penurunan Nilai Uang Muka	48,838	--	--	(5,861)	--	42,978	<i>Allowance for Impairment of Advances</i>
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi							<i>Accumulated Depreciation and Amortization of</i>
Aset Tetap, Properti Investasi dan							<i>Fixed Assets, Property Investment and</i>
Aset Tak Berwujud	3,920,667	982,454	--	1,546,248	--	6,449,369	<i>Intangible Assets</i>
Imbalan Kerja Karyawan	--	14,483	12,661	10,716	--	37,861	<i>Employee Benefits</i>
Rugi Fiskal	4,238,031	--	--	(4,238,031)	--	--	<i>Fiscal Loss</i>
Subtotal	10,202,745	996,937	12,661	(2,928,552)	--	8,283,792	<i>Subtotal</i>
Total	822,547,722	1,080,756,711	9,900,913	76,752,163	(10,386,994)	1,979,570,515	<i>Total</i>

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	1 Januari / January 1, 2020 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) Ke Laba Rugi / Credited (Charged) to Profit or Loss Rp	Dikreditkan ke Ekuitas / Credited to Equity Rp	Penyesuaian Tarif Pajak / Tax Rate Adjustment Rp	Dampak PSAK 71 / Effect of PSAK 71 Rp	31 Desember / December 31, 2020 Rp	
Liabilitas Pajak Tangguhan							Deferred Tax Liabilities
Entitas Anak	(522,505,013)	153,906,536	140,491,577	(2,917,940)	--	(231,024,839)	Subsidiaries
Aset Pajak Tangguhan							Deferred Tax Assets
Entitas Anak	85,239,474	652,444,058	84,989,145	(33,918,653)	23,590,952	812,344,977	Subsidiaries
Perusahaan :							The Company :
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha	287,575	--	--	--	--	287,575	Allowance for Impairment of Trade Receivable
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Lain-lain	1,668,378	--	--	--	--	1,668,378	Allowance for Impairment of Other Receivable
Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan	39,257	--	--	--	--	39,257	Allowance for Impairment of Inventories
Penyisihan Penurunan Nilai Uang Muka	48,838	--	--	--	--	48,838	Allowance for Impairment of Advances
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	--	--	--	--	--	--	Accumulated Depreciation and Amortization of
Aset Tetap, Properti Investasi dan							Fixed Assets, Property Investment and
Aset Tak Berwujud	3,920,667	--	--	--	--	3,920,667	Intangible Assets
Imbalan Kerja Karyawan	--	--	--	--	--	--	Employee Benefits
Rugi Fiskal	8,610,636	(4,372,605)	--	--	--	4,238,031	Fiscal Loss
Subtotal	14,575,350	(4,372,605)	--	--	--	10,202,745	Subtotal
Total	99,814,825	648,071,453	84,989,145	(33,918,653)	23,590,952	822,547,722	Total

g. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 18 Juni 2020, APH menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2018 sebesar Rp709.315 dari yang dilaporkan pada surat pemberitahuan pajak tahun 2018 sebesar Rp2.090.137. Pada tanggal 23 Juli 2020, APH telah menerima pengembalian lebih bayar tersebut dan mengakui beban sebesar Rp1.380.822 dalam laba rugi tahun 2020.

Pada tahun 2020, APH menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas beberapa jenis pajak untuk tahun pajak 2018. Atas ketetapan kurang bayar pajak tersebut, AP I mengakui beban sebesar Rp856.841 dalam laba rugi tahun 2020.

Pada tanggal 28 Desember 2021, AP I menerima SKPLB atas PPN masa Desember 2020 sebesar Rp952.396.513 dari yang dilaporkan pada surat pemberitahuan pajak sebesar Rp965.197.266. AP I menyetujui ketetapan pajak lebih bayar tersebut dan mengakui beban sebesar Rp12.800.752 dalam laba rugi tahun 2021. Pada tanggal 24 Januari 2022, AP I telah menerima pengembalian pajak tersebut sebesar Rp913.977.858, dan sisanya dikompensasi dengan denda pajak sebesar Rp38.418.655.

Pada tanggal 15 April 2021, AP I menerima SKPLB atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2019 sebesar Rp82.633.287 dari yang dilaporkan pada surat pemberitahuan pajak sebesar Rp102.897.005. AP I menyetujui ketetapan pajak lebih bayar tersebut dan mengakui beban sebesar Rp20.263.718 dalam laba rugi tahun 2021. Pada tanggal 21 Mei 2021, AP I telah menerima pengembalian pajak tersebut sebesar Rp 59.317.361, dan sisanya dikompensasi dengan denda pajak sebesar Rp23.315.926.

g. Tax Assessment Letters

On June 18, 2020, APH received Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) of Corporate Income Tax for fiscal year 2018 amounting to Rp709,315 compared to the overpayment reported in tax return fiscal year 2018 of Rp2,090,137. On July 23, 2020, APH has received the overpayment and recognized expenses amounted to Rp1,380,822 in profit or loss in 2020..

In 2020, APH received Underpayment Tax Assesment Letters (SKPKB) of certain taxes for fiscal year 2018. In relation to assessment of tax underpayment, AP I recognized expenses amounted to Rp856,841 in profit or loss in 2020.

On December 28, 2021, AP I received SKPLB of VAT for period December 2020 totalling to Rp952,396,513 compared to the overpayment reported in tax returns amounting to Rp965,197,266. AP I accepted these assessed overpayments and recognized expense amounting to Rp12,800,752 in 2021 profit or loss. On January 24, 2022, AP I has received the tax refund amounting to Rp913,977,858, and the rest was compensated with a tax penalty of Rp38,418,655.

On April 15, 2021, AP I received SKPLB on Corporate Income Tax year 2019 amounting to Rp82,633,287 compared to the reported amount in the tax return amounting to Rp102,897,005. AP I accepted this assessed overpayment and recognized expenses of Rp20,263,718 in profit or loss in 2021. On May 21, 2021, AP I has received the tax refund amounting to Rp 59,317,361, and the rest was compensated with a tax penalty of Rp 23,315,926.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 18 Juni 2020 Sarinah menerima SKPLB Pajak Penghasilan Badan tahun 2018 senilai Rp7.502.703 dan telah menerima restitusi tersebut pada tanggal 22 Agustus 2020.

On June 18, 2020, Sarinah received an SKPLB on Corporate Income Tax year 2018 amounting to Rp7,502,703 and has received the restitution on August 22, 2020.

Pada tanggal 23 Juni 2021 Sarinah menerima SKPLB atas restitusi Pajak Penghasilan Badan tahun 2019 senilai Rp7.868.698 dan telah menerima restitusi tersebut pada tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp6.008.268 dikompensasikan terkait dengan kekurangan pajak PPN sebesar Rp1.826.244 dan mengakui beban sebesar Rp34.187 dalam laba rugi tahun 2021.

On June 23, 2021, Sarinah received SKPLB on Corporate Income Tax year 2019 for the 2019 corporate income tax refund amounting to Rp7,868,698 and has received the restitution on 17 June 2021 amounting to Rp6,008,268 compensated for the shortfall in VAT tax of Rp1,826,244 and recognized expenses of Rp34,187 in profit or loss in 2021.

h. Perubahan Tarif Pajak

Pajak Pada tanggal 30 Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2020 yang antara lain menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, serta menjadi 20% sejak tahun fiskal 2022.

h. Changes in Tax Rates

Taxes On March 30, 2020, the government issued Government Regulation in Lieu of Law no. 1 of 2020, which among other things reduces the corporate income tax rate from the previous 25% to 22% for the 2020 and 2021 fiscal years, and to 20% since the 2022 fiscal year.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya sebesar 20% menjadi tidak berlaku setelah undang-undang ini disahkan.

On October 29, 2021, the Government issued Law No. 7 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation stipulates the income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments at 22% which will take effect from the 2022 tax year onwards. Thus, the previous tax rate determination of 20% becomes invalid after this Law is passed.

14. Investasi Jangka Panjang

14. Long-Term Investments

	2021 Rp	2020 Rp	
Obligasi	76,814,078	82,495,369	Bonds
Penyertaan Saham	13,853,000	13,963,669	Investment in Shares
Total	90,667,078	96,459,038	Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

a. Obligasi

	2021		2020		
	Nilai Nominal / Nominal Value	Nilai Tercatat / Carrying Value	Nilai Nominal / Nominal Value	Nilai Tercatat / Carrying Value	
Obligasi:					Bonds:
RI0148	15,193,818	16,389,078	15,936,400	16,847,869	RI0148
BEXI04BCN7	--	--	5,000,000	5,164,000	BEXI04BCN7
BEXI04CCN7	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	BEXI04CCN7
Obligasi Negara Tahun 2007 Seri FR0047	30,000,000	36,594,000	30,000,000	36,657,000	Government Bond Year 2007 Series FR0047
Obligasi Negara Tahun 2007 Seri FR0045	15,150,000	18,831,000	15,150,000	18,826,500	Government Bond Year 2007 Series FR0045
Subtotal	65,343,818	76,814,078	71,086,400	82,495,369	Subtotal

b. Penyertaan Saham

	2021	2020	
	Rp	Rp	
PT Sinergi Colomadu	8,600,000	8,600,000	PT Sinergi Colomadu
PT Putrantara Mitra Angkasa Dua	5,253,000	5,253,280	PT Putrantara Mitra Angkasa Dua
PT Pembangunan Pariwisata Sulawesi Utara	2,285,000	2,285,000	PT Pembangunan Pariwisata Sulawesi Utara
PT Manajemen CBT Nusantara	250,000	250,000	PT Manajemen CBT Nusantara
	16,388,000	16,388,280	
Perubahan Nilai Wajar Investasi Ekuitas yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Komprehensif Lain	(250,000)	(139,611)	Changes in the Fair Value of Equity Investments Measured at Fair Value Through Other Comprehensive
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2,285,000)	(2,285,000)	Allowance for Impairment Losses
Total	13,853,000	13,963,669	Total

PT Sinergi Colomadu

PT Sinergi Colomadu adalah badan usaha hasil kerjasama antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk dan TWC. Badan usaha ini bergerak dalam bidang jasa komersial area. TWC memiliki kepemilikan saham pada PT Sinergi Colomadu dengan nilai tercatat pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp8.600.000 atau dengan persentase sebesar 10%.

PT Purantara Mitra Angkasa Dua ("PMAD")

Kepemilikan AP II di PMAD sebesar 0,11% merupakan kompensasi sewa tanah selama periode 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan sesuai dengan perjanjian sewa tanah No.SPSW.02.1/TU.308/APII-2000 tanggal 1 Mei 2000 yang kemudian di adendum melalui surat perjanjian tambahan (addendum) I No. ADD.I.SPSW.12/TU.308/ 2002-AP II tanggal 15 April 2002.

Nilai investasi di PMAD pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp5.253.000.

PT Sinergi Colomadu

PT Sinergi Colomadu is a joint venture between PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk and TWC. This business entity is engaged in commercial area services. TWC has share ownership in PT Sinergi Colomadu with a recorded value as of December 31, 2021 and 2020, amounting to Rp8,600,000 with a percentage of 10%.

PT Purantara Mitra Angkasa Dua ("PMAD")

AP II's ownership in PMAD amounting to 0.11% represents a land lease compensation for 11 (eleven) years and 3 (three) months in accordance with the land lease agreement No. SPSW.02.1/TU.308/ APII-2000 dated May 1, 2000 which has been amended by letter of additional agreement (addendum) I No. ADD.I.SPSW.12/TU.308/2002-AP II dated April 15, 2002.

The balance of investment in PMAD as of December 31, 2021 and 2020 is Rp5,253,000, respectively.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT Pembangunan Pariwisata Sulawesi Utara
("PPSU")**

Investasi saham pada PPSU ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai surat No. S/114/M K.013/1991 tanggal 24 Januari 1991. Investasi saham pada PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU (d/h PT Manado Minahasa Tourism Development Corporation (MMTDC) dengan kepemilikan sebesar 8,26%, berdasarkan Akta No. 23 tanggal 24 November 2008 Notaris Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. PPSU sudah tidak menjalankan kegiatan operasinya.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai permanen akibat tidak beroperasinya PPSU.

PT Manajemen CBT Nusantara

Investasi saham pada PT Manajemen CBT Nusantara ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sesuai surat No.SR-796/MRU/11/2018 tanggal 30 November 2018. Investasi saham pada PT Manajemen CBT Nusantara dengan kepemilikan sebesar 8,33% dengan penyeteroran saham yaitu sebesar Rp250.000.

**c. Keuntungan yang Belum Direalisasi dari
Investasi – Nilai Wajar diukur Melalui
Penghasilan Komprehensif Lain**

	2021 Rp	2020 Rp
Nilai Wajar Pada Awal Tahun	11,269,358	9,085,252
Reklasifikasi atas Klasifikasi dan Pengukuran Dari Tersedia untuk Dijual Menjadi Nilai Wajar Diukur Melalui Laba Rugi	139,611	1,092,053
Keuntungan Belum Direalisasi yang Diakui Sebagai Penghasilan Komprehensif Lain	(188,709)	1,092,053
Nilai Wajar pada Akhir Tahun	11,220,260	11,269,358

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**PT Pembangunan Pariwisata Sulawesi Utara
("PPSU")**

This share investment in PPSU has received approval from the Minister of Finance in accordance with letter no. S/114/M K.013/1991 dated January 24, 1991. Investment in shares in PT Pembangunan Wisata North Sulawesi (PPSU (formerly PT Manado Minahasa Tourism Development Corporation (MMTDC)) with ownership of 8.26%, based on Deed No. 23 dated November 24, 2008 Notary Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. PPSU is no longer operating.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses that may arise from permanent impairment due to PPSU not operating.

PT Manajemen CBT Nusantara

This investment in shares in PT Management CBT Nusantara has received approval from the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia in accordance with letter No. SR-796/MRU/11/2018 dated November 30, 2018. Investment in shares in PT Manajemen CBT Nusantara with ownership of 8.33 % with a share deposit of Rp250,000.

**c. Unrealized Gains from Investment – Fair
Value through Other Comprehensive
Income**

Fair Value at Beginning Year

Reclassification For Classification and Measurement from Available For Sale to Fair Value Through Profit or Loss Unrealized Gain

are Recognized as Other Comprehensive Income
Fair Value at Year End

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**15. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura
Bersama**

15. Investment in Associates and Joint Venture

2021									
Persentase Kepemilikan/ Percentage %	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost Rp	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Carrying Value at Beginning of the Year Rp	Penambahan Investasi Periode Berjalan/ Additional Investment for the Period Rp	Penerimaan Dividen Periode Berjalan/ Dividend Received for the Year Rp	Bagian Laba (Rugi)/ Share of Profit (Loss) Rp	Bagian Penghasilan Komprehensif Lain/ Share of Other Comprehensive Income Rp	Selisih Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali/ Difference in the Value of Business Combination Under Common Control Rp	Nilai Tercatat Akhir Periode/ Carrying Value at End of the Period Rp	
Metode Ekuitas/ Equity Method									
Entitas Asosiasi/ Associates									
PT Wijaya Karya Realty	22.57%	1,755,999,882	--	1,755,999,882	--	(4,097,056)	845,459	--	1,752,748,285
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat	16.76%	285,000,000	238,539,858	50,000,000	--	(33,905,858)	--	--	254,634,000
PT Railink	40.00%	316,000,000	182,769,299	19,760,000	--	(64,244,299)	(20,000)	--	138,265,000
PT Sariarthamas Hotel Internasional	50.00%	63,809,675	91,594,388	--	(30,000,000)	(16,782,227)	868,103	--	45,700,264
PT Jasa Marga Bali Tol	6.31%	59,635,000	30,232,340	--	--	(12,468,708)	--	(5,938)	17,757,694
Ventura Bersama/ Joint Venture									
PT Bandara Internasional Batam	51.00%	296,523,690	--	296,523,690	--	--	--	--	296,523,690
Total		2,776,968,247	543,135,885	2,122,283,572	(30,000,000)	(131,478,148)	1,693,562	(5,938)	2,505,628,933
2020									
Persentase Kepemilikan/ Percentage %	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost Rp	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Carrying Value at Beginning of the Year Rp	Penyesuaian Atas Penerapan Awal - PSAK 71/ Adjustment of Initial Implementation - PSAK 71 Rp	Penambahan Investasi Tahun Berjalan/ Additional Investment for the Year Rp	Bagian Laba (Rugi)/ Share of Profit (Loss) Rp	Bagian Penghasilan Komprehensif Lain/ Share of Other Comprehensive Income Rp	Selisih Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali/ Difference in the Value of Business Combination Under Common Control Rp	Nilai Tercatat Akhir Periode/ Carrying Value at End of the Period Rp	
Metode Ekuitas/ Equity Method									
Entitas Asosiasi/ Associates									
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat	15.41%	200,000,000	194,175,968	--	85,000,000	(40,636,110)	--	--	238,539,858
PT Railink	38.55%	316,000,000	228,572,152	--	--	(45,898,396)	95,543	--	182,769,299
PT Sariarthamas Hotel Internasional	50.00%	63,809,675	111,642,984	(2,030,408)	--	(18,177,009)	--	158,821	91,594,388
PT Jasa Marga Bali Tol	6.31%	59,635,000	28,960,425	--	--	(6,540,869)	(23,000)	7,835,784	30,232,340
Total		639,444,675	563,351,529	(2,030,408)	85,000,000	(111,252,384)	72,543	7,994,605	543,135,885

Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi dan ventura bersama di atas adalah sebagai berikut:

Summary of financial information of associates and joint venture above are as follows:

	Total Aset/ Total Assets Rp	Total Liabilitas/ Total Liabilities Rp	Labanya (Rugi) Neto/ Net Profit (Loss) Rp
PT Wijaya Karya Realty	19,025,915,518	12,570,306,721	10,027,028
PT Bandara Internasional Batam	581,431,111	--	12,111
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat	3,065,671,000	1,917,362,000	(172,870,000)
PT Railink	1,000,069,000	658,647,000	(162,229,000)
PT Sariarthamas Hotel Internasional	176,960,933	85,105,293	(33,524,454)
PT Jasa Marga Bali Tol	1,827,452,099	1,511,754,790	(155,679,067)

PT Jasa Marga Bali Tol ("JMBT")

JMBT bergerak dalam bidang perusahaan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Bena.

PT Jasa Marga Bali Tol ("JMBT")

JMBT is engaged in the operation of Nusa Dua - Ngurah Rai - Bena toll road.

Investasi dalam saham pada JMBT merupakan konsorsium investasi pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Bena di daerah Bali oleh beberapa AP I BUMN.

Investments in shares in JMBT is an investment consortium highway construction Nusa Dua - Ngurah Rai - Bena in Bali by several state-owned companies.

AP I memiliki 59.635 saham atau sebesar Rp59.635.000 dan tambahan modal disetor lainnya sebesar Rp14.908.400 dengan jumlah kepemilikan sebesar 8%.

AP I has 59,635 shares or Rp59,635,000 and additional paid-in capital amounting to Rp14,908,400 with ownership of 8%.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP I mencatat investasi saham pada JMBT menggunakan metode ekuitas karena pengaruh signifikan di investee sesuai PSAK 15 paragraf 6 dan 16.

Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Nomor 46 Tanggal 22 Oktober 2020 dari Leolin Jayanti, S.H. Notaris di Jakarta, pemegang saham sepakat melakukan peningkatan modal dasar dari semula Rp745.434.000 menjadi Rp1.440.434.000. Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Nomor 24 Tanggal 12 November 2020 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., Notaris di Jakarta, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk melakukan setoran modal disetor sejumlah Rp 200.000.000, sehingga membuat persentase kepemilikan AP I di PT Jasamarga Bali Tol terdilusi dari 8,00% menjadi 6,31%.

PT Bandara Internasional Batam (“BIB”)

BIB didirikan pada tanggal 13 September 2021 untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pengembangan, pengoperasian, dan pengelolaan kegiatan kebandarudaraan di bandara Hang Nadim Batam.

AP I memiliki 296.523.690 saham atau sebesar Rp296.523.690 dengan persentase kepemilikan sebesar 51%. AP I mencatat investasi saham pada BIB menggunakan metode ekuitas sesuai PSAK 66 tentang Pengaturan Bersama.

PT Railink (“Railink”)

Berdasarkan Akta Notaris Hadijah S.H., Nomor 14 Tanggal 12 Mei 2020, Pemegang Saham menyetujui penambahan modal dasar PT Railink yang semula sebesar Rp790.000.000 yang terbagi atas 790.000 lembar saham menjadi Rp839.400.000 yang terbagi dalam 839.400 lembar saham dan menyetujui pengeluaran/ penempatan saham yang masih disimpan sebesar 29.640 lembar yang masing-masing bernilai Rp1 juta dengan total Rp29.640.000 yang seluruhnya diambil oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) sehingga persentase kepemilikan saham AP II terdilusi menjadi 38,55%.

Berdasarkan Akta Notaris Ariani L. Rachim, S.H., No. 06 Tanggal 19 April 2021, Pemegang Saham menyetujui pengeluaran/ penempatan saham yang masih disimpan sebesar 19.760 lembar yang masing-masing bernilai Rp1 juta dengan total Rp19.760.000 yang seluruhnya diambil oleh AP II sehingga persentase kepemilikan saham AP II menjadi 40%.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP I recorded its investments in shares in JMBT using the equity method due to significant influence over investee in accordance with PSAK 15, paragraphs 6 and 16.

Based on the Deed of Meeting Resolutions Number 46 dated October 22, 2020 from Leolin Jayanti, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders agreed to increase the authorized capital from Rp745,434,000 to Rp1,440,434,000. Based on the Deed of Meeting Resolutions Number 24 dated November 12, 2020 from Leolin Jayanti, S.H., Notary in Jakarta, PT Jasa Marga (Persero) Tbk and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk made injection of Rp200,000,000, which made AP I's ownership in PT Jasamarga Bali Tol to be diluted from 8.00% to 6.31%.

PT Bandara Internasional Batam (“BIB”)

BIB was established in September 13, 2021 to manage business activities in the development, operation, and management of airport activities at Hang Nadim airport, Batam.

AP I has 296,523,690 shares or Rp296,523,690 with percentage ownership of 51%. AP I recorded its investments in BIB using the equity method according to PSAK 66 about Joint Arrangements.

PT Railink (“Railink”)

Based on Notarial Deed of Hadijah S.H., No. 14, dated May 12, 2020, the Shareholders approved the addition of PT Railink's authorized capital from Rp790,000,000 which was consist of 790,000 shares to become Rp839,400,000 consist of 839,400 shares and approved the issuance or placement of unauthorized shares of 29,640 shares with a par value of Rp1 million with total value of Rp29,640,000, which all were acquired by PT Kereta Api Indonesia (KAI) and made AP II percentage of ownership decreased into 38.55%.

Based on Notarial Deed of Ariani L. Rachim, S.H., No. 06, dated April 19, 2021, the Shareholders approved the issuance or placement of unauthorized shares of 19,760 shares with a par value of Rp1 million with total value of Rp19,760,000, which all were acquired by AP II and made AP II percentage of ownership into 40%.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perhitungan bagian laba/rugi berdasarkan laporan keuangan Railink untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**PT Bandarudara Internasional Jawa Barat
("BIJB")**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BIJB yang telah diaktakan dengan akta notaris Surjadi Jasin, S.H., No. 9 pada tanggal 15 Desember 2020, AP II menambah penyertaan saham di BIJB sebesar Rp85.000 sehingga meningkatkan persentase kepemilikan menjadi 15,41%. AP II telah melakukan pembayaran atas penambahan kepemilikan saham tersebut pada tanggal-tanggal 1 April 2020, 29 Mei 2020 dan 29 September 2020 dengan masing-masing pembayaran sebesar Rp35.000.000, Rp15.000.000 dan Rp35.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Surjadi Jasin, S.H No. 27 tanggal 29 September 2021, Pemegang Saham menyetujui pengeluaran/penempatan saham sebesar 99.968 lembar yang masing-masing bernilai Rp1.000.000 dengan total Rp99.968.000 yang seluruhnya diambil oleh Pemprov Jabar sehingga persentase kepemilikan saham AP II terdilusi menjadi 14,62%.

Berdasarkan Akta Notaris Surjadi Jasin, S.H No. 10 Tanggal 29 Desember 2021, Pemegang Saham menyetujui pengeluaran/ penempatan saham sebesar 50.000 lembar yang masing-masing bernilai Rp1.000.000 dengan total Rp50.000.000 yang seluruhnya diambil oleh AP II sehingga persentase kepemilikan saham AP II menjadi 16,76%.

PT Wijaya Karya Realty

Investasi saham pada PT Wijaya Karya Realty Berdasarkan Akta Notaris No.189 tanggal 30 September 2021 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHUAH.01.03-0460507 tanggal 13 Oktober 2021, sehubungan dengan penyerahan inbreng saham PT Hotel Indonesia Properti. Perusahaan berhak menerima dari PT Wijaya Karya Realty hak atas kepemilikan sebanyak 16.566.614.132 lembar saham, dengan harga perolehan sebesar Rp1.755.999.882.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The calculation of the share in profit/loss is based on the financial statements of Railink for the year ended December 31, 2021 and 2020, respectively.

**PT Bandarudara Internasional Jawa Barat
("BIJB")**

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders of BIJB which has been notarized by notarial deed of Surjadi Jasin, S.H., No. 9 dated December 15, 2020, AP II made additional investment of Rp85,000 which increased their percentage ownership to 15.41%. AP II has fully paid the additional investment on April 1, 2020, May 29, 2020 and September 29, 2020 amounted Rp35,000,000, Rp15,000,000 and Rp35,000,000, respectively.

Based on Notarial Deed of Surjadi Jasin, S.H, No. 27 dated September 29, 2021, the Shareholders approved the issuance or placement of 99,968 shares with a par value of Rp1,000,000 with total value of Rp99,968,000 which all were acquired by Pemprov Jabar and made AP II's percentage of ownership decreased into 14.62%.

Based on Notarial Deed of Surjadi Jasin, S.H, No. 10 dated December 29, 2021, the Shareholders approved the issuance or placement of 50,000 shares with a par value of Rp1,000,000 with total value of Rp50,000,000 which all were acquired by AP II and made AP II's percentage of ownership into 16.76%.

PT Wijaya Karya Realty

Investment in shares in PT Wijaya Karya Realty Based on Notarial Deed No.189 dated 30 September 2021 of Rosida Rajagukguk-Siregar, SH., M.Kn., Notary in South Jakarta, which has been approved and ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Indonesia by Decree No.AHUAH.01.03-0460507 dated October 13, 2021, in connection with the transfer of shares in PT Hotel Indonesia Properti. The Company is entitled to receive from PT Wijaya Karya Realty the ownership rights of 16,566,614,132 shares, with acquisition cost of Rp1,755,999,882.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT Sariarthamas Hotel International

Sarinah menguasai saham pada PT Sariarthamas Hotel International sebesar 50% atau 3.750 lembar saham dengan nilai nominal USD1,000 per lembar saham. Sehingga penyertaan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Tanah yang merupakan bagian dari setoran modal inbreng Sarinah ke PT Sariarthamas Hotel International (SHI) yang luasnya 2.280 m² yang berlokasi di Jalan H. Agus Salim Jakarta. Tanah setoran modal inbreng tersebut tertuang dalam beberapa perjanjian diantara pemegang saham Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas dalam Basic Agreement tanggal 30 September 1970. Terkait dengan hal tersebut, Sarinah juga telah mengkonfirmasi kewajibannya kepada PT Sariarthamas Hotel International yang dituangkan dalam Memorandum Agreement tanggal 8 Maret 1983 diantara pemegang saham Perusahaan.

16. Uang Muka Pembelian Tanah

Uang muka pembelian tanah terutama untuk pembelian tanah sehubungan dengan perluasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Pada tanggal 25 September 2008, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 48 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, di mana kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusaha serta pengembangan bandar udara sesuai rencana induk, membutuhkan lahan seluas kurang lebih 2.137,82 Ha untuk memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara dilakukan terutama berdasarkan perkembangan lalu lintas angkutan udara.

Berdasarkan Surat Gubernur Banten perihal Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pengembangan Bandar Udara Soekarno-Hatta Tangerang Nomor 050/1152-BAPP/2015 menerangkan bahwa proses pengadaan lahan untuk pengembangan Bandar Udara Soekarno-Hatta Tangerang harus memperhatikan pentahapan pengadaan lahan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT Sariarthamas Hotel International

Sarinah owns 50% shares in PT Sariarthamas Hotel International or 3,750 shares with a par value of USD1,000 per share. Therefore, the investment is recorded using the equity method.

Land which is part of the Sarinah's inbreng capital injection to PT Sariarthamas Hotel International (SHI) with an area of 2,280 sqm located at Jalan H. Agus Salim Jakarta. The land for paid-in capital inbreng is contained in several agreements between the Company's shareholders including but not limited to the Basic Agreement dated September 30, 1970. In this regard, Sarinah has also confirmed its obligations to PT Sariarthamas Hotel International as stated in the Memorandum Agreement dated March 8, 1983 among the Company's shareholders.

16. Advance for Land Acquisition

Advance for land acquisition mainly for land acquisition regarding expansion of Soekarno-Hatta International Airport.

On September 25, 2008, Ministry of Transportation issued a Ministry of Transportation Regulation Number: KM 48 Year 2008 on Soekarno-Hatta International Airport Master Plan that states the airport operation, service, management, and business as well as the development of airport following the master plan requires land area about 2,137.82 Ha. The plan to build and develop airport's facilities is to accommodate flight operations and airport services needs based on recent air traffic growth.

Based on Governor of Banten's letter about the Suitability for Utilization of Soekarno-Hatta Airport Development Space Recommendation number 050/1152-BAPP/2015 explains that the process for land acquisition for the development of Soekarno-Hatta Airport Tangerang must be based on the land acquisition phasing regulated in Act Number 2 year 2012 regarding Land Acquisition for Construction for Public Interest.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT Angkasa Pura II, melalui Surat AP II kepada Gubernur Provinsi Banten Nomor 06.02/00.1/10/2015/0799 tanggal 23 Oktober 2015 perihal permohonan penetapan lokasi untuk pembangunan runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, telah menyampaikan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 130 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015, AP II menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp2.000.000.000 dalam rangka pembebasan lahan terkait dengan pembangunan landasan pacu (runway) 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 69 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016, AP II menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp2.000.000.000 dalam rangka pembebasan lahan terkait dengan pembangunan landasan pacu (runway) 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Selanjutnya, Keputusan Gubernur Banten Nomor 598/Kep.83-Huk/2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, menyatakan bahwa menetapkan lokasi pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta seluas ±173,19 Hektar (Ha) yang terletak di wilayah Kelurahan Benda, Kelurahan Selapajang Jaya, Desa Rawa Burung, Desa Rawa Rengas dan Desa Bojong Renged.

Keputusan Gubernur Banten Nomor 598/Kep.83- Huk/2016 dimaksud berlaku untuk jangka waktu 2 Tahun dan diperpanjang selama 1 Tahun melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 598/Kep.19-Huk/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Dalam pelaksanaan pembebasan lahan tersebut, AP II berkoordinasi dengan BPN Kanwil Banten terkait pelaksanaan pengadaan tanahnya, yang mana pada prosesnya pelaksanaan pembebasan lahan tersebut dilaksanakan oleh BPN Kota Tangerang dan BPN Kabupaten Tangerang.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT Angkasa Pura II, through AP II's Letter to Governor of Banten Number 06.02/00.1/10/2015/0799 dated October 23, 2015 concerning the proposal to determine the location for developing runway 3 of Soekarno-Hatta International Airport Tangerang, has submitted the document on land acquisition schemes to develop runway 3 Soekarno-Hatta International Airport Tangerang.

Based on the Government Regulation ("PP") No. 130 Year 2015 dated December 28, 2015, AP II received additional capital investment of the Republic of Indonesia amounting to Rp2,000,000,000 in relation with the land acquisition related to the construction of runway 3 at Soekarno-Hatta International Airport.

Based on the Government Regulation ("PP") No. 69 Year 2016 dated December 29, 2016, AP II received additional capital investment of the Republic of Indonesia amounting to Rp2,000,000,000 in relation with the land acquisition related to the construction of runway 3 at Soekarno-Hatta International Airport.

Then, Decree of Governor of Banten Number 598/Kep.83-Huk/2016 dated February 5, 2016 concerning the Runway 3 Soekarno-Hatta International Airport Development Location Establishment, confirmed that the location for the development of Runway 3 Soekarno-Hatta International Airport with an area of ±173.19 Hectare (Ha) located in Kelurahan Benda, Kelurahan Selapajang Jaya, Desa Rawa Burung, Desa Rawa Rengas and Desa Bojong Renged.

The Decree of Governor of Banten Number 598/Kep.83-Huk/2016 valid for 2 years period and has been extend for another 1 year through the Decree of Governor of Banten Number 598/Kep.19-Huk/2018 dated January 25, 2018 concerning the Extension of Runway 3 Soekarno-Hatta International Airport Development Location Establishment.

In the process of land clearing, AP II coordinates with the National Land Agency (BPN) of Banten Regional Office related to the land acquisition process which conducted by BPN Kota Tangerang and BPN Kabupaten Tangerang.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 4 Maret 2019, BPN Kabupaten Tangerang telah menyerahkan hasil pembebasan tanah kepada AP II dengan total luas 134,06 Ha berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Tanah No.263/BA-36.03.AT.02/III/2019.

Pada tanggal 11 Maret 2019, BPN Kota Tangerang telah menyerahkan hasil pembebasan tanah kepada AP II dengan total luas 33,46 Ha berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Tanah No. 01/PH/RW.3/III/2019.

Dengan demikian, berdasarkan Berita Acara di atas, pembebasan tanah yang telah dilakukan oleh AP II untuk pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta adalah seluas 167,52 Ha.

Lahan yang telah diserahkan kepada Perusahaan di atas saat ini telah diajukan untuk proses Sertifikasi Lahan atas nama AP II di BPN Kanwil Banten berdasarkan Surat AP II Nomor. 06.04/00/10/2019/11388-11389 tanggal 7 Oktober 2019 untuk lahan yang terletak di wilayah Kota Tangerang dan Surat AP II Nomor. 06.04/00/10/2019/12216-12218 tanggal 28 Oktober 2019 untuk lahan yang terletak di wilayah Kabupaten Tangerang.

Pada tahun 2021, AP II telah mendapatkan dua peta bidang tanah untuk area Benda dan Selapajang, sebagai salah satu syarat penerbitan sertifikat tanah oleh BPN.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 pembebasan tanah yang telah dilakukan oleh AP II untuk pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta masing-masing seluas 167,5 Ha dengan jumlah pembayaran kepada pemilik lahan total sebesar Rp3.269.013.000.

Pada tahun 2021, AP II mereklasifikasi uang muka tanah menjadi aset tetap sebesar Rp3.314.043.000 (Catatan 18). Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, sertifikat tanah tersebut masih dalam proses penerbitan oleh BPN.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

On March 4, 2019 BPN Kabupaten Tangerang has handed over the results of the land acquisition to AP II with a total area 134.06 Ha based on the Minutes of Handover of the Results of Land Acquisition Number 263/BA-36.03.AT.02/III/2019.

On March 11, 2019 BPN Kota Tangerang has handed over the results of the land acquisition to AP II with a total area 33.46 Ha based on the Minutes of Handover of the Results of Land Acquisition Number 01/PH/RW.3/III/2019.

Therefore, based on the Minutes above, the land acquisition that has been carried out by AP II for the development of Runway 3 Soekarno-Hatta International Airport is an area of 167.52 Ha.

Land that has been handed over to AP II has now been submitted for the process of Land Certification in BPN Banten Regional Office on behalf of AP II based on Company Letter Number. 06.04/00/10/2019/11388-11389 dated October 7, 2019 for land located in Kota Tangerang area and Company Letter Number. 06.04/00/10/2019/12216-12218 dated October 28, 2019 land located in Kabupaten Tangerang area.

In 2021, AP II has obtained land map for Benda and Selapajang as one of the requirements for the issuance of the land certificate.

As of December 31, 2021 and 2020, the progress of completion of land acquisition by AP II for constructions of Runway 3 of Soekarno-Hatta International Airport are 167.5 Ha with total payments to land owners amounted to Rp3,269,013,000 in total.

In 2021, AP II has reclassified the advance for land into fixed assets of Rp3,314,043,000 (Note 18). Until the completion date of these consolidated financial statements, the land certificate is still in the process of being issued by BPN.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

17. Properti Investasi

17. Investment Properties

	2021					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Addition	Pengurangan / Deduction	Reklasifikasi / Reclassification (Catatan/Note 18)	Saldo Akhir / Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan						Acquisitions Cost
Tanah	104,376,168	--	--	--	104,376,168	Lands
Bangunan/ Lapangan	179,804,986	--	--	46,504,051	226,309,037	Building/Fields
Total	284,181,154	--	--	46,504,051	330,685,205	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan/ Lapangan	60,919,615	3,855,589	--	21,459,557	86,234,761	Building/Fields
Penurunan Nilai						Impairment Value
Bangunan/ Lapangan	23,007,461	--	--	--	23,007,461	Building/Fields
Nilai Buku	200,254,077				221,442,982	Book Value
	2020					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Addition	Pengurangan / Deduction	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan						Acquisitions Cost
Tanah	107,598,118	187,529	(3,409,479)	--	104,376,168	Lands
Bangunan/ Lapangan	176,395,507	3,409,479	--	--	179,804,986	Building/Fields
Total	283,993,625	3,597,008	(3,409,479)	--	284,181,154	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan/ Lapangan	56,007,559	4,912,056	--	--	60,919,615	Building/Fields
Penurunan Nilai						Impairment Value
Bangunan/ Lapangan	--	23,007,461	--	--	23,007,461	Building/Fields
Nilai Buku	227,986,065				200,254,077	Book Value

Properti investasi Grup terutama terdiri dari:

- Tanah dan gedung di Jl. Majapahit No. 8, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jl. MH. Thamrin dan aset tanah di Braga yang terletak di Jalan Braga No. 10, Bandung yang dimiliki oleh Sarinah.
- Tanah yang akan dikembangkan untuk kawasan wisata di sekitar Candi Ijo, Candi Sewu dan Candi Ratu Boko yang dimiliki oleh TWC.
- Tanah, gedung, dan fasilitas penunjang, eks-unit Hotel Indonesia serta Unit Inna Wisata dengan masa 30 tahun dan dengan Hak Opsi Perpanjangan selama 20 tahun yang dimiliki oleh HIN.
- Tanah ex Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) yang berada di Jalan Kramat Raya No. 21 DKI Jakarta seluas 16.101 m² dan di Jalan Batas II Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan seluas 14.303 m² yang dimiliki oleh AP II.
- Tanah yang berada di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang seluas 40.000 m² yang dimiliki oleh AP II.

The Group's investment properties mainly consist of:

- Land and building on Jl. Majapahit No. 8, South Petojo Village, Gambir District, Central Jakarta, Jl. MH. Thamrin and land assets in Braga which is located at Jalan Braga No. 10, Bandung which is owned by Sarinah.
- The land which will be developed for tourist areas around Ijo Temple, Sewu Temple and Ratu Boko Temple which are owned by TWC.
- Land, building, and supporting facilities ex. Hotel Indonesia Unit and the Inna Wisata Unit with a 30-year term and with an Optional Extension of 20 years owned by HIN.
- Ex Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) land located in Kramat Raya Street No. 21 DKI Jakarta totaling 16,101 sqm and in Batas II Street Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan totaling 14,303 sqm which is owned by AP II.
- Land located at Saentis Village, Sub-District Percut Sei Tuan, District Deli Serdang with an area of 40,000 sqm which is owned by AP II.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Tanah dan bangunan yang merupakan tanah, bangunan dan ruang yang dimanfaatkan oleh pihak lain untuk ruang tunggu di bandara, pergudangan, hotel dan perkantoran di kawasan Bandara Soekarno-Hatta dan Kualanamu yang dimiliki oleh AP II.
- Bangunan dan lapangan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Cabang Balikpapan yang dimiliki oleh AP I.

- Land and buildings which consist of land, building and space utilized by other parties for airport lounge, warehouse, hotel and office around Soekarno-Hatta and Kualanamu Airports area which is owned by AP II.
- Buildings and fields at Sultan Aji Muhammad Sulaiman Airport Balikpapan Branch owned by AP I.

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation is allocated as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 36)	3,545,011	4,601,478	Cost of Revenues (Note 36)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 38)	310,578	310,578	General and Administrative Expenses (Note 38)
Total	3,855,589	4,912,056	Total

Pada tahun 2021, aset tetap berupa gudang Marunda dan gudang Bali Logistics Park (BLP) milik Angkasa Pura Logistik (APL) direklasifikasi ke properti investasi (Catatan 18).

In 2021, fixed assets in form of Marunda and Bali Logistics Park (BLP) warehouses owned by Angkasa Pura Logistik (APL) have been reclassified to investment properties (Note 18).

Tanah milik Sarinah dijadikan sebagai jaminan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 26).

Land owned by Sarinah was used as collateral to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Note 26).

Nilai wajar properti investasi Grup ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), manajemen berkeyakinan bahwa NJOP telah mendekati nilai wajarnya.

The Group's fair value of investment properties is determined based on the Selling Value of Tax Object (NJOP), management believes that the NJOP is close to its fair value.

18. Aset Tetap

18. Fixed Assets

	2021						
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Divestasi/ Divest Rp	Reklasifikasi/ Reclassification/ Adjustment Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Biaya Perolehan							Acquisitions Cost
Tanah	16,307,795,296	--	(30,103)	(1,783,005,114)	4,270,598,207	18,795,358,286	Lands
Bangunan Lapangan	26,198,858,449	(5,317,875)	(606,249)	--	947,022,876	27,139,957,201	Buildings/Fields
Bangunan Gedung	20,954,215,529	109,685,925	(1,294,084)	(894,461,019)	1,050,282,672	21,218,429,023	Buildings
Pesawat	5,496,343	--	--	--	(4,465,700)	1,030,643	Aircraft
Kendaraan Bermotor	1,123,217,301	68,484,019	(11,539,831)	(324,962,287)	85,529,426	940,728,628	Vehicles
Mesin dan Peralatan	11,299,604,319	84,687,911	(55,553,598)	(217,669,653)	593,369,606	11,704,438,585	Machinery and Equipments
Perlengkapan Terminal dan Gedung	5,459,809,827	124,372,388	(199,000)	(38,653,138)	209,967,000	5,755,297,077	Terminal dan Building Equipments
Instalasi dan Jaringan	9,718,937,968	86,186,196	(216,446)	--	591,737,682	10,396,645,400	Installation and Network
Overlay	1,432,353,000	5,255,000	--	--	108,377,000	1,545,985,000	Overlay
Renovasi Bangunan	29,356,016	1,284,614	--	--	--	30,640,630	Buildings Renovation
Lain-lain	350,538,814	11,142	(20,000)	--	1,099,000	351,628,956	Others
Aset dalam Penyelesaian	8,952,303,932	2,450,908,015	(77,388,709)	(66,299,051)	(4,632,436,287)	6,627,087,899	Assets Under Construction
Total	101,832,486,794	2,925,557,335	(146,848,020)	(3,325,050,263)	3,221,081,482	104,507,227,328	Total
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Bangunan Lapangan	4,499,849,820	892,500,651	(33,226)	--	405,799	5,392,723,044	Buildings/Fields
Bangunan Gedung	3,615,848,686	603,306,188	(447,381)	(309,420,877)	(23,503,686)	3,885,782,930	Buildings
Pesawat	1,030,643	--	--	--	--	1,030,643	Aircraft
Kendaraan Bermotor	739,458,779	75,863,311	(922,215)	(265,946,487)	4,418	548,457,806	Vehicles
Mesin dan Peralatan	5,945,623,802	923,528,346	(53,552,528)	(212,855,006)	1,442,182	6,604,186,796	Machinery and Equipments
Perlengkapan Terminal dan Gedung	1,661,958,097	326,351,236	(5,000)	(12,421,884)	--	1,975,882,448	Terminal dan Building Equipments
Instalasi dan Jaringan	3,507,515,114	820,159,092	(99,250)	--	213,105	4,327,788,061	Installation and Network
Overlay	511,308,000	94,872,000	--	--	--	606,180,000	Overlay
Renovasi Bangunan	15,651,968	2,527,270	--	--	--	18,179,238	Buildings Renovation
Lain-lain	207,668,000	40,945,000	(19,000)	--	--	248,594,000	Others
Total	20,705,912,909	3,780,053,095	(55,078,600)	(800,644,256)	(21,438,181)	23,608,804,966	Total
Cadangan Penurunan Nilai	109,127,129	412,356	--	--	--	109,539,485	Allowance for Impairment
Nilai Buku	81,017,446,756					80,788,882,877	Book Value

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2021							
Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Divestasi/ Divest Rp	Reklasifikasi/ Koreksi Reclassification/ Adjustment Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp		
Biaya Perolehan						Acquisitions Cost	
Tanah	15,671,185,720	1,703,000	--	--	634,906,575	16,307,795,296 Lands	
Bangunan Lapangan	20,850,277,373	74,642,525	(6,718,669)	--	5,280,857,220	26,198,858,449 Buildings/Fields	
Bangunan Gedung	16,127,099,406	27,882,672	(15,644,616)	--	4,814,878,066	20,954,215,529 Buildings	
Pesawat	5,496,343	--	--	--	--	5,496,343 Aircraft	
Kendaraan Bermotor	975,279,988	124,984,863	(17,615,290)	--	40,567,740	1,123,217,301 Vehicles	
Mesin dan Peralatan	9,597,970,437	291,515,173	(84,260,538)	--	1,494,379,247	11,299,604,319 Machinery and Equipments	
Perlengkapan Terminal dan Gedung	5,156,413,509	214,162,318	(10,223,000)	--	99,437,000	5,459,809,827 Terminal dan Building Equipments	
Instalasi dan Jaringan	7,999,973,774	88,918,830	(35,421,912)	--	1,665,467,276	9,718,937,968 Installation and Network	
Overlay	874,270,000	7,630,000	--	--	550,453,000	1,432,353,000 Overlay	
Renovasi Bangunan	79,327,642	770,796	(50,742,422)	--	--	29,356,016 Buildings Renovation	
Lain-lain	357,238,000	13,002,814	(2,656,000)	--	(17,046,000)	350,538,814 Others	
Aset dalam Penyelesaian	17,398,788,382	6,278,091,549	(1,123,316)	--	(14,723,452,683)	8,952,303,932 Assets Under Construction	
Total	95,093,320,573	7,123,324,539	(224,405,763)	--	(159,752,558)	101,832,486,794 Total	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation	
Bangunan Lapangan	3,787,647,460	712,930,710	(728,350)	--	--	4,499,849,820 Buildings/Fields	
Bangunan Gedung	3,083,252,679	536,349,361	(3,748,780)	--	(4,574)	3,615,848,686 Buildings	
Pesawat	1,030,643	--	--	--	--	1,030,643 Aircraft	
Kendaraan Bermotor	662,447,518	94,779,512	(17,772,825)	--	4,574	739,458,779 Vehicles	
Mesin dan Peralatan	5,149,444,950	861,593,921	(65,415,069)	--	--	5,945,623,802 Machinery and Equipments	
Perlengkapan Terminal dan Gedung	1,368,123,980	303,087,117	(9,253,000)	--	--	1,661,958,097 Terminal dan Building Equipments	
Instalasi dan Jaringan	2,873,416,693	666,964,155	(32,865,734)	--	--	3,507,515,114 Installation and Network	
Overlay	403,779,000	107,529,000	--	--	--	511,308,000 Overlay	
Renovasi Bangunan	42,859,910	4,061,440	(31,269,382)	--	--	15,651,968 Buildings Renovation	
Lain-lain	169,217,000	41,107,000	(2,656,000)	--	--	207,668,000 Others	
Total	17,541,219,833	3,328,402,216	(163,709,140)	--	--	20,705,912,909 Total	
Cadangan Penurunan Nilai	27,854,000	81,273,129	--	--	--	109,127,129 Allowance for Impairment	
Nilai Buku	77,524,246,740					81,017,446,756 Book Value	

Beban penyusutan untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Depreciation expenses for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 36)	3,771,773,654	3,317,302,546	Cost of Revenues (Note 36)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 38)	8,279,441	11,099,670	General and Administrative Expenses (Note 38)
Jumlah	3,780,053,095	3,328,402,216	Total

Pengurangan aset tetap terdiri dari penghapusan dan penjualan aset tetap sebagai berikut:

Disposal of fixed assets consist of write off and sale of fixed assets as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Harga Jual	106,246,512	94,933,683	Proceeds
Dikurangi: Nilai Buku Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap	91,769,420	60,696,623	Less: Net Book Value of Sale and Retirement of Fixed Assets
Keuntungan Penjualan Aset Tetap (Catatan 36)	14,477,092	34,237,060	Gain on Sale of Fixed Assets (Note 36)

Aset dalam penyelesaian merupakan proyek yang masih belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

Assets under construction represents projects that have not been completed at the date of the consolidated statements of financial position with the details as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021			
	Perkiraan % Penyelesaian / Estimated % of Completion	Nilai Tercatat / Carrying Value	Tahun Perkiraan Penyelesaian / Estimated Years of Completion	
Landasan, Apron	92.85	377,671,558	2022	Runways, Apron
Lapangan, Jalan dan Pagar	86.13	853,430,839	2022	Field, Roads, Fences
Bangunan	88.59	4,970,866,914	2022	Buildings
Peralatan Mekanik	65.77	71,556,805	2022	Mechanical Equipments
Tanah	99.15	17,210,035	2022	Land
Sistem Pengolahan Data Berbantuan Komputer	95.51	24,970,978	2022	Computer Assisted Data Processing System
Lain-lain	68.00	311,380,770	2022	Others
Aset Dalam Penyelesaian		6,627,087,899		Assets Under Construction
	2020			
	Perkiraan % Penyelesaian / Estimated % of Completion	Nilai Tercatat / Carrying Value	Tahun Perkiraan Penyelesaian / Estimated Years of Completion	
Landasan, Apron	74.50	529,305,910	2021	Runways, Apron
Lapangan, Jalan dan Pagar	83.52	1,026,485,035	2021	Field, Roads, Fences
Bangunan	85.84	6,072,776,922	2021	Buildings
Peralatan Mekanik	76.98	53,176,087	2021	Mechanical Equipments
Tanah	99.00	630,558,775	2021	Land
Sistem Pengolahan Data Berbantuan Komputer	81.03	15,660,536	2021	Computer Assisted Data Processing System
Lain-lain	78.08	624,340,667	2021	Others
Aset Dalam Penyelesaian		8,952,303,932		Assets Under Construction

Pada tahun 2021, aset tetap tanah sebesar Rp3.314.043.000 merupakan reklasifikasi dari uang muka pembelian tanah (Catatan 16).

In 2021, fixed assets of land amounting to Rp3,314,043,000 represents a reclassification of advances for land acquisition (Note 16).

Pada tanggal 30 April 2021, HIN telah melepas pengendalian terhadap HIPRO sehingga terjadi pengurangan pada aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp2.524.406.007.

On April 30, 2021, HIN has relinquished control of HIPRO, resulting in a reduction in fixed assets with a book value of Rp2,524,406,007.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 aset tetap berupa gedung terminal penumpang, gedung operasional, fasilitas terminal penumpang dan gedung operasi dan aset lainnya diasuransikan dengan nilai pertanggungan semua risiko, gempa bumi, kerusakan mesin dan peralatan elektronik masing-masing sebesar Rp36.128.638.865 dan Rp37.002.754.699. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

On December 31, 2021 and 2020, fixed assets in the form of passenger terminal building, operational building, passenger terminal facility and operational building and other assets are insured with an all risk coverage, earthquake, machinery breakdown and electronic equipment amounting to Rp36,128,638,865 and Rp37,002,754,699 respectively. Management believes that the insured amount is adequate to cover possible losses from such risk.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah cukup.

Management believes that the allowance for impairment as of December 31, 2021 and 2020 is adequate.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif.

As of December 31, 2021 and 2020, there are no fixed assets classified as terminated from active.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

19. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

19. Right-of-Use Assets and Lease Liabilities

a. Aset Hak Guna

a. Right-of-Use

	2021					
	Saldo Awal / Beginning Balance Rp	Penambahan / Addition Rp	Pengurangan / Deduction Rp	Divestasi / Divest Rp	Saldo Akhir / Ending Balance Rp	
Biaya Perolehan						Acquisitions Cost
Tanah	866,241,297	16,424,407	(21,643,000)	(268,552,696)	592,470,008	Land
Bangunan	44,879,095	30,409,141	(31,362,067)	--	43,926,169	Building
Kendaraan	398,253,128	3,906,141	(354,089,950)	--	48,069,319	Vehicles
Peralatan	27,883,776	1,714,056	(140,178)	--	29,457,654	Equipment
Taman Mini Indonesia Indah	--	126,981,814	--	--	126,981,814	Taman Mini Indonesia Indah
Subtotal	1,337,257,296	179,435,559	(407,235,195)	(268,552,696)	840,904,964	Subtotal
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Tanah	62,112,521	29,784,488	--	(29,719,479)	62,177,530	Land
Bangunan	30,824,655	20,036,321	(118,555)	--	50,742,421	Building
Kendaraan	51,183,167	10,256,673	(29,898,054)	--	31,541,786	Vehicles
Peralatan	3,964,407	7,609,524	--	--	11,573,931	Equipment
Taman Mini Indonesia Indah	--	2,539,636	--	--	2,539,636	Taman Mini Indonesia Indah
Subtotal	148,084,750	70,226,641	(30,016,609)	(29,719,479)	158,575,304	Subtotal
Nilai Buku	1,189,172,546				682,329,661	Book Value

	2020						
	Saldo Awal / Beginning Balance Rp	Dampak PSAK 73 / Effect of PSAK 73 Rp	Penambahan / Addition Rp	Pengurangan / Deduction Rp	Divestasi / Divest Rp	Saldo Akhir / Ending Balance Rp	
Biaya Perolehan							Acquisitions Cost
Tanah	--	654,662,831	219,759,775	(8,181,310)	--	866,241,297	Land
Bangunan	--	3,839,929	56,131,137	(15,091,971)	--	44,879,095	Building
Kendaraan	--	66,620,466	506,702,571	(175,069,909)	--	398,253,128	Vehicles
Peralatan	--	4,317,352	33,392,981	(9,826,557)	--	27,883,776	Equipment
Subtotal	--	729,440,578	815,986,464	(208,169,747)	--	1,337,257,296	Subtotal
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Tanah	--	9,390,553	52,721,968	--	--	62,112,521	Land
Bangunan	--	638,286	30,186,369	--	--	30,824,655	Building
Kendaraan	--	--	51,183,167	--	--	51,183,167	Vehicles
Peralatan	--	--	3,964,407	--	--	3,964,407	Equipment
Subtotal	--	10,028,839	138,055,911	--	--	148,084,750	Subtotal
Nilai Buku	--					1,189,172,546	Book Value

b. Liabilitas Sewa

b. Lease Liabilities

	2021 Rp	2020 Rp	
Liabilitas Sewa			Lease Liabilities
Bagian Jangka Pendek	91,080,336	180,061,176	Current Portion
Bagian Jangka Panjang	525,528,288	921,886,213	Non-Current Portion
Total	616,608,624	1,101,947,389	Total

Beban bunga atas liabilitas sewa untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp57.920.377 dan Rp74.727.839 yang dicatat sebagai bagian dari beban keuangan.

Interest expense on lease liabilities for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp57,920,377 and Rp74,727,839, respectively, recorded as part of financial expenses.

Penyusutan aset hak guna dibebankan pada beban pokok pendapatan.

Depreciation of right-of-use assets is charged to cost of revenues.

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Grup sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang

Some leases contain extension options exercisable by the Group before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Group.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

dimiliki hanya dapat diambil oleh Grup. Grup mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Grup mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Grup.

The Group assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Group reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

20. Aset Tidak Lancar Lain-lain

Aset Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) merupakan alat bantu navigasi yang belum diserahkan AP II kepada LPPNPI.

Uang jaminan merupakan uang jaminan atas petugas keamanan dan langganan listrik.

Saldo per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp101.213.827 dan Rp78.030.912.

20. Other Non-Current Assets

The assets of Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) are navigation support equipment that have not been transferred yet by AP II to LPPNPI.

Deposits represents guarantee deposits from security personnel and electricity.

The balance as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp101,213,827 and Rp78,030,912, respectively.

21. Utang Usaha

	2021 Rp	2020 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 44)	184,107,523	86,026,246	Related Parties (Note 44)
Pihak Ketiga	596,402,658	574,746,766	Third Parties
Total	780,510,181	660,773,012	Total

21. Account Payables

22. Utang Lain-lain

	2021 Rp	2020 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 44)	866,199,845	777,952,157	Related Parties (Note 44)
Pihak Ketiga	2,718,321,020	3,552,947,057	Third parties
Total	3,584,520,865	4,330,899,214	Total

22. Other Payables

Utang lain-lain mayoritas terdiri dari perolehan aset tetap, jaminan pelanggan dan titipan pembayaran.

Perolehan aset tetap merupakan utang kepada kontraktor sehubungan proyek-proyek aset tetap Grup yang dibangun oleh kontraktor.

Jaminan pelanggan merupakan uang jaminan yang diberikan oleh pelanggan sehubungan dengan sewa ruangan, tanah, listrik, air dan telepon di awal perjanjian.

The majority of other payables consist of acquisitions of fixed assets, customer guarantees and payment deposits.

Acquisition of fixed asset payable mainly represent payable to contractors who build the Group's fixed assets.

Customer deposit represent cash deposit given by customer that consists of deposits for space rental, land rental, electrical and water installation at the beginning of the contract.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Titipan pembayaran terutama merupakan penerimaan pembayaran dari DJPU sehubungan dengan stimulus subsidi tarif penerbangan PJP2U.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Payment deposit mainly represent receipt from DJPU in relation to PJP2U airline fare subsidy stimulus.

**23. Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
Jangka Pendek**

**23. Short-Term Bank and Other Financial
Institution Loans**

	2021 Rp	2020 Rp	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	801,596,344	402,909,464	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	500,000,000	163,576,140	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	381,089,500	46,761,232	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRISyariah Tbk)	39,560,000	20,000,000	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRISyariah Tbk)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	--	8,700,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	--	15,000,000	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Total	1,722,245,844	656,946,836	Total

PT Angkasa Pura I ("AP I") dan Entitas Anak

a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Pada tanggal 11 Desember 2014, PT Angkasa Pura Suport (APS) memperoleh pinjaman jangka pendek sebesar Rp40.000.000 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan jangka waktu 12 bulan dan tingkat bunga 11,5% per tahun. Fasilitas ini telah beberapa kali diperpanjang, terakhir berdasarkan surat dari BNI tanggal 22 Desember 2020, dimana pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2022 dengan tingkat suku bunga 10,00% per tahun. Per 31 Desember 2021 dan 2020 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp38.946.344 dan Rp39.931.070.

APS diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan berupa rasio ancer minimum sebesar 1 kali, *debt service coverage ratio* minimum sebesar 1 kali dan *debt to equity ratio* (DER) maksimal sebesar 2,50 kali.

Pada tanggal 30 Desember 2021, APS telah menerima surat pembebasan (*waiver letter*) dari BNI atas tidak terpenuhinya rasio keuangan tertentu pada tanggal 31 Desember 2021.

b. PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")

Pada tanggal 28 Juni 2019, APS memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp11.357.000 dengan jangka

PT Angkasa Pura I ("AP I") and Subsidiaries

a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

On December 11, 2014, PT Angkasa Pura Suport (APS) obtained short-term bank loan amounting to Rp40,000,000 from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) with 12 months term and bearing interest at 11.5%. This facility had been extended several times, last extension was based on letter from BNI dated December 22, 2020, where the loan will mature on December 10, 2022, bearing interest rate at 10.00% per annum. As of December 2021 and 2020 the outstanding balance of this facility amounting to Rp38,946,344 and Rp39,931,070.

APS is required to maintain the debtor's financial ratios, minimum current ratio of 1 time, debt service coverage ratio minimum of 1 time, debt to equity ratio (DER) maximum of 2.50 times.

On December 30, 2021, APS has received waiver letter from BNI for incompliance of certain financial ratio as of December 31, 2021.

b. PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")

On June 28, 2019, APS obtained financing working capital facility amounting to Rp11,357,000 with 7 months term with due

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

waktu 7 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2020 termasuk masa tenggang (*grace period*) selama 6 bulan. APS telah melunasi pinjaman ini pada tanggal 20 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Juli 2019, APS memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp9.619.000 dengan jangka waktu 7 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2020 termasuk masa tenggang (*grace period*) selama 6 bulan. APS telah melunasi pinjaman ini pada tanggal 20 Desember 2020.

Pada tanggal 18 September 2019, APS memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp3.333.600 dengan jangka waktu 7 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 April 2020 termasuk masa tenggang (*grace period*) selama 6 bulan. APS telah melunasi pinjaman ini pada tanggal 20 Desember 2020.

Pada tanggal 29 Desember 2020, APS memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp20.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2021. APS telah melunasi pinjaman ini pada tanggal 24 Juni 2021.

Seluruh fasilitas pinjaman yang diperoleh pada tahun 2021 dan 2020 dijamin dengan piutang usaha senilai Rp50.000.000 (Catatan 7).

Pada tanggal 18 Juni 2021, APS memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp20.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2021 dengan bunga bagi hasil 4,92% ke BSI. Fasilitas ini telah diperpanjang hingga 17 Juni 2022 dengan bunga bagi hasil 0,62% ke BSI.

Pada tanggal 5 Maret 2021, APS memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp13.839.000 dengan jangka waktu 6 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2021 dengan bunga bagi hasil 4,75% ke BSI. Fasilitas ini telah diperpanjang hingga 17 Juni 2022.

Pada tanggal 2 Juli 2021, APS memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp5.721.000 dengan jangka waktu 6 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2022. Fasilitas ini telah diperpanjang hingga 17 Juni

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

date on January 29, 2020 including 6 months grace period. APS has repaid the outstanding loan on December 20, 2020.

On July 31, 2019, APS obtained financing working capital facility amounting to Rp9,619,000 with 7 months term with due date on February 28, 2020 including 6 months grace period. APS has repaid the outstanding loan on December 20, 2020.

On September 18, 2019, APS obtained financing working capital facility amounting to Rp3,333,600 with 7 months term with due date on April 20, 2020 including 6 months grace period. APS has repaid the outstanding loan on December 20, 2020.

On December 29, 2020, APS obtained financing working capital facility amounting to Rp20,000,000 with 6 months term with due date on June 20, 2021. APS has repaid the outstanding loan on June 24, 2021.

All working capital facilities obtained in 2021 and 2020 are secured by trade receivable amounting to Rp50,000,000 (Note 7).

On June 18, 2021, APS obtained financing working capital facility amounting to Rp20,000,000 with 6 months term with due date on December 20, 2021 with sharing interest at 4.92% to BSI. This facility had been extended until June 17, 2022 with sharing interest 0.62% to BSI.

On March 5, 2021, APS obtained financing working capital facility amounting to Rp13,839,000 with 6 months term with due date on September 20, 2021 with sharing interest 4.75%. This facility had been extended until June 17, 2022.

On July 2, 2021, APS obtained financing working capital facility amounting Rp5,721,000 with 6 months term with due date on January 20, 2022. This facility had been extended until June 17, 2022. As of December 31, 2021 and

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2022. Per 31 Desember 2021 dan 2020 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp39.560.000 dan Rp20.000.000.

c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 7 Agustus 2020, AP I bersama dengan entitas anak menandatangani perjanjian fasilitas notional pooling Nomor: SP.DK.155/HK.06/2020 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri). Jangka waktu fasilitas ini adalah 1 tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian. Atas fasilitas ini, bank memberikan jasa giro efektif dan membebaskan biaya bunga efektif yang dihitung atas dasar posisi saldo akhir harian. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp9.989.052.

Pada tanggal 4 Maret 2021, PT Angkasa Pura Logistik (APL) memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dari Bank Mandiri dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp15.000.000. Pada tanggal 17 Maret 2021, APL telah melakukan penarikan pinjaman tersebut sebesar Rp15.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan tingkat bunga 1% diatas tingkat suku bunga deposito counter. Seluruh fasilitas yang diperoleh dijamin dengan deposito sebesar Rp15.000.000 (Catatan 5). Saldo pinjaman per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.500.000.

d. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")

Pada tanggal 18 Desember 2020, APL memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dari SMI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp25.000.000. Penarikan fasilitas pinjaman ini telah dilakukan oleh APL pada tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp15.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan tingkat suku bunga 9,00% per tahun.

APL juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- Debt Service Coverage Ratio ("DSCR") minimum sebesar 1 kali
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas ("DER") maksimum sebesar 3 kali
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2020 the outstanding balance of this facility amounting to Rp39,560,000 and Rp20,000,000.

c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On August 7, 2020, AP I and its subsidiaries signed a notional pooling facility agreement Number: SP.DK.155 / HK.06 / 2020 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri). The term of these facility is 1 year from the signing date of the agreement. For these facility the bank provides an effective charges of current account service and effective charges of interest which is calculated on the basis of the daily at ending balance. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balance of these facility are Rp10,000,000 and Rp9,989,052, respectively.

On March 4, 2021, PT Angkasa Pura Logistik (APL) obtained short-term loan facility from Bank Mandiri with maximum credit facility limit of Rp15,000,000. On March 17, 2021, APL has withdrawn this loan amounted to Rp15,000,000 with 12 months term and the interest rate of 1% above the counter deposit rate. All facilities are secured by time deposits amounting to Rp15,000,000 (Note 5). As of December 31, 2021 the outstanding balance of this facility amounting to Rp13,500,000.

d. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")

On December 18, 2020, APL obtained a short term loan facility from SMI with maximum credit facility limit of Rp25,000,000. Withdrawal of this loan facility has been made by APL on December 28, 2020 amounted to Rp15,000,000 with 12 months term, bearing interest at 9.00% per annum.

APL is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- Debt Service Coverage Ratio ("DSCR") minimum of 1 time
- Debt Equity Ratio ("DER") maximum of 3 times
- Current Ratio minimum of 1 times

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

APL telah melunasi fasilitas pinjaman ini
pada tanggal 3 Desember 2021.

**e. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten Tbk**

Pada tanggal 19 Agustus 2019, PT Angkasa Pura Properti (APP) memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan fasilitas maksimum sebesar Rp130.000.000 dengan suku bunga 9,25% per tahun. Fasilitas ini bersifat revolving dan dijamin dengan piutang usaha APP kepada AP I sebesar pinjaman yang diterima. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk modal kerja pekerjaan proyek konstruksi.

APP memperoleh perpanjangan fasilitas pinjaman sebesar Rp100.000.000. Atas fasilitas pinjaman tersebut, pada tanggal 16 Oktober 2020, APP melakukan penarikan fasilitas sebesar Rp8.700.000 yang akan jatuh tempo pada 19 Agustus 2021. APP telah melunasi pinjaman ini pada tanggal 21 Januari 2021.

PT Angkasa Pura II ("AP II")

a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 29 Mei 2020, AP II memperoleh *revolving loan facility* dari PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp750.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 6,50% - 8,00% pada tahun 2021 dan antara 8,00% - 8,50% pada tahun 2020.

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 27 Mei 2021, AP II dan BNI setuju memperpanjang jangka waktu pinjaman hingga tanggal 29 Mei 2022.

Per 31 Desember 2021 dan 2020 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp750.000.000 dan Rp362.978.395.

b. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan akad line fasilitas pembiayaan Musyarakah tanggal 3 Juni 2020, AP II memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Maybank")

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

APL has fully repaid this facility on
December 3, 2021.

**e. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten Tbk**

On August 19, 2019, PT Angkasa Pura Properti (APP) obtained loan facility from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk with maximum facility amounted to Rp130,000,000 and bear interest 9.25% per annum. This credit is a revolving facility and secured by trade receivables APP to AP I with the same amount of loans received. The loan facility is used as working capital for construction project.

APP obtained an extension of the loan facility amounting to Rp100,000,000. For these loan facility, APP has withdrawn the loan facility on October 16, 2020 amounting to Rp8,700,000 which will due on August 19, 2021. APP has fully paid the loan on January 21, 2021.

PT Angkasa Pura II ("AP II")

a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on a loan agreement dated May 29, 2020, AP II obtained a revolving loan facility from PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") with maximum credit facility limit of Rp750,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to to finance AP II's working capital. This loan bears interest at annual rates ranging from 6.50% - 8.00% in 2021 and ranging from 8.00% - 8.50% in 2020.

Based on a loan agreement dated May 29, 2021, AP II and BNI agreed to extend the loan period until May 29, 2022.

As of December 31, 2021 and 2020 the outstanding balance of this facility amounting to Rp750,000,000 and Rp362,978,395.

b. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Based on Musyarakah line financing facility agreement dated June 3, 2020, AP II obtained a financing facility from PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Maybank") with

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

dengan jumlah maksimum sebesar Rp500.000.000. Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 7,25% pada tahun 2021 dan 2020.

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 27 Mei 2021, AP II dan Maybank setuju memperpanjang jangka waktu pinjaman hingga tanggal 3 Juni 2022.

Per 31 Desember 2021 dan 2020 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp500.000.000 dan Rp163.576.140.

c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian tanggal 29 November 2021, AP II memperoleh Supplier Financing Facility dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") dengan jumlah limit fasilitas Rp400.000.000. Pembiayaan ini digunakan untuk membayar hutang pengeluaran modal kepada pemasok.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pembiayaan sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali yang diperhitungkan mulai periode Desember 2022.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2021, AP II telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam perjanjian utang banknya.

AP II diwajibkan untuk membayar *provision fee* atau *up-front fee* sebesar 0,25% dari jumlah fasilitas pinjaman yang tersedia yang dibayarkan diawal masa peminjaman.

Pada tanggal 15 September 2020, AP II melakukan pembayaran atas pinjaman jangka pendek ke BNI sebesar Rp32.000.000.

Per 31 Desember 2021 dan 2020 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp337.692.000 dan nihil.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

maximum financing facility limit of Rp500,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II's operation. This loan bears interest at annual rates ranging from 7.25% in 2021 and 2020.

Based on a loan agreement dated May 27, 2021, AP II and Maybank agreed to extend the loan period until June 3, 2022.

As of December 31, 2021 and 2020 the outstanding balance of this facility amounting to Rp500,000,000 and Rp163,576,140.

c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on agreement dated November 29, 2021, AP II obtained a Supplier Financing Facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") with total limit of Rp400,000,000. The financing was used to settle capital expenditure liabilities to the suppliers.

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of financing agreement as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time that started to be accounted on December 2022.*
- *Maximum Debt Equity Ratio (DER) of 2 times.*

As of December 31, 2021, AP II has complied with all covenant stated in its bank loan agreements.

AP II is required to pay a provision fee or an up-front fee of 0.25% from the total loan facility, paid at the beginning of loan period.

On September 15, 2020, AP II has made repayment on short-term loans to BNI amounting Rp32,000,000.

As of December 31, 2021 and 2020 the outstanding balance of this facility amounting to Rp337,692,000 and nil.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT Sarinah

• **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Sarinah mendapatkan kredit modal kerja dari Bank Mandiri dan perjanjian kredit telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. KP.CRO/041/PK-KMK/2010 addendum XI (sebelas) tanggal 28 Oktober 2021.

Fasilitas yang diperoleh PT Sarinah antara lain:

- Plafond pinjaman sebesar Rp20.000.000.
- Jangka waktu 1 tahun (28 Oktober 2021 – 27 Oktober 2022).
- Tingkat suku bunga 7,75%

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut (Catatan 18):

- Sebidang Tanah SHGB No.1.170 m² Terletak di Jl. Jend. Basuki Rahmat Nomor 2A Malang, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, Perusahaan memiliki kewajiban untuk mempertahankan:

- Menjaga rasio keuangan yaitu *current ratio* minimal 110%.
- *Debt to Equity Ratio* tidak melebihi 230%.

Per 31 Desember 2021 dan 2020 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp19.897.500.

PT Sarinah

• **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Sarinah obtained a working capital loan from Bank Mandiri and the credit agreement has been amended several times with the latest amendment based on a letter from Bank Mandiri No. KP.CRO/041/PK-KMK/2010 addendum XI (eleven) dated October 28, 2021.

The facilities obtained by PT Sarinah include:

- Loan ceiling of Rp20,000,000.
- 1 year period (28 October 2021 – 27 October 2022).
- Interest rate 7.75%

This facility is secured by the following collaterals (Note 18):

- Plot of Land SHGB No.1.170 sqm Located on Jl. Gen. Basuki Rahmat Number 2A Malang, Kiduldalem Village, Klojen District, Malang City, East Java.

In connection with the credit agreement, the Company has an obligation to maintain:

- Maintain financial ratios, which is *current ratio* at least 110%.
- *Debt to Equity Ratio* does not exceed 230%.

As of December 31, 2021 and 2020 the outstanding balance of this facility amounting to Rp19,897,500, respectively.

24. Beban Akrual

24. Accrued Expense

	2021 Rp	2020 Rp	
Pihak Berelasi	1,329,666	1,196,959	Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Umum	1,413,179,601	1,208,465,431	General
Pelayanan Bandara	459,710,044	411,916,894	Passenger Services
Penerimaan Negara Bukan Pajak	293,488,000	270,174,029	Non-Tax Revenue
Gaji dan Tunjangan	281,564,072	247,110,067	Salaries and Allowance
Sewa	142,100,586	123,098,751	Rent
Bunga	141,512,579	145,264,960	Interest
Persediaan	75,070,253	43,485,164	Inventories
Pajak	46,584,739	19,775,895	Taxes
Jasa Profesional	26,568,378	67,639,195	Professional Services
Utilitas	24,833,649	32,490,855	Utilities
Lain-lain	96,100,989	124,333,578	Others
Subtotal	3,000,712,890	2,693,754,819	Subtotal
Total	3,002,042,556	2,694,951,778	Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Beban akrual - pelayanan bandara terutama merupakan biaya konsesi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU). Pada tanggal 15 Desember 2015, AP I mengadakan Perjanjian dengan DJPU mengenai pemberian konsesi untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian No. HK.201/2/8/DRJU.kum 2015 dan SP.333/HK.06.03/2015/DU. Berdasarkan perjanjian tersebut, AP I dikenakan biaya konsesi.

Pada tanggal 15 Desember 2015, AP II mengadakan Perjanjian dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) mengenai pemberian konsesi untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian No. HK.202/2/6/DRJU.kum 2015 dan PJJ.04.04/00.02/12/2015/0025 (Perjanjian Konsesi) (Catatan 47). Berdasarkan perjanjian tersebut, AP II dikenakan biaya konsesi berupa PNBP yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan aeronautikanya. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, AP II telah mencatat beban akrual masing-masing sebesar Rp293.488.000 dan Rp270.174.000 sehubungan dengan peraturan tersebut.

Beban akrual umum terutama merupakan management fee atas kerjasama pengelolaan tenant dengan PT GVK Services Indonesia, beban penyediaan x-ray, jaringan telekomunikasi dan jasa tenaga kerja.

Beban akrual gaji dan tunjangan mencakup beban manfaat pegawai diantaranya beban bonus, beban cuti, beban kelebihan jam kerja, beban uang makan harian yang akan dibayarkan Grup kepada pegawai.

Beban akrual pelayanan bandara terutama merupakan akrual untuk pemeliharaan, kebersihan, keamanan, serta perbaikan dan perawatan aset tetap Grup.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Accrued expenses - airport services mainly represents of concession charge to the Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU). On December 15, 2015, AP I entered into Agreement with DJPU regarding the concession provided to AP I to conduct airport services as stated in agreement No. HK.201/2/8/DRJU.kum 2015 and SP.333/HK.06.03/2015/DU. Based on that agreement, AP I is charged with concession fees.

On December 15, 2015, AP II entered into an Agreement with the Directorate General of Civil Aviation (DJPU) regarding the concession provided to AP II to conduct airport services as stated in agreement No. HK.202/2/6/DRJU.kum 2015 and PJJ.04.04/00.02/12/2015/0025 (Concession Agreement) (Note 47). Based on that agreement, AP II is charged with concession fees in the form of PNBP which is calculated based on predetermined percentage of its aeronautical income. As of December 31, 2021 and 2020, AP II has recorded accrued expense totaling Rp293,488,000 and Rp270,174,000, respectively, related to the regulation.

General accrued expenses consist of management fee on collaborative tenants management with PT GVK Services Indonesia, x-ray providing expense, telecommunication network and outsourcing services.

Accrued expenses related to salaries and allowance consist of employee benefits expenses including bonus expenses, leave expenses, overtime expenses, daily meal allowances which will be paid by the Group to employees.

Accrued expenses related to aviation services represent the accrued for maintenance, sanitation, security, as well as repairment and preservation of the Group's fixed assets.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

25. Pendapatan Diterima di Muka

25. Unearned Revenues

	2021 Rp	2020 Rp	
Sewa Lahan dan Tanah	201,600,481	183,000,642	Space and Land Rental
Penjualan Impor Beras	113,777,000	21,386,000	Selling of Imported Rice
Pemasangan Reklame	9,151,000	11,521,369	Advertising Installation
Konsesi dan Tiket Bandara	7,098,000	12,398,813	Concession and Airport Pass
Lain-lain	30,314,856	24,198,589	Others
Total	361,941,337	252,505,413	Total

**26. Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya –
Jangka Panjang**

**26. Long-Term Bank and Other Financial
Institutions Loans**

	2021 Rp	2020 Rp	
Perusahaan			The Company
<u>Pihak Berelasi</u>			<u>Related Parties</u>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	270,115,000	--	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	--	131,540,007	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Sub Total	270,115,000	131,540,007	Subtotal
Entitas Anak			Subsidiaries
<u>Pihak Berelasi</u>			<u>Related Parties</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7,143,243,825	6,977,564,340	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	5,195,415,691	5,266,586,275	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,486,678,000	3,997,422,851	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRISyariah Tbk)	2,189,811,222	2,240,416,209	(formerly PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRISyariah Tbk)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,597,170,707	696,766,083	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,461,332,216	1,018,994,081	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1,297,941,000	1,309,265,110	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Indonesia Infrastruktur Finance Tbk	1,138,053,737	857,351,863	PT Indonesia Infrastruktur Finance Tbk
Subtotal	24,509,646,398	22,364,366,812	Subtotal
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third parties</u>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	4,104,730,000	4,207,894,028	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2,759,810,780	2,655,212,912	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DKI	1,700,000,000	1,416,780,515	PT Bank DKI
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	1,000,000,000	809,686,451	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1,250,000,000	--	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	670,891,000	161,937,290	PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	499,999,999	404,843,225	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	100,000,000	80,968,645	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	--	215,535,335	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Subtotal	12,085,431,779	9,952,858,401	Subtotal
Total	36,865,193,177	32,448,765,220	Total
Biaya Pinjaman yang Belum Diamortisasi	(64,315,110)	(57,093,831)	Unamortized cost of loans
Dikurangi : Bagian Jangka Pendek Utang Bank Jangka Panjang	(1,463,087,314)	(511,104,533)	Less: Current Portion Long-Term Bank Loans
Bagian Jangka Panjang	35,337,790,753	31,880,566,856	Long-Term Portion

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Perusahaan

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
("Bank BTN")**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 169 tanggal 29 Desember 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Bank BTN dalam rangka mendukung pelaksanaan pembentukan Holding BUMN Pariwisata dengan Plafond setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan *grace period* selama 3 (tiga) tahun, serta tingkat bunga LPS + 4,50% eq 8,00% per tahun.

Per 31 Desember 2021 dan 2020 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp270.115.000 dan nihil.

**PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
("PT PPA")**

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Siaga No. 127 dan Perjanjian Kredit Swadana tanggal 31 Desember 2020 dalam rangka pelunasan utang kepada PT PPA untuk mendukung pelaksanaan pembentukan Holding BUMN Pariwisata dengan Plafond setinggi-tingginya sebesar Rp305.115.000 dengan jaminan berupa *corporate guarantee* dan/atau aset milik anggota *holding* BUMN Pariwisata dan Pendukung.

Per 31 Desember 2021 dan 2020 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar nihil dan Rp131.540.007.

**PT Angkasa Pura I ("AP I")
Perjanjian Kredit Sindikasi**

Perjanjian Kredit Sindikasi 2016

Pada tanggal 18 Agustus 2016, AP I menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank dimana Mandiri sebagai agen sindikasi. Rincian utang jangka panjang atas perjanjian kredit sindikasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The Company

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
("Bank BTN")**

Based on the Credit Agreement No. 169 dated December 29, 2021, the Company obtained a credit facility from Bank BTN in order to support the implementation of the establishment of a Tourism SOEs Holding with a maximum ceiling of Rp. 500,000,000 with a term of 5 (five) years and a grace period of 3 (three) years, as well as a LPS interest + 4.50% eq 8.00% per annum.

As of December 31, 2021 and 2020 the outstanding balance of this facility amounting to Rp270,115,000 and nil.

**PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
("PT PPA")**

Based on the Standby Loan Facility Provision Agreement No. 127 and the Self-funding Credit Agreement dated December 31, 2020 in the context of paying off debt to PT PPA to support the implementation of the establishment of a Tourism SOEs Holding with a maximum ceiling of Rp305,115,000 with a guarantee in the form of a corporate guarantee and/or assets belonging to members of the Tourism and Supporting SOEs holding.

As of December 31, 2021 and 2020 the outstanding balance of this facility amounting to nil and Rp131,540,007.

**PT Angkasa Pura I ("AP I")
Syndicated Credit Agreement**

Syndicated Credit Agreement 2016

On August 18, 2016, AP I signed Syndicated Credit Agreement with a Bank and a Non-Bank Financial Institution which Mandiri as a syndicated agent. The details of longterm bank loans of syndicated credit agreement as of December 31, 2021, are as follows:

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1,350,000,000	1,349,663,885	336,115	1,282,180,691	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,000,000,000	999,751,026	248,974	949,763,475	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	800,000,000	799,800,821	199,179	759,810,780	PT Bank Central Asia Tbk
PT Indonesia Infrastruktur Finance Tbk	500,000,000	499,875,513	124,487	474,881,737	PT Indonesia Infrastruktur Finance Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	350,000,000	349,912,859	87,141	332,417,216	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total	4,000,000,000	3,999,004,104	995,896	3,799,053,899	Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Fasilitas pinjaman pokok akan dibayar dalam 40 kali angsuran triwulanan mulai tanggal 23 September 2021, sedangkan bunga dibayar secara bulanan.

Pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan dan atau pembiayaan kembali proyek pengembangan bandara dan/atau investasi.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,75% sampai dengan 6,75% pada tahun 2021 dan 7,25% sampai dengan 8,50% pada tahun 2020 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

AP I tidak dapat memenuhi persyaratan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum 1 kali pada tanggal dan 31 Desember 2020. Namun demikian kondisi ini tidak merupakan peristiwa cidera janji yang berkelanjutan yang menyebabkan pinjaman menjadi segera jatuh tempo. Disamping itu, Pada tanggal 28 Desember 2020, AP I telah menerima surat persetujuan pengampunan dari agen sindikasi atas tidak terpenuhinya DSCR minimum 1 kali.

Perjanjian Kredit Sindikasi BCA dan Mandiri 2019

Pada tanggal 23 Desember 2019, AP I menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dimana PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") sebagai agen fasilitas. Rincian utang jangka panjang atas perjanjian kredit sindikasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,000,000,000	2,000,000,000	--	2,000,000,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2,000,000,000	2,000,000,000	--	2,000,000,000	PT Bank Central Asia Tbk
Total	4,000,000,000	4,000,000,000	--	4,000,000,000	Total

Fasilitas pinjaman pokok akan dibayar dalam 40 kali angsuran triwulanan mulai tanggal 23 Maret 2025, sedangkan bunga dibayar secara bulanan.

Pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan investasi dan belanja modal.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan LPS + margin dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu perjanjian kredit sindikasi adalah 15 tahun dihitung sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2034 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 5 tahun.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The principal facility is payable in 40 installments starting on September 23, 2021, while the interest is paid monthly.

Credit facilities is used for financing and/or refinancing airport and/or investment development projects.

This loan bears annual interest ranging from 5.75% to 6.75% in 2021 and ranging from 7.25% to 8.50% in 2020 and represent unsecured loans.

AP I can not meet the *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) requirement minimum of 1 time as of and December 31, 2020. However, this condition does not constitute an event of continuing breach of covenant which causes the loan to become due immediately. In addition, on December 28, 2020, AP I has received waiver approval letter from the syndicated agent for not fulfilling the DSCR of minimum 1 time.

BCA and Mandiri Syndicated Credit Agreement 2019

On December 23, 2019, AP I signed Syndicated Credit Agreement which PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") as an facility agent. The details of long-term bankloans of syndicated credit agreement as of December 31, 2021, are as follows:

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,000,000,000	2,000,000,000	--	2,000,000,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2,000,000,000	2,000,000,000	--	2,000,000,000	PT Bank Central Asia Tbk
Total	4,000,000,000	4,000,000,000	--	4,000,000,000	Total

Loan facility is payable in 40 quarterly installments starting on March 23, 2025, while interest will be paid on monthly basis.

Credit facilities is used for investment financing and capital expenditure.

This loan bears annual interest LPS + margin and represent unsecured loan.

The Syndicated Loan Agreement is valid for 15 years from December 23, 2019 until December 23, 2034 including grace period of 5 years.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum sebesar 1 kali
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali untuk periode 2024 dan setelahnya.

AP I tidak dapat memenuhi persyaratan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimal 1 kali pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Namun demikian pada tanggal 20 Desember 2021 dan 22 Desember 2020, AP I telah menerima surat persetujuan pengampunan dari agen sindikasi atas tidak terpenuhinya DSCR minimum 1 kali.

**Perjanjian Kredit Sindikasi Bank
Pembangunan Daerah**

Pada tanggal 23 Desember 2019, AP I menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi Bank Pembangunan Daerah dimana Bank DKI sebagai agen sindikasi. Rincian utang jangka panjang atas perjanjian kredit sindikasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	1,000,000,000	1,000,000,000	--	1,000,000,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank DKI	700,000,000	700,000,000	--	700,000,000	PT Bank DKI
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	500,000,000	500,000,000	--	500,000,000	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	200,000,000	200,000,000	--	200,000,000	PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	100,000,000	100,000,000	--	100,000,000	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Total	2,500,000,000	2,500,000,000	--	2,500,000,000	Total

Fasilitas pinjaman pokok akan dibayar dalam 40 kali angsuran triwulanan mulai tanggal 23 Maret 2025, sedangkan bunga dibayar secara bulanan.

Pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan investasi rutin, pengembangan bandara *existing* maupun bandara baru yang dikelola AP I tahun 2019 - 2022.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar LPS + margin dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu perjanjian kredit sindikasi adalah 15 tahun terhitung sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2034 dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit selama 5 tahun sejak ditandatangani perjanjian kredit.

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum of 1 time
- *Debt Equity Ratio (DER)* maximum of 3 times
- *Current Ratio* minimum of 1 time since 2024 and after.

AP I can not meet the *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* requirement minimum of 1 time as of December 31, 2021, and December 31, 2020. However, on December 20, 2021, and December 22, 2020, AP I has received waiver approval letter from the syndicated agent for not fulfilling the DSCR of minimum of 1 time.

**Regional Development Banks Syndicated
Credit Agreement**

On December 23, 2019, AP I signed Regional Development Banks Syndicated Credit Agreement which Bank DKI as a syndicated agent. The details of long-term bank loans of syndicated credit agreement as of December 31, 2021, are as follows:

Loan facility is payable in 40 quarterly installments starting on March 23, 2025, while interest will be paid on monthly basis.

Credit facilities is used for routine investment financing, development of existing and new airport managed by AP I in 2019 - 2022.

This loan bears interest at annual rate of LPS + margin and represent unsecured loans.

The Syndicated Loan Agreement is valid for 15 years from December 23, 2019 until December 23, 2034 with grace period and drawdown period of 5 years, respectively from the signing date of loan agreement.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 1 kali.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali.

AP I tidak dapat memenuhi persyaratan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum 1 kali pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Namun demikian pada tanggal 10 Desember 2021 dan 22 Desember 2020, AP I telah menerima surat persetujuan pengampunan dari agen sindikasi atas tidak terpenuhinya DSCR minimum 1 kali.

Pada tanggal 25 Februari 2021, 29 April 2021 dan 21 Mei 2021, AP I telah melakukan penarikan atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp85.373.366, Rp119.036.549 dan Rp150.000.000.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”)

Pada tanggal 18 Desember 2018, AP I memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp2.000.000.000.

	<u>Plafond/ Plafonds Rp</u>	<u>Penarikan/ Drawdown Rp</u>	<u>Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp</u>	<u>Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp</u>	
SMI	2,000,000,000	2,000,000,000	--	2,000,000,000	SMI

Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengembangan dan investasi rutin bandar udara yang dikelola oleh AP I.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% sampai dengan 6,50% pada tahun 2021 dan 7,00%% sampai dengan 8,25%% pada tahun 2020 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu kredit adalah 10 tahun sejak tanggal perjanjian kredit dengan opsi perpanjangan selama 5 tahun dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 5 tahun dan 3 tahun sejak ditandatangani perjanjian kredit.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP I is also required to maintain cer-tain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum of 1 time.
- *Debt Equity Ratio* (DER) maximum of 3 times.

AP I can not meet the *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) requirement minimum of 1 time as of December 31, 2021 and December 31, 2020. However, on December 10, 2021, and December 22, 2020, AP I has received waiver approval letter from the syndicated agent for not fulfilling the DSCR of minimum 1 time.

On February 25, 2021, April 29, 2021 and May 21, 2021, AP I has withdrawn the facility amounting to Rp85,373,366, Rp119,036,549 and Rp150,000,000, respectively

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”)

On December 18, 2018, AP I obtained a term loan facility from SMI with maximum credit facility limit of Rp2,000,000,000.

The proceeds of the loan from this facility were used to finance development and routine investment of airports which are managed by AP I.

This loan bears annual interest ranging from 5.50% to 6.50% in 2021 and ranging from 7.00% to 8.25% in 2020 and represent unsecured loans.

The loan period is 10 years started on the date of agreement with option to extend for 5 years with grace period and drawdown period of 5 years and 3 years, respectively from the signing date of loan agreement.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 1 kali
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali.

AP I tidak dapat memenuhi persyaratan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dan *Current Ratio* (CR) minimum 1 kali pada tanggal 31 Desember 2021 dan DSCR minimum 1 kali pada tanggal 31 Desember 2020. Namun demikian, pada tanggal 9 September 2020, AP I telah menerima surat persetujuan pengampunan dari SMI untuk tahun 2021 dan 2020 atas tidak terpenuhinya DSCR dan CR minimum 1 kali.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”)

Pada tanggal 18 Desember 2018, AP I memperoleh fasilitas pinjaman dari BTN jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp2.000.000.000.

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
BTN	2,000,000,000	2,000,000,000	--	2,000,000,000	BTN

Pada tanggal 18 Desember 2018, AP I memperoleh fasilitas pinjaman dari BTN jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp2.000.000.000. Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai aktivitas usaha, pengembangan bandara dan investasi rutin AP I. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% sampai dengan 6,50% pada tahun 2021 dan 7% sampai dengan 8,25% pada tahun 2020 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu perjanjian kredit adalah 15 tahun terhitung sejak 18 Desember 2018 sampai 17 Desember 2033 dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 5 tahun dan 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum of 1 time
- *Debt Equity Ratio* (DER) maximum of 3 times
- *Current Ratio* minimum of 1 times

AP I can not meet the *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) and *Current Ratio* (CR) requirement minimum 1 time as of December 31, 2021 and DSCR requirement minimum 1 time as of December 31, 2020. However, on September 9, 2020, AP I has received waiver approval letter from SMI for the year 2021 and 2020 for not fulfilling the DSCR and CR of minimum 1 time

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”)

Based on a loan agreement dated December 18, 2018, AP I obtained a term loan facility from BTN with maximum credit facility limit of Rp2,000,000,000.

On December 18, 2018, AP I obtained a term loan facility from BTN with maximum credit facility limit of Rp2,000,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP I's business operation, airport development and routine investment. This loan bears annual interest ranging from 5.50% to 6.50% in 2021 and 7% to 8.25% in 2020 and represent unsecured loan.

The loan credit agreement is valid for 15 years from December 18, 2018 until December 17, 2033 with *grace period* and *drawdown period* of 5 years and 3 years, respectively from the signing date of loan agreement.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 1 kali
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali

Berdasarkan perjanjian, jika AP I tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka pemberi pinjaman dapat sewaktu-waktu meminta pembayaran penuh atas seluruh saldo pinjaman.

AP I tidak dapat memenuhi persyaratan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dan *Current Ratio* (CR) minimum 1 kali pada tanggal 31 Desember 2021 dan DSCR minimum 1 kali pada tanggal 31 Desember 2020. Namun demikian, pada tanggal 24 November 2020, AP I telah menerima surat persetujuan pengampunan dari BTN untuk tahun 2021 dan 2020 atas tidak terpenuhinya DSCR dan CR minimum 1 kali

Pada tanggal 26 Juli 2019, AP I memperoleh fasilitas pinjaman dari BTN dengan maksimum fasilitas sebesar Rp1.000.000.000.

	<u>Plafond/ Plafonds Rp</u>	<u>Penarikan/ Drawdown Rp</u>	<u>Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp</u>	<u>Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp</u>	
BTN	1,000,000,000	1,000,000,000	--	1,000,000,000	BTN

Fasilitas pinjaman pokok akan dibayar dalam 40 kali angsuran triwulanan mulai tanggal 7 September 2024, sedangkan bunga dibayar secara bulanan.

Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai aktivitas usaha, pengembangan bandara, refinancing dan investasi rutin AP I. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% sampai dengan 6,50% pada tahun 2021 dan 7,00% sampai dengan 8,25% pada tahun 2020 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan. Pada tanggal 15 Oktober 2020, AP I telah menerima surat persetujuan untuk pembayaran kewajiban bunga secara triwulanan pada bulan September 2020 sampai dengan Maret 2021

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum of 1 time
- *Debt Equity Ratio* (DER) maximum of 3 times
- *Current Ratio* minimum of 1 time

Based on credit agreement, if AP I cannot fulfill such covenants, lender may request AP I to repay all outstanding loan balances at any times.

AP I can not meet the *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) and *Current Ratio* (CR) requirement minimum of 1 time as of December 31, 2021 and DSCR minimum of 1 time as of December 31, 2020. However, on November 24, 2020, AP I has received waiver approval letter from BTN for the year 2021 and 2020 for not fulfilling the DSCR of minimum 1 time.

On July 26, 2019, AP I obtained a term loan facility from BTN with maximum credit facility limit of Rp1,000,000,000

Loan facility is payable in 40 quarterly installments starting on September 7, 2024, while interest will be paid on monthly basis.

The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP I's business operation, airport development, refinancing and routine investment. This loan bears annual interest ranging from 5.50% to 6.50% in 2021 and ranging from 7.00% to 8.25% in 2020 and represent unsecured loan. On October 15, 2020, AP I received approval letter for payment of interest on quarterly basis for period from September 2020 until March 2021.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jangka waktu perjanjian kredit adalah 15 tahun terhitung sejak 26 Juli 2019 sampai 26 Juli 2034 dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 5 tahun dan 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit.

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 1 kali
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali (jumlah kewajiban jangka pendek tidak termasuk akrual kewajiban kepada kontraktor yang belum diterbitkan tagihannya)

AP I tidak dapat memenuhi persyaratan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum 1 kali pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Namun demikian, pada tanggal 24 November 2020, AP I telah menerima surat persetujuan pengampunan dari BTN untuk tahun 2021 dan 2020 atas tidak terpenuhinya DSCR minimum 1 kali.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”)

Pada tanggal 18 Desember 2018, AP I memperoleh fasilitas plafon pembiayaan dari BSI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.000.

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
BSI	1,000,000,000	1,000,000,000	--	1,000,000,000	BSI

Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai investasi rutin, pengembangan dan pembangunan bandar udara baru serta bandara lainnya sesuai Rencana Kerja dan Anggaran AP I (RKAP) yang dikelola oleh AP I.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% sampai dengan 6,50% pada tahun 2021 dan 7,00% sampai dengan 8,25% pada tahun 2020 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The loan credit agreement is valid for 15 years from July 26, 2019 until July 26, 2034 with *grace period* and *drawdown period* of 5 years and 3 years, respectively from the signing date of loan agreement.

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum of 1 time
- *Debt Equity Ratio* (DER) maximum of 3 times
- *Current Ratio* minimum of 1 time (total current liabilities are not include accrual liabilities to contractors which not invoiced yet).

AP I can not meet the *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) requirement minimum of 1 time as of December 31, 2021 and December 31, 2020. However, on November 24, 2020, AP I has received waiver approval letter from BTN for the year 2021 and 2020 for not fulfilling the DSCR of minimum 1 time.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”)

On December 18, 2018, AP I obtained a term *plafond loan facility* from BSI with Maximum credit facility limit of Rp1,000,000,000.

The proceeds of the loan from this facility were used to finance routine investment, development and construction of new airports and other airport according to Work Plan and Company Budget (RKAP) which is managed by AP I.

This loan bears annual interest ranging from 5.50% to 6.50% in 2021 and ranging from 7.00% to 8.25% in 2020 and represent unsecured loan.

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 1 kali
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali.

AP I tidak dapat memenuhi persyaratan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dan *Current Ratio* (CR) minimum 1 kali pada tanggal 31 Desember 2021 dan DSCR minimum 1 kali pada tanggal 31 Desember 2020. Namun demikian, pada tanggal 14 Agustus 2020, AP I telah menerima surat persetujuan pengampunan dari BSI untuk tahun 2021 dan 2020 atas tidak terpenuhinya DSCR dan CR minimum 1 kali.

Pada tanggal 2 September 2019, AP I memperoleh fasilitas pembiayaan Musyarakah dari BSI dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp1.000.000.000.

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp
BSI	1,000,000,000	1,000,000,000	--	1,000,000,000

Fasilitas pembiayaan pokok akan dibayar dalam 40 kali angsuran triwulanan mulai dari tanggal 23 September 2024, sedangkan bagi hasil dibayar secara bulanan.

Hasil penerimaan dari fasilitas ini digunakan untuk membiayai belanja modal atas dasar Rencana Kerja dan Anggaran AP I (RKAP) tahun 2021 dan 2020. Fasilitas ini merupakan fasilitas tanpa jaminan.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% sampai dengan 6,50% pada tahun 2021 dan 6,50% sampai dengan 8,25% pada tahun 2020 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu perjanjian kredit adalah 15 tahun terhitung sejak 26 September 2019 sampai 23 Juni 2034 dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 5 tahun dan 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit.

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian fasilitas pembiayaan sebagai berikut:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum of 1 time
- *Debt Equity Ratio* (DER) maximum of 3 times
- *Current Ratio* minimum of 1 time.

AP I can not meet the *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) and *Current Ratio* (CR) requirement minimum of 1 time as of December 31, 2021 and DSCR minimum of 1 time as of December 31, 2020. However, on August 14, 2020, AP I has received waiver approval letter from BRIS for the year 2021 and 2020 for not fulfilling the DSCR and CR of minimum 1 time.

On September 2, 2019, AP I obtained a Musyarakah financing facility from BSI with maximum limit facility of Rp1,000,000,000.

Financing facility is payable in 40 quarterly installments starting on September 23, 2024, while profit sharings will be paid on monthly basis.

The proceeds of the this facility were used for capital expenditure in 2021 and 2020 Work Plan and Company Budget (RKAP). This facility represents unsecured facility.

This loan bears annual interest ranging from 5.50% to 6.50% in 2021 and 6.50% to 8.25% in 2020 and represent unsecured loan.

The loan credit agreement is valid for 15 years from September 26, 2019 until June 23, 2034 with grace period and drawdown period of 5 years and 3 years, respectively from the signing date of loan agreement.

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the period of financing facility agreement as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum sebesar 1 kali
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali untuk periode 2024 dan setelahnya.

AP I tidak dapat memenuhi persyaratan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum 1 kali pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Namun demikian, pada tanggal 14 Desember 2020, AP I telah menerima surat persetujuan pengampunan dari BSI untuk tahun 2021 dan 2020 atas tidak terpenuhinya DSCR minimum 1 kali.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Pada tanggal 26 September 2019, AP I memperoleh fasilitas pinjaman dari Mandiri dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp3.000.000.000.

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
Mandiri	3,000,000,000	3,000,000,000	--	3,000,000,000	Mandiri

Fasilitas pinjaman pokok akan dibayar dalam 40 kali angsuran triwulanan mulai tanggal 23 Desember 2024, sedangkan bunga dibayar secara bulanan.

Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai belanja modal atas dasar Rencana Kerja dan Anggaran AP I (RKAP) tahun 2019 dan 2020. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% sampai dengan 6,50% pada tahun 2021 dan 7,00% sampai dengan 8,25% pada tahun 2020 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu perjanjian kredit adalah 15 tahun terhitung sejak 26 September 2019 sampai 25 September 2034 dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 5 tahun dan 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit.

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum of 1 time
- *Debt Equity Ratio (DER)* maximum of 3 times
- *Current Ratio* minimum of 1 time for period 2024 and after.

AP I can not meet the *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* requirement minimum 1 time as of December 31, 2021 and December 31, 2020. However, on December 14, 2020, AP I has received waiver approval letter from BSI for the year 2021 and 2020 for not fulfilling the DSCR of minimum 1 time.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Based on a loan agreement dated September 26, 2019, AP I obtained a term loan facility from Mandiri with maximum credit facility limit of Rp3,000,000,000.

Loan facility is payable in 40 quarterly installments starting on December 23, 2024, while interest will be paid on monthly basis.

The proceeds of the loan from this facility were used to capital expenditure to 2019 and 2020 Work Plan and Company Budget (RKAP). This loan bears annual interest ranging from 5.50% to 6.50% in 2021 and ranging from 7.00% to 8.25% in 2020 and represent unsecured loan.

The loan credit agreement is valid for 15 years from September 26, 2019 until September 25, 2034 with *grace period* and drawdown period of 5 years and 3 years, respectively from the signing date of loan agreement.

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum sebesar 1 kali
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali untuk periode 2024 dan setelahnya

AP I tidak dapat memenuhi persyaratan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum 1 kali pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Namun demikian, pada tanggal 15 Desember 2020, AP I telah menerima surat persetujuan pengampunan dari Mandiri untuk tahun 2021 dan 2020 atas tidak terpenuhinya DSCR minimum 1 kali.

Pada tanggal 3 Desember 2021, AP I memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp1.000.000.000.

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
Mandiri	1,000,000,000	1,000,000,000	--	1,000,000,000	Mandiri

Hasil penerimaan dari fasilitas ini digunakan untuk modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional sesuai RKAP 2021-2022. Fasilitas ini merupakan fasilitas tanpa jaminan.

PT Bank DKI

Pada tanggal 18 Desember 2020, AP I memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank DKI dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp1.000.000.000

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
Bank DKI	1,000,000,000	1,000,000,000	--	1,000,000,000	Bank DKI

Fasilitas pembiayaan pokok akan dibayar dalam 4 kali angsuran triwulanan mulai dari tanggal 23 Maret 2023, sedangkan bunga dibayar secara bulanan.

Hasil penerimaan dari fasilitas ini digunakan untuk tambahan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional AP I yang terdampak Pandemi Covid-19. Fasilitas ini merupakan fasilitas tanpa jaminan.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum of 1 time
- Debt Equity Ratio (DER) maximum of 3 times
- Current Ratio minimum of 1 time for period 2024 and after.

AP I can not meet the Debt Service Coverage Ratio (DSCR) requirement minimum of 1 time as of December 31, 2021, and December 31, 2020. However on December 15, 2020, AP I has received waiver approval letter from Mandiri for the year 2021 and 2020 for not fulfilling the DSCR of minimum 1 time.

On December 3, 2021, AP I obtained a financing facility from Bank Mandiri with maximum limit facility of Rp1,000,000,000.

The proceeds of the this facility were used for working capital to support operational activities according to Work Plan and Company Budget (RKAP) 2021-2022. This facility represents unsecured facility.

PT Bank DKI

On December 18, 2020, AP I obtained a financing working capital facility from Bank DKI with maximum limit facility of Rp1,000,000,000.

Financing facility is payable in 40 quarterly installments starting on March 23, 2023, while interest will be paid on monthly basis.

The proceeds of the this facility were used for additional working capital to support the operational activities of companies affected by the Covid-19 Pandemic. This facility represents unsecured facility.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 6,5% per tahun yang dapat direviu setiap saat dengan ketentuan yang berlaku di Bank DKI dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu perjanjian kredit adalah 36 bulan terhitung sejak 18 Desember 2020 sampai 17 Desember 2023 dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit.

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu dari tahun 2022 sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 1 kali mulai berlaku pada tahun 2022
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali mulai berlaku pada tahun 2022

Pada tanggal 29 April 2021, AP I telah melakukan penarikan atas pinjaman ini sebesar Rp150.000.000.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 28 Desember 2020, AP I memperoleh fasilitas kredit angsuran berjangka dari Bank Danamon dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp500.000.000 dan Rp750.000.000.

	Plafond/ <i>Plafonds</i> Rp	Penarikan/ <i>Drawdown</i> Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ <i>Remaining Amount of Loan Facilities</i> Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ <i>Amount of Drawdown</i> Rp	
Danamon - KAB 1	500,000,000	500,000,000	--	500,000,000	Danamon - KAB 1
Danamon - KAB 2	750,000,000	750,000,000	--	750,000,000	Danamon - KAB 2
Total	1,250,000,000	1,250,000,000	--	1,250,000,000	Total

Pinjaman ini dikenakan suku bunga mengambang atau tetap yang disepakati.

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 1 kali mulai tahun 2022.
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali mulai tahun 2024.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

This loan bears annual interest is 6.5% per annum which can be reviewed at any time with the provisions applicable in Bank DKI and represent unsecured loan.

The loan credit agreement is valid for 36 months from December 18, 2020 until December 17, 2023 with grace period and drawdown period of 2 years and 6 months, respectively from the signing date of loan agreement.

AP I is also required to maintain certain financial ratios started from year 2022 as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum of 1 time start from 2022
- *Debt Equity Ratio* (DER) maximum of 3 times start from 2022

On April 29, 2021, AP I has withdrawn this loan amounting to Rp150,000,000.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

On December 28, 2020, AP I obtained a financing term installment credit facility from Bank Danamon with maximum limit facility of Rp500,000,000 and Rp750,000,000.

This loan bears an agreed floating rate or fixed rate.

AP I is also required to maintain certain financial ratios as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum of 1 time starting 2022.
- *Current Ratio* minimum of 1 time starting 2024.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Selama tahun 2021, AP I telah melakukan penarikan atas fasilitas Danamon - KAB 1 dan KAB 2 masing-masing sebesar Rp500.000.000 dan Rp750.000.000.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
("BNI")**

Pada tanggal 21 Juli 2021, AP I memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank BNI dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp1.500.000.000

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
BNI	1,500,000,000	886,585,000	613,415,000	886,585,000	BNI

Fasilitas pembiayaan pokok akan dibayar dalam angsuran triwulanan mulai dari 21 Oktober 2023, sedangkan bunga dibayarkan secara triwulanan.

Hasil penerimaan dari fasilitas ini digunakan untuk investasi sesuai dengan RKAP 2021. Fasilitas ini merupakan fasilitas tanpa jaminan.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar LPS + margin dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu sebagai berikut:

- *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal sebesar 3 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 1 kali mulai tahun 2022.

Selama tahun 2021, AP I telah melakukan penarikan atas fasilitas sebesar Rp886.585.000.

PT Angkasa Pura Suport ("APS")

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 11 Desember 2014, APS memperoleh fasilitas *Credit Term Loan* dengan pinjaman maksimum sebesar Rp100.000.000 yang digunakan sebagai pembiayaan kontrak penyewaan peralatan. Plafon fasilitas pinjaman ini mengalami kenaikan menjadi Rp185.000.000 pada tanggal 23 Oktober 2018 sesuai dengan surat persetujuan dari BNI No. BIN/2.1/263/R. Penarikan fasilitas pinjaman ini telah dilakukan beberapa kali oleh APS, antara lain sebagai berikut:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

In 2021, AP I has withdrawn the Danamon - KAB 1 and KAB 2 facility amounting to Rp500,000,000 and Rp750,000,000, respectively.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
("BNI")**

On July 21, 2021, AP I obtained a financing facility from Bank BNI with maximum limit facility of Rp1,500,000,000.

Financing facility will be paid in quarterly installments starting on October 21, 2023, while interest will be paid on quarterly basis.

The proceeds of the this facility were used for investments according to Work Plan and Company Budget (RKAP). This facility represents unsecured facility.

This loan bears interest at annual rate of LPS + margin and represent unsecured loans.

AP I is also required to maintain certain financial ratios as follows:

- *Debt to Equity Ratio* (DER) maximum of 3 time.
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) maximum of 1 time starting 2022.

In 2021, AP I has withdrawn the facility amounting to Rp886.585.000.

PT Angkasa Pura Suport ("APS")

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

On December 11, 2014, APS obtained Credit Term Loan's facility with maximum of Rp100,000,000 which used to financing rental equipments projects. The ceiling of the loan facility has increased to Rp185,000,000 on October 23, 2018 in accordance with the approval letter from BNI No.BIN/2.1/263/R. Withdrawal of this loan facility has been made several times by APS, which are as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Pada tanggal 26 Oktober 2016, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp40.785.000. Pinjaman bersifat aflopend dan dijamin dengan beberapa aset peralatan yang dimiliki oleh APS (Catatan 18). Jangka waktu pinjaman ini adalah 58 bulan. Pinjaman jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan suku bunga berkisar 9,75%-10,50% per tahun. APS telah melunasi pinjaman ini pada tanggal 25 Agustus 2021.
- Pada tanggal 4 Juni 2018, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp9.600.000 dengan suku bunga 9,75% per tahun. Pinjaman bersifat aflopend dan dijamin dengan beberapa aset peralatan yang dimiliki oleh APS. Jangka waktu pinjaman ini adalah 54 bulan. Pinjaman jatuh akan tempo pada tanggal 16 November 2022. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp1.955.555 dan Rp4.088.888.
- Pada tanggal 4 Juni 2018, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp5.134.000 dengan suku bunga 9,75% per tahun. Pinjaman bersifat aflopend dan dijamin dengan beberapa aset kendaraan yang dimiliki oleh APS. Jangka waktu pinjaman ini adalah 30 bulan. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2022. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp1.881.800 dan telah dilunasi seluruhnya pada 16 November 2020.
- Pada tanggal 4 Juni 2018, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp13.000.000 dengan suku bunga 9,75% per tahun. Pinjaman bersifat *aflopend* dan dijamin dengan beberapa aset kendaraan yang dimiliki oleh APS (Catatan 18). Jangka waktu pinjaman ini adalah 34 bulan. APS telah melunasi pinjaman pada tanggal 16 Maret 2021.
- Pada tanggal 18 Desember 2018, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp29.431.000 dengan suku bunga 9,75% per tahun. Pinjaman bersifat aflopend dan dijamin dengan beberapa peralatan yang dimiliki oleh APS (Catatan 18). Jangka waktu pinjaman ini adalah 57 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2023. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp8.838.752 dan Rp15.355.852
- On October 26, 2016, APS obtained loan from BNI with amount of Rp40,785,000. This loan is an aflopend and secured by some equipments assets owned by APS (Note 18). The term of this loan is 58 months. This loan will be due on August 16, 2021 and bear interest at rates ranging 9.75%-10.50% per annum. APS have repaid the outstanding loan on August 25, 2021.
- On June 4, 2018, APS obtained loan from BNI with amount of Rp9,600,000 with bear interest 9.75% per annum. This loan is an aflopend and secured by some equipments assets owned by APS. The term of this loan is 54 months. This loan will be due on November 16, 2022. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp1,955,555 and Rp4,088,888, respectively.
- On June 4, 2018, APS obtained loan from BNI with amount of Rp5,134,000 with bear interest 9.75% per annum. This loan is an aflopend and secured by some vehicles assets owned by APS. The term of this loan is 30 months. This loan will be due on November 16, 2022. As of December 31, 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp1,881,800 and has fully repaid on November 16, 2020.
- On June 4, 2018, APS obtained loan from BNI with amount of Rp13,000,000 with bear interest 9.75% per annum. This loan is an aflopend and secured by some vehicles assets owned by APS (Note 18). The term of this loan is 34 months. APS has fully repaid on March 16, 2021.
- On December 18, 2018, APS obtained loan from BNI with amount of Rp29,431,000 with bear interest 9.75% per annum. This loan is an aflopend and secured by some equipments assets owned by APS (Note 18). The term of this loan is 57 months and will be due on August 31, 2023. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp8,838,752 and Rp15,355,852, respectively.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Pada tanggal 5 Maret 2021, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp35.800.000 dengan suku bunga 10% per tahun. Pinjaman bersifat aflopend dan dijamin dengan beberapa peralatan yang dimiliki oleh APS (Catatan 18). Jangka waktu pinjaman ini adalah 65 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2023. Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar Rp14.989.966.
- Pada tanggal 6 Mei 2021, APS memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp2.499.000 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2022. Saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.249.500.

APS diwajibkan oleh BNI untuk menjaga rasio keuangan yaitu rasio lancar minimum sebesar 1 kali, *debt service coverage* minimum sebesar 1 kali, *debt to equity ratio* (DER) maksimal 2,50 kali.

Pada tanggal 30 Desember 2021 dan 2020, APS telah menerima surat pembebasan (*waiver letter*) dari BNI atas tidak terpenuhinya rasio keuangan tertentu pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”)

APS memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan Murabahah dari BSI sebagai berikut:

- Pada 7 November 2014, APS memperoleh fasilitas pembiayaan dengan skema Murabahah sebesar Rp3.575.200 dengan margin sebesar 13% efektif *single price* per tahun dengan jangka waktu 10 tahun. Agunan atas pinjaman ini adalah 1 unit ruko di Denpasar (Catatan 18). Fasilitas pembiayaan akan jatuh akan tempo pada tanggal 20 November 2024. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.548.089 dan Rp1.957.983.
- Pada tanggal 28 Oktober 2015, APS memperoleh pembiayaan Murabahah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.650.000 dengan margin 12% efektif per tahun dengan jangka waktu 10 tahun. Agunan atas pinjaman ini adalah 2 unit ruko yang terdapat di Denpasar dan Makassar (Catatan 18). Fasilitas pembiayaan akan jatuh akan tempo pada tanggal 16 dan 20 November 2025. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.956.097 dan Rp2.325.330.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- On March 5, 2021, APS obtained loan from BNI with amount of Rp35,800,000 with bear interest 10% per annum. This loan is an aflopend and secured by some equipments assets owned by APS (Note 18). The term of this loan is 65 months and will be due on April 30, 2023. As of December 31, 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp14,989,966.
- On May 6, 2021, APS obtained financing working capital facility amounting Rp2,499,000 with due date on August 31, 2022. As of December 31, 2021 the ending balance is Rp1,249,500.

APS is required by BNI to maintain the financial ratios, current ratio minimum of 1 time, debt service coverage at least 1 time, debt to equity ratio (DER) maximum of 2.50 times.

On December 30, 2021 and 2020, AP I has received waiver letter from BNI for incompliance of certain financial ratio as of December 31, 2021 and 2020.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”)

APS obtained several Murabahah financing facilities from BSI as follows:

- On November 7, 2014, APS obtained financing facility of the Murabahah scheme amounted to Rp3,575,200 with margin at 13% effective single price per annum and a period of 10 years. Loan's collateral is 1 unit shop house in Denpasar (Note 18). Financing facility will be due on November 20, 2024. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp1,548,089 and Rp1,957,983, respectively.
- On October 28, 2015, APS obtained financing facility of the Murabahah scheme totaling of Rp3,650,000 with margin 12% effective per annum and 10 year term. Loan's collateral of this loan are 2 unit shop houses in Denpasar and Makassar (Note 18). Financing facility will be due on November 16 and 20, 2025. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp1,956,097 and Rp2,325,330, respectively.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Pada tanggal 22 Agustus 2016 dari BSI, APS memperoleh pembiayaan Murabahah sebesar Rp1.800.000 dengan margin sebesar 11,50% per tahun dengan jangka waktu 10 tahun. Agunan atas pinjaman ini adalah 1 unit ruko milik APS yang terdapat di Balikpapan (Catatan 18). Fasilitas pembiayaan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2026. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.092.768 dan Rp1.260.176.
 - Pada tanggal 7 Agustus 2017, APS memperoleh fasilitas pembiayaan Murabahah sebesar Rp573.600 dengan margin sebesar 11,50% per tahun dengan jangka waktu 10 tahun. Agunan atas pinjaman ini berupa sebidang tanah yang dimiliki APS di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Catatan 18). Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp491.587 dan telah dilunasi seluruhnya pada 15 Mei 2020.
 - Pada tanggal 31 Mei 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp112.512.000 dengan nisbah bagi hasil 11,14% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp69.805.032 dan Rp94.072.404
- On August 22, 2016, APS obtained Murabahah financing amounting to Rp1,800,000 with bear margin of 11.50% per annum and a period of 10 years. Loan's collateral of this loan are 1 unit shop house owned by APS in Balikpapan (Note 18). Financing facility will be due on August 20, 2026. As of December 31 2021 and 2020, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp1,092,768 and Rp1,260,176, respectively.
 - On August 7, 2017, APS obtained Murabahah financing facility amounting to Rp573,600 with margin at 11.50% per annum and a period of 10 years. Loan's collateral of this loan are land owned by APS in Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Note 18). As of December 31, 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp491,587 and has fully repaid on May 15, 2020.
 - On May 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp112,512,000 with profit sharing ratio at 11.14% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on May 20, 2024 including 9 months grace period. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp69,805,032 and Rp94,072,404, respectively.

APS memperoleh beberapa fasilitas Pembiayaan Investasi dengan Musyarakah Mutanaqishah dari BSI sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Mei 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp15.949.000 dengan nisbah bagi hasil 14,20% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp12.929.628 dan Rp14.644.164.
 - Pada tanggal 28 Juni 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp7.762.000 dan Rp807.000 dengan nisbah bagi hasil 12,06% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 36 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2022 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.882.907 dan Rp5.928.851.
- APS obtained several Musyarakah Mutanaqishah financing investment facilities from BSI as follows:
- On May 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp15,949,000 with profit sharing ratio at 14.20% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on May 20, 2024 including 9 months grace period. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp12,929,628 and Rp14,644,164 respectively.
 - On June 28, 2019, APS obtained facility amounting to Rp7,762,000 and Rp807,000 with profit sharing ratio at 12.06% per annum. The term of this financing is 36 months with due date on June 28, 2022 including 9 months grace period. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp1,882,907 and Rp5,928,851, respectively.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Pada tanggal 31 Juli 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp2.109.000 dengan nisbah bagi hasil 10,93% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 58 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 7 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp801.432 dan Rp1.305.009.
 - Pada tanggal 31 Juli 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp3.708.000 dengan nisbah bagi hasil 14,20% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp3.076.265 dan Rp3.468.222..
 - Pada tanggal 31 Juli 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp1.572.000 dengan nisbah bagi hasil 12,16% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 34 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2022 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp341.612 dan Rp1.104.707.
 - Pada tanggal 31 Oktober 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp23.551.000 dengan nisbah bagi hasil 14,22% per tahun. Jangka waktu 57 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp19.729.480 dan Rp22.102.298.
 - Pada tanggal 31 Oktober 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp5.283.000 dengan nisbah bagi hasil 11,13% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp3.768.448 dan Rp4.860.794.
 - Pada tanggal 24 Januari 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp8.944.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2025 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp6.844.051 dan Rp8.659.128.
- On July 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp2,109,000 with profit sharing ratio at 10.93% per annum. The term of this financing is 58 months with due date on May 20, 2024 including 7 months grace period. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp801,432 and Rp1,305,009, respectively.
 - On July 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp3,708,000 with profit sharing ratio at 14.20% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on July 20, 2024 including 9 months grace period. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp3,076,265 and Rp3,468,222, respectively.
 - On July 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp1,572,000 with profit sharing ratio 12.16% per annum. The term of this financing is 34 months term with due date on May 20, 2022 including 9 months grace period. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp341,612 and Rp1,104,707, respectively.
 - On October 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp23,551,000 with profit sharing ratio 14.22% per annum. The term of this financing is 57 months with due date on July 20, 2024 with grace period of 9 months. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp19,729,480 and Rp22,102,298, respectively.
 - On October 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp5,283,000 with profit sharing ratio at 11.13% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on October 20, 2024 with grace period of 9 months. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp3,768,448 and Rp4,860,794, respectively.
 - On January 24, 2020, APS obtained facility amounting to Rp8,944,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on January 27, 2025 with grace period of 9 months. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp6,844,051 and Rp8,659,128, respectively.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Pada tanggal 19 September 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp27.807.000 dengan nisbah bagi hasil 14,08% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 58 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 7 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp23.219.008 dan Rp26.065.699.
 - Pada tanggal 24 Januari 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp1.115.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 29 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2022 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 2 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp269.225 dan Rp771.054.
 - Pada tanggal 24 Januari 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp2.775.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2025 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp2.123.461 dan Rp2.686.615.
 - Pada tanggal 28 Januari 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp19.267.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2025 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp15.080.751 dan Rp18.958.773.
 - Pada tanggal 30 April 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp14.602.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 April 2025 termasuk masa tenggang waktu selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo kredit fasilitas ini adalah sebesar Rp11.938.903 dan Rp14.602.000.
 - Pada tanggal 30 April 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp9.775.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 50 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2024 termasuk masa tenggang waktu selama
- On September 19, 2019, APS obtained facility amounting to Rp27,807,000 with profit sharing ratio at 14.08% per annum. The term of this financing is 58 months with due date on July 20, 2024 including 7 months grace period. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp23,219,008 and Rp26,065,699, respectively.
 - On January 24, 2020, APS obtained facility amounting to Rp1,115,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 29 months with due date on June 28, 2022 with grace period of 2 months. As of December 31 2021 and 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp269,225 and Rp771,054, respectively.
 - On January 24, 2020, APS obtained facility amounting to Rp2,775,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on January 27, 2025 with grace period of 9 months. As of December 31 2021 and 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp2,123,461 and Rp2,686,615, respectively.
 - On January 28, 2020, APS obtained facility amounting to Rp19,267,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on February 20, 2025 with grace period of 9 months. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp15,080,751 and Rp18,958,773, respectively.
 - On April 30, 2020, APS obtained facility amounting to Rp14,602,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on April 20, 2025 with grace period of 9 months. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp11,938,903 and Rp14,602,000, respectively.
 - On April 30, 2020, APS obtained facility amounting to Rp9,775,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 50 months with due date on October 20, 2024 with grace period of 9 months. As of December 31, 2021 and

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo kredit fasilitas ini adalah sebesar Rp8.338.409 dan Rp9.775.000.
- Pada tanggal 25 Agustus 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp1.358.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 56 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 April 2025 termasuk masa tenggang waktu selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo kredit fasilitas ini adalah sebesar Rp1.188.565 dan Rp1.358.000.
 - Pada tanggal 25 Agustus 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp2.152.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 54 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2025 termasuk masa tenggang waktu selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo kredit fasilitas ini adalah sebesar Rp1.869.007 dan Rp2.152.000.
 - Pada tanggal 29 September 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp2.361.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 45 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2024. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman fasilitasi ini adalah sebesar Rp2.008.074 dan Rp2.358.000.

Seluruh fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan seluruh obyek investasi yang dibiayai bank dan piutang usaha APS kepada Bank sebesar Rp50.000.000 (Catatan 7).

APS diwajibkan oleh BSI untuk menjaga rasio keuangan yaitu rasio lancar minimum sebesar 1 kali, *debt service coverage* minimum sebesar 1 kali, *debt to equity ratio* (DER) maksimal 3 kali.

Pada tanggal 28 Desember 2021 dan 30 Desember 2020, APS telah menerima surat pembebasan (*waiver letter*) dari BSI atas tidak terpenuhinya rasio keuangan tertentu masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**PT Angkasa Pura Properti ("APP")
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

Pada tanggal 1 Agustus 2019, APP memperoleh fasilitas Pembiayaan Musyarakah dari Muamalat sebesar Rp15.500.000 dengan suku bunga 9,50% per tahun. Pinjaman ini bersifat *revolving* dan dijamin dengan aset garbarata yang dimiliki oleh APP. Jangka waktu pembiayaan selama 48 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp8,338,409 and Rp9,775,000, respectively
- On August 25, 2020, APS obtained facility amounting to Rp1,358,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 56 months with due date on April 20, 2025 with grace period of 9 months. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp1,188,565 and Rp1,358,000, respectively.
 - On August 25, 2020, APS obtained facility amounting to Rp2,152,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 54 months with due date on February 20, 2025 with grace period of 9 months. The outstanding balances of this loan facility amounted to Rp1,869,007 and Rp2,152,000, respectively.
 - On September 29, 2020, APS obtained facility amounting to Rp2,361,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 45 months with due date on June 20, 2024. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp2,008,074 and Rp2,358,000, respectively.

This facility is secured by all objected financing investment and account receivables APS to the Bank amounted Rp50,000,000 (Note 7).

APS is required by BSI to maintain the financial ratios, minimum current ratio of 1 time, debt service coverage at least 1 time, debt to equity ratio (DER) maximum 3 times.

On December 28, 2021 and December 30, 2020, APS has received waiver letter from BSI for incompliance of certain financial ratio as of December 31, 2021 and 2020.

**PT Angkasa Pura Properti ("APP")
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

On August 1, 2019, APP obtained Musyarakah financing facility from Muamalat with amount of Rp15,500,000 with bear interest 9,50% per annum. This facility is a revolving and secured by assets (Aviobridges) owned by APP. The term of this facility is 48 months and will be due on August 1, 2023. As of December 31, 2020,

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1 Agustus 2023. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar Rp11.969.824 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Januari 2021.

Pada tanggal 11 Februari 2020, APP memperoleh fasilitas Pembiayaan dari Bank Muamalat sebesar Rp224.000.000 dengan suku bunga 9% per tahun. Pinjaman ini bersifat *non-revolving* dan dijamin dengan piutang usaha dan aset garbarata yang dimiliki oleh APP. Jangka waktu pembiayaan selama 84 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar Rp73.435.521 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Januari 2021.

Pada tanggal 25 Agustus 2020, APP memperoleh fasilitas sebesar Rp20.000.000 dengan suku bunga 9% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 78 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2027. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar Rp19.417.053 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Januari 2021.

Pada tanggal 25 Agustus 2020, APP memperoleh fasilitas sebesar Rp20.000.000 dengan suku bunga 9% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 78 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2027. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar Rp19.800.366 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Januari 2021.

Pada tanggal 18 September 2020, APP memperoleh fasilitas sebesar Rp23.555.471 dengan suku bunga 9% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 77 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2027. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar Rp22.555.471 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Januari 2021.

Pada tanggal 27 Oktober 2020, APP memperoleh fasilitas sebesar Rp13.866.085 dengan suku bunga 9% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 76 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2027. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar Rp13.866.085 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Januari 2021.

Pada tanggal 5 November 2020, APP memperoleh fasilitas sebesar Rp54.491.015 dengan suku bunga 9% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 75 bulan dan jatuh tempo

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

the outstanding balances of these financing facility amounted to Rp11,969,824 and has fully paid on January 18, 2021.

On February 11, 2020, APP obtained financing facility from Muamalat with amount of Rp224,000,000 with bear interest 9% per annum. This facility is a non-revolving and secured by account receivables and assets (Aviobridges) owned by APP. The term of this facility is 84 months. As of December 31, 2020, the outstanding balances of these financing facility amounted to Rp73,435,521 and has fully paid on January 18, 2021.

On August 25 2020, APP obtained facility amounting to Rp20,000,000 with bear interest at 9% per annum. The term of this financing is 78 months with due date on February 12, 2027. As of December 31, 2020, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp19,417,053 and has fully paid on January 18, 2021.

On August 25, 2020, APP obtained facility amounting to Rp20,000,000 with bear interest at 9% per annum. The term of this financing is 78 months with due date on February 12, 2027. As of December 31, 2020, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp19,800,366 and has fully paid on January 18, 2021.

On September 18, 2020, APP obtained facility amounting to Rp23,555,471 with bear interest at 9% per annum. The term of this financing is 77 months with due date on February 12, 2027. As of December 31, 2020, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp22,555,471 and has fully repaid on January 18, 2021.

On October 27, 2020, APP obtained facility amounting to Rp13,866,085 with bear interest at 9% per annum. The term of this financing is 76 months with due date on February 12, 2027. As of December 31, 2020, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp13,866,085 and has fully repaid on January 18, 2021.

On November 5, 2020, APP obtained facility amounting to Rp54,491,015 with bear interest at 9% per annum. The term of this financing is 75 months with due date on February 12, 2027.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

pada tanggal 12 Februari 2027. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar Rp54.491.015 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Januari 2021.

APP diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis apabila membagikan dividen kepada pemegang saham.

APP diwajibkan oleh Muamalat untuk menjaga rasio keuangan yaitu rasio lancar minimum sebesar 1 kali, *debt service coverage* minimum sebesar 1,5 kali, *debt to equity ratio* (DER) maksimal 3 kali. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, APP telah memenuhi semua persyaratan pinjaman.

PT Angkasa Pura II ("AP II")

PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank")

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 11 Agustus 2014, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari Maybank dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp1.500.000.000. Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% - 6,50% pada tahun 2021 dan antara 7,00% - 8,25% pada tahun 2020.

Pada tanggal 3 Juni 2020, Maybank setuju memberikan penangguhan pembayaran angsuran hutang pokok yang jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2020 hingga 30 April 2021. Disamping kewajiban pembayaran tersebut, Maybank juga menyetujui untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* sebagai berikut:

- Penyesuaian *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 1 kali akan diperhitungkan mulai periode Desember 2022.
- Penyesuaian *Debt to Equity* (DER) sebesar 2 kali akan diperhitungkan mulai periode Desember 2021.

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 12 Oktober 2018, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari Maybank dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp3.000.000.000. Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,65% - 6,65% pada tahun 2021 dan 7,15% - 8,40% pada tahun 2020.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

As of December 31, 2020, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp54,491,015 and has fully repaid on January 18, 2021.

APP is required to made written-notice once there are any dividend distributed to shareholders.

APP is required by Muamalat to maintain the financial ratios, minimum current ratio of 1 time, debt service coverage at least 1.5 time, debt to equity ratio (DER) maximum of 3 times. As of December 31, 2021 and 2020, APP complies with all of the loan covenants.

PT Angkasa Pura II ("AP II")

PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank")

Based on a loan agreement dated August 11, 2014, AP II obtained a term loan facility from Maybank with maximum credit facility limit of Rp1,500,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II's airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 5.50% - 6.50% in 2021 and 7.00% - 8.25% in 2020.

On June 3, 2020, Maybank agreed to postpone the payment of installments of principal debt due on May 1, 2020 to April 30, 2021. In addition to the payment obligations, Maybank also agreed to make financial covenant adjustments as follows:

- To adjust the *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time will be calculated starting from December 2022.
- To adjust *Debt to Equity* (DER) of 2 times will be calculated starting from December 2021.

Based on a loan agreement dated October 12, 2018, AP II obtained a term loan facility from Maybank with maximum credit facility limit of Rp3,000,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II's airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 5.65% - 6.65% in 2021 and 7.15% - 8.40% in 2020.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2 kali.

Berdasarkan akad line fasilitas pembiayaan Musyarakah tanggal 7 November 2019, AP II memperoleh fasilitas pembiayaan dari Maybank dengan jumlah maksimum sebesar Rp1.000.000.000 AP II juga menandatangani akad Perjanjian Limit Gabungan No. PJJ.04.04./00/11/2019/0792 pada tanggal 7 November 2019 dengan Maybank dimana AP II tidak dapat menggunakan limit fasilitas perjanjian kredit yang disepakati sebelumnya pada tanggal 12 Oktober 2018 jika jumlah kewajiban AP II gabungan yang harus dibayar (Limit Kredit dan Limit Pembiayaan Musyarakah) kepada Maybank telah melebihi Rp3.000.000.000.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pembiayaan sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2 kali.

Pada tanggal 19 Mei 2020, Maybank setuju memberikan penangguhan pembayaran angsuran hutang pokok yang jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2020 hingga 30 April 2021. Disamping kewajiban pembayaran tersebut, Maybank juga menyetujui untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* sebagai berikut:

- Penyesuaian *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 1 kali akan diperhitungkan mulai periode Desember 2022.
- Penyesuaian *Debt to Equity* (DER) sebesar 2 kali akan diperhitungkan mulai periode Desember 2021.

**PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
("SMI")**

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 20 Maret 2015, AP II memperoleh fasilitas pembiayaan dari SMI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp500.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 4,25% - 6,25% pada tahun 2021 dan antara 4,50% - 8,25% pada tahun 2020.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time.
- *Maximum Debt Equity Ratio* (DER) of 2 times.

Based on Musyarakah line financing facility agreement dated November 7, 2019, AP II obtained a financing facility from Maybank with maximum financing facility limit of Rp1,000,000,000. AP II also signed Combined Limit Agreement No.PJJ.04.04./00/11/2019/0792 dated November 7, 2019 with Maybank where AP II would not be able to use the credit facility limit which previously agreed on October 12, 2018 if the total Company's liability to Maybank (Credit limit and Financing Limit) has exceeded Rp3,000,000,000.

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of financing agreement as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time.
- *Maximum Debt Equity Ratio* (DER) of 2 times.

On May 19, 2020, Maybank agreed to postpone the payment of installments of principal debt due on May 1, 2020 to April 30, 2021. In addition to the payment obligations, Maybank also agreed to make financial covenant adjustments as follows:

- To adjust the *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time will be calculated starting from December 2022.
- To adjust *Debt to Equity* (DER) of 2 times will be calculated starting from December 2021.

**PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
("SMI")**

Based on a loan agreement dated March 20, 2015, AP II obtained a financing facility from SMI with maximum credit facility limit of Rp500,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to to finance AP II airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 4.25% - 6.25% in 2021 and 4.50% - 8.25% in 2020.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1,20 kali.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2 kali.
- Rasio Lancar minimum sebesar 1,10 kali.

Pada tanggal 20 September 2018, SMI menyetujui untuk melakukan perubahan financial covenant menjadi sebagai berikut :

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2 kali.

Pada tanggal 30 Juni 2020, SMI setuju memberikan penangguhan pembayaran angsuran hutang pokok yang jatuh tempo pada tanggal 1 September 2020 hingga 1 Maret 2021. Disamping kewajiban pembayaran tersebut, SMI juga menyetujui untuk melakukan penyesuaian financial covenant sebagai berikut:

- Penyesuaian *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 1 kali untuk diperhitungkan mulai periode Desember 2022.

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 21 November 2018, AP II memperoleh fasilitas pembiayaan dari SMI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp1.500.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 4,25% - 6,25% pada tahun 2021 dan antara 4,50% - 8,40% pada tahun 2020.

Pada tanggal 30 Juni 2020, SMI setuju untuk melakukan penyesuaian financial covenant sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali yang diperhitungkan mulai periode Desember 2022.

**Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
("LPEI")**

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 1 April 2015, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari LPEI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp1.500.000.000. Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% - 6,50% pada tahun 2021 dan antara 6,50% - 8,25% pada tahun 2020.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1.20 times.
- *Maximum Debt Equity Ratio* (DER) of 2 times.
- *Minimum Current Ratio* of 1.10 times.

On September 20, 2018, SMI agreed to adjust financial covenant to become as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time.
- *Maximum Debt Equity Ratio* (DER) of 2 times.

On June 30, 2020, SMI agreed to postpone the payment of installments of principal debt due on September 1, 2020 to March 1, 2021. In addition to the payment obligations, SMI also agreed to make financial covenant adjustments as follows:

- To adjust the *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time will be calculated starting from December 2022.

Based on a loan agreement dated November 21, 2018, AP II obtained a financing facility from SMI with maximum credit facility limit of Rp1,500,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 4.25% - 6.25% in 2021 and 4.50% - 8.40% in 2020.

On June 30, 2020, SMI agreed to to make financial covenant adjustments as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time that started to be accounted on December 2022.

**Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
("LPEI")**

Based on a loan agreement dated April 1, 2015, AP II obtained a term loan facility from LPEI with maximum credit facility limit of Rp1,500,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 5.50% - 6.50% in 2021 and 6.50% - 8.25% in 2020.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1,20 kali.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2 kali.
- Rasio Lancar minimum sebesar 1,10 kali.

AP II juga diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada LPEI terkait dengan pembagian dividen.

Pada tanggal 21 Februari 2019, LPEI menyetujui untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* dengan menghapus Rasio Lancar dan mengubah *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) menjadi 1 kali.

Pada tanggal 8 Juni 2020, LPEI setuju memberikan penangguhan pembayaran angsuran hutang pokok yang jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2020 hingga 25 Januari 2021. Disamping kewajiban pembayaran tersebut, LPEI juga menyetujui untuk melakukan penyesuaian *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 1 kali akan diperhitungkan mulai periode Desember 2022.

PT Indonesia Infrastruktur Finance Tbk (“IIF”)

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 15 Juli 2015, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari IIF dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp400.000.000. Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengembangan bandar udara AP II khususnya Bandara Soekarno-Hatta. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 4,50% - 6,25% pada tahun 2021 dan antara 5,00% - 8,25% pada tahun 2020.

Pada tanggal 19 Desember 2018, IIF menyetujui untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* menjadi sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali.
- Menghapus persyaratan Rasio Lancar.

Pada tanggal 9 Oktober 2020, IIF setuju memberikan penangguhan pembayaran angsuran hutang pokok yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2020 hingga 15 Januari 2021. Disamping kewajiban pembayaran tersebut, IIF juga menyetujui untuk melakukan penyesuaian *financial covenant Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 1 kali akan diperhitungkan mulai periode Desember 2022.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1.20 times.
- *Maximum Debt Equity Ratio* (DER) of 2 times.
- *Minimum Current Ratio* of 1.10 times.

AP II is also required to provide written notification to LPEI regarding dividend declaration.

On February 21, 2019, LPEI agreed to adjust financial covenant by removed the Current Ratio and adjusted Debt Service Coverage Ratio (DSCR) become 1 time.

On June 8, 2020, LPEI agreed to postpone the payment of installments of principal debt due on July 25, 2020 to January 25, 2021. In addition to the payment obligations, LPEI also agreed to make adjustments Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time will be calculated starting from December 2022.

PT Indonesia Infrastruktur Finance Tbk (“IIF”)

Based on a loan agreement dated July 15, 2015, AP II obtained a term loan facility from IIF with maximum credit facility limit of Rp400,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to to finance AP II airport development, especially in Soekarno-Hatta Airport. This loan bears interest at annual rates ranging from 4.50% - 6.25% in 2021 and 5.00% - 8.25% in 2020.

On December 19, 2018, IIF agreed to adjust financial covenant as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time.
- Remove the Current Ratio requirement.

On October 9, 2020, IIF agreed to postpone the payment of installments of principal debt due on July 15, 2020 to January 15, 2021. In addition to the payment obligations, IIF also agreed to make financial covenant adjustments to adjust Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time will be calculated starting from December 2022.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
("BRI")**

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 1 April 2016, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari BRI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp700.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% - 6,50% pada tahun 2021 dan antara 7,00% - 8,25% pada tahun 2020.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2 kali.

Pada tanggal 13 Juli 2020, BRI setuju memberikan penangguhan pembayaran angsuran hutang pokok yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2020 hingga 15 Januari 2021.

Disamping kewajiban pembayaran tersebut, BRI juga menyetujui untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* atas *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 1 kali akan diperhitungkan mulai periode Desember 2021.

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 30 Juli 2020, AP II memperoleh *revolving loan facility* dari BRI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp700.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan 7,00% pada tahun 2021.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- Menjaga ekuitas selalu positif.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2 kali.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
("BNI")**

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 1 April 2016, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari BNI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp700.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 7,00% - 7,50% pada tahun 2021 dan antara 7,00% - 8,25% pada tahun 2020.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
("BRI")**

Based on a loan agreement dated April 1, 2016, AP II obtained a term loan facility from BRI with maximum credit facility limit of Rp700,000. The proceeds of the loan from this facility were used to to finance AP II airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 5.50% - 6.50% in 2021 and 7.00% - 8.25% in 2020.

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time.
- *Maximum Debt Equity Ratio* (DER) of 2 times.

On July 13, 2020, BRI agreed to postpone the payment of installments of principal debt due on July 15, 2020 to January 15, 2021.

In addition to the payment obligations, BRI also agreed to make financial covenant adjustments of *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time will be calculated starting from December 2021.

Based on a loan agreement dated July 30, 2020, the Company obtained a revolving loan facility from BRI with maximum credit facility limit of Rp700,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to to finance AP II working capital. This loan bears interest at annual rate of 7.00% in 2021.

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- Maintain a positive equity.
- *Maximum Debt Equity Ratio* (DER) of 2 times.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
("BNI")**

Based on a loan agreement dated April 1, 2016, AP II obtained a term loan facility from BNI with maximum credit facility limit of Rp700,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 7.00% - 7.50% in 2021 and 7.00% - 8.25% in 2020.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2 kali.

Pada tanggal 29 Mei 2020, BNI setuju memberikan penangguhan pembayaran angsuran hutang pokok yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2020 hingga 15 Januari 2021. Disamping kewajiban pembayaran tersebut, BNI juga menyetujui untuk melakukan penyesuaian atas *financial covenant Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 1 kali baru akan diperhitungkan mulai periode Desember 2022.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 1 April 2016, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari Mandiri dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp700.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 7,00% - 7,25% pada tahun 2021 dan antara 7,00% - 8,25% pada tahun 2020.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2 kali.
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali.

Pada tanggal 25 April 2019, Mandiri menyetujui untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* dengan menghapus persyaratan Rasio Lancar.

Pada tanggal 25 Juni 2020, Mandiri setuju memberikan penangguhan pembayaran angsuran hutang pokok yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2020 hingga 15 Januari 2021. Disamping kewajiban pembayaran tersebut, Mandiri juga menyetujui untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* atas *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 1 kali akan diperhitungkan mulai periode Desember 2022.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time.
- *Maximum Debt Equity Ratio* (DER) of 2 times.

On May 29, 2020, BNI agreed to postpone the payment of installments of principal debt due on July 15, 2020 to January 15, 2021. In addition to the payment obligations, BNI also agreed to make financial covenant adjustments of *Deferral calculation of Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time until December 2022.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Based on a loan agreement dated April 1, 2016, AP II obtained a term loan facility from Mandiri with maximum credit facility limit of Rp700,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 7.00% - 7.25% in 2021 and 7.00% - 8.25% in 2020.

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time.
- *Maximum Debt Equity Ratio* (DER) of 2 times.
- *Minimum Current Ratio* of 1 time.

On April 25, 2019, Mandiri agreed to adjust the financial covenant by removing Current Ratio requirement.

On June 25, 2020, Mandiri agreed to postpone the payment of installments of principal debt due on July 15, 2020 to January 15, 2021. In addition to the payment obligations, Mandiri also agreed to make financial covenant adjustments of *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time will be calculated starting from December 2022.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 29 Mei 2020, AP II memperoleh *revolving loan facility* dari Mandiri dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp750.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 7,00% - 7,50% pada tahun 2021.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman atas Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2 kali.

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
("BTN")**

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 12 September 2018, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari BTN dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,65% - 6,65% pada tahun 2021 dan antara 7,15% - 8,40% pada tahun 2020.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum 1 kali.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2 kali.

Pada tanggal 13 Juli 2020, BTN setuju memberikan jadwal pembayaran pokok atau angsuran baru yang jatuh tempo mulai dari tanggal 12 Desember 2021. Disamping kewajiban pembayaran tersebut, BTN juga menyetujui untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* atas *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 1 kali akan diperhitungkan mulai periode Desember 2023.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 22 Oktober 2021, AP II memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Jateng dengan jumlah limit kredit sebesar Rp700.000.000. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan 7,50% pada tahun 2021.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Based on a loan agreement dated May 29, 2020, AP II obtained a revolving loan facility from Mandiri with maximum credit facility limit of Rp750,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to to finance AP II working capital. This loan bears interest at annual rates ranging from 7.00% - 7.50% in 2021.

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement of Maximum Debt Equity Ratio (DER) of 2 times.

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
("BTN")**

Based on a loan agreement dated September 12, 2018, AP II obtained a term loan facility from BTN with maximum credit facility limit of Rp1,000,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 5.65% - 6.65% in 2021 and 7.15% - 8.40% in 2020.

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time.
- Maximum Debt Equity Ratio (DER) of 2 times.

On July 13, 2020, BTN agreed to provide a new schedule for payment of principal or installments due starting from December 12, 2021. In addition to these payment obligations, BTN also agreed to make financial covenant adjustments of Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time will be calculated starting from December 2023.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Based on a loan agreement dated October 22, 2021, AP II obtained a working capital loan from BTN with credit limit of Rp700,000,000. This loan bears interest at annual rate of 7.50% in 2021.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2,2 kali.
- Ekuitas positif.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, AP II telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang bank jangka panjangnya.

PT Sarinah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi II No. WCO.KP/592/KI/2021 pada tanggal 8 Desember 2021, PT Sarinah mendapatkan kredit investasi dari Bank Mandiri.

Fasilitas yang diperoleh PT Sarinah antara lain:

- Fasilitas kredit investasi 1 sebesar Rp98.800.000.
- Fasilitas kredit investasi 2 sebesar Rp3.000.000.
- Jangka waktu 5 tahun (31 Desember 2021 - 31 Desember 2026).
- Tingkat suku bunga 7,75%.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut (Catatan 18):

- Gedung parkir yang dibiayai dari fasilitas KI-1 akan diikat fidusia.
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 163/Margasari seluas 1.750 m² yang terletak di Jl. Jend Basuki Rachmat No 2a Malang, Kel kiduldalem, Kec Klojen Kota Malang Jawa Timur.
- Sebidang tanah sertifikat Hak Guna bangunan No. 112 seluas 4.135 m² yang terletak di Jl. Jend Basuki Rachmat No.2A Malang.

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, PT Sarinah memiliki kewajiban untuk mempertahankan:

- *Financial covenant* yaitu *current ratio* minimum 110% selama masa konstruksi mulai dihitung sejak terbitnya Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2022.
- *Debt to Equity Ratio* tidak melebihi 230%.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

App II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- Maximum Debt Equity Ratio (DER) of 2.2 times.
- Positive equity.

As of December 31, 2021 and 2020, AP II has complied with all covenant stated in all of its long-term bank loan agreements

PT Sarinah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Based on the Deed of Investment Credit Agreement II No. WCO.KP/592/KI/2021 on December 8, 2021, PT Sarinah received an investment credit from Bank Mandiri.

Facilities obtained by PT Sarinah include:

- Investment credit facility 1 amounting to Rp98,800,000.
- Investment credit facility 2 amounting to Rp3,000,000.
- 5 years period (31 December 2021 - December 31, 2026).
- Interest rate 7.75%.

This facility is secured by the following collaterals (Note 18):

- The parking building financed from the KI-1 facility will be tied on fiduciary basis.
- A plot of land with Building Use Rights Certificate Number 163/Margasari covering an area of 1750 sqm located at Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 2a Malang, Kel kiduldalem, Kec Klojen Malang City, East Java.
- A plot of land with a Right of Use certificate for building No. 112 covering an area of 4,135 sqm located on Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 2A Malang.

In connection with the credit agreement, PT Sarinah has an obligation to maintain:

- Financial covenants, namely a minimum current ratio of 110% during the construction period starting from the publication of the Financial Statements for the position of December 31, 2022.
- Debt to Equity Ratio does not exceed 230%.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
("BNI")**

Berdasarkan Akta Kredit Investasi No 1 tertanggal 2 November 2021 dibuat dihadapan Fessy Farizqoh Alwi, SH, dan Surat Persetujuan Kredit No. BIN/3.2/112/R tanggal 19 Maret 2021 Bank setuju memberikan fasilitas kredit investasi kepada PT Sarinah.

Fasilitas yang diperoleh PT Sarinah antara lain:

- Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp65.000.000.
- Jangka waktu 8 tahun (2 November 2021 - 2 November 2029).
- Tingkat suku bunga 9%

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut (Catatan 18):

- Sebidang tanah dan bangunan ruko diatasnya yang terletak di Jl. Ir H Juanda Raya No. 27 Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, PT Sarinah memiliki kewajiban untuk mempertahankan:

- Menjaga ratio keuangan yaitu Debt Equity Ratio (DER) maksimal 3 (tiga) kali. *Current ratio* minimal 1 (satu) kali.
- *Current ratio* minimal 1 (satu) kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%

Per 31 Desember 2021 dan 2020 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp20.811.933 dan nihil.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
("BRI")**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No 5 tertanggal 26 April 2021 dibuat dihadapan Sri Budi Lestariningsih, SH, dan melalui surat R.II.106-CRO/BCO/04/2021 Bank setuju memberikan fasilitas kredit transaksi khusus kepada PT Sarinah.

Fasilitas yang diperoleh PT Sarinah antara lain:

- Plafond pinjaman sebesar Rp50.000.000.
- Jangka waktu 5 tahun (26 April 2021 - 26 April 2026).
- Tingkat suku bunga 9,5%

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut (Catatan 18):

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1725 Petojo Selatan, seluas 1.159 m² yang terletak di provinsi

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
("BNI")**

Based on the Investment Credit Deed No. 1 dated November 2, 2021, it was drawn up before Fessy Farizqoh Alwi, SH, and the Credit Approval Letter No. BIN/3.2/112/R dated March 19, 2021, the Bank agreed to provide an investment credit facility to PT Sarinah.

Facilities obtained by PT Sarinah include:

- Investment Credit Facility amounting to Rp65,000,000.
- 8 years period (2 November 2021 - 2 November 2029).
- 9% interest rate

This facility is secured by the following collaterals (Note 18):

- A plot of land and a shophouse building on it which is located on Jl. Ir H Juanda Raya No. 27 Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta.

In connection with the credit agreement, PT Sarinah has an obligation to maintain:

- Maintain financial ratios, namely Debt Equity Ratio (DER) a maximum of 3 (three) times. - *Current ratio* at least 1 (one) time.
- *Current ratio* at least 1 (one) time.
- *Debt Service Coverage Ratio* at least 100%

As of December 31, 2021 and 2020 the outstanding balance of this facility amounting to Rp20,811,933 and nil.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
("BRI")**

Based on the Deed of Credit Agreement No. 5 dated April 26, 2021, drawn up before Sri Budi Lestariningsih, SH, and through letter R.II.106-CRO/BCO/04/2021 the Bank agreed to provide a special transaction credit facility to PT Sarinah.

Facilities obtained by PT Sarinah include:

- Loan ceiling of Rp50,000,000.
- 5 years period (26 April 2021 - 26 April 2026).
- Interest rate 9.5%

This facility is secured by the following collaterals (Note 18):

- A plot of land with Building Use Rights Certificate Number 1725 Petojo Selatan, covering an area of 1,159 sqm which is

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

daerah khusus Ibukota Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, kecamatan
Gambir, kelurahan petojo Selatan.

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut,
PT Sarinah memiliki kewajiban untuk
mempertahankan:

- Menjaga rasio keuangan yaitu *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 300%.
- *Current ratio* minimal 1 (satu) kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%.

Per 31 Desember 2021 dan 2020 saldo
pinjaman pada fasilitas ini masing-masing
sebesar Rp49.500.000 dan nihil.

PT Hotel Indonesia Natour (“HIN”)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Sesuai dengan surat Bank Mandiri nomor:
CBD.CB1.SPPK.038/2021 tertanggal 19 Mei
2021, perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan
Novasi a.n. PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
(“HIN”) Kepada PT Hotel Indonesia Properti
(HIP), Bank Mandiri menyetujui permohonan
Novasi Fasilitas Kredit Investasi HIN oleh HIP
dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- Jumlah yang Dinovasi fasilitas kredit
Investasi Hotel Inna Muara Padang, pokok
fasilitas KI: Rp61.625.000, Fasilitas KI Hotel
Grand Inna Kuta Bali, pokok fasilitas KI:
Rp59.925.000, dan pokok fasilitas KI Hotel
Inaya Putri Bali pokok fasilitas KI :
Rp331.770.000.
- Seluruh tunggakan bunga yang dijadwalkan
dan bunga yang ditangguhkan juga dilakukan
novasi.
- HIN memperoleh Fasilitas Kredit Investasi
(KI) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
berdasarkan Akta Perjanjian Investasi No.
CRO.KP/355/KI/11 tanggal 22 Desember
2011 sejumlah Rp101.000.000. untuk tujuan
pembangunan Hotel Grand Inna Muara
Padang. Pinjaman tersebut berjangka waktu
8 tahun yang berakhir pada tanggal
23 Desember 2020 termasuk masa tenggang
(*grace period*) pembayaran angsuran pokok
1 tahun 3 bulan terhitung sejak tanggal
23 Desember 2011 sampai dengan tanggal
31 Maret 2012. Tingkat suku bunga atas
pinjaman tersebut adalah sebesar 8%
(*floating rate*) per tahun dibayar efektif setiap
tanggal 23 (dua puluh tiga) tiap bulannya,
dan dapat berubah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku di bank.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

located in the province of the Special Capital
Region of Jakarta, Central Jakarta
Administrative City, Gambir sub-district,
Petojo Selatan sub-district.

In connection with the credit agreement,
PT Sarinah has an obligation to maintain:

- Maintain financial ratio, namely *Debt Equity Ratio* (DER) of a maximum of 300%.
- *Current ratio* at least 1 (one) time.
- *Debt Service Coverage Ratio* at least 100%.

As of December 31, 2021 and 2020 the
outstanding balance of this facility amounting to
Rp49,500,000 and nil.

PT Hotel Indonesia Natour (“HIN”)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

In accordance with Bank Mandiri letter number:
CBD.CB1.SPPK.038/2021 dated 19 May 2021,
regarding Notification Letter of Approval of
Novation a.n. PT Hotel Indonesia Natour
(Persero) (“HIN”) To PT Hotel Indonesia Properti
(HIP), Bank Mandiri approved the application for
HIN Investment Credit Facility Novation by HIP
with the following terms and conditions:

- Total Renovated Investment credit facilities
at Hotel Inna Muara Padang, principal KI
facilities: Rp61,625,000, KI facilities at
Grand Inna Kuta Bali, principal KI facilities:
Rp59,925,000, and principal KI facilities at
Hotel Inaya Putri Bali, principal facilities KI :
Rp331,770,000.
- All scheduled interest arrears and deferred
interest are also novated.
- HIN obtained an Investment Credit Facility
(KI) from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
based on the Deed of Investment
Agreement No. CRO.KP/355/KI/11 dated
December 22, 2011 in the amount of
Rp101,000,000 for the purpose of building the
Grand Inna Muara Padang Hotel. The
loan has a term of 8 years ending on
December 23, 2020 including a grace period
for payment of the principal installments of 1
year and 3 months from December 23, 2011
until March 31, 2012. The interest rate on
this loan is 8%. (*floating rate*) per year is
paid effectively on the 23rd (twenty-third) of
each month, and may change in accordance
with the prevailing regulations at the bank.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Tanggal 12 Mei 2020 HIN menandatangani Addendum IV (Keempat) atas Akta Perjanjian Kredit Investasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang perubahan fasilitas kredit Grand Inna Kuta (GIK) berdasarkan perjanjian No.CRO.KP/143/KI/12, perubahan fasilitas kredit Grand Inna Muara (GIM) berdasarkan perjanjian No. CRO.KP/355/KI/11, dan perubahan fasilitas kredit Inaya Putri Bali (IPB) berdasarkan perjanjian No.CRO.KP/158/KI/13, ketiganya tentang Perubahan Ketentuan Fasilitas Kredit, antara lain:

- Perubahan Jadwal Pembayaran Angsuran.
- Perubahan suku bunga. Sesuai dengan surat Bank Mandiri nomor: CBD.CB1.SPPK.038/2021 tertanggal 19 Mei 2021 HIN telah mendapatkan persetujuan novasi atas kredit investasi (KI) kepada PT Hotel Indonesia Properti.

**PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")**

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 2 tanggal 3 November 2021 yang dibuat di hadapan Anita Kurniawati S.H. M.Kn., Notaris di Sleman, PT TWC memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai maksimum sebesar Rp57.000.000 dengan jangka waktu selama 36 bulan.

Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk refinancing Hotel The Manohara. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 9% per tahun (*floating*).

Pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 1.835 m² dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 9.529 m² (Catatan 18).

PT TWC harus memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan, antara lain:

- Rasio utang terhadap modal paling tinggi sebesar 200%.
- Rasio likuiditas paling rendah sebesar 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2021 PT TWC dapat memenuhi seluruh kewajiban keuangan yang dinyatakan dalam perjanjian.

Selama kredit belum lunas, PT TWC tidak diperbolehkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

On May 12, 2020 HIN signed Addendum IV (Fourth) of the Deed of Investment Credit Agreement of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk regarding changes to the Grand Inna Kuta (GIK) credit facility based on agreement No. CRO.KP/143/KI/12, changes to facilities Grand Inna Muara (GIM) credit based on agreement no. CRO.KP/355/KI/11, and changes to the Inaya Putri Bali (IPB) credit facility based on the agreement No.CRO.KP/158/KI/13, the three of them regarding Changes to Credit Facility Provisions, including:

- Change of Installment Payment Schedule.
- Interest rate changes. In accordance with Bank Mandiri's letter number: CBD.CB1.SPPK.038/2021 dated May 19, 2021, HIN has obtained a novation approval for investment credit (KI) to PT Hotel Indonesia Properti.

**PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")**

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Based on the Deed of Credit Agreement No. 2 dated November 3, 2021, made in presence of Anita Kurniawati S.H. M.Kn., Notary in Sleman, PT TWC obtained an investment credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta with a maximum value of Rp57,000,000 with a period of 36 months.

The purpose of using this facility is for refinancing Hotel The Manohara. This facility bears interest at 9% per annum (*floating*).

This loan is secured by land with an area of 1,835 sqm and a building that stands on it with an area of 9,529 sqm (Note 18).

PT TWC must fulfill its financial obligations, including:

- Debt to equity ratio maximum of 200%.
- Liquidity ratio minimum of 100%.

As of December 31, 2021, PT TWC is able to fulfill all financial obligations thant stated in the agreement.

As long as the credit has not been paid off, PT TWC is not allowed to do the following:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Melakukan penjualan aset, kecuali dilakukan dalam rangka menjalankan operasional PT TWC dan/ atau sekuritas aset sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Melakukan penggabungan atau akuisisi, kecuali dilakukan dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Melakukan perubahan bidang usaha, kecuali dilakukan dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Melakukan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan pihak Bank.
 - Mengubah periode pelaporan keuangan.
- Selling assets, except for carrying out PT TWC's operations and/or asset securities in accordance with the articles of association and the provisions of the applicable laws and regulations.
 - Perform mergers or acquisitions, unless carried out in the context of implementing the applicable laws and regulations.
 - Make changes to the business field, unless it is carried out in the context of implementing the applicable laws and regulations.
 - Conduct transactions that cause conflicts of interest with the interests of the Bank.
 - Change the financial reporting period.

27. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah

27. Bonds Payable And Sukuk Ijarah

	2021 Rp	2020 Rp	
Utang Obligasi	6,793,900,000	7,500,000,000	Bonds Payable
Utang Sukuk Ijarah	728,000,000	500,000,000	Sukuk Ijara Payable
Biaya Pinjaman yang Belum Diamortisasi	(16,346,812)	(8,752,868)	Unamortized Cost of Loans
Total	7,505,553,188	7,991,247,132	Total

	2021 Rp	2020 Rp	
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	--	2,090,000,000	Current Maturities of Long-Term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	7,505,553,188	5,901,247,132	Long Term Liabilities - Net of Current Maturities
Total	7,505,553,188	7,991,247,132	Total

PT Angkasa Pura I ("AP I")

a. Obligasi dan Sukuk Ijarah 2016

Pada tanggal 10 November 2016, AP I telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi I AP I Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

PT Angkasa Pura I ("AP I")

a. Bonds Payable and Sukuk Ijarah 2016

On November 10, 2016, AP I has obtained effective statement from Financial Services Authority (OJK) on the issuance of Bonds I AP I Year 2016 with detail as follows:

	Obligasi/ Bonds				
	Nominal	Bunga per Tahun/ Interest per Annum	Jangka Waktu/ Periods	Jatuh Tempo/ Due Date	
Seri B	389,000,000	8.40%	7 Tahun/Years	2023	Seri B
Seri C	1,489,000,000	8.55%	10 Tahun/Years	2026	Seri C
Total	1,878,000,000				Total

	Sukuk Ijarah/Sukuk Ijarah				
	Nominal	Imbalan per Tahun/ Benefit per Annum	Jangka Waktu/ Periods	Jatuh Tempo/ Due Date	
Seri B	55,000,000	4,620,000	7 Tahun/Years	2023	Seri B
Seri C	177,000,000	15,133,500	10 Tahun/Years	2026	Seri C
Total	232,000,000	19,753,500			Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat utang obligasi dan utang sukuk ijarah, 75% dana yang diperoleh akan digunakan untuk pengembangan 5 (lima) bandara yaitu bandara baru Yogyakarta, Ahmad Yani-Semarang, Syamsudin Noor Banjarmasin, Juanda Surabaya dan Sultan Hasanudin Makasar.

Obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi baik langsung maupun tidak langsung dijamin dengan seluruh harta kekayaan AP I, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- a) Perbandingan aset lancar terhadap kewajiban lancar tidak kurang dari 1 kali.
- b) Perbandingan total pinjaman terhadap total ekuitas tidak lebih dari 3 kali.
- c) Perbandingan penghasilan sebelum beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi terhadap beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1 kali.

AP I tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah pada tanggal 7 Desember 2020, seluruh pemegang obligasi dan sukuk ijarah menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan tahun 2021 dan 2020.

Pada tanggal 22 September 2021, peringkat obligasi AP I yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAA+.

b. Obligasi dan Sukuk Ijarah 2021

Pada tanggal 8 September 2021, AP I telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee for bonds payable and sukuk ijarah, 75% of fund received will be used for the development of 5 (five) airports there are the new airport in Yogyakarta, Ahmad Yani-Semarang, Banjarmasin Syamsudin Noor, Juanda Surabaya and Makassar Sultan Hasanuddin.

Bonds and sukuk ijarah are not secured by specific collateral, but either directly or indirectly secured by all assets of AP I wealth, goods moveable or immovable, either existing or that will exist in the future.

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable ratio as follows:

- a) Ratio of current assets to current liabilities not less than 1 time.*
- b) Ratio of total debt to total equity not more than 3 times.*
- c) Ratio of earnings before income tax, depreciation and amortization to interest expenses not less than 1 time.*

AP I was unable to meet these requirements on December 31, 2021 and December 31, 2020. Based on the General Meeting of Bondholders and General Meeting of Sukuk Ijarah on December 7, 2020, all bond and sukuk ijarah holders agreed to waive the fulfilment of the financial covenants in 2021 and 2020.

On September 22, 2021, AP I's bond rating by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) is idAA+.

b. Bonds Payable and Sukuk Ijarah 2021

On September 8, 2021, AP I has obtained an effective statement from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on the issuance of Bonds I Angkasa Pura I Year 2021 with detail as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Obligasi/ Bonds					
	Nominal	Bunga per Tahun/ Interest per Annum	Jangka Waktu/ Periods	Jatuh Tempo/ Due Date	
Seri A	272,500,000	6.70%	3 Tahun/Years	2024	Seri A
Seri B	66,000,000	7.10%	5 Tahun/Years	2026	Seri B
Seri C	280,400,000	8.00%	7 Tahun/Years	2028	Seri C
Seri D	497,000,000	8.60%	10 Tahun/Years	2031	Seri D
Total	1,115,900,000				Total

Sukuk Ijarah/ Sukuk Ijarah					
	Nominal	Imbalan per Tahun/ Interest per Annum	Jangka Waktu/ Periods	Jatuh Tempo/ Due Date	
Seri A	215,000,000	14,405,000	3 Tahun/Years	2024	Seri A
Seri B	215,000,000	15,265,000	5 Tahun/Years	2026	Seri B
Seri B	52,000,000	4,160,000	7 Tahun/Years	2028	Seri B
Seri C	14,000,000	1,204,000	10 Tahun/Years	2031	Seri C
Total	496,000,000	35,034,000			Total

Berdasarkan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat utang obligasi dan sukuk ijarah, bahwa dana sebesar Rp622.000.000 dan Rp199.900.205 akan digunakan untuk melunasi surat utang Obligasi Seri A 2016, dana sisa hasil penawaran umum obligasi sebanyak 73% akan digunakan untuk investasi antara lain overlay landasan pacu, penggantian peralatan, renovasi terminal beserta fasilitas penunjang, dan lain-lain. Sedangkan sebanyak 27% digunakan untuk modal kerja.

Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee for bonds payable and sukuk ijarah, Rp622,000,000 and Rp199,900,205 of funds will be used to pay off the 2016 Series A Bonds, the remaining 73% proceeds from the public offering of bonds will be used for investments including runway overlay, equipment replacement, terminal renovation and supporting facilities, and others. Meanwhile, 27% is used for working capital.

Berdasarkan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat utang obligasi dana sebesar Rp199.950.205 akan digunakan untuk melunasi sebagian pokok utang Pinjaman Kredit Sindikasi 2016.

Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee for bonds payable, Rp199,950,205 of funds will be used to pay off part of the principal debt of the 2016 Syndicated Credit Loans.

Obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi baik langsung maupun tidak langsung dijamin dengan seluruh harta kekayaan AP I, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Bonds and sukuk ijarah are not secured by specific collateral, but either directly or indirectly secured by all assets of AP I wealth, goods moveable or immovable, either existing or that will exist in the future.

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable ratio as follows:

- Perbandingan total pinjaman terhadap total ekuitas tidak lebih dari 5 kali.
- Perbandingan penghasilan sebelum beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi terhadap beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1 kali yang dimulai pada tahun 2022.

- Ratio of total debt to total equity not more than 5 times.*
- Ratio of earnings before income tax, depreciation and amortization to interest expenses not less than 1 time starting from 2022.*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP I tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah pada tanggal 7 Desember 2020, seluruh pemegang obligasi dan sukuk ijarah menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan tahun 2021 dan 2020.

The Company was unable to meet these requirements on December 31, 2021 and December 31, 2020. Based on the General Meeting of Bondholders and General Meeting of Sukuk Ijarah on December 7, 2020, all bond and sukuk ijarah holders agreed to waive the fulfillment of the financial covenants in 2021 and 2020.

Pada tanggal 2 September 2021, peringkat obligasi AP I yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAA+.

On September 2, 2021, AP I's bond rating by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) is idAA+.

PT Angkasa Pura II ("AP II")

a. Obligasi 2016

Pada tanggal 23 Juni 2016, AP II telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi I Angkasa Pura II tahun 2016 dengan 3 (tiga) seri yaitu:

PT Angkasa Pura II ("AP II")

a. Bonds 2016

On June 23, 2016, AP II has obtained an effective statement from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on the issuance of Bonds I Angkasa Pura II Year 2016 with 3 (three) series as follows:

	Obligasi/ Bonds				
	Nominal	Bunga per Tahun/ Interest per Annum	Jangka Waktu/ Periods	Jatuh Tempo/ Due Date	
Seri A	1,000,000,000	8.60%	5 Tahun/Years	2021	Seri A
Seri B	100,000,000	8.80%	7 Tahun/Years	2023	Seri B
Seri C	900,000,000	9.00%	10 Tahun/Years	2026	Seri C
Total	2,000,000,000				Total

Total dana yang diterima AP II pada tanggal 30 Juni 2016 dari hasil penerbitan perdana Obligasi I Angkasa Pura II tahun 2016 adalah sebesar Rp2.000.000.000. Sesuai dengan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi Perusahaan, 92% dari dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan bandara Soekarno-Hatta dan 8% akan digunakan untuk pengembangan bandara lainnya.

Total fund received by AP II on June 30, 2016 from the first issuance of Bonds I Angkasa Pura II Year 2016 was Rp2,000,000,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee and the Company's prospectus for bonds payable, 92% of the funds will be used for the development of Soekarno-Hatta airport and 8% will be used for the development of other airports.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable period as follows:

- a) Perbandingan Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar tidak kurang dari 1 kali.
- b) Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 2 kali.
- c) Perbandingan Profit Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 kali.

- a) *Ratio of Current Assets to Current Liabilities not less than 1 time.*
- b) *Ratio of Total Debt to Total Equity not more than 2 times.*
- c) *Ratio of Earnings Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses not less than 1 time.*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP II juga akan dianggap wanprestasi terhadap kewajibannya sehubungan dengan utang obligasinya apabila terdapat utang jangka panjang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan, sejumlah lebih dari 25% dari ekuitas AP II.

Pada tanggal 14 Juni, 2021, AP II melakukan pembayaran obligasi sebesar Rp1.000.000.000 atas Obligasi I Angkasa Pura II tahun 2016 Seri A.

Pada tanggal 19 November 2020 dan 16 Desember 2020, Pemegang Obligasi I Angkasa Pura II 2016 setuju untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* sebagai berikut:

- Penghapusan Perbandingan Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar tidak kurang dari 1 kali.
- Pengesampingan Perbandingan Profit Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 kali untuk periode laporan keuangan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021

b. Obligasi 2018

Pada tanggal 13 Desember 2018, AP II telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap I Tahun 2018 dengan 2 (dua) seri yaitu:

The Company will also be declared *incompliance with its covenant relating to the bonds payable if there is any other long-term loan that is not in compliance with their covenant, totaling more than 25% of the AP II equity.*

On June 14, 2021, the Company has paid the Bonds I Angkasa Pura II Year 2016 Seri A of Rp1,000,000,000.

On November 19, 2020 and December 16, 2020, holders of Bonds I Angkasa Pura II Year 2016 agreed to to make financial covenant adjustments as follows:

- *Invalidation of Ratio of Current Assets to Current Liabilities not less than 1 time.*
- *Waive Ratio of Earnings Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses not less than 1 time for financial reporting period of December 31, 2020 and December 31, 2021.*

b. Bonds 2018

On December 13, 2018, the Company has obtained an effective statement from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on the issuance of Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Phase I Year 2018 with 2 (two) series as follows:

Obligasi/ Bonds					
Nominal	Bunga per Tahun/ Interest per Annum	Jangka Waktu/ Periods	Jatuh Tempo/ Due Date		
Seri A	200,000,000	8.65%	3 Tahun/Years	2021	Seri A
Seri B	550,000,000	8.95%	5 Tahun/Years	2023	Seri B
Total	750,000,000				Total

Total dana yang diterima AP II pada tanggal 12 Desember 2018 dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap I Tahun 2018 adalah sebesar Rp750.000.000. Sesuai dengan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi AP II, seluruh dari dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan sisi udara dan sisi darat di Bandara Soekarno Hatta dan bandara lainnya yang dikelola oleh AP II.

Total funds received by the Company on December 12, 2018 from the issuance of Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Year 2018 is Rp750,000,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee and the Company's bonds payable prospectus, all of the funds will be used for the development of airside and landside of Soekarno-Hatta Airport and other airports managed by AP II.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 2 kali.
- Perbandingan Profit Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 kali.

AP II juga akan dianggap wanprestasi terhadap kewajibannya sehubungan dengan utang obligasinya apabila terdapat utang jangka panjang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan, sejumlah lebih dari 30% dari ekuitas AP II.

Pada tanggal 4 November 2020, Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap I Tahun 2018 setuju untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* sebagai berikut:

- Pengesampingan Perbandingan Profit Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 kali untuk periode laporan keuangan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021

Pada tanggal 30 November 2021, AP II melakukan pembayaran obligasi sebesar Rp200.000.000 atas Obligasi II Angkasa Pura II tahun 2018 Seri A.

c. Obligasi 2020

Pada tanggal 13 Agustus 2020, AP II menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020 dengan 4 (empat) seri yaitu:

AP II is also obligated to maintain certain financial ratios along the bonds payable period as follows:

- Ratio of Total Debt to Total Equity not less than 2 times.
- The comparison of Profit Before Income Tax and Depreciation and Amortisation to Debt Interest Expense not less than 1 time.

The Company will also be declared in compliance with its covenant relating to the bonds payable if there is any other long-term loan that is not in compliance with their covenant, totaling more than 30% of the Company's equity.

On November 4, 2020, holders of Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Phase I Year 2018 agreed to to make financial covenant adjustments as follows:

- Waive Ratio of Earnings Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses not less than 1 time for financial reporting period of December 31, 2020 and December 31, 2021.

On November 30, 2021, the Company has paid the Bonds II Angkasa Pura II Year 2018 Seri A of Rp200,000,000.

c. Bonds 2020

On August 13, 2020, AP II issued Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Phase II Year 2020 with 4 (four) series as follows:

	Obligasi/ Bonds				
	Nominal	Bunga per Tahun/ Interest per Annum	Jangka Waktu/ Periods	Jatuh Tempo/ Due Date	
Seri A	32,000,000	7.80%	3 Tahun/Years	2023	Seri A
Seri B	159,000,000	8.50%	5 Tahun/Years	2025	Seri B
Seri C	1,602,000,000	9.10%	7 Tahun/Years	2027	Seri C
Seri D	457,000,000	9.25%	10 Tahun/Years	2030	Seri D
Total	2,250,000,000				Total

Total dana yang diterima AP II pada tanggal 13 Desember 2020 dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.250.000.000 Sesuai dengan perjanjian

Total funds received by AP II on December 12, 2020 from the issuance of Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Phase II Year 2020 is Rp2,250,000,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi AP II, seluruh dari dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan sisi udara dan sisi darat di Bandara Soekarno Hatta dan bandara lainnya yang dikelola oleh AP II.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:
(a) Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 2 kali dan
(b) Perbandingan Profit Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 kali.

AP II juga akan dianggap wanprestasi terhadap kewajibannya sehubungan dengan utang obligasinya apabila terdapat utang jangka panjang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan, sejumlah lebih dari 30% dari ekuitas AP II.

Pada tanggal 4 November 2020, Pemegang Obligasi Berkelanjutan I AP II Tahap II Tahun 2020 setuju untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* sebagai berikut:

- Pengesampingan Perbandingan Profit Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 kali untuk periode laporan keuangan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, AP II telah memenuhi semua kewajiban dalam perjanjiannya dengan Wali Amanat dan tidak ada peristiwa gagal silang sehubungan dengan utang jangka panjang lainnya.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Trustee and AP II bonds payable prospectus, all funds will be used for the development of airside and landside of Soekarno-Hatta Airport and other airports managed by AP II.

AP II is also obligated to maintain certain financial ratios along the bonds payable period as follows: (a) Ratio of Total Debt to Total Equity not less than 2 times and (b) The comparison of Profit Before Income Tax and Depreciation and Amortisation to Debt Interest Expense not less than 1 time.

AP II will also be declared in compliance with its covenant relating to the bonds payable if there is any other long-term loan that is not in compliance with their covenant, totaling more than 30% of the AP II equity.

On November 4, 2020, holders of Obligasi Berkelanjutan I AP II Phase II Year 2020 agreed to to make financial covenant adjustments as follows:

- *Waive Ratio of Earnings Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses not less than 1 time for financial reporting period of December 31, 2020 and December 31, 2021.*

As of December 31, 2021 and 2020 AP II has complied with all covenant required by its agreement with the Trustee and there is no cross default incurred in relation with other long-term loans.

28. Surat Utang Jangka Menengah

28. Medium Term Notes

	2021 Rp	2020 Rp	
MTN Seri IV	--	50,000,000	MTN Series IV
MTN Seri V	--	45,000,000	MTN Series V
Dikurangi:			Less:
Bagian Jangka Pendek yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun	--	(50,000,000)	Short-Term Portion Matures in 1 Year
Bagian Jangka Panjang	--	45,000,000	Long-Term Portion

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- a. Tanggal 6 November 2019, HIN selaku Penerbit, menandatangani Akta Pengakuan Utang No. 03 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak S.H., mengenai Perjanjian Penerbitan *Medium Term Note* (MTN) Seri V PT Hotel Indonesia Natour ("HIN") tahun 2019 senilai Rp45.000.000 dengan penunjukan RDPT PNM Multisektoral XVI pemegang MTN dan penunjukan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku Agen Pembayaran.

MTN Seri V dikenakan suku bunga sebesar 11,05% per tahun yang akan dibayarkan oleh Penerbit kepada Pemegang MTN setiap 3 (tiga) bulan, dimana bunga pertama kalinya dibayarkan pada tanggal 8 Februari 2020 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan.

Jaminan atas penerbitan MTN tersebut adalah berupa tanah SHGB No.3311/Tebet Barat yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat seluas 1.134 m² yang diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama sebesar 100% dari Nilai pokok MTN yang terutang.

HIN harus membayar bunga dan pokok MTN sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dan apabila terjadi keterlambatan, maka HIN akan dikenakan denda sebesar 1% di atas tingkat suku bunga MTN per tahun dari jumlah yang wajib dibayar yang dihitung secara harian.

Berdasarkan Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) Atas Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat *Medium Term Notes V Hotel Indonesia Natour Tahun 2019* nomor 25, tanggal 20 September 2021 HIN mengalihkan seluruh jumlah terutang kepada HIN berdasarkan perjanjian Penerbitan MTN sebesar Rp45.000.000.

- b. Tanggal 28 Juli 2017, HIN selaku Penerbit, menandatangani Akta Pengakuan Utang No. 52 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak S.H., mengenai Perjanjian Penerbitan *Medium Term Note* (MTN) Seri IV PT Hotel Indonesia Natour ("HIN") tahun 2017 senilai Rp50.000.000 dengan penunjukan RDPT Asanusa Jamkrindo pemegang MTN dan Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen pembayaran dan *Manager* investasi.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- a. On November 6, 2019, HIN as the Publisher, signed the Deed of Recognition of Debt No. 03 made by Notary Lenny Janis Ishak S.H., regarding the 2019 Series V *Medium Term Note* (MTN) Agreement for PT Hotel Indonesia Natour ("HIN") worth Rp45,000,000 with the appointment of RDPT PNM Multisectoral XVI MTN holders and the appointment of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as Payment Agent.

MTN Series V bears an interest rate of 11.05% per annum which will be paid by the Issuer to MTN Holders every 3 (three) months, with the first interest being paid on February 8, 2020 for a period of 3 (three) years from the date of issuance.

The collateral for the issuance of the MTN is in the form of land SHGB No.3311/Tebet Barat which is located in the Province of the Special Capital Region of Jakarta, South Jakarta Administrative City, Tebet District, Tebet Barat Village covering an area of 1,134 sqm which is tied with a first rank Mortgage of 100% of the Value principal MTN payable.

HIN must pay the interest and principal of MTN in accordance with the agreed term and if there is a delay, then HIN will be subject to a fine of 1% above the MTN interest rate per year from the amount that must be paid which is calculated daily.

Based on the Debt Renewal Agreement (Novasi) on the Issuance Agreement and Appointment of Trustee for *Medium Term Notes V Hotel Indonesia Natour 2019* number 25, September 20, 2021 PT Hotel Indonesia Natour transferred the entire amount owed to HIN based on the MTN Issuance agreement amounting to Rp45,000,000.

- b. On July 28, 2017, HIN as the Publisher, signed the Deed of Recognition of Debt No. 52 made by Notary Lenny Janis Ishak S.H., regarding the Issuance Agreement of *Medium Term Note* (MTN) Series IV PT Hotel Indonesia Natour ("HIN") in 2017 valued at Rp50,000,000 with the appointment of RDPT Asanusa Jamkrindo, holder of MTN and Bank Mandiri (Persero) Tbk as payment agent and investment manager.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

MTN Seri IV dikenakan suku bunga sebesar 12,125% per tahun yang akan dibayarkan oleh Penerbit kepada Pemegang MTN setiap 3 (tiga) bulan, dimana bunga pertama kalinya dibayarkan pada tanggal 28 Oktober 2017 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan.

Jaminan atas penerbitan MTN tersebut adalah berupa tanah SHGB No. 1/Dangin Puri Kauh atas nama HIN yang terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur, Desa Dangin Puri Kauh seluas 7.835 m² yang diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama sebesar 100% dari Nilai pokok MTN yang terutang.

HIN harus membayar bunga dan pokok MTN sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dan apabila terjadi keterlambatan, maka HIN akan dikenakan denda sebesar 1% di atas tingkat suku bunga MTN per tahun dari jumlah yang wajib dibayar yang dihitung secara harian.

Tanggal 29 November 2018 Perusahaan menandatangani Addendum I (Pertama) atas Akta Perjanjian Pengakuan Utang No. 27 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak S.H. RDPT Asanusa Jamkrindo pemegang MTN melakukan tentang penggantian manager investasi semula PT Asanusa Asset Management menjadi PT PNM Investment Management dan semula Bank Kustodian menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk.

Tanggal 24 Juli 2020 HIN menandatangani Addendum II (Kedua) atas Akta Perjanjian Pengakuan Utang No.41 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak S.H. perubahan tanggal pelunasan pokok MTN terbagi menjadi 2 tahap, antara lain:

- Jadwal Pembayaran Angsuran tahap 1 tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp25.000.000.
- Jadwal Pembayaran Angsuran tahap 1 tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp25.000.000.

Berdasarkan Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) Atas Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat *Medium Term Notes IV Hotel Indonesia Natour Tahun 2017*, nomor 22, tanggal 20 September 2021

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

MTN Series IV bears an interest rate of 12.125% per annum which will be paid by the Issuer to the MTN Holder every 3 (three) months, with the first interest being paid on October 28, 2017 for a period of 3 (three) years from the date of issuance.

Collateral for the issuance of the MTN is in the form of land SHGB No. 1/Dangin Puri Kauh on behalf of HIN which is located in Bali Province, Denpasar City, East Denpasar District, Dangin Puri Kauh Village covering an area of 7,835 sqm which is tied with a first rank Mortgage of 100% of the principal value of the MTN owed.

HIN must pay the interest and principal of the MTN in accordance with the agreed term and if there is a delay, HIN will be subject to a fine of 1% above the MTN interest rate per year from the amount that must be paid which is calculated daily.

On November 29, 2018 the Company signed Addendum I (First) to the Deed of Debt Recognition Agreement No. 27 made by Notary Lenny Janis Ishak S.H. RDPT Asanusa Jamkrindo, the MTN holder, made changes to the investment manager from PT Asanusa Asset Management to PT PNM Investment Management and originally the Custodian Bank appointed PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to PT Bank Kb Bukopin Tbk.

On July 24, 2020 HIN signed Addendum II (Second) on the Deed of Debt Recognition Agreement No. 41 made by Notary Lenny Janis Ishak S.H. The change in the principal repayment date of MTN is divided into 2 stages, including:

- Schedule of installment payments for stage 1 on July 28, 2021, amounting to Rp25,000,000.*
- Schedule of installment payments for stage 1 on October 28, 2021, amounting to Rp25,000,000.*

Based on the Debt Renewal Agreement (Novation) on the Issuance Agreement and Appointment of Trustee for Medium Term Notes IV Hotel Indonesia Natour 2017, number 22, dated 20 September 2021, HIN

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

HIN mengalihkan seluruh jumlah terutang kepada Perusahaan Pemegang MTN berdasarkan perjanjian Penerbitan MTN sebesar Rp50.000.000. Pengalihan hutang ini telah diterima dan disetujui oleh Pemegang MTN, dan serta membebaskan HIN dari kewajibannya untuk melunasi jumlah terutang kepada Pemegang MTN.

transferred the entire amount owed to the MTN Holders Company based on the MTN Issuance agreement amounting to Rp50,000,000. This transfer of debt has been accepted and approved by the MTN Holder, and also frees HIN from its obligation to pay off the amount owed to the MTN Holder.

29. Utang Jangka Panjang Lainnya

29. Other Long-Term Liabilities

	2021 Rp	2020 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 44)	--	27,167,216	<i>Related Parties (Note 44)</i>
Pihak Ketiga	459,867,588	374,473,204	<i>Third Parties</i>
Total	459,867,588	401,640,420	Total

Akun ini merupakan jaminan yang diberikan oleh penyewa (*tenant*) atas sewa ruangan, tanah dan instalasi listrik, air dan telepon di awal perjanjian.

This account represents collateral given by tenants that consist of deposits for space rental, land rental, electrical and water installation at the beginning of the contract.

30. Utang Provisi

30. Provisions Payable

Utang provisi pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp20.367.575.

Provisions payables as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp20,367,575.

Pada tanggal 31 Desember 2020, TWC melakukan pembentukan biaya provisi sehubungan dengan restrukturisasi aset program dana pensiun yang ditempatkan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Restrukturisasi tersebut mengakibatkan adanya kewajiban PT TWC yang belum dipenuhi sebelum dilakukannya restrukturisasi. Nilai provisi tersebut berdasarkan Surat dari PT Asuransi Jiwasraya (AJS) (Persero) No. 00017/S/CBR9/1220 tanggal 30 Desember 2020 mengenai besaran nilai top up premi sebesar Rp20.367.575 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 19 Januari 2021.

As of December 31, 2020, TWC established a provision expense regarding with the restructuring of the pension plan assets placed at PT Asuransi Jiwasraya (Persero). The restructuring resulted in PT TWC's obligations which had not been fulfilled prior to the restructuring. The value of the provision is based on a letter from PT Asuransi Jiwasraya (AJS) (Persero) No. 00017/S/CBR9/1220 dated December 30, 2020 regarding the top up premi amounting to Rp20,367,575 which was approved by the Board of Commissioners on January 19, 2021.

Pada tanggal 30 April 2021, terdapat Kesepakatan Bersama Nso. 88/KP.605/IV/2021 antara PT TWC dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang Persetujuan Mengikuti Restrukturisasi Polis. Para pihak sepakat bahwa proses restrukturisasi akan berlaku efektif setelah diterbitkannya polis baru hasil restrukturisasi atas polis lama. Sampai dengan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, proses restrukturisasi tersebut masih belum selesai.

On April 30, 2021, there was a Joint Agreement No. 88/KP.605/IV/2021 between PT TWC and PT Asuransi Jiwasraya (Persero) regarding Approval to Participate in Policy Restructuring. The parties agree that the restructuring process will be effective after the issuance of a new policy resulting from the restructuring of the old policy. As of the date the financial statements are authorized to be issued, the restructuring process has not yet been completed.

31. Liabilitas Imbalan Kerja

31. Employee Benefits Liabilities

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* oleh aktuaris independen tersebut di atas, masing-masing berdasarkan laporannya pada tanggal 24 Februari 2022 dan 5 Februari 2021.

The employee benefits liabilities as of December 31, 2021 and 2020 were calculated using the *projected-unit-credit* method by the independent actuaries, based on its reports dated February 24, 2022 and February 5, 2021, respectively.

	2021 Rp	2020 Rp	
Tunjangan Hari Tua	123,415,567	110,342,553	Pension
Tunjangan Perumahan	16,134,616	20,375,493	Housing Allowance
Penghargaan Pengabdian	23,545,221	23,612,467	Service Award
Kesehatan Pensiun	152,856,920	130,684,520	Retirement Health
Program Pensiun	1,495,938,913	1,403,164,714	Retirement Program
Program Imbalan Pascakerja	409,517,251	435,271,852	Post-Employment Rewards Program
Program Imbalan Jangka Panjang Lainnya	54,356,618	47,565,919	Other Long Term Rewards Programs
Lain-lain (Catatan 47.b AP II)	--	40,079,000	Others (Note 47.b AP II)
Total	2,275,765,106	2,211,096,518	Total

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions used in determining expenses and liabilities are as follows:

	2021	2020	
Tingkat Diskonto	3.40% - 7.55%	3.64% - 8.20%	Discount Rate
Tingkat Mortalita	TMI IV 2019	TMI IV 2019	Mortality Rate
Tingkat Cacat	1%	1%	Disability Rate
Metode Aktuarial	<i>Projected Unit Credit</i>		Actuarial Method
Umur Pensiun	56 Tahun/Years	56 Tahun/Years	Retirement Rate
Tingkat Mengundurkan Diri	5% pada usia 20 tahun, menurun secara linear sampai dengan 0% pada usia pensiun normal/ 5% for employees with ages 20 years old, decreasing linearly to 0% at age of normal		Resignation Rate

a. Tunjangan Hari Tua

Tunjangan hari tua diberikan kepada karyawan yang diberhentikan dan janda/duda dari karyawan yang meninggal dunia.

a. Retirement Allowance

Retirement allowance are given to employees who are dismissed and to widows/widowers of employees who die.

	2021 Rp	2020 Rp	
Nilai Kini Liabilitas	564,948,557	586,150,167	Present Value of Liabilities
Nilai Wajar Aset Program	(441,532,990)	(475,807,614)	Fair Value of Plan Assets
Total	123,415,567	110,342,553	Total

Nilai kini liabilitas dan nilai wajar aset program pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

The present value of liabilities and fair value of plan assets as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021	2020	
	Rp	Rp	
Saldo Awal	586,150,167	566,958,296	<i>Beginning Balance</i>
Biaya Jasa Kini	36,191,929	31,904,211	<i>Current Service Cost</i>
Biaya Bunga	36,268,755	40,723,833	<i>Interest Cost</i>
Iuran Peserta Program	6,426,054	6,255,234	<i>Plan Participant's Contribution</i>
Pembayaran Imbalan	(73,247,154)	(62,236,779)	<i>Benefits Paid</i>
(Kerugian)/Keuntungan Aktuarial	(26,841,194)	2,545,372	<i>Actuarial Gain/ (Loss)</i>
Saldo Akhir	564,948,557	586,150,167	<i>Ending Balance</i>

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of fair value of plan assets is as follows:

	2021	2020	
	Rp	Rp	
Saldo Awal	475,807,614	487,111,793	<i>Beginning Balance</i>
Iuran Peserta Program	6,426,054	6,255,233	<i>Plan Participant's Contribution</i>
Iuran Pemberi Kerja	23,299,071	40,169,334	<i>Employer Contribution</i>
Imbal Hasil Aset Program	29,967,076	36,419,631	<i>Program Asset Return</i>
Pembayaran Imbalan	(73,247,154)	(62,236,779)	<i>Rewards Payment</i>
Kerugian/(Keuntungan) Aktuarial	(20,719,671)	(31,911,598)	<i>Actuarial Gain/ (Loss)</i>
Saldo Akhir	441,532,990	475,807,614	<i>Ending Balance</i>

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2021	2020	
	Rp	Rp	
Biaya Jasa Kini	36,191,929	31,904,211	<i>Current Service Cost</i>
Biaya Bunga	36,268,755	40,723,833	<i>Interest Cost</i>
Ekspektasi Hasil Program	(29,967,076)	(36,419,632)	<i>Expectations Plan Assets</i>
Total	42,493,608	36,208,412	<i>Total</i>

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2021	2020	
	Rp	Rp	
Saldo Awal	110,342,553	79,846,505	<i>Beginning Balance</i>
Beban yang Diakui dalam Laba Rugi	42,493,608	36,208,412	<i>Expense Recognized in Profit or Loss</i>
Beban (Penghasilan) yang Diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	(6,121,523)	34,456,970	<i>Expense (Income) recognized in Other Comprehensive Income</i>
Pembayaran	(23,299,071)	(40,169,334)	<i>Contribution</i>
Saldo Akhir	123,415,567	110,342,553	<i>Ending Balance</i>

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis on December 31, 2021 and 2020 are as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021 Rp	2020 Rp	
Asumsi Tingkat Diskonto			<i>Discount Rate Assumptions</i>
Jika Tingkat +1%	517,354,880	(43,596,596)	<i>If Rate +1%</i>
Jika Tingkat -1%	620,661,375	50,738,264	<i>If Rate -1%</i>
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			<i>Salary Increment Assumptions</i>
Jika Tingkat +1%	628,566,481	(58,842,215)	<i>If Rate +1%</i>
Jika Tingkat -1%	510,117,282	51,055,765	<i>If Rate -1%</i>

Komposisi pengelolaan dana atas aset ditempatkan adalah pada deposito berjangka, piutang pinjaman, reksadana, obligasi dan aset lainnya.

The composition of management of planned asset are on time deposits, loan receivables, mutual funds, bonds and other assets.

b. Tunjangan Perumahan

Sesuai ketentuan Grup, karyawan yang telah bekerja secara terus menerus selama 20 tahun diberikan tunjangan perumahan.

b. Housing allowance

Based on Groups provisions, employees who have worked continuously for 20 years are given a housing allowance.

Nilai kini liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

The present value of liabilities as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Nilai Kini Liabilitas	16,134,616	20,375,493	<i>Present Value of Liabilities</i>
Total	16,134,616	20,375,493	Total

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal	20,375,494	22,513,725	<i>Beginning Balance</i>
Biaya Jasa Kini	2,722,959	2,663,731	<i>Current Service Cost</i>
Biaya Bunga	986,174	1,349,347	<i>Interest Cost</i>
Pembayaran Imbalan	(7,878,514)	(8,059,055)	<i>Benefits Paid</i>
(Kerugian) / Keuntungan Aktuarial	(71,497)	1,907,745	<i>Actuarial Gain/ (Loss)</i>
Saldo Akhir	16,134,616	20,375,493	Ending Balance

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Biaya Jasa Kini	2,722,959	2,663,731	<i>Current Service Cost</i>
Biaya Bunga	986,175	1,349,347	<i>Interest Cost</i>
Total	3,709,134	4,013,078	Total

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal	20,375,493	22,513,726	<i>Beginning Balance</i>
Beban yang Diakui dalam Laba Rugi (Penghasilan) Beban yang diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	3,709,134	4,013,078	<i>Expenses Recognized in Profit and Loss (Income) Expenses Recognized in Other Comprehensive Income</i>
Pembayaran	(71,497)	1,907,745	<i>Contribution</i>
Saldo Akhir	16,134,616	20,375,493	<i>Ending Balance</i>

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis on December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Asumsi Tingkat Diskonto			<i>Discount Rate Assumptions</i>
Jika Tingkat +1%	14,919,112	(20,373,392)	<i>If Rate +1%</i>
Jika Tingkat -1%	17,214,241	20,364,948	<i>If Rate -1%</i>
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			<i>Salary Increment Assumptions</i>
Jika Tingkat +1%	16,134,616	(20,364,948)	<i>If Rate +1%</i>
Jika Tingkat -1%	16,134,616	20,366,404	<i>If Rate -1%</i>

c. Penghargaan Pengabdian

Penghargaan pengabdian diberikan kepada pegawai yang mengabdikan terus menerus selama sekurang-kurangnya 25 tahun di Grup termasuk masa kerja pada masa penugasan di luar Grup yang diakui sebagai bagian dari pola karir serta pegawai yang mengakhiri masa tugas dan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun normal atau meninggal dunia.

c. Employee Appreciation

Employee appreciation are given to employees who serve continuously for at least 25 years in Group including the service period during outside assignments that are recognized as part of the career pattern and employees who end their term of service and are honorably terminated because they reach the normal retirement age or die.

Nilai kini liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

The present value of liabilities as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Nilai Kini Liabilitas	23,545,221	23,612,467	<i>Present Value of Liabilities</i>
Total	23,545,221	23,612,467	<i>Total</i>

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal	23,612,467	22,482,052	<i>Beginning Balance</i>
Biaya Jasa Kini	2,189,692	2,055,922	<i>Current Service Cost</i>
Biaya Bunga	1,491,534	1,656,402	<i>Interest Cost</i>
Pembayaran Imbalan (Kerugian)/Keuntungan Aktuarial	(2,026,927)	(1,374,583)	<i>Benefits Paid</i>
	(1,721,545)	(1,207,326)	<i>Actuarial Gain/ (Loss)</i>
Saldo Akhir	23,545,221	23,612,467	<i>Ending Balance</i>

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	<u>2021</u> Rp	<u>2020</u> Rp	
Biaya Jasa Kini	2,189,692	2,055,922	Current Service Cost
Biaya Bunga	1,491,534	1,656,402	Interest Cost
Total	<u>3,681,226</u>	<u>3,712,324</u>	Total

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	<u>2021</u> Rp	<u>2020</u> Rp	
Saldo Awal	23,612,467	22,482,052	Beginning Balance
Beban (Pendapatan) yang Diakui dalam Laba Rugi	3,681,226	3,712,323	Expense (Income) recognized in Profit or Loss
Beban yang diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	(1,721,545)	(1,207,325)	Expenses Recognized in Other Comprehensive Income
Pembayaran	(2,026,927)	(1,374,583)	Contribution
Saldo Akhir	<u>23,545,221</u>	<u>23,612,467</u>	Ending Balance

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis on December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2021</u> Rp	<u>2020</u> Rp	
Asumsi Tingkat Diskonto			Discount Rate Assumptions
Jika Tingkat +1%	21,786,169	(1,512,593)	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	25,566,691	1,733,399	If Rate -1%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			Salary Increment Assumptions
Jika Tingkat +1%	25,854,761	2,026,613	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	21,415,006	(1,804,818)	If Rate -1%

d. Kesehatan Pensiun

Nilai kini liabilitas dan nilai wajar aset program pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

d. Pension Health

The present value of liabilities and fair value of plan assets as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2021</u> Rp	<u>2020</u> Rp	
Nilai Kini Liabilitas	541,623,320	517,775,500	Present Value of Liabilities
Nilai Wajar Aset Program	(388,766,400)	(387,090,980)	Fair Value of Plan Assets
Total	<u>152,856,920</u>	<u>130,684,520</u>	Total

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021	2020	
	Rp	Rp	
Saldo Awal	517,775,500	437,164,700	<i>Beginning Balance</i>
Biaya Jasa Kini	4,050,018	3,857,152	<i>Current Service Cost</i>
Biaya Bunga	38,529,946	34,702,365	<i>Interest Cost</i>
Iuran Peserta Program	3,543,684	3,963,400	<i>Plan Participant's Contribution</i>
Pembayaran Imbalan	(8,085,769)	(6,770,268)	<i>Benefits Paid</i>
(Kerugian)/Keuntungan Aktuarial	(14,190,059)	44,858,151	<i>Actuarial Gain/ (Loss)</i>
Saldo Akhir	541,623,320	517,775,500	<i>Ending Balance</i>

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of fair value of plan assets is as follows:

	2021	2020	
	Rp	Rp	
Saldo Awal	387,090,980	378,983,479	<i>Beginning Balance</i>
Iuran Peserta Program	3,543,684	3,963,400	<i>Plan Participant's Contribution</i>
Imbal Hasil Aset Program	28,861,495	30,206,404	<i>Return on Plan Assets</i>
Pembayaran imbalan	(8,085,769)	(6,770,268)	<i>Benefits Paid</i>
(Kerugian)/Keuntungan Aktuarial	(22,643,990)	(19,292,034)	<i>Actuarial Gain/ (Loss)</i>
Saldo Akhir	388,766,400	387,090,981	<i>Ending Balance</i>

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2021	2020	
	Rp	Rp	
Biaya Jasa Kini	4,050,018	3,857,152	<i>Current Service Cost</i>
Biaya Bunga	38,529,946	34,702,365	<i>Interest Cost</i>
Ekspektasi Hasil Program	(28,861,495)	(30,206,403)	<i>Expectations Plan Assets</i>
Total	13,718,469	8,353,114	<i>Total</i>

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2021	2020	
	Rp	Rp	
Saldo Awal	130,684,520	58,181,220	<i>Beginning Balance</i>
Beban yang Diakui dalam Laba Rugi	13,718,469	8,353,114	<i>Expenses Recognized in Profit and Loss</i>
Beban yang diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	8,453,931	64,150,186	<i>Expenses Recognized in Other Comprehensive Income</i>
Saldo Akhir	152,856,920	130,684,520	<i>Ending Balance</i>

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis on December 31, 2021 and 2020 are as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021	2020	
	Rp	Rp	
Asumsi Tingkat Diskonto			<i>Discount Rate Assumptions</i>
Jika Tingkat +1%	454,878,025	(94,774,259)	<i>If Rate +1%</i>
Jika Tingkat -1%	689,332,615	106,285,472	<i>If Rate -1%</i>
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			<i>Salary Increment Assumptions</i>
Jika Tingkat +1%	566,721,871	2,494,850	<i>If Rate +1%</i>
Jika Tingkat -1%	541,307,543	(20,849,063)	<i>If Rate -1%</i>

e. Program Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas dan nilai wajar aset program pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

	2021	2020	
	Rp	Rp	
Nilai Kini Liabilitas	509,247,974	538,046,139	<i>Present Value of Liabilities</i>
Nilai Wajar Aset Program	(99,730,723)	(102,774,287)	<i>Fair Value of Plan Assets</i>
Total	409,517,251	435,271,852	Total

e. Post-Employment Rewards Program

The present value of liabilities and fair value of plan assets as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

	2021	2020	
	Rp	Rp	
Saldo Awal	538,046,139	555,052,367	<i>Beginning Balance</i>
Biaya Jasa Kini	44,066,116	33,681,885	<i>Current Service Cost</i>
Biaya Jasa Lalu	(36,486,818)	5,289	<i>Past Service Cost</i>
Biaya Bunga	35,390,771	21,450,586	<i>Interest Cost</i>
Dampak Mutasi Pegawai	(52,379,303)	--	<i>Impact of Employee Transfer</i>
Iuran Peserta Program	142,644	799,659	<i>Plan Participant's Contribution</i>
Imbalan Kerja yang Sudah Tercatat Bagi Pegawai Keluar	(4,437,820)	(17,979,778)	<i>Recorded Employee Benefits for Exiting Employees</i>
<i>Settlement Asset</i>	--	744,148	<i>Settlement Asset</i>
Pembayaran Imbalan (Kerugian)/Keuntungan Aktuarial	(33,829,377)	(51,143,243)	<i>Benefits Paid</i>
	18,735,622	(4,564,774)	<i>Actuarial Gain/ (Loss)</i>
Saldo Akhir	509,247,974	538,046,139	Ending Balance

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of fair value of plan assets is as follows:

	2021	2020	
	Rp	Rp	
Saldo Awal	102,774,287	110,854,186	<i>Beginning Balance</i>
Iuran Peserta Program	3,208,986	2,398,320	<i>Plan Participant's Contribution</i>
Iuran Pemberi Kerja	13,532,387	19,134,239	<i>Employer Contribution</i>
Imbal Hasil Aset Program	4,902,942	(10,422,495)	<i>Program Asset Return</i>
Pembayaran Imbalan	(16,667,294)	(16,484,000)	<i>Benefit Paid</i>
Kerugian/(Keuntungan) Aktuarial	(8,020,585)	(2,705,963)	<i>Actuarial Gain/ (Loss)</i>
Saldo Akhir	99,730,723	102,774,287	Ending Balance

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	<u>2021</u> Rp	<u>2020</u> Rp	
Biaya Jasa Kini	44,227,191	33,681,885	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	(37,276,629)	(6,359,619)	Past Service Cost
Biaya Bunga	35,635,728	25,600,501	Interest Cost
Selisih Imbalan Pascakerja	(1,455,896)	(46,134,301)	Difference in Post-Employment Benefits
Total	<u>41,130,394</u>	<u>6,788,466</u>	Total

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	<u>2021</u> Rp	<u>2020</u> Rp	
Saldo Awal	435,271,853	485,007,863	Beginning Balance
Dampak Mutasi Pegawai	(42,559,902)	--	Impact of Employee Transfer
Beban yang Diakui dalam Laba Rugi	41,461,095	6,788,465	Expenses Recognized in Profit and Loss
Beban yang Diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	16,294,134	(202,482)	Expenses Recognized in Other Comprehensive Income
Iuran Pemberi Kerja	(12,406,264)	(17,724,000)	Employer Contribution
Pembayaran Manfaat	(28,543,665)	(38,597,994)	Benefit Paid
Saldo Akhir	<u>409,517,251</u>	<u>435,271,852</u>	Ending Balance

f. Program Pensiun

Nilai kini liabilitas dan nilai wajar aset program pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

f. Retirement Program

The present value of liabilities and fair value of plan assets as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2021</u> Rp	<u>2020</u> Rp	
Nilai Kini Liabilitas	3,413,090,372	3,480,483,207	Present Value of Liabilities
Nilai Wajar Aset Program	(1,917,151,459)	(2,077,318,493)	Fair Value of Plan Assets
Total	<u>1,495,938,913</u>	<u>1,403,164,714</u>	Total

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

	<u>2021</u> Rp	<u>2020</u> Rp	
Saldo Awal	3,480,483,207	2,546,615,053	Beginning Balance
Biaya Jasa Kini	37,813,357	30,296,211	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	(9,594,821)	(1,635,014)	Past Service Cost
Biaya Bunga	251,505,173	196,423,735	Interest Cost
Iuran Peserta Program	2,256,004	2,425,756	Plan Participant's Contribution
Pembayaran Imbalan	(229,267,634)	(105,182,507)	Benefits Paid
(Kerugian)/Keuntungan Aktuarial	(120,104,914)	811,539,973	Actuarial Gain/ (Loss)
Saldo Akhir	<u>3,413,090,372</u>	<u>3,480,483,207</u>	Ending Balance

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of fair value of plan assets is as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021	2020	
	Rp	Rp	
Saldo Awal	2,077,318,493	2,180,912,377	<i>Beginning Balance</i>
Iuran Peserta Program	3,538,310	3,829,756	<i>Plan Participant's Contribution</i>
Iuran Pemberi Kerja	48,087,767	22,414,340	<i>Employer Contribution</i>
Imbal Hasil Aset Program	120,324,377	171,521,957	<i>Program Asset Return</i>
Pembayaran Imbalan	(224,716,264)	(218,033,201)	<i>Rewards Payment</i>
Kerugian/(Keuntungan) Aktuarial	(107,401,224)	(83,326,736)	<i>Actuarial Gain/(Loss)</i>
Saldo Akhir	1,917,151,459	2,077,318,493	<i>Ending Balance</i>

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2021	2020	
	Rp	Rp	
Biaya Jasa Kini	37,810,652	30,293,507	<i>Current Service Cost</i>
Biaya Jasa Lalu	87,294,087	92,650,892	<i>Past Service Cost</i>
Settle kewajiban	(1,282,306)	(1,404,000)	<i>Settle obligations</i>
Biaya Bunga	154,139,232	12,126,273	<i>Interest Cost</i>
Ekspektasi Hasil Program	(148,034,046)	(77,402,957)	<i>Expectations Plan Assets</i>
Total	129,927,619	56,263,715	<i>Total</i>

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2021	2020	
	Rp	Rp	
Saldo Awal	1,403,164,714	480,725,538	<i>Beginning Balance</i>
Beban yang Diakui dalam Laba Rugi	129,927,618	136,831,242	<i>Expenses Recognized in Profit and Loss</i>
Beban yang Diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	9,417,943	811,699,629	<i>Expenses Recognized in Other Comprehensive Income</i>
Pembayaran Manfaat	(19,465,987)	(9,002,000)	<i>Benefit Paid</i>
Iuran Pemberi Kerja	(27,105,375)	(17,089,695)	<i>Employer Contribution</i>
Saldo Akhir	1,495,938,913	1,403,164,714	<i>Ending Balance</i>

Nilai kini liabilitas dan nilai wajar aset program pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

The present value of liabilities and fair value of plan assets as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021	2020	
	Rp	Rp	
Asumsi Tingkat Diskonto			<i>Discount Rate Assumptions</i>
Jika Tingkat +1%	2,985,252,697	1,616,561,682	<i>If Rate +1%</i>
Jika Tingkat -1%	3,661,818,663	2,332,552,904	<i>If Rate -1%</i>
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			<i>Salary Increment Assumptions</i>
Jika Tingkat +1%	1,417,807,360	66,720,187	<i>If Rate +1%</i>
Jika Tingkat -1%	1,370,063,462	12,148,170	<i>If Rate -1%</i>

g. Program Imbalan Jangka Panjang Lainnya

Nilai kini liabilitas dan nilai wajar aset program pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

g. Other Long Term Rewards Programs

The present value of liabilities and fair value of plan assets as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021 Rp	2020 Rp	
Nilai Kini Liabilitas	54,356,618	47,565,919	Present Value of Liabilities
Total	54,356,618	47,565,919	Total

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal	47,565,919	41,298,917	Beginning Balance
Biaya Jasa Kini	11,351,607	5,459,000	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	154,458	--	Past Service Cost
Biaya Bunga	3,534,615	3,085,000	Interest Cost
Pembayaran Imbalan	(3,482,598)	(2,617,998)	Benefits Paid
(Kerugian)/Keuntungan Aktuarial	(4,767,383)	341,000	Actuarial Gain/ (Loss)
Saldo Akhir	54,356,618	47,565,919	Ending Balance

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Biaya Jasa Kini	11,351,607	5,459,000	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	154,458	--	Past Service Cost
Biaya Bunga	3,534,615	3,085,000	Interest Cost
Kerugian/(Keuntungan) Aktuarial	(4,767,383)	341,000	Actuarial Gain/ (Loss)
Saldo Akhir	10,273,297	8,885,000	Ending Balance

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal	47,565,919	41,298,917	Beginning Balance
Beban yang Diakui dalam Laba Rugi	10,273,297	8,885,000	Expenses Recognized in Profit and Loss
Pembayaran Manfaat	(3,482,598)	(2,617,998)	Benefit Paid
Saldo Akhir	54,356,618	47,565,919	Ending Balance

Nilai kini liabilitas dan nilai wajar aset program pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

The present value of liabilities and fair value of plan assets as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Asumsi Tingkat Diskonto			Discount Rate Assumptions
Jika Tingkat +1%	45,515,000	163,638,960	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	51,281,000	179,635,753	If Rate -1%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			Salary Increment Assumptions
Jika Tingkat +1%	--	--	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	--	--	If Rate -1%

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis dibawah ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan dan semua asumsi lain akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Salaries Risk

The present value of the defined benefit obligation is calculated by reference to the salary of the future program participants. Thus, the salary increase program participants will enhance the program's liabilities.

Significant actuarial assumption for the determination of the defined benefit obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible change of the respective assumption occur at the end of the reporting period, while holding all other assumption constant.

32. Modal Saham

32. Capital Stock

2021				
Pemegang Saham/ Shareholder	Jumlah Lembar Saham/ Total Shares	Nilai Nominal per Lembar Saham/ Par Value per Share Rp	Jumlah Nilai Saham/ Total Share Value Rp	Persentase Kepemilikan Saham/ Percentage of Ownership %
Negara Republik Indonesia	65,164,367	1,000	<u>65,164,367,000</u>	100%
2020				
Pemegang Saham/ Shareholder	Jumlah Lembar Saham/ Total Shares	Nilai Nominal per Lembar Saham/ Par Value per Share Rp	Jumlah Nilai Saham/ Total Share Value Rp	Persentase Kepemilikan Saham/ Percentage of Ownership %
Negara Republik Indonesia	13,000	1,000	<u>13,000,000</u>	100%

Rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir tahun adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the number of outstanding shares at the beginning and the end of the year is as follows:

	Lembar Saham/ Shares		
	2021	2020	
Saldo Awal	13,000	13,000	Beginning Balance
Penambahan	65,151,367	--	Addition
Saldo Akhir	<u>65,164,367</u>	<u>13,000</u>	Ending Balance

Berdasarkan Akta No.65 tanggal 15 Desember 2021 oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta telah diputuskan:

- a) Menyetujui Peningkatan Modal Dasar Perusahaan menjadi sejumlah Rp260.000.000.000 yang terbagi atas 260.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000;

Based on Deed No.65 dated December 15, 2021 by Notary Desman, S.H., M.Hum., Notary in Jakarta has been decided:

- a) Approved the increase in the Company's Authorized Capital to Rp260,000,000, which is divided into 260,000 shares with a nominal value of Rp1,000;

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- b) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp65.164.367.000 oleh Negara Republik Indonesia.

Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0076120.AH.01.02. TAHUN 2021.

- b) The issued and fully paid-up capital of Rp65,164,367,000,000 by the Republic of Indonesia.

The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-0076120.AH.01.02. YEAR 2021.

33. Tambahan Modal Disetor

Seperti yang telah di ungkapkan pada Catatan 4, Perusahaan telah melakukan kombinasi bisnis atau akuisisi dengan AP I, AP II, HIN, Sarinah dan TWC yang merupakan entitas dalam pengendalian yang sama dengan Perusahaan, yaitu entitas di bawah pengendali Pemerintah Republik Indonesia. Kombinasi bisnis ini diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK 38: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

Selisih antara bagian kepemilikan Perusahaan atas aset bersih masing-masing entitas sepengendali tersebut dengan biaya perolehan investasi dicatat sebagai Selisih Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali dengan rincian sebagai berikut:

33. Additional Paid in Capital

As stated in Note 4, the Company has entered into a business combination or acquisition with AP I, AP II, HIN, Sarinah and TWC which are entities under the same control as the Company, namely entities under the control of the Government of the Republic of Indonesia. This business combination is recognized at carrying amount based on the pooling of interest method in accordance with PSAK 38: Business Combinations of Entities Under Common Control.

The difference between the Company's ownership interest in the net assets of each entity under common control and the acquisition cost of the investment is recorded as difference between business combinations of entities under common control with details as follows:

	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost Rp	Nilai Aset Bersih/ Net Asset Value Rp	Total/ Total Rp
PT Angkasa Pura I	16,750,717,972	10,060,881,637	6,689,836,336
PT Angkasa Pura II	36,200,821,092	17,509,402,904	18,691,418,188
PT Hotel Indonesia Nataour	8,736,217,019	8,190,986,543	545,230,476
PT Sarinah	448,527,127	76,114,969	372,412,158
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	3,015,083,575	548,004,680	2,467,078,895
Total	65,151,366,785	36,385,390,733	28,765,976,052

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

34. Kepentingan Non Pengendali

34. Non-controlling Interest

	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Akuisisi Saham Entitas Sepengendali/ Acquisition of Under Common Entities Shares Rp	Laba Tahun Berjalan/ Current Year Profit Rp	Rugi Kprehensif Tahun Berjalan/ Total Comprehensive Loss for the Year Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
PT Angkasa Pura I dan Entitas Anak	--	241,268	--	--	241,268
PT Angkasa Pura II dan Entitas Anak	--	1,945,096	--	--	1,945,096
PT Hotel Indonesia Natour dan Entitas Anak	--	(784,049)	--	--	(784,049)
PT Sarinah dan Entitas Anak dan Entitas Anak	--	66,869	--	--	66,869
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dan Entitas Anak	--	--	--	--	--
	--	226,219	--	--	226,219
Total	--	1,695,403	--	--	1,695,403

35. Pendapatan

35. Revenues

a. Berdasarkan Jenis

c. By Type

	2021 Rp	2020 Rp	
Aviasi			Aviation
Aeronautika	3,244,932,590	3,985,242,935	Aeronautical
Non Aeronautika	5,189,295,659	5,150,707,974	Non Aeronautical
Kargo	169,384,038	326,884,293	Cargo
Sub Total	8,603,612,287	9,462,835,202	Sub Total
Perhotelan			Hospitality
Jasa Hotel	55,502,329	221,070,647	Hotel Services
Jasa Non Hotel	30,547,840	12,793,850	Non Hotel Services
Sub Total	86,050,169	233,864,497	Sub Total
Pariwisata			Tourism
Taman Nasional	36,415,553	77,645,110	Heritage Park
Fasilitas Pariwisata	33,556,889	19,858,039	Tourism Amenities
Atraksi	1,080,736	2,893,638	Attraction
Taman Budaya	17,008,860	--	Cultural Park
Sub Total	88,062,038	100,396,787	Sub Total
Retail			Retail
Penjualan Ritel	8,662,256	21,148,490	Retail Sales
Jasa Money Changer	604,623,008	247,639,062	Money Changer Service
Perdagangan (Ekspor dan Import)	310,648,407	328,138,822	Trading (Ekspor and Import)
Property Management	31,175,419	45,611,089	Property Management
Sub Total	955,109,090	642,537,463	Sub Total
Proyek Pemetaan			Mapping Project
Lain-lain	--	19,737,003	Others
Sub Total	--	19,737,003	Sub Total
Total	9,732,833,584	10,459,370,952	Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

b. Berdasarkan Transaksi

d. By Transaction

	2021 Rp	2020 Rp	
Pihak Berelasi	2,157,252,280	2,172,614,620	Related Parties
Pihak Ketiga	7,575,581,304	8,286,756,332	Third Parties
Total	9,732,833,584	10,459,370,952	Total

36. Beban Pokok Pendapatan

36. Cost of Revenues

	2021 Rp	2020 Rp	
Aviasi			Aviation
Penyusutan (Catatan 17 dan 18)	3,775,318,665	3,321,904,024	Depreciation (Note 17 dan 18)
Pemeliharaan	886,423,369	1,048,620,975	Maintenance
Utilitas	642,547,562	798,042,907	Utilities
Jasa Alih Daya	589,517,132	630,637,547	Outsourcing Services
Groundhandling and Aircraft Handling Additional Note (AHAN)	531,595,000	679,851,378	Ground handling and Aircraft Handling Additional Note (AHAN)
Logistik	261,479,033	212,024,598	Logistic
Sewa	171,937,834	223,287,650	Rent
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 19)	70,226,641	138,055,911	Depreciation of Right of Use Assets (Note 19)
Lain-lain	744,079,057	703,491,394	Others
Subtotal	7,673,124,293	7,755,916,384	Subtotal
Perhotelan			Hospitality
Kamar	20,745,262	63,729,904	Room
Makanan dan Minuman	28,765,656	78,017,282	Food and Beverages
Lain-lain	9,172,693	4,943,655	Others
Subtotal	58,683,611	146,690,841	Subtotal
Pariwisata			Tourism
Taman Nasional	55,626,339	74,282,673	Heritage Park
Fasilitas Pariwisata	30,457,810	15,233,893	Tourism Amenities
Taman Budaya	28,655,548	--	Cultural Park
Atraksi	9,207,542	8,885,226	Attraction
Subtotal	123,947,239	98,401,792	Subtotal
Retail			Retail
Penukaran Uang	604,212,788	245,216,433	Money Changer
Ekspor dan Impor	288,060,309	305,546,052	Export and Import
Sewa	6,574,513	17,751,165	Rent
Barang Dagang	4,952,949	9,245,920	Merchandise
Lain-lain	964,739	601,305.40	Others
Subtotal	904,765,298	578,360,875	Subtotal
Proyek Pemetaan			Mapping Project
Pemetaan	--	16,054,816	Mapping
Penyusutan	--	1,382,842	Depreciation
Subtotal	--	17,437,658	Subtotal
Total	8,760,520,441	8,596,807,551	Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

37. Beban Pemasaran

37. Marketing Expenses

	2021 Rp	2020 Rp	
Pegawai	2,699,286,625	2,887,994,520	Employee
Promosi/Pemasaran	24,618,903	30,430,167	Promotion/Marketing
Lain-lain	--	6,008,992	Others
Total	2,723,905,528	2,924,433,679	Total

38. Beban Umum dan Administrasi

38. General and Administrative Expenses

	2021 Rp	2020 Rp	
Penurunan Nilai Piutang (Catatan 7 dan 8)	1,749,956,728	366,577,725	Impairment of Receivable (Notes 7 and 8)
Pajak	417,158,374	483,873,458	Tax
Imbalan Pascakerja dan Iuran Pensiun	399,774,743	272,450,978	Post-Employment Benefits and Pension Contributions
Gaji dan Tunjangan	312,071,801	368,928,313	Salaries and Allowances
Jasa Profesional	155,796,992	79,293,441	Professional Services
Asuransi	125,112,709	115,923,388	Insurance
Kantor	55,892,144	38,535,296	Office
Perjalanan Dinas dan Transportasi	38,863,964	67,399,055	Business Travel and Transportation
Pendidikan dan Pelatihan	36,970,507	35,273,726	Education and Training
Air, Listrik dan Gas	33,819,851	53,520,813	Water, Electricity and Gas
Aset Dibiayakan	30,157,967	4,373,339	Financed Assets
Pemakaian Persediaan	27,034,450	44,294,646	Inventory Usage
Collection fee	18,851,000	45,672,908	Collection Fee
Keamanan	16,689,923	35,154,561	Security
Pemeliharaan	16,264,923	29,642,939	Maintenance
Penyusutan (Catatan 17 dan 18)	8,590,019	11,410,248	Depreciation (Note 17 and 18)
Lain-lain	276,839,812	243,478,348	Others
Total	3,719,845,907	2,295,803,182	Total

39. Pendapatan Lain-Lain

39. Other Income

	2021 Rp	2020 Rp	
Pemulihan Cadangan Penurunan Nilai	79,656,930	3,999,875	Impairment Reserve Recovery
Keuntungan Modifikasi Kontrak Sewa	15,872,107	--	Gain on Lease Contract Modification
Laba Penjualan Aset Tetap	14,477,092	34,237,060	Gain on Sale of Fixed Assets
Denda	12,511,406	30,356,951	Penalty
Pendapatan atas Ganti Rugi Tenant	13,138,578	--	Income on Tenant Compensation
Pendapatan atas Pengelolaan Wisma Atlet	7,908,001	10,737,135	Income on Athlete Village Management
Pendapatan atas Penghapusan Utang	7,410,209	--	Income on Debt Elimination
Laba Selisih Kurs	6,259,261	41,105,570	Profit on Foreign Exchange
Klaim Asuransi	2,134,730	--	Insurance Claim
Settlement atas Perubahan Program Imbalan Kerja	443,445	4,869,520	Settlement of Changes in the Employee Benefits Program
Penyesuaian Pembayaran Tantiem	--	49,173,927	Tantiem Payment Adjustment
Kompensasi BOT	--	17,913,206	BOT Compensation
Dana Hibah Pemulihan Ekonomi Pariwisata	--	12,851,630	Tourism Economic Recovery Grant Fund
Restitusi Pajak	--	8,000,000	Tax Refund
Lain-lain	173,843,409	32,477,297	Others
Total	333,655,168	245,722,171	

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

40. Beban Lain-Lain

40. Other Expenses

	2021 Rp	2020 Rp	
Penghapusan PPN Masukan	61,440,975	--	Write off of VAT In
Beban TJSL	55,995,060	76,954,551	TJSL Expense
Beban Ganti Rugi Sewa	22,732,500	--	Rent Compensation Expense
Penurunan Nilai Aset Tetap	8,266,082	104,280,590	Impairment of Fixed Assets
Beban Asuransi Pensiunan	7,970,000	--	Retired Employees Insurance Expense
Sanksi Denda	6,594,731	4,765,480	Penalty Sanctions
Konsultan Holding	5,043,500	5,611,865	Holding Consultant
Beban dokter jaga	3,160,000	5,570,361	Doctor Expense
Sumbangan	948,724	4,925,513	Donation
Administrasi Provisi dan Bank	303,198	21,317	Provision and Bank Administration
Kerugian Instrumen Keuangan	--	22,876,953	Financial Instrument Losses
Lelang	--	2,627,795	Auction
Lain-lain	171,456,648	104,834,578	Others
Total	343,911,418	332,469,003	Total

41. Pendapatan Keuangan

41. Financial Income

	2021 Rp	2020 Rp	
Bunga Jasa Giro	46,235,336	75,630,721	Giro Service Interest
Bunga Deposito	27,295,758	185,456,019	Time Deposit Interest
Bunga Obligasi dan Reksadana	10,258,515	25,941,900	Bonds and Mutual Funds Interest
Bunga Pinjaman	131,793	17,127	Loan Interest
Total	83,921,402	287,045,767	Total

42. Beban Keuangan

42. Financial Expense

	2021 Rp	2020 Rp	
Bunga Bank dan Obligasi	2,709,597,982	2,343,115,080	Bank Loans and Bonds Interest
Beban Bunga Liabilitas Sewa	57,920,377	74,727,839	Interest on Lease Liabilities
Beban Administrasi Bank	10,352,850	6,987,164	Bank Administration Charges
Lain-lain	2,926,803	3,687,474	Others
Total	2,780,798,012	2,428,517,557	Total

43. Rugi Operasi yang Dihentikan

43. Loss of Discontinued Operations

Berdasarkan Akta Notaris No.189 tanggal 30 September 2021 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan pelepasan hak atas 79% kepemilikan saham HIN di PT Hotel Indonesia Properti kepada PT Wijaya Karya Realty dengan nilai akuisisi Rp1.755.999.882. Serta berdasarkan akta No.190 tanggal 30 September 2021 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan pelepasan hak atas 20% kepemilikan saham HIN di PT Hotel Indonesia Properti kepada PT Wijaya Karya Realty dengan nilai akuisisi Rp439.998.887.

Based on Notarial Deed No.189 dated September 30, 2021 from Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, in connection with the opening of the rights to 79% share ownership of HIN in PT Hotel Indonesia Properti to PT Wijaya Karya Realty with a value of acquisition of Rp1,755,999,882. And based on deed No.190 dated September 30, 2021 from Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, in connection with the disclosure of the rights to 20% ownership of HIN in PT Hotel Indonesia Properti to PT Wijaya Karya Realty with acquisition value Rp439,999,887.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021 Rp	
Pendapatan	58,035,287	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(36,758,330)	Cost of Revenues
Laba Kotor dari Operasi yang Dihentikan	21,276,957	Gross Profit from Discontinued Operations
Beban Usaha	(76,800,352)	Operating expenses
Rugi Usaha dari Operasi yang Dihentikan	(55,523,395)	Loss from Discontinued Operations
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(29,040,610)	Other Income (Expenses)
Rugi Sebelum Pajak dari Operasi yang Dihentikan	(84,564,005)	Loss Before Tax from Discontinued Operations
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	447,855	Income Tax Benefit (Expense)
Rugi Setelah Pajak dari Operasi yang Dihentikan	(84,116,150)	After-Tax Loss from Discontinued Operations
Pendapatan Komprehensif Lain	--	Other Comprehensive Income
Rugi Komprehensif Lain dari Operasi yang Dihentikan	(84,116,150)	Other Comprehensive Loss from Discontinued Operations

44. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

44. Transaction With Related Parties

a. Sifat Hubungan Pihak Berelasi

a. Nature of Relationship

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transaction
Pemerintah Republik Indonesia/ <i>The Government of The Republic of Indonesia</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pemegang Saham/ <i>Shareholders</i> Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Setoran Saham/ <i>Share Capital</i> Jasa Perbankan, Piutang Usaha, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pendapatan/ <i>Banking Services, Account Receivables, Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans, Revenues</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Jasa Perbankan, Piutang Usaha, Utang Usaha, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pendapatan/ <i>Banking Services, Account Receivables/ Banking Services, Account Receivables, Account Payables, Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans, Revenues</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Jasa Perbankan, Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Utang Usaha, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pendapatan/ <i>Banking Services, Account Receivables, Other Receivables, Account Payables, Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans, Revenues</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Jasa Perbankan, Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pendapatan/ <i>Banking Services, Account Receivables, Other Receivables, Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans, Revenues</i>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Jasa Perbankan, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pendapatan/ <i>Banking Services, Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans, Revenues</i>
PT Bank KB Bukopin Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Pendapatan/ <i>Revenues</i>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Jasa Perbankan, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/ <i>Banking Services, Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans</i>
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Jasa Perbankan/ <i>Banking Services</i>
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Piutang Usaha, Utang Usaha, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Account Payables, Revenues</i>
PT Citilink Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Piutang Usaha, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Piutang Usaha, Utang Usaha, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Account Payables, Revenues</i>
PT Aerofood Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Piutang Usaha, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT Pertamina Patra Niaga	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Other Receivables, Revenues</i>
PT Merpati Nusantara Airlines	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Piutang Usaha, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT Railink	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Piutang Usaha, Utang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Account Payables, Other Payables, Revenues</i>

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transaction
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan/ Account Receivables, Account Payables, Other Payables, Revenues
Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura (Kokapura)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Usaha/ Account Receivables, Account Payables
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan/ Account Receivables, Other Payables, Revenues
PT Propernas Griya Utama	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
PT Aero Wisata	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Pendapatan/ Account Receivables, Revenues
PT Telekomunikasi Seluler	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Usaha, Pendapatan/ Account Receivables, Account Payables, Revenues
PT Yapro Artha Perdana	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
PP KSO	Kerjasama Operasi/ Joint Operation	Piutang Usaha/ Account Receivables
PT Pertamina (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Pendapatan/ Account Receivables, Revenues
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
Perum LPPNPI	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Pendapatan/ Account Receivables, Revenues
PT Nindya Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Usaha, Utang Lain-lain, Beban Akrua/ Account Receivables, Account Payables, Other Payables, Accrued Expenses
PT Pelabuhan Listrik Negara (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
Perum DAMRI	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Usaha, Pendapatan/ Account Receivables, Account Payables, Revenues
PT Pertamina Bina Medika IHC	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Pendapatan/ Account Receivables, Revenues
PT Antam (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan/ Account Receivables, Other Payables, Revenues
PT Utama Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan/ Account Receivables, Account Payables, Other Payables, Revenues
PT ITDC Nusantara Utilitas	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
Kementerian Perhubungan/ Ministry of Transportation	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Lain-lain/ Account Receivables, Other Payables
PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
PT Aero Asia Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
PT Sariarthamas Hotel Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Percetakan Negara RI (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
Perum Produksi Film Negara (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Jasa Raharja Putera	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
Kementerian Sekretariat Negara RI/ Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Manajemen CBT Nusantara	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Pelita Air Service (PAS)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha, Pendapatan/ Account Payables, Revenues

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transaction
Koperasi Karyawan PT Taman Wisata Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko PT PP Urban	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Aero System Indonesia Konstruksi	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Asuransi Jasa Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan/ <i>Account Payables, Other Payables, Revenues</i>
PT Garuda Daya Pratama Sejahtera	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Sucofindo (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Amarta Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan/ <i>Account Payables, Other Payables, Revenues</i>
PT Yodya Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha, Utang Lain-lain/ <i>Account Payables, Other Payables</i>
PT Kimia Farma Apotek	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PDAM Tirta Mangutama	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
BPJS Kesehatan	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Taspen (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Jasa Raharja (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha, Utang Lain-lain/ <i>Account Payables, Other Payables</i>
BPJS Ketenagakerjaan	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Usaha, Pendapatan/ <i>Account Payables, Revenues</i>
PT PP (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Lain-lain/ <i>Other Payables</i>
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Lain-lain/ <i>Other Payables</i>
PT Istaka Karya (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Lain-lain/ <i>Other Payables</i>
PT Surveyor Indonesia (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Lain-lain/ <i>Other Payables</i>
PT Kadomas Aviasindo	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Lain-lain/ <i>Other Payables</i>
PT Pratama Persada Airborne	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Beban Akrual/ <i>Accrued Expenses</i>
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Beban Akrual/ <i>Accrued Expenses</i>
PT Inaca	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Beban Akrual/ <i>Accrued Expenses</i> , Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/ <i>Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans</i>
PT Indonesia Infrastructure Finance Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/ <i>Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans</i>
PT PPA (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/ <i>Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans</i>
PT PPA Finance	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/ <i>Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans</i>
PT PPA (Persero)-PPAI	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/ <i>Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans</i>
PT Pos Logistik Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Pendapatan/ <i>Revenues</i>
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/ <i>Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans</i>
PT Purantara Mitra Angkasa Dua	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Pendapatan/ <i>Revenues</i>

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transaction
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Pendapatan/ Revenues
PT Wijaya Karya Realty	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Pendapatan/ Revenues
PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Pendapatan/ Revenues
PT Pupuk Kalimantan Timur	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Pendapatan/ Revenues
PT Badak Natural Gas Liquefaction	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Pendapatan/ Revenues
PT Aerotrans Services Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Pendapatan/ Revenues

b. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi.

b. Transaction with Related Parties

In the normal course of business, Group entered into transactions with related parties.

	2021 Rp	2020 Rp	
Bank			Cash in Bank
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	702,183,977	929,283,100	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	546,978,977	121,381,915	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	545,834,425	864,729,256	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	373,806,488	394,154,536	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			PT Bank Syariah Indonesia Tbk
(d/h PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah Tbk)	217,629,658	90,214,563	(formerly PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRISyariah Tbk)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	--	35	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
	<u>2,386,433,525</u>	<u>2,399,763,405</u>	
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	163,536,633	10,111,329	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18,834,424	8,505,225	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,061,532	1,302,873	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			PT Bank Syariah Indonesia Tbk
(d/h PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah Tbk)	314,359	--	(formerly PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRISyariah Tbk)
	<u>183,746,948</u>	<u>19,919,427</u>	
Dolar Singapura			Singapore Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	119,270	116,724	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	27,637	1,386,939	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	<u>146,907</u>	<u>1,503,663</u>	
Euro			Euro
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21,270	129,640	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	<u>21,270</u>	<u>129,640</u>	
Subtotal	<u>2,570,348,650</u>	<u>2,421,316,135</u>	Subtotal
Deposito Berjangka			Time Deposits
Pihak Berelasi			Related Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	369,461,000	285,941,605	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	176,500,000	659,500,000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	161,084,000	75,281,912	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	112,800,000	36,500,000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	5,000,000	20,000,000	PT Bank Mandiri Taspen
	<u>824,845,000</u>	<u>1,077,223,517</u>	
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	246,837,500	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Total Kas dan Setara Kas	<u>3,395,193,650</u>	<u>3,745,377,152</u>	Total Cash and Cash Equivalent
Persentase Terhadap Total Aset	<u>3.59%</u>	<u>3.83%</u>	Percentage to Total Assets

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	<u>2021</u> <u>Rp</u>	<u>2020</u> <u>Rp</u>	
Piutang Usaha			Account Receivables
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1,502,545,845	1,145,753,905	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Citilink Indonesia	265,221,868	211,614,909	PT Citilink Indonesia
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk	160,944,260	91,905,533	PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk
PT Aerofood Indonesia	116,506,799	72,734,143	PT Aerofood Indonesia
PT Pertamina Patra Niaga	62,741,672	--	PT Pertamina Patra Niaga
PT Merpati Nusantara Airlines	56,460,446	60,529,920	PT Merpati Nusantara Airlines
PT Railink	22,530,000	20,439,305	PT Railink
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	10,310,558	8,407,649	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	7,126,311	1,800,183	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,023,333	8,437,198	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura (Kokapura)	4,441,278	4,768,369	Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura (Kokapura)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	4,022,083	--	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Propernas Griya Utama	2,405,306	2,405,306	PT Propernas Griya Utama
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,977,506	2,009,621	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Aero Wisata	1,965,510	--	PT Aero Wisata
PT Telekomunikasi Seluler	1,907,484	2,828,321	PT Telekomunikasi Seluler
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,886,617	3,561,226	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Yapro Artha Perdana	1,858,833	--	PT Yapro Artha Perdana
Instansi Pemerintah	1,749,324	1,325,517	Instansi Pemerintah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,737,834	--	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PP KSO	1,418,019	5,087,107	PP KSO
PT Pertamina (Persero)	1,330,723	15,457,005	PT Pertamina (Persero)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1,122,217	--	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Perum LPPNPI	827,418	1,167,443	Perum LPPNPI
PT Nindya Karya (Persero)	810,865	--	PT Nindya Karya (Persero)
PT Pelabuhan Listrik Negara (Persero)	706,915	--	PT Pelabuhan Listrik Negara (Persero)
Perum DAMRI	595,313	--	Perum DAMRI
PT Pertamina Bina Medika IHC	570,048	--	PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Antam (Persero) Tbk	496,065	--	PT Antam (Persero) Tbk
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat	463,549	--	PT Bandarudara Internasional Jawa Barat
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	376,994	--	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Utama Karya (Persero)	361,214	--	PT Utama Karya (Persero)
PT ITDC Nusantara Utilitas	306,130	--	PT ITDC Nusantara Utilitas
Kementerian Perhubungan	279,382	--	Kementerian Perhubungan
PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk	255,082	--	PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk	126,314	--	PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	15,750	15,750	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Aero Asia Tbk	--	16,424,701	PT Aero Asia Tbk
Lain-lain	49,449,130	32,972,115	Others
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1,716,222,260)	(301,454,649)	Allowance for Impairment Losses
Total Piutang Usaha	576,651,735	1,408,190,577	Total Account Receivables
Persentase Terhadap Total Aset	0.61%	1.44%	Percentage to Total Assets
	<u>2021</u> <u>Rp</u>	<u>2020</u> <u>Rp</u>	
Piutang Lain-lain			Other Receivables
PT Sariarthamas Hotel Indonesia	15,000,000	--	PT Sariarthamas Hotel Indonesia
PT Percetakan Negara RI (Persero)	9,647,587	--	PT Percetakan Negara RI (Persero)
Perum Produksi Film Negara (Persero)	4,545,455	5,000,000	Perum Produksi Film Negara (Persero)
PT Jasa Raharja Putera	2,275,000	2,775,000	PT Jasa Raharja Putera
Kementerian Sekretariat Negara RI	2,284,282	--	Kementerian Sekretariat Negara RI
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	857,469	857,469	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	87,719	87,719	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Pertamina Patra Niaga	55,000	55,000	PT Pertamina Patra Niaga
PT Manajemen CBT Nusantara	--	441,332	PT Manajemen CBT Nusantara
Lain-lain	26,119,000	16,483,764	Others
Total Piutang Lain-lain	60,871,512	25,700,284	Total Other Receivables
Persentase Terhadap Total Aset	0.06%	0.03%	Percentage to Total Assets

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021 Rp	2020 Rp	
Utang Usaha			Account Payables
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	29,651,818	--	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Utama Karya (Persero)	22,229,299	--	PT Utama Karya (Persero)
PT Waskita Karya (Persero)	18,285,219	--	PT Waskita Karya (Persero)
PT Nindya Karya	17,516,886	--	PT Nindya Karya
PT Pelita Air Service (PAS)	14,648,505	--	PT Pelita Air Service (PAS)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	13,643,000	4,154,891	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Koperasi Karyawan PT Taman Wisata Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko	8,145,167	163,180	Koperasi Karyawan PT Taman Wisata Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko
PT PP Urban	7,200,000	17,922,500	PT PP Urban
PT Aero System Indonesia Konstruksi	6,992,000	9,009,248	PT Aero System Indonesia Konstruksi
PT Asuransi Jasa Indonesia	6,794,714	--	PT Asuransi Jasa Indonesia
PT Garuda Daya Pratama Sejahtera	6,561,000	--	PT Garuda Daya Pratama Sejahtera
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	7,035,258	7,277,379	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Sucofindo (Persero)	3,215,727	--	PT Sucofindo (Persero)
Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura (Kokapura)	2,874,612	--	Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura (Kokapura)
PT Amarta Karya (Persero)	2,550,047	--	PT Amarta Karya (Persero)
PT Garuda Maintenance Facility Aerosia Tbk	1,718,000	33,068,482	PT Garuda Maintenance Facility Aerosia Tbk
PT Yodya Karya (Persero)	1,145,373	--	PT Yodya Karya (Persero)
PT Kimia Farma Apotek	972,055	--	PT Kimia Farma Apotek
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	592,900	--	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	514,364	514,364	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
PDAM Tirta Mangutama	293,412	--	PDAM Tirta Mangutama
BPJS Kesehatan	254,917	--	BPJS Kesehatan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	200,000	--	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Pos Indonesia (Persero)	109,940	--	PT Pos Indonesia (Persero)
PT Taspen (Persero)	109,451	--	PT Taspen (Persero)
Perum DAMRI	109,099	--	Perum DAMRI
PT Telekomunikasi Seluler	108,165	--	PT Telekomunikasi Seluler
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	97,200	31,631	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
PT Jasa Raharja (Persero)	21,845	164,852	PT Jasa Raharja (Persero)
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	--	7,697,557	PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
BPJS Ketenagakerjaan	--	737,711	BPJS Ketenagakerjaan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	--	181,189	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Lain-lain	10,517,550	5,103,262	Others
Total Utang Usaha	184,107,523	86,026,246	Total Account Payables
Persentase Terhadap Total Liabilitas	0.32%	0.16%	Percentage to Total Liabilities
	2021 Rp	2020 Rp	
Utang Lain-lain			Other Payables
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	287,793,189	287,793,189	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	159,206,571	168,707,735	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	147,210,722	69,882,940	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk	91,530,957	97,154,418	PT PP (Persero) Tbk
PT Nindya Karya	67,303,892	60,190,778	PT Nindya Karya
PT Utama Karya (Persero)	37,323,376	31,038,731	PT Utama Karya (Persero)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	15,525,233	--	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	15,302,649	--	PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
PT Istaka Karya (Persero) Tbk	15,073,024	13,271,130	PT Istaka Karya (Persero) Tbk
PT Amarta Karya (Persero)	11,440,098	36,374,351	PT Amarta Karya (Persero)
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	5,945,374	--	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
PT Yodya Karya (Persero) Tbk	4,444,509	5,816,923	PT Yodya Karya (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2,734,937	--	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk	2,543,202	3,632,986	PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk
PT Surveyor Indonesia (Persero)	915,372	1,571,092	PT Surveyor Indonesia (Persero)
PT Kadomas Aviasindo	430,091	--	PT Kadomas Aviasindo
Lain-lain	1,476,648	2,517,884	Lain-lain
Total Utang Lain-lain	866,199,845	777,952,157	Total Other Payables
Persentase Terhadap Total Liabilitas	1.48%	1.44%	Percentage to Total Liabilities

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Akrua			Accrued Expenses
PT Pratama Persada Airborne	654,890	568,100	PT Pratama Persada Airborne
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	650,776	--	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Inaca	24,000	--	PT Inaca
PT Nindya Karya (Persero)	--	628,859	PT Nindya Karya (Persero)
Total Beban Akrua	1,329,666	1,196,959	Total Accrued Expenses
Persentase Terhadap Total Liabilitas	0.00%	0.00%	Percentage to Total Liabilities
Utang Bank Jangka Pendek			Short-Term Bank Loan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	801,596,344	402,909,464	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRISyariah Tbk)	39,560,000	20,000,000	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRISyariah Tbk)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	381,089,500	46,761,232	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total Utang Bank Jangka Pendek	1,222,245,844	469,670,696	Total Short-Term Bank Loan
Persentase Terhadap Total Liabilitas	2.10%	0.87%	Percentage to Total Liabilities
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya			Bank Loan and Other Financial Institutions
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7,143,243,825	6,977,564,340	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	5,195,415,691	5,266,586,275	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,756,793,000	3,997,422,851	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRISyariah Tbk)	2,189,811,222	2,240,416,209	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRISyariah Tbk)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,597,170,707	696,766,083	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,461,332,216	1,018,994,081	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1,297,941,000	1,309,265,110	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Indonesia Infrastructure Finance Tbk	1,138,053,737	857,351,863	PT Indonesia Infrastructure Finance Tbk
PT PPA (Persero)	--	131,540,007	PT PPA (Persero)
Total	24,779,761,398	22,495,906,819	Total
Persentase Terhadap Total Liabilitas	42.48%	41.55%	Percentage to Total Liabilities

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021 Rp	2020 Rp	
Pendapatan Usaha			Revenues
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	967,111,870	1,061,745,621	<i>PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Citilink Indonesia	637,848,962	446,242,354	<i>PT Citilink Indonesia</i>
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk	98,143,571	117,092,015	<i>PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk</i>
PT Pertamina (Persero)	96,728,572	155,229,885	<i>PT Pertamina (Persero)</i>
PT Aerofood Indonesia	54,075,856	27,334,622	<i>PT Aerofood Indonesia</i>
PT Pertamina Patra Niaga	53,242,932	5,911,555	<i>PT Pertamina Patra Niaga</i>
PT Pos Logistik Indonesia	39,271,312	--	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	38,942,567	22,536,884	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	42,378,991	19,825,549	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	32,059,378	25,154,443	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
Perum LPPNPI	28,022,297	13,099,654	<i>Perum LPPNPI</i>
PT Telekomunikasi Seluler	18,594,818	1,366,369	<i>PT Telekomunikasi Seluler</i>
PT Purantara Mitra Angkasa Dua	10,462,671	--	<i>PT Purantara Mitra Angkasa Dua</i>
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	4,761,157	4,399,297	<i>PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur</i>
PT Pertamina Bina Medika	3,719,654	3,436,951	<i>PT Pertamina Bina Medika</i>
PT Pelita Air Service (PAS)	2,502,395	3,079,577	<i>PT Pelita Air Service (PAS)</i>
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2,469,237	384,900	<i>PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Wijaya Karya Realty	2,288,520	--	<i>PT Wijaya Karya Realty</i>
Perum DAMRI	1,205,580	1,137,404	<i>Perum DAMRI</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	937,964	1,730,511	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</i>
PT PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	790,476	1,580,953	<i>PT PT Wijaya Karya (Persero) Tbk</i>
PT Pos Indonesia (Persero)	631,797	550,990	<i>PT Pos Indonesia (Persero)</i>
PT Hutama Karya (Persero)	397,091	1,860,677	<i>PT Hutama Karya (Persero)</i>
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	342,722	841,794	<i>PT Adhi Karya (Persero) Tbk</i>
PT Bank KB Bukopin Tbk	275,100	262,320	<i>PT Bank KB Bukopin Tbk</i>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	240,398	1,385,308	<i>PT Waskita Karya (Persero) Tbk</i>
PT Aero Wisata	111,084	130,903	<i>PT Aero Wisata</i>
PT Pupuk Kalimantan Timur	92,568	176,400	<i>PT Pupuk Kalimantan Timur</i>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRISyariah Tbk)	121,000	357,995	<i>PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRISyariah Tbk)</i>
PT Badak Natural Gas Liquefaction	77,876	74,785	<i>PT Badak Natural Gas Liquefaction</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	35,160	35,160	<i>PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</i>
PT Asuransi Jasa Indonesia	3,600	84,297	<i>PT Asuransi Jasa Indonesia</i>
PT Merpati Nusantara Airlines	--	716,460	<i>PT Merpati Nusantara Airlines</i>
PT AeroTrans Services Indonesia	--	487,726	<i>PT AeroTrans Services Indonesia</i>
PT Amarta Karya (Persero)	--	13,303	<i>PT Amarta Karya (Persero)</i>
Lain-lain	19,365,103	254,347,958	<i>Lain-lain</i>
Total Pendapatan Usaha	2,157,252,280	2,172,614,620	Total Revenues

Kompensasi Personil Manajemen Kunci

Total manfaat yang dibayarkan oleh Grup untuk Dewan Komisaris dan Direksi sebesar Rp4.163.215 dan Rp2.518.458 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit).

Key Management Personnel Compensation

Total benefits paid by the Group for the Board of Commissioners and Directors amounted to Rp4,163,215 and Rp2,518,458 for the years ended December 31, 2021 and 2020 respectively (unaudited).

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

45. Informasi Segmen Operasi

45. Operation Segmen Operation

	2021					
	Aviasi/ Aviation Rp	Jasa dan Perdagangan Umum/ Services and Trading Rp	Pariwisata Lainnya/ Other Tourism Rp	Eliminasi/ Elimination Rp	Total Rp	
PENDAPATAN	8,652,601,458	956,002,840	174,112,207	(49,882,921)	9,732,833,584	REVENUES
LABA BRUTO	929,594,244	51,237,543	(8,518,644)	--	972,313,143	GROSS PROFIT
Beban Pemasaran	(2,696,016,015)	(3,617,190)	(24,272,323)	--	(2,723,905,528)	Marketing Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(3,338,764,491)	(121,593,833)	(246,715,357)	(12,772,226)	(3,719,845,907)	General and Administrative Expenses
Beban Lain-lain	(262,634,206)	(9,102,891)	(43,599,102)	(28,575,219)	(343,911,418)	Other Expenses
Pendapatan Lain-lain	293,745,528	20,671,214	19,238,426	--	333,655,168	Other Income
RUGI USAHA	(5,074,074,940)	(62,405,157)	(303,867,000)	(41,347,445)	(5,481,694,542)	OPERATING LOSS
Pendapatan Keuangan	81,095,196	412,545	2,413,661	--	83,921,402	Finance Income
Beban Keuangan	(2,757,802,033)	(5,162,272)	(17,833,707)	--	(2,780,798,012)	Finance Costs
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	(149,635,777)	(16,762,227)	(4,097,056)	39,016,912	(131,478,148)	Equity Loss of Associates Entities
Rugi Operasi yang Dihentikan	--	--	(84,116,150)	--	(84,116,150)	Loss of Discontinued Operations
Pajak Final	(162,275,156)	--	--	--	(162,275,156)	Final Tax
RUGI SEBELUM						LOSS BEFORE
PAJAK PENGHASILAN BADAN	(8,062,692,710)	(83,917,111)	(407,500,252)	(2,330,533)	(8,556,440,606)	CORPORATE INCOME TAX
Manfaat Pajak Penghasilan	981,319,570	13,907,651	25,049,174	--	1,020,276,395	Income Tax Benefit
RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA	(7,081,373,140)	(70,009,460)	(382,451,078)	(2,330,533)	(7,536,164,211)	LOSS FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT
RUGI KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(25,173,750)	(876,582)	2,861,299	--	(23,189,033)	OTHER COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR AFTER TAX
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA	(7,106,546,890)	(70,886,042)	(379,589,779)	(2,330,533)	(7,559,353,244)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR YEAR AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT
Aset Segmen	84,391,575,784	514,231,153	46,103,552,160	(36,471,544,549)	94,537,814,548	Segment Assets
Liabilitas Segmen	56,815,611,411	438,049,316	11,669,820,513	(10,585,498,812)	58,337,982,428	Segment Liabilities

	2020					
	Aviasi/ Aviation Rp	Jasa dan Perdagangan Umum/ Services and Trading Rp	Pariwisata Lainnya/ Other Tourism Rp	Eliminasi/ Elimination Rp	Total Rp	
PENDAPATAN	9,517,389,183	642,537,464	353,998,287	(54,553,982)	10,459,370,952	REVENUES
LABA BRUTO	1,761,472,798	64,176,589	36,914,014	--	1,862,563,401	GROSS PROFIT
Beban Pemasaran	(2,906,875,989)	(1,526,997)	(16,230,693)	--	(2,924,633,679)	Marketing Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(1,825,264,250)	(95,728,194)	(368,057,768)	(6,752,970)	(2,295,803,182)	General and Administrative Expenses
Beban Lain-lain	(270,250,063)	(32,122,554)	(15,595,288)	(14,501,098)	(332,469,003)	Other Expenses
Pendapatan Lain-lain	172,769,848	3,619,797	69,332,526	--	245,722,171	Other Income
RUGI USAHA	(3,067,947,656)	(61,581,359)	(293,637,209)	(21,254,068)	(3,444,420,292)	OPERATING LOSS
Pendapatan Keuangan	272,436,322	730,351	13,879,094	--	287,045,767	Finance Income
Beban Keuangan	(2,387,517,406)	(1,493,942)	(39,506,209)	--	(2,428,517,557)	Finance Costs
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	(113,580,453)	(18,177,010)	(748,990)	21,254,069	(111,252,384)	Equity Loss of Associates Entities
Pajak Final	(161,967,871)	--	--	--	(161,967,871)	Final Tax
RUGI SEBELUM						LOSS BEFORE
PAJAK PENGHASILAN BADAN	(5,458,577,064)	(80,521,960)	(320,013,314)	1	(5,859,112,337)	CORPORATE INCOME TAX
Manfaat Pajak Penghasilan	688,240,725	12,822,157	8,541,075	--	709,603,957	Income Tax Benefit
RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA	(4,770,336,339)	(67,699,803)	(311,472,239)	1	(5,149,508,380)	LOSS FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT
RUGI KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(810,201,371)	(3,751,773)	(7,904,561)	--	(821,857,705)	OTHER COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR AFTER TAX
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA	(5,580,537,710)	(71,451,576)	(319,376,800)	1	(5,971,366,085)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR YEAR AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT
Aset Segmen	87,012,817,989	275,692,809	10,554,287,110	(98,985,973)	97,743,811,935	Segment Assets
Liabilitas Segmen	52,339,168,912	122,211,916	1,734,951,838	(54,966,354)	54,141,366,312	Segment Liabilities

46. Perjanjian-Perjanjian Penting

46. Significant Agreements

PT Angkasa Pura I ("AP I")

a) Perjanjian Konsesi - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Pada tanggal 15 Desember 2015, AP I mengadakan Perjanjian dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) mengenai pemberian konsesi untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian No. HK.201/2/8/DRJU.kum-2015 dan No. SP.333/HK.06.03/2015/DU (Perjanjian Konsesi).

PT Angkasa Pura I ("AP I")

a) Concession Agreement - Directorate General of Civil Aviation
On December 15, 2015, AP I entered into an agreement with the Directorate General of Civil Aviation (DJPU) regarding the concession provided to AP I to conduct airport services as stated in agreement No. HK.201/2/8/DRJU.kum-2015 and No. SP.333/HK.06.03/2015/DU (Concession Agreement).

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

DJPU memberikan hak kepada AP I melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan termasuk meliputi pelayanan sehubungan dengan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos. Layanan tersebut mencakup penyediaan dan/atau pengembangan:

- Fasilitas kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
- Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
- Fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
- Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang digunakan untuk mendukung transportasi udara.

Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi adalah sebagai berikut, antara lain:

- AP I diwajibkan untuk membayar pendapatan konsesi dari pelayanan jasa kebandarudaraan sebesar 2,5% dari pendapatan pelayanan jasa kebandarudaraan per tahun, yang akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- Perjanjian Konsesi berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian, dan diperpanjang selama 30 tahun sesuai kesepakatan DJPU dan AP I, setelah AP I mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

DJPU memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Konsesi berdasarkan Perjanjian Konsesi sesuai dengan kewenangannya yang diatur oleh Undang-Undang. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perpanjangan perjanjian tersebut masih dalam proses.

Pada tanggal 28 Juni 2018, AP I telah menerima tagihan pembayaran konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan tahun 2016 dari DJPU sebesar Rp91.505.658. Berdasarkan surat tagihan tersebut setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya, setelah 30 hari sejak dikeluarkannya tagihan tersebut. Pada tanggal 31 Oktober 2019, AP I telah melakukan pembayaran secara penuh atas tagihan tersebut di atas.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

DJPU granted the right to AP I to conduct the airport service activities including aircraft, passenger, freight and postal related services. Such services encompass for the provision and/or development of:

- *Facilities for service activities for landing, takeoff, maneuvering, parking and storage of aircraft;*
- *Terminal facilities for passenger transport services, cargo, and mail;*
- *Electronic facilities, electricity, water, and waste disposal installations; and*
- *Areas for the building, grounds, and industry as well as buildings provided to support air transportation.*

Important conditions in the Concession Agreement, among others, are as follows:

- *AP I is required to pay concession revenue of airport service activities amounting to 2.5% from revenue of airport service activities per year, which will be evaluated every 5 (five) years.*
- *The Concession Agreement is valid for 2 (two) years, starting from date the Concession Agreement is signed, and extended for 30 years as agreed by DJPU and AP I, after AP I received approval from Shareholders General Meeting.*

DJPU has the authority to supervise and control the implementation of the Concession based on Concession Agreement in accordance with its authority which is regulated by the Law. Up until the date of completion of the consolidated financial statements, the extension of the agreement is still in process.

On June 28, 2018, AP I has received an invoice from DJPU for payment of aeronautical service concession for year 2016 amounting Rp91,505,658. Based on the information stated in the invoice, every late payment made 30 days after the date of invoice will be subjected to penalty of 2% each month. On October 31, 2019, AP I has been fully paid the invoice as stated above.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Sehubungan dengan keterlambatan pembayaran tagihan tersebut di atas, AP I telah mencadangkan denda sebesar Rp25.537.267 dan Rp25.537.267 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, AP I mencatat akrual beban konsesi masing-masing sebesar Rp287.070.364 dan Rp281.806.546.

- b) Perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Bandara Internasional Ahmad Yani

Pada tanggal 17 Juni 2014, AP I dan TNI AD menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagian tanah Milik TNI AD di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian. Perjanjian kerja sama ini mempunyai maksud dan tujuan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang untuk penerbangan sipil dan penerbangan militer dengan prinsip prinsip korporasi.

Ruang lingkup kerjasama adalah:

- Pemanfaatan tanah milik TNI AD seluas 885.500 m² dimana tanah seluas 676.089 m² akan digunakan untuk areal pengembangan bandar udara dan tanah seluas 208.411 m² akan digunakan untuk areal resapan pada sisi utara areal pengembangan bandar udara.
- Pembayaran kontribusi kepada negara oleh AP I berupa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan lahan.
- Aset yang diperoleh dari kerja sama pemanfaatan ini akan diserahkan oleh AP I kepada TNI AD setelah perjanjian berakhir yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya maupun dibangun oleh AP I akan diserahkan kepada TNI AD.

AP I dikenakan kontribusi tetap kepada negara atas pemanfaatan tanah milik TNI AD tersebut yakni sebesar 0,6% dari nilai wajar tanah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan atau sebesar 0,6% x

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

In relation with the late payment of the invoice as stated above, AP I has accrued the penalty amounting to Rp25,537,267 and Rp25,537,267 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

On December 31, 2021 and 2020, AP I has recorded accrued concession expense amounted to Rp287,070,364 and Rp281,806,546, respectively.

- b) *Cooperation agreements utilization of land owned by Indonesian Army (TNI AD) in Ahmad Yani International Airport*

On June 17, 2014 AP I and TNI AD signed into cooperation agreement utilization of some of the land owned by TNI AD in Ahmad Yani International Airport for period of 30 (thirty) years from the signing of the agreement. This cooperation agreement has the sole purpose to enable the development of facilities and infrastructure Ahmad Yani International Airport in Semarang for civil aviation and military aviation with the principles of the corporation.

The scope of cooperation are:

- *The utilization of land owned by TNI AD area of 885,500 sqm where the land of 676,089 sqm will be used for airport development area and the land of 208,411 sqm will be used for recharge areas on the north side of the airport development area.*
- *Payment of contributions to the country by AP I is in the form of fixed contributions and profit sharing on land use.*
- *Assets obtained from this utilization cooperation will be handed over by AP I to TNI AD after the agreement ends which is stated in the minutes of handover.*

Facilities and infrastructure that have been previously established or built by AP I will be handed over to TNI AD.

AP I is subject to a fixed contribution for the utilization of the land owned by the TNI AD, which is 0.6% of the fair value of the land which is the object of the joint utilization or 0.6% x Rp219,471,288, which is equal to

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Rp219.471.288 yakni Rp1.316.827. Dimana diasumsikan kenaikan nilai tanah yang menjadi objek KSP sebesar 4,14% setiap tahun. Selain itu juga terdapat pembagian keuntungan sebesar 12,29% dari arus kas bersih dari aktivitas operasi dan investasi per tahun. Untuk periode tahun buku 2021 dan 2020, nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi dan investasi Bandara International Ahmad Yani Semarang masing-masing adalah arus kas negatif Rp35.831.522 dan arus kas negatif Rp61.240.518.

- c) Perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya

Pada tanggal 13 Februari 2014, AP I dan TNI AL menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah dan fasilitas milik TNI AL di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan pengembangan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya untuk kepentingan penerbangan sipil maupun penerbangan TNI AL.

Objek perjanjian kerjasama ini adalah tanah seluas 3.143.352 m² beserta fasilitas di atasnya milik TNI AL yang akan dimanfaatkan oleh AP I.

Sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya maupun dibangun oleh AP I akan diserahkan kepada TNI AL. AP I diwajibkan melaksanakan pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan tanah beserta fasilitasnya dari hasil pembangunan dan pengembangan Terminal 2 Bandara.

- d) Perjanjian jasa konstruksi bandara baru di Kulon Progo

Pada tanggal 21 Agustus 2018, AP I dan PP KSO menandatangani perjanjian pengadaan jasa No. PJKP-18003169 untuk melakukan pembangunan infrastruktur bandara baru di Kulon Progo dengan addendum terakhir, yaitu addendum VII Nomor: 210-AD/4800000958/PL.02/2020 tanggal 20 November 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp7.075.310.000 (termasuk PPN). Jangka waktu perjanjian 730 hari sampai

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rp1,316,827. Where it is assumed that the increase in the value of land which is the object of the KSP is 4.14% every year. In addition, there is also a profit sharing of 12.29% of net cash flow from operating and investing activities per year. For the fiscal year 2021 and 2020, the net cash flow value from operating and investing activities of Ahmad Yani International Airport in Semarang is negative cash flow of Rp35,831,522 and negative cash flow of Rp61,240,518, respectively.

- c) Cooperation agreements utilization of land owned by Indonesian Navy (TNI AL) Juanda International Airport in Surabaya

On February 13, 2014, AP I and TNI AL signed into cooperation agreement utilization of and facilities owned by TNI AL in International Airport Juanda Surabaya for period of 30 (thirty) years from the signing of the agreement. This cooperation agreement intended to carry out the development of Juanda International Airport for the benefit of civil aviation and aviation Indonesian Navy.

The object of this cooperation agreement is an area of 3,143,352 sqm and the facilities on it owned by TNI AL which will be utilized by AP I.

Facilities and infrastructure that have been previously established or built by AP I will be handed over to TNI AL. AP I is required to pay fixed contribution and profit sharing from land use and its facilities from the results of the construction and development of Airport Terminal 2.

- d) Construction service agreements of new airport at Kulon Progo

On August 21, 2018, AP I and PP KSO signed service agreement No. PJKP-18003169 to construct infrastructure of new airport at Kulon Progo with latest amendment of amendment VII Number: 210-AD/4800000958/PL.02/2020 dated November 20, 2020 with contract value of Rp7,075,310,000 (including VAT). The period of the agreement was 730 days until July 14, 2020, which was extended until

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

dengan 14 Juli 2020 dan diperpanjang hingga tanggal 25 November 2020. Pada tanggal 31 Desember 2020, presentase penyelesaian atas pengerjaan konstruksi tersebut telah mencapai 100% dari keseluruhan pekerjaan.

e) Perjanjian jasa kontruksi gedung terminal dan fasilitas penunjang Bandara Surabaya Internasional Juanda
Pada tanggal 4 Juli 2019, AP I dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Menandatangani perjanjian pengadaan jasa No. PJKP-19003930 untuk melakukan perluasan dan pembenahan interior gedung terminal 1 dan fasilitas penunjangnya di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Pada tanggal 31 Desember 2021, persentase penyelesaian atas pengerjaan konstruksi tersebut telah mencapai 100% dari keseluruhan pekerjaan.

f) Perjanjian jasa kontruksi gedung terminal dan fasilitas penunjang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar
Pada tanggal 19 Maret 2019, AP I dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menandatangani perjanjian pengadaan jasa No. PJKP-19003608 untuk melakukan konstruksi dan pengembangan gedung terminal dan fasilitas penunjangnya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan nilai kontrak sebesar Rp2.666.418.700 (nilai termasuk PPN). Jangka waktu perjanjian terhitung sejak 27 Februari 2019 sampai dengan 11 Mei 2021 dan diperpanjang hingga tanggal 24 Oktober 2022. Pada tanggal 31 Desember 2021, persentase penyelesaian atas pengerjaan konstruksi tersebut telah mencapai 61,74% dari keseluruhan pekerjaan.

g) Perjanjian dengan APP

- Perjanjian kerjasama tentang bangun guna serah (BOT) atas tanah seluas 12.000 m² di Sunset Road Bali antara AP I dengan APP

Pada tanggal 19 September 2012, AP I dan APP menandatangani perjanjian kerjasama No.SP/96.HK.06.03/ 2012/DU dan No. APP.001/PKS/2012/DU tentang bangun serah guna (BOT) atas tanah seluas 12.000 m² di Sunset Road Bali dimana tanah milik AP I akan diserahkan kepada APP untuk dibangun kondotel dan fasilitas penunjang yang selanjutnya dikelola dan diusahakan oleh APP.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

November 25, 2020. As of December 31, 2020, the percentage of completion of the construction has reached 100% from total construction.

e) *Construction service agreements of terminal building and supporting facilities at Juanda International Airport Surabaya
On July 4, 2019, AP I and PT Waskita Karya (Persero) Tbk. signed a construction service agreement No. PJKP19003930 to expand and revamp terminal building and its supporting facilities of Juanda International Airport Surabaya. As of December 31, 2021, the percentage of completion of the construction has reached 100% from total construction.*

f) *Construction service agreements of terminal building and supporting facilities at Sultan Hasanuddin International Airport Makassar
On March 19, 2019, AP I and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. signed construction service agreement No. PJKP19003608 to construct and develop terminal building and its supporting facilities of Sultan Hasanuddin Airport Makassar with contract value of Rp2,666,418,700 (include VAT). The term of the agreement is started on February 27, 2019 until May 11, 2021 and has been extended until October 24, 2022. As of Desember 31, 2021, the percentage of completion of the construction has reached 61.74% from total construction.*

g) *Agreements with APP*

- *Cooperation agreement on build operation transfer (BOT) on land covering an area of 12,000 m² in Sunset Road Bali between AP I and APP*

On September 19, 2012, AP I and APP signed into cooperation agreement No.SP/96.HK.06.03/2012/DU and No. APP.001/PKS/2012/DU regarding the use of building (BOT) on land of 12,000 sqm on Sunset Road Bali where AP I's land will be handed over to APP to build condotels and supporting facilities which managed by APP. The period of the cooperation agreement is 32 (thirty two)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jangka waktu perjanjian kerjasama adalah 32 (tiga puluh dua) tahun dengan 6 (enam) bulan persiapan dengan kompensasi yang akan diterima AP I adalah sebesar Rp39.168.000.

- Perjanjian kerjasama tentang bangun guna serah (BOT) atas tanah seluas 16.386 m² di Sunset Road Bali antara AP I dan APP

Pada tanggal 4 Agustus 2014, AP I dan APP menandatangani perjanjian kerjasama No. SP.187/KB.03.02/2014/PD dan No. APP. 001/PKS/2014/DU tentang bangun serah guna (BOT) atas tanah seluas 16.386 m² di Sunset Road Bali dimana tanah milik AP I akan diserahkan kepada APP untuk dibangun kondotel, vilatel, area komersial dan fasilitas penunjang yang selanjutnya dikelola dan diusahakan oleh APP.

Jangka waktu perjanjian kerjasama adalah 32 (tiga puluh dua) tahun dengan 6 (enam) bulan persiapan sejak tanggal 4 Agustus 2014. Kompensasi yang akan diterima AP I adalah sebesar Rp54.000.000.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 28 September 2020, perjanjian kerjasama tersebut telah diakhiri tanggal 30 September 2020 dengan kompensasi yang harus dibayarkan oleh APP kepada AP I sebesar Rp5.400.000.

- Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek antara PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura Properti

Berdasarkan perjanjian antara PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura Properti mengenai Pinjaman Jangka Pendek, pada tanggal 10 Juni 2020 APP memperoleh pinjaman dari AP I sebesar Rp32.000.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk reimbursement pengadaan *Bagage Handling System* (BHS) atas pekerjaan perencanaan dan pembuatan perluasan lantai 2 counter *check-in* penumpang di terminal Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Pinjaman bersifat *aflopend non revolving*. Pinjaman jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2020 dengan suku bunga 9,00% per tahun. APP telah melunasi pinjaman tersebut pada tanggal 30 April 2021.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

years with 6 (six) months of preparation with the compensation to be received by AP I amounting to Rp39,168,000.

- Cooperation agreement on build operation transfer (BOT) on land covering an area of 16,386 m² in Sunset Road Bali between AP I and APP

On August 4, 2014, AP I and APP signed into cooperation agreement No. SP.187/KB.03.02/ 2014/PD and No. APP. 001/PKS/2014/DU regarding the use of building (BOT) on area of 16,386 sqm on Sunset Road Bali where AP I's land will be handed over to APP to build condotel, vilatel, commercial areas and supporting facilities which are managed by APP.

The term of this agreement is 32 (thirty two) years with 6 (six) months from the date of preparation of August 4, 2014. Compensation for AP I amounted Rp54,000,000.

Based on Minutes of Agreement dated September 28, 2020, the agreement was terminated on September 30, 2020 with the compensation to be paid by APP to AP I amounted to Rp5,400,000.

- Short Term Loan Agreement between PT Angkasa Pura I and PT Angkasa Pura Properti

Based on the agreement between PT Angkasa Pura I and PT Angkasa Pura Properti regarding short-term loans dated June 10, 2020, APP obtained loan from AP1 amounting to Rp32,000,000. This loan facility is used for the reimbursement of the Bagage Handling System (BHS) procurement for the planning and construction work on the 2nd floor of the passenger check-in counter at the International Terminal I Gusti Ngurah Rai Airport. The loan is a non-revolving *aflopend*. The loan will mature on June 30, 2020 with an interest rate of 9.00% per annum. APP has repaid the loan on April 30, 2021.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- h) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bandara Sentani
Pada tanggal 13 Oktober 2019, AP I dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Dephub) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Bandar Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura No. HK.201/0027/KUM/BRJU/X/2019 dan SP.314/HK.09.01/2019/DU. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

Ruang lingkup kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengelola dan melakukan optimalisasi penyediaan dan pengembangan Bandar Udara Sentani Jayapura sehingga meningkatkan perannya dalam mendukung kegiatan perekonomian.
- Memberikan kontribusi tetap (Catatan 10) dan pembagian keuntungan atas pengelolaan Bandar Udara Sentani Jayapura sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Penyerahan hasil pengembangan, pembangunan dan penambahan fasilitas Bandar Udara Sentani Jayapura dari AP I kepada Dephub.

AP I dikenakan kontribusi tetap tahun pertama sebesar Rp10.206.694 dengan kenaikan sebesar 3,60% setiap tahun serta pembagian keuntungan sebesar 7,43% dari pendapatan per tahun apabila BMN yang menjadi objek KSP telah menghasilkan keuntungan.

Pada tanggal 31 Maret 2021, AP I telah melakukan pembayaran kontribusi tetap tahun kedua sebesar Rp10.574.556.

- i) Perjanjian Kerjasama antara AP I dan entitas anak dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Layanan *Notional Pooling*.

Pada tanggal 7 Agustus 2020, AP I dan entitas anak menandatangani Perjanjian Kerjasama Terkait Layanan *Notional Pooling* Nomor: SP.DK.155/HK.06/2020 dan CBG.CB2/PKS.012/2020. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- h) *Cooperation Agreement of Utilization of Sentani Airport*
On October 13, 2019, AP I and Directorate General of Civil Aviation Ministry of Transportation Republic Indonesia (Dephub) signed Cooperation Agreement of State Property Utilization of Main Class I Sentani Airport Jayapura No. HK.201/0027/KUM/BRJU/X/2019 and SP.314/HK.09.01/2019/DU. This agreement is effective for 30 years from signing date of the agreement.

Scopes of the cooperation are as follows:

- *Manage and optimize provision and development of Sentani Airport Jayapura as the result increase its role in developing the economy activities.*
- *Provide permanent contribution (Note 10) and profit sharing for management of Sentani Airport Jayapura as non-tax state revenue (PNBP).*
- *Hand over of the result of the development, construction and addition facilities of Sentani Airport Jayapura from AP I to Dephub.*

AP I is subject to a fixed contribution in first year amounted Rp10,206,694 with an annual increase of 3.60% as well as a profit sharing of 7.43% of annual revenue if BMN as the KSP object has made a profit.

On March 31, 2021, AP I has paid the second year fixed contribution amounting to Rp10,574,556.

- i) *Cooperation Agreement between AP I and its subsidiaries and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Regarding the Notional Pooling Services.*

On August 7, 2020, AP I and its subsidiaries signed a Cooperation Agreement Regarding Notional Pooling Services Number: SP.DK.155/HK.06/2020 and CBG.CB2/PKS.012/2020. This agreement is valid for 1 year from the signing of the agreement.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 6 Agustus 2021, AP I melakukan addendum pertama untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas selama 6 bulan yaitu mulai dari tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022.

- j) Perjanjian Kerjasama Pemberian Dukungan dan Pengelolaan pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Kediri

Pada tanggal 26 Oktober 2020, AP I dan PT Gudang Garam Tbk (Gudang Garam) menandatangani Perjanjian Induk tentang Perjanjian Kerjasama Pemberian Dukungan dan Pengelolaan pada Proyek KPBU Bandar Udara Kediri dimana kerjasama akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- Tahap penetapan badan usaha pemrakarsa dan pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP);
- Tahap pembangunan dan pengelolaan bandar udara Kediri.

Atas kerjasama tersebut, Gudang Garam akan membayarkan kompensasi kepada AP I sebagai berikut:

- *Upfront fee/Technical Expertise Fee* atas advis yang diberikan oleh AP I pada proses pengadaan BUP dan *technical know-how* dalam pembangunan dan pengelolaan di bidang kebandarudaraan;
- *Management fee* atas biaya pengelolaan bandar udara Kediri;
- *Variable Incentives*, yaitu bagi hasil atas pendapatan kegiatan pengelolaan bandar udara Kediri.

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian sampai dengan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Bandar Udara Kediri berlaku efektif dan mengikat para pihak.

Pada tanggal 11 Februari 2021, AP I telah menerima 25% pembayaran *Upfront Fee/Technical Expertise Fee* sebesar Rp22.028.500.

Pada tanggal 26 Januari 2021, AP I dan Gudang Garam menandatangani Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Kediri dimana Gudang Garam menyerahkan pengoperasian bandar udara Kediri kepada AP I. Atas kegiatan pengoperasian tersebut, AP I

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

On August 6, 2021, AP I has entered into addendum to extend the term of the facility for 6 month, starting from August 7, 2021 to February 5, 2022.

- j) *Cooperation Agreement of Support and Operation of Government and Business Entity Cooperation Project (KPBU) Kediri Airport*

On October 26, 2020, AP I and PT Gudang Garam Tbk (Gudang Garam) signed a Master Agreement regarding the Cooperation Agreement for Providing Support and Operation of Kediri Airport KPBU Project, whereas the cooperation will be carried out in 2 (two) stages:

- *The appointment stage of the initiating business entity and the procurement of the Implementation Business Entity (BUP);*
- *The construction and operation stage of Kediri airport.*

For the cooperation, Gudang Garam will pay compensation to AP I as follows:

- *Upfront fee/Technical Expertise Fee for the advice given by AP I on the BUP procurement process and technical knowhow in the development and operation of the airport sector;*
- *Management fee for the operation fee of Kediri airport;*
- *Variable Incentives, which is revenue sharing from the operation of Kediri airport*

This Agreement is valid from the signing of the agreement until the Kediri Airport Operation Cooperation Agreement becomes effective and binding on the parties.

On February 11, 2021, AP I has received 25% of the Upfront Fee/Technical Expertise Fee amounted to Rp22,028,500.

On January 26, 2021, AP I and Gudang Garam signed Joint Operation Agreement of Operating Airport Services at Kediri Airport whereas Gudang Garam handover the operation of Kediri airport to AP I. For the operational activities, AP I will obtain management fee and variable incentives as

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

memperoleh *management fee* dan variable incentives sebagaimana dijelaskan di atas. Jangka waktu perjanjian ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan perjanjian KPBU antara Gudang Garam dengan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, yaitu DJPU.

PT Angkasa Pura ("AP II")

a) PT Mandara Jasindo Sena ("MJS")
Pada tanggal 15 Maret 1991, AP II mengadakan Surat Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Lahan Bandara Soekarno-Hatta dengan MJS berdasarkan Perjanjian No. SPKPL.01/TU.308/PAPII-91 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum IV No. ADD.IV.SPKS.004/KM.103/2006-APII Tanggal 30 Januari 2006 ("SPKL.01"), seluas 150.000 m².

MJS menggunakan lahan tersebut untuk membangun serta mengusahakan fasilitas hotel, balai sidang, perkantoran, pertokoan, restoran, fasilitas olah raga, parkir dan sarana rekreasi ("fasilitas"). Jangka waktu perjanjian adalah 30 tahun. Pemanfaatan lahan dibagi menjadi 2 tahap. Untuk tahap pertama dibahas dalam perjanjian ini sedangkan tahap kedua dibahas terpisah dalam Perjanjian Sewa Tanah No. SPKS.21/TU.208/APII-96 ("SPKS.21") tanggal 1 Maret 1996.

- Tahap pertama meliputi lahan seluas 50.000 m² untuk jangka waktu 30 tahun yang berakhir bulan Maret 2021. AP II memperoleh kompensasi sebesar Rp10.800.000 dan konsesi sebesar persentase tertentu dari pendapatan bersih MJS atas hasil operasi komersial dari fasilitas, dihitung sejak dimulainya operasi komersial dari fasilitas.
- Tahap kedua meliputi lahan seluas 100.000 m² untuk jangka waktu 30 tahun yang berakhir tanggal 8 Februari 2026. AP II memperoleh kompensasi yang setiap lima tahun meningkat mulai dari Rp600 hingga Rp3.226,94 (nilai penuh) per m² per bulan atau seluruhnya sebesar Rp58.766.000 dan konsesi sebesar persentase tertentu dari pendapatan bersih atas hasil operasi komersial dari fasilitas, dihitung sejak dimulainya operasi komersial dari fasilitas.
- Pada akhir periode perjanjian, MJS akan mengembalikan lahan tersebut dan mengalihkan kepemilikan seluruh fasilitas yang telah dibangun di atas lahan tersebut kepada AP II.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

explained above. The period of the agreement will be determined later based on KPBU agreement between Gudang Garam and the Representation of of the Project Cooperation, which is DJPU.

PT Angkasa Pura ("AP II")

a) PT Mandara Jasindo Sena ("MJS")
On March 15, 1991, AP II entered into a Letter of Agreement on Land Use of Soekarno-Hatta Airport with MJS based on Agreement No. SPKPL.01/TU.308/PAPII-91 as last amended through Addendum IV No. ADD.IV.SPKS.004/KM.103/2006-APII Dated January 30, 2006 ("SPKL.01"), covering an area of 150,000 sqm.

MJS used the land to build and commercialize facilities of hotel, convention center, offices, stores, restaurant, sport facilities, parking and recreation ("facilities"). The agreement is valid for 30 years. Land utilization is divided into 2 phases. The first phase was described in this agreement while the second phase was described in Land Lease Agreement No. SPKS.21/TU.208/APII-96 ("SPKS.21") dated March 1, 1996.

- *The first phase covers an area of 50,000 sqm for period of 30 years ending in March 2021. AP II received compensation amounted Rp10,800,000 and concession for a certain percentage of MJS net income over the commercial operation of the facility, starting from the commencement of the commercial operation of the facility.*
- *The second phase covers a land area of 100,000 sqm for a period of 30 years which expired on February 8, 2026. AP II received compensation increases every five years starting from Rp600 to Rp3,226.94 (full amount) per sqm per month or total amounted Rp58,766,000 and concession for a certain percentage of net income over the commercial operation of the facility, starting from the commencement of commercial operation of the facility.*
- *At the end of the agreement period, MJS will restore the land and transfer ownership of the entire facility that was built on the land to AP II.*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi sejak tahun 1997 sampai dengan 2003, MJS terkena dampak dari krisis ekonomi tersebut sehingga MJS tidak dapat memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah untuk mengembangkan lahan 100.000 m² yang telah disebutkan dalam perjanjian sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka AP II melalui Surat Direksi No. 15.02.01/00/10/2007/004 tanggal 4 Oktober 2007 telah membatalkan Perjanjian SPKL.01 dan SPKS.21 yang menyangkut lahan seluas 100.000 m².

Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 15.02.01/00/05/2008/101 tanggal 21 Mei 2008, MJS menyerahkan secara fisik lahan seluas 100.000 m² dan 4 (empat) buah sertifikat HGB kepada AP II.

Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut telah diaktakan melalui Akta No. 4 oleh Notaris Muhammad Taufiq, S.H., tanggal 16 April 2009.

Pada tahun 2021, masa Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Lahan Bandara Soekarno-Hatta seluas 50.000 m² telah berakhir seperti dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura II Nomor: BAC.15.02/00/10/2021/4815 Tanggal 13 Oktober 2021. Sesuai dengan perjanjian, pada akhir periode perjanjian, MJS telah mengembalikan lahan tersebut dan mengalihkan kepemilikan seluruh fasilitas yang telah dibangun di atas lahan tersebut kepada AP II. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian lahan dan Pengalihan Pemilikan Fasilitas Bandara Internasional Hotel Nomor BAC.06.04/00/07/2021/4651 tanggal 28 Juli 2021.

Selain menerima kembali lahan yang dikerjasamakan, AP II juga menerima seluruh fasilitas yang dibangun di atas lahan tersebut dengan total nilai sebesar Rp94.031.000. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Joko Suratno sesuai dengan laporannya per tanggal 23 Juli 2021. AP II mencatat penerimaan aset tersebut pada aset tetap dan mengakui pendapatan lain-lain pada laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2021.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

With the economic crisis from year 1997 to 2003, MJS was affected by the crisis hence MJS could not meet the requirements in the land use agreement to develop 100,000 sqm of land that has been mentioned in the previous agreement.

By considering the matter, AP II through Director Letter No. 15.02.01/00/10/2007/004 dated October 4, 2007 has canceled SPKL.01 and SPKS.21 Agreement concerning a land area of 100,000 sqm.

Based on Acceptance of Land Transfer and Land Rights ("HGB") No. 15.02.01/00/05/2008/101 dated May 21, 2008, MJS physically submit a land area of 100,000 sqm and 4 (four) HGB to AP II.

Such release of Land Rights has been ratified by the Deed No. 4 of Muhammad Taufiq, S.H., dated April 16, 2009.

In 2021, the period of Land Use Agreement of Soekarno-Hatta Airport has ended as documented in Berita Acara Pengakhiran Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura II Number: BAC.15.02/00/10/2021/4815 dated October 13, 2021. In accordance with the agreement, at the end of the agreement period, MJS has returned the land and transfer the ownership of all the facilities that have been built on the land to AP II. This has been documented in the Minutes of Land Return and Transfer of Ownership of Hotel International Airport Facilities Number BAC.06.04/00/07/2021/4651 dated July 28, 2021.

In addition to receiving back the land, AP II also received all the facilities built on the land with a total value of Rp94,031,000. The value is based on the Valuation Report conducted by KJPP Joko Suratno as reported in its report as of July 23, 2021. AP II records the receipt of these assets as fixed assets and recognizes other income in the 2021 consolidated financial statements.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

b) PT Sanggraha Daksa Mitra ("SDM")

AP II mengadakan perjanjian penggunaan tanah di area Bandara Soekarno-Hatta seluas 1.020.000 m² dengan SDM sesuai Perjanjian Sewa Tanah No. SPKS.07.1/TU.208/APII-2000 tanggal 30 Maret 2000 dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak 1 Mei 2000 sampai dengan 6 Januari 2019. AP II menyewakan tanah tersebut kepada SDM untuk dikelola sebagai fasilitas usaha yaitu lapangan golf, taman niaga dan pusat pertokoan berikut fasilitas penunjangnya.

AP II juga memperoleh pendapatan konsesi yang dihitung berdasarkan jumlah pendapatan kotor dengan persentase konsesi. Pada akhir periode perjanjian, SDM wajib mengembalikan tanah tersebut kepada AP II dan AP II wajib membayar kepada SDM sebesar nilai pasar yang wajar dari bangunan gedung serta kelengkapannya yang melekat termasuk infrastruktur yang terdapat di pusat pertokoan dan taman niaga tersebut.

Pada tanggal 31 Mei 2017, AP II dan SDM menandatangani addendum I No. PJJ.04.04/00.02/05/2017/0011 atas Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tanah No. SPKS.07.1/TU.208/APII-2000 tanggal 30 Maret 2000, dimana AP II dan SDM sepakat antara lain:

- Seluruh fasilitas usaha yang dibangun SDM, pada akhir masa perjanjian diserahkan dan menjadi milik AP II tanpa kompensasi dalam bentuk apapun.
- Mengubah objek perjanjian yang dikenakan kompensasi dan besaran kompensasi penggunaan tanah.
- Mengubah objek perjanjian yang dikenakan konsesi dan prosentase konsesi.
- Mengembalikan sebagian tanah seluas ±57.000 m² yang telah disewa SDM kepada AP II sehingga luas objek perjanjian menjadi 963.000 m².
- SDM melakukan pembongkaran dan/atau relokasi aset milik SDM yang berlokasi di area lahan seluas ±57.000 m². Bentuk dan cara kompensasi yang akan dibayarkan oleh AP II kepada SDM antara lain dapat diperhitungkan dari pembebasan kewajiban kompensasi dan/atau pembebasan nilai konsesi.
- Memperhitungkan jangka waktu perjanjian antara lain:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

b) PT Sanggraha Daksa Mitra ("SDM")

AP II entered into land use agreement at Soekarno-Hatta Airport area covering 1,020,000 sqm with SDM in accordance with Land Lease Agreement No. SPKS.07.1/TU.208/APII-2000 dated March 30, 2000 and valid for 20 (twenty) years from May 1, 2000 until January 6, 2019. AP II leased the land to SDM to be used as business facilities such as golf course, park and shopping centre, including its supporting facilities.

AP II also obtained a concession income calculated based on the amount of gross income with the percentage of concession. At the end of the agreement, SDM is required to return the land to AP II and AP II shall pay to SDM for the fair market value of the building as well as the accessories attached including infrastructure located in the shopping centre and commercial parks.

On May 31, 2017, AP II and SDM signed addendum I No. PJJ.04.04/00.02/05/2017/0011 of Land Use Cooperation Agreement No. SPKS.07.1/TU.208/APII-2000 dated March 30, 2000, whereas AP II and SDM agreed:

- All business facilities that were built by SDM, at the end of the agreement shall be returned and become the property of AP II without any compensation.
- Changes the object of the agreement subject to compensation and the amount of land use compensation.
- Changes the object of the agreement subject to concession and percentages of concession.
- Returns part of the land that has been rented by SDM measuring ±57,000 sqm to AP II and changes the object of agreement to 963,000 sqm.
- SDM dismantling and/or relocating assets owned by SDM located in an area of ±57,000 sqm. The form and method of compensation that will be paid by AP II to SDM may be calculated from the exemption of compensation and/or exemption of the concession.
- Considering term of agreement among others:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- i. Tanggal 1 Mei 2000 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019.
- ii. Tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 untuk objek perjanjian seluas ±643.000 m².
- iii. Tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 untuk objek perjanjian seluas ±320.000 m². Jangka waktu tersebut akan diperpanjang otomatis sampai dengan maksimal tanggal 6 Januari 2024 apabila AP II tidak menggunakan objek perjanjian untuk kepentingan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta.

Pada tanggal 22 Februari 2018, AP II dan SDM menandatangani addendum II Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tanah No.PJJ.04.04/00/02/2018/0043 dimana AP II dan SDM menyepakati antara lain:

- Rincian aset yang akan direlokasi.
- Total biaya pembongkaran dan/atau aset yang akan direlokasi.
- Bentuk dan cara kompensasi yang akan diberikan dan/atau dibayarkan oleh AP II kepada SDM atas biaya pembongkaran dan/atau aset yang akan direlokasi.

c) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda")

Pada tanggal 3 Juli 2014, AP II mengadakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah No.PJJ.15.02.01/00/07/2014/119 dengan Garuda, dimana AP II bertindak sebagai pemberi sewa dan Garuda sebagai penyewa. Beberapa isi perjanjian sebagai berikut:

- Lahan yang dimanfaatkan seluas 164.742 m².
- Tujuan pemanfaatan lahan untuk administrasi perkantoran, penunjang kegiatan operasional penerbangan berikut fasilitas penunjangnya.
- Jangka waktu perjanjian adalah 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2016.

Pada tanggal 13 Oktober 2016, AP II mengadakan perjanjian dengan Garuda No.PJJ.04.04/00.02/10/2016/0009 dan No.WI/PERJ/DG-3368 tentang pemanfaatan fasilitas komersial, yaitu ruangan di gedung 510, 520 dan 530 berlaku sampai dengan 31 Desember 2018, dimana AP II bertindak sebagai pemberi sewa dan Garuda sebagai penyewa.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- i. May 1, 2000 until January 6, 2019.
- ii. January 7, 2019 until January 6, 2021 for the object of the agreement of ±643,000 sqm.
- iii. January 7, 2019 until January 6, 2021 for the object of the agreement of ±320,000 sqm. The term will automatically be extended until January 6, 2024 if AP II does not use the object of the agreement for the construction of Terminal 4 of Soekarno-Hatta Airport.

On February 22, 2018, AP II and SDM signed addendum II of Land Use Cooperation Agreement No. PJJ.04.04/00/02/2018/0043 whereas AP II and SDM agreed:

- Details of the assets to be relocated.
- Total cost of dismantling and/or assets to be relocated.
- The method of compensation to be provided and/or paid by AP II to SDM for the costs of dismantling and/or assets to be relocated.

c) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda")

On July 3, 2014, AP II entered into Land Use Agreement No. PJJ.15.02.01/00/07/2014/119 with Garuda, where AP II acts as lessor and Garuda as lessee. Some terms of the agreement are as follows:

- Area utilization of 164,742 sqm.
- Land use objectives are for the administrative offices, flight operations, including its supporting facilities.
- The agreement is valid from January 1, 2012 until December 31, 2016.

On October 13, 2016, AP II entered into agreement with Garuda No.PJJ.04.04/00.02/10/2016/0009 and No.WI/PERJ/DG-3368 regarding the use of commercial facility, such as building 510, 520 and 530 up to December 31, 2018, where AP II acts as lessor and Garuda as lessee.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 20 Juni 2018, AP II dan Garuda telah melakukan perpanjangan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial AP II Nomor PJJ.04.04/00/06/2018/1435 dan IG/PERJ/ DG-3718/2018 tanggal 20 Juni 2018 dengan jangka waktu 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2022.

Pada tanggal 29 Juli 2020, AP II dan Garuda telah melakukan perpanjangan Perjanjian Nomor PJJ.04.04/00/07/2020/0258 dan IG/PERJ/DI-4173/2020/NON-LEG dengan jangka waktu perjanjian hingga 31 Desember 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021, berdasarkan Berita Acara No BAC.06.04/00/12/202/6935 Garuda tidak lagi memperpanjang sewa lahan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial AP II No. PJJ.04.04/00/07/2020/0258 dan IG/PERJ/DI4173/2020/NON-LEG tanggal 29 Juli 2020.

Atas bangunan di atas lahan tersebut, yang bukan merupakan objek yang harus dikembalikan sesuai perjanjian, AP II setuju untuk membayar bangunan tersebut sebesar Rp142.500.000 melalui mekanisme penjumlahan utang atas tagihan yang dimiliki oleh AP II kepada Garuda. Nilai bangunan tersebut berdasarkan Laporan Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan pada tanggal 15 Desember 2021. Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pemindahan kepemilikan aset tersebut masih dalam proses.

d) Kerjasama Penyelenggaraan Perkeretaapian Bandara

Pada tanggal 7 Juli 2015, AP II mengadakan perjanjian No. HK.223/VII/5/KA2015, PJJ.15.01/00.1/07/2015/0061 dan RL/DIR/028/VII/2015 dengan KAI dan Railink ("Para Pihak"). Perjanjian ini berlaku sejak penandatanganan Perjanjian sampai dengan berakhirnya Masa Konsesi. Ruang Lingkup Kerjasama Penyelenggaraan Perkeretaapian Bandara ialah Penyelenggaraan sarana Perkeretaapian meliputi pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusaha sarana.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

On June 20, 2018, AP II and Garuda agreed to extend the agreement based on the Cooperation Agreement for the Utilization of Commercial Facilities of AP II Number PJJ.04.04/00/06/2018/1435 and IG/PERJ/ DG-3718/2018 dated June 20, 2018 with period from July 1, 2018 to June 30, 2022.

On July 29, 2020, AP II and Garuda agreed to extend the agreement Number PJJ.04.04/00/07/2020/0258 and IG/PERJ/DI4173/2020/NON-LEG with period up to December 31, 2021.

On December 31, 2021, based on Minutes No. BAC.06.04/00/12/202/6935, Garuda did not extend the Utilization of Commercial Facilities Agreement of AP II Number PJJ.04.04/00/07/2020/0258 and IG/PERJ/DI-4173/2020/NON-LEG dated July 29, 2020.

Regarding the building built on the land, which is not an object that must be returned to AP II according to the agreement, AP II agreed to pay the building totalling to Rp142,500,000 through a set off with the outstanding receivables of AP II from Garuda. The value of the building is based on the Valuation Report conducted by KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun and Partners on December 15, 2021. As of the completion date of the consolidated financial statements, the transfer of ownership of the assets is still in process.

d) Cooperation Arrangement of Airport Railway

On July 7, 2015, AP II entered into an agreement No. HK.223/VII/5/KA-2015, PJJ.15.01/00.1/07/2015/0061 and RL/DIR/028/VII/2015 with KAI and Railink ("the Parties"). This agreement is valid since the signing of the Agreement until the end of the Concession Period. The scope of Cooperation Arrangement of Airport Railway is Railway Infrastructure Implementation service including construction, procurement, operation, maintenance and operation of infrastructure.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP II beserta Para Pihak sepakat bahwa Kerjasama Penyelenggaraan Perkeretaapian Bandara ini menggunakan skema bagi hasil dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perhitungan nilai bagi hasil adalah berdasarkan EBITDA dikurangi dengan pembayaran utang;
- Nilai bagi hasil yang ditentukan, mengacu kepada laporan keuangan Railink dan dilakukan berdasarkan proporsi realisasi AP II dan Para Pihak;
- Pembayaran Bagi Hasil mulai dilakukan pada tahun ketiga setelah penyelenggaraan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta beroperasi penuh untuk 1 (satu) tahun anggaran.

- e) PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")
Pada tanggal 4 Mei 2018, AP II dan Pertamina mengadakan perjanjian No. PJJ.04.04/00/05/2018/0170 dan 007/F20100/2018-SO untuk melaksanakan pelayanan pengisian bahan bakar pesawat udara dan sewa pemanfaatan fasilitas Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) milik AP II di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2020.

Perjanjian tersebut diperpanjang mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2022 berdasarkan Perjanjian Nomor PJJ.04.04/00/05/2020/0127 dan SP052/F10100/2020-S3 Tanggal 5 Mei 2020.

Pada tanggal 4 Mei 2018, AP II dan Pertamina mengadakan perjanjian No. PJJ.04.04/00/05/2018/0171 dan 007/F20100/2018-SO untuk melaksanakan pelayanan pengisian bahan bakar pesawat udara di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Minangkabau, Sultan Syarif Kasim II, Sultan Mahmud Badaruddin II dan Banyuwangi. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2023.

Pada tanggal 31 Maret 2015, AP II dan Pertamina mengadakan perjanjian No. 008/F20100/2015-S0 dan No. PJJ.04.04/00.04/03/2015/0048 untuk melaksanakan pelayanan pengisian bahan bakar pesawat udara di Bandara Kualanamu. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 5 tahun

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP II and the Parties agreed that the Cooperation Arrangement of Airport Railway will use the following profit sharing scheme:

- The calculation of the profits is based on EBITDA less the payment of the debt;
- The profit sharing portions are referred to the Railink's financial statements and is based on the proportion of the realization of AP II and the Parties;
- Revenue Sharing Payment began to be made in the third year after the implementation of the Soekarno-Hatta Airport Railway fully operational for 1 (one) fiscal year.

- e) PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")
On May 4, 2018, AP II and Pertamina entered into an agreement No. PJJ.04.04/00/05/2018/0170 and 007/F20100/2018-SO to perform the airline refueling services and Aircraft Charging Depot (DPPU) facilities rental at Soekarno-Hatta International Airport. This agreement is valid for 2 years starting on April 1, 2018 until March 31, 2020.

The agreement was extended from April 1, 2020 until March 31, 2022 based on agreement no PJJ.04.04/00/05/2020/0127 and SP052/F10100/2020-S3 dated May 5, 2020.

On May 4, 2018, AP II and Pertamina entered into an agreement No. PJJ.04.04/00/05/2018/0171 and 007/F20100/2018-SO to perform the airline refueling services at Halim Perdanakusuma, Minangkabau, Sultan Syarif Kasim II, and Sultan Mahmud Badaruddin II and Banyuwangi Airport. This agreement is valid for 5 years starting on April 1, 2018 until March 31, 2023.

On March 31, 2015, AP II and Pertamina entered into an agreement No. 008/F20100/2015-S0 and No. PJJ.04.04/00.04/03/2015/0048 to perform the airline refueling services at Kualanamu Airport. The project period was effective for 5 years starting on July 25, 2013 until July

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

sejak 25 Juli 2013 sampai dengan 24 Juli 2018. Perjanjian tersebut diperpanjang mulai dari tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 berdasarkan perjanjian No.PJJ.04.04/00/08/2018/0626 dan No.013/F20100/2018-S0 tanggal 7 Agustus 2018.

Pada tanggal 14 Desember 2015, AP II dan Pertamina mengadakan perjanjian No. 041/F00000/2015-03 dan No. PJJ.04.04/00.02/12/2015/0106 untuk melaksanakan pelayanan pengisian bahan bakar pesawat udara di Bandara Husein Sastranegara, Supadio, Sultan Iskandar Muda, Raja Haji Fisabilillah, Sultan Thaha, Depati Amir dan Silangit. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 2 tahun sejak 1 Oktober 2015 sampai dengan 30 September 2017. Perjanjian tersebut diperpanjang mulai dari tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2022 berdasarkan perjanjian No.PJJ.04.04/00/03/2018/0069 dan No.003/F20100/2018-S3 tanggal 14 Maret 2018.

- f) Perjanjian Konsesi-Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Pada tanggal 15 Desember 2015, AP II mengadakan Perjanjian dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) mengenai pemberian konsesi untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian No. HK.2012/6/DRJU.kum 2015 dan PJJ.04.04/00.02/12/2015/0025 (Perjanjian Konsesi).

DJPU memberikan hak kepada AP II melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan termasuk meliputi pelayanan sehubungan dengan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos. Layanan tersebut mencakup penyediaan dan/atau pengembangan:

- Fasilitas kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara;
- Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos;
- Fasilitas elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan; dan
- Lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang digunakan untuk mendukung transportasi udara.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

24, 2018. The agreement was extended from July 25, 2018 to July 24, 2023 based on agreement No.PJJ.04.04/00/08/2018/0626 and No.013/F20100/2018-S0 dated August 7, 2018.

On December 14, 2015, AP II and Pertamina entered into an agreement No. 041/F00000/2015-03 and No. PJJ.04.04/00.02/12/2015/0106 to perform the airline refueling services at Husein Sastranegara, Supadio, Sultan Iskandar Muda, Raja Haji Fisabilillah, Sultan Thaha, Depati Amir and Silangit Airport. The project period was effective for 2 years starting on October 1, 2015 until September 30, 2017. The agreement was extended from October 1, 2017 to September 30, 2022 based on agreement No. No.PJJ.04.04/00/03/2018/0069 and No.003/F20100/2018-S3 dated March 14, 2018.

- f) Concession Agreement-Directorate General of Civil Aviation
On December 15, 2015, AP II entered into Agreement with the Directorate General of Civil Aviation (DJPU) regarding the concession provided to AP II to conduct airport services as stated in agreement No. HK.2012/6/DRJU.kum 2015 and PJJ.04.04/00.02/12/2015/0025 (Concession Agreement).

DJPU granted the right to AP II to conduct the airport service activities including aircraft, passenger, freight and postal related services. Such services encompass for the provision and/or development of:

- Facilities for service activities for landing, takeoff, maneuvering, parking and storage of aircraft;
- Terminal facilities for passenger transport services, cargo and mail;
- Electronic facilities, electricity, water and waste disposal installations; and
- Areas for the building, grounds and industry as well as buildings provided to support air transportation.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi adalah sebagai berikut, antara lain:

- AP II diwajibkan untuk membayar pendapatan konsesi dari pelayanan jasa kebandarudaraan sebesar 2,5% dari pendapatan pelayanan jasa kebandarudaraan per tahun, yang akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun. Nilai yang dibayarkan tersebut akan diakui sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Perjanjian Konsesi berlaku selama 2 (dua) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian dan diperpanjang selama 30 tahun sesuai kesepakatan DJPU dan AP II, setelah AP II mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.

DJPU memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Konsesi berdasarkan Perjanjian Konsesi sesuai dengan kewenangannya yang diatur oleh Undang-Undang.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, AP II telah membukukan pencadangan beban konsesi masing-masing sebesar Rp293.488.000 dan Rp270.174.000.

Perjanjian Konsesi tersebut telah berakhir pada tanggal 14 Desember 2017. Pada tanggal otorisasi untuk penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perpanjangan perjanjian tersebut masih dalam proses. AP II telah membukukan cadangan beban konsesi dengan tarif 1% dari pendapatan pelayanan jasa kebandarudaraan pada laporan keuangan konsolidasian tahun 2021 dan 2020.

Pada tanggal 28 Juni 2018, AP II telah menerima tagihan pembayaran konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan tahun 2016 dari DJPU sebesar Rp102.578.000. Berdasarkan surat tagihan tersebut setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya, setelah 30 hari sejak dikeluarkannya tagihan tersebut.

Sampai dengan tanggal otorisasi untuk penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, AP II belum membayar denda tersebut. Atas hal tersebut AP II telah membukukan pencadangan beban denda sebesar Rp43.869.000.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Important conditions in the Concession Agreement, among others, are as follows:

- *AP II is required to pay concession revenue of airport service activities amounting to 2.5% from revenue of airport service activities per year, which will be evaluated every 5 (five) years. The amount paid will be recognized as Non Tax Revenue (PNBP).*
- *The Concession Agreement is valid for 2 (two) years, starting from date the Concession Agreement is signed and extended for 30 years as agreed by DJPU and AP II, after AP II received approval from shareholders general meeting*

DJPU has the authority to supervise and control the implementation of the Concession based on Concession Agreement in accordance with its authority regulated by the Law.

On December 31, 2021 and 2020, AP II has recorded accrued concession expense amounted to Rp293,488,000 and Rp270,174,000 respectively.

The Concession Agreement has expired on December 14, 2017. As of the date of the authorization of issuance of consolidated financial statements, the extension of the agreement is still in process. AP II has recorded provision of concession fees at a rate of 1% from revenue of airport services for the consolidated financial statements for the year 2021 and 2020.

On June 28, 2018, AP II has received a payment bill for aeronautical service concession for year 2016 from DJPU amounted to Rp102,578,000. Based on the bill, every late payment will be subjected to penalty of 2% for each month, 30 days after the bill issue date.

Up to the date of the authorization of issuance of consolidated financial statements, AP II has not paid the penalty. For this matter, AP II has recorded accrual for penalty expense amounted to Rp43,869,000.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP II telah melakukan pembayaran secara bertahap tagihan beban konsesi tahun 2016, yaitu sebesar Rp10.000.000 dan Rp92.578.000 masing-masing pada tanggal 21 Februari 2019 dan 4 Februari 2020.

Pada tanggal 22 April 2021, AP II telah menandatangani berita acara kesepakatan dengan DJPU sehubungan dengan besaran konsesi tahun 2017 sebesar Rp128.898 miliar.

Pada tanggal 28 April 2021, AP II telah mengajukan relaksasi pembayaran untuk tagihan konsesi tahun 2017 dan denda tahun 2016 dan belum mendapatkan persetujuan hingga penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini.

- g) Serah operasi Bandar Udara Banyuwangi
Pada tanggal 22 Desember 2017, AP II dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Pemkab Banyuwangi) menandatangani Berita Acara Serah Terima pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkab Banyuwangi. Tanah dan bangunan yang diserahkan oleh Pemkab Banyuwangi kepada AP II masing-masing seluas $\pm 1.318.678$ m² dan ± 17.910 m².

Pada tanggal 22 Desember 2017, AP II dan DJPU menandatangani Berita Acara Pengalihan Pengoperasian Bandar Udara Banyuwangi dari DJPU kepada AP II dengan nomor BA. 481 Tahun 2017, di mana DJPU menyerahkan pengalihan/ pengoperasian Bandar Udara Banyuwangi kepada AP II berikut fasilitas, peralatan dan sumber daya manusia.

Pada tanggal 22 Desember 2017, AP II dan DJPU menandatangani Berita Acara Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan Bandar Udara Banyuwangi dari DJPU kepada AP II dengan No. BA.1482 Tahun 2017, dimana DJPU menyerahkan hasil pekerjaan pada Bandar Udara Banyuwangi kepada AP II. Hasil pekerjaan tersebut berupa aset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan aset takberwujud yang seluruhnya berjumlah Rp207.706.379 yang dinilai berdasarkan harga perolehan.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP II has paid the concession fees for year 2016 in installments of Rp10,000,000 and Rp92,578,000 on February 21, 2019 and February 4, 2020, respectively.

On April 22, 2021, AP II has received a payment bill for aeronautical service concession for year 2017 from DJPU amounted to Rp128,898 billion.

On April 28, 2021, AP II has requested credit payment relaxation on aeronautical service concession for year 2017 and penalty for year 2016 to DJPU and had not received any approval until the completion date of these consolidated financial statement.

- g) *Transfer operations of Banyuwangi Airport
On December 22, 2017, AP II and the Government of Banyuwangi Regency (Pemkab Banyuwangi) signed an Official Report on the handover of land and/or buildings owned/ controlled by Pemkab Banyuwangi to AP II amounting to $\pm 1,318,678$ sqm and $\pm 17,910$ sqm, respectively.*

On December 22, 2017, AP II and DJPU signed the Minutes of Transfer of Banyuwangi Airport Operations from DJPU to AP II No. 481 Tahun 2017, whereby DJPU handed over the transfer/operation of Banyuwangi Airport to AP II including facilities, equipment and human resources.

On December 22, 2017, AP II and DJPU signed an Official Report on the Operation Handover of Banyuwangi Airport Work Results from DJPU to AP II No. BA.1482 Tahun 2017, where the DJPU submitted the proceeds at Banyuwangi Airport to AP II. The proceeds consist of equipment and machinery, buildings, roads and bridges, irrigation, network, other fixed assets and intangible assets with total amounted to Rp207,706,379 valued at cost.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 5 Januari 2018, AP II mengeluarkan Keputusan Direksi tentang *Task Force* Alih Operasi Bandar Udara Banyuwangi yang diperuntukkan untuk mendukung dan memastikan semua kesiapan pengalihan secara menyeluruh operasional Bandar Udara Banyuwangi kepada AP II, baik dari sisi fasilitas, operasi, pelayanan, komersial, sistem dan informasi serta pemenuhan sumber daya manusia berjalan dengan baik dan tepat, dengan pembentukan *Coordinator of Safety, Risk, Operation & Quality Control, Coordinator of Airport Service & Commercial Support, Coordinator of Shared Service dan Member.*

- h) Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Internasional Jawa Barat

Pada tanggal 22 Januari 2018, AP II, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Internasional Jawa Barat, dimana para pihak sepakat menunjuk AP II sebagai operator untuk melaksanakan penyelenggaraan jasa kebandarudaraan, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 17 tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis para pihak.

Pada tanggal 4 Mei 2018, AP II, Pemprov Jabar dan BIJB menandatangani Perjanjian Tambahan (Addendum I) atas Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Internasional Jawa Barat, yang menyepakati antara lain:

- Perjanjian berlaku terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dengan kesepakatan adanya masa *grace period*. Masa *grace period* terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan tanggal efektif.
- Jangka waktu perjanjian adalah 17 tahun terhitung sejak tanggal efektif.
- Tanggal efektif diperhitungkan sejak dioperasikannya Bandara oleh AP II yang tanggalnya ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Mei 2018 dan dituangkan dalam suatu Berita Acara Operasional.

On January 5, 2018, AP II issued Directors' Decree on Task Force of Operation Transfer Banyuwangi Airport which is intended to support and ensure all readiness of the complete transfer of Banyuwangi Airport operations to AP II, in terms of facilities, operations, services, commercial, system and information and the fulfillment of human resources goes well and appropriately, with the establishment of Coordinator of Safety, Risk, Operation & Quality Control, Coordinator of Airport Service & Commercial Support, Coordinator of Shared Service and Member.

- h) *Cooperation Agreement on Airport Service Provision at West Java International Airport*

On January 22, 2018, AP II, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) and PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) signed a Cooperation Agreement on Airport Service Provision at West Java International Airport, whereby the parties agreed to appoint AP II as operator to carry out the service airport, including the operation and maintenance of West Java International Airport in Kertajati Sub-district. The term of this agreement is valid for 17 years commencing from the signing of the agreement and may be extended upon the parties' written agreement.

On May 4, 2018, AP II, Pemprov Jabar and BIJB entered into Additional Agreement (Addendum I) on Cooperation Agreement on Airport Service Provision at West Java International Airport, that agreed on:

- *The agreement is effective as of the signing of the agreement by the parties, with grace period. Grace period is valid from the signing of the agreement until the effective date.*
- *Term of the agreement is 17 years from the effective date.*
- *The effective date is valid from the operation of the airport by AP II, which the date is set not later than May 24, 2018 and written in Operational Minutes.*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- i) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bandara Banyuwangi
Pada tanggal 30 Agustus 2018, AP II dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Tanah dan Bangunan untuk Kegiatan Pengusahaan dan/atau Pengembangan Bandar Udara Banyuwangi No. 188/524/429.012/2018 dan PJJ.04.04/00/08/2018/0754. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

Ruang lingkup kerjasama tersebut adalah sebagai berikut :

- Memanfaatkan tanah dan bangunan dengan situasi dan kondisi yang telah diketahui untuk kegiatan pengusahaan dan/atau pengembangan Bandar Udara Banyuwangi.
- Memberikan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pengelolaan Bandar Udara Banyuwangi.
- Rencana pemanfaatan tanah dan/atau bangunan adalah khusus untuk kegiatan pengusahaan dan/atau pengembangan Bandar Udara Banyuwangi.
- Tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek KSP tidak boleh dijaminkan dan/atau dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun kepada pihak lain.

- j) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bandara Tjilik Riwut
Pada tanggal 19 Desember 2018, AP II dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Dephub) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Tjilik Riwut Palangka Raya No. AU.2136/KUM/DJU/XII/2018 dan PJJ.04.04/00/12/2018/1246. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

Ruang lingkup kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengelola dan melakukan optimalisasi penyediaan dan pengembangan Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya sehingga meningkatkan perannya dalam mendukung kegiatan perekonomian.
- Memberikan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pengelolaan Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- i) *Cooperation Agreement of Utilization of Banyuwangi*
On August 30, 2018, AP II and Government of Banyuwangi signed Cooperation Agreement of State Property Utilization of Organizing Unit Banyuwangi Airport No. 188/524/429.012/2018 and PJJ.04.04/00/08/2018/0754. This agreement is effective for 30 years from signing date of the agreement.

Scopes of the cooperation are as follows:

- *Utilize land and building with known situation and condition for commercial activities and/or development of Banyuwangi Airport.*
- *Provide fixed contribution and profit sharing for management of Banyuwangi Airport.*
- *Planning for land and building utilization is specific for commercial activities and/or development of Banyuwangi Airport.*
- *Land and/or building that become objects of KSP should not be guaranteed and/or burdened with dependent rights of any kind to other parties.*

- j) *Cooperation Agreement of Utilization of Tjilik Riwut Airport*
On December 19, 2018, AP II and Directorate General of Civil Aviation Ministry of Transportation Republic Indonesia (Dephub) signed Cooperation Agreement of State Property Utilization of Organizing Unit Tjilik Riwut Airport (UPBU) Palangka Raya No. AU.2136/KUM/DJU/XII/2018 and PJJ.04.04/00/12/2018/1246. This agreement is effective for 30 years from signing date of the agreement.

Scopes of the cooperation are as follows:

- *Manage and optimize provision and development of Tjilik Riwut Airport Palangka Raya as the result increase its role in developing the economy activities.*
- *Provide fixed contribution and profit sharing for management of Tjilik Riwut Airport Palangka Raya as non-tax state revenue (PNBP).*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Penyerahan hasil pengembangan, pembangunan dan penambahan fasilitas Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya dari AP II kepada Dephub.
- k) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bandara Kelas I Radin Inten II Lampung
Pada tanggal 12 Oktober 2019, AP II dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Dephub) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Bandar Udara Kelas I Radin Inten II Lampung No. HK.201/0030/KUM/DRJU/X/2019 dan PJJ.04.04.01/00/10/2019/0917. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak tanggal 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2049.

Ruang lingkup kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengelola dan melakukan optimalisasi penyediaan dan pengembangan Bandar Udara Kelas I Radin Inten II Lampung sehingga meningkatkan perannya dalam mendukung kegiatan perekonomian.
 - Memberikan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pengelolaan Bandar Udara Kelas I Radin Inten II Lampung.
 - Penyerahan hasil pengembangan, pembangunan dan penambahan fasilitas Bandar Udara Kelas I Radin Inten II Lampung dari AP II kepada Dephub..
- l) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bandara Kelas I H. AS. Hanandjoeddin Tanjung Pandan dan Bandara Kelas I Fatmawati Soekarno Bengkulu
Pada tanggal 13 Oktober 2019, AP II dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Dephub) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Bandar Udara Kelas I H. AS. Hanandjoeddin Tanjung Pandan No. HK.201/0029/KUM/DRJU/X/2019 dan PJJ.04.04.01/00/10/2019/0918 dan Bandar Udara Kelas I Fatmawati Soekarno Bengkulu No. HK.201/0028/KUM/DRJU/X/2019 dan PJJ.04.04.01/00/10/2019/0919. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak tanggal 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2049.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Hand over of the result of the development, construction and addition facilities of Tjilik Riwut Palangka Raya Airport from AP II to Dephub.
- k) Cooperation Agreement of Utilization of Radin Inten II Class I Airport Lampung
On October 12, 2019, AP II and Directorate General of Civil Aviation Ministry of Transportation Republic Indonesia (Dephub) signed Cooperation Agreement of State Property Utilization of Raden Inten II Class I Airport Lampung No. HK.201/0030/KUM/DRJU/X/2019 and PJJ.04.04.01/00/10/2019/0917. This agreement is effective for 30 years start from January 1, 2020 to December 31, 2049.

Scopes of the cooperation are as follows:

- Manage and optimize provision and development of Radin Inten II Class I Airport Lampung as the result increase its role in developing the economy activities.
 - Provide fixed contribution and profit sharing for management of Radin Inten II Class I Airport Lampung.
 - Hand over of the result of the development, construction and addition facilities of Radin Inten II Class I Airport Lampung from AP II to Dephub..
- l) Cooperation Agreement of Utilization of H. AS. Hanandjoeddin Class I Airport Tanjung Pandan and Fatmawati Soekarno Class I Airport Bengkulu
On October 13, 2019, AP II and Directorate General of Civil Aviation Ministry of Transportation Republic Indonesia (Dephub) signed Cooperation Agreement of State Property Utilization of H. AS. Hanandjoeddin Class I Airport Tanjung Pandan No. HK.201/0029/KUM/DRJU/X/2019 and PJJ.04.04.01/00/10/2019/0918 and Fatmawati Soekarno Class I Airport Bengkulu No. HK.201/0028/KUM/DRJU/X/2019 and PJJ.04.04.01/00/10/2019/0919. This agreement is effective for 30 years start from January 1, 2020 to December 31, 2049.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ruang lingkup kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengelola dan melakukan optimalisasi penyediaan dan pengembangan Bandar Udara Kelas I H. AS. Hanandjoeddin Tanjung Pandan dan Bandar Udara Kelas I Fatmawati Soekarno Bengkulu sehingga meningkatkan perannya dalam mendukung kegiatan perekonomian.
- Memberikan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pengelolaan Bandar Udara Kelas I H. AS. Hanandjoeddin Tanjung Pandan dan Bandar Udara Kelas I Fatmawati Soekarno Bengkulu.
- Penyerahan hasil pengembangan, pembangunan dan penambahan fasilitas Bandar Udara Kelas I H. AS. Hanandjoeddin Tanjung Pandan dan Bandar Udara Kelas I Fatmawati Soekarno Bengkulu oleh AP II kepada Dephub

- m) Perjanjian Kerjasama Strategis Bandara Kualanamu
Pada tanggal 23 Desember 2021, AP II, PT Angkasa Pura Aviasi, dan GMR Airport Netherlands B.V telah menandatangani *Shareholders Agreement (SHA)* dan *Subscription of Share Agreement (SSA)* terkait pengelolaan dan pengembangan bandara Kualanamu.

Sampai dengan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, sedang dilakukan pemenuhan persyaratan (*condition precedent*) yang dimuat dalam SHA dan SSA masih dalam proses agar perjanjian dapat berlaku efektif dan akan persyaratan tersebut dituangkan dalam *Master Agreement (MA)*.

- n) Perjanjian Ijarah Muntahiyah bit Tamlik ("IMBT") dengan CIMB Niaga
PT Gapura Angkasa melakukan kerjasama pembiayaan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk dalam bentuk fasilitas pembiayaan langsung IMBT, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 092/CB/JKT/2017 yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 02 tanggal 9 Agustus 2017 oleh Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Pembiayaan ini ditandatangani dalam rangka penyewaan alat *ground support equipment (GSE)* untuk keperluan operasi PT Gapura Angkasa. Nilai kontrak atas pokok sewa

Scopes of the cooperation are as follows:

- *Manage and optimize provision and development of H. AS. Hanandjoeddin Class I Airport Tanjung Pandan and Fatmawati Soekarno Class I Airport Bengkulu as the result increase its role in developing the economy activities.*
- *Provide fixed contribution and profit sharing for management of H. AS. Hanandjoeddin Class I Airport Tanjung Pandan and Fatmawati Soekarno Class I Airport Bengkulu.*
- *Hand over of the result of the development, construction and addition facilities of H. AS. Hanandjoeddin Class I Airport Tanjung Pandan and Fatmawati Soekarno Class I Airport Bengkulu from AP II to Dephub*

- m) *Strategic Partnership Agreement Kualanamu Airport*
On December 2021, AP II, PT Angkasa Pura Aviasi, and GMR Airport Netherlands B.V had signed Shareholders Agreement (SHA) and Subscription of Share Agreement (SSA) regarding Kualanamu airport's operation and development.

Until the completion of this consolidated financial statement, the fulfillment of all condition precedents as stated in SHA and SSA is still on process so that the agreement is effective and will be included into the master agreement.

- n) *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik ("IMBT") Agreement with CIMB Niaga*
PT Gapura Angkasa entered into a financing partnership with PT Bank CIMB Niaga Tbk in the form of an IMBT direct financing facility, based on the Financing Agreement Number 092/CB/JKT/2017 as stated in the Notary Deed. 02 dated August 9, 2017 by Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Jakarta. This financing was signed in the context of ground support equipment (GSE) leasing for PT Gapura Angkasa's operations. The contract value of the principal lease amounted to Rp425,803,142

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

adalah sebesar Rp425.803.142 dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 120 bulan, atau jatuh tempo pada 7 Agustus 2027. Kepemilikan atas GSE tersebut akan berpindah dari bank kepada PT Gapura Angkasa seiring dengan berakhirnya kontrak.

Pada 5 November 2020, kedua belah pihak menandatangani amendemen kedua atas Perjanjian Pembiayaan No. 433/AMD/CB/JKT/2020 yang berisi perubahan skedul pembayaran sewa bulanan selama *grace period* untuk 11 bulan (Mei 2020 – Maret 2021) dan periode setelahnya hingga tanggal jatuh tempo sehubungan dengan pandemi Covid-19.

Pada 12 April 2021, kedua belah pihak menandatangani kesepakatan dalam surat No. 025/EXT/KPP/CBTVIII/CBGII/IV/2021 yang berisi perpanjangan masa *grace period* selama 12 bulan (April 2021 - Maret 2022) dan perpanjangan jangka waktu pembiayaan hingga 7 Maret 2028.

PT Hotel Indonesia Natour (“HIN”)

a) HIN mengadakan Perjanjian Pembangunan, Pemilikan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Gedung dan Fasilitas Penunjang dengan PT Cipta Karya Bumi Indah dan PT Grand Indonesia berdasarkan Akta No. 141 Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2004. Bentuk kerjasama yang disepakati dalam rangka mengembangkan Eks. Unit Hotel Indonesia dan Unit Inna Wisata dengan pola *Build Operate and Transfer* (BOT) untuk masa 30 tahun dan dengan Hak Opsi Perpanjangan selama 20 tahun.

Kompensasi yang akan diterima HIN terdiri dari penggantian biaya pindah kantor pusat selama masa konstruksi dan kompensasi tahunan. Besarnya kompensasi tahunan pada 9 tahun pertama sebesar Rp10.000.000 pertahun dan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya sehingga seluruhnya berjumlah Rp355.000.000.

Pada tanggal 22 Desember 2010, HIN menerima kompensasi sebesar Rp400.000.000 atas Pelaksanaan Hak Opsi Perpanjangan atas Perjanjian Pembangunan, Pemilikan, Pengelolaan dan Penyerahan

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

with a maximum financing term of 120 months, or due on August 7, 2027. The ownership of the GSE will be transferred from the bank to PT Gapura Angkasa along with the end of the contract.

On November 5, 2020, both parties signed the second addendum to Financing Agreement No. 433/AMD/CB/JKT/2020 which contains change of monthly payment schedule during the grace period for 11 months (May 2020 – March 2021) and the period thereafter until the due date in connection with the Covid-19 pandemic.

On April 12, 2021, both parties signed the agreement on Letter No. 025/EXT/KPP/CBTVIII/CBGII/IV/2021 which contains extension of grace period for 12 months (April 2021 - March 2022) and extension of financing period until March 7, 2028.

PT Hotel Indonesia Natour (“HIN”)

a) HIN entered into Development, Ownership, Management, and Handover Agreements of Land, Buildings, and Supporting Facilities with PT Cipta Karya Bumi Indah and PT Grand Indonesia based on Deed No. 141 Notary Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Sc., Notary in Jakarta on May 13, 2004. The agreed form of cooperation in the context of developing Ex. Hotel Indonesia Units and Inna Wisata Units with a Build Operate and Transfer (BOT) pattern for 30 years and with Optional Extension Rights for 20 years.

The compensation to be received by HIN consists of reimbursement of the cost of moving the head office during the construction period and annual compensation. Annual compensation for the first 9 years is Rp10,000,000 per year and will continue to increase in the following years so that the total becomes Rp355,000,000.

On December 22, 2010, HIN received compensation amounting to Rp400,000,000 for the Exercise of Extension of Option Rights on Development, Ownership, Management, and Handover of Land,

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Kembali Tanah, Gedung dan Fasilitas Penunjang berdasarkan Akta No. 195 Notaris Lim Robbyson Halim, S.H., M.H., Notaris pengganti di Jakarta.

- b) HIN mengadakan Perjanjian Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Tanah dengan cara Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) dengan PT Karya Cipta Balindo berdasarkan Akta No. 6 Notaris Betsil Untajana, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2004. Kesepakatan tersebut untuk merenovasi Golf Course dan pembangunan Club House di Unit Inna Grand Bali Beach, Bali dengan pola kerjasama Build Operate and Transfer (BOT) untuk jangka waktu 25 tahun. Dengan kesepakatan ini, HIN harus menyerahkan hak penguasaan Golf Course dan Club House selama masa BOT. Sebaliknya HIN akan menerima kompensasi untuk kerugian selama masa konstruksi dan kompensasi tahunan selama masa BOT. Dengan kerja sama ini HIN akan mendapat kompensasi sebesar Rp42.000.000 yang terdiri dari kompensasi kerugian selama masa konstruksi sebesar Rp1.500.000 dan kompensasi selama masa BOT sebesar Rp40.500.000.

Pada 22 Desember 2021, PT Hotel Indonesia Natour ("HIN") dan PT Karya Cipta Balindo ("KCB") menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pengakhiran Kerja Sama BOT Pengembangan Bali Beach Golf Course ("BA Pengakhiran"), adapun BA Pengakhiran ini didasari atas rencana HIN untuk melakukan Revitalisasi Grand Inna Bali Beach menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan, sehingga pada 21 Juli 2021 HIN dan KCB menandatangani Komitmen Bersama penunjukan KJPP Pengakhiran Kerja Sama BOT, guna melakukan penilaian dan penghitungan atas sisa investasi yang akan dibayarkan.

Berdasarkan hasil perhitungan KJPP, didapat nilai kompensasi pengakhiran lebih awal kerja sama BOT adalah sebesar Rp24.000.000 terhadap nilai ini dikurangi biaya kompensasi BOT Juli – Desember 2021 sebesar Rp840.000 dan biaya novasi tenant ruko sebesar Rp427.500, sehingga total nilai kompensasi pengakhiran lebih awal kerja sama BOT adalah sebesar Rp22.732.500.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Buildings, and Supporting Facilities based on Deed No. 195 Notary Lim Robbyson Halim, S.H., M.H., substitute Notary in Jakarta.

- b) *HIN entered into a Land Use and/or Utilization Agreement through Build Operate and Transfer (BOT) with PT Karya Cipta Balindo based on Deed No. 6 Notary Betsil Untajana, S.H., Notary in Jakarta on July 14, 2004. The agreement is to renovate the Golf Course and build a Club House at the Inna Grand Bali Beach Unit, Bali with a Build Operate and Transfer (BOT) cooperation pattern for 25 years. With this agreement, HIN must transfer the ownership rights to the Golf Course and Club House during the BOT period. In return, HIN will receive compensation for losses during the construction period and annual compensation during the BOT period. With this collaboration, HIN will receive compensation of Rp42,000,000 consisting of compensation for losses during the construction period of Rp1,500,000 and compensation during the BOT period is Rp40,500,000.*

On December 22, 2021, PT Hotel Indonesia Natour ("HIN") and PT Karya Cipta Balindo ("KCB") signed the Minutes of Termination of the BOT Cooperation for the Development of Bali Beach Golf Course ("Termination of BA"), while the termination of BA was based on the HIN plan to revitalize Grand Inna Beach Bali into a Special Economic Zone for Health Tourism, so that on July 21, 2021, HIN and KCB signed a Joint Commitment to appoint KJPP for Termination of BOT Cooperation, to evaluate and calculate the remaining investment to be paid.

Based on the results of the KJPP calculation, the compensation value for the early termination of the BOT cooperation is Rp24,000,000 against this value less the cost of compensation for BOT in July – December 2021 of Rp840,000 and the novation fee for shophouse tenants of Rp427,500 so the total value of compensation for early termination of BOT cooperation is Rp22,732,500.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- c) Berdasarkan Perjanjian Sewa Ruang No.38/PERJ/DIRUT/HIN/XXI/2015 tanggal 15 Desember 2015 dan telah dilakukan addendum Pertama Kontrak Sewa Ruang tanggal 10 Oktober 2016, HIN menyewakan sebuah ruangan di Menara BCA Lantai 39 kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), yaitu zona F, G dan H yang menghadap ke sisi jalan Teluk Betung dengan luas ± 605m² selama 5 tahun. Harga sewa ruangan sebesar Rp556 per meter persegi per bulan (belum termasuk PPN). Sehingga total biaya sewa 605 meter persegi untuk 5 tahun adalah sebesar Rp18.120.040 belum termasuk biaya lainnya seperti *service charge*, parkir, pemakaian listrik dan telepon yang akan disesuaikan tarif yang berlaku umum untuk sewa di gedung Menara yang ditagih dari PT Grand Indonesia. Kontrak berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dimulai sejak tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut, kontrak dapat diperpanjang dengan melakukan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

Pada 26 Oktober 2021, PT Hotel Indonesia Natour dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) telah menandatangani Addendum Ketiga Kontrak Sewa Ruang No:0083/ADD/PERJ/DZ/HIN/X/2021 adapun dalam perjanjian ini disepakati sewa ruangan di Menara BCA Lt.39 untuk Zona A, Zona F, Zona G dan Zona H, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2026. Adapun total nilai sewa ruangan yang disepakati untuk jangka waktu tersebut adalah sebesar Rp15.724.800 adapun terhadap nilai tersebut disepakati untuk *set-off* dengan sebagian nilai tunggakan kewajiban HIN berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Lahan, adapun hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Restrukturisasi Utang dan Pengalihan Kewajiban antara PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), PT Hotel Indonesia Natour dan PT Hotel Indonesia Properti, No: 0076/PERJ/DF/HIN/IX/2021 tanggal 24 September 2021.

- d) Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali No. LHE-282/PW22/2017 Tanggal 10 Juli 2017

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- c) *Based on the Room Rental Agreement No.38/PERJ/DIRUT/HIN/XXI/2015 dated December 15, 2015, and the First Addendum to the Room Rental Contract was made on October 10, 2016, HIN leased a room at Menara BCA 39th Floor to PT Pembangunan Wisata Indonesia (Persero), namely zones F, G and H facing the side of Teluk Betung road with an area of ± 605sqm for 5 years. The room rental price is IDR 556 per square meter per month (excluding VAT). So that the total rental fee of 605 square meters for 5 years is Rp18,120,040 not including other costs such as service charges, parking, electricity, and telephone usage which will be adjusted to the generally accepted rate for rent in the Menara building which is billed from PT Grand Indonesia. The contract is valid for 5 years starting from the date of signing the contract, the contract can be extended by giving written notification at least 3 months before the contract period ends.*

On October 26, 2021, PT Hotel Indonesia Natour and PT Pembangunan Wisata Indonesia (Persero) signed the Third Addendum to the Room Lease Contract No.: 0083/ADD/PERJ/DZ/HIN/X/2021, while in this agreement it was agreed to rent a room in the Tower BCA Floor 39 for Zone A, Zone F, Zone G, and Zone H, for 5 (five) years starting from December 15, 2021, until December 14, 2026. The total agreed rental value for this period is Rp15,724,800 as for that value, it was agreed to set off with a portion of the value of the arrears of HIN's obligations based on the Land Utilization Agreement, while this is as stipulated in Article 7 of the Debt Restructuring and Transfer of Liability Agreement between PT Pembangunan Wisata Indonesia (Persero), PT Hotel Indonesia Natour and PT Hotel Indonesia Properti, No: 0076/PERJ/DF/HIN/IX/2021 dated September 24, 2021.

- d) *Based on the Evaluation Report of the Financial and Development Supervisory Agency for the Province of Bali No.LHE-282/PW22/2017 dated July 10, 2017*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

mengenai hambatan kelancaran pembangunan atas klaim tambahan PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada pelaksanaan proyek Inaya Putri Bali, Kedua belah pihak sepakat untuk menerima hasil evaluasi BPKP untuk menerima klaim tambahan atas *cost of money* sebesar Rp5.915.072, hasil perhitungan tersebut telah disesuaikan dengan basis tingkat suku bunga BI. Semula, PT Waskita Karya mengajukan 6 item atas biaya kompensasi/ganti rugi perihal IMB akibat penambah luasan, CAR (*Contractor All Risk*), biaya perencanaan dan pengembangan, *Overhead* Kontrak Induk, *Overhead* Kontrak Lanjutan, dan *Cost of Money*. Namun, hanya *Cost of Money* yang disepakati atas klaim Tambahan kepada pihak HIN. Jumlah total keseluruhan utang HIN kepada PT Waskita, sesuai dengan surat Direktur Operasi Waskita, No. 1273/WK/DIR/2017 tanggal 28 Juli 2017, perihal kepastian pembayaran Tagihan Proyek Inaya Putri Bali, adalah sebesar Rp41.161.105 dan ditambahkan dengan klaim atas *Cost of Money* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sebesar Rp5.915.072.

- e) HIN mengadakan perjanjian pembangunan Hotel Grand Inna Muara Padang dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero). Dalam proses pembangunan tersebut, terjadi pekerjaan tambah kurang yang dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero). Atas nilai dari pekerjaan tambah kurang tersebut masih belum ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Untuk menyelesaikan perbedaan pengakuan tersebut, kedua belah pihak sepakat menunjuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan kajian atas pekerjaan tambah kurang tersebut. Sampai dengan tanggal laporan ini, masih dalam proses kajian dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Merujuk pada surat PT PP Nomor 364/EXT/PP/DU/2019 tanggal 10 September 2019 perihal Penyelesaian Piutang Proyek HIN Padang yang dimana dalam surat tersebut disampaikan Hasil Laporan Audit BPKP dengan total sebesar Rp17.073.575 ditambah dengan Pekerjaan *Up Grade* yang sudah di sepakati oleh HIN melalui surat

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

regarding the obstacles to the smooth development of PT Waskita Karya (Persero) Tbk's additional claims on the implementation of the Inaya Putri Bali project, both parties agreed to accept the results of the BPKP evaluation to receive an additional claim on the cost of money amounting to Rp5,915,072, the calculation results have been adjusted to the basis of the BI rate. Initially, PT Waskita Karya proposed 6 items for compensation/ compensation costs regarding the IMB due to the increase in area, CAR (Contractor All Risk), planning and development costs, Master Contract Overhead, Continuation Contract Overhead, and Cost of Money. However, only the Cost of Money was agreed upon for the Additional claim to HIN. 1273/WK/DIR/2017 dated July 28, 2017, regarding the certainty of payment of the Inaya Putri Bali Project Bill, amounting to Rp41,161,105,025 and added to the claim for Cost of Money as previously explained of Rp5,915,072.

- e) *HIN entered into an agreement to build Grand Inna Muara Padang Hotel with PT Pembangunan Perumahan (Persero). In the development process, there was additional work carried out by PT Pembangunan Perumahan (Persero). On the value of the added work less there is still no agreement between the two parties. To resolve the difference in recognition, both parties agreed to appoint the Financial and Development Supervisory Agency to conduct a study on the added or less work. As of the date of this report, it is still in the process of being reviewed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).*

Referring to PT PP's letter Number 364/EXT/PP/DU/2019 dated September 10, 2019, regarding the Settlement of Receivables for the Padang HIN Project, which in the letter submitted the results of the BPKP Audit Report with a total of Rp17,073,575 plus the work Up Grade which has been approved by HIN through

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

No.742/DIROPSPDM/HIN/08/2011 sebesar Rp2.027.741 dengan Grand Total Rp19.101.316 Berdasarkan hal tersebut PT PP mengajukan permohonan untuk dilakukannya pertemuan erjasa dalam penyelesaian kewajiban piutang PT PP. Sampai dengan tanggal laporan ini, belum ada pertemuan antara HIN dengan PP.

- f) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sewa tanah dan bangunan (ex Suzuki) di kawasan Grand Inna Bali Beach No: 0006/PERJ/DIRPB/HIN/II/2021 antara PT Hotel Indonesia Natour dengan Bapak Ketut Bagus Angga Yudistira, adapun tanah dan bangunan seluas ±739 m² tersebut akan dimanfaatkan sebagai café, *fashion boutique*, penyewaan motor, UTV dan Storage Jet Ski, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak 15 Maret 2021 hingga 14 Maret 2026, dengan nilai sewa selama 5 (lima) tahun sebesar Rp550.000.
- g) Berdasarkan Perjanjian Sewa Lahan antara PT Hotel Indonesia Natour dengan PT Pertamina Bina Medika IHC No: 0099/PERJ/DZ/HIN/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, disepakati sewa lahan di kawasan Grand Inna Bali Beach seluas ±5 Ha (lima hektar) untuk jangka waktu 30 tahun, dengan nilai sewa per m² per tahun sebesar Rp172 dengan total nilai sewa selama jangka waktu sebesar Rp258.000.000. Adapun sampai dengan pelaporan nilai sewa tersebut belum dibayarkan oleh IHC kepada HIN dikarenakan Pihak IHC masih menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Kesehatan Sanur yang saat ini masih dalam proses pengajuan.
- h) HIN Pada tanggal 01 Februari 2021 melalui perjanjian Nomor 002/DIRUT/HIG-PERJ/II/2021 atau Nomor Perjanjian 0018/PERJ/DIRUT/HIN/II/2021, telah terjadi perjanjian antara PT Hotel Indonesia Group dengan PT Hotel Indonesia Natour yaitu kerjasama manajemen Hotel milik HIN yang menggunakan salah satu merek Hotel milik HIG yang bernama Grand Inna Bali Beach, Inaya Putri Bali, Inna Bali Heritage, Inna Sindhu Beach, Grand Inna Kuta, Grand Inna Tunjungan, Inna Tretes, Grand Inna Malioboro, Grand Inna Samudra, Grand Inna

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

letter No.742/DIROPSPDM/HIN/08/2011 amounting to Rp2,027,741 with a Grand Total of Rp19,101,316 Based on this, PT PP applied to a joint meeting to settle PT PP's debt obligations. As of the date of this report, there has been no meeting between HIN and PP.

- f) Based on the Cooperation Agreement for renting land and buildings (ex Suzuki) in the Grand Inna Bali Beach area No: 0006/PERJ/DIRPB/HIN/II/2021 between PT Hotel Indonesia Natour and Mr. Ketut Bagus Angga Yudistira, as for the land and building covering an area of ±739 sqm will be used as a café, *fashion boutique*, motorbike rental, UTV, and Storage Jet Ski, for a period of 5 (five) years, starting from March 15, 2021, to March 14, 2026, with a 5 (five) year rental value of Rp550,000.
- g) Based on the Land Lease Agreement between PT Hotel Indonesia Natour and PT Pertamina Bina Medika IHC No: 0099/PERJ/DZ/HIN/XII/2021 dated December 10, 2021, it was agreed to lease land in the Grand Inna Bali Beach area of ±5 Ha (five hectares) for 30 years, with a rental value per sqm per year of Rp172 with a total rental value of Rp258,000,000 As for reporting the rental value, IHC has not paid HIN because IHC is still waiting for the issuance of a Government Regulation concerning the Special Economic Zone (SEZ) for Health Tourism in Sanur which is currently still in the process of being submitted.
- h) HIN On February 1, 2021, through Agreement Number 002/DIRUT/HIG-PERJ/II/2021 or Agreement Number 0018/PERJ/DIRUT/HIN/II/2021, there has been an agreement between PT Hotel Indonesia Group and PT Hotel Indonesia Natour, namely HIN's hotel management collaboration that uses one of HIG's hotel brands, namely Grand Inna Bali Beach, Inaya Putri Bali, Inna Bali Heritage, Inna Sindhu Beach, Grand Inna Kuta, Grand Inna Tunjungan, Inna Tretes, Grand Inna Malioboro, Grand Inna Samudra, Grand

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Medan, Inna Parapat, Grand Inna Padang. Jangka waktu perjanjian adalah sebelum Hotel beroperasi dan tahap persiapan pembukaan (*pre-opening*) sampai dengan dimulainya *trial/soft opening* Hotel dengan besarnya Jasa *Technical Assistant* adalah sebesar nihil dan Hotel beroperasi adalah 10 (sepuluh) tahun dengan besaran *basic management fee* adalah sebesar 3% pendapatan kotor / *Gross Revenue* perbulan. Selain *Basic Management Fee*, PT Hotel Indonesia Group juga akan mendapatkan Insentif Fee sebesar 3% jika GOP mencapai 30% s/d 35%, 4% jika GOP mencapai 35% s/d 40%, 5% jika GOP mencapai 41% s/d 45%, dan 6% jika GOP mencapai 45% atau lebih. PT Hotel Indonesia Group juga akan mendapatkan *Marketing Fee* sebesar Rp329.242 termasuk pajak setiap bulan dan pembayaran tersebut akan dilakukan dalam 12 (dua belas) tahap. Setelah ditandatangani dokumen transaksi kepemilikan dalam rangka pembentukan Holding Hotel BUMN, biaya jasa *Sales* dan *Marketing* diatas dinyatakan tidak berlaku seiring dengan berlakunya pembayaran *Basic Fee* dan *Incentive Fee*.

Pada tanggal 03 Mei 2021 melalui perjanjian Nomor 014/DIRUT/HIG-PERJ/X/2021 atau Nomor Perjanjian 0045.3/ADD/PERJ/DIRUT/HIN/V/2021, adanya erjasam I terkait perjanjian erjasama antara PT Hotel Indonesia Group dengan PT Hotel Indonesia Natour bahwa sehubungan dengan Program Holding Hotel BUMN, melalui Akta Pemisahan Aktiva dan Passiva Perusahaan Perseroan PT Hotel Indonesia Natour kedalam PT Hotel Indonesia Properti Nomor 31, tanggal 30 April 2021 HIN telah melakukan pemisahan Aktiva dan Passiva 11 Aset hotelnya kepada PT Hotel Indonesia Properti. Bahwa terhitung sejak ditandatanganinya Akta Pemisahan maka seluruh kebijakan atas 11 Aset Hotel menjadi kewenangan PT Hotel Indonesia Properti. Maka dari itu, perjanjian erjasama manajemen Hotel milik HIN yang menggunakan salah satu merek Hotel milik HIG yang erjasa Grand Inna Bali Beach. Dengan adanya perubahan di bagian biaya *Sales* and *Marketing Fee*.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Inna Medan, Inna Parapat, Grand Inna Padang. The term of the agreement is before the Hotel operates and the pre-opening preparation stage until the start of the trial/soft opening Hotel with a Technical Assistant Services amount of nil and the Hotel operates for 10 (ten) years with a basic management fee of 3% of revenue. Gross / Gross Income per month. In addition to the Basic Management Fee, PT Hotel Indonesia Group will also get an Incentive Fee of 3% if GOP reaches 30% to 35%, 4% if GOP reaches 35% to 40%, 5% if GOP reaches 41% to d 45%, and 6% if GOP reaches 45% or more. PT Hotel Indonesia Group will also get a Marketing Fee of Rp329,242 including tax every month and payment will be made in 12 (twelve) stages. After signing the ownership transaction document in the context of establishing a SOEs Holding Hotel, the Sales and Marketing service fees above are declared invalid by the payment of the Basic Fee and Incentive Fee.

On May 3, 2021 through agreement Number 014/DIRUT/HIG-PERJ/X/2021 or Agreement Number 0045.3/ADD/PERJ/DIRUT/HIN/V/2021, there is an addendum I related to the cooperation agreement between PT Hotel Indonesia Group and PT Hotel Indonesia Natour that in connection with the SOEs Hotel Holding Program, through the Deed of Separation of the Company's Assets and Liabilities of the Company PT Hotel Indonesia Natour into PT Hotel Indonesia Properti Number 31, dated April 30, 2021 HIN has separated the Assets and Liabilities of 11 of its hotel assets to PT Hotel Indonesia Properti. That as of the signing of the Deed of Separation, all policies on 11 Hotel Assets become the authority of PT Hotel Indonesia Properti. Therefore, the HIN-owned Hotel management cooperation agreement uses one of HIG's hotel brands named Grand Inna Bali Beach. With the change in the cost of Sales and Marketing Fee.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- i) Pada tanggal 03 Mei 2021 melalui perjanjian Nomor 0001.1b/PERJ/DIR/HIP/V/2021, telah terjadi perjanjian antara PT Hotel Indonesia Group dengan PT Hotel Indonesia Properti yaitu menggunakan salah satu merek Hotel milik HIG yang bernama Merusaka Nusa Dua, Inna Bali Heritage, Inna Sindhu Beach, Grand Inna Kuta, Grand Inna Tunjungan, Inna Tretes, Grand Inna Malioboro, Grand Inna Samudra, Grand Inna Medan, Khas Parapat dan Truntum Padang. Jangka waktu perjanjian adalah sejak ditandatanganinya perjanjian ini hingga penandatanganan Akta Jual Beli Saham antara PT Hotel Indonesia Natour dan Koperasi Grand Inna Bali Beach, selaku pemegang saham dengan PT Wika Realty dalam rangka program integrasi dan peningkatan nilai hotel BUMN.
- j) Pada tanggal 10 Desember 2021 melalui nomor perjanjian HK.02.09/A.DIR.WR.4414/2021 atau nomor 016/DIRUT/HIG-PERJ/XII/2021, HIG dan PT Wijaya Karya Realty (WIKA Realty) sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan hotel. Dalam perjanjian tersebut WIKA Realty memberikan ijin pengelolaan hotel milik WIKA Realty kepada PT Hotel Indonesia Grup (HIG) dan HIG setuju untuk mengelola Hotel-hotel milik WIKA Realty sebagai berikut: Hotel Khas Ampel Surabaya, Hotel Khas Pekalongan, Hotel Khas Semarang, Hotel Khas Malioboro, Hotel Khas Makasar, Hotel Khas Pekanbaru, Hotel Khas Tugu Yogyakarta, Hotel Khas Gresik, dan Hotel Khas Tegal. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif dengan kewajiban HIG melaksanakan pengelolaan hotel. Berita Acara Operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ditambah masa pengelolaan pertama dan dapat di perpanjang untuk masa pengelolaan kedua apabila pengelolaan pertama menunjukkan Hasil Evaluasi Kinerja Positif. Sebagai kontra prestasi atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban HIG dengan baik dan sesuai dengan perjanjian maka HIG mendapatkan imbalan jasa sebagai berikut:
- Biaya dasar pengelolaan (*Basic Fee*) adalah sebesar 2,5% dari Laba Kotor Usaha (*Gross Operating Profit*) setiap bulan kalender yang bersangkutan.
 - Biaya Insentif pengelolaan hotel dimana imbalan yang diterima adalah 0% dari *Gross Operating Profit* (GOP) jika GOP

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- i) On May 3, 2021, through agreement Number 0001.1b/PERJ/DIR/HIP/V/2021, there has been an agreement between PT Hotel Indonesia Group and PT Hotel Indonesia Properti, namely using one of the hotel brands owned by HIG named Merusaka Nusa Dua, Inna Bali Heritage, Inna Sindhu Beach, Grand Inna Kuta, Grand Inna Tunjungan, Inna Tretes, Grand Inna Malioboro, Grand Inna Samudra, Grand Inna Medan, Khas Parapat and Truntum Padang. The term of the agreement is from the signing of this agreement until the signing of the Deed of Sale and Purchase of Shares between PT Hotel Indonesia Natour and the Grand Inna Bali Beach Cooperative, as shareholders with PT Wika Realty in the context of the integration program and increasing the value of SOEs hotels.
- j) On December 10, 2021 through agreement number HK.02.09/A.DIR.WR.4414/2021 or number 016/DIRUT/HIG-PERJ/XII/2021, HIG and PT WIKA Realty agreed to make and bind themselves in the hotel management agreement. In the agreement WIKA Realty gave PT Hotel Indonesia Group (HIG) a hotel management license owned by WIKA Realty and HIG agreed to manage the hotels owned by WIKA Realty as follows: Hotel Khas Ampel Surabaya, Hotel Khas Pekalongan, Hotel Khas Semarang, Hotel Khas Malioboro, Hotel Khas Makasar, Hotel Khas Pekanbaru, Hotel Khas Tugu Yogyakarta, Hotel Khas Gresik, dan Hotel Khas Tegal. This agreement is effective from the effective date with HIG's obligation to carry out hotel management. Minutes of Operation until December 31, 2021, plus the first management period and can be extended for a second management period if the first management shows Positive Performance Evaluation Results. As a counter achievement for implementing HIG's obligations properly and in accordance with the agreement, HIG will receive the following service fees:
- The basic management fee (*Basic Fee*) is 2.5% of Gross Operating Profit for each calendar month concerned.
 - Incentive costs for hotel management where the reward received is 0% of Gross Operating Profit (GOP) if the GOP of the

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

hotel tidak mencapai 30%, 2% dari GOP jika GOP hotel mencapai 30% s.d. 35%, atau 3% dari GOP jika GOP hotel mencapai >35% s.d. 40%, atau 4% dari GOP jika GOP hotel mencapai >40%.

Pembayaran atas imbalan jasa dapat diajukan setiap bulan kalender dalam satu tahun buku oleh HIG dan dibayarkan oleh WIKA Realty dalam waktu 30 hari kalender pada bulan berikutnya setelah WIKA Realty menerima dari HIG laporan manajemen bulanan untuk bulan kalender yang relevan, berikut tagihan invoice dan dokumen pendukung lainnya yang telah di verifikasi oleh WIKA Realty secara lengkap dan benar.

- k) Pada tanggal 10 Desember 2021 melalui nomor perjanjian 0023/PERJ/DIRUT/HIP/XII/2021 atau nomor 019/DIRUT/HIG-PERJ/XII/2021, PT Hotel Indonesia Grup (HIG) dan PT Hotel Indonesia Properti (HIPRO) sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan hotel, dalam perjanjian tersebut HIPRO memberikan ijin pengelolaan hotel milik HIPRO kepada HIG dan HIG setuju untuk mengelola hotel-hotel milik HIPRO sebagai berikut: Truntum Padang. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif dengan kewajiban HIG melaksanakan pengelolaan hotel setak tanggal Berita Acara Operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ditambah masa pengelolaan pertama dan dapat di perpanjang untuk masa pengelolaan kedua apabila pengelolaan pertama menunjukkan Hasil Evaluasi Kinerja Positif.

Pembayaran atas imbalan jasa dapat diajukan setiap bulan kalender dalam satu tahun buku oleh HIG dan dibayarkan oleh PT HIPRO dalam waktu 30 hari kalender pada bulan berikutnya setelah PT HIPRO menerima dari HIG laporan manajemen bulanan untuk bulan kalender yang relevan, berikut tagihan invoice dan dokumen pendukung lainnya yang telah di verifikasi oleh PT HIPRO secara lengkap dan benar.

- l) Pada tanggal 10 Desember 2021 melalui nomor perjanjian 0021/PERJ/DIRUT/HIP/XII/2021 atau nomor 017/DIRUT/HIG-PERJ/XII/2021, PT Hotel Indonesia Grup (HIG) dan PT Hotel Indonesia Properti (HIPRO) sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan hotel, dalam perjanjian tersebut PT HIPRO memberikan ijin pengelolaan hotel

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

hotel does not reach 30%, 2% of the GOP if the GOP of the hotel reaches 30% to 30%. 35%, or 3% of GOP if the hotel's GOP reaches >35% s.d. 40%, or 4% of GOP if the hotel's GOP reaches >40%.

Payment for service fees can be submitted every calendar month in one financial year by HIG and paid by WIKA Realty within 30 calendar days of the following month after WIKA Realty receives from HIG the monthly management report for the relevant calendar month, along with invoices and other supporting documents. Which has been verified by WIKA Realty completely and correctly.

- k) On December 10, 2021, through agreement number 0023/PERJ/DIRUT/HIP/XII/2021 or number 019/DIRUT/HIG-PERJ/XII/2021, PT Hotel Indonesia Group (HIG) and PT Hotel Indonesia Properti (HIPRO) agreed to make and bind themselves in an agreement hotel management, in the agreement PT HIPRO granted HIPRO's hotel management license to HIG and HIG agreed to manage HIPRO's hotels as follows: Truntum Padang. This agreement is valid from the effective date with the obligation of HIG to carry out hotel management from the date of the Minu'es of Operation until December 31, 2021, plus the first management period, and can be extended for a second management period if the first management shows Positive Performance Evaluation Results.

Payment for service fees can be submitted every calendar month in one financial year by HIG and paid by PT HIPRO within 30 calendar days of the following month after PT HIPRO receives from HIG a monthly management report for the relevant calendar month, including invoices and other supporting documents which has been verified by PT HIPRO completely and correctly.

- l) On December 10, 2021 through agreement number 0021/PERJ/DIRUT/HIP/XII/2021 or number 017/DIRUT/HIG-PERJ/XII/2021, PT Hotel Indonesia Group (HIG) and PT Hotel Indonesia Properti (HIPRO) agreed to make and bind themselves in a hotel management agreement, in the agreement PT HIPRO grants a hotel management permit belonging to PT HIPRO to HIG and HIG

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

milik PT HIPRO kepada HIG dan HIG setuju untuk mengelola hotel milik PT HIPRO yaitu hotel Merusaka Nusa Dua. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif dengan kewajiban HIG melaksanakan pengelolaan hotel sejak tanggal Berita Acara Operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ditambah masa pengelolaan pertama dan dapat di perpanjang untuk masa pengelolaan kedua apabila pengelolaan pertama menunjukkan Hasil Evaluasi Kinerja Positif.

Pembayaran atas imbalan jasa dapat diajukan setiap bulan kalender dalam satu tahun buku oleh HIG dan dibayarkan oleh PT HIPRO dalam waktu 30 hari kalender pada bulan berikutnya setelah PT HIPRO menerima dari HIG laporan manajemen bulanan untuk bulan kalender yang relevan, berikut tagihan *invoice* dan dokumen pendukung lainnya yang telah di verifikasi oleh PT HIPRO secara lengkap dan benar.

- m) Pada tanggal 10 Desember 2021 melalui nomor perjanjian 0022/PERJ/DIRUT/HIP/XII/2021 atau nomor 018/DIRUT/HIG-PERJ/XII/2021, PT Hotel Indonesia Grup (HIG) dan PT Hotel Indonesia Properti (HIPRO) sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan hotel, dalam perjanjian tersebut PT HIPRO memberikan ijin pengelolaan hotel milik PT HIPRO kepada HIG dan HIG setuju untuk mengelola Hotel-hotel milik PT HIPRO sebagai berikut: Khas Parapat. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif dengan kewajiban HIG melaksanakan pengelolaan hotel sejak tanggal Berita Acara Operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ditambah masa pengelolaan pertama dan dapat di perpanjang untuk masa pengelolaan kedua apabila pengelolaan pertama menunjukkan Hasil Evaluasi Kinerja Positif.

Pembayaran atas imbalan jasa dapat diajukan setiap bulan kalender dalam satu tahun buku oleh HIG dan dibayarkan oleh PT HIPRO dalam waktu 30 hari kalender pada bulan berikutnya setelah PT HIPRO menerima dari HIG laporan manajemen bulanan untuk bulan kalender yang relevan, berikut tagihan *invoice* dan dokumen pendukung lainnya yang telah di verifikasi oleh PT HIPRO secara lengkap dan benar.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

agrees to manage a hotel owned by PT HIPRO, namely the Merusaka Nusa Dua hotel. This agreement is valid from the effective date with the obligation of HIG to carry out hotel management from the date of the Minutes of Operation until December 31, 2021 plus the first management period and can be extended for a second management period if the first management shows Positive Performance Evaluation Results.

Payment for service fees can be submitted every calendar month in one financial year by HIG and paid by PT HIPRO within 30 calendar days of the following month after PT HIPRO receives from HIG a monthly management report for the relevant calendar month, including invoices and other supporting documents which has been verified by PT HIPRO completely and correctly.

- m) *On December 10, 2021, through agreement number 0022/PERJ/DIRUT/HIP/XII/2021 or number 018/DIRUT/HIG-PERJ/XII/2021, PT Hotel Indonesia Group (HIG) and PT Hotel Indonesia Properti (HIPRO) agreed to make and bind themselves in an agreement hotel management, in the agreement PT HIPRO granted PT HIPRO's hotel management license to HIG and HIG agreed to manage PT HIPRO's hotels as follows: Khas Parapat. This agreement is effective from the effective date with HIG's obligation to Carry out hotel management from the date of the Minutes of Operation until december 31, 2021, plus the first management period, and can be extended for a second management period if the first management shows Positive Performance Evaluation Results.*

Payment for service fees can be submitted every calendar month in one financial year by HIG and paid by PT HIPRO within 30 calendar days of the following month after PT HIPRO receives from HIG a monthly management report for the relevant calendar month, including invoices and other supporting documents which has been verified by PT HIPRO completely and correctly.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- n) Tanggal 10 Desember 2021 PT Hotel Indonesia Group menandatangani perjanjian Pengelolaan Hotel dengan PT Senggigi Pratama Internasional (SPI) dengan nomor perjanjian 020/DIRUT/HIGPERJ/XII/2021 dan 8005/PERJ/SPI-DIR/XII/2021 dalam perjanjian tersebut SPI memberikan ijin pengelolaan hotel milik SPI kepada HIG dan HIG setuju untuk mengelola hotel milik SPI yaitu Hotel Merumatta. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif dengan kewajiban HIG melaksanakan pengelolaan hotel sejak tanggal Berita Acara Operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ditambah masa pengelolaan pertama dan dapat di perpanjang untuk masa pengelolaan kedua apabila pengelolaan pertama menunjukkan Hasil Evaluasi Kinerja Positif.

Pembayaran atas imbalan jasa dapat diajukan setiap bulan kalender dalam satu tahun buku oleh HIG dan dibayarkan oleh SPI dalam waktu 30 hari kalender pada bulan berikutnya setelah SPI menerima dari HIG laporan manajemen bulanan untuk bulan kalender yang relevan, berikut tagihan *invoice* dan dokumen pendukung lainnya yang telah di verifikasi oleh SPI secara lengkap dan benar.

- o) Pada tanggal 18 April 2019 melalui perjanjian Nomor 001/DIRUT/HIG-PERJ/IV/2019 atau Nomor Perjanjian 002/IFPRO/PKS/IV/2019, telah terjadi perjanjian antara PT. Hotel Indonesia Group dengan PT Indonesia Ferry Properti (IFPRO) yaitu kerjasama manajemen Hotel milik IFPRO yang menggunakan salah satu merek Hotel milik HIG, yang terletak di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Florest Barat.

Jangka waktu perjanjian adalah sebelum Hotel Beroperasi dan tahap persiapan pembukaan (*pre-opening*) sampai dengan dimulainya *trial/soft opening Hotel* dengan besarnya Jasa *Technical Assistant* adalah sebesar Rp735.000.000 yang akan dibayarkan selama 4 tahap dan setelah Hotel beroperasi adalah 10 (sepuluh) tahun dengan besaran *basic management fee* adalah sebesar 2% pendapatan kotor/*Gross Revenue* perbulan. Selain *Basic Management Fee*, PT. Hotel Indonesia Group Juga akan mendapatkan *Incentif Fee* sebesar 3% jika GOP mencapai 35%, 4% jika GOP mencapai 36% s/d 40%, 5% jika GOP mencapai 41% s/d 45%, dan 6% jika GOP mencapai 46% atau lebih.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- n) On December 10, 2021, PT Hotel Indonesia Group signed a Hotel Management Agreement with PT Senggigi Pratama Internasional (SPI) with agreement numbers 020/DIRUT/HIG PERJ/XII/2021 and 8005/PERJ/SPI-DIR/XII/2021 in the agreement SPI provides SPI's hotel management license to HIG and HIG agreed to manage SPI's hotel, Merumatta Hotel. This agreement is effective from the effective date with HIG's obligation to carry out hotel management from the date of the Minutes of Operation until December 31, 2021, plus the first management period, and can be extended for a second management period if the first management shows Positive Performance Evaluation Results.

Payment of service fees can be submitted every calendar month in one financial year by HIG and paid by SPI within 30 calendar days of the following month after SPI receives from HIG the monthly management report for the relevant calendar month, including invoices and other supporting documents that have been submitted. Verified by SPI completely and correctly.

- o) On April 18, 2019, through agreement Number 001/DIRUT/HIG-PERJ/IV/2019 or Agreement Number 002/IFPRO/PKS/IV/2019, there was an agreement between PT. Hotel Indonesia Group with PT Indonesia Ferry Properti (IFPRO) is a hotel management collaboration owned by IFPRO that uses one of the hotel brands owned by HIG, which is located in Labuan Bajo, West Manggarai, West Flores.

The term of the agreement is before the Hotel Operates and the pre-opening stage until the start of the trial/soft opening of the Hotel with the amount of Technical Assistant Services is Rp735,000,000 which will be paid in 4 stages and after the hotel operates is 10 (ten) years with a basic management fee of 2% gross income per month. In addition to the Basic Management Fee, PT. Hotel Indonesia Group will also get an Incentive Fee of 3% if the GOP reaches 35%, 4% if the GOP reaches 36% to 40%, and 5% if the GOP reaches 41% to 45%, and 6% if the GOP reaches 46 % or more.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT Hotel Indonesia Group juga akan mendapatkan *Marketing Fee* sebesar 1,5% dari pendapatan kamar Hotel, dan akan dibayarkan setiap bulannya paling lambat dalam waktu 30 hari setelah HIG menyampaikan secara tertulis laporan bulanan mengenai hasil pendapatan kotor dan besarnya Biaya Operasional Hotel, berikut tagihan kepada IFPRO secara lengkap.

p) Tanggal 12 Oktober 2019 PT Hotel Indonesia Group menandatangani perjanjian kerjasama dengan Perum Jasa Tirta II atas pengelolaan Hotel, Restoran dan Bungalow yang terletak di Hotel Pesangrahan, Jatiluhur, Purwakarta. PT Hotel Indonesia Group berhak untuk memperoleh *joining fee* sebesar Rp150.000.000. PT Hotel Indonesia Group juga berhak untuk memperoleh *management fee* sebesar 2%-5% dari laba usaha kotor, tergantung dari *Gross Operating Profit* (GOP) dari hotel yang dikelola, bila GOP 30-35% maka *management fee* adalah sebesar 2%, bila GOP 36-40% maka *management fee* adalah 3%, bila GOP adalah 41-45% maka *management fee* sebesar 4%, bila GOP melebihi 46% maka *management fee* adalah sebesar 5% selain itu PT Hotel Indonesia Group juga berhak untuk mendapatkan biaya penjualan dan pemasaran sebesar 2% dari pendapatan kamar per bulan, dan 10% dari nilai transaksi bila terdapat penjualan melalui portal HIG.

q) Pada tanggal 15 Agustus 2018 PT Hotel Indonesia Natour Membuat Perjanjian Kerjasama pengelolaan Hotel dengan PT Bukit Asam dengan Nomor perjanjian T/062.J/0400/HK.03/VIII/2018 dan No.32.a.PERJ/DIRUT/HIN/VIII/2018 dimana maksud dan tujuan perjanjian ini sebagai pedoman dalam melakukan kerjasama pengelolaan hotel yang menggunakan merek Hotel milik HIN, untuk kepentingan PT BA sesuai dengan standar perhotelan pada umumnya dan sesuai standar hotel HIN pada khususnya, antara lain standar pemberian nama di hotel dan lain-lain.

Obyek perjanjian yang dimanfaatkan oleh HIN adalah Hotel yang erjasa Hotel Ombilin, dengan jumlah kamar sebanyak 21 kamar yang beralamat di Jl. Ahmad Yani kelurahan Sawahlunto Sumatera Barat, Atas pengelolaan aset milik PT BA oleh HIN, PT BA bersedia membayar biaya jasa

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT Hotel Indonesia Group will also receive a Marketing Fee of 1.5% of hotel room revenue and will be paid every month no later than 30 days after HIG submits a written monthly report regarding the results of gross income and the amount of Hotel Operational Costs, along with invoices to IFPRO in full.

p) *On October 12, 2019, PT Hotel Indonesia Group signed a cooperation agreement with Perum Jasa Tirta II for the management of the Hotel, Restaurant and Bungalow located at Hotel Pesangrahan, Jatiluhur, Purwakarta. PT Hotel Indonesia Group has the right to obtain a joining fee of Rp150,000,000. PT Hotel Indonesia Group is also entitled to receive a management fee of 2%-5% of gross operating profit, depending on the Gross Operating Profit (GOP) of the hotel being managed, if the GOP is 30-35%, the management fee is 2%, if the GOP is 36-40% then the management fee is 3%, if the GOP is 41-45% then the management fee is 4%, if the GOP exceeds 46% then the management fee is 5% besides that PT Hotel Indonesia Group is also entitled to get sales fees and marketing of 2% of room revenue per month, and 10% of transaction value if there are sales through the HIG portal.*

q) *On August 15, 2018, PT Hotel Indonesia Natour made a Hotel Management Cooperation Agreement with PT Bukit Asam with agreement numbers T/062.J/0400/HK.03/VIII/2018 and No.32.a.PERJ/DIRUT/HIN/VIII /2018 where the intent and purpose of this agreement is as a guideline in conducting cooperation in hotel management using the Hotel brand belonging to HIN, for the benefit of PT by hospitality standards in general and according to HIN hotel standards in particular, including naming standards in hotels and others.*

The erjast of the agreement used by HIN is a hotel called Hotel Ombilin, with a total of 21 rooms having its address at Jl. Ahmad Yani, Sawahlunto sub-district, West Sumatra, For the management of PT BA's assets by HIN, PT BA is willing to pay the HIN management service fee to provide

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

pengelolaan HIN melakukan jasa asistensi teknis atas persiapan hotel maupun saat Hotel sudah siap dikelola sepenuhnya. Biaya jasa pengelolaan hotel yang berupa Biaya Dasar Pengelolaan (*Basic Fee*) dan Biaya Insentif Pengelolaan akan di berikan oleh PT BA kepada HIN dengan besaran, mekanisme, dan perhitungan sebagaimana akan dituangkan kemudian pada Berita Acara Kesepakatan.

r) Pada tanggal 27 Agustus 2018 terdapat Berita Acara Kesepakatan antara PT BA dengan HIN melalui nomor 09.2/BA/DIRUT/HIN/VIII/2018 atau nomor T/068.1.J/0400/HK.03/VIII/2018 dimana PT BA dan HIN sepakat bahwa objek perjanjian yang dimanfaatkan oleh HIN adalah hotel sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama adalah berjumlah 21 kamar, ditambah dengan 8 kamar yang ditetapkan oleh PT BA, biaya dasar pengelolaan hotel adalah sebesar 15% dari total pendapatan kotor (*Gross Revenue*) hotel perbulan. Biaya Insentif Pengelolaan yang akan diberikan oleh PT BA kepada HIN adalah 5% dari Laba Usaha Kotor (*Gross Operating Profit*) hotel perbulan jika GOP Hotel mencapai sampai dengan 30% s/d 35%, 6% dari Laba Usaha Kotor (*Gross Operating Profit*) hotel perbulan jika GOP Hotel mencapai sampai dengan 35% s/d 40%, 7% dari Laba Usaha Kotor (*Gross Operating Profit*) hotel perbulan jika GOP Hotel mencapai lebih dari 40%.

s) Pada tanggal 8 September 2020 melalui nomor perjanjian 0058/PERJ/DIRPB/HIN/IX/2020 atau nomor 002/DIRUT/HIG-PERJ/IX/2020, atau nomor T/404A/14300/HK.03/IX/2020, atau nomor 004/PJJ-BMP.02/IX/2020, telah terjadi Perjanjian Novasi antara PT Hotel Indonesia Group dengan PT Bukit Multi Properti atas perjanjian kerjasama pengelolaan hotel antara PT Bukit Asam, Tbk dan Hotel Indonesia Natour para pihak dalam perjanjian novasi sepakat bahwa HIN dan PT BA dengan ini memberikan persetujuan atas penunjukan dan pengalihan seluruh tugas dan tanggung jawab serta hak-hak dan manfaat yang di terima oleh *Assignor* berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Berita Acara Kesepakatan untuk sepenuhnya beralih, dilaksanakan, dan diterima manfaatnya oleh PT BMP dan PT HIG.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

technical assistance services for the hotel preparation and when the hotel is ready to be fully managed. Hotel management service fees in the form of Basic Management Fees and Management Incentive Fees will be given by PT BA to HIN with the amount, mechanism, and calculation as will be stated later in the Minutes of Agreement.

r) *On 27 August 2018, there was a Minutes of Agreement between PT BA and HIN through number 09.2/BA/DIRUT/HIN/VIII/2018 or number T/068.1.J/0400/HK.03/VIII/2018 where PT BA and HIN agrees that the object of the agreement used by HIN is the hotel as stipulated in the cooperation agreement which is 21 rooms, plus 8 rooms set by PT BA, the basic cost of hotel management is 15% of the total gross revenue of the hotel per month. Management Incentive Fee that will be given by PT BA to HIN is 5% of the hotel's Gross Operating Profit per month if the GOP of the hotel reaches 30% to 35%, 6% of Gross Operating Profit) hotel per month if the hotel's GOP reaches up to 35% to 40%, 7% of the hotel's Gross Operating Profit per month if the hotel's GOP reaches more than 40%.*

s) *On September 8, 2020, through agreement number 0058/PERJ/DIRPB/HIN/IX/2020 or number 002/DIRUT/HIG-PERJ/IX/2020, or number T/404A/14300/HK.03/IX/2020, or number 004/PJJ-BMP.02/IX/2020, there has been a Novation Agreement between PT Hotel Indonesia Group and PT Bukit Multi Properti on a hotel management cooperation agreement between PT Bukit Asam, Tbk, and Hotel Indonesia Natour, the parties in the novation agreement agree that HIN and PT BA hereby agree to the appointment and transfer of all duties and responsibilities as well as the rights and benefits received by the Assignor based on the Cooperation Agreement and the Minutes of Agreement to fully transfer, implement, and receive benefits by PT BMP and PT HIG.*

PT Sarinah

a) Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS)

Berdasarkan surat tertanggal 8 Juni 2020 nomor 607/DIREKSI/E/VI/2020 perihal Kerjasama Bangun Guna Serah (*Building Operating Transfer*) transformasi erjas sarinah Thamrin, PT Sarinah telah menunjuk PT Wijaya Karya Realty sebagai mitra kerjasama BOT atas Obyek BOT yaitu lantai basement sampai dengan dan termasuk lantai 5 gedung Sarinah Thamrin dengan luas total ± 28.864 m² (lebih kurang dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat Meter Persegi).

Total Investasi yang dilakukan atas proyek BOT tersebut ialah sebesar Rp560.723.090 dengan jangka waktu selama 30 tahun dengan *internal rate of return* (IRR) sebesar 13,85%, para pihak sepakat bahwa nilai investasi tersebut adalah berdasarkan gambar *visioning*, lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya dari pelaksanaan pemugaran obyek BOT.

PT Sarinah berhak atas kompensasi bisnis dari PT Wijaya Karya Realty yang nilainya dihitung sebesar 3% dari pendapatan sewa. Pendapatan sewa adalah penghasilan kotor tidak termasuk PPN dan *Service Charge* dengan syarat setelah terbitnya laporan audit tahunan atas pengelolaan proyek BOT dan PT Sarinah telah membayarkan biaya sewa ruangan dan biaya-biaya lainnya atas penggunaan obyek BOT.

PT Sarinah berhak melakukan audit teknis obyek BOT setiap 5 tahun sekali, dengan biaya yang ditanggung PT Sarinah sendiri dan PT Wijaya Karya Realty berhak atas Hak Melakukan Pengelolaan (HMP) selama masa BOT.

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Sarinah antara PT Sarinah dengan PT Wijaya Karya Realty No. 15 tanggal 6 Mei 2021 yang menyebutkan bahwa perjanjian ini merupakan pelaksanaan atas kesepakatan para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) dengan demikian perjanjian ini merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir (pelengkap/turunan dari Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS)).

PT Sarinah

a) *Build-to-Handover Cooperation*

Based on a letter dated June 8, 2020 Number 607/Directors/E/VI/2020 regarding the collaboration to hand up (Building Operating Transfer) Transformation of the Sarinah Thamrin Building, PT Sarinah has visited PT Wijaya Karya Realty Cooperation with and incenses the 5th floor of the Sarinah Thamrin building with a vast A total of ± 28,864 sqm (approximately two eight thousand eight hundred and sixty-four square meters).

The total investment made on the BOT project is Rp560,723,090 with a period of 30 years with the Internal Rate of Return (IRR) of 13.85%, the parties agreed that the investment value was based on visioning images, the scope of work, Technical specifications, and budget plans from the implementation of the restoration of objects.

PT Sarinah is entitled to business compensation from PT Wijaya Karya Realty whose value is calculated at 3% of rental income. Rental income is gross income excluding VAT and Service Charges provided that after the publication of the annual audit report on the management of the BOT project and PT Sarinah has paid the room rental fee and other costs for the use of the BOT object.

PT Sarinah has the right to conduct a technical audit of the BOT object once every 5 years, with the costs being borne by PT Sarinah itself and PT Wijaya Karya Realty entitled to the Right to Manage (HMP) during the BOT period.

Based on the Sarinah Building Lease Agreement between PT Sarinah and PT Wijaya Karya Realty No. 15 dated 6 May 2021 which states that this agreement is an implementation of the agreement of the parties as regulated in Article 11 of the Build-to-Transfer Agreement (BGS).

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT Sarinah setuju untuk menyewakan dengan PT Wijaya Karya Realty bangunan seluas 22.985 m² yang terdiri dari lantai basement, lantai ground, dan lantai 1 sampai 6. Dimana jangka waktu sewa adalah selama 30 tahun dihitung sejak ditanda tangani Berita Acara Mulai Beroperasi.

b) Kerjasama Operasi Hotel D'Braga

PT Sarinah melakukan perjanjian Bangun, Guna, Serah (*Build, Operate, and Transfer/BOT*) dengan PT Wijaya Karya Gedung Tbk tentang Pengembangan Properti di Jalan Braga No. 10 Bandung - Jawa Barat. Pembangunan tersebut tertuang dalam sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor: 649 seluas 1.763 m².

Untuk melakukan kerjasama dengan PT Sarinah, PT Wijaya Karya Gedung Tbk telah memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham yang tertuang dalam Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat PT Wijaya Karya Gedung Tbk No: MJ.01.00/PS.WG.037/2015 tertanggal 13 November 2015. Sedangkan SARINAH telah memperoleh persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara seperti tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham No. s-89/MBU/01/2016 tertanggal 25 Januari 2016 tentang Persetujuan Pendayagunaan Aset Milik PT Sarinah di Jl. Braga No. 10, Bandung Jawa barat.

PT Sarinah berhak atas pembayaran sewa lahan sebesar 3,33% dari nilai NJOP tanah setiap tahunnya sebagaimana tertera dalam Peraturan Kementerian Keuangan No:33/PMK.06/2012 dan berhak mendapatkan ruang komersial seluas 132 m² selama masa berlakunya perjanjian kerjasama tanpa dikenakan biaya sewa ruang dan *service charge*. Sedangkan PT Wijaya Karya Gedung Tbk telah merencanakan jumlah investasi yang akan ditanamkan untuk membangun hotel dan fasilitas penunjang dengan investasi awal sebesar Rp81.192.000 dengan jangka waktu pengelolaan selama 25 tahun.

PT Sarinah tidak memiliki kewajiban memberikan ganti rugi kepada PT Wijaya Karya Gedung Tbk sebagai bentuk penyerahan dan atau transfer, yang timbul dalam perjanjian kerjasama ini. Sedangkan PT Wijaya Karya

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT Sarinah agreed to lease a building with PT Wijaya Karya Realty with an area of 22,985 sqm consisting of a basement floor, ground floor, and floors 1 to 6. Where the lease term is 30 years from the signing of the Minutes of Operation Start.

b) *D'Braga Hotel Operation Cooperation*

PT Sarinah entered into a Build, Use, Transfer (Build, Operate, and Transfer/BOT) agreement with PT Wijaya Karya Gedung Tbk regarding Property Development at Jalan Braga No. 10 Bandung - West Java. The construction of the building is stated in the Hak Guna certificate with Number: 649 covering an area of 1,763 sqm.

To cooperate with PT Sarinah, PT Wijaya Karya Gedung Tbk has obtained the approval of the Shareholders as stated in the Shareholders' Decision outside the PT Wijaya Karya Gedung Tbk Meeting No: MJ.01.00/PS.WG.037/2015 dated November 13, 2015. Meanwhile, SARINAH has obtained approval from the Minister of State-Owned Enterprises as stated in the General Meeting of Shareholders No. s-89/MBU/01/2016 dated January 25, 2016, concerning Approval for the Utilization of Assets Owned by PT Sarinah on Jl. Braga No. 10, Bandung, West Java.

PT Sarinah is entitled to a land lease payment of 3.33% of the NJOP value of the land annually as stated in the Ministry of Finance Regulation No:33/PMK.06/2012 and is entitled to a commercial space of 132 sqm for the duration of the cooperation agreement without being charged a space rental fee. and service charges. Meanwhile, PT Wijaya Karya Gedung Tbk has planned the amount of investment to be invested in building a hotel and supporting facilities with an initial investment of Rp81,192,000 with a management period of 25 years.

PT Sarinah has no obligation to provide compensation to PT Wijaya Karya Gedung Tbk as a form of submission and or transfer, which arises in this cooperation agreement. Meanwhile, PT Wijaya Karya Gedung Tbk is

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Gedung Tbk berkewajiban menyerahkan kembali dan mengalihkan obyek BOT pada tanggal pengalihan bangunan dan penyerahan kembali tanah kepada PT Sarinah.

**PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")**

- a) Perjanjian Pemanfaatan Materi Promosi "Prambanan Jazz Festival" (PJF) dengan PT Syakira Ghyna Rajawali Indonesia Communication (Rajawali)

TWC melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan materi promosi PJF dengan Rajawali sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama No. 361/HM.301/XI/2019 tanggal 26 November 2019.

Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa TWC berhak menggunakan Invensi Materi Promosi PJF selama jangka waktu 8 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian. TWC memiliki hak sebagai Co-Promotor PJF untuk turut serta mencari dan mendapatkan sponsor dari pihak lain di luar perjanjian dengan menggunakan Invensi Materi Promosi PJF.

Apabila akan diadakan event PJF, TWC dapat mencari *sponsorship* dengan usaha sendiri dengan kesepakatan nilai minimal sebesar Rp3.000.000. Atas pemanfaatan materi promosi tersebut, TWC telah melakukan pembayaran sebesar Rp36.548.616. Pembayaran tersebut merupakan jasa penyelenggaraan PJF ke 5 sekaligus merupakan pembayaran Royalti Invensi Materi Promosi PJF dengan *branding value* sebesar Rp37.000.000. Atas pembayaran tersebut TWC berhak mencatat sebagai aset selama masa perjanjian.

- b) Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja kepada Perusahaan Umum Produksi Film Negara (Perum PFN)
TWC mengadakan perjanjian kerjasama pembuatan dan komersialisasi film layar lebar berdurasi 90 menit berjudul "Akhir Pekan Panjang" dengan Perum PFN berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 272/OP.302/XI/2017 pada 16 November 2017 dan Addendum Pertama No. 160/PL.102/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018. Produksi film sebagaimana dimaksud Perjanjian ini dibiayai oleh Para Pihak

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

obliged to return and transfer the BOT object on the date of the transfer of the building and the handover of the land to PT Sarinah.

**PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")**

- a) *Agreement on the Utilization of Promotional Materials "Prambanan Jazz Festival" (PJF) with PT Syakira Ghyna Rajawali Indonesia Communication (Rajawali)*

TWC entered into a cooperation agreement for the use of PJF promotional materials with Rajawali in accordance with the Cooperation Agreement No. 361/HM.301/XI/2019 dated November 26, 2019.

In the agreement, it was agreed that TWC has the right to use PJF's Promotional Material Inventions for a period of 8 years from the date of signing the agreement. TWC has the right as Co-Promoter of PJF to participate in seeking and obtaining sponsorship from other parties outside the agreement by using PJF Promotional Material Inventions.

If a PJF event will be held, TWC can seek sponsorship with its own business with an agreement of a minimum value of Rp3,000,000. For the use of these promotional materials, TWC has made a payment amounting to Rp36,548,616. The payment is a service for organizing the 5th PJF as well as a royalty payment for the Invention of PJF Promotional Materials with a branding value amounting to Rp37,000,000. For this payment, TWC has the right to record it as an asset during the term of the agreement.

- b) *Working Capital Financing Agreement to the Produksi Film Negara Public Company (Perum PFN)*
TWC Company entered into a cooperation agreement for the production and commercialization of a 90-minute widescreen film entitled "Akhir Pekan Panjang" with Perum PFN based on Cooperation Agreement No. 272/OP.302/XI/2017 on November 16, 2017 and First Addendum No. 160/PL.102/VI/2018 dated June 29, 2018. The film production as referred to in this

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebesar Rp10.000.000, dengan rincian pembiayaan dalam bentuk modal untuk produksi film berdasarkan Perjanjian ini oleh TWC sebesar Rp5.000.000, sedangkan pembiayaan dari Perum PFN sebesar Rp5.000.000 yang berasal dari pihak sponsor. Perum PFN menyatakan bahwa proses produksi film selesai dalam 1 tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian.

Komponen pendapatan berdasarkan perjanjian ini terbagi atas:

- Pendapatan pra-proyek adalah pendapatan yang diterima oleh para pihak sebelum produksi film selesai sesuai jangka waktu Perjanjian, yang meliputi kelebihan penerimaan sponsorship setelah digunakan untuk menutup biaya sesuai RAB.
- Pendapatan pasca-proyek adalah pendapatan yang diterima oleh para pihak setelah produksi film dinyatakan selesai sesuai jangka waktu Perjanjian, yang meliputi penjualan tiket film.
- Pembagian Pendapatan dimaksud huruf a) dan b) menggunakan dasar perhitungan Bagi Hasil sebesar 25% untuk TWC dan 75% untuk Perum PFN, khusus bagi pendapatan pasca proyek akan dibagi setelah dikurangi beban biaya dan pajak Perum PFN terkait operasional film.

- c) Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan Kementerian Sekretariat Negara

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Juli 2021 oleh Notaris Buntario Tigris, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta, atas Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan TWC tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dimaksudkan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN berupa tanah dan bangunan serta aset lainnya TMII milik Kementerian Sekretariat Negara dengan melakukan pengelolaan sesuai kesepakatan para pihak.

Agreement is financed by the Parties with a Budget and Cost Plan (RAB) of Rp10,000,000, with details of financing in the form of capital for film production based on the Agreement. In this case TWC is Rp5,000,000, while the financing from Perum PFN is Rp5,000,000 which comes from the sponsor. Perum PFN stated that the film production process was completed within 1 year from the signing of the agreement.

The revenue components under this agreement are divided into:

- *Pre-project income is income received by the parties before film production is completed according to the term of the Agreement, which includes the excess of sponsorship receipts after being used to cover costs according to the RAB.*
- *Post-project income is the income received by the parties after the film production is declared completed according to the term of the Agreement, which includes the sale of film tickets.*
- *Revenue sharing referred to in letters a) and b) using the calculation basis for Profit Sharing of 25% for TWC and 75% for Perum PFN, specifically for post-project income, it will be divided after deducting the costs and taxes of Perum PFN related to film operations.*

- c) *Cooperation Agreement regarding of Cooperation in the Utilization of Owned State Property (BMN) in Taman Mini Indonesia Indah (TMII) with Ministry of State Secretariat*

Based on Deed No. 1 dated July 1, 2021 by Notary Buntario Tigris, SH., SE., MH., Notary in Jakarta, of Cooperation Agreement between Ministry of State Secretariat Negara Republik Indonesia with TWC regarding of Cooperation in the Utilization of Owned State Property on Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia in Taman Mini Indonesia Indah. Utilization cooperation (KSP) intended for optimize the usability of BMN in the form of land and buildings and other assets of TMII belonging to the Ministry of State Secretariat by managing according to the agreement of the parties.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Kerjasama yang disepakati antara lain sebagai berikut:

- Nilai dan objek KSP
 - i. Nilai wajar BMN Objek KSP adalah sebesar Rp12.824.485.985.
 - ii. Objek KSP yaitu tanah, bangunan eksisting fasilitas lainnya sesuai dengan lampiran Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan KSP yang berada dalam Kawasan KSP.
 - iii. Dalam hal terdapat perubahan atas Objek KSP, Para Pihak sepakat akan melakukan addendum dan memperhitungkan kembali kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas Objek KSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Ruang lingkup pelaksanaan KSP sebagai berikut: penggunaan atau pemanfaatan, pembangunan, renovasi dan pemeliharaan, pengelolaan, laporan tahunan, dan pembayaran kontribusi kepada negara oleh TWC berupa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan Objek KSP.
- TWC berhak membangun, merenovasi dan memelihara Objek KSP dengan didasarkan pada Program Pengajuan KSP TMII.
- Pembayaran Kontribusi Tetap:
 - i. Kontribusi tetap dihitung mulai dari awal KSP dan dibayarkan mulai tahun 2021 sebesar Rp1.385.044.486, untuk tahun pertama dan untuk tahun berikutnya dihitung dengan kenaikan sebesar 2,91% per tahun dari kontribusi tetap tahun sebelumnya.
 - ii. TWC diberikan keringanan untuk kontribusi tetap 3 tahun pertama sebesar 50%.
 - iii. selanjutnya dilakukan setiap tahun paling lambat 30 Juni pada tahun berjalan
- Pembagian keuntungan KSP dihitung sebesar 40,54% dari Laba Bersih KSP per tahun.
- Jangka waktu pelaksanaan KSP selama 25 tahun dihitung mulai berlaku 1 Juli 2021 sampai 30 Juni 2046 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The agreed collaborations include the following:

- Values and object of KSP:
 - i. The fair value of KSP Object BMN amounting to Rp12,824,485,985,.
 - ii. KSP objects are land, existing buildings and other facilities in accordance with the attachment to the Letter of the Minister of Finance concerning the KSP Approval located in the KSP Area.
 - iii. In the event that there is a change in the KSP Object, the Parties agree to make an addendum and recalculate the fixed contribution and profit sharing on the KSP Object in accordance with the provisions of the laws and regulations
- The scope of the KSP implementation as follows: use or utilization, construction, renovation and maintenance, management, annual reports, and payment of contributions to the state by TWC in the form of fixed contributions and profit sharing on the utilization of KSP Objects.
- TWC has the right to build, renovate and maintain KSP Objects based on the TMII KSP Submission Program
- Fixed Contribution Payment:
 - i. Fixed contributions are calculated starting from the beginning of the KSP and paid started in 2021 amounting to Rp1,385,044,486, for the first year and for the following year calculated with an increase of 2.91% per year from the previous year's fixed contributions.
 - ii. TWC is given discount for the first 3 years fixed contribution of 50%.
 - iii. Subsequent fixed contribution payments are made annually no later than June 30 of the current year.
- KSP profit sharing is calculated at 40.54% of KSP Net Profit per year.
- The KSP implementation period is 25 years starting from July 1, 2021 until June 30, 2046 and can be extended in accordance with the provisions of this Agreement and the prevailing laws and regulations.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- d) Perjanjian Kerjasama dengan PT Dapur Film Production tentang Produksi Film Layar Lebar "Ibu".
- TWC mengadakan Perjanjian tentang Produksi Film Layar Lebar (PKS Produksi) No. 03/PL.102/1/2019 tanggal 24 Januari 2019 beserta Addendum Perjanjian No.363/PL.102/XI/2019 tanggal 28 November 2019.
 - TWC mengadakan Perjanjian tentang Promosi dan Pemasaran Film (PKS Markom) No. 04/HM.301/1/2020, No. 01/FILM-MKT/DFP/IBU/1/2020 tanggal 9 Januari 2020
 - Para Pihak melakukan pengakhiran Perjanjian yang dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerjasama No. 2158/PL.1021/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020
 - TWC melakukan Perjanjian Baru tentang Produksi Film Layar Lebar No. 124/PL.102/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Jo. Addendum Perjanjian tentang Produksi Film Layar Lebar No. 286/PL.102/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Produksi film sebagaimana dimaksud Perjanjian ini dibiayai oleh Para Pihak dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebesar Rp6.959.184 dengan rincian pembiayaan dalam bentuk modal untuk produksi film berdasarkan Perjanjian ini.

Dalam perjanjian tersebut disepakati porsi kepemilikan diantara kedua belah pihak selama 5 (lima) tahun pertama dan 50%-50% untuk tahun berikutnya.

47. Kontinjensi

PT Angkasa Pura I ("AP I")

a) Gugatan Paulus Wuwungan

AP I menerima gugatan perdata dari Paulus Wuwungan melalui Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Mei 2019 sehubungan dengan dua bidang tanah di Douna Sekolah, Manado dengan total luas tanah 33.500 m² dan nilai gugatan sebesar Rp10.000 per m² atau sebesar Rp335.000.000. Adapun sebagai tergugat lainnya adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Menteri BUMN Republik Indonesia.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- d) *Cooperation Agreement with PT Dapur Film Production regarding the Production of the Wide Screen Film "Ibu".*
- *TWC entered into an Agreement on Wide Screen Film Production (PKS Production) No. 03/PL.102/1/2019 dated January 24, 2019 along with Addendum to Agreement No.363/PL.102/XI/2019 dated November 28, 2019.*
 - *TWC entered into a New Agreement on Widescreen Film Production No. 124/PL.102/VIII/2020 dated August 19, 2020 Jo. Addendum to the Agreement on Widescreen Film Production No. 286/PL.102/XII/2020 on December 30, 2020.*
 - *The parties terminate the Agreement as outlined in the Minutes of Termination of the Cooperation Agreement No. 2158/PL.1021/VII/2020 dated July 22, 2020.*
 - *TWC entered into a New Agreement on Widescreen Film Production No. 124/PL.102/VIII/2020 dated August 19, 2020 Jo. Addendum to the Agreement on Widescreen Film Production No. 286/PL.102/XII/2020 on December 30, 2020.*

The film production as referred to in this Agreement is financed by the Parties with a Budget and Cost Plan (RAB) of Rp6,959,184 with details of financing in the form of capital for film production based on this Agreement.

In the agreement, the share of ownership between the two parties is agreed for the first 5 (five) years and 50%-50% for the following year.

47. Contingencies

PT Angkasa Pura I ("AP I")

a) Paulus Wuwungan's lawsuit

AP I received a civil lawsuit from Paulus Wuwungan through the Manado District Court on May 28, 2019 in connection with two parcels of land at Douna Sekolah, Manado with a total land area of 33,500 sqm and a claim value of Rp10,000 per sqm or Rp335,000,000. The other defendants are the Minister of Transportation of the Republic of Indo-nesia and the Minister of State-Owned Entities of the Republic of Indonesia.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 29 Juni 2020, gugatan dikabulkan dan AP I serta Menteri BUMN Republik Indonesia diharuskan melakukan pembayaran secara tanggung renteng ganti kerugian atas tanah sebesar Rp1.000 per m² atau sebesar Rp33.500.000.

b) Gugatan Maria Nellie Awuy

AP I menerima gugatan perdata dari Maria Nellie Awuy Sumakul melalui Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 November 2016 sehubungan dengan tanah seluas 26.880 m² yang terletak di Desa Mapanget Barat, Manado dengan nilai gugatan sebesar Rp64.123.200. Adapun sebagai tergugat lainnya adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan turut tergugat adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri BUMN Republik Indonesia.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 31 Juli 2018, sebagian gugatan dikabulkan dan AP I diharuskan melakukan pembayaran ganti kerugian atas tanah sebesar Rp17.203.200 dan uang paksa sebesar Rp1.000 per hari jika lalai melaksanakan putusan.

Pada tanggal 19 Oktober 2018, AP I mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Manado. Pada tanggal 17 Desember 2019, putusan Pengadilan Tinggi Manado menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 31 Juli 2018.

c) Gugatan Sylvana Yunita

AP I menerima gugatan perdata dari Sylvana Yunita sehubungan dengan sebidang tanah Pasini (Individual Bezit) seluas 19.300 m² yang terletak di tempat yang terdahulu bernama Koyawas, di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Dimembe, Minahasa (saat ini masuk wilayah Manado) dengan nilai gugatan sebesar Rp11.850.200.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Based on the decision of the Manado District Court dated June 29, 2020, the lawsuit was granted and AP I and the Minister of State-Owned Entities of the Republic of Indonesia are required to jointly pay compensation for land amounting to Rp1,000 per sqm or Rp33,500,000.

b) Maria Nellie Awuy's lawsuit

AP I received a civil lawsuit from Maria Nellie Awuy Sumakul through the Manado District Court on November 18, 2016 in connection with a land area of 26,880 sqm located in Mapanget Barat Village, Manado with a claim value of Rp64,123,200. The other defendants are the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia and also the co-defendants are the Minister of Finance of the Republic of Indonesia and the Minister of State-Owned Entities of the Republic of Indonesia.

Based on the decision of the Manado District Court dated July 31, 2018, part of the lawsuit was granted and AP I was required to pay compensation for land amounting to Rp17,203,200 and subject money of Rp1,000 per day if fail to implement the decision.

On October 19, 2018, AP I submitted an appeal to the Manado High Court. On December 17, 2019, the Manado High Court decision strengthened the Manado District Court decision on July 31, 2018.

c) Sylvana Yunita's lawsuit

AP I received a civil lawsuit from Sylvana Yunita for a piece of land Pasini (Individual Bezit) covering an area of 19,300 sqm which was located in a place previously called Koyawas, in Mangapet Barat Village, Dimembe sub-district, Minahasa (currently included in Manado area) with a claim value of Rp11,850,200.

Angkasa Pura II

a) AJB Bumiputera 1912 (“AJB”)

Pada tanggal 25 Juli 2018, AP II mengajukan permohonan ke Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) terhadap AJB Bumiputera 1912 (“AJB”) sebagaimana terdaftar dalam perkara nomor: 41072/VIII/ARV-BANI/2018. Permohonan tersebut diajukan sehubungan dengan kewajiban AJB dalam melakukan pembayaran atas manfaat pengelolaan dana Tunjangan Hari Tua (THT) kepada pegawai AP II.

Terhadap permohonan tersebut, pada tanggal 4 Februari 2019, BANI memberikan putusan antara lain sebagai berikut:

1. Menghukum AJB untuk membayar kewajiban kepada AP II atas klaim asuransi sebesar Rp30.469.
2. Menghukum dan memerintahkan AJB untuk mengganti kerugian AP II sebesar Rp104.298 yang harus menunjuk pengelola dana THT baru untuk menggantikan AJB.

Pada tanggal 28 Maret 2019, AJB mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan BANI kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Pada tanggal 6 Agustus 2019, PN Jaksel telah menolak Permohonan AJB tersebut. Pada tanggal 20 Agustus 2019, AJB mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan PN Jaksel kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengajukan memori permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2019. Berdasarkan nomor putusan kasasi nomor 98B/Pdt.Sus-Arb/2020 tanggal 29 Januari 2020, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut.

b) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (“AJS”)

Program imbalan pascakerja - THT AP II bagi karyawannya diantaranya dikelola oleh AJS dalam bentuk program asuransi kumpulan untuk 1.118 karyawan.

Pada tanggal 23 Desember 2020, AJS mengirimkan surat kepada AP II dimana AJS menyampaikan Penawaran Restrukturisasi Polis Asuransi Kumpulan. Kementerian BUMN sebagai pemegang saham AJS bekerjasama dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) telah merancang Rencana Penyehatan Keuangan Jiwasraya dengan cara:

Angkasa Pura II

a) AJB Bumiputera 1912 (“AJB”)

On July 25, 2018, the Company submitted an application to the Indonesian National Arbitration (“BANI”) against AJB Bumiputera 1912 (“AJB”) as registered in case number: 41072/VIII/ARV-BANI/2018. The application was submitted in relation with AJB’s obligation to provide benefit payment of retirement funds to the AP II’s employees.

In regard with the application, on February 4, 2019, BANI has made decision, among others, is as follows:

1. Convict AJB to paid its obligation to AP II for the insurance benefit claim of Rp30,469.
2. Convict and instruct AJB to compensate AP II loss of Rp104,298 which must appoint new retirement fund manager to replace AJB.

On March 28, 2019, AJB has submitted a revocation letter on the BANI’s Decision to the South Jakarta District Court. On August 6, 2019, the South Jakarta District Court rejected the AJB request. On August 20, 2019, AJB filed an appeal against the South Jakarta District Court’s decision to the Supreme Court of the Republic of Indonesia by submitting a memorandum of cassation on September 2, 2019. Based on cassation decision number 98B/Pdt.Sus-Arb/2020 dated January 29, 2020, the Supreme Court rejected that appeal request.

b) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (“AJS”)

One of AP II post employment benefits - THT is being managed by AJS in the form of collective insurance program for 1,118 employees.

On December 23, 2020, AJS send a letter to AP II, where AJS present The Restructurisation of Collective Insurance Policy Proposal. Ministry of State-owned Enterprises (SOE) as the shareholder of AJS cooperate with PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) had devised a Plan to Financially Restructure Jiwasraya, which is as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Restrukturisasi Polis Asuransi
2. Pendirian IFG Life dan Transfer Portofolio dari AJS ke IFG Life
3. Pemerintah akan melakukan *bail-in* berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada IFG sebagai holding asuransi dan penjaminan untuk kemudian IFG akan mendirikan IFG Life untuk menyelamatkan polis asuransi Jiwasraya.

Restrukturisasi polis asuransi dilakukan dengan menawarkan penghentian polis asuransi eksisting, dimana 95% dari Nilai Tunai menjadi saldo awal produk Pendanaan Hari Tua yang disebut JS PHT.

Pada tanggal 10 Maret 2021, AP II kembali menerima surat dari AJS terkait tindak lanjut penawaran restrukturisasi polis, dimana dalam surat tersebut AJS menyatakan bahwa nilai tunai program THT adalah sebesar Rp128.281.000.

Pada tanggal 26 Maret 2021, Kementerian Negara BUMN mengirimkan surat kepada BUMN-BUMN terkait dukungan restrukturisasi polis BUMN dan Afiliasi yang akan dilakukan oleh AJS. Dalam surat tersebut dihimbau kepada BUMN-BUMN yang memiliki polis di AJS untuk turut mendukung program tersebut.

Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, restrukturisasi polis tersebut masih dalam proses penyelesaian.

c) PT Angkasa Transportindo Selaras (“ATS”)

Pada tahun 2010, terdapat gugatan yang dilakukan oleh PT Angkasa Transportindo Selaras (“ATS”) kepada AP II dan Induk Koperasi Angkatan Udara (“INKOPAU”) sehubungan dengan pengelolaan lahan seluas 21 ha di Bandara Halim Perdanakusuma. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 492/PDT.G/2010, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 10/PDT/2012/PT/DKI dan Putusan Mahkamah Agung No. 688K/PDT/2013, AP II dan INKOPAU dinyatakan kalah.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. *Restructuring the Insurance Policy*
2. *Establishment of IFG Life and Transfer Portofolio from AJS to IFG Life*
3. *The Government will bail-in in the form of State Equity Participation (PMN) to IFG as the insurance holding and guarantor, where IFG will then establish IFG Life to bail insurance policy of Jiwasraya.*

The restructuring of insurance policy will be performed by offering the termination of the existing insurance policy, where 95% of cash value will be the beginning balance of Pendanaan Hari Tua product called JS PHT.

On March 10, 2021, AP II received letter from AJS in relation to the restructuring of insurance policy proposal's response, where in the letter, AJS stated that the cash value for the THT program is amounting to Rp128,281,000.

On March 26, 2021, Ministry of SOEs sent a letter to BUMNs to endorse the BUMN's and their Affiliations insurance policy restructuring done by AJS. In the letter, SOEs are appealed to own policy in AJS to support the program.

Up to the completion date of the consolidated financial statement, the insurance policy restructuring is still on process.

c) PT Angkasa Transportindo Selaras (“ATS”)

In 2010, there was claim made by PT Angkasa Transportindo Selaras (“ATS”) to AP II and Induk Koperasi Angkatan Udara (“INKOPAU”) relating to land operation of 21 ha in Halim Perdanakusuma Airport. Based on Decision No. 492/PDT.G/2010 of East Jakarta District Court, Decision No. 10/PDT/2012/PT/DKI of DKI Jakarta High Court and Decision No. 688K/PDT/2013 of Supreme Court, AP II and INKOPAU were declared in lost position.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 28 April 2015, AP II mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ("PK"). Pada tanggal 26 Juli 2016, AP II telah menerima Putusan Mahkamah Agung No. 527 PK/Pdt/2015 tanggal 11 Februari 2016, dimana permohonan PK AP II telah ditolak oleh Mahkamah Agung.

Sampai dengan penghentian operasi sementara Bandara Halim Perdanakusuma, AP II masih menguasai dan mengoperasikan seluruh bangunan dan fasilitas di atas lahan 21 ha tersebut.

Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, AP II sedang dalam tahap negosiasi dengan ATS terkait pemanfaatan aset AP II yang dibangun di atas lahan tersebut. Manajemen meyakini tidak terdapat penurunan nilai atas aset AP II yang dibangun di lahan tersebut.

d) PT Taurus Gemilang ("TG")

Pada tanggal 29 Juli 2020, PT Taurus Gemilang ("TG") mengajukan Gugatan kepada AP II atas Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura II di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 638/PDT.G/2020PN.TNG tanggal 2 Agustus 2021, AP II dinyatakan menang dan TG diminta untuk membayar ganti rugi sebesar Rp58.471. Pada tanggal 1 Oktober 2021, TG mengajukan banding atas keputusan Pengadilan tersebut. Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, belum ada hasil banding yang diinformasikan kepada AP II.

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN")

a) Perkara Perkara Perdata No. 363/PDT.G/2012/PN.JKT.UT atas objek tanah sesuai Sertifikat HGB No.4480 dan No.4481 di Kelapa Gading Jakarta Utara milik HIN sudah diputus pada tingkat kasasi, tetapi saat ini amar / salinan putusannya masih belum dikeluarkan. Perkara ini bermula dari rencana Dinas Bina Marga (PU) Propinsi DKI Jakarta akan memberikan ganti rugi atas tanah milik HIN yang terkena rencana jalan koridor busway. Pembayaran ganti rugi tersebut belum dapat dibayarkan karena obyek tanah tersebut masih dalam sengketa/perkara No.577/PDT/2009/PT.DKI tanggal 2 Agustus

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

On April 28, 2015, AP II submitted Judicial Review ("PK"). On July 26, 2016, AP II received Supreme Court Decision No. 527 PK/Pdt/2015 dated February 11, 2016, where the application for the PK of AP II was rejected.

Up until the temporary halt operations of Halim Perdanakusuma Airport, AP II still controls and operates all buildings and facilities on that 21 ha land.

Up to the completion date of these consolidated financial statement, AP II is in the negotiation stage with ATS regarding the utilization of AP II assets on the land. Management believes that there was no impairment on the Company's assets build on that land.

d) PT Taurus Gemilang ("TG")

On July 29, 2020, PT Taurus Gemilang ("TG") filed a lawsuit against AP II in regards with the Cooperation Agreement for the Utilization of Commercial Facilities of PT Angkasa Pura II at Terminal 3 Ultimate Soekarno-Hatta Airport. Based on the decision of the Tangerang District Court Number 638/PDT.G/2020PN.TNG dated August 2, 2021, AP II was declared victorious and TG was asked to pay compensation amounting to Rp58,471. On October 1, 2021, TG filed an appeal against the Court's decision. As of the completion date of these consolidated financial statements, no appeal has been informed to AP II.

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN")

a) Civil Case No. 363/PDT.G/2012/PN.JKT.UT regarding Land Objects According to HGB Certificates No.4480 and No.4481 in Kelapa Gading, North Jakarta, belonging to HIN have been decided at the cassation, but at this time the order/decision has not been issued. It starts from DKI Jakarta Provincial Toll Road (PU) plans to provide compensation for owned land HIN was affected by the planned busway corridor road. Compensation payment has not been received because the land object is still in dispute/case No. 577/PDT/2009/PT.DKI dated August 2, 2010, between HIN and the

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2010 antara HIN dengan Ahli waris Alm H. Hanafi. Oleh karena itu diajukan Permohonan Penetapan Konsinyasi atau penitipan ganti rugi di Pengadilan Negeri. Perkara ini sebenarnya telah selesai dengan adanya Putusan Kasasi No 1459 k/Pdt/2013 tanggal 26 Agustus 2016 karena objek konsinyasi adalah HGB No 4480 dan 4481, namun karena adanya Perkara No 588/Pdt.G/2015/PN.JKT.UT maka status hukum atas objek tanah sesuai SHGB No 4480 dan 4481 di Kelapa Gading masih sengketa.

Bahwa adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282K/Pdt/2015 tanggal 7 April 2015, yang menyatakan menghukum dan memerintahkan Tergugat VIII untuk membatalkan semua sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 4240/Kelapa Gading Timur berikut 7 (tujuh) sertifikat pemisahan/pemecahan dari HGB Nomor 4240 yaitu:

1. Sertifikat tanah HGB Nomor 4479/Kelapa Gading Timur.
2. Sertifikat tanah HGB Nomor 4543/Kelapa Gading Timur.
3. Sertifikat HGB Nomor 4544/ Kelapa Gading Timur.
4. Sertifikat HGB Nomor 4545/ Kelapa Gading Timur.
5. Sertifikat HGB Nomor 4546/ Kelapa Gading Timur.
6. Sertifikat HGB Nomor 4547/ Kelapa Gading Timur.
7. Sertifikat HGB Nomor 4548/Kelapa Gading Timur dan menghentikan perpanjangan atau perubahan atas sertifikat HGB tersebut di atas.

- b) Pada tanggal 17 Desember 2015, HIN (Tergugat I) menghadapi gugatan perdata dari ahli waris Alm. H. Hanafi bin H. Mursid, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor : 588/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR tanggal 17 Desember 2015 atas kepemilikan lahan yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan RW.05 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. HIN digugat atas dasar penguasaan lahan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4481 dengan luas 10.000 m² atas nama PT Hotel Indonesia Natour.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

heirs of the late H. Hanafi. Therefore handed over an application for Determination of Consignment or Compensation in the District Court. This matter has been equipped with the Decision of Cassation No. 1459 k/Pdt/2013 dated August 26, 2016, because the object of the deposit is HGB No. 4480 and 4481, but because of Case No.588/Pdt.G/2015/PN.JKT.UT, the legal status of the land object is SHGB No. 4480 and 4481 in Kelapa Gading is still a dispute.

That there was a decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 282K/PDT/2015 on April 7, 2015, which stated that he punished and ordered the Defendant VIII to cancel all Bangunan Guna Certificates (HGB) Number 4240/Kelapa Gading Timur following 7 (seven) separation certificates/solutions From HGB number 4240, namely:

1. Land certificate HGB Number 4479/East Kelapa Gading.
2. HGB land certificate Number 4543/East Kelapa Gading.
3. HGB certificate Number 4544/East Kelapa Gading.
4. HGB certificate Number 4545/East Kelapa Gading.
5. HGB certificate Number 4546/East Kelapa Gading.
6. HGB certificate Number 4547/East Kelapa Gading.
7. HGB certificate Number 4548/East Kelapa Gading and stop the extension or change on the HGB certificate above.

- b) On December 17, 2015, HIN (Defendant I) faced a civil lawsuit from the heirs of Alm. H. Hanafi bin H. Mursid, through the North Jakarta District Court with number: 588/Pdt.G/ 201/pn.jkt.UTR dated December 17, 2015, for land ownership located on. Pioneer Independence St RW.05 Kel. East Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading, North Jakarta. HIN was sued on the basis of land tenure with the Certificate of Building Use Rights No. 4481 with an area of 10,000 sqm on behalf of PT Hotel Indonesia Natour.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 588/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan para Penggugat. Berdasarkan putusan tersebut, HIN telah mengajukan upaya banding namun hasil putusan banding masih belum sesuai dengan harapan, untuk itu atas Putusan Banding PT Hotel Indonesia Natour telah mengajukan Akta Pernyataan Kasasi & Memori Kasasi.

Sampai saat ini masih berperkara di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan Penggugat ahli waris Alm. H. Hanafi dengan HIN sebagai salah satu tergugat. Adapun objek gugatan adalah tanah milik di Kelapa Gading sesuai Sertipikat HGB No 4481 yang tertulis atas nama PT Hotel Indonesia Natour. Salinan putusan No 151/PDT/2020/PT.DKI Jo. No. 588/PDT/G/2015/PN.JKT.UTR telah dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2020. Dan atas hal tsb HIN telah mengajukan Pernyataan Kasasi dan Permohonan Memori Kasasi tertanggal 23 Desember 2020; Pengajuan Permohonan Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2020.

- c) Berdasarkan Perkara Perdata antara HIN sebagai Penggugat, melawan PT Mahkota Mulia Mumpuni sebagai Tergugat atas perkara terkait Karaoke Crown di Unit Hotel Grand Inna Malioboro, dengan tuntutan Materil sebesar Rp649.723 dan bunga moratoir sebesar 6% x Rp649.723 setiap tahunnya sejak gugatan ini didaftarkan hingga Tergugat melunasi seluruh kerugian yang dialami Penggugat.

Based on a copy of the North Jakarta District Court Decision No. 588/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR, North Jakarta District Court granted Plaintiff's lawsuit. Based on the verdict, HIN has submitted an appeal effort but the results of the appeal verdict are still not in line with expectations, for that on the decision of the appeal of PT Hotel Indonesia Natour has submitted a Cassation & Cassation Statement Deed.

Until now, it is still lawful at the North Jakarta District Court, with the Plaintiff of the Almy Heirs. H. Hanafi with HIN as one of the Defendants. The lawsuit object island owned in Kelapa Gading according to the certificate of HGB No. 4481 written in the name of PT Hotel Indonesia Natour. Copies of Decision No. 151/PDT/2020/PT.DKI JO. No. 588/Pdt/g/2015/pn.jkt.UTR has been issued on December 15, 2020. And on the case of HIN has submitted a Cassation Statement and Cassation Memory Application dated December 23, 2020; Submission of a memory appeal on December 26, 2020.

- c) *Based on the Civil Case between HIN as the Plaintiff, against PT Mahkota Mulia Mumpuni as a Defendant for the case regarding Karaoke Crown in the Grand Inna Malioboro hotel unit, with material demands of Rp649,723 and Moratoir interest of 6% x Rp649,723 Every year since the lawsuit is registered until the Defendant pays off all the losses experienced by the Plaintiff.*

48. Manajemen Risiko Keuangan dan Modal

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Grup mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Grup.
- Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan Grup membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo.

48. Financial and Capital Risks Managements

a. Financial Risk Management Policy

In its operating, investing and financing activities, the Group is exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk. The Group define those risks as follows:

- *Credit risk is possibility that a customer will not pay the whole or part of a receivable or will not pay in timely manner and hence, the Group will incur loss.*
- *Liquidity risk is the risk of the Group's inability to pay its liabilities at maturity. Currently, the Group expects to pay all liabilities at due date.*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Grup telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Grup secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan berfokus untuk meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak buruk pada kinerja keuangan Grup. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Grup.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Dalam mengelola risiko likuiditas Grup selalu menjaga dan menyediakan jumlah kas dan setara kas dalam jumlah yang memadai. Manajemen juga melakukan perencanaan setiap bulan dan pemantauan yang ketat terhadap realisasi serta saldo kas secara rutin; dan
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten dan mengikuti praktik pasar terbaik.

i. Risiko Kredit

Risiko kredit Grup terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, aset keuangan tidak lancar lainnya dan uang jaminan. Grup mengelola risiko kredit terkait penempatan saldo rekening di bank hanya dengan menggunakan bank-bank yang memiliki reputasi dan predikat yang baik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank. Grup mengendalikan eksposur risiko kredit terkait dengan piutang dengan menetapkan kebijakan, dimana persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru dan kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Hal ini dikarenakan seluruh pendapatan usaha Grup dapat ditagihkan secara tepat waktu.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- *Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to changes in foreign currency exchange rates.*

To manage these risks effectively, the Group's Directors have approved several strategies for financial risk management, which are in line with the Group's overall objectives, a financial risk management program that focuses on minimizing potential losses that adversely affect the Group's financial performance. This guideline sets out the objectives and actions that must be taken in order to manage the financial risks faced by the Group.

The main guidelines for this policy are as follows:

- *In managing liquidity risk, the Group always maintains and provides adequate amounts of cash and cash equivalents. Management also conducts monthly planning and close monitoring of cash realization and balances on a regular basis; and*
- *All financial risk management activities are carried out prudently, consistently and in accordance with best market practices.*

i. Credit Risk

The Group's credit risk is inherent in cash and cash equivalents, trade receivables, other current financial assets, other non current financial assets and security deposits. The Group manages credit risk related to placement of bank account balances only in reputable banks and has good predicate to reduce the possibility of losses due to bank bankruptcy. The Group manages credit risk exposure related to trade receivables by implement policies whereby the approval or rejection of new credit contracts and compliance with these policies is monitored by the Board of Directors. As part of the process of approval or rejection, the customer's reputation and track record are taken into consideration. Currently, there are no significant credit risks. This is because of all the Group's revenues can be collected on time.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

At the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statements of financial position.

	2021 Rp	2020 Rp	
Kas dan Setara Kas	3,725,597,431	4,040,130,634	Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka Pendek	86,231,618	96,115,483	Short-Term Investment
Piutang Usaha			Trade Receivables
Pihak Berelasi	576,651,735	1,408,190,577	Related Parties
Pihak Ketiga	1,057,789,779	1,266,921,606	Third Parties
Piutang Lain-lain			Other Receivables
Pihak Berelasi	57,950,557	58,570,944	Related Parties
Pihak Ketiga	120,884,222	59,218,636	Third Parties
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	297,333,970	672,805,226	Accrued Revenues
Investasi Jangka Panjang	90,667,078	96,459,038	Long Term Investments
Total	6,013,106,390	7,698,412,144	Total

ii. Risiko Likuiditas

Pada saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Grup berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Selain itu, Grup memiliki kas dan setara kas (Catatan 5) yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

ii. Liquidity Risk

Currently, the Group expect able to pay all liabilities at due date. To fulfill commitments on cash, the Group Expect its operating activities to generate sufficient cash inflows. In addition, the Group has cash and cash equivalents (Note 5) which are sufficient to meet liquidity requirements.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

The following table analyzes financial liabilities measured at amortized cost based on their remaining maturity:

	2021			Total/ Total Rp	
	< 1 Tahun/ Year Rp	1-2 Tahun/ Years Rp	> 2 Tahun/ Years Rp		
Utang Usaha					Trade Payables
Pihak Berelasi	184,107,523	--	--	184,107,523	Related Parties
Pihak Ketiga	596,402,658	--	--	596,402,658	Third Parties
Utang Lain-lain					Other Payables
Pihak Berelasi	866,199,845	--	--	866,199,845	Related Parties
Pihak Ketiga	2,718,321,020	--	--	2,718,321,020	Third Parties
Beban Akrua					Accrued Expenses
Pihak Berelasi	1,329,666	--	--	1,329,666	Related Parties
Pihak Ketiga	3,000,712,890	--	--	3,000,712,890	Third Parties
Utang Bank Jangka Pendek	1,722,245,844	--	--	1,722,245,844	Short-Terms Bank Loans
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	1,463,087,314	27,734,542,753	7,603,248,000	36,800,878,067	Bank Loan and Other Financial Institutions
Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah	--	4,394,680,188	3,110,873,000	7,505,553,188	Bonds Payable and Sukuk Ijarah
Surat Utang Jangka Menengah	--	--	--	--	Medium Term Notes
Liabilitas Sewa	91,080,336	153,488,288	372,040,000	616,608,624	Lease Liabilities
Utang Jangka Panjang Lainnya	--	432,202,588	27,665,000	459,867,588	Other Long-Term Liabilities
Total	10,643,487,096	32,714,913,817	11,113,826,000	54,472,226,913	Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2020			Total/ Total Rp	
	< 1 Tahun/ Year Rp	1-2 Tahun/ Years Rp	> 2 Tahun/ Years Rp		
Utang Usaha					
Pihak Berelasi	86,026,246	--	--	86,026,246	Trade Payables Related Parties
Pihak Ketiga	574,746,766	--	--	574,746,766	Third Parties
Utang Lain-lain					
Pihak Berelasi	777,952,157	--	--	777,952,157	Other Payables Related Parties
Pihak Ketiga	3,552,947,057	--	--	3,552,947,057	Third Parties
Beban Akrual					Accrued Expenses
Pihak Berelasi	1,196,959	--	--	1,196,959	Related Parties
Pihak Ketiga	2,693,754,819	--	--	2,693,754,819	Third Parties
Utang Bank dan Lembaga					Short-Terms Bank and Other Financial Institutions Loans
Keuangan Lainnya - Jangka Pende	656,946,836	--	--	656,946,836	
Utang Bank dan	--	--	--	--	Bank Loan and
Lembaga Keuangan Lainnya	511,104,533	22,302,967,856	9,577,599,000	32,391,671,389	Other Financial Institutions
Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah	2,090,000,000	2,788,092,132	3,113,155,000	7,991,247,132	Bonds Payable and Sukuk Ijarah
Surat Utang Jangka Menengah	50,000,000	45,000,000	--	95,000,000	Medium Term Notes
Liabilitas Sewa	180,061,176	519,581,213	402,305,000	1,101,947,389	Lease Liabilities
Utang Jangka Panjang Lainnya	--	384,446,420	17,194,000	401,640,420	Other Long-Term Liabilities
Total	11,174,736,549	26,040,087,621	13,110,253,000	50,325,077,170	Total

iii. Risiko Mata Uang

Grup secara signifikan terekspos risiko mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) karena sebagian besar pembelian material dalam mata uang USD. Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Grup mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan melakukan pengawasan secara periodik terhadap pergerakan nilai tukar mata uang asing sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran Rupiah terhadap mata uang asing dengan asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan.

	2021 Rp	2020 Rp	
Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak Penghasilan			Impact on Profit Before Income Tax
Perubahan Tingkat Pertukaran Terhadap Rupiah (1%)	1,849,424	307,701	Change in exchange rate against Rupiah (1%)
Perubahan Tingkat Pertukaran Terhadap Rupiah (-1%)	(1,849,424)	(307,701)	Change in exchange rate against Rupiah (-1%)

iv. Risiko Suku Bunga

Grup terekspos risiko suku bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan. Untuk meminimalkan risiko tingkat suku bunga, Grup mengelola beban bunga dengan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Grup.

iii. Currency Risk

The Group is significantly exposed to currency risk in United States Dollars (USD) due to the majority of material purchases denominated in USD. There was no currency hedging activity as of December 31, 2021 and 2020.

The Group manages its exposure to foreign currencies by periodically monitoring movements in foreign currency exchange rates so that it can take necessary actions.

The following table shows the sensitivity of possible changes in the exchange rate of Rupiah against foreign currencies with other variable assumptions, the impact on profit before tax expense.

iv. Interest Rate Risk

The Groups is exposed to interest rate risk primarily related to financial liabilities. To minimize interest rate risk, the Group manages interest expense by monitoring the impact of interest rate movements to minimize the negative impact on the Group.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan jenis bunga:

The following table analyse the breakdown of financial liabilities by type of Interest:

	2021 Rp	2020 Rp	
Bunga Mengambang	38,523,123,911	33,048,618,225	Floating Rate
Bunga Tetap	8,122,161,812	9,188,194,521	Fixed Rate
Tanpa Bunga	7,826,941,190	8,088,264,424	Without Rate
Total	54,472,226,913	50,325,077,170	Total

b. Estimasi Nilai Wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

b. Fair Value Measurements

The table below illustrates the carrying values and fair values of financial assets and liabilities:

	2021		2020		
	Nilai tercatat/ Carrying value Rp	Nilai wajar/ Fair value Rp	Nilai tercatat/ Carrying value Rp	Nilai wajar/ Fair value Rp	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas dan Setara Kas	3,725,597,431	3,725,597,431	4,040,130,634	4,040,130,634	Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka Pendek	86,231,618	86,231,618	96,115,483	96,115,483	Short-Term Investment
Piutang Usaha					Trade Receivables
Pihak Berelasi	576,651,735	576,651,735	1,408,190,577	1,408,190,577	Related Parties
Pihak Ketiga	1,057,789,779	1,057,789,779	1,266,921,606	1,266,921,606	Third Parties
Piutang Lain-lain					Other Receivables
Pihak Berelasi	20,185,129	20,185,129	11,250,625	11,250,625	Related Parties
Pihak Ketiga	86,493,036	86,493,036	80,135,460	80,135,460	Third Parties
Investasi Jangka Panjang	90,667,078	90,667,078	96,459,038	96,459,038	Long Term Investments
Total	5,643,615,806	5,643,615,806	6,999,203,423	6,999,203,423	Total

	2021		2020		
	Nilai tercatat/ Carrying value Rp	Nilai wajar/ Fair value Rp	Nilai tercatat/ Carrying value Rp	Nilai wajar/ Fair value Rp	
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang Usaha					Trade Payables
Pihak Berelasi	184,107,523	184,107,523	86,026,246	86,026,246	Related Parties
Pihak Ketiga	596,402,658	596,402,658	574,746,766	574,746,766	Third Parties
Utang Lain-lain					Other Payables
Pihak Berelasi	866,199,845	866,199,845	777,952,157	777,952,157	Related Parties
Pihak Ketiga	2,718,321,020	2,718,321,020	3,552,947,057	3,552,947,057	Third Parties
Beban Akrual					Accrued Expenses
Pihak Berelasi	1,329,666	1,329,666	1,196,959	1,196,959	Related Parties
Pihak Ketiga	3,000,712,890	3,000,712,890	2,693,754,819	2,693,754,819	Third Parties
Utang Bank dan Lembaga					Short-Term Bank and Other Financial Institutions Loans
Keuangan Lainnya - Jangka Pendek	1,722,245,844	1,722,245,844	656,946,836	656,946,836	Bank Loan and Other Financial Institutions
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	36,800,878,067	36,800,878,067	32,391,671,389	32,391,671,389	Bonds Payable and Sukuk Ijarah
Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah	7,505,553,188	7,505,553,188	7,991,247,132	7,991,247,132	Medium Term Notes
Surat Utang Jangka Menengah	--	--	95,000,000	95,000,000	Lease Liabilities
Liabilitas Sewa	616,608,624	616,608,624	1,101,947,389	1,101,947,389	Other Long-Term Liabilities
Utang Jangka Panjang Lainnya	459,867,588	459,867,588	401,640,420	401,640,420	
Total	54,472,226,913	54,472,226,913	50,325,077,170	50,325,077,170	Total

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Fair values of the most financial assets and liabilities approximate their carrying values because the effect of discounting is not significant.

Estimasi nilai wajar bersifat judgmental dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

Fair value estimation is judgmental and involving various boundaries, including:

- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.

- Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/ penghentian aset dan liabilitas keuangan.
- Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

c. Manajemen Permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal, Grup mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah utang.

c. Capital Management

The Group's objective when managing capital is to protect the Group's ability to maintain business continuity, so the entity can provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to manage an optimal capital structure to minimize the cost of capital effectively. In order to manage the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends, issue new shares or increase / decrease the amount of debt.

49. Transaksi Non-Kas

Transaksi Non Kas

Informasi pendukung laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas arus kas adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Penambahan Aset Tetap		
Melalui Kapitalisasi Biaya Pinjaman	266,435,989	569,104,998
Penambahan Aset Tetap		
Melalui Utang	165,784,935	7,767,739
Penambahan Entitas Asosiasi		
Melalui Imbreng	1,755,999,882	--
Penambahan Modal Saham		
Melalui Imbreng Investasi Entitas Anak	65,151,366,785	--

49. Non-Cash Transactions

Non Cash Transaction

Supporting information for the statement of cash flows in connection with cash flow activities is as follows:

	2021 Rp	2020 Rp
Penambahan Aset Tetap		
Melalui Kapitalisasi Biaya Pinjaman	266,435,989	569,104,998
Penambahan Aset Tetap		
Melalui Utang	165,784,935	7,767,739
Penambahan Entitas Asosiasi		
Melalui Imbreng	1,755,999,882	--
Penambahan Modal Saham		
Melalui Imbreng Investasi Entitas Anak	65,151,366,785	--

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas
Pendanaan

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan kasnya. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

Reconciliation of Liabilities Arising from
Financing Activities

The table below detail changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	Non Kas/ Non Cash				31 December 2021/ December 31, 2021 Rp	
	1 Januari 2021/ January 1, 2021 Rp	Arus kas/ Cash Flow Rp	Salisih kurs/ Foreign Exchange Difference Rp	Lainnya/ Other Rp		
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya - Jangka Pendek	656,946,836	1,402,991,008	--	337,692,000	1,722,245,844	Short-Term Bank and Other Financial Institutions Loans
Utang Bank Jangka Panjang dan Lembaga Keuangan Lainnya	32,391,671,389	4,417,006,678	--	7,800,000	36,800,878,067	Long-Term Bank and Other Financial Institutions Loans
Obligasi dan Sukuk Ijarah	7,991,247,132	(478,100,000)	--	(7,593,944)	7,505,553,188	Bonds Payable and Sukuk Ijarah
Liabilitas Sewa	1,101,947,389	(151,356,132)	--	(333,982,633)	616,608,624	Lease Liabilities
Total	42,141,812,746	5,190,541,554	--	3,915,423	46,645,285,723	Total

	Non Kas/ Non Cash				31 December 2020/ December 31, 2020 Rp	
	1 Januari 2020/ January 1, 2020 Rp	Arus kas/ Cash Flow Rp	Salisih kurs/ Foreign Exchange Difference Rp	Lainnya/ Other Rp		
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya - Jangka Pendek	157,908,170	499,038,666	--	--	656,946,836	Short-Term Bank and Other Financial Institutions Loans
Utang Bank Jangka Panjang dan Lembaga Keuangan Lainnya	28,764,104,119	3,633,773,628	--	6,206,358	32,391,671,389	Long-Term Bank and Other Financial Institutions Loans
Obligasi dan Sukuk Ijarah	5,734,753,938	2,261,792,389	--	5,299,195	7,991,247,132	Bonds Payable and Sukuk Ijarah
Liabilitas Sewa	1,180,841,225	(134,862,836)	--	55,969,000	1,101,947,389	Lease Liabilities
Total	35,837,607,452	6,259,741,848	--	67,474,554	42,141,812,746	Total

50. Peristiwa Penting Lainnya

Dampak Covid-19 di Indonesia yang terus menyebar dan bermutasi dengan varian baru yang cukup mengkhawatirkan semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, usaha kecil dan menengah merasakan dampaknya. Penambahan angka orang terinfeksi positif COVID-19 di Indonesia menjadi salah satu acuan kebijakan pemerintah termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berdampak pada penurunan kinerja industri penerbangan terutama *airlines airport* serta sektor pariwisata.

Sampai dengan saat ini, pemerintah gencar menggalakkan Vaksinasi dosis ke 2 maupun *Booster* untuk meningkatkan imun masyarakat. Percepatan program vaksinasi dan *booster* ini diharapkan dapat meningkatkan *confidence level* masyarakat untuk berwisata dan pemulihan ekonomi. Disamping itu, dengan dukungan Pemerintah terhadap pemulihan

50. Other Significant Event

The impact of Covid-19 in Indonesia, which continues to spread and mutate with new variants, is quite worrying for all parties, including the government, the private sector, small and medium-sized businesses. The addition of the number of positive COVID-19 infected people in Indonesia is one of the government's policy references, including the Implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM), which has an impact on the decline in the performance of the aviation industry, especially airport airlines and the tourism sector.

Up to this point, the government is aggressively promoting the 2nd dose of vaccination and booster to increase people's immunity. The acceleration of the vaccination and booster program is expected to increase the public's confidence level for travel and economic recovery. In addition, with the Government's support for the recovery of the national tourism

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

industri pariwisata nasional, Grup sedang mengkaji beberapa program pengembangan destinasi pariwisata baru antara lain Tanamori, Kota Tua serta mengadakan event-event Nasional dan Internasional untuk menggairahkan industri pariwisata antara lain penyelenggaraan Moto GP di Mandalika-Lombok, WSBK di Mandalika-Lombok, *Music Concert* di Prambanan-Yogyakarta dan lainnya.

Dalam melaksanakan perannya sebagai Induk Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1991 yang mengatur mengenai kegiatan utama Perseroan telah dirubah dengan adanya PP Nomor 72 Tahun 2021 yang mengatur kegiatan usaha utama perusahaan selaku Induk *Holding* yaitu sebagai berikut:

- a. Aktivitas perusahaan *Holding*, termasuk mendirikan atau turut serta dalam badan lain;
- b. Aktivitas kantor pusat;
- c. Investasi langsung atau tidak langsung;
- d. Aktivitas restrukturisasi perusahaan/aset;
- e. Aktivitas konsultasi manajemen.

Pembentukan *Holding* BUMN Pariwisata dan Pendukung ini salah satunya untuk membantu proses pemulihan sektor pariwisata dan pendukung yang terdampak akibat pandemi COVID-19.

Grup mempunyai rencana bisnis antara lain:

- a. Pengembangan Bandara Hang Nadim Batam oleh PT Angkasa Pura I sebagai hub kargo internasional dilakukan dengan upaya menarik trafik kargo dari Amerika dan Eropa agar dapat transit di Batam untuk kemudian melanjutkan penerbangan ke Australia.
- b. Melalui anak perusahaan yaitu PT Angkasa Pura II telah menjalankan *strategic partnership* yaitu *KNO Airport partnership* dalam tahap persiapan Dialog Optimalisasi, *Cargo Village Partnership* yang sedang dalam tahap *Feasibility Study* dan proses *Transaction Structure Development* dan yang ketiga adalah *CGK Airport Partnership* yang sedang dalam proses pengajuan anggaran ke Kementerian BUMN. Struktur kerjasama ketiganya adalah *JVCo /Master Concessionare*.
- c. Melalui anak perusahaan yaitu PT Hotel Indonesia Natour akan melakukan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan Sanur.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

industry, the Group is reviewing several new tourism destination development programs, including Tanamori, Kota Tua and holding National and International events to stimulate the tourism industry, including the implementation of the Moto GP in Mandalika-Lombok, WSBK in Mandalika-Lombok, Music Concert in Prambanan-Yogyakarta and others.

In carrying out its role as Holding Holding for Tourism and Supporting SOEs, Government Regulation no. 48 of 1991 which regulates the main activities of the Company has been amended by the existence of PP Number 72 of 2021 which regulates the main business activities of the company as the Holding Parent, namely as follows:

- a. Holding company activities, including establishing or participating in other entities;*
- b. Head office activities;*
- c. Direct or indirect investment;*
- d. Company/asset restructuring activities;*
- e. Management consulting activities.*

The establishment of the Tourism and Supporting SOEs Holding is one of which is to assist the recovery process of the tourism and supporting sectors affected by the COVID-19 pandemic.

The Group has business plans including:

- a. The development of Batam's Hang Nadim Airport by PT Angkasa Pura I as an international cargo hub is carried out with an effort to attract cargo traffic from America and Europe so that they can transit in Batam and then continue flights to Australia.*
- b. Through its subsidiary, PT Angkasa Pura II, it has carried out a strategic partnership, namely the KNO Airport partnership in the preparation stage for the Optimization Dialogue, the Cargo Village Partnership which is in the Feasibility Study and Transaction Structure Development process and the third is the CGK Airport Partnership which is in the process of submitting a budget to Ministry of SOEs. The structure of the cooperation of the three is JVCo / Master Concessionare.*
- c. Through its subsidiary, PT Hotel Indonesia Natour will manage the Special Health Economic Zone-Sanur.*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- d. Melalui anak perusahaan yaitu PT Sarinah sedang mengkaji soft launching toko Sarinah Thamrin, melakukan rekrutmen *entry level*, mengimplementasi ERP serta melakukan finalisasi struktur organisasi baru. Sarinah juga akan melakukan pengembangan bisnis Ritel untuk memperkuat *stream* pendapatan usaha.
- e. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko mengajukan pendanaan eksternal (bank/non-bank) untuk pembiayaan investasi prioritas dan modal kerja. Di Tahun 2022, TWC juga mulai melakukan pengelolaan TMII sebagai penugasan dari Negara.
- f. Pengembangan *cargo service* melalui pembentukan sub *cluster cargo* dan Sub *Cluster Airlines* di dalam *holding* yang berperan sebagai penyedia jasa airlines untuk menunjang penerbangan pada sektor pariwisata.

Manajemen berkeyakinan bahwa rencana-rencana bisnis di atas dapat diterapkan secara efektif, yang diharapkan anak Grup *holding* mempunyai kinerja yang baik dan dapat membukukan keuntungan yang pada akhirnya *holding* juga memperoleh manfaat berupa dividen.

51. Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Keuangan

Hotel Indonesia Natour (“HIN”)

Berdasarkan Akta Notaris No. 004 tanggal 11 Januari 2022 dari Yanis Delarosa Putra, SH., M.Kn., Notaris di Kota Bogor yang telah memperoleh persetujuan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU-0006971.AH.01.02. Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Hotel Indonesia Natour, menyetujui perubahan nama Perseroan dari HIN Perseroan (Persero) PT Hotel Indonesia menjadi PT Hotel Indonesia Natour, menyetujui perubahan struktur pemegang saham dengan cara pengalihan seluruh saham seri B Negara Republik Indonesia kepada dan dalam rangka penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada PT Aviasi Pariwisata Indonesia yakni sebanyak 101.699 dengan nominal Rp101.699.000 dan menyetujui perubahan struktur pemegang saham meliputi pemenuhan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan sejumlah Rp101.700.000.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- d. Through its subsidiary, PT Sarinah, it is reviewing the soft launching of the Sarinah Thamrin store, conducting entry-level recruitment, implementing ERP and finalizing a new organizational structure. Sarinah will also develop Retail business to strengthen business revenue streams.
- e. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko applied for external funding (bank/non-bank) to finance priority investments and working capital. In 2022, TWC will also start managing TMII as an assignment from the State.
- f. Development of cargo services through the formation of cargo sub-clusters and Airlines Sub-Clusters within the Holding which acts as a provider of airlines services to support flights in the tourism sector.

Management believes that the above business plans can be implemented effectively, which is expected by the subsidiaries of the holding group to have good performance and be able to record profits which in the end the holding will also benefit in the form of dividends.

51. Events After Reporting Period

Hotel Indonesia Natour (“HIN”)

Based on Notarial Deed No. 004 dated January 11, 2022 from Yanis Delarosa Putra, SH., M.Kn., Notary in Bogor City which has been approved and ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0006971.AH .01.02. 2022 concerning Amendment to the Articles of Association of PT Hotel Indonesia Natour, approved the change in the name of the Company from HIN Company (Persero) PT Hotel Indonesia to PT Hotel Indonesia Natour, approved the change in shareholder structure by transferring all series B shares of the Republic of Indonesia to and in the context of increasing the capital investment of the Republic of Indonesia in PT Aviasi Pariwisata Indonesia which is as much as 101,699 with a nominal value of Rp101,699,000 and approving changes to the shareholder structure covering the fulfillment of the Company's total issued and paid-up capital amounting to Rp101,700,000.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")**

Perubahan anggaran dasar PT TWC telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 6 tanggal 11 Januari 2022 oleh Notaris Ir. Edwin Rusdi, SH., M.Kn, M. Hum, Notaris di Bantul tentang perubahan nama PT TWC, perubahan struktur pemegang saham, perubahan ketentuan hak istimewa pemegang saham seri A Dwiwarna, perubahan ketentuan kewenangan Direksi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dan perubahan beberapa pasal tertentu dalam anggaran dasar (Catatan 1.a) yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2022 oleh Notaris Ir. Edwin Rusdi, SH., M.Kn, M. Hum, Notaris di Bantul dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0014673.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 dan telah diterbitkan dalam Berita Negara No. 018 tambahan Berita Negara RI No. 007968 tanggal 4 Maret 2022.

PT Angkasa Pura II ("AP II")

a. Pemberhentian Operasi Bandara Halim Perdanakusuma

Pada tanggal 19 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma yang menghentikan sementara seluruh kegiatan operasional pangkalan udara dan bandar udara.

Berdasarkan PERPRES tersebut, AP II juga diminta untuk:

- Memindahkan seluruh kegiatan penerbangan kenegaraan ke Bandar Udara Soekarno-Hatta.
- Pemindahan kegiatan penerbangan niaga, *general aviation*, dan sekolah penerbangan sipil ke Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Kertajati, Bandar Udara Hussein Sastranegara, Bandar Udara Pondok Cabe, atau Bandara Udara Budiarto Curug.

AP II meyakini bahwa penghentian operasi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap operasi AP II secara keseluruhan.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")**

The changes of articles association of PT TWC are contained in the Deed of Decision of the General Meeting of Shareholders No. 6 dated January 11, 2022 by Notary Ir. Edwin Rusdi, SH., M.Kn, M. Hum, Notary in Bantul of the changes of PT TWC's name, change in the structure of PT TWC's shareholders, changes to the conditions on the privileges of the Dwiwarna Class A Shareholders, changes to provision regarding the authority of the Board of Directors of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) and changes of certain articles in articles of association (Note 1.a) which was reaffirmed in Deed No. 1 dated March 1, 2022 by Notary Ir. Edwin Rusdi, SH., M.Kn, M. Hum, Notary in Bantul and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0014673.AH.01.02.The year 2022 is dated March 1, 2022 and has been published in the State Gazette No. 018 additional State Gazette of the Republic of Indonesia No. 007968 March 4, 2022

PT Angkasa Pura II ("AP II")

a. Stop Operation of Halim Perdanakusuma Airports

On January 19, 2022, Government of Republic of Indonesia issued presidential decree (PERPRES) Number 9 Year 2022 regarding Revatiliziation of Indonesian National Airforce's Airbase/Halim Perdanakusuma Airport that will halt all operational activity for both Airbase and Airport.

Based on PERPRES, the Company is asked to:

- Transfer of all state flight activities to Soekarno-Hatta Airport.
- Transfer of all commercial, general aviation, and civil aviation school flight activities to Soekarno-Hatta Airport, Kertajati Airport, Hussein Sastranegara Airport, Pondok Cabe Airport, or Budiarto Curug Airport.

The Company believes that the halt operations will not have a significant impact on the Company's overall operations.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**b. Perubahan Kepemilikan Saham
PT Angkasa Pura Aviassi (“APA”)**

Pada tanggal 11 Maret 2022, GMR Airports Netherlands B.V. membeli saham APA sebanyak 173.665 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham setelah APA kembali melakukan peningkatan modal dasar dari 723.012 lembar saham menjadi 1.417.672 lembar saham. Hal ini telah dinyatakan dalam Akta Notaris No 18 oleh Aryadi, SH., Mkn, Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui surat No.AHU-0019386.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 17 Maret 2022.

AP II dan GMR Airports Netherlands B.V telah membayar peningkatan modal saham tersebut masing masing pada tanggal 7 Maret 2022 dan 22 Februari 2022.

52. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amendemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2021.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 April 2021 yaitu:

- Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021.

Amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**b. Changes in Shares Ownership of
PT Angkasa Pura Aviassi (“APA”)**

On March 11, 2022, GMR Airports Netherlands B.V. purchased 173,665 of APA shares with a par value of Rp1,000,000 (full amount) per share after APA increased its authorized capital from 723,012 shares to 1,417,672 shares. This has been stated in the Notary Deed No. 18 by Aryadi, SH., Mkn, Notary in Tangerang and has been ratified by the Ministry of Law and Human Rights through letter No.AHU-0019386.AH.01.02 TAHUN 2022 dated March 17, 2022.

The Company and GMR Airports Netherlands B.V have paid for the increase in share capital on March 7, 2022 and February 22, 2022, respectively.

52. New Accounting Standard and Interpretation of Standard which Has Issued but Not Yet Effective

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2021.

Amendments to the standard that are effective for periods beginning on or after April 1, 2021 are:

- PSAK 73: Leases regarding Covid-19-related Rent Concessions Beyond 30 June 2021.

Amendment and improvement to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks;
- Amendments PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Onerous Contracts – Cost of Fulfilling the Contracts;
- Amendments PSAK 16: Property, Plant and Equipment regarding Proceeds before Intended Use;
- PSAK 69 (Annual Improvement 2020): Agriculture;

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi; dan
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

53. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung-jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian yang berakhir 31 Desember 2021 untuk diterbitkan pada tanggal 14 April 2022.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- PSAK 71 (Annual Improvement 2020): Financial Instruments; and
- PSAK 73 (Annual Improvement 2020): Leases.

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as a Current or Non Current;
- Amendments PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates; and
- Amendments PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 74: Insurance Contract; and
- Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 – Comparative Information.

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

53. Responsibility for Consolidated Financial Statements

The Company's management is responsible for the preparation of consolidated financial statements and has approved the consolidated financial statements ended December 31, 2021 to be published on April 14, 2022.